Perkebunan Nusantara

BUMN UNTUK INDONESIA

Perkebunan Nusantara

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2023



Kantor Pusat | Head Office:
Gedung Agro Plaza Lt.15,
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1,
Setia Budi, Jakarta Selatan 12950
Telephone : (+62-21) 29183300
Fax : (+62-21) 5203030

Pindai *barcode* ini untuk akses langsung ke *website* kami
Scan this barcode for direct access to our website

Pertumbuhan Transformasional melalui *Integrasi Strategis*

Transformational Growth through Strategic Integration



SANGGAHAN DAN BATAS TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

This Annual Report contains statements on financial conditions, operational results, projections, plans, strategies, policies, and the Company's objectives, which are categorized as forward-looking statements under applicable laws, except for historical matters. These statements entail risks and uncertainties and may result in actual developments differing materially from those reported.

Laporan Tahunan 2023 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) disusun dan diterbitkan berdasarkan Surat Edaran OJK No.16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, karena hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Perusahaan

The 2023 Annual Report of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is prepared and published based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies. Forward-looking statements in the Annual Report are made based on various assumptions regarding the current and future conditions of the Company and the business environment in which it operates. The statements in this Annual Report are not guarantees of future performance, as actual future results may differ due to several factors beyond the Company's control.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang menjalankan bisnis utamanya di bidang Industri perkebunan.

The term "Company" in this annual report refers to PT Perkebunan Nusantara III (Persero), primarily operating in the plantation industry.

PENJELASAN TEMA 2023
EXPLANATION OF THE 2023 THEME



PERTUMBUHAN TRANSFORMASIONAL MELALUI INTEGRASI STRATEGIS

TRANSFORMATIONAL GROWTH THROUGH STRATEGIC INTEGRATION

2023

Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mengusung tema yang menyoroti komitmen kami dalam menciptakan solusi inovatif sebagai langkah strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif. Hal ini melibatkan Integrasi aspek perkebunan, teknologi, dan keberlanjutan, dengan fokus pada efisiensi operasional, peningkatan kualitas hasil produksi, serta dampak positif terhadap lingkungan. Salah satu langkah konkret kami adalah melalui integrasi Holding Perkebunan Nusantara menjadi tiga *subholding* yakni PTPN I, PTPN IV, dan PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN). Integrasi ini memperkuat posisi perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya lahan, sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan digitalisasi yang unggul.

Integrasi PTPN Group telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan nama Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Dengan adanya restrukturisasi organisasi ini sebagai proyek strategis nasional, maka tema "Pertumbuhan Transformasional melalui Integrasi Strategis" menjadi tema yang paling mewakili situasi dan kondisi Perseroan di tahun 2023.

The Annual Report of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) embraces a theme that underscores our commitment to creating innovative solutions as a strategic measure to achieve competitive excellence. This involves integrating aspects of plantation management, technology, and sustainability, focusing on operational efficiency, improving production quality, and making a positive environmental impact. One concrete step we have taken is the integration of Holding Perkebunan Nusantara into three subholdings: PTPN I, PTPN IV, and PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN). This integration strengthens the company's position by leveraging land resources, human resources, technological innovation, and superior digitalization.

The integration of the PTPN Group has been designated as a National Strategic Project under the National Sugar Industry Revitalization and Palm Oil Industry Downstream Program, based on Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number 8 of 2023, which amends Regulation Number 7 of 2021 regarding Changes to the List of National Strategic Projects.

With this organizational restructuring as a national strategic project, the theme "Transformational Growth Through Strategic Integration" aptly represents the company's situation and conditions in 2023.

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY



2022

Continue To Grow Towards A Sustainable Business

Iklim Usaha di sepanjang tahun 2022 masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, mulai dari dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa hingga perang Rusia-Ukraina yang berkelanjutan. Namun, kondisi tersebut tak menyurutkan semangat *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) untuk senantiasa memberikan kinerja yang unggul. Tahun 2022 menjadi momentum bagi Perusahaan untuk menerapkan lima strategi akselerasi kinerja usaha dengan nilai-nilai AKHLAK sebagai *core value* BUMN. Kelima strategi tersebut yakni optimalisasi portofolio dan *operational excellences*, *commercial excellences* dan ekspansi hilir, optimalisasi aset dan kemitraan strategis, pengembangan kapabilitas dan budaya, serta peningkatan sistem dan teknologi.

Melalui sinergi yang kuat dari semua lini, Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan terobosan-terobosan baru dalam rangka menjawab tantangan zaman dalam menggapai kinerja bisnis yang berkelanjutan. Fase ini sekaligus momentum bagi Perusahaan untuk bangkit lebih agresif dan siap menghadapi dinamika perubahan bisnis maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat.

Throughout 2022, the business climate faced various challenges, from the lingering effects of the COVID-19 pandemic to the ongoing Russia-Ukraine war. However, these conditions did not dampen the spirit of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) in consistently delivering superior performance. The year 2022 became a momentum for the Company to implement five business performance acceleration strategies with AKHLAK values as the core values of SOEs. These five strategies include portfolio optimization and operational excellence, commercial and downstream expansion, asset optimization and strategic partnerships, capability and culture development, and system and technology enhancement.

Through strong synergy across all lines, the Company is committed to introducing breakthroughs to address contemporary challenges and achieve sustainable business performance. This phase also serves as a momentum for the Company to rise more aggressively and be ready to face the dynamic changes in business and rapid developments in science and technology.





2021

Unlocking New Opportunities, Growing Toward Possibilities

Tahun 2021 iklim usaha Perusahaan masih dihadapkan oleh tantangan global atas masih merebaknya pandemi COVID-19. Dalam rangka menjaga produktivitas di tengah pandemi, *Holding* Perkebunan Nusantara terus melakukan pembenahan di sektor kerja Perusahaan. Adanya pandemi COVID-19 bukan menjadi halangan bagi Perusahaan untuk beroperasi. *Holding* tetap giat menjalankan usahanya, merancang beberapa langkah jangka pendek maupun jangka panjang dengan memanfaatkan peluang-peluang baru demi kinerja optimal masa depan secara berkelanjutan.

In 2021, the Company's business climate was still confronted by global challenges due to the ongoing COVID-19 pandemic. To maintain productivity amidst the pandemic, Holding Perkebunan Nusantara continued to make improvements in the Company's work sectors. The COVID-19 pandemic did not become an obstacle for the Company to operate. Holding remained active in conducting its business, designing several short-term and long-term steps by leveraging new opportunities for sustainable, optimal future performance.

2020

Performing Beyond Boundaries

Di tengah ketidakpastian dan tantangan yang menghantam iklim usaha nasional dan internasional pada tahun 2020, baik dari sisi finansial maupun kondisi situasional lain, *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tetap mampu menunjukkan kinerja yang baik dan produktif. Merebaknya pandemi COVID-19, yang telah melumpuhkan banyak bisnis di penjuru dunia termasuk Indonesia, tidak menghentikan langkah *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) untuk terus berkontribusi bagi bisnis perkebunan di Indonesia

Amid the uncertainty and challenges impacting the national and international business climate in 2020, both financially and in other situational conditions, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) could still demonstrate good and productive performance. The outbreak of the COVID-19 pandemic, which crippled many businesses worldwide, including in Indonesia, did not stop Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) from continuing to contribute to the plantation business in Indonesia.

TRANSFORMASI BUMN
SOEs TRANSFORMATION

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Sebagai lokomotif perekonomian nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berbenah untuk menghadapi tantangan dan perubahan zaman untuk menjadi entitas bisnis yang kuat dan efisien. Sepanjang 2019-2024, Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi dan restrukturisasi BUMN melalui pembentukan *holding*, *merger*, akuisisi, dan likuidasi. Jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai 108 perusahaan dipangkas menjadi 41 perusahaan, dan klaster BUMN yang sebelumnya berjumlah 27 klaster dikurangi menjadi 12 klaster, di mana setiap Wakil Menteri BUMN menaungi 6 klaster.

As the locomotive of the national economy, State-Owned Enterprises (SOEs) continue to refine their operations to face the challenges and changes of the times, aiming to become strong and efficient business entities. From 2019 to 2024, the Ministry of SOEs has pursued efficiency and restructuring within SOEs through the formation of holdings, mergers, acquisitions, and liquidations. The number of SOEs, previously totaling 108 companies, has been reduced to 41, and the clusters of SOEs, previously 27 have been consolidated to 12 clusters with each Deputy Minister of SOEs overseeing 6 clusters.

2020

Holding Ultra Mikro
Holding Ultra Mikro

Penggabungan BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk penguatan ekonomi mikro dalam membantu masyarakat pra-sejahtera.

The merger of BRI, PT Pegadaian (Persero), and PT Permodalan Nasional Madani (PNM) aims to strengthen the microeconomy in assisting the less affluent communities.

Merger PELINDO
Merger of PELINDO

Penggabungan perusahaan pelabuhan di Indonesia untuk menjadi perusahaan pelabuhan ke-8 terbesar di dunia.
The merger of port companies in Indonesia aims to create the world's 8th largest port company.

Pembentukan Indonesia Healthcare Corporation (IHC)
Indonesia Healthcare Corporation (IHC) Establishment

Penggabungan rumah sakit BUMN sehingga menjadi jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia.
The merger of state-owned hospitals that led to the establishment of the largest hospital network in Indonesia.

Pembentukan InJourney
InJourney Establishment

InJourney menjadi perusahaan BUMN yang mengintegrasikan berbagai sektor pariwisata, aviasi, dan pendukungnya di Indonesia.
InJourney has become a state-owned enterprise that integrates various sectors of tourism, aviation, and their support systems in Indonesia.

2022

Merger Bank Syariah
Merger of Sharia Banks

Penggabungan Bank Syariah BUMN sehingga menjadi Bank Syariah terbesar di Indonesia.
The merger of state-owned Islamic banks results in the formation of the largest Islamic bank in Indonesia.

Pembentukan *Holding* Pangan
Holding Pangan Establishment

Menciptakan transformasi ekosistem pangan yang kuat dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
Creating a strong and integrated upstream-to-downstream food ecosystem.

Pembentukan Indonesia Financial Group (IFG)
Indonesia Financial Group (IFG) Establishment

Penggabungan klaster asuransi untuk menjalankan peran dan fungsi penting dalam pembangunan nasional melalui industri asuransi dan penjaminan yang kuat.
The merger of insurance clusters aims to fulfill a crucial role in national development through a strong insurance and underwriting industry.

Agenda Transformasi BUMN
SOE Transformation Agenda

Transformasi Model Bisnis
Business Model Transformation

108 BUMN 108 SOEs	**41** BUMN 41 SOEs
27 KLASTER 27 Clusters	**12** KLASTER 12 Clusters

TRANSFORMASI PTPN
PTPN Transformation



Transformasi PTPN adalah bagian dari transformasi BUMN. Sepanjang tahun 2021-2024, PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN III bertindak sebagai *Holding* BUMN Perkebunan Nusantara, dan telah melakukan berbagai transformasi di tubuh PTPN. Salah satu transformasi yang dilakukan yakni pembentukan *sub-holding*, di mana PTPN III melakukan pembentukan tiga *sub-holding* yakni PTPN IV, PTPN I, dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

Sub-holding SGN terbentuk sejak tahun 2021, dan merupakan hasil konsolidasi 35 pabrik gula yang sebelumnya dikelola oleh PTPN II, VII, IX, X, XI, XII, dan XIV. SGN bertugas merevitalisasi industri gula nasional dan meningkatkan produksi gula nasional.

Sebagai langkah bersejarah dalam sektor pertanian Indonesia, pada tanggal 1 Desember 2023, PTPN III mengumumkan penggabungan 13 PTPN menjadi dua *sub-holding*, yakni PTPN IV dan PTPN I. Pembentukan dua *sub-holding* ini merupakan implementasi dari Program Strategis Nasional (PSN) yang

PTPN transformation is part of the transformation of SOEs. Throughout 2021-2024, PT Perkebunan Nusantara (Persero) or PTPN III acted as the Holding BUMN Perkebunan Nusantara, and has undertaken various transformations within PTPN. One of the transformations carried out is the formation of sub-holdings, where PTPN III established three sub-holdings namely PTPN IV, PTPN I, and PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

The SGN sub-holding was formed in 2021, and is the result of the consolidation of 35 sugar mills previously managed by PTPN II, VII, IX, X, XI, XII, and XIV. SGN is tasked with revitalizing the national sugar industry and increasing national sugar production.

As a historic step in Indonesia's agricultural sector, on December 1, 2023, PTPN III announced the merger of 13 PTPNs into two sub-holdings, namely PTPN IV and PTPN I. The formation of these two sub-holdings is an implementation of the National Strategic Program (PSN) aimed at achieving

bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, khususnya di bidang ketahanan pangan dan energi.

Sub-holding PTPN IV dibentuk melalui penggabungan PTPN V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai *surviving entity*. PTPN IV diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600 ribu hektar pada 2026, dan akan menjadi pemain utama industri sawit dunia. Sehingga, PTPN IV dipercaya mampu berkontribusi meningkatkan produksi CPO nasional dan minyak goreng dalam negeri, yaitu dari 460 ribu ton/tahun pada 2021 menjadi 1,8 juta ton/tahun pada tahun 2026, atau meningkat hingga 4 kali lipatnya dalam waktu 5 tahun.

Sedangkan *sub-holding* PTPN I dibentuk melalui penggabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I. Perannya sangat penting, karena ditunjuk untuk menjadi Perusahaan Manajemen Aset Perkebunan Unggulan. Mandat PTPN I, antara lain untuk mengoptimalkan dan melepaskan aset perkebunan, mengelola tanaman perkebunan, diversifikasi bisnis, dan mengembangkan inisiatif bisnis ramah lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah nilai Perusahaan dan mendukung ketahanan ekonomi Indonesia.

self-reliance, particularly in food and energy security.

The PTPN IV sub-holding was formed through the merger of PTPN V, VI, and XIII into PTPN IV as the surviving entity. PTPN IV is expected to become the world's largest palm oil company in terms of land area, reaching more than 600 thousand hectares by 2026, and will be a major player in the global palm oil industry. Therefore, PTPN IV is trusted to contribute to increasing national CPO and domestic cooking oil production, from 460 thousand tons/year in 2021 to 1.8 million tons/year by 2026, or an increase of up to 4 times within 5 years.

Meanwhile, the PTPN I sub-holding was formed through the merger of PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, and XIV into PTPN I. Its role is crucial, as it is designated to be the Leading Plantation Asset Management Company. The mandate of PTPN I includes optimizing and releasing plantation assets, managing plantation crops, diversifying businesses, and developing environmentally friendly business initiatives. These activities aim to add value to the Company and support Indonesia's economic resilience.



Daftar Isi
TABLE OF CONTENTS

2 **Sanggahan dan Batas Tanggung Jawab**
Disclaimer and Limitation of Liability

3 **Penjelasan Tema 2023**
Explanation of the 2023 Theme

4 **Kesinambungan Tema**
Theme Continuity

6 **Transformasi BUMN**
SOEs Transformation

8 **Transformasi PTPN**
PTPN Transformation

10 **Daftar Isi**
Table of Contents

13 **Tentang Laporan Tahunan 2023**
About the 2023 Annual Report

14 **Pencapaian Kunci**
Key Achievements

01 PERFORMA 2023
PERFORMANCE IN 2023

18 **Ikhtisar Data Keuangan Penting**
Summary of Important Financial Data

24 **Ikhtisar Saham**
Share Overview

25 **Informasi tentang Penerbitan Obligasi, Sukuk, Obligasi Konversi, serta Sumber Pendanaan Lainnya**
Information on the Issuance of Bonds, Sukuk, Convertible Bonds, and Other Funding Sources

26 **Kilas Peristiwa**
Highlights of Events

02 LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

42 **Laporan Dewan Komisaris**
Report of the Board of Commissioners

58 **Laporan Direksi**
Report of the Board of Directors

74 **Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2023**
Statement of the Board of Commissioners Regarding Responsibility For The Annual Report 2023

75 **Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2023**
Statement of the Board of Directors Regarding Responsibility For The Annual Report 2023

03 PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

78 **Informasi Umum dan Identitas Perusahaan**
General Information and Corporate Identity

80 **Riwayat Singkat Perusahaan**
Brief History of the Company

82 **Kegiatan Usaha dan Pasar yang Dilayani**
Business Activities and Markets Served

83 **Produk dan Jasa**
Products and Services

86 **Struktur Organisasi**
Organizational Structure

88 **Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan**
Vision, Mission, and Corporate Culture

90 **Makna Logo Perusahaan**
Meaning of the Company Logo

92 **Profil Dewan Komisaris**
Profile of the Board of Commissioners

106 **Profil Direksi**
Profile of the Board of Directors

120 **Pejabat Eksekutif**
Executive Officials

122 **Struktur dan Komposisi Pemegang Saham**
Structure and Composition of Shareholders

123 **Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan Kerja Sama Operasi**
List of Subsidiaries and Associated Entities, Joint Ventures, and Joint Operations

125 **Struktur Grup Perusahaan**
Corporate Group Structure

127 **Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham**
Chronology of Share Issuance and Listing

127 **Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya**
Chronology of Other Securities Issuance and Listing

128 **Lembaga dan Profesi Penunjang**
Supporting Institutions and Professionals

130 **Penghargaan dan Sertifikasi**
Awards and Certifications

149 **Keanggotaan Asosiasi**
Membership of Association

150 **Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Jaringan Kawasan, serta Informasi tentang Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan**
Address Of Subsidiaries, Associates, Regional Network, And Information On Branch Offices And Representative Offices

152 **Informasi pada Situs Perusahaan**
Information on the Company Website

04 TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

156 **Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik**
Fundamental Principles of Good Corporate Governance Implementation

165 **Peta jalan**
Roadmap

168 **Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik**
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

170 **Rapat Umum Pemegang Saham**
General Meeting of Shareholders

179 **Dewan Komisaris**
Board of Commissioners

192 **Direksi**
Board of Directors

219 **Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi**
Transparency of Information on the Board of Commissioners and Board of Directors

227 **Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**
Remuneration Policy for The Board of Commissioners and Directors

248 **Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali**
Disclosure of Affiliations Between The Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders

252 **Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi**
Disclosure of Share Ownership by The Board of Commissioners ad Board of Directors

253 **Organ Pendukung Dewan Komisaris**
Board of Commissioners Supporting Organs

290 **Organ Pendukung Direksi**
Board of Directors Supporting Organs

305 **Audit Eksternal/Akuntan Publik**
External Audit/Public Accountant

308 **Manajemen Risiko**
Risk Management

318 **Perkara Penting**
Significant Cases

321 **Akses Informasi dan Data Perusahaan**
Access to Company Information and Data

330 **Tata Kelola Teknologi Informasi**
Information Technology Governance

334 **Kode Etik**
Code of Ethics

337 **Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja**
Performance-Based Long-Term Compensation

338 **Komitmen terhadap Antikorupsi**
Commitment to Anti-Corruption

339 **Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**
Report of State Official Assets Basic Principles of The State Official's Assets

342 **Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa**
Goods and Services Procurement Policy

344 **Kebijakan Terkait *Insider Trading***
Insider Trading Policy

345 ***Whistleblowing System***
Whistleblowing System

349 **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**
Fulfillment of Tax Obligations

350 **Transparansi Praktik *Governance***
Transparency of Governance Practices

05 FUNGSI PENUNJANG BISNIS
Business Support Functions

354 **Sumber Daya Manusia**
Human Resources

354 **Demografi Karyawan**
Employee Demographics

359 **Pejabat Divisi Sumber Daya Manusia**
Human Resources Division Officials

360 **Arah Kebijakan SDM**
HR Policy Direction

360 **Inisiasi Strategis dan Program Kerja SDM Tahun 2023**
Strategic Initiatives and HR Work Programs for 2023

361 **Pengembangan Kompetensi Karyawan**
Employee Competence Development

388 **Pengembangan Karier, Promosi, dan Mutasi**
Career Development, Promotion, and Transfer

388 **Kesejahteraan Karyawan, Lingkungan Kerja, dan Kesetaraan Kesempatan**
Employee Welfare, Work Environment, and Equal Opportunities

391 **Hubungan Industrial dan Kebebasan Berorganisasi**
Industrial Relations and Freedom of Organization

06 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION ON COMPANY PERFORMANCE

394 **Tinjauan Perekonomian dan Industri**
Economic and Industry Review

398 **Rencana dan Kebijakan Strategis Perusahaan**
Company's Strategic Plans and Policies

406 **Tinjauan Operasi per Segmen Usaha**
Operational Review by Business Segment

420 **Tinjauan Keuangan**
Financial Review

430 **Rasio-Rasio Kinerja Keuangan**
Fianncial Performance Ratios

431 **Kinerja Keuangan Masing-Masing Perusahaan *Holding* Perkebunan**
Financial Performance of Each Holding Perkebunan Company

432 **Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang**
Ability to Pay Debts and Accounts Receivable Collectibility Rate

434 **Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal**
Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

436 **Realisasi Investasi Barang Modal**
Realization of Capital Goods Investment

437 **Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/ Modal**
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Business Mergers, Acquisitions, and/or Debt/ Capital Restructuring

441 **Perbandingan antara Target Anggaran dengan Realisasi**
Comparison of Budget Targets and Realization

444 **Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan**
Information and Material Facts Occurring After the Accountant's Report Date

445 **Prospek Usaha**
Business Outlook

448 **Aspek Pemasaran**
Marketing Aspects

449 **Pangsa Pasar**
Market Share

452 **Tinjauan Keuangan Lainnya**
Other Financial Reviews

453 **Informasi tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)**
Information on Employee and/ or Management Stock Ownership Programs (ESOP/MSOP)

453 **Informasi tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**
Information on the Realization of Public Offering Proceeds Usage

454 **Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi**
Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

456 **Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi**
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Occurrence Events

456 **Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan**
Accounting Policy Changes and Their Impacts on the Company

456 **Informasi Kelangsungan Usaha**
Business Continuity Information

457 **Tingkat Kesehatan Perusahaan**
Company Health Level

07 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

460 **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**
Corporate Social and Environment Responsibility

08 LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL REPORT



TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2023

ABOUT THE 2023 ANNUAL REPORT

Selamat datang pada Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tahun 2023 dengan tema *"Transformational Growth Through Strategic Integration"*. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis PT Perkebunan Nusantara III sepanjang tahun 2023.

Welcome to the 2023 Annual Report of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), with the theme "Transformational Growth Through Strategic Integration." This theme was selected based on an in-depth analysis and review of the facts and business developments of PT Perkebunan Nusantara III throughout 2023.

Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 2023 diterbitkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam rangka menjalankan praktik terbaik terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), Perusahaan juga menyampaikan beberapa aspek yang merupakan bagian dari pengembangan dan interpretasi atas isi Laporan Tahunan. Dengan demikian, Perseroan mengharapkan Laporan Tahunan ini dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi yang wajar seiring dengan terpenuhinya aspek komposisi dan aspek substansi.

The 2023 Annual Report of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is published following the Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies. In adhering to best practices for implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company also presents several aspects that are part of developing and interpreting the Annual Report content. Thus, the Company hopes this Annual Report will promote enhanced information transparency, meeting both compositional and substantive aspects.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perusahaan kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan. Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya tentang Perusahaan, melalui penyediaan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan.

The primary objective of this Annual Report is to improve the Company's information disclosure to relevant authorities and to serve as an annual publication that fosters employee pride and solidarity. Furthermore, this Annual Report aims to build understanding and trust among shareholders and other stakeholders by providing accurate, balanced, and relevant information.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tahun 2023 disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik.

References to the currency units "Rupiah," "Rp," or "IDR" denote the official currency of the Republic of Indonesia. All financial information is presented in Rupiah following Indonesian Financial Accounting Standards. The 2023 Annual Report of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is offered in Indonesian and English, using easy-to-read fonts and sizes, and printed with high quality.

PENCAPAIAN KUNCI
KEY ACHIEVEMENTS

Pendapatan Usaha
Operating Revenue

Rp50,98 triliun trillion

Pada tahun 2023 Perusahaan memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp50.981.397 juta, menurun 8,74% dibandingkan tahun 2022, yaitu Rp55.863.302 juta.

In 2023, the Company generated operating revenues of Rp50,981,397 million, a decrease of 8.74% compared to 2022, which was Rp55,863,302 million.



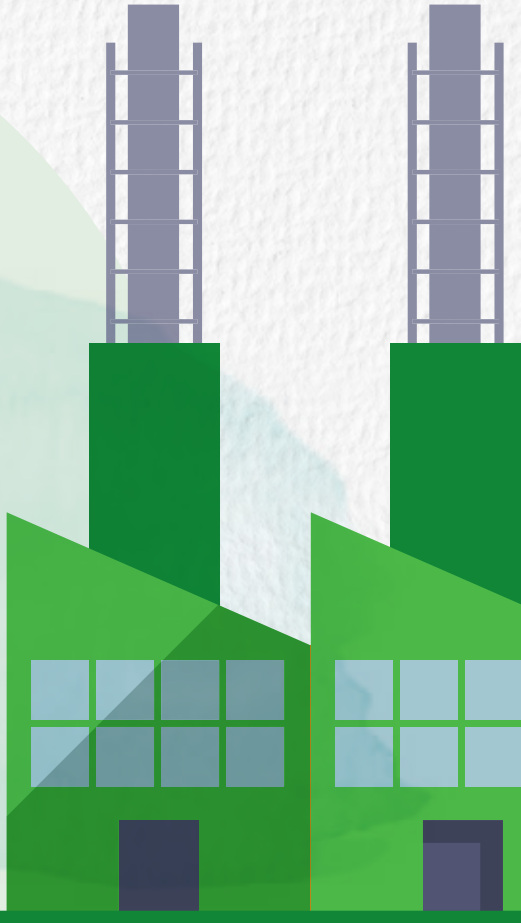


Produksi Kelapa Sawit
Palm Oil Production

9.371.700 ton tons

Realisasi capaian produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kebun sendiri tahun 2023 sebesar 9.371.700 ton atau sekitar 89,77% dari RKAP dan 94,21% dari realisasi periode tahun 2022 sebesar 9.948.194 ton.

The actual production of fresh fruit bunches (FFB) from the company's own plantations in 2023 amounted to 9,371,700 tons, or approximately 89.77% of the Work Plan and Budget (RKAP) and 94.21% of the actual production in 2022, amounted to 9,948,194 tons.

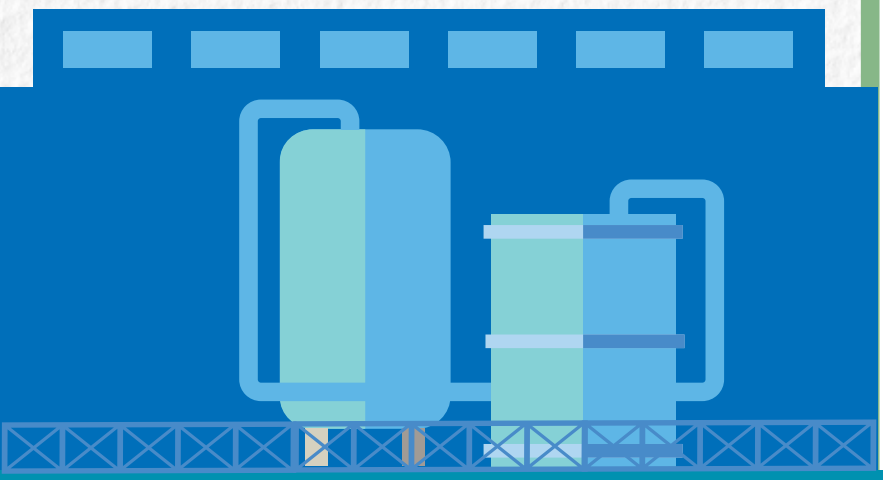


Tebu Giling
Sugarcane Milled

10.448.086 ton tons

Realisasi tebu digiling sepanjang tahun 2023 adalah sebesar 10.448.086 ton, atau mencapai 76,23% terhadap RKAP dan 79,06% dari realisasi tebu yang digiling pada periode yang sama tahun sebelumnya pada 2022, yakni 13.215.948 ton.

The amount of sugarcane milled throughout 2023 was 10,448,086 tons, achieving 76.23% of the RKAP and 79.06% of the sugarcane milled during the same period in 2022, which was 13,215,948 tons.



Tingkat Kesehatan Perusahaan
Company Health Rating

idA-/stable

Pada tahun 2023, *Holding* Perkebunan mendapat predikat "Sehat" dengan peringkat akhir "idA-/stable" oleh lembaga pemeringkat PEFINDO.

In 2023, Holding Perkebunan received the rating of "Healthy" with the final rating is "idA-/stable" by the rating agency PEFINDO

"SANGAT BAIK"
"VERY GOOD"

Asesmen GCG
GCG Assessment

Perseroan melaksanakan asesmen GCG pada tahun 2023 dan mendapat predikat "Sangat Baik" mencakup 6 (enam) aspek dengan capaian skor sebesar 90,90%.

The Company conducted a GCG assessment in 2023 and received a "Very Good" rating, encompassing six aspects, with a score of 90.90%.

Performa 2023

PERFORMANCE IN 2023



01



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
SUMMARY OF IMPORTANT FINANCIAL DATA

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

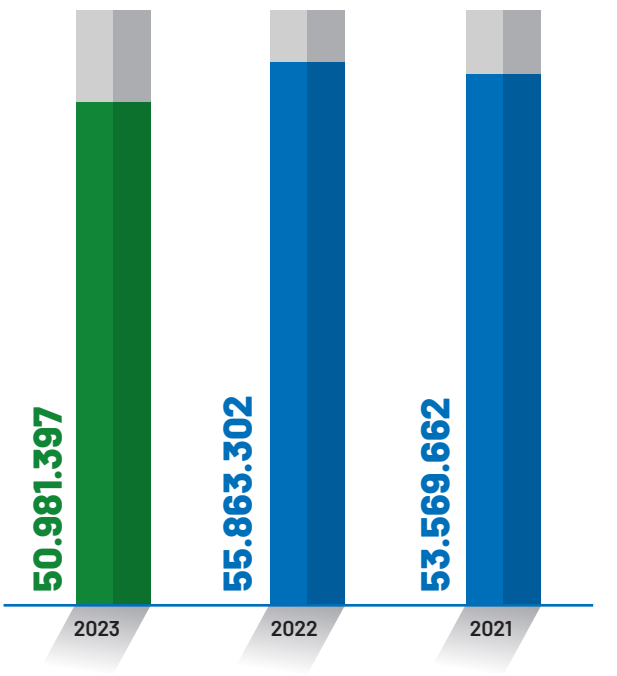
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	YoY 2023-2022 (%)
Pendapatan Bersih Net Revenue	50.981.397	55.863.302	53.569.662	-8,74%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(38.234.291)	(36.669.237)	(33.660.029)	4,27%
Laba Bruto Gross Profit	12.747.106	19.194.065	19.909.633	-33,59%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	2.359.361	8.034.294	7.477.077	-70,63%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(1.337.055)	(2.017.313)	(2.832.745)	-33,72%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	1.022.306	6.016.981	4.644.333	-83,01%
Laba (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Neto Setelah Pajak Other Comprehensive Income (Loss) for the Year, Net of Tax	(452.167)	(1.688.789)	7.221.128	-73,23%
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for the Year	570.139	4.328.191	11.865.461	-86,83%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Profit (Loss) for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	1.085.206	5.633.064	4.377.377	-80,74%
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	(62.900)	383.916	266.956	-116,38%
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income (Loss) for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	732.069	4.112.323	10.976.543	-82,20%
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	(161.930)	215.867	888.917	-175,01%
Laba (Rugi) Per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rupiah Penuh) Basic Earnings (Loss) Per Share Attributable to Owners of the Parent Entity (Full Rupiah)	26.984	140.069	115.484	-80,74%

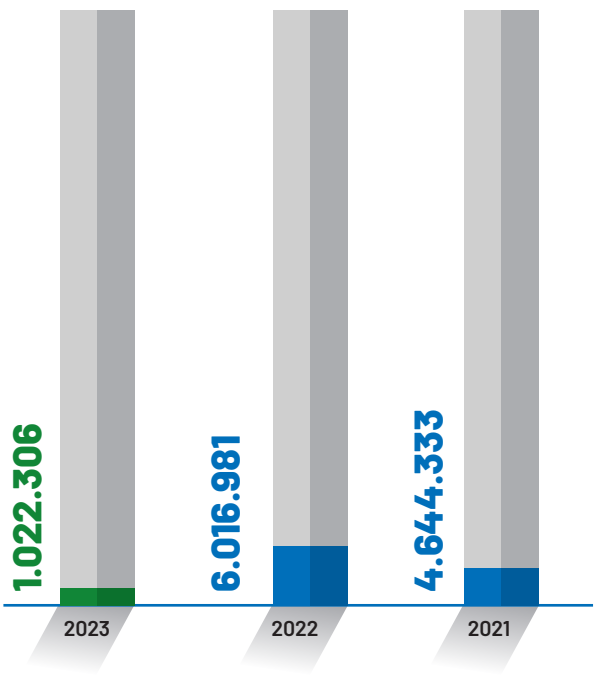
Pendapatan
Revenue

(Rp-juta)|(Rp-million)



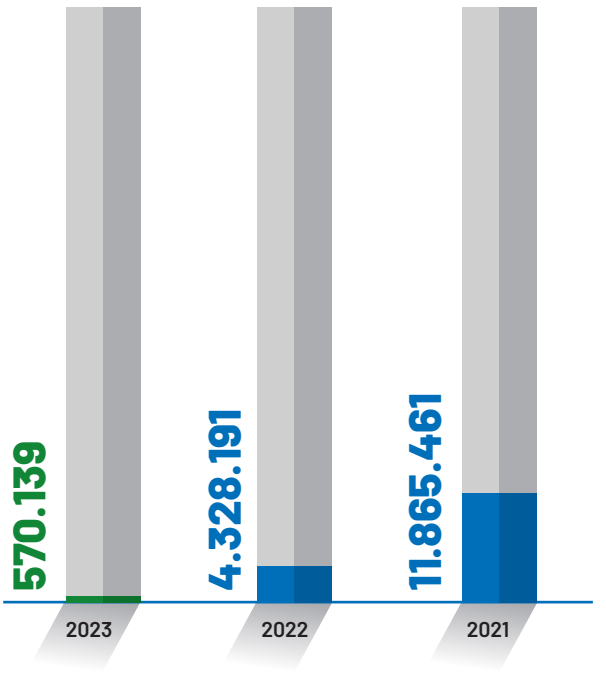
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Income (Loss) for the Year

(Rp-juta)|(Rp-million)



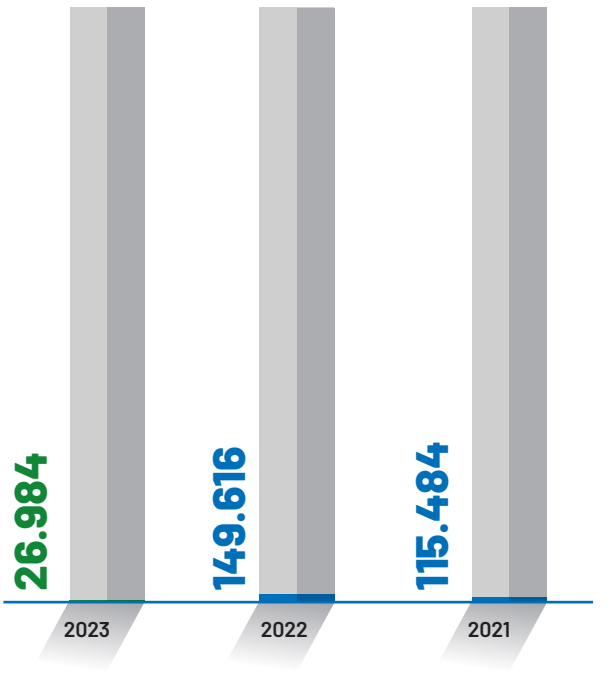
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
Comprehensive Income (Loss) for the Year

(Rp-juta)|(Rp-million)



Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar
Basic Earnings (Loss) per Share

(Rp-juta)|(Rp-million)



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

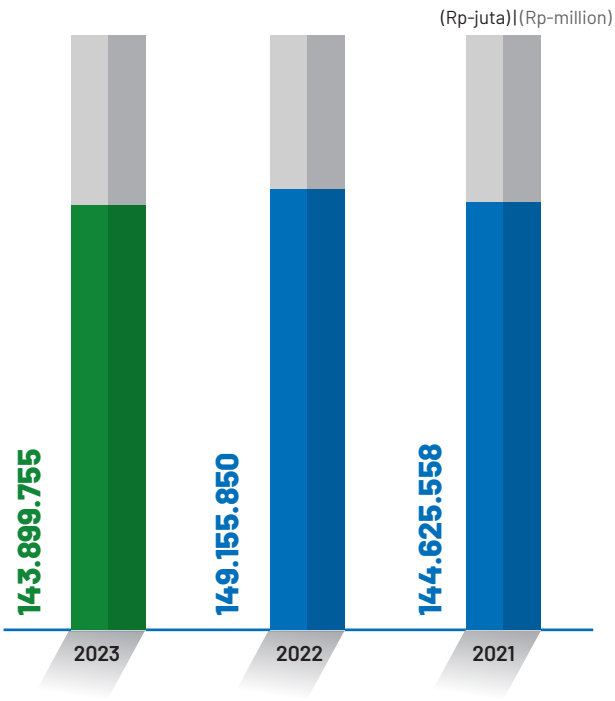
Consolidated Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah)

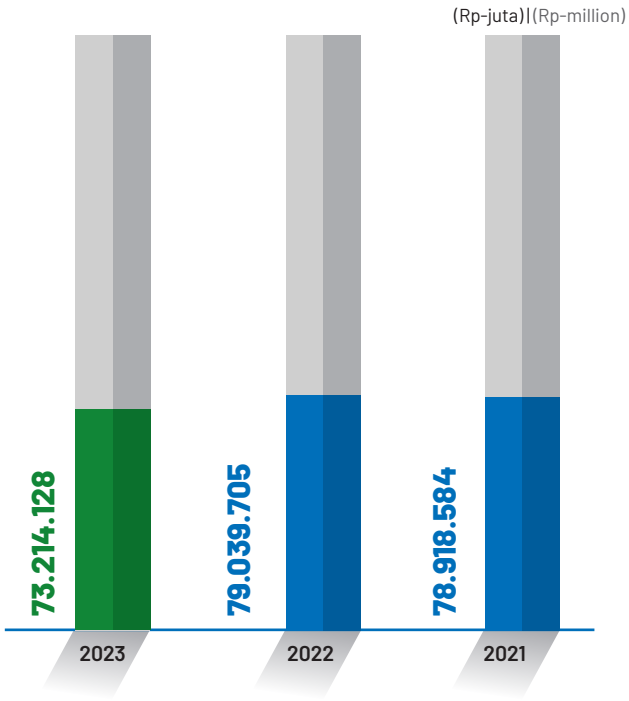
(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	YoY 2023-2022 (%)
Aset Assets				
Total Aset Lancar Total Current Assets	21.509.109	29.746.310	24.494.000	-27,69%
Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	122.390.645	119.409.539	120.131.558	2,50%
Total Aset Total Assets	143.899.755	149.155.850	144.625.558	-3,52%
Liabilitas Liabilities				
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities	21.945.178	26.126.560	20.030.532	-16,77%
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Long-Term Liabilities	51.268.950	52.913.144	58.888.052	-2,73%
Total Liabilitas Total Liabilities	73.214.128	79.039.705	78.918.584	-7,37%
Ekuitas Equity				
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	66.115.030	65.382.960	61.117.186	1,12%
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan NonPengendali Equity Attributable to Non-Controlling Interests	4.570.597	4.733.183	4.589.788	-3,44%
Total Ekuitas Total Equity	70.685.627	70.116.144	65.706.974	1,12%
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**143.899.755**	**149.155.850**	**144.625.558**	**-3,52%**

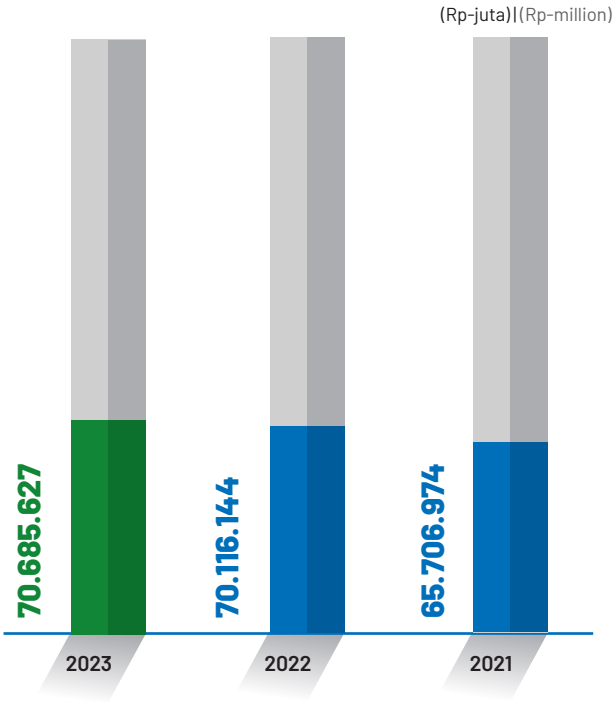
Total Aset
Total Assets



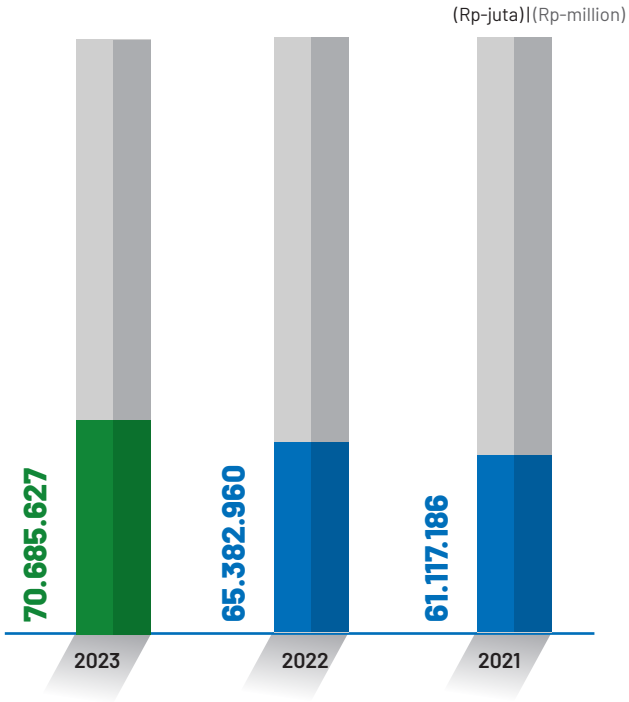
Total Liabilitas
Total Liabilities



Total Ekuitas
Total Equity



Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity



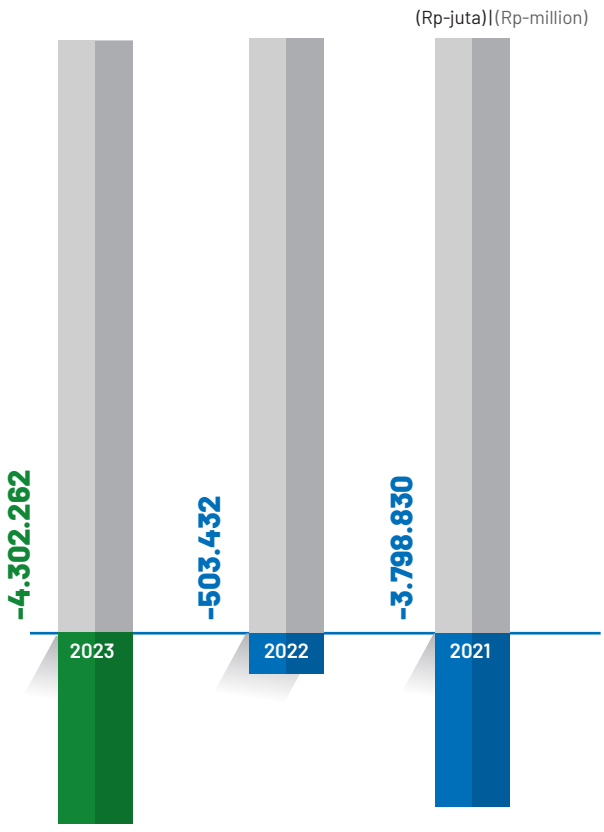
Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flows

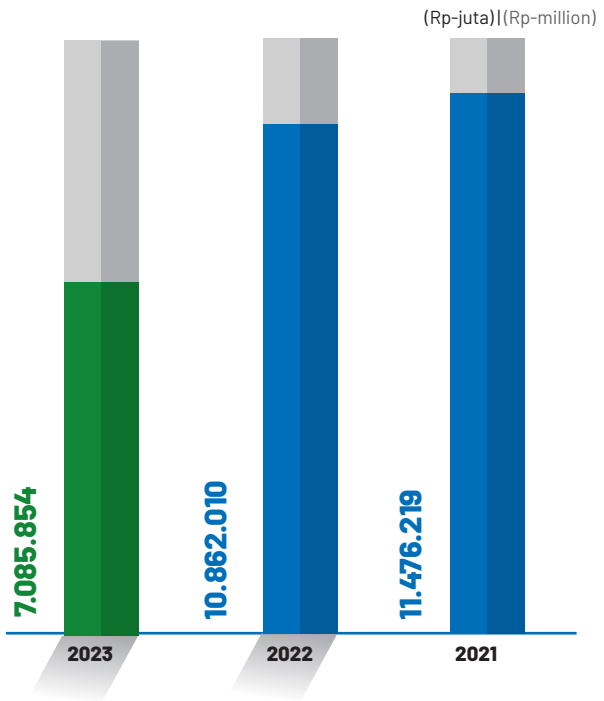
(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	YoY 2023-2022 (%)
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Generated from Operating Activities	10.659.427	6.783.357	11.534.729	58,19%
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(4.317.186)	(2.832.837)	(2.890.319)	52,40%
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net cash used in financing activities	(10.644.504)	(4.408.952)	(2.552.599)	141,43%
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(4.302.262)	(503.432)	6.091.810	754,59%
Dampak Neto Selisih Kurs Atas Kas dan Setara Kas Net Impact of Exchange Rate Differences on Cash and Cash Equivalents	(84.634)	131.672	29.265	-164,28%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	10.862.010	11.476.218	5.355.143	-5,35%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	8.757.400	13.144.297	11.476.219	-33,37%

Kenaikan (Penurunan) Neto Kas Setara Kas
Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents



Kas dan Setara Kas Akhir Tahun
Cash and Cash Equivalents at End of the Year



Rasio-Rasio Keuangan

Financial Ratios

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	YoY 2023-2022 (%)
Gross Profit Margin (GPM)	%	25,00	34,36	37,17	(9,36)
Net Profit Margin (NPM)	%	2,01	10,77	8,67	(8,77)
Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset Profit (loss) ratio to total assets	%	0,71	4,03	3,21	(3,32)
Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas Profit (loss) ratio to equity	%	1,45	8,58	7,07	(7,14)
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan Profit (loss) ratio to revenue/sales	%	2,01	10,77	8,67	(8,77)
Rasio Lancar Current ratio	%	98,91	113,85	122,28	(14,94)
Rasio liabilitas terhadap ekuitas Liability to equity ratio	%	103,58	112,73	120,11	(9,15)
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Liability to total assets ratio	%	50,88	53,00	54,6	(2,11)
Return On Assets (ROA)	%	0,71	4,03	3,21	(3,32)
EBITDA	Rp-Juta Rp-Million	10.249.939	15.582.196	14.179.378	**(34,63)**



IKHTISAR SAHAM
SHARE OVERVIEW

Komposisi Pemegang Saham

Seluruh saham Perseroan merupakan saham milik Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 100,00%. Selain itu, sejak bulan September 2014 Perusahaan telah tercatat memiliki 90,00% saham dari PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV, melalui penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perseroan.

Shareholders Composition

All shares of the Company are owned by the Government of the Republic of Indonesia with a share ownership of 100.00%. Additionally, since September 2014, the Company has held 90.00% of the shares of PT Perkebunan Nusantara I, II, and IV through XIV through additional state capital injection into the Company's share capital.

Informasi Tentang Aksi Korporasi

Dikarenakan Perseroan bukan termasuk Perusahaan publik dan tidak terdaftar di bursa saham mana pun, maka dalam tahun 2023 dan 2022, Perseroan tidak mencatatkan aksi korporasi seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham *(reverse stock)*, pemberian saham bonus, atau penurunan nilai nominal saham.

Information on Corporate Actions

As the Company is not a listed public company and is not listed on any stock exchange, there were no corporate actions such as stock splits, reverse stock mergers, bonus share issuances, or reductions in nominal share value in 2023 and 2022.

Dividen Saham

Tidak terdapat pembagian pembayaran Dividen saham yang dibayarkan kepada Pemerintah untuk tahun buku 2022 dilakukan di tahun 2023, dan Dividen Saham untuk tahun 2021 dilakukan pada tahun 2022. Berikut merupakan rincian pembagian Dividen untuk tahun 2023 dan 2022:

Stock Dividends

No dividends were paid to the Government for the 2022 fiscal year in 2023, and Stock Dividends for the 2022 fiscal year in 2023. Below is the dividend distribution detail for 2023 and 2022:

Dividen Saham Stock Dividends	**2023** **(Untuk Dividen Saham Tahun Buku 2022)** (For 2022 Fiscal Year)	**2022** **(Untuk Dividen Saham Tahun Buku 2021)** (For 2021 Fiscal Year)
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) Cash Dividends Distributed (Rp)	-	-
Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Distribution Ratio (%)	-	-
Tanggal Pembayaran Payment Date	-	-

INFORMASI TENTANG PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK, OBLIGASI KONVERSI, SERTA SUMBER PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION ON THE ISSUANCE OF BONDS, SUKUK, CONVERTIBLE BONDS, AND OTHER FUNDING SOURCES

Perusahaan tidak menyediakan Informasi mengenai penerbitan obligasi, sukuk, obligasi konversi, dan sumber pendanaan lainnya karena Perusahaan tidak menerbitkan informasi tersebut selama tahun 2023.

The Company does not provide information regarding the issuance of bonds, sukuk, convertible bonds, and other funding sources because the Company did not issue such information during the year 2023.



KILAS PERISTIWA
HIGHLIGHTS OF EVENT

06 **Januari |** January 06, 2023



Kunjungan Kerja Menteri BUMN ke Pabrik Minyak Makan Merah

Minister of SOE's Working Visit to Red Cooking Oil Factory

Menteri BUMN bersama Direktur Utama *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), melakukan kunjungan kerja ke pabrik minyak makan merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (06/01).

Kunjungan ini dilakukan guna meninjau *progress* pembangunan pabrik minyak makan merah yang tengah digarap oleh PTPN Group. Di Sumatera Utara ada tiga pabrik dengan kapasitas 10 ton minyak goreng per hari yang sedang dikerjakan, yakni di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Asahan.

The Minister of SOEs and the President Director of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) conducted a working visit to the red cooking oil factory in Deli Serdang, North Sumatra, on Friday (06/01).

This visit reviewed the progress of the red cooking oil factory construction carried out by the PTPN Group. There are three factories in North Sumatra, with a capacity of 10 tons of cooking oil per day, currently under construction and located in the Deli Serdang, Langkat, and Asahan districts.

08 **Januari |** January 08, 2023



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dengan perusahaan BUMN Malaysia FGV Holdings Berhard (FGV)

Signing Ceremony of the Cooperation Agreement between Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) and Malaysian State-Owned Company FGV Holdings Berhard (FGV)

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sebagai satu-satunya BUMN Perkebunan di Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan BUMN Malaysia FGV Holdings Berhard (FGV), salah satu produsen sawit terbesar di dunia dan *commercial arm* dari Federal Land Development Authority (FELDA).

Kontrak kerjasama antara kedua BUMN ini ditandatangani Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani bersama Dato' Mohd. Nazrul Izam Mansor, sebagai Group Chief Executive Officer (Senior Management FGV), di sela kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim di Jakarta pada Minggu (08/01).

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), as the sole State-Owned Plantation Enterprise in Indonesia, entered into a cooperation agreement with Malaysian State-Owned Company FGV Holdings Berhard (FGV), one of the world's largest palm oil producers and the commercial arm of the Federal Land Development Authority (FELDA).

The President Director of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, and Dato' Mohd signed the cooperation contract between the two State-Owned Enterprises. Nazrul Izam Mansor, as the Group Chief Executive Officer (Senior Management FGV), was present during the state visit of the Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, in Jakarta on Sunday (08/01).

18 **Januari** | January 18, 2023



Penandatanganan MoU antara *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

The signing of the MoU between Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) and the Indonesian National Police (POLRI)

Holding Perkebunan Nusantara terus berupaya menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa. Untuk itu *Holding* PTPN sebagai induk usaha PTPN Group, menjalin kerja sama dengan POLRI. Karena keamanan menjadi salah satu isu penting kunci keberhasilan mencapai visi ini.

Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani Direktur Utama *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani dan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Inspektur Jenderal Polisi Agung Setya, di Jakarta, Rabu (18/01/2023).

Holding Perkebunan Nusantara strives to be a leading national agribusiness company with global competitiveness and continuous contribution to the nation's progress. Therefore, PTPN Holding, as the parent company of PTPN Group, has collaborated with the Indonesian National Police (POLRI). Security is one of the critical issues crucial to the success of achieving this vision.

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed by the President Director of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, and the Assistant Deputy of Police Operations, Inspector General Polisi Agung Setya, in Jakarta on Wednesday (18/01/2023).

27 **Januari** | January 27, 2023



RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023

GMS for Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Year 2023

Pada tanggal 27 Januari 2023 PTPN III (Persero) telah melaksanakan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 bertempat di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta. Rapat dipimpin oleh Bapak Pahala Nugraha Mansury selaku Wakil Menteri I BUMN, Kementerian BUMN yang bertindak selaku kuasa Menteri BUMN yang mewakili Negara Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan. RUPS RKAP 2023 dihadiri Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, BOD dan BOC *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2023, PTPN III (Persero) menyelenggarakan RUPS RKAP Tahun 2023 seluruh Anak Perusahaan yang dihadiri Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, BOD *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), BOC dan BOM Anak Perusahaan, bertempat di LPP Agro Nusantara di Yogyakarta.

On 27 January 2023, PTPN III (Persero) held the GMS for Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Year 2023 at the Ministry of State-Owned Enterprises office in Jakarta. Mr. Pahala Nugraha Mansury chaired the meeting, and Deputy Minister I of State-Owned Enterprises represented the Indonesian government as the shareholders of the Company. The RKAP 2023 meeting was attended by the Assistant Deputy of Plantation and Forestry Industry, the Board of Directors (BoD), and the Board of Commissioners (BoC) of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Furthermore, on 30 January 2023, PTPN III (Persero) held the RKAP 2023 GMS for all Subsidiaries, attended by the Assistant Deputy of Plantation and Forestry Industry, the Board of Directors of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), the Board of Commissioners and Board of Management of Subsidiaries, at LPP Agro Nusantara in Yogyakarta.

31 **Januari |** January 31, 2023



Sharing and Collaborating Transformasi EBITDA Menuju PTPN Juara

Sharing and Collaborating Transformation Towards Champion PTPN EBITDA

PTPN Group sukses menyelenggarakan rangkaian acara *Sharing and Collaborating* Transformasi Ebitda Menuju PTPN Juara pada Selasa, (31/01/2023) di Auditorium LPP Agro Nusantara, Yogyakarta.

Acara berlangsung dihadiri Asisten Deputi Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN Rachman Ferry Isfianto, Komisaris Utama *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III Zulkifli Zaini beserta jajaran, Direktur Utama *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III Mohammad Abdul Ghani beserta jajaran, dan *Managing Director* & *Partner Boston Consulting Group* Lenita Tobing, Mr. Hitesh Tak, dan Haikal Siregar.

PTPN Group successfully held a series of events titled "Sharing and Collaborating Transformation Towards Champion PTPN EBITDA" on Tuesday (31/01/2023) at the LPP Agro Nusantara, Yogyakarta Auditorium.

The event was attended by the Assistant Deputy of Plantation and Forestry Industry at the Ministry of State-Owned Enterprises, Rachman Ferry Isfianto, the President Commissioner of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Zulkifli Zaini, along with other officials, the President Director of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Mohammad Abdul Ghani, and Managing Director & Partner of Boston Consulting Group, Lenita Tobing, Mr. Hitesh Tak, and Haikal Siregar.

9-10 **Februari |** 9-10 February 2023



Penandatanganan MoU antara *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dengan KMAC dan POSCO

The signing of the MoU between Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) and KMAC and POSCO

MoU ditandatangani Denaldy Mulino Mauna sebagai Wakil Direktur Utama PTPN III, dengan CEO KMAC, Su-Hee Han di Seoul, pada Kamis, (09/02/2023). Sedangkan MoU yang kedua oleh SVP POSCO, Seung Pyo Hong di Incheon, pada Jumat (10/02/2023).

KMAC merupakan asosiasi konsultan bisnis dalam pengembangan dan inovasi manajemen, sedangkan POSCO merupakan perusahaan bergerak dalam bidang energi, nikel, baja, infrastruktur, hidrogen dan agrobisnis.

The MoU was signed by Denaldy Mulino Mauna as Deputy President Director of PTPN III, with KMAC CEO Su-Hee Han in Seoul on Thursday (09/02/2023). Meanwhile, the second MoU was signed by POSCO SVP Seung Pyo Hong in Incheon on Friday (10/02/2023).

KMAC is a business consulting association in development and management innovation, while POSCO is a company engaged in energy, nickel, steel, infrastructure, hydrogen, and agribusiness.

15 **Maret |** 15 March 2023



Holding Perkebunan PTPN III (Persero) Raih Penghargaan Anugerah BUMN 2023

Holding Perkebunan PTPN III (Persero) Achieves the 2023 SOE Award

Holding Perkebunan Nusantara meraih dua penghargaan sekaligus dengan predikat terbaik, yakni Perusahaan dengan Transformasi Organisasi Terbaik dan *The Best* CEO dengan *Talent Development* Terbaik dalam ajang Anugerah BUMN 2023 di Hotel Sahid Jakarta, pada Rabu (15/03).

Anugerah BUMN 2023 dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan BUMN dan anak perusahaan, para CEO yang telah berkiprah bagi pertumbuhan kinerja dan transformasi perusahaan. Dalam penyelenggaraan tahun ke-12 ini, ajang tersebut mengusung tema "Akselerasi Transformasi Digital, Inovasi, dan *Recovery* Bisnis BUMN".

Holding Perkebunan Nusantara achieved two awards simultaneously with the best predicate: the Best Organizational Transformation Company and The Best CEO with the Best Talent Development at the 2023 SOE Award event at Hotel Sahid Jakarta on Wednesday (15/03).

The 2023 SOE Award is held to show appreciation for SOE companies and subsidiaries and CEOs who have contributed to the performance growth and transformation of the companies. In its 12th year, the event carries the theme "Accelerating Digital Transformation, Innovation, and SOE Business Recovery."

16 **Maret |** March 16, 2023



Peresmian Pembangunan Laboratorium Riset Pengolahan Kelapa Sawit Mini

Inauguration of Mini Palm Oil Processing Research Laboratory Development

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) meresmikan pembangunan Laboratorium Riset Pengolahan Kelapa Sawit Mini. Laboratorium ini akan bermanfaat sebagai sarana pendidikan hingga penelitian pengolahan kelapa sawit di Jonggol, Bogor, Jawa Barat.

Peresmian Laboratorium Riset Pengolahan Kelapa Sawit Mini dihadiri Rektor Institut Pertanian Bogor, Prof. Arif Satria, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan, Direktur di lingkungan IPB, staf Direksi PTPN III (Persero), perwakilan PT RPN, serta para dosen dan mahasiswa IPB.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), together with the IPB University, inaugurated the development of the Mini Palm Oil Processing Research Laboratory. This laboratory will serve as an educational and research facility for palm oil processing in Jonggol, Bogor, West Java.

The inauguration of the Mini Palm Oil Processing Research Laboratory was attended by the Rector of Bogor Agricultural Institute (IPB), Prof. Arif Satria, Vice-Rector, Dean of the Faculty of Agriculture and Animal Husbandry, Directors within IPB, PTPN III (Persero) Directorate staff, representatives from PT RPN, as well as IPB lecturers and students.

14-16 **Maret** | March 14-16, 2023



International Oil Palm Conference (IOPC), *"Coping the Matters, Ensuring the Future"*

International Oil Palm Conference (IOPC), "Coping the Matters, Ensuring the Future"

Forum *International Oil Palm Conference* (IOPC) diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Centre Bali. IOPC yang berlangsung pada 14-16 Maret 2023 lalu, diselenggarakan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) ppks_id atau yang dikenal dengan Indonesia Oil Palm Research Institute (IOPRI) merupakan anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), unit kerja PT Riset Perkebunan Nusantara.

IOPC merupakan sebuah seminar internasional empat tahunan sejak tahun 1998 yang membahas topik terkini industri kelapa sawit. Pada tahun ini IOPC ke-7 mengangkat topik *"Coping the Matters, Ensuring the Future."* Para peserta yang hadir berasal dari Kementerian/ Lembaga, praktisi dari Industri kelapa sawit, peneliti, akademisi dan asosiasi masyarakat kelapa sawit baik.

The International Oil Palm Conference (IOPC) forum was held at the Bali Nusa Dua Convention Centre in Bali. The IOPC, which took place on March 14-16, 2023, was organized by the Palm Oil Research Center (PPKS) known as the Indonesia Oil Palm Research Institute (IOPRI), a subsidiary of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), working under PT Riset Perkebunan Nusantara.

IOPC is a quadrennial international seminar that has been held since 1998 and discusses current topics in the palm oil industry. This year's 7th IOPC addressed "Coping the Matters, Ensuring the Future." Participants included representatives from ministries/agencies, practitioners from the palm oil industry, researchers, academics, and palm oil community associations.

30 **Maret** | March 30, 2023



Menteri ATR/BPN Mendatangi Objek Pemulihan Aset Bersama Direktur Utama *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

Minister of ATR/BPN Visits Asset Recovery Site with President Director of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

Pada Kamis (30/03), Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, memberikan apresiasi atas solusi yang ditawarkan PTPN Group dalam menyelesaikan masalah aset lahan di kawasan Gunung Mas, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam penyelesaian masalah yang dilakukan, PTPN Group tidak hanya memberikan solusi berimbang tetapi juga memerhatikan aspek lingkungan di sekitar lahan. Selain itu, saat ini masih ada puluhan hektar luas lahan PTPN Group yang masih diokupasi oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan tetap melalui pendekatan humanis sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir.

On Thursday (30/03), Minister of ATR/BPN Air Marshal TNI (Ret.) Hadi Tjahjanto expressed appreciation for the solutions offered by the PTPN Group to resolve land asset issues in the Gunung Mas area, Megamendung District, Bogor Regency, West Java.

In the resolution process, the PTPN Group provided balanced solutions and considered environmental aspects around the land. Furthermore, the community still occupies tens of hectares of PTPN Group land. Efforts are being made with a humanistic approach as directed by President Joko Widodo and Minister of SOEs Erick Thohir.

5-7 **Mei** | May 5-7, 2023



Indonesia Coffee Festival (ICF), Pameran Industri Kopi Terbesar

Indonesia Coffee Festival (ICF), Largest Coffee Industry Exhibition

Digelar pada 5-7 Mei 2023 di JIEXPO Kemayoran, ICF 2023 merupakan pameran industri kopi terbesar di tanah air yang diselenggarakan oleh Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) dan Panorama Media bermitra strategis dengan PMO Kopi Nusantara.

ICF juga mengumpulkan semua pelaku bisnis kopi dari hulu hingga hilir, dari petani hingga *coffee shop*. Kegiatan ini turut membuka peluang bagi para pengunjung untuk menikmati sajian kopi dari seluruh nusantara, membuka peluang kerjasama bisnis, berbagi pengetahuan tentang industri kopi hingga menyaksikan kompetisi bertajuk kopi tingkat nasional.

Held on 5-7 May 2023 at JIEXPO Kemayoran, ICF 2023 is the largest coffee industry exhibition in the country, organized by the Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) and Panorama Media in strategic partnership with PMO Kopi Nusantara.

ICF gathers all coffee business stakeholders from upstream to downstream, from farmers to coffee shops. This event also provides opportunities for visitors to enjoy coffee offerings from across the archipelago, explore business collaboration opportunities, share knowledge about the coffee industry, and witness national-level coffee competitions.

22 **Mei** | May 22, 2023



Holding Perkebunan PTPN III (Persero) Raih Penghargaan *Green Business* Terbaik 2023

Holding Perkebunan PTPN III (Persero) Receives Best Green Business Award 2023

Pada acara *Green Economic Forum* yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Senin (22/05), PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan bangga meraih penghargaan sebagai perusahaan *Green Business* Terbaik 2023.

Penghargaan diserahkan oleh Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan dan diterima oleh Bambang Agustian, selaku *Corporate Secretary* PTPN III. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen PTPN dalam menjalankan operasional bisnis perusahaan untuk tetap memperhatikan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

At the Green Economic Forum event organized by CNBC Indonesia at Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, on Monday (22/05), PT Perkebunan Nusantara III (Persero) proudly received the Best Green Business Company 2023 award.

The award was presented by Moeldoko, Chief of Staff of the Presidency, and received by Bambang Agustian, Corporate Secretary of PTPN III. This award demonstrates PTPN's commitment to conducting the company's business operations while considering environmentally friendly and sustainable business practices.

19-21 **Mei** | May 19-21, 2023



Rapat Koordinasi PTPN Group
PTPN Group Coordination Meeting

PTPN Group pada Tanggal 19-21 Mei 2023 melaksanakan Rapat Koordinasi di Lingkup PTPN bertempat di Merusaka, Nusa Dua Bali yang dihadiri oleh seluruh *Board of Commissioners* dan *Board of Management* PTPN *Group*.

Kegiatan sesi pagi dibuka dengan pemaparan oleh Dapenbun, Sosialisasi dari PT Asuransi Jasa Tania Tbk serta pemaparan Komunikasi Publik. Pada sesi siang terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang salah satunya adalah Arahan Umum Pemegang Saham dari Kementerian BUMN oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury.

PTPN Group held a Coordination Meeting on 19-21 May 2023, at Merusaka, Nusa Dua Bali, attended by all Board of Commissioners and Board of Management of PTPN Group.

The morning session began with presentations by Dapenbun, Socialization from PT Asuransi Jasa Tania, Tbk, and Public Communication presentations. In the afternoon session, there were several activities, including General Shareholder Guidance from the Ministry of SOEs by Deputy Minister of SOEs I, Pahala Nugraha Mansury.

30 **Mei** | May 30, 2023



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022
General Meeting of Shareholders (GMS) for the Approval of the Financial Statements for the Fiscal Year 2022

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mencatatkan kinerja keuangan positif untuk tahun buku 2022. Perusahaan mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp6,02 triliun atau 121,63% dari target, serta arus kas operasi sebesar Rp6,81 triliun atau 107,88% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut disampaikan Abdul Ghani, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Jakarta, pada Selasa (30/05).

Apresiasi pun diberikan oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, yang hadir sebagai perwakilan Pemegang Saham PTPN III (Persero). Apresiasi diberikan atas kinerja Perseroan dan upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan jajaran perusahaan sepanjang tahun buku 2022.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) recorded positive financial performance for the 2022 fiscal year. The company recorded a consolidated net income of Rp6.02 trillion, or 121.63% of the target, and an operating cash flow of Rp6.81 trillion, or 107.88% of the set target. Abdul Ghani announced these achievements during the General Meeting of Shareholders (GMS) held in Jakarta on Tuesday (30/05).

Appreciation was given by Deputy Minister of SOEs I, Pahala Nugraha Mansury, who attended as a representative of PTPN III (Persero) Shareholders. The appreciation was for the Company's performance and efforts made by the Board of Commissioners, Directors, and company staff throughout the 2022 fiscal year.

06 **Juni** | June 06, 2023



Road Test Bensin Etanol (Bensin Ramah Lingkungan)

Ethanol Gasoline Road Test (Environmentally Friendly Gasoline)

PTPN Group melalui PT Energi Agro Nusantara, bersama PT Pertamina Patra Niaga, Kementerian ESDM Ditjen EBTKE dan Balai Besar Pengujian Migas (LEMIGAS), melepas rombongan *road test* uji coba bensin etanol pada Selasa (6/6) di Surabaya.

Pengujian tersebut dilakukan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova Reborn matic in line 16 Valve DOHC dual VVT-i (137 Ps @5600RPM) dengan menempuh jarak harian 500 km/hari. Bioetanol merupakan campuran antara BBM konvensional dan nabati etanol yang berasal dari molase tebu hasil produksi PT Energi Agro Nusantara, salah satu anak usaha PTPN Group. Langkah ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan minyak berbahan baku fosil.

PTPN Group, through PT Energi Agro Nusantara, together with PT Pertamina Patra Niaga, the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Directorate General of New and Renewable Energy and Energy Conservation (EBTKE), and the Oil and Gas Testing Center (LEMIGAS), conducted a road test convoy of ethanol gasoline trials on Tuesday (6/6), in Surabaya.

The testing was conducted using a Toyota Kijang Innova Reborn automatic inline 16 Valve DOHC dual VVT-i (137 Ps @5600RPM) vehicle covering a daily distance of 500 km. Bioethanol is a mixture of conventional fuels and plant-based ethanol derived from molasses produced by PT Energi Agro Nusantara, a subsidiary of PTPN Group. This initiative aligns with the government's goal to reduce dependence on fossil fuel-based oil.

16 **Juni** | June 16, 2023



Wakil Menteri BUMN I Tinjau Kegiatan Panen Raya Kopi Arabika

Deputy Minister of SOEs I Inspects Arabica Coffee Harvest Event

Kegiatan panen raya kopi arabika PTPN XII ditinjau langsung oleh Pahala Nugraha Mansury Wakil Menteri BUMN I, bersama Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur, Alue Dohong Wamen KLKH, Abdul Ghani Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), dan Jatmiko K. Santosa Direktur PTPN V.

Terdapat areal tanaman kopi arabika produktif yang memiliki luas 3.310 hektar, dan diprediksi akan menghasilkan produksi sebanyak 1.300 ton *green bean* kopi pada tahun ini. Pahala juga turut memastikan budidaya Kopi Ijen dilakukan sesuai dengan standar *Good Agricultural Practices* dan standar *Good Manufacturing Practices* sehingga mampu bersaing secara global.

The Arabica coffee harvest event at PTPN XII was directly inspected by Pahala Nugraha Mansury, Deputy Minister of SOEs I, along with Khofifah Indar Parawansa, Governor of East Java, Alue Dohong, Deputy Minister of KLKH, Abdul Ghani, President Director of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), and Jatmiko K. Santosa, Director of PTPN V.

There is a productive Arabica coffee plantation area covering 3,310 hectares, which is predicted to produce 1,300 tons of green coffee beans this year. Pahala also ensured that Ijen Coffee was cultivated following Good Agricultural Practices and Good Manufacturing Practices standards to compete globally.

13 **Juli |** July 13, 2023



Perkebunan Nusantara Group selenggarakan "AKHLAK *Town Hall Meeting*"

Perkebunan Nusantara Group Organizes "AKHLAK Town Hall Meeting"

Perkebunan Nusantara Group menyelenggarakan "AKHLAK *Town Hall Meeting*" yang diselenggarakan pada Kamis, (13/7). Pada acara tersebut mengusung tema "Peran AKHLAK dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan Berkelanjutan", sebagai Narasumber yaitu Mohammad Abdul Ghani - Direktur Utama Holding PTPN III (Persero) dan turut hadir sebagai *Keynote Speech* yaitu Rachman Ferry Isfianto - Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN dan Erwan Pelawi - Komisaris Independen *Holding* PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Perkebunan Nusantara Group held an "AKHLAK Town Hall Meeting" on Thursday (13/7). The event carried the theme "The Role of AKHLAK in Improving Sustainable Company Performance." Mohammad Abdul Ghani - President Director of Holding PTPN III (Persero) served as the Speaker, while Rachman Ferry Isfianto - Assistant Deputy for Plantation and Forestry Industries of the Ministry of SOEs and Erwan Pelawi - Independent Commissioner of Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) were present as Keynote Speakers.

28 **Juli |** July 28, 2023



Pengapalan Perdana Ekspor *Palm Kernel Meal* (PKM) PTPN Group

Inaugural Shipment of Palm Kernel Meal (PKM) Export by PTPN Group

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menggelar pelepasan ekspor perdana PKM ke Huangpu, Tiongkok, pada Jumat (28/07) di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.

Ekspor perdana PKM ini senilai Rp18,2 miliar. PTPN Group terus melakukan fokus penjualan, tak hanya di pasar domestik, tetapi hingga ke pasar global. Sehingga melalui ekspor ini menjadi momentum bagi PTPN Group untuk menembus pasar ekspor dengan tetap mengedepankan konsep keberlanjutan.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) held the inaugural export release of palm kernel meal to Huangpu, China, on Friday (28/07) at Belawan Port, North Sumatra.

The inaugural export of palm kernel meal is valued at Rp18.2 billion. PTPN Group continues to focus on sales in the domestic market and globally. Thus, this export has become momentum for PTPN Group to penetrate the export market while emphasizing sustainability concepts.

07 **Agustus |** August 07, 2023



Pengapalan Perdana Ekspor Teh Oolong Kerjasama PTPN Group dan Suntory

Inaugural Shipment of Oolong Tea Export Collaboration between PTPN Group and Suntory

PTPN Group berkolaborasi dengan PT Suntory Garuda Beverage melakukan ekspor perdana teh Oolong ke Vietnam untuk Suntory Pepsico Vietnam Beverage. Kolaborasi ini menjadi awal strategis antar kedua korporasi untuk memasok bahan baku berkualitas tinggi bagi minuman *ready-to-drink* (RTD) di seluruh Asia. Selain itu, PTPN juga memperoleh manfaat dari pengetahuan global Suntory dan keahlian sebagai produsen minuman kelas dunia.

Pelepasan ekspor perdana diharapkan membuka peluang bisnis baru bagi PTPN Group, Suntory, dan perusahaan multinasional lainnya, serta membawa manfaat ekonomi bagi negara. Selain itu, mendorong promosi produk-produk teh Indonesia yang berkualitas tinggi ke pasar internasional.

PTPN Group collaborated with PT Suntory Garuda Beverage to export the inaugural shipment of Oolong tea to Vietnam for Suntory Pepsico Vietnam Beverage. This collaboration marks the strategic beginning between the two corporations to supply high-quality raw materials for ready-to-drink (RTD) beverages across Asia. Furthermore, PTPN also benefits from Suntory's global knowledge and expertise as a world-class beverage producer.

The inaugural export release is expected to open new business opportunities for PTPN Group, Suntory, and other multinational companies and bring economic benefits to the country. Moreover, it promotes high-quality Indonesian tea products to the international market.

12 **September |** September 12, 2023



PTPN Group Jalin Kemitraan dalam Pengembangan *Compressed Biomethane Gas* (CBG) Bersama reNIKOLA SDN BHD

PTPN Group Establishes Partnership in Compressed Biomethane Gas (CBG) Development with reNIKOLA SDN BHD

Holding Perkebunan Nusantara melalui anak usahanya, PTPN IV telah menjalin kemitraan dalam pengembangan Compressed Biomethane Gas (CBG) bersama reNIKOLA SDN BHD, salah satu perusahaan energi terbarukan asal Malaysia.

Kerja sama ini dilakukan dalam rangka mengakselerasi implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di PTPN Group. Kemitraan ini tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno dan Direktur reNIKOLA SDN BHD, Lim Beng Guan serta disaksikan oleh Direktur Pemasaran PTPN III (*Holding*) Dwi Sutoro dalam acara seremonial pada 12/9.

Holding Perkebunan Nusantara, through its subsidiary, PTPN IV, has partnered to develop Compressed Biomethane Gas (CBG) with reNIKOLA SDN BHD, a renewable energy company from Malaysia.

This collaboration aims to accelerate the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) in the PTPN Group. The partnership is embodied in a Memorandum of Understanding (MoU) signed by PTPN IV Director Sucipto Prayitno and reNIKOLA SDN BHD Director Lim Beng Guan, witnessed by PTPN III (Holding) Marketing Director Dwi Sutoro at a ceremonial event on 12/9.

18 **Oktober |** October 18, 2023



IPB Berikan Penghargaan Kepada PTPN *Holding* atas Hibah Laboratorium Riset Pengolahan Kelapa Sawit Mini

IPB Awards PTPN Holding for Granting Mini Palm Oil Processing Research Laboratory

Pembangunan PKS mini rencananya akan dilakukan di lahan seluas seribu hektar. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, saat menerima penghargaan dan apresiasi dari Fakultas Pertanian IPB, di kampus IPB, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (18/10).

Penghargaan tersebut diberikan karena PTPN *Holding* telah memberikan hibah berupa pembangunan Laboratorium Riset Pengolahan Kelapa Sawit Mini di Kebun Pendidikan dan Penelitian Kelapa Sawit (KPPS) Institut Pertanian Bogor, di Jonggol, Jawa Barat.

The mini PKS is planned to be constructed on a land area of one thousand hectares. This was conveyed by the President Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, when receiving an award and appreciation from the Faculty of Agriculture IPB, on the IPB campus, Dramaga, Bogor, West Java, on Thursday (18/10).

The award was given because PTPN Holding has provided a grant for constructing a Mini Palm Oil Processing Research Laboratory at the Palm Education and Research Plantation (KPPS) of the IPB University in Jonggol, West Java.

18 **Oktober |** October 18, 2023



Direktorat Jenderal Perkebunan Lakukan Penandatanganan Kerjasama Terhadap Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI)

Directorate General of Plantations Signs Cooperation Agreement with Indonesian Sugar Plantation Research Center (P3GI)

Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan penandatanganan kerjasama terhadap Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) sebagai anak usaha *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang dikelola oleh PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN).

Kerjasama antara P3GI dengan pabrik gula ini terkait penggunaan benih unggul tebu yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan pada (18/10) di Pasuruan, Jawa Timur. P3GI siap mendukung swasembada gula dengan menyediakan benih unggul bersertifikat guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tebu serta produksi gula.

The Directorate General of Plantations signed a cooperation agreement with the Indonesian Sugar Plantation Research Center (P3GI) as a subsidiary of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) managed by PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN).

The cooperation between P3GI and this sugar mills is related to using superior sugarcane seeds facilitated by the Directorate General of Plantations on (18/10) in Pasuruan, East Java. P3GI is ready to support sugar self-sufficiency by providing certified superior seeds to increase sugarcane productivity, quality, and sugar production.

27 **Oktober |** October 27, 2023



Holding Perkebunan PTPN III (Persero) Raih 2 Penghargaan di Ajang Keterbukaan Informasi Publik *Awards* 2023

Holding Perkebunan PTPN III (Persero) Achieves 2 Awards at Public Information Transparency Awards 2023

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sukses raih dua penghargaan di bidang keterbukaan informasi publik, yakni *The Most Interact* BUMN *by Engagement* dan *The Most Anticipated High Engagement*.

Apresiasi tersebut diperoleh PTPN III (Persero) dalam ajang Keterbukaan Informasi Publik *Awards* 2023, yang digelar BUMN Track bekerja sama dengan PT Media Kernels Indonesia (Drone Emprit Publications) dan Bali Post, pada Jumat (27/10) di Ayodya Resort Bali.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) successfully garnered two awards in the field of public information transparency, namely The Most Interactive SOE by Engagement and The Most Anticipated High Engagement.

This appreciation was attained by PTPN III (Persero) at the Public Information Transparency Awards 2023 event, organized by BUMN Track in collaboration with PT Media Kernels Indonesia (Drone Emprit Publications) and Bali Post, on Friday (27/10) at Ayodya Resort Bali.

08 **November |** November 08, 2023



PTPN III (Persero) dan PT PLN (Persero) Jalin Kerja Sama Optimalisasi Energi Terbarukan

PTPN III (Persero) and PT PLN (Persero) Establish Cooperation for Renewable Energy Optimization

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT PLN (Persero) menjalin kerja sama untuk mendukung program yakni *Environmental*, *Social*, and *Governance* (ESG) di Industri Perkebunan melalui penyediaan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini dilakukan pada Rabu (8/11) di Jakarta, bertujuan untuk meningkatkan penyediaan tenaga listrik bagi pabrik kelapa sawit, serta pemanfaatan energi baru terbarukan.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and PT PLN (Persero) have entered into a collaboration to support the Environmental, Social, and Governance (ESG) program in the Plantation Industry through the provision of electricity based on Renewable Energy (EBT).

The signing of the memorandum of understanding (MoU) was conducted on Wednesday (8/11) in Jakarta, aiming to enhance the provision of electricity for palm oil mills and the utilization of renewable energy.

21 **November |** November 21, 2023



PTPN III (Persero) bersama PT RPN Gelar Ekspose Hasil Riset dan Launching Sejumlah Produk Unggulan

PTPN III (Persero) and PT RPN Host Research Results Exhibition and Launching of Several Flagship Products

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama dengan anak usahanya, yakni PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), menggelar ekspos hasil riset dan meluncurkan sejumlah produk unggulan.

Acara yang diselenggarakan pada Selasa (21/11) di Gedung Agro Plaza, Kuningan, Jakarta Selatan, memperlihatkan perkembangan dari 17 riset RPN yang telah mendapat pendanaan oleh *Holding* Perkebunan Nusantara selama periode 2022-2023.

PTPN Group akan menjadi salah satu tumpuan negara untuk mewujudkan swasembada pangan. Rachman Ferry Isfianto, Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN, mengapresiasi upaya riset dan pengembangan yang telah dilakukan PTPN Group.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), along with its subsidiary, PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), organized an exhibition of research results and the launch of several flagship products.

The event, held on Tuesday (21/11) at Agro Plaza Building, Kuningan, South Jakarta, showcased the progress of 17 RPN research projects funded by Holding Perkebunan Nusantara during the 2022-2023 period.

PTPN Group will be one of the mainstays of the nation in achieving food self-sufficiency. Rachman Ferry Isfianto, Assistant Deputy for Plantation and Forestry Industries at the Ministry of SOEs, appreciated the research and development efforts undertaken by PTPN Group.

29 **November |** November 29, 2023



Holding PTPN III (Persero) Raih Penghargaan di Bidang *Human Capital*

Holding PTPN III (Persero) Receives Awards in the Field of Human Capital

Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) kembali sukses meraih prestasi di Bidang Human Capital dengan mendapatkan penghargaan dalam dua ajang sekaligus, yaitu *Human Capital & Performance Awards* 2023 dan *Indonesia Best Companies in Creating Leaders From Within* 2023. Kedua penghargaan tersebut digelar di lokasi terpisah pada (29/11) di Jakarta.

Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) once again successfully achieved accolades in the field of Human Capital by receiving awards in two separate events, namely the Human Capital & Performance Awards 2023 and Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2023. Both awards ceremonies were held on (29/11) in Jakarta.

01 **Desember |** December 01, 2023



Penandatanganan Akta *Merger* dan *Spin Off* Pembentukan *Sub Holding* PTPN IV dan Penandatanganan Akta Merger Pembentukan *Sub Holding* PTPN I

Signing of Merger Deed and Spin-Off Formation of PTPN IV Sub-Holding and Signing of Merger Deed for Formation of PTPN I Sub-Holding

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) resmi mengumumkan terkait penggabungan 13 perusahaan di bawah *Holding* Perkebunan Nusantara, menjadi dua *Sub Holding*, yakni PTPN IV dan PTPN I.

Pembentukan *Subholding* PTPN IV melibatkan penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai *surviving entity* dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV. Sementara *Subholding* PTPN I dibentuk melalui penggabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) officially announced the merger of 13 companies under Holding Perkebunan Nusantara into two Sub-Holdings, PTPN IV and PTPN I.

The formation of the PTPN IV Subholding involves the merger of PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI, and XIII into PTPN IV as the surviving entity and the non-pure separation of PTPN III (Persero) into PTPN IV. Meanwhile, the PTPN I Subholding is formed by merging PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, and XIV into PTPN I.

27 **Desember |** December 27, 2023



Kunjungan Kerja Wakil Menteri BUMN dan Direktur Utama Holding PTPN Tinjau Program Percepatan Gula Nasional

Working Visit of the Deputy Minister of SOEs and President Director of PTPN Holding to Review the National Sugar Acceleration Program

Direktur Utama *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani, mendampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo melakukan kunjungan kerja ke kebun HGU Lumajang PTPN I Regional 4 pada Rabu (27/12).

Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program pasca transformasi, serta strategi bisnis PTPN Group dalam mewujudkan percepatan swasembada gula nasional. Kegiatan dimulai dengan peninjauan langsung ke kebun HGU Lumajang dan dilanjutkan dengan prosesi tanam perdana Kebun Benih Datar 24/25.

President Director of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani, accompanied by Deputy Minister of SOEs Kartika Wirjoatmodjo, conducted a working visit to Lumajang HGU Plantation of PTPN I Regional 4 on Wednesday (27/12).

This visit was carried out to review the implementation of several post-transformation programs and the business strategy of PTPN Group in achieving national sugar self-sufficiency. The activities began with a direct review of the Lumajang HGU plantation and continued with the inaugural planting process of the Datar 24/25 Seed Garden.

Laporan Manajemen

MANAGEMENT REPORT



02



LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



Zulkifli Zaini

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Perkenankan kami sebelumnya untuk menyampaikan rasa syukur kami yang begitu besar kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang mampu membawa *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mampu menorehkan catatan kinerja yang baik sepanjang tahun 2023, di antaranya Perseroan mampu memperoleh *environmental*, *social*, dan *governance* (ESG) *Risk Rating* dari Sustainalytics dengan skor 17,2 (*low risk*). Hal ini menandakan bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dinilai sebagai perusahaan perkebunan terbaik di industrinya dalam menerapkan prinsip ESG.

Pelaksanaan peran strategis di Perseroan dipenuhi Dewan Komisaris melalui kewajiban pengawasan dan pemberian nasihat yang diperlukan Direksi dengan menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan penuh kehati-hatian untuk kebaikan Perseroan.

Sepanjang tahun 2023, dinamika ekonomi global tercatat berubah dengan cepat dengan ketidakpastian yang tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh fragmentasi geopolitik-ekonomi dunia yang meningkat dengan adanya perang Rusia di Ukraina yang menyebabkan keterbatasan pasokan serta tetap tingginya harga energi dan pangan global. Di samping itu, ketegangan Israel dan Palestina sejak awal Oktober 2023 menambah ketegangan geopolitik di Kawasan Timur Tengah dan dunia. Hal ini memberikan dampak pada proses pemulihan ekonomi global melambat di tengah berlanjutnya tekanan inflasi terhadap harga energi dan pangan dunia serta keketatan pasar tenaga kerja di sejumlah negara maju. Proses pemulihan ekonomi global juga dipengaruhi oleh permasalahan perubahan iklim, struktur demografi, dan digitalisasi. Kondisi iklim dunia, utamanya di Kawasan Asia yang dilanda kekeringan akibat El Nino mengharuskan otoritas untuk menyediakan pasokan dan ketersedian pangan sehingga dampak inflasi dan pemulihan ekonomi dapat cepat teratasi.

Meskipun ekonomi global berpotensi besar melambat, Laporan Perekonomian Bank Indonesia menjelaskan bahwa kinerja dan prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Namun demikian, produk domestik bruto (PDB) yang berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Secara umum industri perkebunan di tanah air terdampak ditandai dengan menurunnya ekspor produk CPO dan PKO dan turunnya harga rata-rata harga kelapa sawit selama tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Allow us first to express our profound gratitude to the Almighty for His abundant blessings, grace, and protection that have enabled PTPN III (Persero) Plantation Holding to achieve commendable performance throughout the year 2023. Among these achievements is the acquisition of an environmental, social, and governance (ESG) Risk Rating from Sustainalytics, scoring 17.2 (low risk). This signifies that PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is recognized as the premier plantation company in its industry for adhering to ESG principles.

The Board of Commissioners has fulfilled its strategic role within the Company through diligent oversight and necessary advisement to the Board of Directors, upholding the highest standards of integrity, responsibility, and prudence for the benefit of the Company.

Throughout 2023, the global economic dynamics underwent rapid changes amidst high uncertainty. This condition was influenced by the escalating geopolitical-economic fragmentation worldwide, notably due to the Russian conflict in Ukraine leading to supply constraints and persistently high global energy and food prices. Additionally, tensions between Israel and Palestine since early October 2023 heightened geopolitical tensions in the Middle East region and globally. This had an impact on the global economic recovery process, slowing down amidst continued inflationary pressures on energy and food prices globally, as well as tight labor markets in several advanced economies. The global economic recovery process was also influenced by climate change issues, demographic structures, and digitalization. The global climate conditions, especially in the Asian region affected by El Nino-induced droughts, necessitated authorities to ensure food supply and availability to quickly address inflationary impacts and economic recovery.

Although the global economy potentially faces a significant slowdown, the Bank Indonesia Economic Report indicates that Indonesia's economic performance and prospects remain preserved. The Central Statistics Agency (BPS) notes that Indonesia's economy grew by 5.05% in 2023, a decrease compared to the 5.31% growth achieved in 2022. Nevertheless, the gross domestic product (GDP) originating from the agriculture, forestry, and fisheries sectors experienced a decline in 2023 compared to the previous year. Overall, the domestic plantation industry was impacted, as evidenced by the decrease in exports of CPO and PKO and the decline in average palm oil prices during 2023 compared to 2022.

Di sisi lain, Pemerintah mengimplementasi kebijakan Biodiesel (B35) yang secara efektif dilakukan pada bulan Juli 2022 telah meningkatkan konsumsi minyak sawit sebesar 17,68% yakni dari 9,05 juta ton pada tahun 2022 menjadi 10,65 juta ton di tahun 2023. Dengan diimplementasikannya B35, konsumsi biodiesel selama 2023 telah melampaui konsumsi untuk pangan dalam negeri. Kondisi global maupun domestik pada tahun 2023, telah mempengaruhi kinerja PT Perkebunan Nusantara III (Persero) diantaranya adanya penurunan *gross margin* yang cukup signifikan dari 34,4% menjadi 25,0%.

Sampai dengan akhir tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan masukan untuk berbagai aspek, seperti kelanjutan program-program strategis perusahaan seperti transformasi dan restrukturisasi; penguatan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) beserta manajemen risiko dan pengendalian internal; peningkatan produktivitas; penguatan strategi pemasaran untuk komoditi non sawit yang perlu diformulasikan lebih tepat; peningkatan *cash flow from operation*; transformasi digital; mewujudkan investasi yang memenuhi asas tepat guna dan tepat waktu; mitigasi risiko; tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri BUMN; pelaksanaan penyerapan dana dan pelaksanaan program dari PMN tahun 2015 dan IP PEN secara tepat guna; serta merencanakan, melaksanakan, dan memonitor penyaluran dana TJSL *Holding* maupun anak perusahaan secara efektif dan terpusat.

On the other hand, the government's implementation of the Biodiesel (B35) policy, effectively enacted in July 2022, resulted in a 17.68% increase in palm oil consumption, from 9.05 million tons in 2022 to 10.65 million tons in 2023. With the implementation of B35, biodiesel consumption during 2023 surpassed domestic food consumption. The global and domestic conditions in 2023 have influenced the performance of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), including a significant decrease in gross margin from 34.4% to 25.0%.

By the end of 2023, the Board of Commissioners provided advice and input on various aspects, such as the continuation of strategic corporate programs like transformation and restructuring; strengthening the implementation of good corporate governance (GCG) principles along with risk management and internal control; enhancing productivity; refining marketing strategies for non-palm oil commodities; improving cash flow from operations; digital transformation; achieving timely and efficient investments; risk mitigation; following up on the implementation of the Minister of SOEs Regulations; precise utilization of funds and implementation of programs from the 2015 State Capital Injection and IP PEN; and effectively planning, executing, and monitoring the distribution of CSR funds from both the Holding and its subsidiaries in a centralized manner.

FUNGSI PENGAWASAN DAN HUBUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI

Dewan Komisaris merupakan organ yang bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan di Perseroan. Pengawasan ini mencakup banyak aspek, antara lain adalah laporan-laporan Direksi terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan RKAP tahun 2023 dan hasil pencapaiannya. Fungsi pengawasan serta fungsi dan peran lainnya senantiasa dijalankan oleh Dewan Komisaris dengan profesional, independen, dan selalu berlandaskan nilai-nilai GCG. Dalam mengawasi kegiatan usaha Perseroan, Dewan Komisaris terus memegang teguh komitmennya untuk tetap proaktif, terutama pada hal-hal seperti tahap perencanaan strategis, penyusunan dan pelaksanaan rencana bisnis, evaluasi kinerja, hingga penerapan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris juga mencakup tinjauan hasil kinerja Perseroan yang diraih pada setiap periode tertentu. Seluruh tinjauan tersebut disampaikan Dewan Komisaris pada Direksi dalam mekanisme rapat bersama, yang mana rapat ini juga menjadi media bagi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan langsung atas pengelolaan Perseroan secara keseluruhan. Di tahun 2023,

SUPERVISORY FUNCTION AND WORKING RELATIONSHIP WITH THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners is responsible for the supervisory function within the Company. This supervision encompasses various aspects, including the Directors' reports, particularly regarding implementing the 2023 Work Plan and Budget (RKAP) and its outcomes. The Board of Commissioners consistently performs its supervisory and other functions with professionalism, independence, and a firm foundation in GCG values. In overseeing the Company's business activities, the Board of Commissioners remains committed to being proactive, particularly in strategic planning, business plan preparation and implementation, performance evaluation, and the application of risk management and Good Corporate Governance principles.

The duties of the Board of Commissioners also include reviewing the Company's performance results at each specified period. All such reviews are conveyed to the Board of Directors in joint meetings, which serve as a platform for direct oversight of the Company's overall management. In 2023, the joint meetings with the Board of Directors were held 52 times. The Board of Commissioners not only focuses

rapat bersama dengan Direksi telah terselenggara sebanyak 52 kali. Tidak hanya berfokus dalam peninjauan pada periode tertentu, Dewan Komisaris juga tetap melakukan pengawasan berkala secara langsung untuk memastikan bahwa pengawasan telah memenuhi tingkat kecukupan dan mengevaluasi kesesuaian dari proses dan hasil kinerja dengan ketentuan dan persyaratan yang ada.

on reviewing specific periods but also conducts regular direct oversight to ensure that the supervision meets adequacy levels and evaluates the suitability of processes and performance outcomes with existing provisions and requirements.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA DIREKSI

Di dalam organisasi, Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi serta memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan dan pengurusan bisnis Perseroan. Salah satu tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha PTPN III telah berjalan konsisten dengan rencana bisnis Perseroan serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di semua unit organisasi. Di samping itu, pengawasan juga memiliki tujuan untuk melihat lebih rinci hasil kerja yang tercapai di tahun 2023 sebagai bentuk sistem peringatan dini serta untuk memverifikasi lebih lanjut bahwa implementasi sistem pengendalian internal telah berpengaruh signifikan pada perolehan kinerja *Holding* Perkebunan Nusantara.

BOARD OF COMMISSIONER'S VIEWS ON THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Within the organization, the Board of Commissioners is tasked with overseeing and advising the Board of Directors on the management and administration of the company's business. One of the purposes of this oversight is to ensure that PTPN III's business activities are consistently aligned with the company's business plan and adhere to the principles of Good Corporate Governance (GCG) across all organizational units. Additionally, oversight aims to delve into the detailed achievements of the year 2023 as an early warning system and to further verify that the implementation of internal control systems has significantly impacted the performance of Holding Perkebunan Nusantara.

Kinerja keuangan Perseroan di tahun 2023 mencatatkan hasil yang masih belum memenuhi target RKAP. Dari sisi pendapatan penjualan, hasil terealisasi sampai dengan Desember 2023 mencapai Rp50,98 triliun, sedikit mengalami penurunan dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp55,86 triliun. Sementara dari sisi laba konsolidasi setelah pajak, *Holding* Perkebunan berhasil membukukan hasil sebesar Rp1,02 triliun, menurun jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp6,02 triliun. PTPN III menjadi penyumbang laba sebelum pajak terbesar dengan perolehan mencapai Rp2,36 triliun.

The financial performance of the company in 2023 recorded results that still fell short of the RKAP target. In terms of sales revenue, the realized results up to December 2023 reached Rp50.98 trillion, experiencing a slight decline from the 2022 realization of Rp55.86 trillion. Meanwhile, in terms of consolidated profit after tax, Holding Perkebunan managed to achieve results of Rp1.02 trillion, declining compared to the 2022 realization of Rp6.02 trillion. PTPN III contributed the largest pre-tax profit, with earnings reaching Rp2.36 trillion.

Kondisi ekonomi global dan nasional tahun 2023 secara tidak langsung turut memberikan pengaruh kepada kinerja Perseroan selain dari sisi kondisi internal Perseroan secara keseluruhan. Kondisi internal, baik dari sisi kinerja operasional dan keuangan masih perlu dilakukan pengembangan terhadap kecepatan dan keandalan data yang disampaikan sehingga mampu memberikan dukungan yang optimal kepada manajemen dalam mengambil langkah-langkah mitigasi risiko yang optimal untuk tetap bisa mencapai kinerja perusahaan yang baik.

The global and national economic conditions in 2023 indirectly influenced the Company's performance, in addition to the internal aspects of the Company as a whole. Internally, improvements are still needed in operational and financial performance, particularly in terms of the speed and reliability of data conveyed, to provide optimal support to management in taking optimal risk mitigation steps to maintain good company performance.

Dari sisi operasional area, areal tanaman keseluruhan yang dimiliki Perseroan didominasi oleh areal tanaman kelapa sawit dengan luas mencapai 559.577,36 ha. Sementara areal lainnya seperti tanaman karet memiliki luas 121.976,70 ha, areal konsesi teh seluas 23.637,23 ha, serta areal tebu yang

From operational perspective, the Company's plantations are predominantly palm oil, covering an area of 559,577.36 ha. Additionally, other areas include rubber plantations totaling 121,976.70 ha, tea concession areas comprising 23,637.23 ha, and sugarcane areas harvested up to December 2023

ditebang sampai dengan Desember 2023 adalah seluas 179.293,6 ha. Komoditi kelapa sawit menjadi kontributor porsi penjualan periode tahun 2023 terbesar dengan persentase mencapai 64,63% dari total penjualan yang diraih Perseroan.

Kondisi disparitas produktivitas komoditas utama yang masih tinggi telah menjadi perhatian utama Dewan Komisaris untuk dilakukan minimasi ke arah yang lebih baik. Contohnya, produktivitas CPO berkisar 3,07 ton/ha-5,70 ton/ha, produktivitas tebu sendiri 13,2 ton/ha-107,8 ton/ha, produktivitas karet 434 kg/ha-1.222 kg/ha, dan produktivitas teh 1.348 kg/ha-2.831 kg/ha. Pengawasan yang kuat baik secara langsung dan berjenjang atas kinerja unit kebun/pabrik dan Anak Perusahaan masih perlu dioptimalkan secara *ajek* dan berkelanjutan untuk memastikan inisiatif strategis yang dibangun perusahaan telah terimplementasikan secara tertib, tercapai dengan kualitas dan tepat waktu, serta sesuai dengan kaidah tata kelola perusahaan yang baik.

Kinerja operasional dan keuangan tahun 2023 secara umum belum memberikan performa yang optimal untuk *shareholder* dan *stakeholder* Perseroan yang ditandai dengan realisasi masih di bawah target bahkan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Meski demikian, Perseroan masih tetap melaksanakan inisiatif strategis untuk mendukung pelaksanaan penyehatan perusahaan sehingga mampu memenuhi kewajiban Perseroan.

Saat ini, Perseroan masih bertumpu pada kinerja 4 (empat) komoditas utama yaitu Kelapa Sawit, Karet, Gula dan Teh dengan *areal statement* masing-masing yang tidak mengalami perubahan signifikan. Di sisi lain, total produksi dan produktivitas tanaman tahun 2023, seperti produksi TBS 12.231 ribu ton dengan produktivitas 20,71 ton/ha, produksi Karet 131 ribu ton dengan produktivitas 1.033 kg/ha, produksi Gula 752 ribu ton dengan produktivitas 4,20 ton/ha dan produksi Teh 42,8 ribu ton dengan produktivitas 1.814 kg/ha, menunjukan penurunan dibandingkan tahun lalu akibat pengaruh kekeringan. Luasnya areal yang ditanami (*planted area*) perusahaan yang harus dijaga dan dikelola secara optimal menuntut penerapan digitalisasi proses bisnis untuk monitoring kinerja unit kebun/pabrik maupun anak perusahaan agar tereksekusi dengan baik, tepat kualitas dan waktu, serta sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dukungan penerapan *reward & punishment* yang tegas, adil dan konsisten di lapangan diharapkan mampu mendorong perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Secara umum industri perkebunan mengalami penurunan, demikian halnya dengan kinerja keuangan. Kondisi ini sangat berkorelasi positif terhadap kinerja operasional. Dewan Komisaris terus mendorong pencapaian kinerja operasional

covering 179,293.6 ha. Palm oil commodities contributed the most significant portion of sales in 2023, representing 64.63% of the Company's total sales.

The high disparity in productivity among the main commodities has been a primary concern for the Board of Commissioners to be minimized towards better outcomes. For instance, the productivity of CPO ranges from 3.07 tons/ha to 5.70 tons/ha, sugarcane productivity ranges from 13.2 tons/ha to 107.8 tons/ha, rubber productivity from 434 kg/ha to 1,222 kg/ha, and tea productivity from 1,348 kg/ha to 2,831 kg/ha. Strong and hierarchical supervision over the performance of plantation/mill units and subsidiaries needs to be optimized comprehensively and sustainably to ensure that the company's strategic initiatives are implemented systematically, achieved with quality and timeliness, and aligned with good corporate governance principles.

Overall, the operational and financial performance in 2023 has not yet delivered optimal results for the Company's shareholders and stakeholders, marked by realizations below targets and even experiencing a decline compared to 2022. However, the Company continues to implement strategic initiatives to support the company's recovery efforts to meet its obligations.

Currently, the Company still relies on the performance of its 4 (four) main commodities, namely Palm Oil, Rubber, Sugar, and Tea, with no significant changes in their respective planted areas. On the other hand, the total production and productivity of crops in 2023, such as crude palm oil production of 12.231 thousand tons with a productivity of 20.71 tons/ha, rubber production of 131 thousand tons with a productivity of 1,033 kg/ha, sugar production of 752 thousand tons with a productivity of 4.20 tons/ha, and tea production of 42.8 thousand tons with a productivity of 1,814 kg/ha, showed a decrease compared to the previous year due to drought effects. The extensive planted area that needs to be well-maintained and managed demands the implementation of business process digitalization for monitoring the performance of plantation/mill units and subsidiaries to be executed well, with appropriate quality and timing, and in line with good corporate governance practices. The support for the implementation of firm, fair, and consistent reward and punishment measures in the field is expected to drive performance improvements in the coming year.

In general, the plantation industry has experienced a decline, as reflected in the financial performance. This condition is highly positively correlated with operational performance. The Board of Commissioners continues to push for achieving

PTPN Grup baik *on farm* maupun *off farm* dapat sesuai *benchmark* serta meningkatkan kinerja keuangan dengan mengendalikan biaya dan meningkatkan profit.

Di tahun 2023, Dewan Komisaris melihat bahwa Perseroan masih menghadapi sejumlah tantangan di tengah masa-masa pemulihan ini. Beberapa tantangan yang menurut Dewan Komisaris masih berpengaruh cukup besar pada pencapaian produktivitas hasil kebun Perseroan antara lain seperti pencapaian hasil yang belum sesuai target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disebabkan berbagai kondisi, keadaan cuaca yang tidak mendukung seperti curah hujan yang cukup tinggi, pemeliharaan tanaman di kebun yang tidak optimal sesuai yang diharapkan, masih adanya kondisi alam yang berpengaruh seperti gugur daun, keterbatasan tenaga kerja penyadap, kapasitas mesin giling inclusive yang tidak mencapai target, aplikasi pupuk rendah, dan pemeliharaan yang belum optimal. Kendati demikian, Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dinilai mampu melaksanakan mitigasinya dengan mengelola dan mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai langkah strategis. Hal tersebut tergambar dari perolehan kinerja finansial dan operasional Perseroan yang cukup terjaga secara baik sepanjang tahun 2023. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Direksi dan keputusan-keputusan yang diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Dewan Komisaris juga menilai Direksi telah mampu mengelola potensi risiko dan ketidakpastian yang hadir sepanjang bisnis Perseroan berjalan. Melalui implementasi sistem manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi, Perseroan dapat menjaga kestabilan usaha dan mencegah potensi risiko negatif.

Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan pengelolaan Perseroan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mematuhi anggaran dasar maupun regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/3/2024 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, terhadap perumusan dan implementasi strategi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Pelaksanaan *cascading* Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ke dalam masing-masing unit kerja kebun/pabrik maupun Anak Perusahaan berikut *Key Performance Indicator* (KPI) nya serta penetapan penanggung jawabnya diperlukan untuk memudahkan Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara langsung dan secara berjenjang.

Dewan Komisaris terus berperan aktif melakukan pengawasan untuk memastikan implementasi strategis

operational performance within PTPN Group, both on-farm and off-farm, to meet benchmarks and improve financial performance by controlling costs and increasing profits.

In 2023, the Board of Commissioners observed that the Company faced several challenges amid recovery efforts. Some challenges that, according to the Board of Commissioners, significantly impacted the productivity of the Company's plantation results include achieving yields that did not meet the targets set in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) due to various conditions, unfavorable weather conditions such as high rainfall, suboptimal plantation maintenance as expected, remaining environmental conditions affecting such as leaf drop, limited tapping labor force, insufficient capacity of grinding machines inclusive of not reaching targets, low fertilizer application, and suboptimal maintenance. Despite these challenges, the Board of Directors, as the organ responsible for the Company's management, was deemed capable of mitigating these issues through various strategic measures. This is reflected in the Company's financial and operational performance, which remained fairly stable throughout 2023. The Board of Commissioners appreciates the efforts and decisions the entire Board of Directors made to address these challenges.

The Board of Commissioners also assesses that the Board of Directors has successfully managed potential risks and uncertainties encountered during the Company's operations. The Company has maintained business stability and prevented potential risks by implementing a comprehensive and integrated risk management system.

The Board of Commissioners also oversees the management of the Company by prioritizing good governance principles, complying with the articles of association and applicable regulations, such as Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/3/2024 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, regarding the formulation and implementation of strategies in the Company's Work Plan and Budget as well as the Long-Term Company Plan. The cascading implementation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) into each plantation/mill unit and Subsidiary along with its Key Performance Indicators (KPIs) and the designation of responsible parties are necessary to facilitate the Board of Directors and Board of Commissioners in conducting direct and hierarchical supervision.

The Board of Commissioners continues to actively play a role in supervision to ensure that the Company's strategic

Perseroan dieksekusi dengan baik, tepat kualitas dan waktu, serta sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris secara umum dilakukan dengan mekanisme rapat dengan Direksi maupun kunjungan kerja ke unit kerja kebun/pabrik maupun Anak Perusahaan. Mekanisme rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dilakukan bulanan/sewaktu waktu untuk mendapatkan informasi kinerja yang update secara keseluruhan, kinerja per masing-masing direktorat dan kinerja Anak Perusahaan, maupun informasi aksi korporasi yang memerlukan tanggapan ataupun persetujuan Dewan Komisaris. Informasi yang diperoleh Dewan Komisaris akan menjadi bahan telaah yang dirumuskan untuk menjadi sebuah arahan/nasihat maupun rekomendasi tanggapan/persetujuan atas aksi korporasi yang dapat dilaksanakan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Adapun evaluasi kinerja bulanan sepanjang tahun 2023 juga telah dilakukan dan telah menjadi agenda rutin dengan topik mengenai:

- Pelaksanaan rencana kerja dan realisasi kinerja operasional di bidang produksi dan pengembangan, bidang pemasaran, bidang SDM, hukum dan lain sebagainya;
- Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja keuangan bulanan perusahaan secara konsolidasi maupun per Anak Perusahaan;
- Pemberian saran dan nasihat Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Perusahaan.

Setelah melihat hasil kerja Direksi secara kolektif di tahun 2023 dalam mencapai tujuan usaha, Dewan Komisaris mendorong seluruh jajaran Direksi untuk senantiasa mengedepankan partisipasi aktif dalam memenuhi standar RKAP dan/atau kriteria lainnya. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris memandang bahwa seluruh jajaran Direksi telah bekerja secara optimal dan telah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik selama tahun buku 2023.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Bank Dunia atau *World Bank* memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 berada pada level 4,9%. Kondisi ekonomi Tiongkok yang mengalami perlambatan dikhawatirkan akan memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Meski terbilang lebih rendah dari target APBN, tetap ada optimisme bahwa pertumbuhan Indonesia terjaga di angka 5%. Membaiknya kondisi global seperti salah satunya perekonomian Amerika Serikat yang terus pulih menjadi pemicu dari optimisme ini.

implementation is executed well, with appropriate quality and timing, and in line with good corporate governance practices. Supervision by the Board of Commissioners is generally carried out through meeting mechanisms with the Board of Directors and work visits to plantation/mill units and Subsidiaries. Board of Commissioners' meetings with the Board of Directors are conducted monthly or as needed to obtain updated performance information overall, performance per directorate, Subsidiary performance, and information on corporate actions requiring the Board of Commissioners' response or approval. The information obtained by the Board of Commissioners becomes the basis for formulation into guidance/advice or recommendations for responses/approvals to corporate actions that can be implemented with good corporate governance principles.

Monthly performance evaluations throughout 2023 have also been conducted and have become a routine agenda with topics including:

- Implementation of work plans and operational performance realization in production and development, marketing, HR, legal aspects, and others;
- Factors influencing monthly financial performance achievements of the company on a consolidated basis and per Subsidiary;
- Provision of advice and guidance from the Board of Commissioners regarding efforts to improve Company performance.

After reviewing the collective performance of the Board of Directors in 2023 towards achieving business objectives, the Board of Commissioners encourages the entire Board of Directors to consistently participate actively in meeting RKAP standards and/or other criteria. Overall, the Board of Commissioners believes that all members of the Board of Directors have worked optimally and have fulfilled their duties and responsibilities exceptionally well during the fiscal year 2023.

OUTLOOK ON THE BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The World Bank predicts that Indonesia's economic growth in 2024 will be 4.9%. The economic slowdown in China is a concern that may affect Indonesia's financial conditions. Despite being lower than the state budget target, there is optimism that Indonesia's growth will be maintained at 5%. Improved global conditions, such as the continued recovery of the U.S. economy, contribute to this optimism.

Menurut penilaian Dewan Komisaris, tahun 2024 masih harus dipandang sebagai tahun yang memiliki peluang kendati kondisi masih dipenuhi dengan tantangan. Melihat situasi ini, Dewan Komisaris memandang bahwa Perseroan harus memiliki optimisme yang tinggi dalam menyambut tahun 2024. Dari prospek usaha Direksi untuk tahun 2024 yang terangkum dalam rencana kerja Perseroan, Dewan Komisaris menilai bahwa hal tersebut telah tersusun dengan baik dan selaras dengan visi dan misi serta tujuan Perseroan untuk periode jangka pendek maupun panjang.

According to the Board of Commissioners, 2024 should still be a year with opportunities despite the challenges. Considering this situation, the Board of Commissioners believes the Company should have high optimism in welcoming 2024. From the business prospects outlined by the Board of Directors for 2024 in the Company's work plan, the Board of Commissioners assesses that these plans are well-prepared and aligned with the Company's vision, mission, and short-term and long-term goals.

Perseroan masih memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan produksi CPO dan juga gula dengan potensi ada peningkatan *demand* dalam negeri dan luar negeri, meskipun tipis untuk CPO. Potensi larangan CPO Indonesia untuk masuk ke pasar Eropa dirasa tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor Perseroan karena PTPN masih memiliki potensi pasar di India dan Tiongkok.

The Company still has significant opportunities to increase the production of Crude Palm Oil (CPO) and sugar, with the potential for increased demand both domestically and internationally, albeit marginally for CPO. The potential ban on Indonesian CPO entering the European market is not expected to significantly impact the Company's export performance as PTPN still has market potential in India and China.

Selain itu, Perseroan juga masih memiliki peluang besar untuk melakukan pengembangan pada komoditas CPO dan gula dengan memasuki industri hilirisasi dalam mendukung program pemerintah terutama untuk pengembangan Biodiesel, pengembangan Bioetanol, pengembangan bisnis *carbon trade*.

Furthermore, the Company also has substantial opportunities to develop its CPO and sugar commodities by entering downstream industries to support government programs, especially in the development of Biodiesel, Bioethanol, and carbon trade businesses.

Dari sisi bisnis gula saat ini dan ke depan, Perseroan masih akan memberikan kontribusi yang besar untuk pemenuhan *supply* di dalam negeri, terutama untuk *supply* konsumsi rumah tangga dan bisa juga untuk konsumsi industri. Peningkatan produktivitas dan areal diharapkan bisa meningkat sejalan dengan pelaksanaan program *operational excellence*.

Regarding the sugar business, the Company is expected to continue making significant contributions to domestic supply, especially for household consumption and potentially for industrial consumption as well, both currently and in the future. Increased productivity and land area are anticipated to rise in line with the implementation of operational excellence programs.

Secara khusus, Direksi di tahun 2024 juga telah memiliki kebijakan strategis atas prospek usaha yang mencakup optimalisasi portofolio *& operational excellence*; *commercial excellence* & ekspansi hilir; optimalisasi aset & kemitraan strategis; pengembangan kapabilitas & budaya; serta peningkatan sistem & teknologi. Seluruh strategi tersebut juga telah diselaraskan serta dipetakan sesuai prioritas strategis Kementerian BUMN.

Specifically, in 2024, the Board of Directors has formulated strategic policies regarding business prospects that encompass portfolio optimization & operational excellence; commercial excellence & downstream expansion; asset optimization & strategic partnerships; capability development & culture; and system & technology enhancement. All of these strategies have been aligned and mapped according to the strategic priorities of the Ministry of State-Owned Enterprises.

Dewan Komisaris pun meyakini bahwa prospek tersebut telah disusun dengan pertimbangan panjang mengenai asumsi, prospek bisnis, dan peluang Perseroan dalam industri perkebunan di Indonesia tahun 2024. Dewan Komisaris mengapresiasi prospek usaha yang telah disusun tersebut dengan harapan dapat membawa Perseroan menuju pertumbuhan usaha yang menjanjikan. Pengawasan dan dukungan akan senantiasa diberikan oleh Dewan Komisaris

The Board of Commissioners also believes that these prospects have been developed with careful consideration of assumptions, business prospects, and opportunities for the company in Indonesia's plantation industry in 2024. The Board of Commissioners appreciates the formulated business prospects with the hope that they will lead the company towards promising business growth. Oversight and support will be continuously provided by the Board of Commissioners

dalam menunjang pencapaian peluang usaha dan menjaga posisi Perseroan dalam memberikan nilai kepada Indonesia.

Perseroan berambisi untuk menciptakan kinerja yang unggul serta sustainable melalui pembentukan *subholding* yang terjadi saat ini. Tahun 2024 memberikan tantangan perusahaan untuk bisa melaksanakan program bisnis pasca pembentukan *subholding*, utamanya melaksanakan turn around pada Anak Perusahaan maupun komoditas yang masih memberikan kerugian. Pembentukan *subholding* ini akan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan *turn around* kinerja pada PTPN I dan PT Sinergi Gula Nusantara, terutama dari sisi pengendalian biaya perusahaan (*cash cost*).

PENGAWASAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris memandang Perseroan memegang teguh komitmennya untuk senantiasa menerapkan praktik terbaik GCG di tahapan proses bisnis perusahaan. Pedoman tata kelola perusahaan edisi 5 telah menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan, baik dalam aspek Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), pelaksanaan RUPS, pendelegasian wewenang RUPS, pelaksanaan benturan kepentingan, pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan operasional, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan tata kelola teknologi dan informasi, hingga etika dan anti korupsi.

Seiring dengan perubahan regulasi pada tahun 2023, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan, manajemen telah seoptiomal mungkin mempedomaninya dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan, khususnya dalam pelaksanaan aksi korporasi Perseroan. Di sisi lain, manajemen juga mempersiapkan pemenuhan infrastruktur pendukung yang diperlukan secara bertahap untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri BUMN tersebut, seperti persiapan pemenuhan terhadap organ pengelola risiko.

Dalam hal implementasi GCG, Dewan Komisaris sangat berharap Perseroan dapat memiliki budaya sadar GCG. Perseroan juga memiliki *reward & punishment* yang jelas, tegas dan konsisten terhadap tingkat pelaksanaan GCG, manajemen melakukan program pengembangan dan pelatihan untuk SDM di Induk maupun Anak Perusahaan untuk peningkatan pemahaman GCG, serta perlunya monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan GCG secara berkala.

to support business opportunity achievement and maintain the company's position in delivering value to Indonesia.

The Company is ambitious in creating superior and sustainable performance through the formation of a Subholding that is currently taking place. The year 2024 presents challenges for the company to execute post-formation business programs, primarily focusing on turning around subsidiaries and commodities that are still causing losses. The establishment of this Subholding will facilitate the company in improving performance at PTPN I and PT Sinergi Gula Nusantara, particularly in terms of controlling company costs (cash cost).

SUPERVISION OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners views the Company as steadfast in its commitment to consistently apply best practices of GCG throughout the stages of the company's business processes. The Corporate Governance guidelines edition 5 have been the management's guide in implementing company management, covering aspects such as the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Long-Term Company Plan (RJPP), GMS implementation, delegation of authority by GMS, conflict of interest management, health and safety management, operational management, human resource management, financial management, risk management, technology and information governance, and ethics and anti-corruption.

With regulatory changes in 2023, notably the issuance of Minister of SOEs Regulation Number PER-2/MBU/3/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities, management has optimally adhered to it in implementing company management, particularly in the execution of corporate actions. On the other hand, management has also been preparing the gradual fulfillment of necessary supporting infrastructure to comply with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation, such as preparing for risk management organization fulfillment.

Regarding GCG implementation, the Board of Commissioners strongly hopes that the Company can foster a GCG-conscious culture. The Company also has clear, firm, and consistent reward and punishment systems for GCG implementation levels. Management is conducting development and training programs for both the Parent Company and Subsidiaries' human resources to enhance understanding of GCG. There is also a need for regular monitoring and evaluation of GCG implementation effectiveness.

Dalam bidang SDM, pada tahun 2023 Perseroan memiliki pegawai sejumlah 86.737 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 4.846 orang atau sekitar 5,29% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 91.583 orang sebagai dampak dari penerapan kebijakan *zero growth* yang konsisten dilakukan. Kebijakan tersebut dipandang perlu untuk merasionalisasi jumlah SDM per Ha (*land to man ratio*) dan meningkatkan efisiensi biaya umum yang saat ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan *benchmark* agar lebih kompetitif. Di sisi lain, Dewan Komisaris terus mendorong memberikan rekomendasi terhadap penerapan *reward and punishment* yang baik mengingat hal tersebut merupakan kunci dalam mengelola perilaku karyawan dan menciptakan budaya perusahaan "AKHLAK".

In terms of Human Resources, in 2023, the Company had 86,737 employees. This number decreased by 4,846 people, or approximately 5.29% of the previous year's total of 91,583 people due to the consistent implementation of a zero growth policy. This policy is deemed necessary to rationalize the number of employees per hectare (land to man ratio) and improve general cost efficiency, which is currently higher compared to benchmarks to enhance competitiveness. Additionally, the Board of Commissioners continues to encourage recommendations for effective reward and punishment implementation as it is key in managing employee behavior and fostering the company's "AKHLAK" culture.

Sementara pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pelaksanaan TJSL Perseroan senantiasa berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan pada tahun 2023 telah memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, masyarakat lokal, serta karyawan perkebunan PTPN. Hal ini untuk mendukung strategi perusahaan dalam implementasi nilai-nilai ESG sehingga memperoleh *rating* sebagai perusahaan terbaik di dunia dengan risiko ESG terendah menurut Sustainalytics. Strategi ini dapat memperkuat reputasi BUMN Perkebunan sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta meningkatkan daya saing jangka panjang dalam industri perkebunan.

Regarding Social and Environmental Responsibilities (TJSL), the Company's TJSL implementation consistently adheres to Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-01/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises. The utilization of the company's Corporate Social Responsibility (CSR) in 2023 has had a positive impact on the environment, local communities, and PTPN plantation employees. This supports the company's strategy in implementing ESG values, thus earning a rating as the best company in the world with the lowest ESG risk according to Sustainalytics. This strategy can strengthen the reputation of the State-Owned Plantation as a socially and environmentally responsible business entity, enhancing long-term competitiveness in the plantation industry.

PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

Menurut Dewan Komisaris, *Whistleblowing System* (WBS) memegang peranan penting sebagai sarana yang membantu Perseroan menjalankan implementasi dan penegakan GCG. Proses ini penting bagi Perseroan karena dapat mewujudkan budaya perusahaan yang positif dengan makna sehat, kuat, dan bersih serta membangun sekaligus menjaga citra dan reputasi Perseroan. Untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dari penegakan WBS, Perseroan menetapkan parameter dalam laporan yang dapat diambil tindakan oleh tim pengelola WBS Perseroan. Jenis laporan yang dapat dilaporkan mencakup penyimpangan kode etik/perilaku dan peraturan Perseroan, benturan kepentingan, kecurangan, korupsi, dan penipuan. Di luar laporan-laporan tersebut, Perseroan juga menerima laporan mengenai tindakan lainnya yang dilarang seperti pemerasan, penggelapan, suap, dan juga gratifikasi. Adanya cakupan yang luas untuk jenis-jenis

ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN MANAGING THE WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

The Board of Commissioners believes that the Whistleblowing System (WBS) is crucial in helping the Company implement and enforce GCG principles. This process is vital for the Company as it fosters a positive corporate culture characterized by health, strength, and integrity while also building and maintaining the Company's image and reputation. To ensure the efficiency and effectiveness of WBS enforcement, the Company has established parameters for reportable incidents that the WBS management team can address. Reportable incidents include violations of the code of ethics/conduct and Company regulations, conflicts of interest, fraud, corruption, and embezzlement. The Company also accepts reports of other prohibited actions, such as extortion, bribery, and gratuities. The broad scope of these reportable incidents demonstrates the Company's commitment to promoting a positive work environment

laporan tersebut menunjukkan komitmen Perseroan untuk terus mengedepankan pencapaian lingkungan kerja yang positif melalui pelaksanaan WBS.

through implementing WBS.

Kesuksesan WBS tercermin dari konsistensi dan kelangsungan implementasinya oleh sebuah perusahaan. Guna merealisasikannya, Perseroan memastikan WBS senantiasa disosialisasikan secara menyeluruh sehingga seluruh individu dapat memahami dan menyamakan persepsi atas filosofi dan manfaat dari implementasi WBS. Komitmen ini telah dimulai oleh Perseroan sejak kegiatan *capacity building* untuk Karyawan Baru dengan menjadikan materi WBS sebagai bahan pendidikannya.

The success of the WBS is reflected in its consistent and ongoing implementation by a company. To achieve this, the Company ensures that the WBS is thoroughly communicated so that all individuals understand and align their perceptions with the philosophy and benefits of WBS implementation. The Company has initiated this commitment through capacity-building activities for new employees, incorporating WBS materials into their education.

Perseroan telah memiliki infrastruktur yang cukup baik untuk menjalankan WBS secara optimal melalui media *website* wbs.holding-perkebunan.com demi terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik, menjaga nilai nilai etika bisnis maupun kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Perusahaan terus melakukan penguatan pengelolaan WBS diantaranya melalui kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dilakukan sejak tahun 2020. Dewan Komisaris juga memiliki peran aktif mendukung pelaksanaan WBS melalui penciptaan keterbukaan kepada seluruh stakeholder perusahaan, baik internal dan eksternal perusahaan, untuk menyampaikan pendapat dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan yang berkinerja unggul dan akuntabel.

The Company has established a robust infrastructure to efficiently execute the Whistleblowing System (WBS) through the website wbs.holding-perkebunan.com, aiming to achieve good corporate governance, uphold business ethics, and comply with applicable regulations. The Company continues to strengthen WBS management, including through cooperation with the Corruption Eradication Commission (KPK) since 2020. The Board of Commissioners actively supports the implementation of WBS by fostering transparency to all internal and external stakeholders, allowing them to express their opinions in realizing superior and accountable corporate management.

Secara umum, pengelolaan WBS yang sudah baik ini harus terus ditingkatkan dengan melaksanakan evaluasi tindak lanjut terhadap hal-hal yang menjadi perhatian para stakeholder dan telah disampaikan kepada perusahaan baik secara langsung maupun melalui Dewan Komisaris.

Overall, the effective management of the WBS should be further improved by conducting follow-up evaluations on issues raised by stakeholders and communicated to the company directly or through the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris meyakini WBS merupakan salah satu infrastruktur penting dalam penerapan dan penegakan GCG, termasuk membangun kultur perusahaan yang sehat, kuat, dan bersih sehingga meningkatkan citra dan reputasi Perseroan. PTPN III memberikan batasan dalam pelaporan yang berpotensi untuk ditindaklanjuti oleh tim yang mengelola WBS. PTPN III (Persero) memiliki kebijakan dan mekanisme *whistleblowing* serta media pelaporan pengaduan pelanggaran dengan nama *Whistleblowing System* Terintegrasi. Aplikasi ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero). WBS terintegrasi mendorong awareness dan kepedulian seluruh pegawai serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Pelapor dapat menyampaikan laporan melalui surat, SMS/WA, email, dan aplikasi WBS.

The Board of Commissioners believes that WBS is a crucial infrastructure in the application and enforcement of GCG, including building a healthy, strong, and clean corporate culture to enhance the Company's image and reputation. PTPN III sets limits on reporting that have the potential to be followed up by the WBS management team. PTPN III (Persero) has policies and mechanisms for whistleblowing and a reporting mechanism for violations called the Integrated Whistleblowing System. This application aims to build and improve the effectiveness and efficiency of handling complaints internally and externally, integrating them professionally, transparently, accountably, and prioritizing confidentiality to optimize the eradication of corruption within PT Perkebunan Nusantara III (Persero). The integrated WBS promotes awareness and concern among all employees and enhances the company's reputation in the eyes of stakeholders. Reporters can submit reports via mail, SMS/WhatsApp, email, and the WBS application.

Ukuran Keberhasilan dari WBS adalah sistem ini diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan oleh Perseroan. Dewan Komisaris senantiasa berperan aktif dalam hal pengawasan implementasi WBS di lingkungan Perseroan, di antaranya memastikan bahwa sosialisasi WBS berjalan dengan baik di lingkup *Holding*.

The success measure of WBS is its consistent and continuous implementation by the Company. The Board of Commissioners actively oversees the implementation of WBS within the Company, ensuring that WBS socialization is conducted effectively within the Holding.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris turut terlibat dalam pengawasan implementasi pelaporan *fraud* yang telah berjalan, meliputi prosedur pencegahan, deteksi dan identifikasi, investigasi dan pelaporan, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Dewan Komisaris mengevaluasi pelaksanaan WBS melalui rapat internal maupun gabungan antara Dewan Komisaris, Direksi maupun komite di bawah supervisi Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara berkala dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ke depan, sistem pengelolaan WBS dapat ditingkatkan melalui sistem teknologi informasi yang semakin terencana, handal, dan terintegrasi.

During 2023, the Board of Commissioners was involved in supervising the implementation of fraud reporting, covering prevention, detection and identification procedures, investigation and reporting, as well as evaluation and follow-up actions. The Board of Commissioners evaluates the implementation of WBS through internal meetings and joint meetings involving the Board of Commissioners, the Board of Directors, and committees under the Board of Commissioners' supervision, held regularly and documented in accordance with applicable regulations. Moving forward, the WBS management system can be enhanced through increasingly planned, reliable, and integrated information technology systems.

PENGAWASAN PADA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sebagai organ pengawas, Dewan Komisaris turut bertanggung jawab dalam pemantauan sekaligus peninjauan efektivitas manajemen risiko di Perseroan. Manajemen risiko menjadi landasan vital yang berpengaruh penting dalam menjaga kelangsungan dan kesehatan kinerja Perseroan. Menurut Dewan Komisaris, Perseroan di tahun 2023 telah mampu menjalankan manajemen risiko dengan maksimal melalui strategi proaktif yang mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, hingga mengatasi berbagai risiko sehingga tidak membawa dampak negatif pada pencapaian tujuan Perseroan.

SUPERVISION OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

As a supervisory body, the Board of Commissioners is also responsible for monitoring and reviewing the effectiveness of risk management within the Company. Risk management is a vital foundation that significantly influences the continuity and health of the Company's performance. According to the Board of Commissioners, the Company has effectively implemented risk management in 2023 through proactive strategies that identify, evaluate, manage, and address various risks, preventing negative impacts on the Company's objectives.

Dewan Komisaris memahami bahwa di dalam lingkungan bisnis Perseroan yang dinamis dan kompleks, timbul berbagai risiko dari berbagai bidang. Secara khusus di tahun 2023, Perseroan telah mengidentifikasi risiko dan memperoleh 10 profil risiko yang masuk dalam berbagai kategori, seperti makro, geopolitik, dan pasar; operasional; keuangan; hukum dan kepatuhan; serta strategis. Untuk bidang-bidang tersebut, Perseroan telah melakukan berbagai perlakuan risiko yang disesuaikan dengan kategori risiko serta identifikasi risiko. Sampai dengan akhir tahun 2023, seluruh risiko tersebut telah ditangani dengan perlakuan risiko yang sesuai dengan kategori dan sasaran risiko.

The Board of Commissioners understands that the Company's dynamic and complex business environment presents various risks across different fields. Specifically, in 2023, the Company identified and obtained 10 risk profiles that fall into various categories such as macro, geopolitical, and market; operational; financial; legal and compliance; as well as strategic. For these areas, the Company has implemented various risk treatments tailored to the risk categories and risk identification. By the end of 2023, all of these risks have been managed with risk treatments aligned with the categories and risk objectives.

Selama pelaksanaan manajemen risiko Perseroan, Dewan Komisaris senantiasa memastikan manajemen risiko telah diintegrasikan secara menyeluruh pada semua tingkatan

During the risk management implementation, the Board of Commissioners ensures that risk management is integrated across all organizational levels, from executive to operational.

organisasi, mulai dari tingkat eksekutif hingga operasional. Selain itu, Dewan Komisaris juga memastikan manajemen risiko tidak hanya bersifat reaktif terhadap risiko yang sudah ada, namun juga proaktif dalam mengantisipasi serta menangani risiko-risiko potensial yang mungkin terjadi.

Perseroan terus melakukan pengembangan berkelanjutan untuk penerapan manajemen risiko di tahun 2023 dari tahun tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan implementasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan PER-3/MBU/3/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Perseroan dihadapkan pada tantangan dalam pelaksanaan manajemen risiko untuk menciptakan insan *planter* yang sadar risiko serta menciptakan efektivitas manajemen risiko yang optimal dalam mengawal penciptaan kinerja Perseroan. Pendisiplinan dan monitoring terhadap pelaksanaan mitigasi risiko pelaksanaan inisiatif strategis dan program kinerja Perseroan di *Holding*, *Subholding*, dan Anak Perusahaan baik dari unit kerja *holding* sampai ke unit kerja terkecil di kebun/pabrik untuk mendukung penciptaan kinerja Perseroan masih menjadi area yang harus dilakukan pengembangan. Selain itu, pemenuhan organ pengelola risiko juga menjadi bagian yang harus segera dipenuhi oleh Perseroan untuk mendukung pengawasan kinerja *Holding*, *Subholding*, dan Anak Perusahaan yang lebih optimal.

Dewan Komisaris mendorong Direksi beserta seluruh pihak untuk terus memprioritaskan penanganan dan penyelesaian risiko-risiko yang muncul untuk menjaga kelangsungan aktivitas usaha secara jangka panjang. Penerapan manajemen risiko diharapkan menjadi bagian penting yang difokuskan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di Perseroan sehingga dapat mendukung optimalisasi pemberian nilai bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Additionally, the Board of Commissioners also ensures that risk management is not only reactive to existing risks but also proactive in anticipating and addressing potential risks that may arise.

The Company continues its sustainable development for risk management implementation in 2023 compared to previous years, while adhering to the implementation of Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and PER-3/MBU/3/2023 concerning Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises.

The Company faces challenges in risk management implementation to cultivate risk-aware planter personnel and achieve optimal risk management effectiveness in overseeing the Company's performance. Disciplining and monitoring the implementation of risk mitigation, strategic initiatives, and performance programs within the Holding, Subholding, and Subsidiaries—from the holding unit to the smallest unit in the plantations/mills to support the Company's performance creation—remain areas for development. Additionally, fulfilling the risk management organization is also crucial for the Company to enhance the oversight of Holding, Subholding, and Subsidiaries' performance more effectively.

The Board of Commissioners encourages the Board of Directors and all parties to prioritize handling and resolving emerging risks to maintain long-term business activities. The implementation of risk management is expected to remain a critical focus in fulfilling the Company's duties and responsibilities, thereby supporting the optimization of value delivery to shareholders and all stakeholders.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas pengarahan, pengawasan, pemantauan dan pemberian nasihat atas jalannya pengelolaan perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh empat Komite Penunjang Dewan Komisaris. Keempat Komite tersebut adalah Komite audit, Komite Remunerasi dan nominasi, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Pemantau Risiko.

PERFORMANCE EVALUATION OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out the duties of direction, supervision, monitoring, and advisory on the management of the company, the Board of Commissioners is assisted by four Supporting Committees of the Board of Commissioners. These four Committees are the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Monitoring Committee, and Risk Monitoring Committee.

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite telah memiliki kewenangan dan akses yang cukup dan memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tugas-tugasnya secara efektif, termasuk akses terhadap informasi yang diperlukan dan bertindak independen dalam merumuskan rekomendasi serta melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris. Komite telah berfungsi secara efektif dalam membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pengurusan perseroan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki meliputi bidang keuangan, agronomi, manajemen risiko, legal serta kepatuhan.

Untuk menjaga kualitas kerja para organ pendukung tersebut, Dewan Komisaris melaksanakan mekanisme penilaian. Evaluasi kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi dijalankan melalui analisis kualitatif yang meliputi tingkat partisipasi dalam tugas, proses dokumentasi, dan substansi rekomendasi yang disampaikan.

Pemberian saran/nasihat oleh Dewan Komisaris dilakukan pada saat pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah rapat serta ketika melakukan kunjungan kerja Dewan Komisaris kebun, pabrik dan unit lainnya. Di samping itu, pemberian saran/nasihat selama tahun 2023 dilakukan melalui surat Dewan Komisaris kepada Direksi sebanyak kurang lebih 120 surat.

Secara umum pemberian nasihat Dewan Komisaris meliputi evaluasi kinerja bulanan yang terdiri dari aspek operasional, keuangan dan manajemen risiko. Dewan Komisaris juga memberikan nasihat terhadap kebijakan manajemen di bidang Sumber Daya *On Farm* maupun *Off Farm* serta beberapa isu strategis menyangkut Kinerja Dana Pensiun Perkebunan, Penyelesaian Penanaman Modal Negara 2015 dan Investasi Pemerintah Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Penyusunan dan penetapan anggota Dewan Komisaris Perseroan dipastikan selalu dilakukan secara cermat untuk mewujudkan kehadiran organ Dewan Komisaris yang dapat bekerja secara efektif, tepat, cepat, dan mampu bertindak independen.

Di tahun 2023, terdapat perubahan pada komposisi Dewan Komisaris yang tercatat dan diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-394/MBU/12/2023 tanggal 19 Desember 2023.

The Board of Commissioners assesses that the Committees have sufficient authority and access and utilize these to effectively carry out their duties, including access to necessary information and acting independently in formulating recommendations and reporting periodically to the Board of Commissioners. The Committees have functioned effectively in assisting the Board of Commissioners in performing oversight functions on the management of the company in accordance with their knowledge and experience in areas such as finance, agronomy, risk management, legal, and compliance.

To maintain the quality of work of these supporting bodies, the Board of Commissioners implements an evaluation mechanism. The performance evaluation of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee is conducted through qualitative analysis, covering the level of participation in duties, documentation processes, and the substance of recommendations provided.

The Board of Commissioners provides advice during the conduct of Board and Board of Directors meetings, documented in meeting minutes, and during the Board of Commissioners' visits to plantations, mills, and other units. Additionally, advice throughout the year 2023 was provided by the Board of Commissioners to the Board of Directors through approximately 120 letters.

In general, the advice from the Board of Commissioners includes monthly performance evaluations encompassing operational, financial, and risk management aspects. The Board of Commissioners also advises on management policies related to On Farm and Off Farm Resources as well as strategic issues concerning the Performance of the Plantation Pension Fund, Completion of the 2015 State Capital Investment, and Government Investment in the National Economic Recovery Program.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The selection and appointment of the Company's Board of Commissioners are always conducted meticulously to establish a Board of Commissioners that can work effectively, accurately, swiftly, and independently.

In 2023, there were changes in the composition of the Board of Commissioners as recorded and regulated based on Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-394/MBU/12/2023 dated December 19, 2023.

Per 31 Desember 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang telah melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Pemegang Saham. Uji kelayakan dan kepatutan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah didukung oleh integritas, kualifikasi, reputasi yang bersih dari afiliasi atau potensi konflik kepentingan lain, serta memiliki pengalaman dan keahlian yang diperlukan guna memenuhi perannya masing-masing di Perseroan.

Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023, all 7 (seven) members of the Board of Commissioners have undergone a fit and proper test conducted by the Shareholders. This fit and proper test is conducted with the aim of ensuring that all serving members of the Board of Commissioners are supported by integrity, qualifications, a clean reputation free from affiliations or potential conflicts of interest, as well as the necessary experience and expertise to fulfill their respective roles in the Company.

The composition and structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2023 are as follows:

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023
Composition and Structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Remarks
Zulkifli Zaini	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-398/MBU/12/2021 Decree of the Minister of SOEs No. SK-398/MBU/12/2021	10 Desember 2021-10 Desember 2026 December 10, 2021 – December 10, 2026
Asep Subarkah Yusuf	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-56/MBU/02/2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-56/MBU/02/2020	26 Februari 2020-26 Februari 2025 February 26 , 2020 – February 26, 2025
Wisto Prihadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-282/MBU/08/2021 Decree of the Minister of SOEs No. SK-282/MBU/08/2021	25 Agustus 2021-25 Agustus 2026 August 25, 2018-August 25, 2026
Ardan Adiperdana	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-86/MBU/03/2022 Decree of the Minister of SOEs No. SK-86/MBU/03/2022	25 Maret 2022-25 Maret 2027 March 25, 2022-March 25, 2027
Alhilal Hamdi	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-3/MBU/01/2023 Decree of the Minister of SOEs No. SK-3/MBU/01/2023	4 Januari 2023-4 Januari 2028 January 4, 2023-January 4, 2028
Suyus Windayana	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-394/MBU/12/2023 Decree of the Minister of SOEs No. SK-394/MBU/12/2023	19 Desember 2023-19 Desember 2028 December 19, 2023-December 19, 2028
Tsamara Amany Alatas	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-394/MBU/12/2023 Decree of the Minister of SOEs No. SK-394/MBU/12/2023	19 Desember 2023-19 Desember 2028 December 19, 2023-December 19, 2028

Kami mengapresiasi keputusan yang diambil Perseroan yang menunjukkan kepercayaan kepada komitmen Dewan Komisaris dalam memajukan laju bisnis. Komitmen penuh terus dipegang oleh Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab ini dengan selalu memprioritaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berkualitas demi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya.

We appreciate the decisions made by the Company, which demonstrate trust in the commitment of the Board of Commissioners to advancing the business. The Board of Commissioners remains fully committed to fulfilling these responsibilities, always prioritizing high-quality corporate governance principles for the benefit of Shareholders and other relevant Stakeholders.

PENUTUP

Kami selaku jajaran Dewan Komisaris *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Direksi, Manajemen, dan segenap Karyawan yang telah memberikan semangat, dedikasi, hingga kontribusi nyata yang diberikan sepanjang tahun 2023 sehingga mampu mendukung Perseroan mencapai hasil yang signifikan. Tak lupa kami juga ingin menyampaikan penghargaan kepada seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan untuk segala dukungan dan kepercayaan kepada Perseroan selama ini. Kiranya komitmen kita bersama untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan masih akan terus menginspirasi kita untuk terus melangkah ke depan dan secara konsisten memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan bangsa ini.

CLOSING

We, the Board of Commissioners of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), extend our gratitude and appreciation to the entire Board of Directors, Management, and all Employees for their enthusiasm, dedication, and tangible contributions throughout 2023, enabling the Company to achieve significant results. We would also like to express our appreciation to all Shareholders and Stakeholders for their ongoing support and trust in the Company. May our shared commitment to sustainable growth inspire us to move forward and consistently contribute meaningfully to the nation's progress.

Jakarta, 31 Mei 2024
Jakarta, May 31, 2024



Zulkifli Zaini

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner

LAPORAN DIREKSI
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS



Mohammad Abdul Ghani

Direktur Utama
President Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Perkenankan kami sebagai perwakilan segenap Manajemen *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa mempersembahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab Perseroan kepada Para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan yang terlibat. Diberdayakan oleh dukungan luar biasa dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemilik saham mayoritas Perseroan, *Holding* Perkebunan dengan keyakinan penuh telah siap memberikan kinerja yang positif secara berkelanjutan.

Dalam laporan ini, kami selaku Direksi akan menyampaikan hasil pengelolaan Perseroan yang kami jalankan melalui implementasi kebijakan strategis, pelaksanaan praktik tata kelola, hingga pelaksanaan rencana dan strategi bisnis sepanjang tahun 2023.

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

With heartfelt gratitude to God Almighty, we, as representatives of the entire Management of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), are pleased to present the Annual Report for the fiscal year 2023. This report manifests the Company's commitment to fulfilling its responsibilities to Shareholders and all involved Stakeholders. Empowered by the extraordinary support from State-Owned Enterprises (SOEs) as the Company's majority shareholder, the Holding Perkebunan is confidently poised to deliver sustainable positive performance.

In this report, the Board of Directors will present the results of the Company's management through the implementation of strategic policies, governance practices, and the execution of business plans and strategies throughout 2023.

Analisa Makro Ekonomi

Menutup tahun 2023 yang masih diliputi dengan berbagai tantangan ekonomi global mulai dari potensi perlambatan ekonomi, peningkatan tensi geopolitik, risiko inflasi, hingga perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan IV-2023 justru kembali mencatatkan angka solid sebesar 5,04% (yoy) atau lebih tinggi dari Triwulan III-2023 yang tumbuh sebesar 4,94% (yoy). Secara *full year*, pertumbuhan ekonomi nasional di sepanjang tahun 2023 juga mencatatkan yang mengesankan sebesar 5,05% (ctc).

Secara lebih rinci, capaian positif pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan IV-2023 tersebut ditopang dengan penguatan kinerja sejumlah komponen pada sektor lapangan usaha. Tercatat, sektor konstruksi mampu tumbuh sebesar 7,68% (yoy) dan menjadi kontributor pertumbuhan terbesar kedua setelah industri pengolahan yang memiliki capaian sebesar 4,07 (yoy).

Selain itu, pertumbuhan ekonomi secara *full year* tahun 2023 yang menunjukkan kinerja impresif juga ditopang oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,82% (yoy), serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencapai 4,40% (yoy). Lebih lanjut dari sisi lapangan usaha, sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan yakni transportasi dan pergudangan sebesar 13,96% (yoy). Sedangkan pada sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh konsumsi Lembaga *Non-Profit* Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 9,83% (yoy).

Terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB, serta meningkatnya pertumbuhan sektor konstruksi

Macroeconomic Analysis

Closing the year 2023, which was still marked by various global economic challenges ranging from the potential economic slowdown, increasing geopolitical tensions, inflation risks, and climate change, the national economic growth in the fourth quarter of 2023 recorded a solid figure of 5.04% (yoy), higher than the 4.94% (yoy) growth in the third quarter of 2023. For the full year, national economic growth in 2023 also impressively recorded 5.05% (ctc).

More specifically, the positive national economic growth in the fourth quarter of 2023 was supported by the strengthening performance of several components in the business sector. Notably, the construction sector grew by 7.68% (yoy) and became the second-largest contributor to growth after the manufacturing industry, which achieved 4.07% (yoy).

Additionally, the impressive full-year economic growth in 2023 was supported by household consumption expenditure, which grew by 4.82% (yoy), and Gross Fixed Capital Formation (PMTB), which reached 4.40% (yoy). Furthermore, from a business sector perspective, the transportation and warehousing sector experienced significant growth at 13.96% (yoy). On the expenditure side, the highest growth was seen in Non-Profit Institutions Serving Households (LNPRT) consumption, which grew by 9.83% (yoy).

The sustained growth in household consumption and PMTB, along with the increased growth in the construction sector, is

tersebut merupakan implikasi dari upaya yang telah dijalankan Pemerintah dalam menstimulasi perekonomian nasional pada Triwulan IV-2023 lalu, seperti stimulus sektor perumahan melalui kebijakan PPN Perumahan Ditanggung Pemerintah dan pemberian subsidi biaya administrasi bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, penebalan bantuan sosial (bansos) untuk mitigasi El Nino dan menjaga daya beli, serta akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk penguatan UMKM.

a result of the Government's efforts to stimulate the national economy in the fourth quarter of 2023. These efforts include housing sector stimulus through the Government-Borne VAT policy, subsidies for administrative costs for housing for Low-Income Communities, increased social assistance to mitigate El Nino and maintain purchasing power, and the acceleration of People's Business Credit (KUR) disbursement to strengthen MSMEs.

Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia juga terus mengalami penguatan dengan dominasi kontribusi terbesar kepada PDB nasional berasal dari Pulau Jawa yakni mencapai 57,05%. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga dicapai oleh Provinsi Maluku Utara 20,49% dan Sulawesi Tengah 11,91%, yang ditopang oleh kinerja industri pengolahan logam dasar sebagai implikasi dari kebijakan hilirisasi.

Spatially, all regions in Indonesia continued to strengthen, with the most significant contribution to the national GDP coming from Java Island, reaching 57.05%. North Maluku also achieved significant economic growth at 20.49% and Central Sulawesi at 11.91%, supported by the performance of the primary metal processing industry as an implication of downstream policies.

Dengan berbagai capaian kondisi perekonomian nasional tersebut, Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang tumbuh kuat dan persisten berada di level yang tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2023 mampu melampaui beberapa negara *peers* seperti Malaysia (3,77%) dan Korea Selatan (1,36%), serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi negara G-20 seperti Amerika Serikat (2,5%), Perancis (0,9%) maupun Jerman yang mengalami kontraksi (-0,3%).

With these national economic achievements, Indonesia has become one of the countries that is growing strongly and persistently at a high level compared to several other countries. The national economic growth throughout 2023 surpassed peer countries such as Malaysia (3.77%) and South Korea (1.36%) and was higher than the economic growth of G-20 countries such as the United States (2.5%), France (0.9%), and Germany, which experienced contraction (-0.3%).

Ke depan, prospek perekonomian nasional juga dinilai masih akan memiliki capaian optimal dengan ditunjukkan oleh angka PMI Manufacturing Indonesia yang terus berada di level ekspansif pada Januari 2024 sebesar 52,9. Hal tersebut memberikan optimisme bahwa geliat ekonomi nasional semakin membaik, dan menjadi modal bagi pencapaian target ekonomi mendatang seiring dengan proyeksi perbaikan ekonomi global. Dengan proyeksi yang ada, berbagai lembaga memprediksi pertumbuhan Indonesia sampai tahun 2025 seperti International Monetary Fund (IMF) masih memprediksi pertumbuhan di angka 5%, World Bank antara 4,9%-5%, dan OECD di angka 5,2%, jauh di atas rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan di atas pertumbuhan ekonomi *emerging market* seperti Tiongkok.

The national economic outlook is still expected to achieve optimal results, as indicated by Indonesia's Manufacturing PMI remaining at an expansive level of 52.9 in January 2024. This provides optimism that the national economy is improving and serves as a foundation for achieving future economic targets in line with global economic recovery projections. Various institutions predict Indonesia's growth until 2025, with the International Monetary Fund (IMF) forecasting growth at 5%, the World Bank between 4.9% and 5%, and the OECD at 5.2%, far above the average global economic growth projection and above emerging markets like China.

Guna memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi ke depan, sejumlah kebijakan prioritas telah disiapkan Pemerintah, seperti revitalisasi mesin konvensional melalui peningkatan produktivitas dan daya saing dengan Program Kartu Pra Kerja, pelatihan vokasi, dan implementasi UU Cipta Kerja, pembangunan infrastruktur dengan melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan MRT dan kereta cepat, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Ibu Kota Nusantara (IKN), serta Reforma Agraria, perluasan kerjasama internasional, dan penguatan ketahanan pangan.

To ensure future economic stability and resilience, the Government has prepared several priority policies, such as revitalizing conventional engines through productivity and competitiveness enhancement with the Pre-Employment Card Program, vocational training, and the implementation of the Job Creation Law, infrastructure development by continuing National Strategic Projects (PSN), MRT and high-speed train construction, Special Economic Zones (KEK), Nusantara Capital City (IKN), and Agrarian Reform, expanding international cooperation, and strengthening food security.

Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong mesin perekonomian baru melalui digitalisasi, transisi energi berkelanjutan, industrialisasi dengan hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi. Selanjutnya, penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga akan dilakukan Pemerintah melalui berbagai perlindungan sosial termasuk menjaga daya beli masyarakat rentan, pembiayaan mikro, dan padat karya tunai.

Kontribusi kontestasi politik pemilu terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan IV-2023 juga dapat terlihat dari pertumbuhan konsumsi Lembaga *Non-Profit* Rumah Tangga (LNPRT) yang melejit mencapai dua digit hingga sebesar 18,11% (yoy) yang didominasi berasal dari *spending* politik seiring diselenggarakannya rangkaian kegiatan pemilu tersebut.

Sementara itu, perekonomian dunia di tahun 2023 dipandang masih memiliki risiko perlambatan. Beberapa lembaga dunia memproyeksikan bahwa ekonomi global mengalami stagnan dan berlanjutnya moderasi inflasi. IMF dalam laporan WEO Januari 2024 memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global berada di level 3,1%. Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya berada di kisaran 2,6%. Sementara dari sisi inflasi, IMF memproyeksikan tahun 2023 masih mencatatkan inflasi yang tinggi yakni 6,8%.

Adanya beberapa faktor seperti peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah hingga pergesekan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang belum sepenuhnya reda masih memberikan pengaruh yang sangat besar pada perekonomian global saat ini.

Sementara perekonomian global berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya positif, perekonomian nasional mampu mempertahankan kondisinya dengan pencapaian yang cukup solid. Sebagaimana disampaikan Badan Pusat Statistik dalam berita resminya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 mencapai persentase 5,05%. Walaupun sedikit lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2022 sebesar 5,31%, pencapaian di tahun 2023 tersebut masih dinilai positif karena tetap stabil di kisaran angka 5%.

Analisa Segmen Industri

Sisi produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak sawit kernel (PKO) Indonesia di tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,15% dan 5,56% dari tahun sebelumnya menjadi 50,07 juta ton dan 4,77 juta ton. Beberapa faktor dinilai menjadi komponen yang mempengaruhi kenaikan ini, termasuk di antaranya adalah minyak sawit dengan harga tinggi yang memicu adanya pembenihan kebun dan perluasan areal tanaman.

Furthermore, the Government will promote new economic drivers through digitalization, sustainable energy transition, and industrialization downstream to increase financial value. The Government will also strengthen social resilience and community economic empowerment through various social protections, including maintaining the purchasing power of vulnerable communities, micro-financing, and cash-for-work programs.

The contribution of the election political contestation to economic growth in the fourth quarter of 2023 is also evident from the significant increase in Non-Profit Institutions Serving Households (LNPRT) consumption, which soared to double digits, reaching 18.11% (yoy), dominated by political spending in line with the election activities.

Meanwhile, the global economy in 2023 is still perceived to face a slowdown risk. Several global institutions project that the global economy will experience stagnation and continued moderate inflation. The IMF, in its January 2024 WEO report, estimates that global economic growth will be at 3.1%. The World Bank also projects global economic growth to be around 2.6%. On the inflation side, the IMF forecasts that 2023 will still record high inflation at 6.8%.

The presence of several factors, such as the escalation of geopolitical tensions in the Middle East and ongoing friction between Russia and Ukraine that has not fully subsided, continues to have a significant impact on the global economy at present.

While the global economy remains less favorable, the national economy has maintained its condition with solid achievements. As the Central Statistics Agency reported in its official release, Indonesia's economic growth 2023 reached 5.05%. Although slightly lower than the 2022 growth of 5.31%, the achievement in 2023 is still considered positive as it remains stable at around 5%.

Industrial Segment Analysis

The production side of Indonesia's crude palm oil (CPO) and palm kernel oil (PKO) in 2023 is projected to increase by 7.15% and 5.56%, respectively, from the previous year, reaching 50.07 million tons and 4.77 million tons. Several factors are considered to be components influencing this increase, including high palm oil prices triggering plantation seeding and expansion of plantation areas.

Dari sisi konsumsi dalam negeri juga terpantau mengalami peningkatan menjadi 23,13 juta ton di tahun 2023 dari sebelumnya 21,24 juta ton di tahun 2022. Pendorong utama peningkatan ini terutama berasal dari implementasi kebijakan biodiesel (B35) dengan konsumsi biodiesel meningkat secara signifikan dan melebihi pemakaian untuk kebutuhan pangan domestik.

On the domestic consumption side, there is also an observed increase to 23.13 million tons in 2023 from 21.24 million tons in 2022. The main driver of this increase primarily stems from implementing biodiesel policies (B35), with biodiesel consumption increasing significantly and surpassing usage for domestic food needs.

Kendati terpantau mengalami peningkatan dari sisi produksi dan konsumsi, bagian ekspor minyak sawit Indonesia mencatatkan adanya penurunan sebesar 32,21 juta ton atau setara dengan 2,38%. Dilihat dari tujuan ekspor, Uni Eropa (EU) menjadi tujuan dengan penurunan ekspor terbesar dengan persentase mencapai 11,6%, sedangkan ekspor ke beberapa negara lain seperti Afrika, Tiongkok, India, dan Amerika Serikat (AS) justru masih mencatatkan adanya kenaikan signifikan.

Despite the observed increase in production and consumption, Indonesian palm oil exports recorded a decrease of 32.21 million tons, equivalent to 2.38%. Regarding export destinations, the European Union (EU) experienced the most significant export decline, with a percentage reaching 11.6%. In contrast, exports to other countries, such as Africa, China, India, and the United States (US), still significantly increased.

Nilai ekspor Indonesia juga mengalami penurunan menjadi US$30,32 miliar di tahun 2023 dari US$39,07 miliar di tahun 2022 yang terdampak dari menurunnya harga rata-rata kelapa sawit di pasar internasional, terutama di Ciff Rotterdam. Kendati terdapat penurunan, produk CPO dan PKO Indonesia memiliki stok akhir yang tetap diperkirakan cukup stabil dengan kisaran jumlah 3,14 juta ton.

Indonesia's export value also decreased to US$30.32 billion in 2023 from US$39.07 billion in 2022, affected by the decline in the average price of palm oil in the international market, especially in Ciff Rotterdam. Despite the decrease, Indonesian CPO and PKO products maintain a stable end stock of around 3.14 million tons.

Meski produksi dan konsumsi minyak sawit meningkat, adanya penurunan pada ekspor dan harga di pasar internasional membawa tantangan baru terutama di tahun-tahun mendatang bagi industri kelapa sawit Indonesia.

Although palm oil production and consumption are increasing, the decline in exports and prices in the international market brings new challenges for the Indonesian palm oil industry, especially in the coming years.

Saat ini, *Holding* Perkebunan mencakup anak perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing. Areal tanaman keseluruhan *Holding* didominasi oleh areal tanaman kelapa sawit seluas 559.577,36 ha, areal tanaman karet seluas 121.976,70 ha, areal konsesi teh 23.637,23 ha serta areal tebu yang ditebang sampai dengan Desember 2023 seluas 179.293,6 ha. Pencapaian produktivitas TBS kelapa sawit realisasi sampai dengan Desember 2023 sebesar 20,71 ton/ha atau 89,78% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 23,07 ton/ha dan 95,49% dari periode yang sama tahun 2022 sebesar 21,69 ton/ha. Hal ini disebabkan oleh masih terdapat *losses* di lapangan khususnya brondolan yang tertinggal di lapangan, pemeliharaan tanaman tidak optimal sesuai yang diharapkan, sarana infrastruktur jalan, jembatan, saluran air dan sarana pendukung panen.

Holding Perkebunan encompasses subsidiary companies in palm oil, rubber, sugarcane, tea, coffee, tobacco, cocoa, and their respective downstream products. The total plantation area of the Holding is dominated by oil palm plantations covering 559,577.36 hectares, rubber plantations covering 121,976.70 hectares, tea concession areas covering 23,637.23 hectares, and sugar cane areas cleared until December 2023 covering 179,293.6 hectares. The realized productivity of oil palm fresh fruit bunches (FFB) until December 2023 is 20.71 tons/ha or 89.78% of the budgeted target of 23.07 tons/ha and 95.49% compared to the same period in 2022, mainly due to losses in the field, particularly unharvested fruit bunches, suboptimal plant maintenance, and inadequate infrastructure support such as roads, bridges, water channels, and harvest support facilities.

Pencapaian produktivitas karet kering realisasi sampai dengan Desember 2023 sebesar 1.033 kg/ha atau mencapai 78,54% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 1.315 kg/ha dan 95,89% dari realisasi periode yang sama tahun 2022 sebesar 1.077 kg/ha. Tidak tercapainya produktivitas karet kering kebun sendiri terutama disebabkan antara lain adanya serangan penyakit daun *Pestalotiopsis* sp, masih terdapat kondisi gugur daun, penggalian produksi yang belum optimal, curah hujan yang tidak mendukung, dan keterbatasan tenaga kerja penyadap.

The realized productivity of dry rubber until December 2023 is 1,033 kg/ha or 78.54% of the budgeted target of 1,315 kg/ha and 95.89% compared to the same period in 2022. The unattained productivity of own rubber plantations is mainly due to factors such as attacks of Pestalotiopsis sp leaf disease, the presence of leaf fall conditions, suboptimal production excavation, unsupportive rainfall, and limited tapping labor.

Realisasi produktivitas tebu per hektar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 58,3 ton/ha atau mencapai 81,06% terhadap RKAP yang dianggarkan tahun 2023 sebesar 71,9 ton/ha dan 78,42% terhadap realisasi produktivitas tebu pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 74,3 ton/ha. Terdapat beberapa catatan antara lain cuaca yang tidak mendukung, kualitas tebangan yang belum optimal, dan kapasitas giling inklusif yang tidak mencapai target.

The realized productivity of sugar cane per hectare until December 2023 is 58.3 tons/ha or 81.06% of the budgeted target of 71.9 tons/ha for 2023 and 78.42% compared to the productivity in the same period the previous year at 74.3 tons/ha. Some contributing factors include unfavorable weather, suboptimal harvesting quality, and inclusive milling capacity not meeting targets.

Produktivitas teh kering per hektar sampai dengan Desember 2023 secara total sebesar 1.814 kg kering/ha atau 80,64% terhadap RKAP sampai dengan Desember 2023 dan 94,50% terhadap realisasi hingga Desember 2022. Tidak tercapainya produktivitas teh terutama disebabkan antara lain aplikasi pupuk rendah, pemeliharaan yang belum optimal, masih ditemukan panen pada gilir petik pendek dengan tidak dijalankannya pola panen *delay leaf* dan *fresh leaf*.

The total realized productivity of tea until December 2023 is 1,814 kg dry/ha or 80.64% against the budgeted target until December 2023 and 94.50% compared to the realized productivity until December 2022. Factors contributing to the unmet tea productivity include low fertilizer application, suboptimal maintenance, and continued short-interval harvesting, with delayed leaf and fresh leaf picking patterns not being implemented.

Kontribusi porsi penjualan periode hingga Desember 2023 didominasi oleh komoditi kelapa sawit sebesar 64,63% dari total penjualan. Komoditi karet memberikan kontribusi 6,01%. Komoditi tebu memberikan kontribusi 19,62%. Komoditi teh memberikan kontribusi 1,59% dari total penjualan, dan komoditi aneka tanaman/lainnya sebesar 8,15%.

The sales contribution until December 2023 is predominantly from palm oil commodities at 64.63%. Rubber commodities contribute 6.01%. Sugar cane commodities contribute 19.62%. Tea commodities contribute 1.59% of total sales, and other miscellaneous crops contribute 8.15%.

Capaian Terbaik 2023

Integrasi PTPN Group melalui pembentukan *sub holding* PTPN IV, PTPN I, dan PT SGN (Integrasi PTPN Group) telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan nama Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pelaksanaan Integrasi PTPN Group tersebut telah mendapatkan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai surat Nomor S-595/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023 perihal Persetujuan atas Integrasi PTPN Group (Surat Persetujuan Menteri BUMN). Adapun pelaksanaan Integrasi PTPN Group , sebagai berikut:

a. PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V), PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI), dan PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) telah menggabungkan diri ke dalam PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV).
b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (PTPN III) telah melakukan pemisahan tidak murni (*spin off*) usaha perkebunan kelapa sawit dan karet dengan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva, termasuk utang bank dan surat utang ke ke dalam PTPN IV sesuai dengan Akta Pemisahan

Best Achievements In 2023

The Integration of PTPN Group through the formation of sub-holding companies PTPN IV, PTPN I, and PT SGN (PTPN Group Integration) has been designated as a National Strategic Project under the name of the National Sugar Industry Revitalization Program and Palm Oil Industry Downstreaming based on the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number 8 of 2023 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the Amendment to the List of National Strategic Projects.

The implementation of the PTPN Group Integration has received approval from the Minister of State-Owned Enterprises following letter Number S-595/MBU/11/2023 dated 28 November 2023 regarding Approval of the PTPN Group Integration (Letter of Approval from the Minister of SOEs). The implementation of the PTPN Group Integration is as follows:

a. PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V), PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI), and PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) have merged into PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV).
b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (PTPN III) has carried out a partial spin-off of oil palm and rubber plantation businesses by transferring some of the assets and liabilities, including bank debts and bonds, to PTPN IV following the Separation Deed of Oil Palm and Rubber

atas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III kepada Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara IV.

c. PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII), PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII), PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX), PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X), PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI), PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII), dan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) telah menggabungkan diri ke dalam PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I).

d. Perusahaan melakukan aksi korporasi pemisahan tidak murni (*spin-off*) atas aset dan liabilitas dari PT Perkebunan Nusantara II, PT Buma Cima Nusantara, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Industri Gula Glenmore dan PT Perkebunan Nusantara XIV berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-641/MBU/10/2022 tertanggal 6 Oktober 2022. Aksi korporasi tersebut membentuk PT Sinergi Gula Nusantara.

Saat ini *Holding* Perkebunan mencakup anak perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing. Areal tanaman keseluruhan *Holding* didominasi oleh areal tanaman kelapa sawit seluas 559.577,36 ha, areal tanaman karet seluas 121.976,70 ha, areal konsesi teh 23.637,23 ha serta areal tebu yang ditebang sampai dengan bulan Desember 2023 seluas 179.293,6 ha.

Kendala yang Dihadapi dan Solusi Penanganannya

Meski kondisi tahun 2023 terpantau mulai mengarah ke perkembangan yang lebih baik jika dibandingkan beberapa tahun ke belakang, tahun 2023 masih tidak terlepas sepenuhnya dari tantangan dan kendala yang mempengaruhi aktivitas usaha Perseroan. Di tahun 2023, Perseroan menemukan beberapa permasalahan di area produksi, keuangan, serta sumber daya manusia.

Beberapa permasalahan di sektor produksi antara lain seperti capaian produksi yang berada di bawah RKAP untuk sawit dan karet dikarenakan beberapa faktor seperti serangan hama tikus dan penyakit gugur daun (*Pestalotiopsis* sp.), rendahnya curah hujan, ketersediaan vendor yang terbatas, intensitas cahaya matahari yang rendah di awal tahun, kendala performa dan kapasitas pabrik terbatasi, mutu bahan baku pucuk di bawah standar norma untuk pengolahan, kualitas bahan bakar yang *out-spek*-nya masih tinggi, pasokan terkendala ketidaklancaran pabrik gula dan lasahan tinggi, jumlah tenaga tebang terbatas akibat persaingan, hingga kualitas bahan baku tebu/tebangan yang belum optimal.

Plantation Business of PT Perkebunan Nusantara III to PT Perkebunan Nusantara IV.

c. PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII), PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII), PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX), PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X), PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI), PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII), and PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) have merged into PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I).

d. The company conducted a corporate action of partial spin-off of assets and liabilities from PT Perkebunan Nusantara II, PT Buma Cima Nusantara, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Industri Gula Glenmore, and PT Perkebunan Nusantara XIV based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number S-641/MBU/10/2022 dated 6 October 2022. The corporate action resulted in the formation of PT Sinergi Gula Nusantara.

Holding Perkebunan encompasses subsidiary companies in palm oil, rubber, sugarcane, tea, coffee, tobacco, cocoa, and their respective downstream products. The total plantation area of the Holding is dominated by oil palm plantations covering 559,577.36 ha, rubber plantations covering 121,976.70 ha, tea concession areas covering 23,637.23 ha, and sugar cane areas cleared until December 2023 covering 179,293.6 ha.

Challenges Faced and Their Handling Solutions

Despite the observed improvement trend in 2023 compared to previous years, 2023 still cannot be entirely detached from the challenges and constraints affecting the Company's business activities. In 2023, the Company encountered several production, finance, and human resources issues.

Some of the production sector issues include production achievements below the RKAP for palm oil and rubber due to factors such as rat infestation and leaf fall disease (Pestalotiopsis sp.), low rainfall, limited vendor availability, low sunlight intensity at the beginning of the year, restricted mills performance and capacity, substandard raw material quality for processing, high out-of-spec fuel quality, supply constraints due to sugar mills irregularities and high harvesting areas, limited harvesting labor due to competition, and suboptimal quality of sugarcane/raw materials.

Rata-rata berat tandan (RBT) bulan Desember sebesar 11,99 Kg/Tdn dengan *growth* RBT sebesar 0,06 Kg/Tandan/Bulan. Hal ini disebabkan karena kondisi TBS sisa kumulatif sampai dengan bulan Desember masih cukup tinggi terutama di ke Kebun PTG (11,67%), KLM (17,55%) dan TSW (12,47%) disebabkan kesulitan evakuasi TBS akibat kerusakan infrastruktur jalan di dalam kebun serta jalan akses keluar kebun yang melewati perkampungan Masyarakat. Penggalian potensi produksi sampai dengan Desember juga dipengaruhi oleh kerapatan tandan (AKP) di lapangan. AKP realisasi setahun masih lebih rendah dibandingkan AKP dalam RKAP.

The average bunch weight (ABW) in December was 11.99 Kg/Tdn with ABW growth of 0.06 Kg/Bunch/Month. This is due to the high cumulative remaining Fresh Fruit Bunches (FFB) conditions until December, especially in PTG Plantation (11.67%), KLM (17.55%), and TSW (12.47%) due to difficulties in evacuating FFB due to road infrastructure damage within the plantation and access roads passing through the community settlement. Potential production until December was also influenced by bunch density (AKP) in the fields. The actual AKP for the year is still lower than the AKP in the RKAP.

Pertumbuhan RBT sampai dengan Desember di CGR mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,09 Kg/Tandan/bulan disebabkan tandan turun tanaman muda (35,68%) dan remaja (32,91%) mendominasi seluruh tandan turun di kebun CGR sejumlah 68,89%. Selain itu terlihat *growth* RBT tanaman Remaja hingga Desember 2023 bertumbuh negatif (-0,02 Kg/Tandan/Bulan) disebabkan areal berbukit sehingga berisiko restan dan berada di pinggiran pemukiman warga.

ABW growth until December in CGR experienced negative growth of -0.09 Kg/Bunch/month due to young plant bunches (35.68%) and adolescents (32.91%) dominating all down bunches in the CGR plantation totaling 68.89%. In addition, the ABW growth of young plants until December 2023 was negative (-0.02 Kg/Bunch/Month) due to hilly areas being at risk of restan and being on the outskirts of residential areas.

Penyebab lain rendahnya perolehan produksi sampai dengan bulan Desember 2023 yakni meningkatnya intensitas pencurian jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, khususnya Kebun PTG, KBR, TSW, JRU dan CGR. Capaian produksi di KLM belum mencapai target sebab rencana TU yang awalnya dalam RKAP seluas 303,9 Ha berubah menjadi 524,5 Ha sehingga luasan yang dipanen berkurang seluas 220,6 Ha.

Another reason for the low production until December 2023 is the increased intensity of theft compared to the same period in 2022, especially in PTG, KBR, TSW, JRU, and CGR plantations. Production achievements in KLM have not reached the target because the initial TU plan in RKAP, which was initially 303.9 Ha, changed to 524.5 Ha, resulting in a reduced harvested area of 220.6 Ha.

Sementara di bagian keuangan, Perseroan menemukan beberapa kendala seperti masih perlu adanya proses penyempurnaan untuk *draft* RKAP 2024, likuiditas yang belum mencukupi mengingat *forward sales* belum terlaksana sesuai rencana, pemenuhan sertifikasi dan pelatihan organ pengelola risiko sebagai bentuk tindak lanjut sosialisasi petunjuk teknis komposisi dan kualifikasi organ pengelola risiko di lingkungan BUMN, Akta Perjanjian MAA PT SGN sedang dalam proses review Kreditur dan PT SGN serta pengikatan jaminan MAA PT SGN menunggu Persetujuan BPHTB 0% dari Kementerian Dalam Negeri dan Penunjukan Notaris untuk pengikatan oleh PT SGN, serta diperlukan adanya pembaruan/penyesuaian perjanjian pemegang saham baik dialihkan maupun yang tidak dialihkan pasca Integrasi PTPN Group tanggal 1 Desember 2023.

Meanwhile, in the financial sector, the Company encountered several obstacles, such as the need for further refinement process for the draft RKAP 2024, insufficient liquidity considering that forward sales have not been implemented according to plan, fulfillment of certification and risk management organ training as a follow-up to the technical guidelines for the composition and qualification of risk management organs in the state-owned enterprises' environment, MAA Agreement Act PT SGN is currently under review by Creditors and PT SGN, and the binding of MAA PT SGN collateral is waiting for 0% BPHTB Approval from the Ministry of Home Affairs and the Appointment of a Notary for binding by PT SGN, as well as the need for renewal/adjustment of shareholder agreements both transferred and untransferred post Integration of PTPN Group on 1 December 2023.

Di aspek Sumber Daya Manusia, Perseroan juga menghadapi beberapa tantangan, seperti anggaran pembelajaran dan pengembangan melalui Agro Wallet sampai dengan Desember 2023 terserap 72,43% dari RKAP Khusus Agro Wallet, masih terdapat beberapa PTPN yang memiliki hutang pembayaran SHT dari periode lama sampai dengan 31 Desember 2023 dengan total nilai sebesar Rp652,55 Miliar serta hutang iuran Dapenbun posisi 31 Desember 2023 meningkat 63,19%

In the aspect of Human Resources, the Company also faced several challenges, such as learning and development budget through Agro Wallet until December 2023 absorbed 72.43% of the Agro Wallet Special RKAP, there are still several PTPNs that have SHT payment debts from the old period until December 31, 2023 with a total value of IDR 652.55 billion and Dapenbun contribution debts as of December 31, 2023 increased by 63.19% compared to the position of December

terhadap posisi 31 Desember 2022 meskipun telah melakukan pembayaran kewajiban iuran Dapenbun selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp1.146,85 Miliar.

Tantangan-tantangan tersebut dipandang memberikan dampak yang cukup besar dalam proses operasional Perseroan sehari-hari di bidang agribisnis. Perkembangan situasi ekonomi global dan nasional juga turut mengambil bagian dalam aspek yang mempengaruhi bisnis Perseroan.

Berbagai faktor kendala tersebut mendorong Perseroan untuk mengambil upaya nyata berupa solusi penanganan yang dipandang tepat untuk diaplikasikan dalam menangani dan mencegah dampak negatif dari tantangan-tantangan tersebut. Dengan mengacu pada identifikasi atas kendala dan tantangan tersebut, manajemen telah melakukan penyusunan pada langkah strategis sebagai upaya mitigasi dan membantu Perseroan menjaga keberlanjutan usahanya.

Beberapa langkah strategis di produksi sawit dan karet antara lain pengawalan komitmen pemupukan tepat waktu atau disesuaikan dengan kondisi iklim, tetap melaksanakan pengendalian Pestalotiopsis sp. dengan cara *fogging* menggunakan *b.a. Hexaconazol* dan *Triadimephon*, melaksanakan *vendor gathering* di Medan untuk potensi vendor di Sumatera Utara, melaksanakan TUTKTB di Kalimantan dan Sulawesi, serta monitoring, evaluasi, dan pengawalan pemupukan agar pencapaian pemupukan bisa sesuai dengan perencanaan.

Pada sisi produksi teh, dilakukan beberapa penanganan dengan aksi antara lain penentuan kelas kebun (A, B, C) dan kebun model, fokus penyiapan sumber daya dan bahan penunjang serta pengawalan intensif, serta pemeliharaan tanaman antisipasi evapotranspirasi berlebih, evaluasi beberapa aspek sebagai KPI untuk dipenuhi di tahun 2024, pengendalian stok dan kualitas bahan bakar pabrik serta pengembangan bahan bakar alternatif, penerapan *reward* & *punishment* dan selektif penyiapan karpim, menambah kapasitas olah dengan instalasi pengolahan teh hijau, serta penerapan conveyorisasi unit penggilingan, oksidasi enzimatis hingga pengeringan proses pengolahan Ortodoks.

Untuk produksi tebu, Perseroan melakukan beberapa strategi seperti melaksanakan Tri Tertib Panen (masak optimal, tebang pandas, tebang bersih) libur tebangan untuk mengurangi tingginya lasahan di kebun, melakukan penataan urutan tebangan dengan memprioritaskan penebangan pada tebu yang sudah berbunga dengan tetap mempertimbangkan score tebangan, melaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan bagian *off farm* (pabrik gula), perbaikan dan penggantian peralatan rusak di stasiun gilingan, kelistrikan, *boiler, boiling house*, stasiun pemurnian dan tempat lainnya serta peningkatan kapasitas giling melalui optimalisasi umpan tebu, kinerja gilingan, *power house*, *boiler* dan

31, 2022 even though they have made payments of Dapenbun contribution obligations during January to December 2023 amounting to IDR 1,146.85 billion.

These challenges significantly impact the Company's daily operational processes in the agribusiness sector. Global and national economic development also plays a part in aspects that affect the company's business.

These various constraint factors have prompted the Company to make tangible efforts to handle appropriate solutions to address and prevent the negative impacts of these challenges. Regarding identifying these constraints and challenges, management has formulated strategic steps as mitigation efforts to assist the Company in maintaining its business continuity.

Some strategic steps in palm oil and rubber production include monitoring timely fertilization commitments or adjusting to climatic conditions, continuing Pestalotiopsis sp. control by fogging using b.a. Hexaconazol and Triadimephon, conducting vendor gatherings in Medan for potential vendors in North Sumatra, conducting TUTKTB in Kalimantan and Sulawesi, as well as monitoring, evaluating, and supervising fertilization to ensure that fertilization achievements are in line with planning.

In the tea production sector, several actions were taken, including determining plantation classes (A, B, C) and model plantations, focusing on preparing resources and supporting materials, intensive supervision, and maintaining plants to anticipate excessive evapotranspiration, evaluating several aspects as KPIs to be met in 2024, controlling stock and fuel quality at the mills and developing alternative fuels, implementing reward & punishment and selective preparation of karpim, increasing processing capacity by installing green tea processing facilities, and applying unit grinding conveyorization, enzymatic oxidation to orthodox processing drying processes.

For sugar production, the Company implemented several strategies such as implementing the Tri Tertib Harvest (optimal ripening, precise cutting, clean cutting), harvesting holidays to reduce high harvesting in the plantation, arranging harvesting sequences by prioritizing harvesting of flowering sugarcane while still considering the harvesting score, intensifying coordination with the off-farm section (sugar mills), repairing and replacing damaged equipment at milling stations, electrical, boilers, boiling houses, refining stations, and other locations, as well as increasing milling capacity through optimization of cane feed, milling performance, powerhouses, boilers, and evaporators by conducting

evaporator dengan melakukan inspeksi secara intensif serta menjaga Inhouse Keeping dalam pabrik.

Penanganan untuk permasalahan di bidang keuangan dihadirkan melalui strategi seperti koordinasi dengan PTPN IV untuk finalisasi Rencana Investasi RKAP 2024, melakukan penyusunan dan penyesuaian pedoman internal manajemen risiko dengan menunjuk konsultan manajemen risiko untuk menyusun, menyesuaikan, me*review* dan infrastruktur manajemen risiko, Penerbitan LC ditunda sampai dengan tersedia dana yang berasal dari *forward sales*, berkoordinasi dengan DMAS dan PTPN IV dan PTPN I secara intens, serta *Monitoring* dan Koordinasi terkait penyelesaian Perjanjian.

Terakhir di aspek SDM, Perseroan menjalankan beberapa upaya seperti Implementasi Agro Wallet, Penyelesaian Pembayaran SHT Tahun 2023, tidak menambah hutang SHT dalam bulan berjalan dan pembayaran Hutang SHT dilakukan secara bertahap, serta Penyelesaian Hutang Iuran Dapenbun Tahun 2023 dan tidak menambah hutang Iuran Dapenbun dalam bulan berjalan dan rencana penyelesaian hutang iuran normal beban Perusahaan dan iuran tambahan dilaksanakan mempedomani *Road Map* Penyehatan Dapenbun yang sedang disusun dengan telah mempertimbangkan susunan *Sub Holding*, yaitu PTPN IV, PTPN I, dan PT SGN.

Didukung oleh seluruh pihak terkait, Perseroan di tahun 2023 mampu mengatasi tantangan dan kendala tersebut dengan baik yang tergambar melalui pencapaian performa kerja yang tetap terkendali dan stabil.

intensive inspections and maintaining Inhouse Keeping in the mills.

Handling of financial issues is presented through strategies such as coordination with PTPN IV for finalizing the Investment Plan RKAP 2024, preparing and adjusting internal risk management guidelines by appointing a risk management consultant to prepare, modify, and review risk management infrastructure, LC Issuance is postponed until funds are available from forward sales, coordinating with DMAS and PTPN IV and PTPN I intensively, as well as Monitoring and Coordination related to the completion of Agreements.

Finally, in the aspect of Human Resources, the Company has undertaken several efforts such as Agro Wallet Implementation, Completion of 2023 SHT Payment, not increasing SHT debt in the current month and SHT Payment is done gradually, as well as Completion of 2023 Dapenbun Contribution Debt and not increasing Dapenbun Contribution debt in the current month. The plan to complete typical contribution debt and additional contributions is carried out based on the Dapenbun Improvement Road Map being prepared by considering the arrangement of Sub Holdings, namely PTPN IV, PTPN I, and PT SGN.

Supported by all relevant parties, the Company in 2023 could effectively overcome those challenges and constraints, as reflected in achieving a controlled and stable performance.

Peran Direksi Dalam Penerapan Kebijakan Strategis

Upaya Perseroan dalam menjaga kelangsungan usahanya diwujudkan melalui berbagai langkah, salah satunya adalah dengan perancangan dan penerapan kebijakan strategis. Untuk itu, Perseroan telah menyiapkan rencana strategis yang dirancang dan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2023 sebagai acuan dan standar dalam hal pencapaian kerja. Perseroan menyusun rencana strategis tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti asumsi sesuai situasi Perusahaan serta aspirasi yang diberikan para pemegang saham.

Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab penuh dalam hal pengelolaan Perusahaan berperan besar dalam kesuksesan penyusunan dan penerapan rencana strategis ini. Dengan didukung oleh seluruh pihak internal, Direksi menjalankan inisiatif dalam penyusunan target dalam skala jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan pengembangan usaha. *Holding* Perkebunan menyiapkan berbagai strategi dan target pencapaian yang akan menjadi dasar penilaian keberhasilan kinerja dengan sebelumnya

Role of The Board Of Directors in the Implementation of Strategic Policies

The Company's efforts to sustain its business are realized through various steps, including designing and implementing strategic policies. To this end, the Company has prepared a strategic plan developed and established in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023 as a reference and standard for work achievement. The Company formulated this strategic plan by considering various aspects, such as assumptions based on the Company's situation and the aspirations provided by the shareholders.

The Board of Directors, as the organ responsible for the complete management of the Company, plays a significant role in formulating and implementing this strategic plan. Supported by all internal parties, the Board of Directors sets short- and long-term targets to enhance business development. The Holding Perkebunan prepares various strategies and achievement targets that will serve as the basis for evaluating performance success, having previously reviewed the economic development

telah melakukan peninjauan perkembangan ekonomi Indonesia serta tantangan yang dihadapi, terutama dalam segmen agribisnis saat ini.

of Indonesia and the challenges faced, especially in the current agricultural segment.

Secara khusus di tahun 2023, Perseroan telah menerapkan beberapa rencana strategis yang sebelumnya sudah disusun dengan cermat dan penuh prinsip kehati-hatian. Beberapa rencana strategis tersebut mencakup pelaksanaan evaluasi rutin pelaksanaan panen bersih per hanca di lapangan serta menekan angka restan, pelaksanaan strategi pengamanan produksi secara terpadu melalui kegiatan patroli rutin petugas pengamanan maupun Pam Swakarsa, mencukupi kebutuhan tenaga panen dan armada angkutan TBS, melakukan perbaikan sarana produksi sesuai dengan kebutuhan prioritas, melaksanakan pemeliharaan tanaman secara berkelanjutan/rotasi serta menyelesaikan pemupukan sesuai rekomendasi.

Specifically, in 2023, the Company has implemented several strategic plans that were previously carefully and prudently prepared. Some of these strategic plans include conducting routine evaluations of clean harvest implementation per field and reducing restan numbers, implementing integrated production security strategies through routine patrols by security personnel and community watch, fulfilling the needs of harvest labor and FFB transportation fleets, conducting production facility repairs according to priority needs, implementing sustainable/rotational plant maintenance, and completing fertilization according to recommendations.

Dengan dilakukannya strategi-strategi tersebut, Perseroan berhasil mempercepat proses administrasi investasi pabrik guna mendukung kelancaran operasional produksi pabrik. Perseroan juga melaksanakan pengawasan preventif dan pemeliharaan prediktif terhadap peralatan pabrik, melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan manajemen kebun seinduk agar mengirimkan TBS bahan baku sesuai kriteria matang panen/tidak boleh ada buah mentah. Selain itu, Perseroan meminimalkan jam stagnasi dan *downtime* pabrik agar bisa tercapai kapasitas pabrik, melakukan pengawasan peralatan *boiler* sebagai kunci utama pada operasional pabrik kelapa sawit, mengoperasikan peralatan pabrik sesuai dengan Instruksi Kerja atau SOP pabrik, mengambil titik *sampel losses* minyak dan kernel berdasarkan SOP, hingga menjaga kebersihan/estetika lingkungan kerja agar dapat mempertahankan kondisi nyaman bekerja.

With the implementation of these strategies, the Company accelerated the administrative process of investing in mills to support the smooth operation of mill production. The Company also carried out preventive supervision and predictive maintenance of mill equipment, as well as coordinated, communicated, and consulted with peer plantation management to send mature harvested raw FFB according to criteria without raw fruit. Additionally, the Company minimized mill stagnation and downtime to achieve mill capacity, supervised boiler equipment as the primary key in palm oil mill operations, operated mill equipment according to Work Instructions or mill SOPs, took oil and kernel loss samples based on SOPs, and maintained cleanliness and aesthetics of the work environment to ensure comfortable working conditions.

Perbandingan Antara Hasil Yang Dicapai Dengan Yang Ditargetkan

Comparison Between Achieved Results and Targets

Perseroan di tahun 2023 telah mampu mencatatkan perolehan hasil kerja yang cukup membanggakan di tengah situasi yang masih memiliki ketidakpastian dan tantangan. Hal ini tercapai karena turut dipengaruhi komitmen Perseroan yang tetap mengedepankan proses bisnis yang berlandaskan praktik tata kelola perusahaan yang baik, kerangka kerja *enterprise risk management*, dan *business continuity management* sebagai upaya untuk menciptakan performa sesuai harapan dalam menjalankan seluruh aktivitas usahanya sekaligus menjaga kelangsungan usahanya. Selain itu, Perseroan juga memastikan seluruh risiko telah terkelola dan termitigasi dengan baik melalui manajemen risiko yang komprehensif yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

In 2023, the Company recorded a commendable work achievement amid uncertainties and challenges. This was achieved because the Company's commitment remained steadfast in prioritizing business processes based on good corporate governance practices, the framework of enterprise risk management, and business continuity management efforts to create performance in line with expectations in carrying out all its business activities while maintaining its business sustainability. Additionally, the Company ensured that all risks were well managed and mitigated through comprehensive risk management guided by prudence.

Kinerja keuangan maupun operasional yang dinilai cukup baik meski masih berada di bawah target RKAP yang telah ditetapkan sebelumnya.

Both financial and operational performance were considered quite good, although they remained below the targeted RKAP set earlier.

Pada aspek produksi, Perseroan sampai dengan akhir tahun 2023 telah merealisasikan produktivitas TBS kelapa sawit sebesar 20,71 ton/ha dan telah memenuhi target RKAP hingga 89,78% yang dianggarkan sebesar 23,07 ton/ha. Jumlah tahun 2023 ini sedikit berada di bawah jumlah tahun 2022 sebesar 21,69 ton/ha. Dari bagian produksi gula, jumlah yang terealisasi hingga 31 Desember 2023 mencapai 752.971,11 ton yang mana memenuhi 75,19% dari target RKAP sebesar 1.001.430,5 ton serta telah terealisasi 88,52% dari realisasi jumlah produksi tahun 2022 sebesar 850.651,6 ton. Pencapaian baik juga tercapai di produksi tetes yang terealisasi 505.316,5 ton pada tahun 2023 dan mencapai 81,93% dari anggaran target RKAP yang ditetapkan sebesar 616.775,9 ton. Perolehan produksi tetes tahun 2023 tersebut juga telah mencapai 78,38% dari realisasi yang tercapai di periode yang sama di tahun 2022 sebesar 653.025,1 ton.

In terms of production, by the end of 2023, the Company had realized palm oil fresh fruit bunch (FFB) productivity of 20.71 tons/ha, meeting 89.78% of the targeted RKAP of 23.07 tons/ha. This figure for 2023 was slightly lower than for 2022, which was 21.69 tons/ha. Regarding sugar production, the realized amount by 31 December 2023 reached 752,971.11 tons, meeting 75.19% of the RKAP target of 1,001,430.5 tons and achieving 88.52% of the output realized in 2022, which was 850,651.6 tons. Exemplary achievements were also attained in molasses production, with 505,316.5 tons realized in 2023, reaching 81.93% of the targeted RKAP of 616,775.9 tons. The molasses production for 2023 also reached 78.38% of the realization achieved in the same period in 2022, which was 653,025.1 tons.

Sementara dari sisi keuangan, Perseroan mampu membukukan perolehan yang baik di tahun 2023. Total aset per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp143,90 triliun, mencapai 94,13% dari target RKAP sebesar Rp152,88 triliun serta berada sedikit di bawah jumlah tahun 2022 sebesar Rp149,16 triliun. Dari total liabilitas, jumlah yang dibukukan adalah sebesar Rp75,12 triliun pada tahun 2023 dan berada 12,62% di bawah target RKAP sebesar Rp83,78 triliun serta di bawah liabilitas tahun 2022 sebesar Rp79,04 triliun dengan persentase 7,37%. Sedangkan ekuitas tercatat berjumlah Rp72,47 triliun di tahun 2023, yang mana telah mencapai target RKAP 102,29% yang ditetapkan sebesar Rp69,10 triliun dan di atas 0,81% dari ekuitas tahun 2022 sebesar Rp70,12 triliun. Dari komponen pendapatan, *Holding* Perkebunan meraih hasil Rp50,98 triliun atau sebesar 71,31% dari RKAP yang ditetapkan sebesar Rp71,49 triliun.

Regarding finances, the Company was able to achieve good results in 2023. As of 31 December 2023, total assets amounted to Rp143.90 trillion, reaching 94.13% of the RKAP target of Rp152.88 trillion and slightly below the figure for 2022, which was Rp149.16 trillion. The total liabilities recorded amounted to Rp75.12 trillion in 2023, 12.62% below the RKAP target of Rp83.78 trillion and 7.37% below the 2022 liabilities of Rp79.04 trillion. Meanwhile, equity amounted to Rp72.47 trillion in 2023, which has achieved the RKAP target of 102.29% set at Rp69.10 trillion and 0.81% above the 2022 equity of Rp70.12 trillion. The Holding Perkebunan achieved revenue of Rp50.98 trillion, or 71.31% of the RKAP target of Rp71.49 trillion.

Oleh Perseroan, perbandingan pencapaian dengan target ini dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang diperhatikan dalam perumusan target serta strategi bisnis untuk masa mendatang, terutama untuk tahun 2024. Ke depannya, Perseroan masih memiliki optimisme yang tinggi bahwa kinerja usaha akan terus meningkat dan terjaga positif secara berkesinambungan karena telah didukung oleh kemampuan Perseroan yang unggul di bidangnya serta peluang dan prospek yang dimiliki. Perseroan akan terus memperluas daya jangkau serta menjaga sumber daya alam sekaligus sumber daya manusianya karena Perseroan berkomitmen untuk terus menjadi kebanggaan bagi Indonesia dalam bidang agribisnis.

By the Company, this comparison of achievements with targets is used as one of the considerations in formulating targets and business strategies for the future, especially for the year 2024. In the future, the Company remains highly optimistic that business performance will continue to improve and be positively sustained as it is supported by the Company's excellent capabilities in its field as well as the opportunities and prospects it holds. The Company will continue to expand its reach and preserve its natural and human resources because it is committed to continuing to be a source of pride for Indonesia in agribusiness.

Terkait dengan upaya Perseroan dalam memastikan program strategis telah berjalan sebagaimana yang ditetapkan dalam RJPP 2020-2024 dan RKAP 2023, Perseroan melaksanakan monitoring atas pelaksanaan implementasi program strategis perusahaan dengan capaian per program yang mencakup Kemitraan Strategis Bisnis Gula PTPN Group ; EBITDA *Transformation* Program; Digitalisasi *On-Farm* dan *Off-Farm*;

Regarding the Company's efforts to ensure that strategic programs have been implemented as stipulated in the RJPP 2020-2024 and RKAP 2023, the Company monitors the implementation of the company's strategic program achievements per program, which includes Business Strategic Partnerships with PTPN Group Sugar; EBITDA Transformation Program; On-Farm and Off-Farm Digitalization; Non-Core

Monetisasi Aset Non-Inti; Rasionalisasi Struktur Anak dan Cucu Perusahaan; Mengembangkan *talent* dengan kapabilitas teknis dan manajerial; Pengembangan Investasi; Divestasi Aset Non Inti; Dekarbonisasi; Implementasi Restrukturisasi Keuangan PTPN; serta Melakukan Restrukturisasi Anak Perusahaan & Memperkuat Tata Kelola *Holding*.

Asset Monetization; Rationalization of Subsidiary and Affiliate Structures; Developing talent with technical and managerial capabilities; Investment Development; Non-Core Asset Divestment; Decarbonization; Implementation of PTPN Financial Restructuring; and Subsidiary Restructuring & Strengthening Holding Governance.

Analisis Tentang Prospek Usaha

Dalam publikasinya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tetap terjaga resilien yang didukung oleh kuatnya permintaan domestik, konsumsi, dan investasi di tengah pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan masih berada di posisi lemah. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 dapat menyentuh persentase hingga 5,5% yang bisa tercapai karena didukung oleh permintaan domestik utamanya berlanjutnya pertumbuhan konsumsi, termasuk adanya dampak positif dari penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024.

Nilai ekspor nonmigas Indonesia oleh Kementerian Perdagangan ditargetkan untuk tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,5% hingga 4,5%. Pemerintah akan berusaha dalam tetap mendorong ekspor nonmigas sesuai dengan target tersebut meski tantangan harga komoditas dunia masih dipandang cukup landai. Untuk mewujudkan target ini, Kementerian Perdagangan akan mengembangkan pasar baru non tradisional seperti India, Pakistan, Afrika Selatan, Nigeria, Meksiko, dan lain sebagainya. Andalan dalam ekspor ini masih berpusat pada CPO, batu bara, nikel, dan produk-produk manufaktur serta produk hasil hutan.

Melihat berbagai prospek usaha tersebut, Perseroan berencana untuk menjalankan berbagai strategi, antara lain salah satunya adalah melanjutkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024. Dalam RJPP tersebut, strategi perusahaan dikelompokkan dalam 5 (lima) Tema Besar, yakni optimalisasi portofolio & *operational excellence*; *commercial excellence* & ekspansi hilir; optimalisasi aset & kemitraan strategis; pengembangan kapabilitas & budaya; serta peningkatan sistem & teknologi. Seluruh strategi tersebut juga telah diselaraskan serta dipetakan sesuai prioritas strategis Kementerian BUMN.

Business Prospects Analysis

In its publication, the Ministry of Finance stated that Indonesia's economy remains resilient, supported by strong domestic demand, consumption, and investment amidst global economic growth, which is projected to remain weak. Bank Indonesia predicts that Indonesia's economic growth in 2024 could reach up to 5.5%, achievable due to continued domestic demand, primarily driven by consumption growth, including the positive impact of the 2024 elections.

The Ministry of Trade targets a 2.5% to 4.5% growth in Indonesia's non-oil and gas exports in 2024. The government will strive to continue promoting non-oil and gas exports despite the perceived challenges of world commodity prices. The Ministry of Trade will develop new non-traditional markets such as India, Pakistan, South Africa, Nigeria, Mexico, and others to achieve this target. The mainstays in these exports still revolve around CPO, coal, nickel, manufactured products, and forest products.

Considering these various business prospects, the Company plans to implement multiple strategies, including continuing the Long-Term Corporate Plan (RJPP) for 2020-2024. In this RJPP, the company's strategies are grouped into 5 (five) Major Themes, namely portfolio optimization & operational excellence. Commercial excellence & downstream expansion. Asset optimization & strategic partnerships, capability development & culture, and system & technology improvement. All these strategies have been aligned and mapped according to the strategic priorities of the Ministry of SOEs.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dalam menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya, Perseroan menjadikan perkembangan praktik tata kelola terbaik sebagai bagian dari fokus utamanya, baik yang berlaku dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Komitmen Perseroan untuk terus mengutamakan implementasi nilai-nilai GCG secara komprehensif telah

Corporate Governance Development

In conducting all operational activities, the Company considers developing best corporate governance practices as a primary focus, whether at the national, regional, or international level. The Company's commitment to prioritizing the comprehensive implementation of GCG values has become part of its culture, reflected in the implementation

menjadi budaya Perseroan yang tercermin dari pelaksanaan visi *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yakni, "Menjadi Perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa".

of the vision of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), which aims to be a national agribusiness company that excels and competes globally while continuously contributing to the nation's progress.

Di tahun 2023, Direksi menilai bahwa penerapan praktik tata kelola perusahaan telah terlaksana dengan baik oleh Perseroan di seluruh bagian. Kegiatan usaha di bidang agribisnis mampu dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan menghasilkan kinerja yang positif dari sisi pemenuhan regulasi hingga pelaksanaan strategi yang berpedoman pada praktik tata kelola terbaik.

In 2023, the Directors assessed that the Company had effectively implemented corporate governance practices across all divisions. Business activities in the agribusiness sector were conducted per GCG principles, resulting in positive performance in regulatory compliance and implementing strategies guided by best corporate governance practices.

Prinsip-prinsip GCG diimplementasikan salah satunya melalui praktik budaya perusahaan secara menyeluruh yang tergambar dalam sikap, perilaku, dan hasil kerja sehari-hari seluruh manajemen dan karyawan. Dari sisi Perseroan, upaya yang dilakukan mencakup pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi, pengembangan kompetensi, hingga menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas yang sesuai perubahan dalam aktivitas dan struktur organisasi. Perseroan juga terus mengedepankan kepatuhan para peraturan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kebijakan serta prinsip-prinsip dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.

GCG principles are implemented, among other things, through comprehensive corporate culture practices reflected in the attitudes, behaviors, and daily work outcomes of all management and employees. From the Company's perspective, efforts include communication and socialization, competency development, and establishing responsibilities and accountabilities in line with changes in activities and organizational structures. The Company also consistently upholds compliance with applicable regulations while adhering to policies and principles in corporate governance implementation.

Perseroan memastikan bahwa bisnisnya senantiasa dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG, termasuk dalam pemenuhan fungsi oleh organ-organ utama Perseroan seperti Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bahwa Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, dan tanggung jawab.

The Company ensures that its business is always conducted following GCG principles, including fulfilling the functions of the Company's critical organs, such as the Board of Directors and the Board of Commissioners. This is in line with the provisions of Law No. 19 of 2003 concerning SOEs, which stipulate that the Board of Directors and the Board of Commissioners must apply principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, and accountability in carrying out their duties.

Sebagai entitas korporat, secara konsisten Perseroan senantiasa melakukan penerapan dari prinsip-prinsip governansi yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang didasarkan pada empat aspek utama yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Panduan ini diatur dalam Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia (PUTKPI), yang terakhir direvisi pada tahun 2021.

As a corporate entity, the Company consistently applies governance principles established by the National Committee on Governance Policy (KNKG) based on four main aspects: ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability. These guidelines are regulated in the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUTKPI), last revised in 2021.

Implementasi dari prinsip-prinsip GCG bagi Perseroan menjadi penting karena diyakini memiliki peran signifikan dalam mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan sekaligus membantu Perseroan memastikan performa terbaik dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, implementasi ini tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban dalam kepatuhan regulasi, namun juga dijadikan sebagai upaya krusial yang memegang kunci keberhasilan dalam mencapai performa bisnis yang unggul dan berkelanjutan.

The implementation of GCG principles for the Company is essential because it is believed to play a significant role in maintaining the trust of stakeholders while helping the Company ensure optimal performance and sustainable growth. Therefore, this implementation is carried out to fulfill regulatory compliance obligations and is considered a crucial effort that holds the key to achieving superior and sustainable business performance.

Perubahan Komposisi Direksi

Perseroan memastikan keteraturan dan penetapan anggota Direksi telah terlaksana secara akurat dan penuh kehati-hatian untuk menjamin bahwa Perseroan telah didukung oleh jajaran Direksi yang berkompeten, ahli, dan cakap dalam bidangnya.

Di tahun 2023, terdapat perubahan pada komposisi Direksi yang tercatat dan diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN SK-4/MBU/01/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III.

Per 31 Desember 2023, seluruh anggota Direksi yang berjumlah 7 (tujuh) orang telah melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Pemegang Saham. Uji kelayakan dan kepatutan ini dijalankan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota Direksi yang memegang posisi tersebut telah memiliki integritas, kualifikasi, reputasi yang bersih dari afiliasi atau potensi konflik kepentingan lain, sekaligus didukung dengan pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Changes in Board of Directors Composition

The company ensures that the regularity and appointment of members of the Board of Directors have been carried out accurately and prudently to ensure that the company is supported by a competent, knowledgeable, and skilled Board of Directors in their respective fields.

In 2023, there were changes in the Board of Directors composition, recorded and regulated based on the Minister of SOEs Decree No.SK-4/MBU/01/2023 dated January 4, 2023, regarding the Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

As of 31 December 2023, all 7 (seven) members of the Board of Directors have undergone a fit and proper test by the Shareholders. This fit and adequate test aims to ensure that all Board of Directors members holding these positions have integrity, qualifications, a clean reputation free from affiliations or potential conflicts of interest, and the knowledge and competencies required to carry out their duties and responsibilities effectively.

Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2023
Structure and Composition of the Board of Directors as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Remarks
Mohammad Abdul Ghani	Direktur Utama President Director	SK Menteri BUMN No. SK-48/ MBU/02/2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-48/ MBU/02/2020	12 Februari 2020 – 17 Oktober 2024 February 12, 2020 – October 17, 2024
Denaldy Mulino Mauna	Wakil Direktur Utama Vice President Director	SK Menteri BUMN No.48/MBU/02/2020 Decree of the Minister of SOEs No. 48/ MBU/02/2020	12 Februari 2020–12 Februari 2025 February 12, 2020 – February 12, 2025
Sucipto Prayitno	Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Human Resources & General Affairs Director	SK Menteri BUMN No. SK-395/MBU/12/2023 Decree of the Minister of SOEs No. SK-395/ MBU/12/2023	19 Desember 2023-19 Desember 2028 December 19, 2023-December 19, 2028
Dwi Sutoro	Direktur Pemasaran Director of Marketing	SK Menteri BUMN No. SK-231/MBU/10/2019 Decree of the Minister of SOEs No. SK-231/ MBU/10/2019	17 Oktober 2019 - 17 Oktober 2024 October 17, 2019 – October 17, 2024
M. Iswahyudi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	SK Menteri BUMN No.SK-48/MBU/02/2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-48/ MBU/02/2020	12 Februari 2020 - 12 Februari 2025 February 12, 2020 – February 12, 2025
Mahmudi	Direktur Produksi dan Pengembangan Director of Production and Development	SK Menteri BUMN No.SK-48/MBU/02/2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-48/ MBU/02/2020	17 Oktober 2019 – 7 Mei 2024 October 17, 2019 – May 7, 2024
M. Arifin Firdaus	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	SK Menteri BUMN No SK-4/MBU/01/2023 Decree of the Minister of SOEs No. SK-4/ MBU/01/2023	4 Januari 2023-4 Januari 2028 January 4, 2023-January 4, 2028

Penutup

Kami mengapresiasi keputusan yang diambil Perseroan yang menunjukkan kepercayaan kepada komitmen seluruh anggota Direksi dalam memajukan laju bisnis. Komitmen penuh terus dipegang oleh anggota Direksi dalam melaksanakan tanggung jawab ini dengan selalu memprioritaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berkualitas demi kepentingan Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan terkait lainnya.

Kami selaku jajaran Direksi *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Dewan Komisaris, Manajemen, dan segenap Karyawan yang telah memberikan semangat, dedikasi, hingga kontribusi nyata yang diberikan sepanjang tahun 2023 sehingga mampu mendukung Perseroan mencapai hasil yang signifikan. Tak lupa kami juga ingin menyampaikan penghargaan kepada seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan untuk segala dukungan dan kepercayaan kepada Perseroan selama ini. Kiranya komitmen kita bersama untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan masih akan terus menginspirasi kita untuk terus melangkah ke depan dan secara konsisten memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan bangsa ini.

Closing

We appreciate the Company's decisions that demonstrate trust in the commitment of all members of the Board of Directors to advance the business. The members of the Board of Directors remain fully committed to fulfilling this responsibility by consistently prioritizing quality corporate governance principles in the interests of the Shareholders and other relevant Stakeholders.

We, as the Board of Directors of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), express our gratitude and appreciation to all members of the Board of Commissioners, Management, and all Employees who have provided enthusiasm, dedication, and tangible contributions throughout 2023, thus enabling the Company to achieve significant results. We also thank all Shareholders and Stakeholders for their unwavering support and trust in the Company. Let our collective commitment to realizing sustainable growth continue to inspire us to move forward and consistently make meaningful contributions to the progress of this nation.

Jakarta, 31 Mei 2024
Jakarta, May 31, 2024



Mohammad Abdul Ghani
Direktur Utama
President Director

PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023

STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) for the year 2023 has been accurately presented in its entirety, and we take full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 31 Mei 2024
Jakarta, May 31, 2024

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Zulkifli Zaini
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner



Wisto Prihadi
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Ardan Adiperdana
Komisaris
Commissioner



Asep Subarkah Yusuf
Komisaris
Commissioner



Alhilal Hamdi
Komisaris
Commissioner



Suyus Windayana
Komisaris
Commissioner



Tsamara Amany Alatas
Komisaris
Commissioner

PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) for the year 2023 has been accurately presented in its entirety, and we take full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 31 Mei 2024
Jakarta, May 31, 2024

Direksi
Board of Directors



Mohammad Abdul Ghani
Direktur Utama
President Director



Denaldy Mulino Mauna
Wakil Direktur Utama
Deputy President Director



Dwi Sutoro
Direktur Pemasaran
Marketing Director



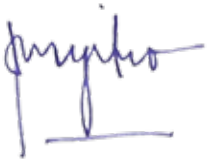
M. Iswahyudi
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director



Mahmudi
Direktur Produksi dan Pengembangan
Production and Development Director



M. Arifin Firdaus
Direktur Hubungan Kelembagaan
Institutional Relations Director



Sucipto Prayitno
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum
Human Resources & General Affairs Director

Profil Perusahaan

COMPANY PROFILE





INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN
GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY

Perkebunan Nusantara

Nama Perusahaan
Company Name

PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Persero

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp66.600.000.000.000

Jumlah Karyawan Tetap
Number of Permanent Employees

86.737 orang
86,737 people

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Negara Republik Indonesia 100,00%
100% owned by the Republic of Indonesia

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

11 Maret 1996 | March 11, 1996

Dasar Hukum Pembentukan Holding Perkebunan Nusantara
Legal Basis of Establishment of Holding Company of Perkebunan Nusantara

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara III, menjadi perusahaan induk (*holding*) bagi PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV.

Government Regulation No. 72 of 2014 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Perkebunan Nusantara III, making it the holding company for PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, and XIV.

Maksud dan Tujuan Pendirian
Purpose and Objective of Establishment

Berusaha dalam bidang Agrobisnis dan Agroindustri.
Engaged in the Agribusiness and Agro-industry sectors.

Bidang Usaha
Business Sector

Agrobisnis dan Agroindustri
Agribusiness and Agro-industry

Status Perusahaan
Company Status

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) *Holding* Perusahaan Perkebunan Nusantara
State-Owned Enterprise (SOE) Holding Company for Perkebunan Nusantara

Situs Perusahaan
Corporate Website

www.holding-perkebunan.com

Alamat Kantor Operasional
Operational Office Address

Jl. Sei Batanghari No. 2, Medan
Telp: (+62 61) 845 2244, 845 3100
Fax: (+62 61) 8455177, 8454728
Jl. Sei Batanghari No. 2, Medan
Phone: (+62 61) 845 2244, 845 3100
Fax: (+62 61) 8455177, 8454728

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid Capital

Rp40.216.132.000.000 (2023)

Surel
Email

sekretariat@holding-perkebunan.com



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Peraturan Pemerintah No. 8 Tanggal 14 Februari 1996, Sesuai Dengan Akta No.36 Tanggal 11 Maret 1996 Dari Harun Kamil, S.h., Notaris Di Jakarta. Akta Pendirian Ini Disahkan Oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Dalam Surat Keputusannya No. C2-8331 Ht.01.01.Th.96. Tanggal 8 Agustus 1996 Dan Telah Diumumkan Dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 Tanggal 8 Oktober 1996, Tambahan No. 8674.

Government Regulation No. 8 dated 14 February 1996, following Deed No. 36 dated 11 March 1996, by Harun Kamil, S.H., Notary in Jakarta. This Deed of Establishment was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-8331 HT.01.01. Th.96 dated 8 August 1996, and was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated 8 October 1996, Supplement No. 8674.

Media Sosial
Social Media

- Facebook : @holdingperkebunan
- X : @holding_ptpn
- Instagram : holdingperkebunan
- Youtube : Nusantara Planters

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Bambang Agustian
Kedudukan: Kantor *Holding*
Telp: 021 29183300
Fax: 021 5203030
Surel: Sekretariat@Holding-Perkebunan.com

Bambang Agustian
Position: Holding Office
Phone: 021 29183300
Fax: 021 5203030
Email: sekretariat@holding-perkebunan.com

Layanan Pengaduan
Customer Care

LAPOR!: https://lapor.go.id
Whistleblowing: apps.ptpn3.id:81/wbs/

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Gedung Agro Plaza Lt.15,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2, No. 1, Setiabudi. Jakarta Selatan, 12950
Telp. (+62 21) 2918 3300
Fax. (+62 21) 520 3003

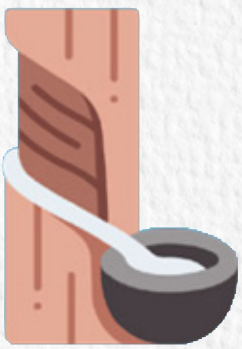
Agro Plaza Building 15th Floor,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2,
No. 1, Setiabudi. South Jakarta, 12950
Phone (+62 21) 2918 3300
Fax. (+62 21) 520 3003



Entitas Anak dan Asosiasi
Subsidiaries and Associates

Sebagai Holding Perkebunan Nusantara, Perusahaan mempunyai kepemilikan secara langsung atau tidak langsung pada beberapa entitas anak dan juga penyertaan saham pada beberapa entitas asosiasi dari PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV sebesar Rp34.778.226.891.286 (per 31 Desember 2023)

As the Holding Perkebunan Nusantara, the company has direct or indirect ownership in several subsidiaries. Also, it holds share investments in several associate entities of PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, and XIV, amounting to Rp34,778,226,891,286 (as of 31 December 2023).



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

Sekilas Tentang Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III (Persero) merupakan perusahaan yang terletak di Jakarta dan bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil komoditi perkebunan. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 11 Maret 1996, hal tersebut sesuai dengan akta no. 36 tanggal 11 Maret 1196 yang ditulis di hadapan Notaris Harun Kamil, S.H., di Jakarta. AKta Pendirian Perusahaan ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-8331 HT.01.01.Th.96 tanggal 8 Agustus 1996, yang kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 08 Oktober 1996, dan tambahan No. 8674.

Selama beberapa tahun, Anggaran Dasar Perusahaan sering kali mengalami revisi. Hingga yang terakhir kali revisi tersebut dilakukan melalui akta No. 08 pada tanggal 24 Juni 2021 oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., seorang notaris di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah resmi dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan nomor Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0429723 tanggal 19 Juli 2021, dan disetujui oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0040341. AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 19 Juli 2021.

Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia menetapkan Perusahaan sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (KEK Sei Mangkei) di Simalungun, Sumatera Utara, melalui Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2012 yang merujuk pada UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan luas tanah sebesar 1.933,8 ha, KEK Sei Mangkei diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 83.304 orang sampai tahun 2031.

Selanjutnya, di tahun 2014, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2014, pemerintah mengalihkan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV ke PTPN III (Persero), sehingga Perseroan memiliki 90% saham PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV. Dengan perubahan tersebut, PTPN III (Persero) menjadi Nusantara *Holding Plantation Company*, sebagai induk perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV. Selain itu, tujuan lain dari pembentukan Nusantara *Holding Plantation Company* ialah untuk meningkatkan integrasi antar BUMN Perkebunan yang terhimpun dari PTPN I sampai dengan PTPN XIV untuk mengatasi masalah sektor perkebunan.

About the Company

PT Perkebunan Nusantara III (Persero), or PTPN III (Persero), is a company in Jakarta that manages, processes, and markets plantation commodity products. The company was established on 11 March 1996, following Deed No. 36 dated 11 March 1996, written in the presence of Notary Harun Kamil, S.H., in Jakarta. This Deed of Establishment was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C2-8331 HT.01.01.Th.96 dated 8 August 1996, and was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated 8 October 1996, Supplement No. 8674.

Over the years, the Company's Articles of Association have undergone several revisions, the latest being through Deed No. 08 dated 24 June 2021, by Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., a notary in South Jakarta. This change was officially recorded in the Legal Entity Administration System with Notification Receipt No. AHU-AH.01.03-0429723 dated 19 July 2021, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0040341. AH.01.02 of 2021, dated 19 July 2021.

In 2012, the Indonesian Government designated the Company as the Sei Mangkei Special Economic Zone (SEZ) manager in Simalungun, North Sumatra, through Government Regulation No. 29 of 2012, referring to Law No. 39 of 2009 on Special Economic Zones. With a land area of 1,933.8 hectares, SEZ Sei Mangkei is expected to create up to 83,304 jobs by 2031.

Furthermore, in 2014, through Government Regulation No. 72 of 2014, the government transferred the Republic of Indonesia's shares in PT Perkebunan Nusantara I, II, and IV to XIV to PTPN III (Persero), giving PTPN III (Persero) a 90% ownership in PT Perkebunan Nusantara I, II, and IV to XIV. With this change, PTPN III (Persero) became the Nusantara Holding Plantation Company, serving as the parent company of PT Perkebunan Nusantara I, II, and IV to XIV. Additionally, the formation of the Nusantara Holding Plantation Company aimed to enhance the integration among state-owned plantation companies from PTPN I to PTPN XIV to address challenges in the plantation sector.

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di tahun 2022, PTPN III (Persero) telah melakukan berbagai inisiatif strategis, termasuk membuka kembali LPP Garden Hotel di Yogyakarta, meluncurkan Institut Teknologi Sawit Indonesia, membangun Pabrik Bio CNG berbahan baku limbah cair kelapa sawit, mendukung ketahanan pangan dan energi melalui PT Sinergi Gula Nusantara, dan membangun Pabrik Minyak Goreng baru dengan kapasitas olahan 2500 ton per hari melalui anak usahanya, PT INL. Salah satu pencapaian penting lainnya adalah pengembangan Biopelet Tandan Kosong Sawit dengan mitra dari Jepang untuk mendukung akselerasi pencapaian target NDC.

In recent years, particularly in 2022, PTPN III (Persero) has undertaken various strategic initiatives, including reopening the LPP Garden Hotel in Yogyakarta, launching the Indonesian Palm Oil Technology Institute, constructing a Bio CNG plant using palm oil mill effluent, supporting food and energy security through PT Sinergi Gula Nusantara, and building a new cooking oil factory with a processing capacity of 2,500 tons per day through its subsidiary, PT INL. Another significant achievement is the development of Empty Fruit Bunch Bio-pellets in partnership with a Japanese entity to support the acceleration of the NDC targets.

Penyusunan Rencana Jangka Panjang perusahaan (RJPP) yang diagendakan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan, dengan fokus pada evaluasi kinerja historis, analisis kondisi saat ini, strategi pengembangan, proyeksi keuangan, dan *roadmap* implementasi, serta Integrasi dan sinergi antar BUMN Perkebunan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

The preparation of the company's Long-Term Plan (RJPP) by PT Perkebunan Nusantara III (Persero) aims to realize the company's vision and mission, focusing on historical performance evaluation, current condition analysis, development strategies, financial projections, and implementation roadmap. Integration and synergy among state-owned plantation companies are expected to improve overall efficiency and performance.

Keterangan Perubahan Nama

Name Change Information

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III (Persero) didirikan sejak tanggal 11 Maret 1996. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) maka status perusahaan resmi menjadi Perusahaan Induk (*Holding*) BUMN Perkebunan mulai dari PTPN I, II, dan IV sampai dengan XIV.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero), or PTPN III (Persero), was established on 11 March 1996. With the issuance of Government Regulation No. 72 of 2014 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), the company's status officially became the Holding Company for state-owned plantation enterprises, starting from PTPN I, II, and IV to XIV.

Selanjutnya, pada 1 Desember 2023 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mengumumkan penggabungan 13 (tiga belas) perusahaan menjadi dua *Sub Holding*, yakni PTPN I dan PTPN IV.

Subsequently, on 1 December 2023, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) announced the merger of thirteen (13) companies into two Sub-Holdings, namely PTPN I and PTPN IV.

Subholding PTPN IV dibentuk melalui penggabungan PTPN V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai *surviving entity* dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV. Sedangkan *Subholding* PTPN I dibentuk melalui penggabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I.

PTPN IV sub-holding was formed by merging PTPN V, VI, and XIII into PTPN IV as the surviving entity and the partial demerger of PTPN III (Persero) into PTPN IV. PTPN I subholding was formed by merging PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, and XIV into PTPN I.

Pembentukan *subholding* PTPN IV dan PTPN I merupakan implementasi dari Program Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, khususnya di bidang ketahanan pangan dan energi.

The formation of PTPN IV and PTPN I is part of the National Strategic Program (PSN) aimed at achieving self-reliance, particularly in food and energy security.

Dengan adanya aksi korporasi tersebut maka kedudukan Perusahaan menjadi *Holding* BUMN Perkebunan diatur dalam Anggaran Perusahaan, yang ditegaskan melalui Akta Nomor 07 tanggal 1 Desember 2023 yang disusun oleh Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notaris di Jakarta Selatan.

As a result of this corporate action, the company's status as the Holding Company for state-owned plantation enterprises is stipulated in the Company's Articles, as affirmed through Deed No. 07 dated 1 December 2023, by Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., a notary in South Jakarta.

KEGIATAN USAHA DAN PASAR YANG DILAYANI
BUSINESS ACTIVITIES AND MARKETS SERVED

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Maksud dan tujuan Perseroan dalam menjalankan bisnis telah diatur dan disahkan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan melalui Akta No. AHU-0040341.AH.01.02 tertanggal 19 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN di Jakarta Selatan. Dalam pasal 3 Anggaran Dasar ini menegaskan bahwa tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di sektor agrobisnis dan agroindustri, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. Perseroan juga berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya guna menghasilkan produk dan layanan berkualitas tinggi yang kompetitif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai Perseroan, sesuai dengan Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Berikut ini merupakan jenis-jenis kegiatan usaha bisnis yang dijalankan oleh Perseroan:
1. Aktivitas Perusahaan *Holding*;
2. Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
3. Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman;
4. Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya;
5. Pemungutan Getah Karet;
6. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*);
7. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*)
8. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti kelapa Sawit;
9. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
10. Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit;
11. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
12. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
13. Perkebunan Tebu;
14. Industri Gula Pasir;
15. Industri Pengolahan Kopi;
16. Industri Pengolahan Teh;
17. Industri Pengasapan Karet;
18. Industri Remilling Karet;
19. Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*);
20. Perdagangan Besar atas Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak;
21. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak;
22. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati;
23. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao;
24. Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam bentuk dasar;
25. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, dan Gula merah;

Business Activities Based on Articles of Association

The aims and objectives of the Company in conducting business have been regulated and ratified following the Company's Articles of Association through Deed No. AHU-0040341.AH.01.02 dated 19 July 2021, drafted by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., in South Jakarta. Article 3 of these Articles of Association states that the Company aims to directly engage in agribusiness and agro-industry sectors or through its subsidiaries. The Company is also committed to optimizing resource use to produce high-quality and competitive products and services, aiming to increase the Company's value, per the principles of a Limited Liability Company.

The following are the types of business activities conducted by the Company:
1. Holding Company Activities;
2. Palm Oil Fruit Plantation;
3. Crop Farming for Beverage Materials;
4. Rubber Plantation and Other Latex Producing Plants;
5. Rubber Tapping;
6. Crude Palm Oil Industry;
7. Crude Palm Kernel Oil Industry;
8. Palm Oil and Palm Kernel Oil Separation/Fracturing Industry;
9. Palm Oil and Palm Kernel Oil Refining Industry;
10. Pure Palm Oil Separation/Fracturing Industry;
11. Pure Palm Kernel Oil Separation/Fracturing Industry;
12. Palm Cooking Oil Industry;
13. Sugarcane Plantation;
14. Granulated Sugar Industry;
15. Coffee Processing Industry;
16. Tea Processing Industry;
17. Rubber Smoking Industry;
18. Rubber Remilling Industry;
19. Crumb Rubber Industry;
20. Wholesale Trade on a Fee or Contract Basis;
21. Wholesale Trade of Oil-Bearing Fruits;
22. Wholesale Trade of Vegetable Oils and Fats;
23. Wholesale Trade of Coffee, Tea, and Cocoa;
24. Wholesale Trade of Rubber and Plastic in Primary Forms;
25. Retail Trade of Coffee, Granulated Sugar, and Brown Sugar;

26. Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula;
27. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.

26. Wholesale Trade of Sugar, Chocolate, and Confectionery;
27. Wholesale Trade of Various Goods.

Pasar yang Dilayani

Bentuk Komitmen PTPN III dalam meningkatkan kinerja Perseroan tercermin melalui ekspansi pasar yang kini tidak hanya terbatas di dalam negeri saja, tetapi juga merambah sampai luar negeri dengan cara melakukan ekspor berbagai produk perkebunan Perseroan dan entitas Perseroan.

Markets Served

PTPN III's commitment to improving the Company's performance is reflected in its expansion, extending beyond the domestic market to international markets by exporting various plantation products of the Company and its subsidiaries.

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

Terdapat beberapa produk dan jasa yang dihadirkan oleh Perseroan, mulai dari pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan yang mencakup komoditas kelapa sawit, karet, komoditas aneka tanaman, serta pengembangan bisnis lainnya.

The Company offers a range of products and services, including managing and marketing plantation commodities such as palm oil, rubber, various crops, and other business developments.

Kegiatan Usaha Perseroan

Hingga akhir tahun 2023, terdapat beberapa jenis kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan, yakni:

Business Activities of the Company

As of the end of 2023, the Company has engaged in various business activities, including:



Komoditas Kelapa Sawit

Kelapa Sawit merupakan komoditas utama dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero), perkebunan kelapa sawit tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui anak perusahaan Perkebunan Nusantara Group. Selama tahun 2023, areal tanaman kelapa sawit yang dimiliki oleh Perseroan ialah seluas 559.577,36 ha dengan rincian, atas Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 452.446,28 ha, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 41.651,44

Palm Oil Commodities

Palm oil is the primary commodity of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), with palm oil plantations spread across Indonesia through its subsidiaries under the Perkebunan Nusantara Group. In 2023, the Company owned a total of 559,577.36 hectares of palm oil plantations, comprising Productive Plants (TM) covering 452,446.28 hectares, Non-Productive Plants (TBM) at 41,651.44 hectares, New Plants (TB)/Replanting Plants (TU)/This Year's

ha, Tanaman Baru (TB)/Tanaman Ulang (TU)/ Tanaman Tahun Ini (TTI) 28.543,82 ha, Tanaman Tidak Produktif (TTAD) seluas 36,390.55 ha, dan Pembibitan seluas 545,27 ha.

Komoditas Tebu

Tebu merupakan salah satu komoditas utama dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero), perkebunan tebu tersebar di beberapa wilayah terutama di Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi melalui anak perusahaan Perkebunan Nusantara Group. Selama tahun 2023, luas areal tanaman tebu yang telah ditebang oleh Perseroan ialah seluas 179.294 ha atau mencapai 94% terhadap RKAP 2023 yang direncanakan seluas 190.667 ha dan 101 % terhadap realisasi periode yang sama dari tahun sebelumnya yaitu 177.840 ha.

Komoditas Karet

Komoditas karet merupakan salah satu komoditas yang dikelola langsung oleh PTPN III (Persero). Selama tahun 2023, luas areal tanaman karet yang dimiliki oleh Perseroan ialah seluas 121.976,70 Ha, dengan rincian atas Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 100.428,92 ha, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 4.542,34 ha, Tanaman Baru (TB)/ Tanaman Ulang (TU)/Tanaman Tahun Ini (TTI) seluas 1.121,50 ha, Tanaman Tidak Produktif (TTAD) seluas 15.716,08 ha, dan Pembibitan seluas 167,86 ha.

Komoditas Tembakau

Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan dari PTPN III (Persero), perkebunan Tembakau tersebar di beberapa wilayah melalui anak perusahaan Perkebunan Nusantara Group. Dengan total luas kebun seluas 679,89 ha dengan rincian yakni, kebun sendiri (HGU) seluas 4,00 ha dan sewa seluas 675,89 ha.

Komoditas Aneka Tanaman (Teh, Kopi, dan Kakao)

Terdapat beberapa jenis komoditas aneka tanaman yang dimiliki oleh perseroan, mulai dari komoditas teh, kopi, dan kakao. Dalam tahun 2023, luas tanah komoditas teh yang dimiliki oleh Perseroan ialah seluas 23.637,23 ha dan berada di Regional 2 PTPN IV (eks PTPN IV), Regional 4 PTPN IV (eks PTPN VI), Regional 7 PTPN I (eks PTPN VII), Regional 2 PTPN I (eks PTPN VIII), Regional 3 PTPN I (eks PTPN IX), dan Regional 5 PTPN I (eks PTPN XII) di mana areal terluas 58,1% berada di Regional 2 PTPN I (eks PTPN VIII) seluas 13.734,22 ha.

Kemudian pada komoditas kopi, total areal tanaman kopi yang dimiliki Perseroan ialah seluas 9.938,08 ha yang terletak

Plants (TTI) spanning 28,543.82 hectares, Non-Productive Plants (TTAD) totaling 36,390.55 hectares, and Nursery area at 545.27 hectares.

Sugarcane Commodities

Sugarcane is another major commodity of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), with plantations located primarily in Sumatra, Java, and Sulawesi through its subsidiaries under the Perkebunan Nusantara Group. In 2023, the Company harvested 179,294 hectares of sugarcane, achieving 94% of the 2023 RKAP target of 190,667 hectares and 101% compared to the same period last year, which was 177,840 hectares.

Rubber Commodities

Rubber is one of the commodities directly managed by PTPN III (Persero). In 2023, the Company owned a total of 121,976.70 hectares of rubber plantations, detailed as follows: Productive Plants (TM): 100,428.92 hectares; Non-Productive Plants (TBM): 4,542.34 hectares; New/Replanting/This Year's Plants (TB/TU/TTI): 1,121.50 hectares; Unproductive Plants (TTAD): 15,716.08 hectares; Seedlings: 167.86 hectares.

Tobacco Commodities

Tobacco is one of the plantation commodities of PTPN III (Persero), with plantations spread across several regions through its subsidiaries under the Perkebunan Nusantara Group. The total plantation area is 679.89 hectares, with 4.00 hectares owned (HGU) and 675.89 hectares leased.

Various Crops Commodities (Tea, Coffee, and Cocoa)

The Company also owns various crops, including tea, coffee, and cocoa. In 2023, the tea plantation area was 23,637.23 hectares, managed by Regional 2 PTPN IV (formerly PTPN IV), Regional 4 PTPN IV (formerly PTPN VI), Regional 7 PTPN I (formerly PTPN VII), Regional 2 PTPN I (formerly PTPN VIII), Regional 3 PTPN I (formerly PTPN IX), and Regional 5 PTPN I (formerly PTPN XII) cover the largest area, with 58.1% located in Regional 2 PTPN I (formerly PTPN VIII), spanning 13,734.22 hectares.

For coffee commodities, the company owns a total coffee plantation area of 9,938.08 hectares, located in Regional 3

di Regional 3 PTPN IV (eks PTPN V (KSO dengan PTPN XII), Regional 4 PTPN IV (eks PTPN VI), Regional 3 PTPN I (eks PTPN IX). Regional 5 PTPN I (eks PTPN XII) yang memegang area terluas, yakni sebesar 87,5%.

Pengembangan Bisnis Lainnya

Dalam upaya pengembangan bisnis pada tahun 2023, PTPN III memiliki sejumlah inisiatif program strategis pengembangan bisnis dan hilirisasi khususnya untuk komoditas kelapa sawit dan gula. Program tersebut tidak hanya sebagai bentuk komitmen PTPN Group dalam pengembangan usaha, melainkan juga bentuk kepatuhan atas penugasan yang telah diatur dalam regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Untuk komoditas kelapa sawit, terdapat tiga inisiatif strategis yang masuk dalam Program Strategis Nasional hilirisasi kelapa sawit sebagaimana tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian nomor 9 tahun 2022 (sekarang Permenko Bidang Perekonomian nomor 7 tahun 2023), antara lain :

1. Pembangunan pabrik minyak goreng unit II di KEK Sei Mangkei kapasitas 750.000 ton CPO/tahun.
2. Pembangunan pabrik biodiesel di KEK Sei Mangkei kapasitas 450.000 ton RBDPO/tahun.
3. Kerjasama pengembangan 6 unit bioCNG plant di pabrik kelapa sawit (PKS) PTPN Group.

Melalui Perpres 40 tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), PTPN III mendapatkan penugasan untuk dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian swasembada gula Nasional serta penyediaan bioethanol. Adapun target yang diharapkan Pemerintah dari PTPN III antara lain :

1. Peningkatan produktivitas tebu sebesar 87 ton/ha.
2. Perluasan areal tebu minimal sebesar 179.000 ha.
3. Pencapaian rendemen gula sebesar 8,05%.

Ketiga target tersebut diharapkan dapat tercapai pada tahun 2028. Adapun implementasi atas Perpres 40 tahun 2023 tersebut saat ini dikawal oleh PT Sinergi Gula Nusantara sebagai *subholding* PTPN III (Persero) yang membidangi komoditas tebu.

Pada tahun 2023, PTPN III juga telah menyelesaikan restrukturisasi anak perusahaan pada tanggal 1 Desember 2023 dengan terbentuknya 2 *subholding* baru yakni :

1. PT Perkebunan Nusantara IV sebagai *subholding* Kelapa Sawit.
2. PT Perkebunan Nusantara I sebagai *subholding Supporting.*

Kedepannya, pengembangan bisnis baik untuk komoditas kelapa sawit maupun komoditas lainnya akan dikawal langsung oleh masing-masing *subholding* sesuai bidangnya.

PTPN IV (formerly PTPN V, in cooperation with PTPN XII), Regional 4 PTPN IV (formerly PTPN VI), and Regional 3 PTPN I (formerly PTPN IX). Regional 5 PTPN I (formerly PTPN XII) holds the largest area, accounting for 87.5%.

Other Business Developments

In 2023, PTPN III undertook several strategic business development initiatives, particularly in the palm oil and sugar commodities. These programs are not only a demonstration of PTPN Group's commitment to business development but also compliance with government regulations.

For the palm oil commodity, three strategic initiatives fall under the National Strategic Program for palm oil downstream as outlined in Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 9 of 2022 (now Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 7 of 2023), including:

1. Construction of a second palm oil mill at KEK Sei Mangkei with a capacity of 750,000 tons of CPO annually.
2. Construction of a biodiesel plant at KEK Sei Mangkei with a capacity of 450,000 tons of RBDPO per year.
3. Collaboration on developing six BioCNG plants at PTPN Group's palm oil mills (PKS).

Through Presidential Regulation No. 40 of 2023 on Accelerating National Sugar Self-Sufficiency and Providing Bioethanol as Biofuel, PTPN III has been tasked with contributing to achieving national sugar self-sufficiency and bioethanol provision. The government expects PTPN III to achieve the following targets by 2028:

1. Increasing sugarcane productivity to 87 tons/hectare.
2. Expanding the sugarcane plantation area to a minimum of 179,000 hectares.
3. Achieving a sugar yield of 8.05%.

The implementation of Presidential Regulation No. 40 of 2023 is currently overseen by PT Sinergi Gula Nusantara, a sub-holding of PTPN III (Persero) focused on sugarcane commodities.

In 2023, PTPN III also completed the restructuring of its subsidiaries on 1 December 2023, forming two new sub-holdings:

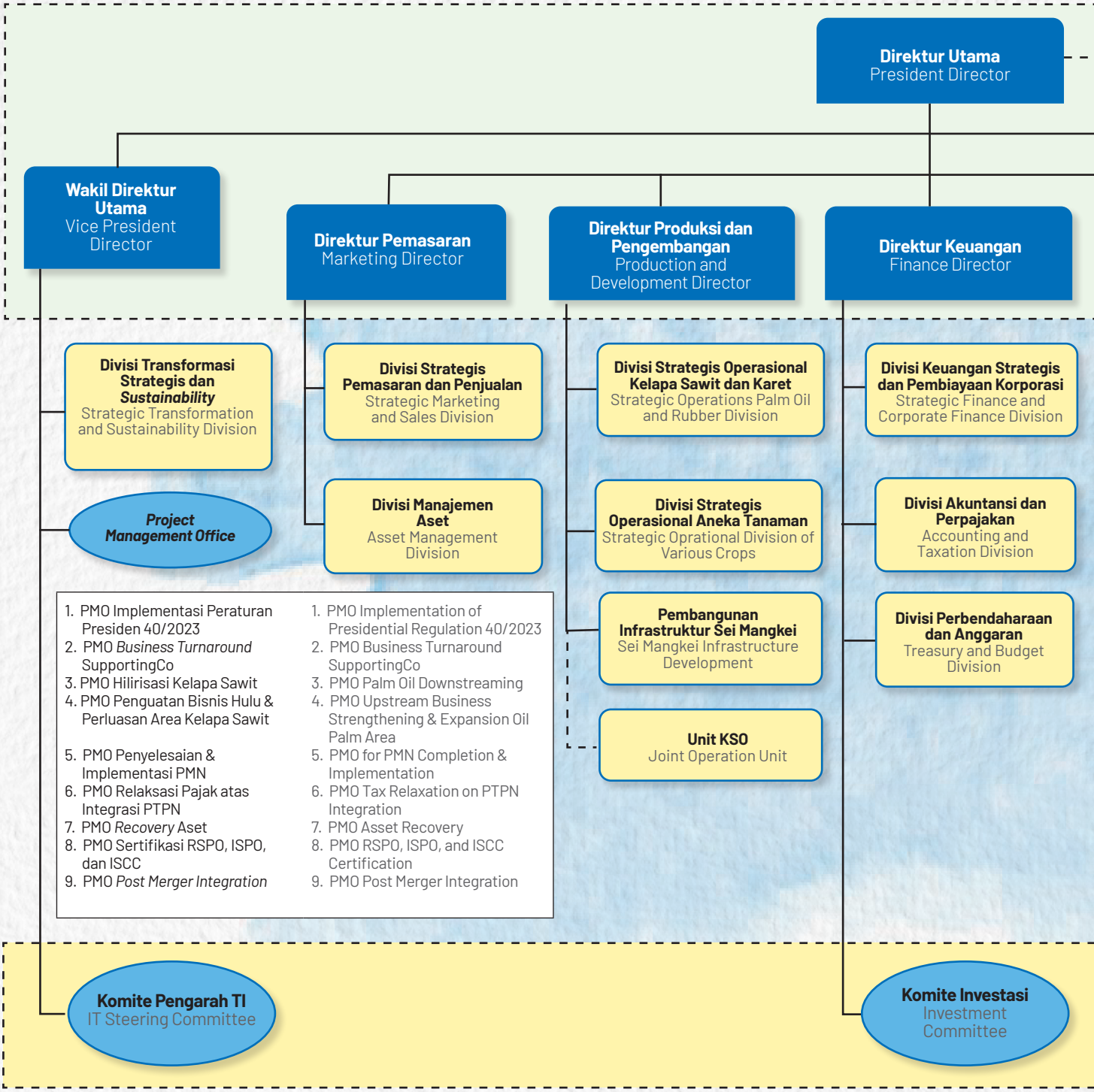
1. PT Perkebunan Nusantara IV as the Palm Oil Sub-Holding.
2. PT Perkebunan Nusantara I as the Supporting Sub-Holding.

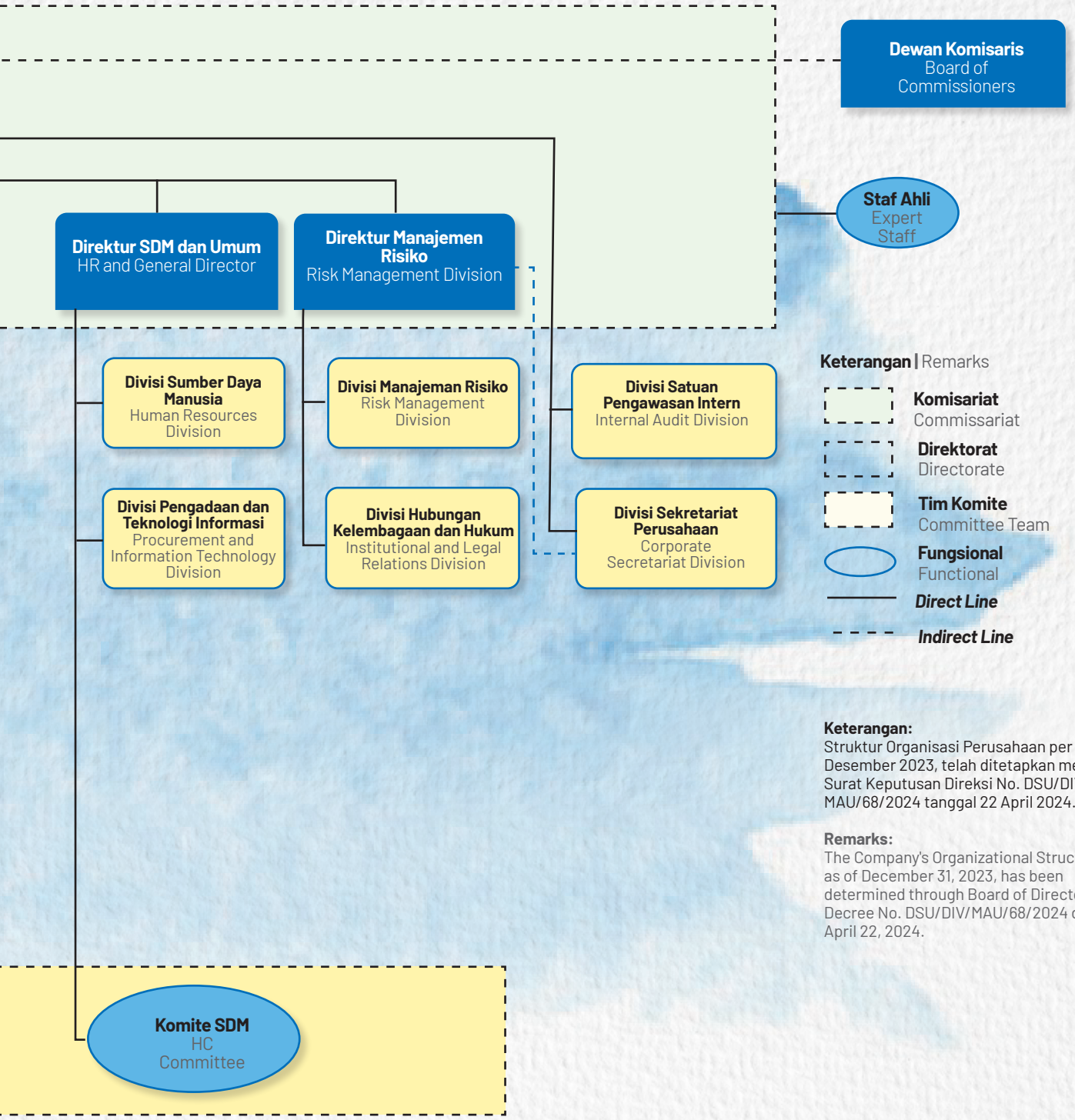
In the future, business development for both palm oil and other commodities will be directly managed by each sub-holding according to their respective sectors.

STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur Organisasi Perusahaan terbaru telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. DSU/DIV/MAU/68/2024 tanggal 22 April 2024 sebagaimana ditampilkan berikut ini.

The latest organizational structure of the Company has been established through the Board of Directors Decision Letter No. DSU/DIV/MAU/68/2024 dated 22 April 2024, as shown below.





Keterangan:
Struktur Organisasi Perusahaan per 31 Desember 2023, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. DSU/DIV/MAU/68/2024 tanggal 22 April 2024.

Remarks:
The Company's Organizational Structure as of December 31, 2023, has been determined through Board of Directors Decree No. DSU/DIV/MAU/68/2024 dated April 22, 2024.

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara, Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mendukung implementasi kebijakan dan program pemerintah dengan memberikan kontribusi ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam sub-sektor perkebunan. Selain itu, Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dengan prinsip-prinsip yang sehat, yang berfokus pada peningkatan nilai tambah bagi negara sebagai pemegang saham utama.

As a state-owned enterprise, the Company was established to support the implementation of government policies and programs by contributing to economic growth and sustainable development, particularly in the plantation sub-sector. Additionally, the Company aims to increase profits based on sound principles, focusing on enhancing value for the state as the principal shareholder.

Berikut ini merupakan visi, misi dan budaya yang dimiliki Perusahaan.

Below are the Company's vision, mission, and values.

VISI
VISION

Menjadi Perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa.
To become a leading national agribusiness company with world-class competitiveness, continuously contributing to the nation's progress.

MISI
MISSION



1. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan.
2. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insani.
4. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbal hasil terbaik.
5. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan.

1. To produce high-quality products for customers.
2. To develop superior work process capabilities through continuous improvement and innovation with good corporate governance.
3. To foster an excellent organization and culture with competent and prosperous human resources, realizing each individual's potential.
4. To optimize asset utilization to provide the best returns.
5. To contribute to the welfare of society and environmental sustainability for the benefit of future generations.

Review Visi dan Misi Perusahaan oleh Manajemen Kunci

Secara berkala VIsi dan misi Perusahaan akan dievaluasi oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan manajemen lainnya untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan bisnis. Pernyataan mengenai Visi dan Misi Perusahaan telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi pada Februari 2021 maupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024 yang telah disetujui Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Utama atau Pengendali, No S-483/ MBU 07/2021 perihal Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020 – 2024 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) pada tanggal 07 Juli 2021.

Review of Vision and Mission by Key Management

The Company's vision and mission will be periodically evaluated by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and other management to ensure alignment with business developments. The statements of the Company's vision and mission were approved and signed by the Board of Directors in February 2021, as well as in the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2020-2024, approved by the Ministry of State-Owned Enterprises as the Main or Controlling Shareholder, No. S-483/MBU 07/2021 regarding the Approval of the Long-Term Plan (RJPP) 2020-2024 of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) on 7 July 2021.

Nilai-Nilai Inti Perusahaan

Company Core Values

AKHLAK

AMANAH Trust	**KOMPETEN** Competent	**HARMONIS** Harmonious	**LOYAL** Loyal	**ADAPTIF** Adaptive	**KOLABORATIF** Collaborative
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan Upholding the trust given.	**Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas** Continuously improving capabilities.	**Saling peduli dan menghargai perbedaan** Caring for each other and respecting differences.	**Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara** Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State.	**Terus berinovasi dan antusias dalam mengerakkan ataupun menghadapi perubahan** Continuously innovating and enthusiastic in driving or facing changes.	**Membangun kerja sama yang sinergis** Building synergistic cooperation.

Paradigma Bisnis Perusahaan

Seluruh paradigma yang dimiliki oleh Perusahaan sejalan dengan seluruh pemangku kepentingan di setiap kebijakannya, yaitu:

1. Perubahan, perbaikan, dan peningkatan metode dan kinerja adalah suatu keharusan;
2. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama untuk meningkatkan persaingan;
3. Setiap kegiatan bisnis harus menghasilkan nilai tambah bagi Perusahaan;
4. Pengembangan hubungan industrial yang egaliter berdasarkan keterbukaan, kesetaraan, dan kebhinekaan;
5. Pengembangan SDM yang terintegrasi untuk membangun kapital insani (*human capital*) dan intelektual yang dibutuhkan Perusahaan;
6. Kepemimpinan yang efektif membangun pengaruh melalui kemampuan membagi ilmu, membina hubungan baik, dan menjadi panutan;
7. Penghargaan diberikan kepada karyawan berdasarkan kompetensi dan kinerja;
8. Efektivitas operasional harus didukung oleh struktur organisasi yang sederhana dan dinamis;
9. Pemanfaatan teknologi sebagai perangkat peningkatan produktivitas kerja dan keunggulan kompetitif;
10. Keputusan bisnis diambil berdasarkan fakta dan data yang akurat;
11. Setiap tugas dan operasional perusahaan dilaksanakan dengan cepat tanggap, cepat tindak lanjut, tuntas, berkualitas, dan penuh tanggung jawab;
12. Seluruh aktivitas Perusahaan harus berorientasi pada peningkatan mutu dan lingkungan.

Business Paradigms

The Company's business paradigms are aligned with all stakeholders in every policy:

1. Change, improvement, and performance enhancement are imperative.
2. Customer satisfaction is the top priority in enhancing competitiveness.
3. Every business activity must add value to the Company.
4. Developing egalitarian industrial relations based on openness, equality, and diversity.
5. Integrated human resource development to build the human and intellectual capital needed by the Company.
6. Effective leadership is influenced through knowledge sharing, good relationships, and exemplary leadership.
7. Recognition of employees based on competency and performance.
8. A simple and dynamic organizational structure supports operational effectiveness.
9. Utilization of technology to enhance work productivity and competitive advantage.
10. Business decisions are based on accurate facts and data.
11. Every task and operation the Company performs should be responsive, timely, thorough, high-quality, and responsible.
12. All Company activities should focus on quality and environmental improvement.

MAKNA LOGO PERUSAHAAN
MEANING OF THE COMPANY LOGO



Angka 3 Romawi
Number 3 in Roman numerals

Melambangkan identitas dan basis orientasi bisnis Perusahaan (3P: *People, Planet, Profit*).

Symbolizes the identity and business orientation of the Company (3P: People, Planet, Profit).

Simpul Tali
Knot

Melambangkan Perusahaan sebagai *Holding* BUMN Perkebunan yang akan menjadi pemersatu dan mensinergikan PTPN.

Represents the Company as a holding of state-owned plantations, unifying and synergizing the PTPN.

Daun
Leaf

Menunjukkan inti bisnis perusahaan yakni perkebunan dengan aset utamanya adalah tanaman.

Indicates the company's core business, plantations, with its primary asset being plants.

***Infinity* (tidak ada akhir)**
Infinity Symbol

Menunjukkan harapan dan tekad Perusahaan untuk berkelanjutan sepanjang masa.

Demonstrates the Company's hope and determination for sustainability over time.

PLANET

- *Fertility*
- *Growth*
- *Harmony with Nature*
- *Strong Determination*

PROFIT

- *Prosperity*
- *Glory*
- *Welfare*

PEOPLE

- *Professional*
- *GO GLOBAL*



PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Hingga akhir tahun 2023, terdapat perubahan mengenai susunan dan komposisi Dewan Komisaris. Perubahan susunan atau komposisi tersebut tercatat dan diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-394/MBU/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III.

Berikut ini merupakan susunan dan komposisi Dewan Komisaris PTPN III (Persero) yang menjabat di tahun 2023:

By the end of 2023, there were changes in the composition of the Board of Commissioners. These changes are recorded and regulated based on the Minister of SOEs Decree No. SK-394/MBU/12/2023 dated 19 December 2023, regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

The following is the composition of the Board of Commissioners of PTPN III (Persero) serving in 2023:



Zulkifli Zaini

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner



Periode Jabatan | Term of Office	
10 Desember 2021-10 Desember 2026	December 10, 2021-December 10, 2026
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Palembang, 22 Oktober 1956	Palembang, October 22, 1956
Usia | Age	
67 tahun	67 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-398/MBU/12/2021	Decree of the Minister of SOEs No. SK-398/MBU/12/2021
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Teknik Institut Teknologi Bandung (1980) • MBA Washington University, St Louis (1994)	• Bachelor of Engineering, Bandung Institute of Technology (1980) • MBA, Washington University, St. Louis (1994)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• *Civil & Structural Engineer*, Wiratman and Associate, (1980) • *Account Officer* Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), (1988) • *Head of Project Finance* Bapindo Cabang Surabaya (1994) • Wakil Kepala Cabang Bapindo Cabang Bandung (1996) • Kepala Cabang Bapindo Jambi (1998) • *Senior Manager* dan *Team Leader Credit Risk Management, Vice President and Division Head, Government Relationship Management* Bank Mandiri (1999—2003) • *Senior Vice President dan Group Head Retail Risk Management* Bank Mandiri (2003) • *Managing Director Distribution Network* Bank Mandiri (2003) • *Managing Director Commercial Banking* Bank Mandiri (2006—2010) • *Managing Director Technology & Operation* Bank Mandiri (2010) • Direktur Utama Bank Mandiri (2010—2013) • Komisaris PT PLN (Persero) (2013—2015) • Komisaris PT Bank Negara Indonesia Tbk (2015—2016) • Komisaris pada PT Indonesia Infrastructure Finance (2016—2017) • Chairman Ikatan Bankir Indonesia (2011—2019) • Komisaris PT Bank Permata Tbk (2017—2019) • Komisaris PT Triputra Agro Persada (2013—2019) • Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2019—2021) • Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2021—Sekarang)	• Civil & Structural Engineer, Wiratman and Associate (1980) • Account Officer, Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) (1988) • Head of Project Finance, Bapindo Surabaya Branch (1994) • Deputy Branch Head, Bapindo Bandung Branch (1996) • Branch Head, Bapindo Jambi Branch (1998) • Senior Manager and Team Leader Credit Risk Management, Vice President and Division Head, Government Relationship Management, Bank Mandiri (1999–2003) • Senior Vice President and Group Head Retail Risk Management, Bank Mandiri (2003) • Managing Director Distribution Network, Bank Mandiri (2003) • Managing Director Commercial Banking, Bank Mandiri (2006–2010) • Managing Director Technology & Operation, Bank Mandiri (2010) • President Director, Bank Mandiri (2010–2013) • Commissioner, PT PLN (Persero) (2013–2015) • Commissioner, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2015–2016) • Commissioner, PT Indonesia Infrastructure Finance (2016–2017) • Chairman, Indonesian Bankers Association (2011–2019) • Commissioner, PT Bank Permata Tbk (2017–2019) • Commissioner, PT Triputra Agro Persada (2013–2019) • President Director, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2019–2021) • President Commissioner, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2021–Present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
• Ketua Komite Nominasi & Remunerasi PTPN III (Persero) (26 Agustus 2022-sekarang) • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi PTPN III (Persero) (sampai saat ini)	• Head of the Nomination & Remuneration Committee of PTPN III (Persero) (August 26, 2022 - present) • Head of the Integrated Governance Committee of PTPN III (Persero) (until present)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Erwan Pelawi

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Periode Jabatan | Term of Office	
26 Februari 2020-19 Desember 2023	February 26, 2020-December 19, 2023
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Medan, 29 Mei 1960	Medan, May 29, 1960
Usia | Age	
63 tahun	63 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-56/MBU/02/2020	Decree of the Minister of SOEs No. SK-56/MBU/02/2020
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Padjajaran (1985) • MBA University of Bridgeport Connecticut USA (1988)	• Bachelor of Economics in Management, Padjadjaran University (1985) • MBA, University of Bridgeport, Connecticut USA (1988)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Staf *Marketing* PT New Pharmindo (1985—1986) • *Credit Officer, Assistant Vice President* Bank Ficorinvest (1994—1995) • *Assistant Vice President Division Head – Corporate Banking Marketing* II Bank Universal (1995—1997) • *Vice President, Group Head Corporate & Merchant* Bank Universal (1997—1998) • *Vice President, Group Head Special Asset Management* Bank Universal (1998—1999) • Direktur PT PNM Venture Capital (1999-2000) • CEO PT PNM Venture Capital (2000—2006) • Direktur Keuangan PT Perkebunan Nusantara V (2006—2012) • Direktur Keuangan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2012—2016) • Direktur Keuangan dan Korporasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2016—2017) • Direktur Manajemen Operasi dan Pengembangan PT Perkebunan Nusantara III (2017—2018) • Komisaris Utama PT Riset Perkebunan Nusantara (2016-2019) • Komisaris Independen pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2020—2023)	• Marketing Staff, PT New Pharmindo (1985–1986) • Credit Officer, Assistant Vice President, Bank Ficorinvest (1994–1995) • Assistant Vice President Division Head – Corporate Banking Marketing II, Bank Universal (1995–1997) • Vice President, Group Head Corporate & Merchant, Bank Universal (1997–1998) • Vice President, Group Head Special Asset Management, Bank Universal (1998–1999) • Director, PT PNM Venture Capital (1999–2000) • CEO, PT PNM Venture Capital (2000–2006) • Finance Director, PT Perkebunan Nusantara V (2006–2012) • Finance Director, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2012–2016) • Finance and Corporate Director, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2016–2017) • Operational and Development Management Director, PT Perkebunan Nusantara III (2017–2018) • President Commissioner of PT Riset Perkebunan Nusantara (2016–2019) • Independent Commissioner, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2020–2023)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Ketua Komite Audit PTPN III (17 Januari-19 Desember 2023)	Head of the Audit Committee of PTPN III (January 17 - December 19, 2023)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Catatan | Note:
Masa jabatan berakhir pada 19 Desember 2023.
Term of office ends on December 19, 2023.

Amal Bakti Pulungan

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Periode Jabatan | Term of Office	
26 Februari 2020-19 Desember 2023	February 26, 2020-December 19, 2023
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Medan, 06 Oktober 1956	Medan, October 06, 1956
Usia | Age	
67 tahun	67 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-56/MBU/02/2020	Decree of the Minister of SOEs No. SK-56/MBU/02/2020
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Agronomi Universitas Padjajaran (1981) • Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor (1995)	• Bachelor of Agronomy, Padjadjaran University (1981) • Master of Agribusiness Management, IPB University (1995)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Asisten kebun PNP VII (1982—1983) • Asisten Tanaman Kebun Pasir Mendoge (1982—1984) • Asisten Tanaman Kebun Dolok Ilir (1984—1986) • Staf Tanaman LO Pontianak Kalimantan Barat (1986) • Asisten Tanaman Kebun Bukit Lima (1986—1987) • Staf Bagian Tanaman Kantor Direksi Bah Jambi (1987—1993) • Pjs. Kaur Pengelolaan Teknis Tanaman Kantor Direksi Bah Jambi (1993) • Pjs. Asisten Kepala Kebun Laras (1993) • Asisten Kepala Proyek Sosa (1993) • Asisten Kepala Kebun Dolok Ilir (1993—1994) • Staf Bagian Tanaman Kantor Direksi Bah Jambi (1994—1995) • Staf Biro SPI Kantor Direksi Bah Jambi (1995—1996) • Pj. Administratur Kebun Marihat (1996) • Administratur Kebun Bah Jambi (1996-2001) • Administratur Kebun Pabatu (2001-2003) • Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantara III (2003—2012) • Komisaris PT Perkebunan Nusantara V (2012—2014) • Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara V (2014—2016) • Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2020—2023)	• Plantation Assistant, PNP VII (1982–1983) • Plant Assistant, Pasir Mendoge Plantation (1982–1984) • Plant Assistant, Dolok Ilir Plantation (1984–1986) • Plant Staff, LO Pontianak West Kalimantan (1986) • Plant Assistant, Bukit Lima Plantation (1986–1987) • Plant Department Staff, Bah Jambi Head Office (1987–1993) • Acting Head of Technical Plant Management, Bah Jambi Head Office (1993) • Acting Head Assistant, Laras Plantation (1993) • Project Head Assistant, Sosa Project (1993) • Head Assistant, Dolok Ilir Plantation (1993–1994) • Plant Department Staff, Bah Jambi Head Office (1994–1995) • SPI Bureau Staff, Bah Jambi Head Office (1995–1996) • Acting Administrator, Marihat Plantation (1996) • Administrator, Bah Jambi Plantation (1996–2001) • Administrator, Pabatu Plantation (2001–2003) • Production Director, PT Perkebunan Nusantara III (2003–2012) • Commissioner, PT Perkebunan Nusantara V (2012–2014) • President Director, PT Perkebunan Nusantara V (2014–2016) • Independent Commissioner, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2020–2023)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Anggota Komite Audit PTPN III (19 Maret 2023 - 19 Desember 2023)	Member of the Audit Committee of PTPN III (March 19, 2023 - December 19, 2023)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Catatan | Note:
Masa jabatan berakhir pada 19 Desember 2023.
Term of office ends on December 19, 2023.

Asep Subarkah Yusuf

Komisaris
Commissioner



Periode Jabatan | Term of Office	
26 Februari 2020-26 Februari 2025	February 26, 2020-February 26, 2025
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Cirebon, 13 Desember 1961	Cirebon, December 13, 1961
Usia | Age	
62 tahun	62 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-56/ MBU/02/2020	Decree of the Minister of SOEs No. SK-56/ MBU/02/2020
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• AKABRI (1984) • SESSARCAB Infanteri (1984) • Komando (1985) • *Airborne/Ranger/Path Finder/Special Forces* (1987) • SELAPA I (1991) • *Security & Inteligence Course* (1993) • SELAPA II (1995) • Susdanyonif (1997) • SESKOAD (1997) • Sus Staf Jemen (2002) • SESKO TNI (2004) • Cimic Course (2005) • LEMHANAS (2009	• AKABRI (1984) • SESSARCAB Infantry (1984) • Commando (1985) • Airborne/Ranger/PathFinder/Special Forces (1987) • SELAPA I (1991) • Security & Intelligence Course (1993) • SELAPA II (1995) • Susdanyonif (1997) • SESKOAD (1997) • Sus Staf Jemen (2002) • SESKO TNI (2004) • CIMIC Course (2005) • LEMHANAS (2009)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Danton Kopassus (1984—1986) **Grup 1 Kopassus** • Danunit (1986-1989) • Dantim (1989) • Pa Intel, Pasi dan Papers serta PGS Danden (1990—1994) **Grup 3 Pusdikpassus** • Kasi (1995) • Danseko (1996) • Danyon 11-4 Grup 1 Kopassus (1998) • Dandim 1705/Paniai DAM XVII/Tkr (2000) • Waasops Kasdam XVII/Tkr (2001) • Kasrem 171/PVT Dam XVII/Tkr (2003) • Pamen Kodam XVII dan Dosen Golongan V Seskoad (2004—2005) • Kasubdispensus Dispenad (2006) • Asisten Logistik Danjen Kopassus (2006) • Dan Grup 2 Kopassus (2007) • Sahli Pangdam II Bidang Hum dan Ter (2008) • Pamen Ahli Gol IV Bid Diklat Kopassus (2011) • Kapusjianstra TNI (2012) • Sekretaris Kodiklat (2013) • Direktur Umum Kodiklat TNI AD (2016) • Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan (2016) • Deputi Kontra Intelijen Badan Inteligen Negara (2019) • Tenaga Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (sampai saat ini) • Komisaris pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)(2020—Sekarang)	• Platoon Leader, Kopassus (1984—1986) **Group 1 Kopassus** • Unit Leader (1986-1989) • Team Leader (1989) • Intelligence Officer, Officer, Papers, and Acting Den Leader (1990–1994) **Grup 3 Pusdikpassus** • Section Head (1995) • Section Commander (1996) • Commander, Battalion 11-4, Group 1, Kopassus (1998) • District Military Commander, 1705/Paniai, Regional Military Command XVII/Tkr (2000) • Deputy Assistant for Operations, Regional Military Command XVII/Tkr (2001) • Chief of Staff, 171/PVT, Regional Military Command XVII/Tkr (2003) • Senior Officer, Regional Military Command XVII and Lecturer, Class V, Seskoad (2004—2005) • Head of Pensus Division, Dispenad (2006) • Logistics Assistant to the Commander of Kopassus (2006) • Commander, Group 2, Kopassus (2007) • Exceptional Staff to the Commander of Regional Military Command II for Public Relations and Territorial Affairs (2008) • Senior Expert Officer, Class IV, Education and Training, Kopassus (2011) • Head of Strategic Research Center, TNI (2012) • Secretary of the Training and Education Command (2013) • Director General of the Training and Education Command, Indonesian Army (2016) • Senior Advisor on Defense and Security (2016) • Deputy for Counter-Intelligence, State Intelligence Agency (2019) • Expert Staff to the Head of the National Intelligence Agency (until present) • Commissioner of PT Perkebunan Nusantara III (Persero)(2020—Present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
• Ketua Komite Pemantau Risiko PTPN III (17 Januari 2023-sekarang) • Deputi Kontra Intelijen, Badan Intelijen Negara (BIN)	• Head of the Risk Monitoring Committee of PTPN III (January 17, 2023-present) • Deputy for Counter-Intelligence, State Intelligence Agency (BIN)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Arie Yuriwin

Komisaris
Commissioner



Periode Jabatan | Term of Office	
19 Maret 2018-19 Maret 2023	March 19, 2018-March 19, 2023
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Medan, 25 Mei 1960	Medan, May 25, 1960
Usia | Age	
63 tahun	63 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-230/ MBU/10/2019	Decree of the Minister of SOEs No. SK-230/ MBU/10/2019
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada (1985) • Magister Ilmu Administrasi, Universitas Moestopo Beragama (2004)	• Bachelor of Law, Gadjah Mada University (1985) • Master of Administrative Sciences, Moestopo University Beragama (2004)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Kepala Biro TU Pimpinan dan Protokol (2006—2008) • Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat (2008—2009) • Direktur Konsolidasi Tanah (2009—2011) • Plt. Direktur Landreform (2009—2011) • Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bangka Belitung (2011—2012) • Kepala Kantor Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2012—2016) • Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara II (2017—2018) • Direktur Jenderal Pengadaan Tanah (2016—2021) • Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pengadaan Tanah (2021—Sekarang) • Komisaris pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2018—2023)	• Head of the Leadership and Protocol Bureau (2006—2008) • Head of the West Sumatra Regional Office (2008—2009) • Director of Land Consolidation (2009—2011) • Acting Director of Land Reform (2009—2011) • Head of the Bangka Belitung Provincial Office (2011—2012) • Head of the Special Region of Yogyakarta Provincial Office (2012—2016) • Independent Commissioner of PT Perkebunan Nusantara II (2017—2018) • Director General of Land Procurement (2016—2021) • Senior Advisor to the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency on Land Procurement (2021—Present) • Commissioner of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2018—2023)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
• Anggota Komite Audit PTPN III (Persero) (sampai dengan 19 Maret 2023) • Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (2016—sekarang) • Advisor di Bidang Pertanahan BUMN (PT Angkasa Pura I, PT Sucofindo, Perum Perumnas, PT KAI, PT Pertamina dan PT Pelindo II) • SKK Migas (2020—Sekarang)	• Member of the Audit Committee of PTPN III (Persero) (until March 19, 2023) • Director General of Land Procurement, Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency (2016—Present) • Advisor in the Field of Land Affairs for State-Owned Enterprises (PT Angkasa Pura I, PT Sucofindo, Perum Perumnas, PT KAI, PT Pertamina, and PT Pelindo II) • Member of SKK Migas (2020—Present)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	She does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Catatan | Note:
Masa jabatan berakhir pada 19 Maret 2023.
Term of office ends on March 19, 2023.

Wisto Prihadi

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Periode Jabatan | Term of Office	
25 Agustus 2021-25 Agustus 2026	August 25, 2021-August 25, 2026
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Jakarta, 19 Desember 1961	Jakarta, December 19, 1961
Usia | Age	
62 tahun	62 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-282/ MBU/08/2021	Decree of the Minister of SOEs No. SK-282/ MBU/08/2021
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (1986) • Magister *Management* Institut Pertanian Bogor (2002)	• Bachelor of Economics, Christian University of Indonesia (1986) • Master of Management, IPB University (2002)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Kepala Audit Intern Wilayah BRI Medan (2011—2012) • Kepala Divisi Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan (2012—2014) • Kepala Audit Intern Wilayah BRI Bandung (2014—2015) • Kepala Audit Intern BRI Wilayah Jakarta I (2016) • Direktur Utama PT BRI Multifinance Indonesia (2018—2020) • Direktur Kepatuhan Bank BRI (2020) • Komisaris Independen pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2021—Sekarang)	• Head of Internal Audit for the Medan Region, BRI (2011—2012) • Head of the Fixed Asset Management and Procurement Division (2012—2014) • Head of Internal Audit for the Bandung Region, BRI (2014—2015) • Head of Internal Audit for the Jakarta I Region, BRI (2016) • President Director of PT BRI Multifinance Indonesia (2018—2020) • Director of Compliance, Bank BRI (2020) • Independent Commissioner of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2021—Present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
• Komite Audit PTPN III (Persero) (20 Maret 2023-19 Desember 2023 • Ketua Komite Pemantau Risiko (19 Desember 2023-sekarang)	• Audit Committee of PTPN III (Persero) (March 20, 2023 - December 19, 2023) • Head of the Risk Monitoring Committee (December 19, 2023 - present)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Ardan Adiperdana

Komisaris
Commissioner



Periode Jabatan | Term of Office	
25 Maret 2022-25 Maret 2027	March 25, 2022-March 25, 2027
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Singkawang, 16 Juni 1959	Singkawang, June 16, 1959
Usia | Age	
64 tahun	64 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-86/MBU/03/2022	Decree of the Minister of SOEs No. SK-86/MBU/03/2022
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Akuntansi STAN Jakarta (1987) • Mba Saint Mary's University SMU Halifax, Canada (1992) • Doktor bidang Strategic Management Universitas Indonesia (2013)	• Accounting, STAN Jakarta (1987) • MBA, Saint Mary's University, Halifax, Canada (1992) • Doctorate in Strategic Management, University of Indonesia (2013)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (2006) • Komisaris HIN (2011) • Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian (2013) • Komisaris Utama PT Jasa Raharja (2013-2016) • Kepala BPKP (2015-2019) • Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019) • Komisaris Bank Mandiri (2016-2021) • Komisaris PLN (2021—2022) • Staf Khusus Menteri BUMN (2021—Sekarang) • Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero)(2022—Sekarang)	• Deputy Head of BPKP for State Accountant Affairs (2006) • Commissioner, HIN (2011) • Deputy Head of BPKP for Economic Affairs (2013) • President Commissioner, PT Jasa Raharja (2013-2016) • Head of BPKP (2015-2019) • Special Staff to the Minister of Tourism and Creative Economy (2019) • Commissioner, Bank Mandiri (2016-2021) • Commissioner, PLN (2021—2022) • Special Staff to the Minister of State-Owned Enterprises (2021—Present) • Commissioner, PT Perkebunan Nusantara III (Persero)(2022—Present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
• Anggota Komite Audit PTPN III (Persero)(sampai dengan 19 Desember 2023) • Ketua Komite Audit PTPN III (Persero)	• Member of the Audit Committee of PTPN III (Persero)(until December 19, 2023) • Head of the Audit Committee of PTPN III (Persero)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Alhilal Hamdi

Komisaris
Commissioner



Periode Jabatan | Term of Office	
4 Januari 2023-4 Januari 2028	January 4, 2023-January 4, 2028
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Cilacap, 28 Maret 1954	Cilacap, March 28, 1954
Usia | Age	
69 tahun	69 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-3/MBU/01/2023	Decree of the Minister of SOEs No. SK-3/MBU/01/2023
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
Sarjana Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (1980)	Bachelor of Engineering in Petroleum Engineering, Bandung Institute of Technology (1980)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan (1999—2000) • Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2000-2001) • Penasihat Senior Menko Kesra (2004—2006) • Penasihat Senior Menteri BUMN (2006—2008) • Ketua Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati (2006—2008) • Komisaris Utama PT PLN (2006—2009) • Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero)(2023—Sekarang)	• Minister of State for Transmigration and Population (1999—2000) • Minister of Manpower and Transmigration (2000-2001) • Senior Advisor to the Coordinating Minister for People's Welfare (2004—2006) • Senior Advisor to the Minister of State-Owned Enterprises (2006—2008) • Chairman of the National Team for the Development of Biofuel (2006—2008) • President Commissioner, PT PLN (2006—2009) • Commissioner, PT Perkebunan Nusantara III (Persero)(2023—Present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Anggota Komite Pemantau Risiko PTPN III (17 Januari 2023-sekarang)	Member of the Risk Monitoring Committee of PTPN III (January 17, 2023 - present)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Catatan | Note:
Alhilal Hamdi menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 4 Januari 2023.
Alhilal Hamdi has served as the Commissioner for the Company since January 4, 2023.

Suyus Windayana

Komisaris
Commissioner



Periode Jabatan | Term of Office	
19 Desember 2023 - 19 Desember 2028	December 19, 2023 - December 19, 2028
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Bandung, 17 Juni 1967	Bandung, June 17, 1967
Usia | Age	
56 tahun	56 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-394/MBU/12/2023	Decree of the Minister of SOEs No. SK-394/MBU/12/2023
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Teknik Geodesi Institute Teknologi Bandung (1992) • Magister pada Royal Melbourne Institute Of Tech dengan jurusan *Land Data Management* di tahun (1999)	• Bachelor of Science in Geodetic Engineering from the Bandung Institute of Technology (1992) • Master's degree in Land Data Management from the Royal Melbourne Institute of Technology (1999)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Karier di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sejak tahun (1993) • Kepala Bidang Pengembangkan Sistem, Data dan informasi Pertanahan (2006-2013) • Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (2013-2016) • Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (2016-2019) • Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan (2019) • Direktur Jendral Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (2020) • Sekretaris Jenderal ATR BPN (2023 - Sekarang) • Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2023—Sekarang)	• Career at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency since 1993 • Head of the System Development, Data, and Land Information Division (2006-2013) • Head of the Bandung Land Office (2013-2016) • Head of the Land, Spatial Planning, and Sustainable Agricultural Land Data and Information Center (2016-2019) • Director General of Agrarian Legal Relations (2019) • Director General of Land Rights and Registration (2020) • Secretary General of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (2023 - Present) • Commissioner of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2023 - Present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Anggota Komite Audit PTPN III (Persero) (19 Desember 2023-sekarang)	Member of the Audit Committee of PTPN III (Persero) (December 19, 2023 - present)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Catatan | Note:
Suyus Windayana menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 19 Desember 2023.
Suyus Windayana has served as the Commissioner for the Company since December 19, 2023.

Tsamara Amany Alatas

Komisaris
Commissioner



Periode Jabatan | Term of Office	
19 Desember 2023 - 19 Desember 2028	December 19, 2023 - December 19, 2028
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Jakarta, 24 Juni 1996	Jakarta, June 24, 1996
Usia | Age	
27 tahun	27 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-394/MBU/12/2023	Decree of the Minister of SOEs No. SK-394/MBU/12/2023
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• *Master of Arts Concentration*: Urban Affairs Gallatin School of Individualized Study New York University - New York (2021-2022) • B.A. *Communications* (*Magna Cum Laude*) 3.86/4 GPA - Paramadina University Jakarta (2014-2018)	• Master of Arts Concentration: Urban Affairs Gallatin School of Individualized Study New York University - New York (2021-2022) • B.A. Communications (Magna Cum Laude) 3.86/4 GPA - Paramadina University Jakarta (2014-2018)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• *Consultant Intern - Consulting & Public Affairs* PT Royston Advisory Indonesia *Providing media monitoring analyses to companies* (2015) • *Copywriter - Consulting & Public Affairs* PT Royston Advisory Indonesia - *Providing social media content such as articles, serial tweet, and taglines for several Indonesian companies* (2016-2017) • CEO Altsa Kreatif Indonesia - *Initiating a new media content-based paradigma that focuses on socio-political issues* (2023- Sekarang) • Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2023—Sekarang)	• Consultant Intern - Consulting & Public Affairs PT Royston Advisory Indonesia Providing media monitoring analyses to companies (2015) • Copywriter - Consulting & Public Affairs PT Royston Advisory Indonesia Providing social media content such as articles, serial tweets, and taglines for several Indonesian companies (2016-2017) • CEO Altsa Kreatif Indonesia - Initiating a new media content-based Paradigma that focuses on socio-political issues (2023- Present) • Commissioner PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2023—Present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Anggota Komite Pemantau Risiko (19 Desember 2023-sekarang)	Member of the Risk Monitoring Committee (December 19, 2023-present)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	She does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Catatan | Note:
Tsamara Amany Alatas menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 19 Desember 2023.
Tsamara Amany Alatas has served as the Commissioner for the Company since December 19, 2023.



DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

SUYUS WINDAYANA
Komisaris
Commissioner

Masa jabatan dimulai sejak 19 Desember 2023.
Term of office started on December 19, 2023.

TSAMARA AMANY ALATAS
Komisaris
Commissioner

Masa jabatan dimulai sejak 19 Desember 2023.
Term of office started on December 19, 2023.

ERWAN PELAWI
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa jabatan berakhir pada 19 Desember 2023.
Term of office ends on December 19, 2023.

AMAL BAKTI PULUNGAN
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa jabatan berakhir pada 19 Desember 2023.
Term of office ends on December 19, 2023.

ZULKIFLI ZAINI
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner



ASEP SUBARKAH YUSUF
Komisaris
Commissioner

WISTO PRIHADI
Komisaris Independen
Independent Commissioner

ARIE YURIWIN
Komisaris
Commissioner

ARDAN ADIPERDANA
Komisaris
Commissioner

ALHILAL HAMDI
Komisaris
Commissioner



Masa jabatan berakhir pada 19 Maret 2023.
Term of office ends on March 19, 2023.

Masa jabatan dimulai sejak 4 Januari 2023.
Term of office started on January 4, 2023.

PROFIL DIREKSI
PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Hingga akhir tahun 2023, terdapat perubahan mengenai susunan dan komposisi Direksi. Perubahan susunan atau komposisi tersebut tercatat dan diatur berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-4/MBU/01/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III.

Berikut ini merupakan susunan dan komposisi Direksi PTPN III (Persero) yang menjabat di tahun 2023:

As of the end of 2023, there are changes in the composition or structure of the Board of Directors. Any changes in the composition are recorded and regulated based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-4/MBU/01/2023 dated January 4, 2023 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III.

Below is the composition of the Board of Directors of PTPN III (Persero) serving in 2023:



Mohammad Abdul Ghani

Direktur Utama
President Director



Periode Jabatan | Term of Office	
12 Februari 2020-17 Oktober 2024	February 12, 2020-October 17, 2024
Tempat dan Tanggal lahir | Term of Office	
Pekalongan, 17 Desember 1959	Pekalongan, December 17, 1959
Usia | Age	
64 tahun	64 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-48/MBU/02/2020	Decree of the Minister of SOEs No. SK-48/MBU/02/2020
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Pertanian, Institut Pertanian Bogor (1984) • Magister Sains, Universitas Gadjah Mada (2008) • Doktor Perencanaan wilayah, Universitas Sumatera Utara (2016)	• Bachelor of Agriculture, IPB University (1984) • Master of Science, Gadjah Mada University (2008) • Doctorate in Regional Planning, University of Sumatera Utara (2016)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XIII (2016-2018) • Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VI (2018) • Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara II (2019) • Wakil Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2019—2020) • Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2020—sekarang)	• President Director of PT Perkebunan Nusantara XIII (2016-2018) • President Director of PT Perkebunan Nusantara VI (2018) • President Director of PT Perkebunan Nusantara II (2019) • Vice President Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2019-2020) • President Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2020-present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Tidak Ada	None
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Denaldy Mulino Mauna

Wakil Direktur Utama
Vice President Director



Periode Jabatan | Term of Office	
12 Februari 2020-12 Februari 2025	February 12, 2020-February 12, 2025
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Paris, 04 Juli 1971	Paris, July 04, 1971
Usia | Age	
52 tahun	52 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No.48/MBU/02/2020	Decree of the Minister of SOEs No.48/MBU/02/2020
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Akuntansi, Universitas Katolik Parahyangan (1995) • Magister *Business Administration in International Business*, University of Maryland College Park (1998)	• Bachelor of Accounting, Parahyangan Catholic University (1995) • Master of Business Administration in International Business, University of Maryland College Park (1998)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• *Deputy Group* PT Triputra Argo Persada (2004—2015) • *Group Chief Financial Officer* PT Triputra Argo Persada (2015—2017) • Direktur Utama Perum Perhutani (2017—2020) • Wakil Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2020—sekarang)	• Deputy Group PT Triputra Agro Persada (2004-2015) • Group Chief Financial Officer PT Triputra Agro Persada (2015-2017) • President Director of Perum Perhutani (2017-2020) • Vice President Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2020-present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Komisaris PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (2020—sekarang)	Commissioner PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (2020-present)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Seger Budiarjo

Direktur Sumber Daya Manusia
Human Resources Director



Periode Jabatan | Term of Office	
28 April 2021-19 Desember 2023	April 28, 2021-December 19, 2023
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Banjarnegara, 18 Juli 1967	Banjarnegara, July 18, 1967
Usia | Age	
56 tahun	56 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No.SK-133/MBU/04/2021	Decree of the Minister of SOEs No.SK-133/MBU/04/2021
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman (1990) • Magister Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (2003)	• Bachelor of Economics, General Soedirman University (1990) • Master of Agribusiness, IPB University (2003)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Direktur Komersil PT Pupuk Kujang (2016) • Direktur *Human Capital Management* dan Umum PT Perkebunan Nusantara III (Persero)(2016—2018) • Direktur SDM dan Umum PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2018—2020) • Direktur Umum PT Perkebunan Nusantara III (Persero)(2020—2021) • Direktur SDM Perkebunan Nusantara III (Persero)(2021—2023)	• Commercial Director of PT Pupuk Kujang (2016) • Director of Human Capital Management and General Affairs PT Perkebunan Nusantara III (Persero)(2016-2018) • Director of Human Resources and General Affairs PT Perkebunan Nusantara III (Persero)(2018-2020) • General Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero)(2020-2021) • Director of Human Resources PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2021-2023)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Ketua Dewan Pengawas DAPENBUN (2016—sekarang)	Chairman of the Supervisory Board of DAPENBUN (2016-present)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Catatan | Note:
Masa jabatan berakhir pada 19 Desember 2023.
Term of office ends on December 19, 2023.

Sucipto Prayitno

Direktur Sumber Daya Manusia & Umum
Human Resources & General Affairs Director



Periode Jabatan | Term of Office	
19 Desember 2023-19 Desember 2028	December 19, 2023–December 19, 2028
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Jombang, 6 Februari 1963	Jombang, February 6, 1963
Usia | Age	
61 Tahun	61 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-395/MBU/12/2023	Decree of the Minister of SOEs No. SK-395/MBU/12/2023
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Peternakan, Institut Pertanian Bogor (1987) • Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (2001)	• Bachelor of Animal Husbandry, IPB University (1982-1987) • Master of Agribusiness Management, IPB University (2019-2021)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Staf Kredit UPP I BAPINDO (1987-1991) • Kepala Tim Kredit BAPINDO Bandung (1991-1997) • Kepala Tim Kredit UKM BAPINDO Pusat (1997-1999) • Relationship Manager Corporate Banking (1999-2007) • Asisten Vice President of Linkage & Support Bank Mandiri (2007-2009) • Vice President of Department IV Bank Mandiri (2009-2011) • Executive Business Officer Bank Mandiri (2011-2014) • SVP of Corporate Banking III Bank Mandiri (2014) • SVP of Corporate Banking Agro Based (2014-2015) • SVP of Corporate Banking VI (2015-2017) • SVP of Commercial Banking (2017-2018) • SVP of Middle Corporate 4 (2018) • Direktur Komersil PTPN XI (2018-2020) • Direktur PTPN IV (2020-2023) • Direktur SDM & Umum PT Perkebunan Nusantara III (Persero)(2023-sekarang)	• Credit Staff, UPP I BAPINDO (1987-1991) • Head of Credit Team, BAPINDO Bandung (1991-1997) • Head of SME Credit Team, BAPINDO Headquarters (1997-1999) • Relationship Manager, Corporate Banking (1999-2007) • Assistant Vice President of Linkage & Support, Bank Mandiri (2007-2009) • Vice President of Department IV, Bank Mandiri (2009-2011) • Executive Business Officer, Bank Mandiri (2011-2014) • SVP of Corporate Banking III, Bank Mandiri (2014) • SVP of Corporate Banking Agro Based, Bank Mandiri (2014-2015) • SVP of Corporate Banking VI (2015-2017) • SVP of Commercial Banking (2017-2018) • SVP of Middle Corporate 4 (2018) • Commercial Director, PTPN XI (2018-2020) • Director, PTPN IV (2020-2023) • Director of Human Resources & General Affairs, PT Perkebunan Nusantara III (Persero)(2023-present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Tidak ada	None
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Catatan | Note:
Sucipto Prayitno menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Perseroan sejak 19 Desember 2023.
Sucipto Prayitno has served as the Human Resources & General Affairs for the company since December 19, 2023.

Dwi Sutoro

Direktur Pemasaran
Marketing Director



Periode Jabatan | Term of Office	
17 Oktober 2019-17 Oktober 2024	October 17, 2019-October 17, 2024
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Semarang, 22 Juni 1971	Semarang, June 22, 1971
Usia | *Age*	
52 tahun	52 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-231/MBU/10/2019	Decree of the Minister of SOEs No. SK-231/MBU/10/2019
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung (1994) • Magister *Management*, IPMI dan Monash University (2004)	• Bachelor of Chemical Engineering, Bandung Institute of Technology (1994) • Master of Management, IPMI and Monash University (2004)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• *Manufacturing Director* Unilever Indonesia (2010—2011) • *Director Quality South East Asia* PT Unilever (2011—2015) • *President Director* PT Kievit Indonesia (2015—2019) • Direktur Pemasaran PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2019—Sekarang)	• Manufacturing Director of Unilever Indonesia (2010-2011) • Director of Quality Southeast Asia PT Unilever (2011-2015) • President Director of PT Kievit Indonesia (2015-2019) • Director of Marketing PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2019-present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Komisaris Utama PT Industri Nabati Lestari (2020—2023)	President Commissioner of PT Industri Nabati Lestari (2020-2023)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Ahmad Haslan Saragih

Direktur Pelaksana
Managing Director



Periode Jabatan | Term of Office	
17 Oktober 2019-27 Maret 2023	October 17, 2019-March 27, 2023
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Tebing Tinggi, 25 September 1960	Tebing Tinggi, September 25, 1960
Usia | Age	
63 tahun	63 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-231/MBU/10/2019	Decree of the Minister of SOEs No. SK-231/MBU/10/2019
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
Sarjana Pertanian, Institut Pertanian Bogor (1983)	Bachelor of Agriculture, IPB University (1983)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha PT Perkebunan Nusantara IV (2006—2012) • Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantara IV (2012—2016) • Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VI (2016—2018) • Direktur Pelaksana PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2019—2023)	• Director of Planning and Business Development PT Perkebunan Nusantara IV (2006-2012) • Director of Production PT Perkebunan Nusantara IV (2012-2016) • President Director of PT Perkebunan Nusantara VI (2016-2018) • Managing Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2019-2023)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Komisaris Utama PT Kawasan Industri Nusantara (2020—sekarang)	President Commissioner of PT Kawasan Industri Nusantara (2020-present)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Catatan | Note:
Masa jabatan berakhir pada 27 Maret 2023.
Term of office ends on March 27, 2023.

M. Iswahyudi

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director



Periode Jabatan | Term of Office	
12 Februari 2020-12 Februari 2025	February 12, 2020-February 12, 2025
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Mataram, 14 Februari 1973	Mataram, February 14, 1973
Usia | Age	
50 Tahun	50 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No.SK-48/MBU/02/2020	Decree of the Minister of SOEs No.SK-48/MBU/02/2020
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
Sarjana Ekonomi Pembangunan, Universitas Brawijaya (1995)	Bachelor of Development Economics, Brawijaya University (1995)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• *Corporate Banking Manager* Surabaya (2014—2015) • Kepala Divisi *Sector Automotive & Heavy Equipment* (2015—2017) • *Group Head Special Asset Management* I (2017—2020) • Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2020—Sekarang)	• Corporate Banking Manager in Surabaya (2014-2015) • Division Head of Automotive & Heavy Equipment Sector (2015-2017) • Group Head Special Asset Management I (2017-2020) • Director of Finance and Risk Management PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2020-present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Komisaris Utama PT Sarana Agro Nusantara (2020-2023)	President Commissioner of PT Sarana Agro Nusantara (2020-2023)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Mahmudi

Direktur Produksi dan Pengembangan
Production and Development Director



Periode Jabatan | Term of Office	
17 Oktober 2019-7 Mei 2024	October 17, 2019-May 7, 2024
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Klaten, 5 Juli 1979	Klaten, July 5, 1979
Usia | Age	
44 tahun	44 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-231/MBU/10/2019	Decree of the Minister of SOEs No. SK-231/MBU/10/2019
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Pertanian, Universitas Gadjah Mada (2001) • Magister *Science*, Universitas Diponegoro (2016)	• Bachelor of Agriculture, Gadjah Mada University (2001) • Master of Science, Diponegoro University (2016)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• *Superintendent* Kepala Kebun Unit Kebun Getas – PT Perkebunan Nusantara IX (2006) • Kepala Urusan Tanaman (2011) • Kepala Bagian Tanaman (2015) • Direktur Operasional Tanaman Tahunan PT Perkebunan Nusantara IX (2018) • Direktur Operasi dan Pengembangan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2019—Sekarang)	• Plantation Superintendent, Getas Plantation Unit – PT Perkebunan Nusantara IX (2006) • Head of Plantation Affairs (2011) • Head of Plantation Division (2015) • Director of Plantation Operations PT Perkebunan Nusantara IX (2018) • Director of Operations and Development PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2019-present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Komisaris Utama PT Riset Perkebunan Nusantara (2020—2023)	President Commissioner of PT Riset Perkebunan Nusantara (2020-2023)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Doni P. Gandamihardja

Direktur Umum
General Affairs Director



Periode Jabatan | Term of Office	
28 April 2021-19 Desember 2023	April 28, 2021-December 19, 2023
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Bandung, 19 September 1966	Bandung, September 19, 1966
Usia | Age	
57 tahun	57 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No.SK-133/MBU/04/2021	Decree of the Minister of SOEs No.SK-133/MBU/04/2021
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
Sarjana Pertanian Sosial Ekonomi, Universitas Padjadjaran (1991)	Bachelor of Social Economics Agriculture, Padjadjaran University (1991)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• *Vice President* PT Bank Mandiri Tbk (2010—2012) • *Head Corporate Banking* Medan PT Bank Mandiri Tbk (2011—2014) • *Commercial Banking Center Manager*, Jakarta Plaza Mandiri PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014—2015) • Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (2015—2017) • Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XIV (2017—2020) • Direktur PT Perkebunan Nusantara VII (2020—2021) • Direktur Umum PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2021—Sekarang)	• Vice President PT Bank Mandiri Tbk (2010-2012) • Head of Corporate Banking in Medan PT Bank Mandiri Tbk (2011-2014) • Commercial Banking Center Manager, Jakarta Plaza Mandiri PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015) • Director PT Perkebunan Nusantara XIII (2015-2017) • President Director PT Perkebunan Nusantara XIV (2017-2020) • Director PT Perkebunan Nusantara VII (2020-2021) • General Director PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2021-present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Komisaris PT Asuransi Jasa Tania Tbk (2018—sekarang)	Commissioner PT Asuransi Jasa Tania Tbk (2018-present)
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Catatan | Note:
Masa jabatan berakhir pada 19 Desember 2023.
Term of office ends on December 19, 2023.

M. Arifin Firdaus

Direktur Hubungan Kelembagaan
Institutional Relations Director



Periode Jabatan | Term of Office	
4 Januari 2023-4 Januari 2028	January 4, 2023-January 4, 2028
Tempat dan Tanggal lahir | Place and Date of Birth	
Bandung, 11 Oktober 1968	Bandung, October 11, 1968
Usia | Age	
55 tahun	55 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian Citizen
Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis for Appointment	
SK Menteri BUMN No. SK-4/MBU/01/2023	Decree of the Minister of SOEs No. SK-4/MBU/01/2023
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
Sarjana Hukum Internasional, Universitas Parahyangan (1991)	Bachelor of International Law, Parahyangan University (1991)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• SEVP *Special Asset Management* Bank Mandiri (2019—2020) • Direktur SDM dan Umum PT Angkasa Pura I (2020—2022) • Direktur Hubungan Kelembagaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2023—Sekarang)	• SEVP Special Asset Management Bank Mandiri (2019-2020) • Director of Human Resources and General Affairs PT Angkasa Pura I (2020-2022) • Director of Institutional Relations PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2023-present)
Rangkap Jabatan | Concurrent Positions	
Tidak Ada	None
Hubungan Afiliasi | Affiliation	
Tidak Ada	None
Pernyataan Independensi | Independence Statement	
Beliau tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	He does not own shares directly or indirectly and has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.



DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

M. ISWAHYUDI
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

SEGER BUDIARJO
Direktur Sumber Daya Manusia
Human Resources Director

MAHMUDI
Direktur Produksi dan Pengembangan
Production and Development Director

DWI SUTORO
Direktur Pemasaran
Marketing Director

MOHAMMAD ABDUL GHANI
Direktur Utama
President Director



Masa jabatan berakhir pada 19 Desember 2023.
Term of office ends on December 19, 2023.

DENALDY MULINO MAUNA
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

DONI P. GANDAMIHARDJA
Direktur Umum
General Affairs Director

AHMAD HASLAN SARAGIH
Direktur Pelaksana
Managing Director

SUCIPTO PRAYITNO
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum
Human Resources & General Affairs Director

M. ARIFIN FIRDAUS
Direktur Hubungan Kelembagaan
Institutional Relations Director



Masa jabatan berakhir pada 19 Desember 2023.
Term of office ends on December 19, 2023.

Masa jabatan berakhir pada 27 Maret 2023.
Term of office ends on March 27, 2023.

Masa jabatan dimulai sejak 19 Desember 2023.
Term of office started on December 19, 2023.

PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICIALS



Hery Nurudin
Divisi Audit Internal
Internal Audit Division
(hingga sekarang | until present)



Bambang Agustian
Divisi Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretariat Division
(hingga 7 Mei 2024 | until May 7, 2024)



Ugun Untaryo
Divisi Bisnis Strategis dan Sustainability
Strategic Business and Sustainability Division
(hingga 4 September 2023 | until September 4, 2023)



Tjahyo Adi
Divisi Akuntansi dan Perpajakan
Accounting and Taxation Division
(hingga sekarang | until present)



Muhammad Muslim Utomo
Divisi Perbendaharaan, Anggaran & Manajemen Risiko
Treasury, Budget & Risk Management Division
(hingga sekarang | until present)



Indaruwati Trivista Andarini
Divisi Keuangan Strategis dan Pembiayaan Korporasi
Strategic Finance and Corporate Financing Division
(hingga sekarang | until present)



Yudhi Cahyadi
Divisi Sumber Daya Manusia
Human Resources Division
(hingga 31 Agustus 2023 | until August 31, 2023)



Idham Haryadi
Divisi Teknologi Informasi
Information Technology Division
(hingga 30 November 2023 | until November 30, 2023)



Yefri Yudianto
Divisi Sumber Daya Manusia
Human Resources Division
(hingga sekarang | until present)



Riza Pahlevi
Divisi Transformasi Strategis
Strategic Transformation Division
(hingga 6 Februari 2024, kemudian menjadi Kepala Divisi Pengadaan dan TI hingga sekarang | until February 6, 2024, then appointed as Head of Procurement and IT until present)



Desmanto

Divisi Operasional Tanaman Kelapa Sawit dan Karet
Palm Oil and Rubber Plantation Operations Division

(hingga 30 November 2023 | until November 30, 2023)



Eman Siswanto

Divisi Teknik & Pengolahan Kelapa Sawit dan Karet
Palm Oil & Rubber Processing and Engineering Division

(hingga sekarang | until present)



Teguh Agung Tn

Divisi Operasional Aneka Tanaman
Various Plant Operations Division

(telah berakhir | has ended)



Petrus Budiman

Divisi Pemasaran Komoditi Kelapa Sawit dan Karet
Palm Oil and Rubber Commodity Marketing Division

(telah berakhir | has ended)



R. Dodi Kusumah

Divisi Pemasaran Komoditi Aneka Tanaman
Various Plant Commodity Marketing Division

(telah berakhir | has ended)



Heru Prabowo

Divisi Strategi Pemasaran & Retail
Marketing Strategy & Retail Division

(hingga sekarang | until present)



Muhammad Iwan Masum

Divisi Pengadaan dan Umum
Procurement and General Affairs Division

(telah berakhir | has ended)



Hengki Heriandono

Divisi Hukum
Legal Division

(hingga sekarang | until present)



Totop Poltak Hatarongan

Divisi Transformasi Strategis dan Sustainability
Strategic Transformation and Sustainability Division

(hingga sekarang | until present)



Putu Sukerman

Divisi Aneka Tanaman
Various Plants Division

(hingga sekarang | until present)

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Komposisi Kepemilikan Saham Perusahaan

Composition of Company Shareholders

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2023
Composition of Shareholders as of 31 December 2023

Pemegang Saham Shareholder	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Subscribed and Fully Paid Capital		Persentase Kepemilikan (%) Percentage Ownership (%)
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (stock)	Nominal (Rp) Nominal (Rp)	
	Nilai nominal Rp1.000.000/lembar saham Nominal value Rp1.000.000/stock shares		
Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	40.216.132	40.216.132.000.000	100,00



Informasi tentang Pemegang Saham Utama/ Pengendali

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga 100% saham yang ada di Perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh negara melalui Pemerintah Republik Indonesia / Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Information on Major/Controlling Shareholders

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is a company owned by the government of the Republic of Indonesia, with 100% of its shares wholly owned by the state through the Government of the Republic of Indonesia/Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs).

Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan/atau Karyawan

Perusahaan tidak menerapkan kebijakan mengenai Program Opsi Saham bagi Manajemen (*Management Stock Option Program*/MSOP) maupun Karyawan (*Employee Stock Option Program*/ESOP), sehingga Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan tidak memiliki kepemilikan saham di Perusahaan. Hal ini disebabkan oleh status hukum PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai perusahaan yang modal sahamnya berasal dari penyertaan modal Pemerintah, di mana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah.

Share Ownership by Management and/or Employees

The company does not implement a Management Stock Option Program (MSOP) or an Employee Stock Option Program (ESOP). Therefore, the Board of Commissioners, Directors, and employees do not own shares in the company. This is due to the legal status of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as a company whose capital shares are derived from government capital participation, with 100% of the shares owned by the Government.

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA, DAN KERJA SAMA OPERASI

LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES, JOINT VENTURES, AND JOINT OPERATIONS

Entitas Anak PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Subsidiaries of PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

No	Entitas Entity	Keterangan Description	Pemegang Saham Shareholder	Saham (%) Shares (%)	Status
1	PTPN I	PT Perkebunan Nusantara I	PTPN III (Persero)	76,00	Beroperasi In operation
2	PTPN II	PT Perkebunan Nusantara II	PTPN III (Persero)	90,00	Beroperasi In operation
3	PTPN IV	PT Perkebunan Nusantara IV	PTPN III (Persero)	90,00	Beroperasi In operation
4	PTPN V	PT Perkebunan Nusantara V	PTPN III (Persero)	90,00	Beroperasi In operation
5	PTPN VI	PT Perkebunan Nusantara VI	PTPN III (Persero)	90,00	Beroperasi In operation
6	PTPN VII	PT Perkebunan Nusantara VII	PTPN III (Persero)	90,00	Beroperasi In operation
7	PTPN VIII	PT Perkebunan Nusantara VIII	PTPN III (Persero)	86,83	Beroperasi In operation
8	PTPN IX	PT Perkebunan Nusantara IX	PTPN III (Persero)	90,00	Beroperasi In operation
9	PTPN X	PT Perkebunan Nusantara X	PTPN III (Persero)	90,00	Beroperasi In operation
10	PTPN XI	PT Perkebunan Nusantara XI	PTPN III (Persero)	90,00	Beroperasi In operation
11	PTPN XII	PT Perkebunan Nusantara XII	PTPN III (Persero)	90,00	Beroperasi In operation
12	PTPN XIII	PT Perkebunan Nusantara XIII	PTPN III (Persero)	90,00	Beroperasi In operation
13	PTPN XIV	PT Perkebunan Nusantara XIV	PTPN III (Persero)	90,00	Beroperasi In operation
14	PT IKN	PT Industri Karet Nusantara	PTPN III (Persero)	99,99	Beroperasi In operation
15	PT RSPMN	PT Rumah Sakit Sri Pamela Medika Nusantara	PTPN III (Persero)	99,99	Beroperasi In operation
16	PT KINRA	PT Kawasan Industri Nusantara	PTPN III (Persero)	99,99	Beroperasi In operation

No	Entitas Entity	Keterangan Description	Pemegang Saham Shareholder	Saham (%) Shares (%)	Status
17	PT SGN	PT Sinergi Gula Nusantara	PTPN III (Persero)	0,09	Beroperasi In operation
			PTPN VII	2,90	
			PTPN IX	8,62	
			PTPN X	34,79	
			PTPN XI	24,63	
			PTPN XIV	3,75	
			PT BCN	7,92	
			PT IGG	17,22	
18	PT INL	PT Industri Nabati Lestari	PTPN III (Persero)	51,00	Beroperasi In operation
			PTPN IV	49,00	
19	PT BIN	PT Bio Industri Nusantara	PTPN III (Persero)	25,00	Beroperasi In operation
			PTPN V	25,00	
			PTPN VII	25,00	
			PTPN VIII	25,00	
20	PT KPBN	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	PTPN III (Persero)	79,43	Beroperasi In operation
			PTPN IV	12,65	
			PTPN XII	5,39	
			PTPN V	2,52	
21	PT RPN	PT Riset Perkebunan Nusantara	PTPN III (Persero)	90,00	Beroperasi In operation
			PTPN V	10,00	
22	PT LPP Agro	PT Lembaga Pendidikan Perkebunan Agro	PTPN III (Persero)	11,24	Beroperasi In operation
			PTPN IV	11,24	
			PTPN V	4,82	
			PTPN VI	4,82	
			Lembaga Perkebunan Nusantara	67,88	

Entitas Asosiasi dan Penyertaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (Tidak Dikonsolidasi)
Associates and Investments of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (Not Consolidated)

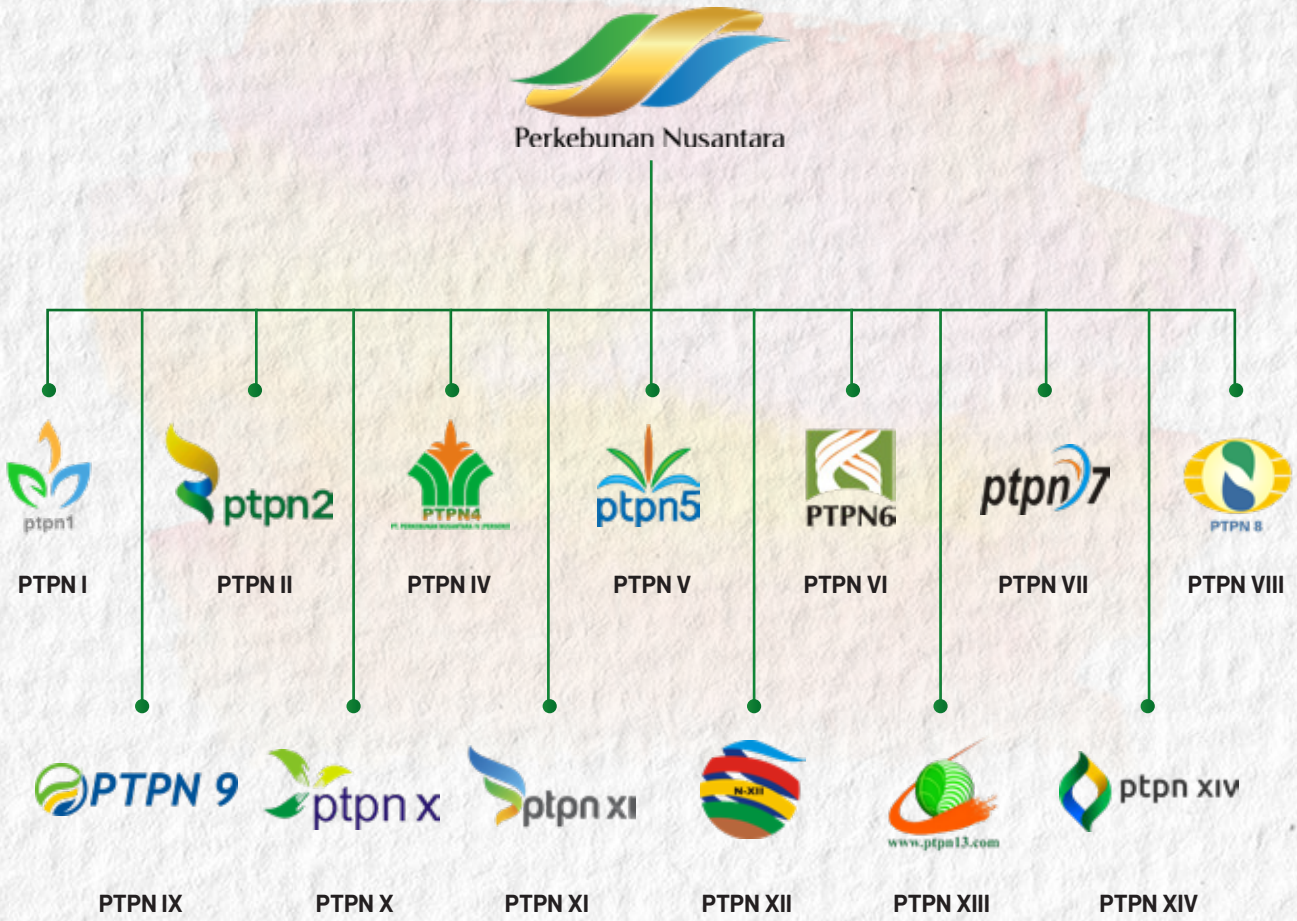
No	Entitas Entity	Keterangan Description	Pemegang Saham Shareholder	Saham (%) Shares (%)	Status
1	PT TMN	PT Tiga Mutiara Nusantara	PTPN III (Persero)	27,21	Beroperasi In operation
2	PT PMO	PT Perkebunan Mitra Ogan	PTPN III (Persero)	26,42	Beroperasi In operation
3	PT MBN	PT Mitra Bumdes Nusantara	PTPN III (Persero)	10,00	Beroperasi In operation

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
CORPORATE GROUP STRUCTURE

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Persero), yang menyatakan bahwa Perseroan merupakan pemegang saham pengendali atas PT Perkebunan Nusantara I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV dengan cakupan lokasi grup Perseroan tersebar dari Aceh hingga Papua.

According to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2014 regarding the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Persero), which states that the Company is the controlling shareholder of PT Perkebunan Nusantara I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, and XIV, with the group's locations spanning from Aceh to Papua.

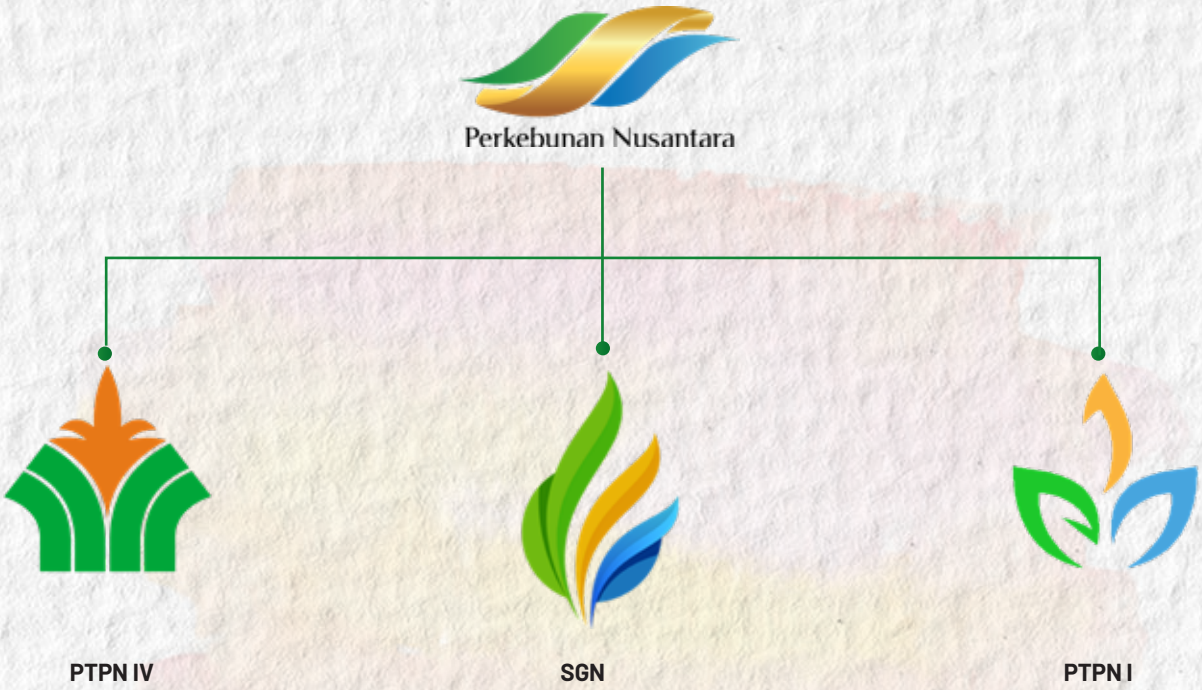
Struktur PTPN Group Sebelum Penggabungan
PTPN Group Structure Before Merger



- Disusun berdasarkan wilayah geografis.
- Terdiri dari 14 badan hukum terpisah, masing-masing dipimpin oleh *Board of Management* dan memiliki komoditas yang beragam.

- Organized based on geographical regions.
- Comprised of 14 separate legal entities, each led by a Board of Management and involved in diverse commodities.

Struktur PTPN Group Setelah Penggabungan
PTPN Group Structure After Merger



PTPN IV	SGN	PTPN I
Berfokus pada komoditas kelapa sawit untuk memenuhi pasokan minyak goreng curah nasional dan pengembangan hilirisasi minyak sawit serta energi baru terbarukan.	**Berfokus pada modernisasi produksi gula untuk memenuhi kebutuhan komoditas gula di Indonesia.**	**Berfokus pada komoditas perkebunan lain dan sektor non-komoditas.**
Focusing on palm oil commodity to meet the national bulk cooking oil supply and develop downstream palm oil processing alongside new renewable energy initiatives.	Focusing on modernizing sugar production to meet Indonesia's sugar commodities needs.	Focusing on other plantation commodities and non-commodity sectors.

Anak Perusahaan Non-PTPN dengan Kepemilikan >50%
Non-PTPN Subsidiaries with Ownership >50%

RUBIN · INL PT. Industri Nabati Lestari · inacom Indonesia Commodity Market kpbn · Riset Perkebunan Nusantara · SRI PAMELA Medika Nusantara · PT Kawasan Industri Nusantara



KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM
CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING

Hingga akhir tahun 2023, Perseroan belum pernah mencatatkan sahamnya di bursa efek mana pun, sehingga tidak ada catatan mengenai proses pencatatan saham, jumlah saham yang terdaftar, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku.

As of the end of 2023, the Company has not listed its shares on any stock exchange; therefore, there are no records of the share listing process, the number of registered shares, nominal value, or offer price from the initial listing to the end of the fiscal year.

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA
CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE AND LISTING

Hingga akhir tahun 2023, PTPN III (Persero) tidak melaksanakan penerbitan efek obligasi, sukuk, obligasi konversi, atau efek lainnya di bursa efek mana pun. Sehingga tidak terdapat catatan informasi mengenai nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/ imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.

As of the end of 2023, PTPN III (Persero) has not issued any bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities on any stock exchange. Therefore, there are no records of information regarding the names of different securities, the year of issuance, interest/yield rates, maturity dates, offering values, the names of stock exchanges where the securities are listed, and the ratings of these securities.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/ Professional	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type and Scope of Services	Periode Penugasan Engagement Period	Biaya Jasa Service Fee
Kantor Akuntan Publik | Public Accounting Firm				
KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja KAP Purwantono, Sungkoro and Surja	Gedung Indonesia Stock Exchange, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 Indonesia Stock Exchange Building, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Neighborhood Unit 5/Community Unit 3, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta, DKI Jakarta 1219	*Assurance*	2023	Rp3.624.982.500
Konsultan Hukum | Legal Consultants				
Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan Law Office Hasrul Benny Harahap & Partners	Jl. Sei Galang No. 5 Medan Jl. Sei Galang No. 5, Medan	Konsultasi dan Bantuan Hukum Consultation and Legal Assistance	3 Agustus 2023 - 2 Agustus 2024 3 August 2023 - 2 August 2024	Rp60.000.000/bulan Rp60,000,000/month
Kantor Hukum Jonni Silitonga & Rekan Law Office Jonni Silitonga & Partners	Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai, Jl. Intan IV No. 4 Dusun V, Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos. 20361 Bumi Serdang Damai Housing Complex, Jl. Intan IV No. 4 Hamlet V, Sigara-gara Village, Patumbak District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province, Postal Code 20361	Konsultasi dan Bantuan Hukum Consultation and Legal Assistance	1 Juli 2023 - 30 Juni 2024 1 July 2023 - 30 June 2024	Rp10.000.000/bulan Rp10,000,000/month
Kantor Hukum Ramces Pandiangan & Partners Law Office Ramces Pandiangan & Partners	Jl. Sisingamangaraja No. 212-A Kel. Sudirejo Kec. Medan Kota, Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja No. 212-A, Sudirejo Village, Medan Kota District, North Sumatra	Konsultasi dan Bantuan Hukum Consultation and Legal Assistance	8 Juni 2023 - 7 Juni 2024 8 June 2023 - 7 June 2024	Rp12.000.000/bulan Rp12,000,000/month
Kantor Hukum Hadiputranto Hadinoto And Partners Law Office Hadiputranto Hadinoto and Partners	Pacific Century Place, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 No. Lot 10 Lv. 35 Jakarta Selatan, DKI Jakarta Pacific Century Place, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 No. Lot 10, Level 35, South Jakarta, DKI Jakarta	Konsultasi dan Bantuan Hukum Consultation and Legal Assistance	Februari 2023 s.d Agustus 2023 February 2023 to August 2023	Rp450.000.000
Kantor Hukum LPS And Partners Law Office LPS And Partners	MNC Tower Lantai 12, Jalan Kebon Sirih No. 17-19 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta MNC Tower, 12th Floor, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Menteng, Central Jakarta, DKI Jakarta	Konsultasi dan Bantuan Hukum Consultation and Legal Assistance	2 Januari 2023 s.d 2 Januari 2024 2 January 2023 to 2 January 2024	Rp52.500.000/bulan Rp52,500,000/month
Kantor Hukum Janis & Associates Law Office Janis & Associates	Royal Palace Blok C 11, Jl. Prof. Dr. Soepomo N. 178 A, Jakarta Selatan Royal Palace, Block C 11, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178 A, South Jakarta	Konsultasi dan Bantuan Hukum Consultation and Legal Assistance	06 Juli 2023 s.d Putusan Banding 6 July 2023 until the Appeal Decision	Rp700.000.000

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/ Professional	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type and Scope of Services	Periode Penugasan Engagement Period	Biaya Jasa Service Fee
Kantor Hukum Syahrir Cakkari & Partners Law Office Syahrir Cakkari & Partners	Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok F.17-18 Boulevard Panakukang Mas, Kota Makassar Jalan Topaz Raya, Zamrud Block F.17-18 Boulevard Panakukang Mas, Makassar City	Konsultasi dan Bantuan Hukum Consultation and Legal Assistance	12 April 2023 s.d Perkara Dihentikan (SP3) / Mendapat Sanksi Administratif / Diputus Pengadilan / dalam 1 tahun tidak diajukan dimuka pengadilan oleh JPU 12 April 2023 until Case is Dismissed (SP3) / Receives Administrative Sanction / Court Decision / not submitted to the court by the prosecutor within 1 year	Rp890.000.000
Notaris | Notary				
Kantor Notaris Vestina Ria Kartika Notary Office Vestina Ria Kartika	Jl. Prof. Dr. Satrio No. 1, Jakarta Selatan Jl. Prof. Dr. Satrio No. 1, South Jakarta	Jasa Konsultasi Consultation Services	Oktober 2022 s.d saat ini October 2022 to present	Rp550.000.000
Kantor Notaris Nanda Fauz Iwan Notary Office Nanda Fauz Iwan	Royal Palace Blok C Jl. Prof. DR. Soepomo No.178, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Royal Palace, Block C, Jl. Prof. DR. Soepomo No.178, South Jakarta, DKI Jakarta	Pembuatan Akta Perusahaan Company Deed Establishment	s.d saat ini Until present	Rp9.000.000/Akta Rp9,000,000/Deed



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

Penghargaan yang Diperoleh di Tahun 2023
Awards Obtained in 2023



Penghargaan Anugerah BUMN 2023 – Perusahaan dengan Transformasi Organisasi Terbaik
BUMN Award 2023 - Best Company with Organizational Transformation

Lembaga Pemberi Penghargaan:
Awarded by:
BUMN TRACK
BUMN TRACK

Waktu Pemberian Penghargaan:
Awarded on:
15 Maret 2023
March 15, 2023



Penghargaan Anugerah BUMN 2023 – *The Best CEO* dengan *Talent Development* Terbaik
BUMN Award 2023 - The Best CEO with Best Talent Development

Lembaga Pemberi Penghargaan:
Awarded by:
BUMN TRACK
BUMN TRACK

Waktu Pemberian Penghargaan:
Awarded on:
15 Maret 2023
March 15, 2023



Perusahaan *Green Business* Terbaik 2023
Best Green Business Company 2023

Lembaga Pemberi Penghargaan:
Awarded by:
CNBC Indonesia
CNBC Indonesia

Waktu Pemberian Penghargaan:
Awarded on:
22 Mei 2023
May 22, 2023



Perusahaan sebagai Mitra BUMN yang Berkomitmen dalam Penerapan Standar Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan
Company as a Partner of SOEs committed to the Implementation of Sustainable Palm Oil Industry Standards

Lembaga Pemberi Penghargaan:
Awarded by:
PT Mutuagung Lestari
PT Mutuagung Lestari

Waktu Pemberian Penghargaan:
Awarded on:
9 Agustus 2023
August 9, 2023



Perusahaan Pengelola Risiko ESG Terbaik dalam Sub Insdustri Agrikultur
Best ESG Risk Management Company in the Agriculture Sub-Industry

Lembaga Pemberi Penghargaan:
Awarded by:
Sustainalityc
Sustainalityc

Waktu Pemberian Penghargaan:
Awarded on:
Juli 2023
July 2023



ASEAN *Energy Awards* 2023-2nd *Runner Up* Kategori *Renewable Energy for Cogeneration* (untuk anak perusahaan PTPN V)
ASEAN Energy Awards 2023 - 2nd Runner-Up in the Renewable Energy for Cogeneration Category (for PTPN V subsidiary)

Lembaga Pemberi Penghargaan:
Awarded by:
ASEAN Center for Energy (ACE)
ASEAN Center for Energy (ACE)

Waktu Pemberian Penghargaan:
Awarded on:
25 Agustus 2023
August 25, 2023



AKHLAK *Culture Festival* BUMN 2023-Juara 1 Lomba Video Tiktok AKHLAK dan Juara I Lomba Koreografi *Jingle* BUMN untuk Indonesia

AKHLAK Culture Festival BUMN 2023 - 1st Place in AKHLAK TikTok Video Competition and 1st Place in BUMN Jingle Choreography Competition for Indonesia

Lembaga Pemberi Penghargaan:
Awarded by:
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Republik Indonesia
Ministry of State-Owned Enterprises, Republic of Indonesia

Waktu Pemberian Penghargaan:
Awarded on:
4 September 2023
September 4, 2023



Keterbukaan Informasi Publik Awards 2023-*The Most Interact* BUMN *by Engagement* dan *The Most Anticipated High Engagement*

Public Information Openness Awards 2023 - The Most Interactive BUMN by Engagement and The Most Anticipated High Engagement

Lembaga Pemberi Penghargaan:
Awarded by:
BUMN TRACK dan PT Media Kernels Indonesia
BUMN TRACK and PT Media Kernels Indonesia

Waktu Pemberian Penghargaan:
Awarded on:
27 Oktober 2023
October 27, 2023





Human Capital & Performance Awards 2023 – *The Best CEO of The Year (Agroindustries)*
ASEAN Energy Awards 2023-2nd Runner Up Kategori Renewable Energy for Cogeneration (untuk anak perusahaan PTPN V)

Lembaga Pemberi Penghargaan:
Awarded by:
SWA Network
SWA Network

Waktu Pemberian Penghargaan:
Awarded on:
29 November 2023
November 29, 2023

Human Capital & Performance Awards 2023 – *The Best Learning and Development Strategy 2023 (Agroindustries)*
Human Capital & Performance Awards 2023 - The Best Learning and Development Strategy 2023 (Agro-industries)

Lembaga Pemberi Penghargaan:
Awarded by:
SWA Network
SWA Network

Waktu Pemberian Penghargaan:
Awarded on:
29 November 2023
November 29, 2023

Human Capital & Performance Awards 2023 – *The Best Human Capital Director of The Year (Agroindustries)*
Human Capital & Performance Awards 2023 - The Best CEO of The Year (Agro-industries)

Lembaga Pemberi Penghargaan:
Awarded by:
SWA Network
SWA Network

Waktu Pemberian Penghargaan:
Awarded on:
29 November 2023
November 29, 2023

Human Capital & Performance Awards 2023 – *Indonesia Best Companies in Creating Leaders Forum Within* 2023, Kategori "*Very Good*"
Human Capital & Performance Awards 2023 - Indonesia Best Companies in Creating Leaders Forum Within 2023, Category "Very Good"

Lembaga Pemberi Penghargaan:
Awarded by:
SWA Network
SWA Network

Waktu Pemberian Penghargaan:
Awarded on:
29 November 2023
November 29, 2023



Top BUMN *Awards* 2023 - *The Best State Owned Enterprise in* 2023
Top BUMN Awards 2023 - The Best State Owned Enterprise in 2023

Lembaga Pemberi Penghargaan:
Awarded by:
Bisnis Indonesia
Bisnis Indonesia

Waktu Pemberian Penghargaan:
Awarded on:
30 November 2023
November 30, 2023



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023, Perusahaan dengan Kategori "Menuju Informatif"
Public Information Openness Award 2023, Company with the Category "Heading towards Informativeness"

Lembaga Pemberi Penghargaan:
Awarded by:
Komisi Informasi Pusat
Central Information Commission

Waktu Pemberian Penghargaan:
Awarded on:
19 Desember 2023
December 19, 2023

Sertifikasi yang Dimiliki Perusahaan
Certifications Held by the Company


SERTIFIKAT ISPO

TÜVRheinland

Sertifikat ini diberikan kepada:

PT Perkebunan Nusantara III - Kebun Bangun

Alamat Kantor Pusat:
Jl. Sei Batang Hari No. 2 Medan, Provinsi Sumatera Utara
Telp: +6261-8452244, Fax: +6261-8452344

Telah memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) melalui Skema Penilaian Sertifikasi Mutu

Unit yang disertifikasi:
Kebun: Kebun Bangun
Pabrik: -

PT TUV Rheinland Indonesia
Gedung Menara Kerja Lantai 10
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950 – Indonesia
Telp: +6221-57944579; Fax: +6221-57944575

Nomor Urut Sertifikat : 824 501 21075
Tanggal Penerbitan Sertifikat : 25 Mei 2020
Tanggal Berakhirnya Sertifikat : 25 Mei 2025

Nuzman Saidin
Direktur Utama

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

ISPO - *Indonesian Sustainable Palm Oil*

ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

ISPO is a policy implemented by the Indonesian Government, specifically, the Ministry of Agriculture, to enhance the competitiveness of Indonesian palm oil in the global market and participate in fulfilling the commitment of the President of the Republic of Indonesia to reduce greenhouse gas emissions while addressing environmental issues.


TÜV NORD
Indonesia

CERTIFICATE

Anti-Bribery Management System as per
ISO 37001 : 2016

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Jl. Sei Batang Hari No. 2
Medan 20123
Indonesia

All Business Processes at PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding - Medan Operations Office that manages Oil Palm and Rubber Plantation Activities

ISO 37001:2016

Untuk menanggulangi tindak korupsi dan penyuapan yang semakin marak terjadi dalam suatu organisasi, yang dapat berpengaruh terhadap segala sektor kehidupan, maka ISO mengeluarkan standar yang mengatur sistem penyuapan, yakni ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau yang biasa disebut dengan SMAP.

To combat the increasingly prevalent acts of corruption and bribery within organizations, which can impact all sectors of life, ISO has issued a standard regulating anti-bribery systems, namely ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management Systems, commonly referred to as ABMS.


Certificate

Standard : Indonesian National Interpretation of RSPO Principles & Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil Year 2018 (April 2020)

Certificate Regist. No. : 824 502 14002

Certificate Holder : PT TUV Rheinland Indonesia certifies : PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Aek Torop Palm Oil Mill Aek Batu Village, Torgamba Sub District, South Labuhan Batu District, Prinang City, North Sumatera Province, 21464, Indonesia and its company owned estates according to the annex

RSPO number : -

Scope : Palm Oil Production and Plantation Management System

An audit was performed, Report No. RSPO-14002-ASA14. Proof has been furnished that the requirements according to Indonesian National Interpretation of RSPO Principles & Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil Year 2018 (April 2020) are fulfilled.

Validity: The certificate is valid from 17 June 2019 until 16 June 2024. The certificate shall remain valid in period stipulated above provided that the certificate holder mentioned here continues to comply with the RSPO P&C requirements. Status of compliance of the certificate holder shall be based on the annual inspections conducted by PT TUV Rheinland Indonesia.

RSPO registered parents company* : PT Perkebunan Nusantara III (RSPO Member No. : 1-0030-06-000-00)

* Name of the RSPO registered member company of which the certificate holder is a subsidiary (if applicable)

Date of first certificate : June 17, 2014

Indonesia, 10-06-2023

Director

The certificate remains property of PT TUV Rheinland Indonesia and can be withdrawn in case of terminations as mentioned in the contract or in case of changes or deviations of the above-mentioned data. The licensee is obliged to inform PT TUV Rheinland Indonesia immediately of any changes to the above-mentioned data. Only an original and signed certificate is valid.

www.tuv.com

asi

TÜVRheinland®
Precisely Right.

RSPO - *Roundtable on Sustainable Palm Oil*

RSPO adalah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit (perkebunan, pemrosesan, distributor, industri manufaktur, investor, akademisi, dan LSM bidang lingkungan) yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. RSPO didirikan tahun 2004 dengan kursi asosiasi berada di Zurich, Swiss, dan kesekretariatan berada di Kuala Lumpur, Malaysia dan kantor cabang di Jakarta. Organisasi ini diklaim telah memiliki 1000 anggota di lebih dari 50 negara.

RSPO is an association comprised of various organizations from different sectors of the palm oil industry (plantations, processing, distribution, manufacturing, investors, academia, and environmental NGOs) aimed at developing and implementing global standards for sustainable palm oil production. RSPO was established in 2004 with its association headquarters in Zurich, Switzerland, and its secretariat in Kuala Lumpur, Malaysia, with branch offices in Jakarta. The organization claims to have 1000 members in over 50 countries.



ISCC - *International Sustainability and Carbon Certification*

Sistem sertifikasi terkemuka untuk keberlanjutan dan emisi gas rumah kaca. Pada bulan Juli tahun 2011, Komisi Eropa diakui ISCC sebagai salah satu skema sertifikasi pertama untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan *Renewable Energy Directive's* (RED) di Uni Eropa. Selain itu, ISCC PLUS telah dikembangkan untuk penerapan di bidang makanan, pakan, teknik atau kimia (misalnya bio plastik) dan bio energi lainnya (misalnya biomassa padat).

The leading certification system for sustainability and greenhouse gas emissions. In July 2011, the European Commission recognized ISCC as one of the first certification schemes to demonstrate compliance with the Renewable Energy Directive's (RED) requirements in the European Union. Additionally, ISCC PLUS has been developed for implementation in the food, feed, technical, or chemical sectors (e.g., bioplastics) and other bioenergy (e.g., solid biomass) applications.



ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu (Quality Management System - QMS) yang diterbitkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (International Organization for Standardization - ISO). Standar ini memberikan pedoman bagi organisasi dalam mendesain, mengimplementasikan, dan memelihara sistem manajemen mutu yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan proses bisnis, dan mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. ISO 9001:2015 menetapkan persyaratan umum untuk sistem manajemen mutu, termasuk persyaratan untuk manajemen sumber daya, proses operasional, pemantauan dan pengukuran, analisis data, dan peningkatan berkelanjutan.

ISO 9001:2015 is an international standard for Quality Management Systems (QMS) published by the International Organization for Standardization (ISO). This standard provides guidelines for organizations to design, implement, and maintain effective quality management systems, enhancing customer satisfaction, optimizing business processes, and achieving overall organizational objectives. ISO 9001:2015 sets out general requirements for quality management systems, including requirements for resource management, operational processes, monitoring and measurement, data analysis, and continual improvement.



ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan (*Environmental Management System* - EMS) yang diterbitkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (International Organization for Standardization - ISO). Standar ini memberikan pedoman bagi organisasi dalam mendesain, mengimplementasikan, dan memelihara sistem manajemen lingkungan yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja lingkungan dan keberlanjutan. ISO 14001:2015 menetapkan persyaratan umum untuk sistem manajemen lingkungan, termasuk persyaratan untuk manajemen aspek lingkungan, pemantauan dan pengukuran kinerja lingkungan, analisis risiko lingkungan, dan peningkatan berkelanjutan.

ISO 14001:2015 is an international Environmental Management Systems (EMS) standard published by the International Organization for Standardization (ISO). This standard provides guidelines for organizations to design, implement, and maintain effective environmental management systems, enhancing environmental performance and sustainability. ISO 14001:2015 sets out general requirements for environmental management systems, including requirements for managing ecological aspects, monitoring and measuring environmental performance, environmental risk analysis, and continual improvement.



ISO 17025 : 2017

Standar akreditasi yang sudah diakui dunia dan mendapatkan pengakuan secara formal untuk kompetensi sebuah laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar Internasional ini telah menjadi persyaratan utama untuk diterimanya sebuah pengujian serta kalibrasi yang dilakukan oleh sebuah laboratorium.

A globally recognized accreditation standard formally acknowledging the competence of a testing and calibration laboratory. This International Standard has become a primary requirement for the acceptance of testing and calibration conducted by a laboratory.



Sertifikat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Occupational Health and Safety (OHS) Certificate

Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja.

Part of the overall company management system aimed at controlling risks related to work activities, in order to create a safe work environment.



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا
SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)
شهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID00410000128420521 / رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
KF-168/ DP-P XI/ XI/ 2021 Tanggal 2 November 2021

Jenis Produk / Type of Product	Minyak, Lemak dan Produk Olahannya	نوع المنتج
Nama Produk / Name of Product	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha / Name of Company	PT PERKEBUNAN NUSANTARA III	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha / Company's Address	Jl. Sei Batanghari No. 2, Kel. Simpang Tanjung, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, 20122, Indonesia	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on	3 November 2021	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
Berlaku sampai dengan / Valid until	3 November 2025	سارية المفعول حتى

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Muhammad Aqil Irham

Halal

Pengakuan kehalalan bagi produk tertentu, sehingga penting dimiliki oleh berbagai jenis produk yang membutuhkan jaminan halal untuk konsumennya.

Recognition of the halal status for specific products, making it crucial for various types of products that require halal assurance for their consumers.



mutu certification international

CERTIFICATE
OF CONFORMITY

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV UNIT TEH

Scope of Certification
Orthodox Black Tea Processing

Scope of Process:
Incoming Material → Withering → Grinding → Fermentation → Drying → Sorting and Grading → Packing → Delivery

KAN

ISO 22001 :2018

Sebuah standar internasional yang dilengkapi dengan elemen utama dan menggabungkan ISO 9001 dan HACCP untuk menyediakan sebuah kerangka kerja yang lebih efektif dan efisien dalam mengembangkan, meningkatkan dan menerapkan keterkaitan dari SMKP (sistem manajemen keamanan pangan).

An international standard that combines key elements of ISO 9001 and HACCP to provide a more effective and efficient framework in developing, improving, and implementing the Food Safety Management System (FSMS).



ISO 14064 : 2018

Spesifikasi dengan panduan pada tingkat organisasi untuk kuantifikasi dan pelaporan emisi dan serapan gas rumah kaca.

A specification with guidance at the organizational level for quantifying and reporting greenhouse gas emissions and absorptions.



Rainforest Alliance

Organisasi nirlaba internasional yang bekerja di bisnis, pertanian, dan hutan untuk menjadikan bisnis yang bertanggung jawab sebagai kenormalan baru.

Rainforest Alliance is an international non-profit organization working in business, agriculture, and forestry to promote responsible business practices as the new norm.



GMP +

Kepatuhan terhadap standar berkontribusi pada kualitas dan keamanan pakan pada Produk *Palm Kernel Meal* PPIS

Compliance with standards that contribute to the quality and safety of feed in Palm Kernel Meal PPIS products.



Ecovadis

Platform penilaian yang diakui secara global yang menilai keberlanjutan bisnis berdasarkan empat kategori utama: standar dampak lingkungan, ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, etika, dan praktik pengadaan.

A globally recognized assessment platform that evaluates business sustainability based on four main categories: environmental impact standards, labor and human rights, ethics, and procurement practices.



Standar Nasional Indonesia (SNI)
Indonesian National Standard (SNI)

Sebuah standar mutu ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan hanya berlaku di Indonesia. Perumusan standarnya dilakukan oleh Komite Teknis Perumusan SNI. Prosedur sertifikasi SNI dilakukan oleh para pihak yang ditunjuk sebagai *stakeholder*.

A quality standard set by the National Standardization Agency (BSN) and applicable only in Indonesia. The standard formulation is carried out by the Technical Committee for Formulating SNI. SNI certification procedures are conducted by parties appointed as stakeholders.



Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif, Perusahaan telah membentuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)

To create a safe, efficient, and productive work environment, the Company has established an Occupational Health and Safety Management System (OHSMS), which is regulated following Government Regulation Number 50 of 2012.

Informasi Sertifikasi ISPO/RSPO Pabrik Kelapa Sawit

Information on ISPO/RSPO Certification for Palm Oil Mills

Nama PKS Name of Palm Oil Mill (PKS)	Status Sertifikasi Status of Certification		
	RSPO/ ISPO	No. Sertifikat Certificate No.	Kadaluarsa Expiry Date
PKS Aek Nabara Selatan (PARAS)	RSPO	82450214024	22/05/2024
	ISPO	MUTU-ISPO/183	21/08/2024
PKS Aek Torop (PATOR)	RSPO	82450214002	16/06/2024
	ISPO	824 501 19061	15/09/2025
PKS Aek Raso (PPARO)	RSPO	82450214003	29/06/2024
	ISPO	824 501 19062	06/10/2025
PKS Sisumut (PSSUT)	RSPO	82450216053	14/10/2025
	ISPO	ISPO 00057	15/09/202
PKS Rambutan (PRBTN)	RSPO	82450216041	31/08/2026
	ISPO	82450117034	26/07/2023
PKS Torgamba (PTORA)	RSPO	82450216043	06/09/2026
	ISPO	MUTU-ISPO/218	10/08/2025
PKS Sei Daun (PSDAN)	RSPO	82450216044	07/09/2026
	ISPO	MUTU-ISPO/219	10/08/2025
PKS Sei Meranti (PSMTI)	RSPO	82450216050	13/10/2026
PKS Sei Silau (PSSIL)	ISPO	82450217058	02/04/2027
PKS Sei Baruhur (PSBAR)	RSPO	82450217081	11/04/2023
	ISPO	ISPO 00056	15/09/2025
PKS Sei Mangkei (PSMKI)	RSPO	82450217069	20/05/2023
	ISPO	82450115010	25/05/2025
PKS Hapesong (PHPSG)	RSPO	82450220122	24/10/2025
	ISPO	824 501 19064	11/11/2026
PKO Sei Mangkei (PKSMK)	RSPO	82450314007	06/01/2025

Informasi Sertifikasi ISPO/RSPO Rantai Pasok
Certification Information for ISPO/RSPO Supply Chain

Nama PKS Name of Palm Oil Mill (PKS)	Rantai Pasok Supply Chain	Status Sertifikasi Status of Certification		
		RSPO/ ISPO	No. Sertifikat Certificate No.	Kadaluarsa Expiry Date
Aek Nabara Selatan	Kebun Aek Nabara Selatan Aek Nabara Selatan Plantation	RSPO	82450214024	22/05/2024
		ISPO	MUTU-ISPO/183	21/08/2024
	Kebun Rantau Prapat Rantau Prapat Plantation	RSPO	82450214024	22/05/2024
		ISPO	MUTU-ISPO/225	09/09/2025
	Kebun Merbau Selatan Merbau Selatan Plantation	RSPO	82450214024	22/05/2024
		ISPO	MUTU-ISPO/186	22/05/2024
	Kebun Membang Muda Membang Muda Plantation	RSPO	82450214024	22/05/2024
		ISPO	MUTU-ISPO/185	21/08/2024
	Kebun Labuhan Haji Labuhan Haji Plantation	RSPO	82450214024	22/05/2024
		ISPO	MUTU-ISPO/184	21/08/2024
Sei Silau	Kebun Sei Silau Sei Silau Plantation	RSPO	82450217058	02/04/2027
	Kebun Pulau Mandi Pulau Mandi Plantation	RSPO	82450217058	02/04/2027
		ISPO	MUTU-ISPO/190	21/08/2024
	Kebun Ambalutu Ambalutu Plantation	RSPO	82450217058	02/04/2027
		ISPO	MUTU-ISPO/188	21/08/2024
	Kebun Huta Padang Huta Padang Plantation	RSPO	82450217058	02/04/2027
		ISPO	MUTU-ISPO/187	21/08/2024
	Kebun Bandar Selamat Bandar Selamat Plantation	RSPO	82450217058	02/04/202
		ISPO	MUTU-ISPO/189	21/08/2024
Aek Torop	Kebun Aek Torop Aek Torop Plantation	RSPO	82450214002	16/06/202
		ISPO	824 501 19061	15/09/2025
Aek Raso	Kebun Aek Raso Aek Raso Plantation	RSPO	82450214003	29/06/2024
		ISPO	824 501 19062	06/10/2025
Sei Daun	Kebun Sei Daun Sei Daun Plantation	RSPO	82450216044	07/09/2026
		ISPO	MUTU-ISPO/219	10/08/2025
	Kebun Bukit Tujuh Bukit Tujuh Plantation	RSPO	82450216044	07/09/2026

Nama PKS Name of Palm Oil Mill (PKS)	Rantai Pasok Supply Chain	Status Sertifikasi Status of Certification		
		RSPO/ ISPO	No. Sertifikat Certificate No.	Kadaluarsa Expiry Date
Torgamba	Kebun Torgamba Torgamba Plantation	RSPO	82450216043	06/09/2026
		ISPO	MUTU-ISPO/218	10/08/2025
Sei Meranti	Kebun Sei Meranti Sei Meranti Plantation	RSPO	8 82450216050	13/10/2026
Sisumut	Kebun Sisumut Sisumut Plantation	RSPO	82450216053	14/10/2025
		ISPO	ISPO 00057	15/09/2025
	Kebun Aek Nabara Utara Aek Nabara Utara Plantation	RSPO	82450216053	14/10/2025
		ISPO	ISPO 00059	15/09/2025
Rambutan	Kebun Tanah Raja Tanah Raja Plantation	RSPO	82450216041	31/08/2026
		ISPO	82450117034	26/07/2023
	Kebun Rambutan Rambutan Plantation	ISPO	824 501 20072	21/01/2027
	Kebun Silau Dunia Silau Dunia Plantation	RSPO	82450216041	31/08/2026
		ISPO	82450117034	26/07/2023
	Kebun Gunung Monako Gunung Monako Plantation	ISPO	82450117034	26/07/2023
	Kebun Sarang Giting Sarang Giting Plantation	RSPO	82450216041	31/08/2026
		ISPO	82450117034	26/07/2023
	Kebun Sei Putih Sei Putih Plantation	RSPO	82450216041	31/08/2026
		ISPO	82450117034	26/07/2023
Sei Baruhur	Kebun Sei Baruhur Sei Baruhur Plantation	RSPO	82450217081	1/04/2023
		ISPO	ISPO 00056	15/09/2025
	Kebun Sei Kebara Sei Kebara Plantation	RSPO	82450217081	11/04/2023
		ISPO	ISPO 00058	15/09/2025

Nama PKS Name of Palm Oil Mill (PKS)	Rantai Pasok Supply Chain	Status Sertifikasi Status of Certification		
		RSPO/ ISPO	No. Sertifikat Certificate No.	Kadaluarsa Expiry Date
Sei Mangkei	Kebun Dusun Hulu Dusun Hulu Plantation	RSPO	82450217069	20/05/2023
		ISPO	82450115010	25/05/2025
	Kebun Bangun Bangun Plantation	RSPO	82450217069	20/05/2023
		ISPO	82450121075	25/05/2025
	Kebun Gunung Para Gunung Para Plantation	RSPO	82450217069	20/05/2023
		ISPO	82450121077	25/05/2025
	Kebun Gunung Pamela Gunung Pamela Plantation	RSPO	82450217069	20/05/2023
		ISPO	82450121076	25/05/2025
	Kebun Sei Dadap Sei Dadap Plantation	RSPO	82450217069	20/05/2023
		ISPO	MUTU-ISPO/191	21/08/2024
Hapesong	Kebun Hapesong Hapesong Plantation	RSPO	82450220122	24/10/2025
		ISPO	824 501 190	11/11/2026
	Kebun Batang Toru Batang Toru Plantation	RSPO	82450220122	24/10/202
		ISPO	824 501 19071	13/01/2026
Bah Jambi	Bah Jambi	RSPO	824 502 23161	12/11/2028
		ISPO	ISPO 00075	28/12/2027
Bah Jambi	Marihat	RSPO	824 502 23161	12/11/2028
		ISPO	MUTU-ISPO/163	04/12/2024
	Marjandi	RSPO	824 502 23161	12/11/2028
		ISPO	MUTU-ISPO/146	04/12/2024
Dolok Sinumbah	Dolok Sinumbah	RSPO	824 502 23156	01/10/2028
		ISPO	ISPO 00076	28/12/2027
	Balimbingan	RSPO	824 502 23156	01/10/2028
		ISPO	MUTU-ISPO/163	04/12/2024
Mayang	Mayang	RSPO	824 502 18098	28/03/2029
		ISPO	ISPO 00072	28/12/2027
	Bukit Lima	RSPO	824 502 18098	28/03/2029
		ISPO	TNI-ISPO-C-2203	08/03/2027

Nama PKS Name of Palm Oil Mill (PKS)	Rantai Pasok Supply Chain	Status Sertifikasi Status of Certification		
		RSPO/ ISPO	No. Sertifikat Certificate No.	Kadaluarsa Expiry Date
Gunung Bayu	Gunung Bayu	RSPO	824 502 18099	20/09/2024
		ISPO	ISPO 00073	28/12/2027
	Tanah Itam Ulu	RSPO	824 502 18099	20/09/2024
		ISPO	82450119052	03/12/2024
Tinjowan	Tinjowan	RSPO	824 502 18097	11/03/2029
		ISPO	ISPO 00033	17/10/2026
	Padang Matinggi	RSPO	824 502 18097	11/03/2029
		ISPO	ISPO 00033	17/10/2026
Air Batu	Air Batu	RSPO	824 502 24174	23/05/2029
		ISPO	ISPO 00032	06/10/2026
Berangir	Berangir	RSPO	824 502 24180	19/07/2028
		ISPO	TNI-ISPO-L-1612	05/12/2026
Sawit Langkat	Sawit Langkat	RSPO	824 502 23168	02/04/2029
		ISPO	Mutu-ISPO/217	10/08/2025
Pasir Mandoge	Pasir Mandoge	RSPO	Mutu-RSPO/147	13/10/2025
		ISPO	Mutu-ISPO/320	07/09/2025
	Sei Kopas	RSPO	Mutu-RSPO/147	13/10/2025
		ISPO	Mutu-ISPO/224	07/09/2025
	Tonduhan	RSPO	Mutu-RSPO/147	13/10/2025
		ISPO	Mutu-ISPO/162	07/09/2025
Ajamu	Ajamu	RSPO	Mutu-RSPO/147	05/09/2024
		ISPO	Mutu-ISPO/263	26/01/2027
	Meranti Paham	RSPO	Mutu-RSPO/147	05/09/2024
		ISPO	Mutu-ISPO/264	26/01/2027
Sosa	Sosa	RSPO	824 502 22139	26/10/2027
		ISPO	C884667ISPO-2023.01	16/03/2028
Timur	Pangkalan 50 Kota (Regional IV)	RSPO	824 502 23165	02/04/2029
Pabatu	Pabatu	RSPO	Mutu-RSPO/072	20/10/2026
		ISPO	ISPO 00071	28/12/2027
	Bah Birung Ulu	RSPO	Mutu-RSPO/072	20/10/2026
		ISPO	Mutu-ISPO/223	16/03/2028

Nama PKS Name of Palm Oil Mill (PKS)	Rantai Pasok Supply Chain	Status Sertifikasi Status of Certification		
		RSPO/ ISPO	No. Sertifikat Certificate No.	Kadaluarsa Expiry Date
PPIS Pabatu	PKS Reg II	RSPO	824 503 23054	11/07/2008
Dolok Ilir	Dolok Ilir	RSPO	824 502 24185	28/09/2025
		ISPO	ISPO 00034	19/10/2026
	Laras	RSPO	824 502 24185	28/09/2025
		ISPO	ISPO 00034	19/10/2026
Pulu Raja	Pulu Raja	RSPO	824 502 24179	18/10/2026
		ISPO	ISPO 00074	28/12/2027
Adolina	Adolina	RSPO	824 502 23157	12/11/2028
		ISPO	ISPO 00035	14/09/2026
Tandun	Tandun	RSPO	824 502 16046	22/11/2026
		ISPO	TNI-ISPO-C-1905	24/03/2024
	Sei Berlian	RSPO	824 502 16046	22/11/2026
		ISPO	TNI-ISPO-I-2001	29/09/2025
	Lindai	RSPO	824 502 16046	22/11/2026
		ISPO	TNI-ISPO-I-2002	29/09/2025
Sei Rokan	Sei Rokan	RSPO	824 502 16054	04/12/2026
		ISPO	TNI-ISPO-G-1606	18/07/2026
PPIS Tandun	Semua PKS Reg III	RSPO	824 503 16026	08/09/2024
Terantam	Terantam	RSPO	824 502 17090	20/02/2029
		ISPO	824 501 22094	19/07/2027
	Tamora	RSPO	824 502 17090	20/02/2029
		ISPO	TNI-ISPO-I-2206	27/03/2027
Sei Intan	Sei Intan	RSPO	MUTU-RSPO/133	16/06/2024
		ISPO	TNI-ISPO-K-1713	30/11/2027
Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	RSPO	824 502 18093	26/06/2024
		ISPO	824 501 22095	19/07/2027
Sei Tapung	Sei Tapung	RSPO	824 502 17092	28/09/2024
		ISPO	TNI-ISPO-L-1614	05/12/2026
	Sei Siasam	RSPO	824 502 17092	28/09/2024
		ISPO	TNI-ISPO-L-2009	29/12/2025

Nama PKS Name of Palm Oil Mill (PKS)	Rantai Pasok Supply Chain	Status Sertifikasi Status of Certification		
		RSPO/ ISPO	No. Sertifikat Certificate No.	Kadaluarsa Expiry Date
Sei Garo	Sei Garo	RSPO	824 502 19115	31/10/2025
		ISPO	TNI-ISPO-D-2103	31/03/2026
Sei Pagar	Sei Pagar	RSPO	824 502 19114	31/10/2025
		ISPO	TNI-ISPO-D-2104	31/03/2026
Tanah Putih	Tanah Putih	RSPO	824 502 19116	30/10/2025
		ISPO	MUTU-ISPO/096	03/08/2027
Sei Galuh	Sei Galuh	RSPO	82450222133	13/04/2027
		ISPO	TNI-ISPO-D-2102	31/03/2026
Sei Buatan	Sei Buatan	RSPO	82450222317	11/07/2027
		ISPO	824 501 22096	14/07/2027
Tanjung Medan	Tanjung Medan	RSPO	82450222141	19/03/2028
		ISPO	MUTU-ISPO/097	03/08/2027
Bunut	Bunut	RSPO	824 502 22130	20/04/2027
		ISPO	AJAINDO/ISPO-IN/041/ XII/2020	30/12/2025
	Batang Hari	RSPO	824 502 22130	20/04/2027
		ISPO	AJAINDO/ISPO-IN/041/ XII/2020	30/12/2025
Rimbo Dua	Rimbo Satu	RSPO	824 502 17082	07/09/2028
		ISPO	MUTU-ISPO/035	29/04/2025
	Rimbo Dua	RSPO	824 502 17082	07/09/2028
		ISPO	MUTU-ISPO/035	29/04/2025
Tanjung Lebar	Tanjung Lebar	RSPO	824 502 22129	07/09/2027
		ISPO	MUTU-ISPO/172	21/08/2024
Aur Gading	Durian Luncuk	RSPO	824 502 22142	07/12/2027
		ISPO	MUTU-ISPO/171	21/08/2024
Solok Selatan	Solok Selatan	RSPO	824 502 23163	08/02/2029
		ISPO	SDS4098a0123.01.2024	29/01/2029
Ophir	Ophir	RSPO	824 502 22146	08/01/2028
		ISPO	AJAINDO/ISPO-IN/044/ XII/2022	08/03/2027
Pangabuan	Pangabuan	RSPO	824 502 23169	19/03/2029

Nama PKS Name of Palm Oil Mill (PKS)	Rantai Pasok Supply Chain	Status Sertifikasi Status of Certification		
		RSPO/ ISPO	No. Sertifikat Certificate No.	Kadaluarsa Expiry Date
Gunung Meliau	Gunung Meliau	RSPO	824 502 24183	30/11/2027
Rimba Berlian	Rimba Berlian	RSPO	824 502 24184	07/02/2029
Sawit Hulu	Sawit Hulu	RSPO	82450222145	15/05/2028
		ISPO	MUTU-ISPO/178	21/08/2024
Sawit Seberang	Sawit Seberang	RSPO	82450222140	31/07/2028
		ISPO	MUTU-ISPO/177	31/07/2028
Pagar Merbau	Tjg Garbus Pagar Merbau	RSPO	MUTU-RSPO/175	17/10/2023
		ISPO	ISPO 00037	24/08/2025
Kwala Sawit	Kwala Sawit	RSPO	MUTU-RSPO/209	05/02/2024
Bekri	Bekri	RSPO	824 502 23152	04/04/2027
		ISPO	MISB-ISPO/097	27/07/2026
	Padang Ratu	RSPO	824 502 23152	04/04/2027
		ISPO	MISB-ISPO/101	27/07/2026
	Rejosari	RSPO	824 502 23152	04/04/2027
		ISPO	MISB-ISPO/097	04/04/2027
PPIS Bekri	Semua PKS Regional VII	RSPO	824 503 22043	08/06/2027
Betung	Betung	RSPO	824 502 22134	21/03/2027
		ISPO	MISB-ISPO/118	31/03/2027
PPIS Betung	Semua PKS Regional VII	RSPO	824 503 22044	06/06/2027
Talang Sawit	Talang Sawit	RSPO	824 502 22148	29/03/2028
Sungai Lengi	Sungai Lengi	RSPO	824 502 22144	30/11/2027
		ISPO	MISB-ISPO/055	22/07/2025
Talopino	-	ISPO	MISB-ISPO/087	28-01-2026
Sungai Niru	Sungai Niru	ISPO	MISB-ISPO/088	28-01-2026
Kertajaya	Kerta Jaya	RSPO	824 502 22135	07/09/2027
		ISPO	824 501 19069	03/12/2024
Cikasungka	Cikasungka	RSPO	824 502 23153	10/09/2028
		ISPO	824 501 23103	06/04/2029
Tj Seumentoh	Baru	RSPO	824 502 23152	12/06/2028
	Lama	RSPO	824 502 23152	12/06/2028
Cot Girek	Cot Girek	RSPO	824 502 22134	18/05/2028

Nama PKS Name of Palm Oil Mill (PKS)	Rantai Pasok Supply Chain	Status Sertifikasi Status of Certification		
		RSPO/ ISPO	No. Sertifikat Certificate No.	Kadaluarsa Expiry Date
Pulau Tiga	Pulau Tiga	RSPO	824 502 22134	16/09/2027
Luwu	Luwu I	RSPO	824 502 22143	25/12/2027
	Luwu II	RSPO	824 502 22143	25/12/2027

KEANGGOTAAN ASOSIASI

Dalam rangka untuk memperkuat bisnisnya, PTPN III telah tergabung dalam keanggotaan organisasi, sebagai berikut:

MEMBERSHIP OF ASSOCIATION

In order to strengthen its business, PTPN III has joined the following organizational memberships:

Perkebunan Nusantara

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Indonesian Palm Oil Entrepreneurs Association	Ruang Lingkup / Scope Nasional / National Posisi Keikutsertaan Membership Position Anggota / Member
Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Indonesian Sugar Association	Ruang Lingkup / Scope Nasional / National Posisi Keikutsertaan Membership Position Anggota / Member
Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)	Ruang Lingkup / Scope Nasional / National Posisi Keikutsertaan Membership Position Anggota / Member
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Institute of Accountants	Ruang Lingkup / Scope Nasional / National Posisi Keikutsertaan Membership Position Anggota / Member
Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO) Indonesian Rubber Entrepreneurs Association (GAPKINDO)	Ruang Lingkup / Scope Nasional / National Posisi Keikutsertaan Membership Position Anggota / Member
Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal Internal Audit Communication Forum	Ruang Lingkup / Scope Nasional / National Posisi Keikutsertaan Membership Position Anggota / Member
Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Indonesia Human Capital Forum (FHCI)	Ruang Lingkup / Scope Nasional / National Posisi Keikutsertaan Membership Position Anggota / Member

ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, JARINGAN KAWASAN , SERTA INFORMASI TENTANG KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

ADDRESS OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, REGIONAL NETWORK, AND INFORMATION ON BRANCH OFFICES AND REPRESENTATIVE OFFICES



Entitas Anak
Subsidiaries

1. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA I**
   Gedung Agro Plaza Lantai 11
   Jl. HR. Rasuna Said Kav X2/1, Kuningan Timur,
   Setiabudi, RT.7/RW.4, Kuningan Timur,
   Jakarta Selatan, 12950
   Agro Plaza Building 11th Floor,
   Jl. HR. Rasuna Said Kav X2/1, East Kuningan,
   Setiabudi, Neighborhood Unit 7/Community Unit 4,
   East Kuningan, South Jakarta, 12950

2. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV**
   Gedung Agro Plaza Lantai 8,
   Jl. HR. Rasuna Said Kav X2/1, Kuningan Timur,
   Setiabudi, RT.7/RW.4, Kuningan Timur,
   Jakarta Selatan, 12950
   Agro Plaza Building 8th Floor,
   Jl. HR. Rasuna Said Kav X2/1, East Kuningan,
   Setiabudi, Neighborhood Unit 7/Community Unit 4,
   East Kuningan, South Jakarta, 12950

Entitas Asosiasi
Associates

1. **PT INDUSTRI KARET NUSANTARA**
   Jl. Medan-Tanjung Morawa KM 9,5.
   Medan - 20148.
   Telp. 061-7867357, 7867566
   Fax. 061- 7867356
   Website: www.ikn.co.id
   Jl. Medan-Tanjung Morawa KM 9,5
   Medan - 20148
   Phone. 061-7867357, 7867566
   Fax. 061- 7867356
   Website: www.ikn.co.id

2. **PT SINERGI GULA NUSANTARA**
   Gedung Graha Nusa Tiga
   Jl. Proklamasi No. 25, Jakarta - 10320
   Telp +6221-3926578
   Website: sinergigula.com
   Graha Nusa Tiga Building Jl. Proklamasi No.
   25, Jakarta - 10320
   Phone +6221-3926578
   Website: sinergigula.com

3. **LPP AGRO NUSANTARA**
   Jl. LPP No. 1, Yogyakarta - 55222
   Telp 0274 - 586201
   Jl. LPP No. 1, Yogyakarta - 55222
   Phone 0274 - 586201







4. PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA
Jl. Taman Cut Mutiah No.11 Jakarta - 10330
Telp. 021 – 3106685, 3907554
Fax. 021 – 31935091
Website: www.kpbptpn.co.id
Jl. Taman Cut Mutiah No.11 Jakarta - 10330
Phone 021 – 3106685, 3907554
Fax. 021 – 31935091
Website: www.kpbptpn.co.id

5. PT INDUSTRI NABATI LESTARI
Jl. Besar Bandar Tongah, Desa Sei Mangkei
Kec Bosar Maligas Kab. Simalungun
Jl. Besar Bandar Tongah, Sei Mangkei Village
Bosar Maligas District Simalungun Regency

6. PT BIO INDUSTRI NUSANTARA
Jl. Ir. H. Juanda No. 107 Bandung - 40132
Telp. 022 - 2530580
Fax. 022 - 2530591
E-mail: bionusa@bdg.centrin.net.id
Website: www.bionusa.com
Jl. Ir. H. Juanda No. 107 Bandung - 40132
Phone 022 - 2530580
Fax. 022 - 2530591
E-mail: bionusa@bdg.centrin.net.id
Website: www.bionusa.com

7. PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA
Jl. Salak No. 1A Bogor - 16151
Telp. 0251 – 333382, 333088, 333089
Fax. 0251 – 315985
Jl. Salak No. 1A Bogor - 16151
Phone 0251 – 333382, 333088, 333089
Fax. 0251 – 315985

8. PT KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA
Jl Kelapa Sawit II No 1 Sei Mangkei,
Simalungun - 21183
Jl Kelapa Sawit II No 1 Sei Mangkei,
Simalungun - 21183

9. PT SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA
Jl. Jend. Sudirman No. 299 Tebing Tinggi
Telp. 061 - 62121845.
Fax. 061 - 62123789
Jl. Jend. Sudirman No. 299 Tebing Tinggi
Phone 061 - 62121845
Fax. 061 - 62123789

10. PT INDUSTRI KARET NUSANTARA
Jl. Medan-Tanjung Morawa KM 9,5
Medan - 20148
Telp. 061-7867357, 7867566
Fax. 061- 7867356
Website: www.ikn.co.id
Jl. Medan-Tanjung Morawa KM 9,5
Medan - 20148
Phone 061-7867357, 7867566
Fax. 061- 7867356
Website: www.ikn.co.id

11. PT SINERGI GULA NUSANTARA
Gedung Graha Nusa Tiga
Jl. Proklamasi No. 25, Jakarta - 10320
Telp +6221-3926578
Website: sinergigula.com
Graha Nusa Tiga Building
Jl. Proklamasi No. 25, Jakarta - 10320
Phone +6221-3926578
Website: sinergigula.com

INFORMASI PADA SITUS PERUSAHAAN
INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE



Sebagai suatu Perusahaan yang bersifat terbuka terhadap publik, maka Perusahaan perlu memberikan transparansi informasi terbaru kepada semua pihak. Untuk itu, PTPN III (Persero) memiliki situs web www.holding-perkebunan.com yang bertujuan untuk memberikan berbagai informasi terkini seputar Perusahaan, peristiwa yang terjadi di lingkungan Perusahaan, dan menyediakan akses ke berbagai dokumen penting, termasuk laporan tahunan. Meski berstatus sebagai Perusahaan terbuka, Perusahaan tetap memprioritaskan keterbukaan informasi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.4/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang mengatur hal-hal berikut:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Situs resmi yang dimiliki oleh PTPN III (Persero) telah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Situs tersebut sudah menyediakan informasi umum tentang Perusahaan, termasuk laporan

As a company that is open to the public, it needs to provide transparency with the latest information to all parties. Therefore, PTPN III (Persero) maintains the website www.holding-perkebunan.com, which aims to offer various up-to-date information about the Company, events occurring within the Company, and access to essential documents, including annual reports. Despite being a public company, the Company prioritizes information transparency following the provisions of the Financial Services Authority Regulation (FSA) No. 8/POJK.4/2015, dated 25 June 2015, which regulates the following:

1. General Information about Issuers or Public Companies;
2. Information for Investors or Stakeholders;
3. Corporate Governance Information; and
4. Corporate Social Responsibility Information.

The official website of PTPN III (Persero) has been adjusted to comply with the provisions set by the Financial Services Authority (FSA). The site provides general information about the Company, including financial and annual reports relevant

keuangan dan tahunan yang relevan bagi investor, serta informasi mengenai Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Selain itu, situs web Perusahaan juga menampilkan berita dan kegiatan terkini dari Perusahaan serta informasi tentang produk dan layanan yang ditawarkan.

to investors and information on Corporate Governance and Corporate Social Responsibility. The company's website also features the latest news, activities, and product and service information.

Uraian mengenai ketersediaan situs terhadap kebutuhan informasi kepada publik, pemegang saham, serta pemangku kepentingan dapat dilihat melalui tabel berikut.

The website's availability to meet the information needs of the public, shareholders, and stakeholders can be seen in the following table.

Uraian Description	**Ketersediaan** Availability	**Keterangan** Remarks
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Shareholder information up to the ultimate individual owner	✓	https://www.holding-perkebunan.com/tentang
Isi Kode Etik Contents of the Code of Ethics	✓	https://www.holding-perkebunan.com/gcg3
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information on General Meetings of Shareholders (GMS), including at least the agenda discussed in the GMS, summary minutes of the GMS, and important dates such as the announcement date of the GMS, the invitation date of the GMS, the date of the GMS, and the date the summary minutes of the GMS are announced	×	Perusahaan belum menampilkan informasi terkait RUPS di *website*. Namun demikian, informasi tersebut bisa diperoleh dari Laporan tahunan Perusahaan yang disediakan pada kanal website The Company has not displayed GMS information on the website. However, this information can be obtained from the Company's Annual Report, which is available on the website.
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir) Annual financial reports (last 5 years)	✓	https://www.holding-perkebunan.com/annual-report
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and Directors	✓	https://www.holding-perkebunan.com/management
Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Unit Audit Internal Charters of the Board of Commissioners, Directors, Committees, and Internal Audit Unit	✓	https://www.holding-perkebunan.com/gcg1

Tata Kelola Perusahaan

CORPORATE GOVERNANCE



04



PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi kebutuhan dunia usaha. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan Perseroan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kelengkapan infrastruktur GCG yang melandasi penerapan GCG di lingkup Perseroan, serta selalu mengikuti perkembangan praktik Tata Kelola Perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) adalah mekanisme yang mengarahkan manajemen Perseroan agar sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Perseroan mengadopsi prinsip-prinsip GCG tidak hanya untuk mematuhi peraturan, tetapi karena Perseroan sadar dan memiliki komitmen yang kuat, bahwa penerapan GCG harus berlandaskan pada standar etika yang tinggi agar mampu mencapai landasan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik, maka akan menciptakan persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, GCG juga merupakan elemen utama dalam *Sustainability Development Goals* (SDG) yang menjadi faktor penting bagi para investor dalam mengevaluasi kinerja Perusahaan.

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Hal ini bertujuan agar penerapan GCG tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga mengikuti praktik-praktik terbaik yang melampaui standar kepatuhan. Selain itu, PTPN III (Persero) berkomitmen untuk terus memantau dan mengadopsi perkembangan terbaru dalam praktik tata kelola yang terbaik, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Penerapan GCG oleh Perseroan didasari oleh peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 dan Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/2012 yang mengatur penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN.

Berikut ini adalah beberapa tujuan dari penerapan GCG oleh Perseroan:

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan, agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan;

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices has become a necessity for the business world. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is highly committed to applying GCG practices in the management of the Company. This commitment is manifested through the comprehensive GCG infrastructure that underpins GCG implementation within the Company, and by continually adhering to the evolving best practices in Corporate Governance.

Good Corporate Governance (GCG) is a mechanism that guides the Company's management in alignment with stakeholder expectations. The Company adopts GCG principles not merely to comply with regulations but due to a strong awareness and commitment that GCG implementation must be based on high ethical standards to achieve sustainable business growth. By effectively applying GCG principles, healthy competition and a conducive business climate are fostered. Moreover, GCG is a key element in the Sustainable Development Goals (SDG), which is a critical factor for investors when evaluating the Company's performance.

The implementation of corporate governance principles by PT Perkebunan Nusantara III (Persero) refers to the standards set by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). This aims to ensure that GCG implementation not only meets legal requirements but also adheres to best practices that surpass compliance standards. Additionally, PTPN III (Persero) is committed to continually monitoring and adopting the latest developments in best governance practices at the national, regional, and international levels.

The Company's application of GCG is based on the regulations of the Minister of State-Owned Enterprises No. Per-01/MBU/2011 and Minister of State-Owned Enterprises No. Per-09/MBU/2012, which governs the implementation of good corporate governance in SOE.

The following are some objectives of the Company's GCG implementation:

1. Optimizing the company's value to ensure strong competitiveness, both nationally and internationally, thereby maintaining its existence and achieving sustainable business objectivesi;

2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
3. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Wujud komitmen manajemen dalam upaya untuk menerapkan GCG secara terencana, sistemik, dan berkesinambungan tergambar dari visi *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yaitu: "Menjadi Perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa".

Melalui Penerapan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan yakin dapat menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, serta menjaga kinerja unggul dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, bahwa Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian dan tanggung jawab.

Penerapan Prinsip Tata Kelola

Prinsip dasar yang diterapkan oleh Perseroan dalam melaksanakan GCG dilandaskan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 (serta perubahan pasal 12 poin 10 pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012) tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN maupun peraturan sejenis lainnya), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Transparansi**
   Mengutamakan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.
2. **Akuntabilitas**
   Memiliki sistem manajemen dengan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang jelas sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.
3. **Responsibilitas**
   Memastikan kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap personel secara efektif melalui pembuatan laporan penerimaan cinderamata atau gratifikasi, laporan *conflict of interest*.

2. Encouraging professional, efficient, and effective company management, empowering corporate organs, and enhancing their independence;
3. Promoting that corporate organs make decisions and take actions based on high moral values, compliance with laws and regulations, and awareness of the company's social responsibilities towards stakeholders and environmental sustainability;
4. Increasing the company's contribution to the national economy;
5. Creating a conducive climate for the development of national investment.

The management's commitment to implementing GCG in a planned, systematic, and continuous manner is reflected in the vision of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero): "To become an excellent and world-class competitive national agribusiness company that contributes sustainably to national advancement."

By implementing GCG principles, the Company believes it can maintain the trust of stakeholders, ensure superior performance, and achieve sustainable growth. This commitment is also reinforced by Law No. 19 of 2003 on SOE, which mandates that the Board of Directors and the Board of Commissioners must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, and responsibility in their duties.

Implementation of Governance Principles

The fundamental principles adopted by the Company in implementing GCG are based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 (including amendments to Article 12 point 10 in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/2012) on the Implementation of GCG Practices in SOE, and other similar regulations, as detailed below:

1. **Transparency**
   Emphasizing openness in decision-making and disclosure of material and relevant information about the Company.
2. **Accountability**
   Establishing a management system with clear functions, implementations, and responsibilities to ensure effective corporate governance.
3. **Responsibility**
   Ensuring clarity of duties and responsibilities for each personnel through the creation of reports on gift acceptance or gratuities, and conflict of interest disclosures.

4. **Independensi**
   Perseroan memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilakukan secara independen tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Kewajaran**
   Perseroan menerapkan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah pemerintah, pekerja, masyarakat umum serta pemangku kepentingan lainnya.

4. **Independency**
   Ensuring that the Company is managed independently, without conflicts of interest and undue influence or pressure from any party, in accordance with laws and sound corporate principles.
5. **Fairness**
   Ensuring fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders, including the government, employees, the general public, and other stakeholders based on agreements and laws.

Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Fundamental Principles of Good Corporate Governance



Perseroan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip governansi korporat yang telah disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Sebagaimana yang telah tertuang dalam pedoma Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), Terdapat 4 (empat) pilar governansi korporat yang telah ditetapkan oleh KNKG, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Selain itu, PUKGI 2021, juga merupakan pengembangan dan perkembangan terkini dari nilai dasar TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*).

Berikut merupakan uraian mengenai 4 (empat) pilar governansi korporat yang menjadi pedoman PTPN III (Persero) dalam mengatur Perusahaan:

The Company is committed to applying the corporate governance principles established by the National Committee on Governance Policy (KNKG). As outlined in the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI), there are 4 (four) pillars of corporate governance set by KNKG: ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability. Furthermore, PUGKI 2021 incorporates the latest developments and core values of TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness).

The following describes the 4 (four) pillars of corporate governance that guide PTPN III (Persero) in managing the Company:

Perilaku Beretika | Ethical Behavior

Definisi	Definition
Dalam melaksanakan kegiatannya, Korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.	In conducting its activities, the Corporation consistently prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, and builds and maintains moral values and trust. The Corporation considers the interests of shareholders and other stakeholders based on fairness and equality and is managed independently so that each corporate organ does not dominate and cannot be intervened by others.

Perilaku Beretika | Ethical Behavior

Penerapan di lingkup Perusahaan	Application within the Company
Meliputi etika kerja karyawan di dalam dan di luar lingkup perusahaan, etika kerja sebagai pimpinan, etika kerja sebagai bawahan, etika terhadap sesama rekan kerja, etika dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi perseroan, etika dalam penyampaian informasi kepada karyawan, etika dalam menjaga aset perseroan, etika dalam mencegah benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, etika dalam aktivitas politik dan etika terhadap gratifikasi.	This includes employee work ethics within and outside the company, work ethics as a leader, work ethics as a subordinate, ethics towards colleagues, ethics in maintaining the confidentiality of company data and information, ethics in conveying information to employees, ethics in safeguarding company assets, ethics in preventing conflicts of interest and misuse of position, ethics in political activities, and ethics regarding gratuities.

Akuntabilitas | Accountability

Definisi	Definition
Perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.	The Company can account for its performance transparently and fairly. Therefore, the Company must be managed correctly, measurably, and in line with corporate interests while considering the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.
Penerapan di lingkup Perusahaan	**Application within the Company**
Penerapan transparansi melalui keterbukaan informasi publik dengan penyediaan Informasi yang tepat dan akurat dan mudah untuk diakses oleh pemangku kepentingan.	Implementation of transparency through public information disclosure by providing accurate and easily accessible information to stakeholders.

Transparansi | Transparency

Definisi	Definition
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.	To maintain objectivity in business operations, the Corporation provides material and relevant information in a manner that is easily accessible and understandable by stakeholders. The Corporation takes the initiative to disclose not only issues required by regulations but also those important for decision-making by shareholders, creditors, and other stakeholders.
Penerapan di lingkup Perusahaan	**Application within the Company**
Penerapan transparansi melalui keterbukaan informasi publik dengan penyediaan Informasi yang tepat dan akurat dan mudah untuk diakses oleh pemangku kepentingan.	Implementation of transparency through public information disclosure by providing accurate and easily accessible information to stakeholders.

Keberlanjutan | Sustainability

Definisi	Definition
Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.	The Company complies with laws and regulations and is committed to fulfilling its responsibilities towards society and the environment, contributing to sustainable development by cooperating with all relevant stakeholders to improve their lives in a manner aligned with business interests and sustainable development agendas.
Penerapan di lingkup Perusahaan	**Application within the Company**
Penerapan prinsip keberlanjutan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, *corporate social responsibility* dan sertifikasi di bidang industri perkebunan.	Implementation of sustainability principles through social and environmental responsibility, corporate social responsibility, and certification in the plantation industry.

Selain menerapkan prinsip 4 (empat) pilar governansi korporat, Perusahaan juga mengadopsi 8 (delapan) prinsip governansi korporat yang memuat tentang hak-hak pemegang saham, pemangku kepentingan dan pemenuhannya, aturan pokok tentang pengelolaan, dan pengawasan atas pengelolaan korporasi di Indonesia, termasuk aspek etika, manajemen risiko, dan pengungkapan. Delapan prinsip governansi tersebut dibagi dalam tiga kelompok prinsip yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tiga prinsip pertama adalah kelompok prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kelompok prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan
3. Kelompok prinsip yang mengatur pemilik sumber daya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat.

Dan berikut ini merupakan uraian mengenai 8 prinsip governansi korporat dan penerapannya dalam lingkup Perseroan.

Besides implementing the 4 (four) pillars of corporate governance, the Company also adopts 8 (eight) corporate governance principles that encompass shareholders' rights, stakeholders' interests and their fulfillment, basic rules of management, and supervision of corporate management in Indonesia, including aspects of ethics, risk management, and disclosure. These eight principles are divided into three groups as follows:

1. The first three principles regulate the management and supervisory functions of the Corporation, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. The second group of principles governs the processes and outputs generated by the Board of Directors and the Board of Commissioners; and
3. The third group of principles concerns the resource owners who will primarily benefit from the implementation of corporate governance.

The following outlines the eight corporate governance principles and their implementation within the Company.

Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
Principle 1: Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Definisi	Definition
Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.	The Board of Directors and the Board of Commissioners perform their roles and responsibilities independently to create sustainable value for the long-term best interests of the corporation and its shareholders, while considering the interests of stakeholders.
Penerapan di lingkup Perusahaan	**Application within the Company**
Prinsip 1 berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengelolaan korporasi serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan korporasi oleh Direksi. Di samping itu prinsip ini mengatur penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan anggotanya masing-masing, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta peningkatan kompetensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Principle 1 relates to the roles and responsibilities of the Board of Directors in managing the corporation and the roles and responsibilities of the Board of Commissioners in overseeing the management by the Board of Directors. Additionally, this principle covers the performance evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners and their members, handling conflicts of interest involving members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and enhancing the competencies of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Principle 2: Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Definisi	Definition
Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris.	Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are selected and appointed such that the composition of the Board of Directors as the management body and the Board of Commissioners as the supervisory body is diverse, and each consists of directors and commissioners who have the commitment, knowledge, skills, experience, and expertise needed to appropriately fulfill the management role of the Board of Directors and the supervisory role of the Board of Commissioners.
Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.	Remuneration is designed to effectively align the interests of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners with the long-term interests of the corporation and the creation of sustainable value.
Penerapan di lingkup Perusahaan	**Application within the Company**
Prinsip 2 mengharuskan pemilihan dan penetapan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing sebagai organ pengelolaan dan pengawasan memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping itu, prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan remunerasi untuk mendorong anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengutamakan kepentingan jangka panjang korporasi berdasarkan prinsip keberlanjutan, serta mengharuskan pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan akuntabel.	Principle 2 requires that the selection and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners ensure that each body has a composition of members with the necessary knowledge, skills, and expertise relevant to their roles. Additionally, this principle emphasizes the importance of remuneration policies to encourage members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to prioritize the long-term interests of the corporation based on sustainability principles, and requires transparent and accountable disclosure of the remuneration policies and information received by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris
Principle 3: Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners

Definisi	Definition
Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi.	The Board of Directors and the Board of Commissioners maintain a close, open, constructive, professional, and trusting working relationship for the best interests of the corporation.
Penerapan di lingkup Perusahaan	**Application within the Company**
Prinsip 3 menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, saling percaya antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai kepentingan terbaik korporasi. Prinsip 3 ini juga mengatur perlunya Dewan Komisaris mengakses informasi yang lengkap serta pentingnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami implikasi struktur kepemilikan korporasi terhadap pelaksanaan perannya.	Principle 3 emphasizes the importance of a close, open, constructive, professional, and trusting working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners in achieving the best interests of the corporation. This principle also governs the need for the Board of Commissioners to access complete information and the importance of the Board of Directors and the Board of Commissioners understanding the implications of the corporate ownership structure on the execution of their roles.

Prinsip 4: Perilaku Etis | Principle 4: Ethical Behavior

Definisi	Definition
Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.	The corporation is committed to acting ethically and responsibly, upholding organizational values and culture.
Penerapan di lingkup Perusahaan	**Application within the Company**
Prinsip 4 mengharuskan korporasi untuk membuat pernyataan secara berkala tentang komitmen korporasi tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga komitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab.	Principle 4 requires the corporation to periodically state its commitment not only to comply with applicable laws and regulations but also to act ethically and responsibly.

Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan
Principle 5: Risk Management, Internal Control, and Compliance

Definisi	Definition
Korporasi menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara berintegritas.	The corporation practices integrated corporate governance with the implementation of an internal control system, risk management, and an effective compliance management system to support the achievement of corporate goals, vision, mission, objectives, and performance targets in conducting business with integrity.
Penerapan di lingkup Perusahaan	**Application within the Company**
Prinsip 5 mengharuskan Direksi untuk mengimplementasikan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan korporasi dalam berbisnis secara bertanggung jawab (*responsible business*) sebagai warga korporat yang baik (*good corporate citizen*). Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan terhadap efektivitas penerapan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan korporat yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direksi.	Principle 5 mandates the Board of Directors to implement governance, internal control systems, risk management, and compliance management systems in an integrated manner as part of the strategy, management tools, and practices executed by the corporation in conducting responsible business as a good corporate citizen. The Board of Commissioners monitors and provides feedback on the effectiveness of the governance, internal control systems, risk management, and compliance management systems implemented in an integrated manner by the Board of Directors.

Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi
Principle 6: Disclosure and Transparency

Definisi	Definition
Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi.	The corporation makes accurate and timely disclosures regarding all material matters concerning the corporation.
Penerapan di lingkup Perusahaan	**Application within the Company**
Prinsip 6 mengharuskan korporasi untuk memiliki kerangka governansi yang mampu memberikan keyakinan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan atas korporasi, dan governansi korporat.	Principle 6 requires the corporation to have a governance framework that can produce accurate and timely disclosures regarding all material matters about the corporation, including financial condition and performance, ownership, and corporate governance.

Prinsip 7: Hak-hak Pemegang Saham
Principle 7: Shareholder Rights

Definisi	Definition
Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakukan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.	The corporation protects and facilitates the exercise of shareholders' rights and ensures fair treatment of shareholders, including minority shareholders. All shareholders have the opportunity to receive effective redress for violations of their rights.
Penerapan di lingkup Perusahaan	**Application within the Company**
Prinsip 7 menjelaskan mengenai pemenuhan hak pemegang saham dan perlakuan adil bagi pemegang saham, bagaimana cara kerja sama aktif antara korporasi dengan pemegang sahamnya dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak pemegang saham secara efektif melalui RUPS.	Principle 7 outlines the fulfillment of shareholders' rights and fair treatment for shareholders, how active cooperation between the corporation and its shareholders is implemented, and the effective execution of some shareholder rights through the GMS.

Prinsip 8: Hak-hak Pemangku Kepentingan
Principle 8: Stakeholder Rights

Definisi	Definition
Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.	The corporation recognizes the rights of stakeholders as set out in applicable laws or agreements and encourages active cooperation with stakeholders in creating wealth, jobs, and financially sound, sustainable enterprises.
Penerapan di lingkup Perusahaan	**Application within the Company**
Prinsip 8 menjelaskan peran Direksi dan Dewan Komisaris mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam model bisnis korporasi, melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh Direksi.	Principle 8 explains the roles of the Board of Directors and the Board of Commissioners in integrating sustainability aspects into the corporate business model, engaging stakeholders, and ensuring the protection of stakeholders' rights. The Board of Commissioners monitors the integration of all the aforementioned aspects conducted by the Board of Directors.

Komitmen dan Konsistensi Penerapan GCG Secara Berkelanjutan

Perseroan senantiasa mematuhi peraturan dan menjunjung tinggi kebijakan serta nilai-nilai yang terkandung dalam praktik tata kelola Perseroan. Hal ini disebabkan karena Perseroan menyadari bahwa penerapan GCG yang berkelanjutan merupakan kunci kesuksesan dalam mencapai kinerja bisnis yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Langkah implementasi penerapan GCG tersebut dapat dicerminkan upaya Perseroan dalam melakukan komunikasi, sosialisasi, pelatihan, serta memetakan akuntabilitas dan tanggung jawab sesuai perubahan bisnis dan organisasi di lingkup Perusahaan.

Komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan GCG dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) dan Pedoman Perilaku. Panduan/kebijakan terhadap penerapan tata kelola Perusahaan yang baik telah disosialisasikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Untuk menciptakan situasi kondusif, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan diwajibkan untuk menerapkan pedoman perilaku (*Code of Conduct*) dengan menandatangani Pernyataan Kepatuhan secara berkala tahunan.
2. Meninjau dan menyempurnakan pedoman-pedoman GCG. Perseroan menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan tata kelola perusahaan yang baik, dan melaporkan hasil *monitoring*/ evaluasi kepada RUPS dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik menjadi salah satu unsur *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan dan dituangkan ke dalam kontrak manajemen.
3. Melakukan asesmen/evaluasi penerapan GCG secara berkala. Penilaian (*assessment*) penerapan GCG dilakukan secara berkala oleh BPKP Pusat. Selain itu, penilai juga

Commitment and Consistency in the Sustainable Implementation of GCG

The Company consistently adheres to regulations and upholds the policies and values embedded in corporate governance practices. This commitment stems from the Company's understanding that sustainable GCG implementation is key to achieving effective, efficient, and sustainable business performance. The steps for implementing GCG reflect the Company's efforts in communication, dissemination, training, and mapping accountability and responsibilities according to changes in business and organizational scope.

The Company's commitment to implementing GCG is outlined as follows:

1. Creating a Conducive Environment for Implementing the GCG Code and Code of Conduct. The guidelines/policies for good corporate governance have been disseminated to the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees. To create a conducive environment, all members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees are required to adhere to the Code of Conduct by signing an annual Compliance Statement.
2. Reviewing and Refining GCG Guidelines. The Company appoints a member of the Board of Directors to be responsible for the implementation and monitoring of good corporate governance and reports the results of monitoring/evaluation to the General Meeting of Shareholders (GMS) and the Board of Commissioners. Good corporate governance practices are included as one of the Company's Key Performance Indicators (KPIs) and are incorporated into management contracts.
3. Conducting Regular GCG Assessments/Evaluations. GCG assessments are conducted regularly by the Central Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).

melakukan evaluasi pada tahun berikutnya dengan *self assessment* oleh tim internal perseroan.

4. Menerbitkan kebijakan tentang pengendalian gratifikasi. Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi adalah pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi menjadi salah satu perhatian dari Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat sifatnya yang mengarah pada tindak pidana suap. Kebijakan pengendalian gratifikasi bertujuan sebagai pedoman bagi insan Perseroan dalam mengambil sikap yang tegas, pentingnya kepatuhan melaporkan, dan penanganan praktik gratifikasi di Perseroan.
5. Menerbitkan kebijakan tentang sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh insan Perseroan. Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran bertujuan menjadi peringatan dini bagi seluruh insan Perseroan dalam menangani pelaporan pelanggaran, menjamin penyelesaian pelaporan pelanggaran, menghindari publikasi negatif, dan mengungkap permasalahan di Perseroan seperti *fraud*, diskriminasi, pelecehan atau penyimpangan lainnya.
6. Kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK Menerbitkan surat keputusan Direksi tentang penetapan jabatan struktural satu tingkat di bawah direksi yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta memberikan teguran bagi pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN.
7. Sistem Pengendalian Intern berbasis Committee of Sponsoring Organization (COSO) Perseroan berkomitmen untuk membangun suatu sistem pengendalian intern yang efektif agar dapat memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*).
8. Manajemen Risiko Terintegrasi berbasis ISO 31000 Perseroan menerapkan pengelolaan Sistem Manajemen Risiko secara kaskade dan agregasi. Secara kaskade berarti dari atas ke bawah menguraikan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sampai pada organisasi terendah, sedangkan agregasi berarti sebaliknya pengelolaan itu dimulai dari organisasi terendah kemudian dikelompokkan terus sampai organisasi tertinggi.

Additionally, the Company's internal team conducts a self-assessment in the subsequent year.

4. Issuing a Policy on Gratuity Control. In business relations, gratuities are often given and/or requested between parties. Gratuities are a concern in the fight against corruption as they can lead to bribery. The gratuity control policy serves as a guide for the Company's personnel in taking a firm stance, emphasizing the importance of compliance in reporting, and handling gratuity practices within the Company.
5. Issuing a Whistleblowing System Policy. Violations of corporate governance principles, ethical values, and applicable regulations must be avoided by all Company personnel. The whistleblowing system policy serves as an early warning for handling violation reports, ensuring the resolution of violation reports, avoiding negative publicity, and uncovering issues such as fraud, discrimination, harassment, or other irregularities within the Company.
6. Compliance in Reporting Assets of State Officials (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK). Issuing a Board of Directors' Decision Letter regarding the designation of structural positions one level below the directors who submit the LHKPN and reprimanding officials who do not submit the LHKPN.
7. Internal Control System Based on the Committee of Sponsoring Organization (COSO). The Company is committed to building an effective internal control system to provide reasonable assurance.
8. Integrated Risk Management Based on ISO 31000. The Company implements a cascading and aggregation risk management system. Cascading means detailing the authority and responsibility of management from top to bottom, while aggregation means starting management from the lowest organization and grouping it up to the highest organization.

PETA JALAN
ROADMAP

Mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan GCG (wajib dan sukarela) serta implementasi jujur, tulus, dan ikhlas

KPI
- Secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan GCG
- Penyempurnaan instrumen GCG:
  a. *Code of GCG*
  b. *Board of Manual*
  c. *Code of Conduct*
  d. Piagam Sekretaris Perusahaan
  e. *Internal Audit Charter*
  f. WBS
  g. Pedoman *Internal Control*
  h. Piagam Komite Audit
  i. Pengelolaan Keterbukaan
  j. Informasi Publik
  k. Gratifikasi
  l. Piagam Pemantau Risiko
- Target capaian hasil GCG mencapai di atas 85 dengan kualifikasi Sangat Baik

Mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan GCG (wajib dan sukarela) serta implementasi jujur, tulus, dan ikhlas

KPI
- Secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan GCG
- Penyempurnaan instrumen GCG:
  a. *Code of GCG*
  b. *Board of Manual*
  c. *Code of Conduct*
  d. Piagam Sekretaris Perusahaan
  e. *Internal Audit Charter*
  f. WBS
  g. Pedoman *Internal Control*
  h. Piagam Komite Audit
  i. Pengelolaan Keterbukaan
  j. Informasi Publik
  k. Gratifikasi
  l. Piagam Pemantau Risiko
- Target capaian hasil *assessment* GCG mencapai di atas 85 dengan kualifikasi Sangat Baik

2018–2019

Compliance with all provisions and regulations related to GCG (mandatory and voluntary) and honest, sincere, and earnest implementation.

KPI
- Consistently and sustainably improve GCG implementation.
- Refine GCG instruments:
  a. Code of GCG
  b. Board Manual
  c. Code of Conduct
  d. Corporate Secretary Charter
  e. Internal Audit Charter
  f. Whistleblowing System (WBS)
  g. Internal Control Guidelines
  h. Audit Committee Charter
  i. Management of Disclosure
  j. Public Information
  k. Gratuity Control
  l. Risk Monitoring Charter
- Achieve GCG assessment results above 85 with a qualification of Very Good

2020

Compliance with all provisions and regulations related to GCG (mandatory and voluntary) and honest, sincere, and earnest implementation.

KPI
- Consistently and sustainably improve GCG implementation.
- Refine GCG instruments:
  a. Code of GCG
  b. Board Manual
  c. Code of Conduct
  d. Corporate Secretary Charter
  e. Internal Audit Charter
  f. Whistleblowing System (WBS)
  g. Internal Control Guidelines
  h. Audit Committee Charter
  i. Management of Disclosure
  j. Public Information
  k. Gratuity Control
  l. Risk Monitoring Charter
- Achieve GCG assessment results above 85 with a qualification of Very Good.

Mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan GCG (wajib dan sukarela) Serta penyelarasan dan implementasi *core value* AKHLAK

KPI

- Secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan GCG
- Penyempurnaan instrumen GCG:
  a *Code of GCG*
  b. *Board of Manual*
  c. *Code of Conduct*
  d. Piagam Sekretaris Perusahaan
  e. *Internal Audit Charter*
  f. WBS
  g. Pedoman *Internal Control*
  h. Piagam Komite Audit
  i. Pengelolaan Keterbukaan
  j. Informasi Publik
  k. Gratifikasi
  l. Piagam Pemantau Risiko
- Pelaksanaan *assessment* secara berkala selama 3 tahun terakhir, sebagai berikut:
  a. Tahun 2019 = 80,34 (Baik)
  b. Tahun 2020 = 87,77 (Sangat Baik)
- Target capaian hasil *assessment* GCG mencapai di atas 85 dengan kualifikasi "Sangat Baik"

2021

Compliance with all provisions and regulations related to GCG (mandatory and voluntary) and alignment and implementation of the core values of AKHLAK.

KPI

- Consistently and sustainably improve GCG implementation.
- Refine GCG instruments:
  a. Code of GCG
  b. Board Manual
  c. Code of Conduct
  d. Corporate Secretary Charter
  e. Internal Audit Charter
  f. Whistleblowing System (WBS)
  g. Internal Control Guidelines
  h. Audit Committee Charter
  i. Management of Disclosure
  j. Public Information
  k. Gratuity Control
  l. Risk Monitoring Charter
- Conduct regular assessments over the past three years, as follows:
  a. 2019 = 80.34 (Good)
  b. 2020 = 87.77 (Very Good)
- Achieve GCG assessment results above 85 with a qualification of "Very Good".

Mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan GCG (wajib dan sukarela) Serta penyelarasan dan implementasi *core value* AKHLAK

KPI

- Secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan GCG
- Penyempurnaan instrumen GCG:
  a. *Code of GCG*
  b. *Board of Manual*
  c. *Code of Conduct*
  d. Piagam Sekretaris Perusahaan
  e. *Internal Audit Charter*
  f. WBS
  g. Pedoman *Internal Control*
  h. Piagam Komite Audit
  i. Pengelolaan Keterbukaan
  j. Informasi Publik
  k. Gratifikasi
  l. Piagam Pemantau Risiko
- Target capaian hasil *assessment* GCG mencapai di atas 90 dengan kualifikasi "Sangat Baik"

2022

Compliance with all provisions and regulations related to GCG (mandatory and voluntary) and alignment and implementation of the core values of AKHLAK.

KPI

- Consistently and sustainably improve GCG implementation.
- Refine GCG instruments:
  a. Code of GCG
  b. Board Manual
  c. Code of Conduct
  d. Corporate Secretary Charter
  e. Internal Audit Charter
  f. Whistleblowing System (WBS)
  g. Internal Control Guidelines
  h. Audit Committee Charter
  i. Management of Disclosure
  j. Public Information
  k. Gratuity Control
  l. Risk Monitoring Charter
- Achieve GCG assessment results above 90 with a qualification of "Very Good".

2023–2027

Sasaran | Goals

Peningkatan implementasi GCG Perseroan Enhancing the Implementation of Corporate Governance (GCG)	Memenuhi ketentuan dan peraturan dalam tata kelola perusahaan Complying with corporate governance regulations and standards	Pencapaian kinerja terbaik melalui pelaksanaan proses bisnis pada lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan Achieving optimal performance through sustainable business processes in environmental, social, and corporate governance aspects

Strategi | Strategies

Peningkatan *awareness* GCG Increasing GCG awareness	Penguatan infrastruktur penerapan GCG Strengthening GCG implementation infrastructure	*Assessment* pelaksanaan GCG dan tindak lanjut AOI atas hasil *assessment* Assessing GCG implementation and following up on Areas of Improvement (AOI)	Digitalisasi pelaksanaan *assessment* GCG Digitizing the GCG assessment process	Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada setiap proses bisnis Applying GCG principles to every business process

Kebijakan | Policies

Penerapan GCG dalam proses bisnis Perseroan
Implementing GCG in Company business processes

Penggunaan Aplikasi *Assessment* GCG berbasis digital di seluruh Anak Perusahaan
Utilizing digital GCG assessment applications across all subsidiaries

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip: 1. *Transparency* 2. *Accountability* 3. *Responsibility* 4. *Independence* 5. *Fairness*	Adhering to principles of: 1. Transparency 2. Accountability 3. Responsibility 4. Independency 5. Fairness	1. Pemutakhiran infrastruktur GCG Perseroan sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 2. Penggunaan sistem pengendalian dan pencegahan *fraud* melalui SMAP 37001 dan pengaduan melalui *Whistle Blowing System* (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 1. Updating the Company's GCG infrastructure according to applicable laws and regulations 2. Utilizing control systems and fraud prevention through SMAP 37001 and reporting via the Whistle Blowing System (WBS) and Gratification Control Unit (UPG)	1. Pelaksanaan *assessment* GCG baik secara *self* assessment dan dengan asesor eksternal 2. Tindak lanjut hasil AOI dengan melengkapi *evidence* 3. Evaluasi program kerja tahunan GCG 1. Conducting GCG assessments both through self-assessment and external assessors 2. Following up AOI results by providing evidence 3. Evaluating the annual GCG work program

Program Kerja | Work Programs

1. Sosialisasi penerapan GCG dengan mengundang narasumber eksternal (BPKP, BPK, LKPP, dll) 2. Kegiatan kampanye melalui spanduk dan media elektronik terkait anti suap dan pelaporan WBS 3. Pelatihan dan Seminar untuk asesor internal terkait implementasi GCG 4. *Review* pedoman pelaksanaan GCG 5. Internalisasi Pedoman GCG kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan yang baru diangkat	1. Socializing GCG implementation by inviting external speakers (BPKP, BPK, LKPP, etc.) 2. Campaign activities via banners and electronic media related to anti-bribery and WBS reporting. 3. Training and seminars for internal assessors on GCG implementation 4. Reviewing GCG implementation guidelines 5. Internalizing GCG guidelines for newly appointed Board of Commissioners, Board of Directors, and employees
1. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap infrastruktur GCG Perseroan 2. *Monitoring* dan evaluasi implementasi SMAP 37001 3. Pelaksanaan dan Perbaikan *WBS* secara berkelanjutan	1. Conducting regular evaluations of the Company's GCG infrastructure 2. Monitoring and evaluating the implementation of SMAP 37001 3. Continuously improving the Whistleblowing System (WBS)
1. Pencapaian hasil *assessment* GCG dengan predikat minimal "Baik" 2. Tindak lanjut AOI minimal 60% 3. Realisasi program kerja GCG tercapai 100%	1. Achieving a minimum "Good" rating in GCG assessments 2. Ensuring at least 60% follow-up on AOI results 3. Fully realizing the GCG work program
1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan *assessment* GCG berbasis digital 2. Pemutakhiran aplikasi *assessment* GCG dengan pihak eksternal	1. Monitoring and evaluating the digital GCG assessment implementation 2. Updating the digital GCG assessment application with external parties
1. Peningkatan kinerja dengan praktik terbaik (*best practice*) 2. *Zero bad practice governance* 3. Peningkatan ESG *Rating* 4. Sertifikasi setiap proses bisnis	1. Improving performance with best practices 2. Ensuring zero bad governance practices 3. Enhancing ESG rating 4. Certifying each business process

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ASSESSMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Dasar dan Kriteria Penilaian

Secara berkala, Perseroan selalu mengadakan penilaian (*assessment*) dan evaluasi (*review*) yang dilakukan sendiri (*self-assessment*) setiap 2 (dua) tahun. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengukur penerapan GCG serta untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perseroan yang dilakukan tahun berikutnya. Bobot Indikator dan parameter penilaian yang digunakan Perseroan mengacu pada pada Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Aspek pengujian dan bobot yang diterapkan oleh Perseroan dapat diuraikan sebagai berikut:

Assessment Basis and Criteria

The Company regularly conducts assessments and reviews, performed biennially through self-assessment. This is aimed at measuring GCG implementation and detailing follow-up actions for subsequent implementation. The indicators and parameters used for assessments are based on the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, on Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The testing aspects and weights applied by the Company are as follows:

Aspek Pengujian | Testing Aspect		**Bobot/** Weight
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan	Commitment to Sustainable Governance Implementation	7,00
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00
Direksi	Board of Directors	35,00
Pengungkapan Informasi dan Transparansi	Information Disclosure and Transparency	9,00
Aspek Lainnya	Other Aspects	6,00
Skor Keseluruhan	Overall Score	100,00

Asesmen Penerapan GCG Tahun Buku 2023

Perseroan terakhir melaksanakan assessment penerapan GCG pada tahun 2023 untuk tahun buku 2022. Pada pelaksanaan *assessment* GCG yang dilakukan di tahun 2023, Perseroan menunjukan hasil dengan predikat "**Sangat Baik**" dengan capaian skor sebesar 90,90%. Rincian penerapan *asssement* ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

GCG Implementation Assessment for Fiscal Year 2023

The Company last conducted a GCG implementation assessment in 2023 for the fiscal year 2022. The assessment resulted in a **"Very Good"** rating with a score of 90.90%. The details of this assessment are as follows:

Jenis Penilaian Assessment Type	**Penilai** Assessors/Evaluators	**Periode Penerapan** Implementation Period	**Tahun Buku** Fiscal Year	**Tempat** Location	**Waktu Pengukuran** Assessment Period
Self Assessment Self Assessment	• Isna Hidayah • David Sihombing • Irvin Fauzan Lubis • Andri Putra Panjaitan • Hadyopie P A Siregar • Sony Abimanyu Tarigan	1 Januari-31 Desember 2022 January 1 - December 31, 2022	2022	Kantor *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Holding Office of Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)	1 Maret-15 April 2023 March 1 - April 15, 2023

Rincian hasil *assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

The detailed results of the GCG implementation assessment for the fiscal year 2022 are as follows:

Aspek Pengujian Testing Aspect	Bobot Weight	Pencapaian Tahun Buku 2022 Achievements for the 2022 Financial Year		
		Nilai Score	Pencapaian Achievement (%)	Predikat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Rating
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance (GCG)	7,00	6,62	94,56	Sangat baik Very Good
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,24	91,59	Sangat baik Very Good
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	32,30	92,28	Sangat baik Very Good
Direksi Board of Directors	35,00	32,23	92,08	Sangat baik Very Good
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	7,75	86,26	Sangat baik Very Good
Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	3,75	75,00	Sangat baik Very Good
Skor Keseluruhan Overall Score	100,00	90,90	90,90	Sangat baik Very Good
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Rating			**SANGAT BAIK** VERY GOOD	

Keterangan: / Remarks:
0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
0-50 : Very Poor | 50-60 : Poor | 60-75 : Fair | 75-85 : Good | 85-100 : Very Good

Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Mengacu pada Undang-Undang No. 47 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Terdapat 3 (tiga) struktur organ utama GCG Perseroan yang memiliki peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Selain itu juga, dalam struktur ini, Perseroan juga memiliki organ-organ yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan GCG, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

Masing-masing organ Perseroan menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara independen untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan lain yang berlaku.

Structure of Good Corporate Governance

Referring to Law No. 47 of 2007 concerning Limited Liability Companies, there are three main governance structures in the Company that play a key role in the successful implementation of GCG, the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. Additionally, within this structure, the Company also has bodies that assist the Board of Commissioners and the Board of Directors in implementing GCG, namely the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, the Secretary to the Board of Commissioners, the Corporate Secretary, and the Internal Audit Unit (SPI).

Each corporate body performs its duties, functions, and responsibilities independently for the benefit of the Company in accordance with applicable laws, the Company's Articles of Association, and other prevailing regulations.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. RUPS juga menjadi wadah bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam di Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus selaras dengan kepentingan jangka panjang dan jangka pendek Perseroan. Meskipun demikian, RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi. Namun, wewenang RUPS untuk melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan tetap utuh, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a GCG organ with authorities not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits set by law and/or the Company's Articles of Association. The GMS serves as a forum for shareholders to make important decisions regarding the capital invested in the Company, adhering to the provisions of the Articles of Association and prevailing regulations.

Decisions made at the GMS must align with the Company's long-term and short-term interests. However, the GMS and/or shareholders do not have the right to interfere with the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Nevertheless, the GMS retains its authority to exercise its rights in accordance with the Articles of Association and prevailing regulations, including the authority to replace or dismiss members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.

Pemegang Saham

Sebagai pemilik modal, Pemegang Saham baik pemegang saham utama, pengendali, maupun Pemegang Saham pendiri memiliki hak dan tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Hingga akhir tahun 2023, Seluruh saham yang terdapat dalam PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia.

Shareholders

As capital owners, shareholders, whether main, controlling, or founding shareholders, have rights and responsibilities in accordance with laws and the Company's Articles of Association. As of the end of 2023, all shares in PT Perkebunan Nusantara III (Persero) are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2023
Composition of the Company's Shareholders as of December 31, 2023



Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/ Pengendali

Sebagai perusahaan yang berstatus milik Negara, maka seluruh modal yang dimiliki oleh Perseroan ialah berbentuk saham yang berasal dari penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Dengan begitu, maka seluruh saham yang terdapat di Perseroan merupakan milik Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana Negara Republik Indonesia menjadi entitas induk akhir.

Information on Major/Controlling Shareholders

As a state-owned company, all capital owned by the Company is in the form of shares derived from the state capital participation of the Republic of Indonesia. Therefore, all shares in the Company are owned by the Republic of Indonesia, represented by the Government of Indonesia/ Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), with the Republic of Indonesia being the ultimate parent entity.

Kewenangan RUPS

1. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk Laporan Keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
4. Memberikan persetujuan terhadap hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Authority of the GMS

1. Appointing and dismissing the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. Approving the Annual Report, including ratifying the Financial Statements, granting full discharge and release to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the previous fiscal year, provided that such actions are reflected in the annual report, including the Financial Statements and in accordance with prevailing regulations;
3. Approving the Company's Work Plan and Budget;
4. Approving other matters requiring GMS approval for the benefit of the Company not included in the draft Work Plan and Budget.

Jenis-Jenis RUPS di Perusahaan

Berdasarkan Undang Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat dua jenis agenda RUPS yang dilaksanakan oleh Perseroan, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. Kedua RUPS tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diadakan setiap tahun, meliputi:

1. RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan RUPS tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:
   a. Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris;
   b. Usulan penggunaan laba bersih Perseroan;
   c. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan. Perseroan menyampaikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat kepada

Types of GMS in the Company

According to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, there are two types of GMS agendas conducted by the Company: the Annual GMS and other GMS. These can be described as follows:

Annual GMS

The Annual GMS is held every year and includes the following:

1. GMS for Approval of the Annual Report: The annual GMS to approve the annual report is held no later than June following the end of the fiscal year. In this meeting, the Board of Directors presents:
   a. The Annual Report signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
   b. Proposals for the use of the Company's net profit;
   c. Other matters requiring GMS approval for the benefit of the Company. The Company provides complete explanations and accurate information to shareholders

Pemegang Saham berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS yang meliputi metode perhitungan dan rincian penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

2. RUPS untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RUPS tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:
   a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan;
   b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perusahaan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, Dewan Komisaris dapat mengusulkan keputusan tertentu, asalkan usul tersebut telah disetujui oleh Direksi sebelum tanggal pemanggilan RUPS tahunan.

RUPS Lainnya (RUPS Luar Biasa)

Pelaksanaan agenda RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan setiap waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan Perseroan. Berikut merupakan uraian tata cara penyelenggaraan RUPS.

Tata Cara Penyelenggaran RUPS

1. RUPS diselenggarakan pada tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. RUPS dapat diadakan di manapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
4. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:
   a. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
   b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

regarding the GMS, including the method of calculating and determining the salaries/honoraria, facilities, and/or other benefits for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors currently in office.

2. GMS for Approval of the Company's Work Plan and Budget: The annual GMS to approve the Company's Work Plan and Budget is held no later than 30 days after the start of the fiscal year (the budget year of the Company's Work Plan and Budget concerned). In this meeting, the Board of Directors presents:
   a. The Work Plan and Budget, including Financial Report Projections;
   b. Other matters requiring GMS approval for the benefit of the Company are not included in the Work Plan draft.

During the Annual GMS, the Board of Commissioners may propose certain decisions, provided that the proposal has been approved by the Board of Directors before the date of the GMS notice.

Other GMS (Extraordinary GMS)

An Extraordinary GMS can be held at any time based on the needs and interests of the Company. The procedures for conducting a GMS are as follows:

Procedures for Conducting a GMS

1. The GMS is held at the Company's domicile or at the main place of business within the territory of the Republic of Indonesia.
2. The GMS can be held anywhere within the territory of the Republic of Indonesia.
3. The GMS as mentioned in point 2 can make decisions if those decisions are approved unanimously.
4. The Board of Directors organizes the Annual and Extraordinary GMS with a GMS notice issued no later than 15 (fifteen) days from the date the request for the GMS is received.
5. If the Board of Directors does not issue a GMS notice:
   a. The shareholders' request for a GMS is re-submitted to the Board of Commissioners; or
   b. The Board of Commissioners issues the GMS notice. The Board of Commissioners must issue the GMS notice no later than 15 days from the date the request for the GMS is received.

6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat pula dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris.
7. Permintaan sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya yang disampaikan oleh Pemegang Saham, tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
8. Alasan sebagaimana dimaksud pada angka 6 antara lain namun tidak terbatas pada:
   a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris akan berakhir; atau
   c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.
9. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
10. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
11. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat yang didokumentasikan.
12. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
13. Perseroan wajib memberikan salinan bahan rapat kepada Pemegang saham.

6. The GMS as mentioned in point 4 can also be held at the request of the Board of Commissioners.
7. The request mentioned in point 5 (a) is submitted to the Board of Directors by registered letter with reasons provided by the shareholders, with a copy sent to the Board of Commissioners.
8. The reasons mentioned in point 6 include but are not limited to:
   a. The Board of Directors does not hold the Annual GMS as per the applicable regulations;
   b. The term of office of the Board of Directors and/or Commissioners is about to expire; or
   c. The Board of Directors is unable to perform their duties or there is a conflict of interest between the Board of Directors and the Company.
9. The GMS organized by the Board of Directors based on a GMS notice only addresses matters related to other necessary agenda items deemed necessary by the Board of Directors.
10. The GMS notice is issued no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS, excluding the date of the notice and the date of the GMS.
11. The GMS notice is documented and sent by letter.
12. The GMS notice includes the date, time, place, and agenda of the meeting, including the proposals planned by the Board of Directors to be presented at the GMS, along with a notice that the materials to be discussed at the GMS are available at the Company's office from the date of the GMS notice until the date of the GMS.
13. The Company must provide copies of the meeting materials to the shareholders.

Pimpinan dan Risalah RUPS

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir;
2. Risalah RUPS dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;
3. Risalah RUPS berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion, jika ada).

Chairmanship and Minutes of the GMS

1. The GMS is chaired by one of the shareholders elected by and from among those present;
2. The minutes of the GMS are prepared and signed by the Chairman of the Meeting and at least one shareholder appointed from and by the GMS participants;
3. The minutes of the GMS include matters discussed and decisions made (including dissenting opinions, if any).

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2023

Keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh manajemen Perseroan. Hal tersebut karena RUPS merupakan

Conduct of the GMS in 2023

Decisions made in the General Meeting of Shareholders (GMS) are mandates that must be implemented by the Company's management. This is because the GMS is the

forum tertinggi yang bertugas mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pemegang saham atau pemilik modal. Jika keputusan RUPS tidak dilaksanakan, maka ini akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban manajemen terhadap pemegang saham dalam mengelola Perseroan.

Pada tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
1. RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 pada tanggal 27 Januari 2023.
2. RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 30 Mei 2023.

Hasil Keputusan RUPS tahun 2023 dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perseroan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

highest forum tasked with making decisions related to the interests of shareholders or capital owners. If GMS decisions are not implemented, it becomes part of the management's accountability to the shareholders in managing the Company.

In 2023, the Company held a total of 2 (two) GMS meetings, as detailed below:
1. GMS for the 2023 Work Plan and Budget on January 27, 2023.
2. GMS for the 2022 Annual Report on May 30, 2023.

The decisions made in the GMS of 2023 and their follow-ups by the Company's management until the end of 2023 are as follows:

RUPS Sepanjang Tahun 2023

GMS Throughout 2023

RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 tanggal 27 Januari 2023
GMS for the 2023 Work Plan and Budget on January 27, 2023

Tanggal Date	Lokasi Location	Waktu Time	Dewan Komisaris yang Hadir Board of Commissioners in Attendance	Direksi yang Hadir Board of Directors in Attendance
27 Januari 2023	Lantai 21, Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, RT 011/RW 002, Gambir, Jakarta Pusat	09.26 Waktu Indonesia Barat (WIB)	• Zulkifli Zaini - Komisaris Utama, merangkap Komisaris Independen • Arie Yuriwin - Komisaris • Ardan Adiperdana - Komisaris • Asep Subarkah Yusuf - Komisaris • Alhilal Hamdi - Komisaris • Erwan Pelawi - Komisaris Independen • Amal Bakti Pulungan - Komisaris Independen • Wisto Prihadi - Komisaris Independen	• Mohammad Abdul Ghani - Direktur Utama • Denaldy Mulino Mauna - Wakil Direktur Utama • Ahmad Haslan Saragih - Direktur Pelaksana • M. Iswahyudi - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko • Seger Budiarjo - Direktur SDM • Dwi Sutoro - Direktur Pemasaran • Mahmudi - Direktur Produksi dan Pengembangan • Doni P. Gandamihardja - Direktur Umum
January 27, 2023	21st Floor, Ministry of State-Owned Enterprises Building, 13 Medan Merdeka Selatan Street, Neighborhood Unit 011/ Community Unit 002, Gambir, Central Jakarta	09:26 AM Western Indonesian Time (WIB)	• Zulkifli Zaini - President Commissioner, concurrently Independent Commissioner • Arie Yuriwin - Commissioner • Ardan Adiperdana - Commissioner • Asep Subarkah Yusuf - Commissioner • Alhilal Hamdi - Commissioner • Erwan Pelawi - Independent Commissioner • Amal Bakti Pulungan - Independent Commissioner • Wisto Prihadi - Independent Commissioner	• Mohammad Abdul Ghani - President Director • Denaldy Mulino Mauna - Vice President Director • Ahmad Haslan Saragih - Managing Director • M. Iswahyudi - Finance and Risk Management Director • Seger Budiarjo - Human Resources Director • Dwi Sutoro - Marketing Director • Mahmudi - Production and Development Director • Doni P. Gandamihardja - General Affairs Director

Hasil Keputusan Decision Results	Sudah/Belum Terlaksana Already/Not Yet Implemented
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Approval of the 2023 Work Plan and Budget (RKAP) and the 2023 Social and Environmental Responsibility Program Budget (RKA CSR).	Sudah Terlaksana Implemented
Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Establishment of the 2023 Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors as outlined in the 2023 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders.	Sudah Terlaksana Implemented
Penetapan *Key Performance* Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Establishment of the 2023 Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners as outlined in the 2023 Management Contract between the Board of Commissioners and the Shareholders.	Sudah Terlaksana Implemented
Persetujuan Indikator Aspek Operasional Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Approval of the 2023 Operational Aspect Indicators for the Health Level Measurement of 2023.	Sudah Terlaksana Implemented
Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari masing-masing item investasi. Delegation of authority to the Board of Commissioners to approve changes in investment budget allocations with a maximum value of 10% per investment item.	Sudah Terlaksana Implemented

RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 30 Mei 2023
GMS Annual Report for Financial Year 2022 on May 30, 2023

Tanggal Date	Lokasi Location	Waktu Time	Dewan Komisaris yang Hadir Board of Commissioners in Attendance	Direksi yang Hadir Board of Directors in Attendance
30 Mei 2023 May 30, 2023	Lantai 8, Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, RT 011/RW 002, Gambir, Jakarta Pusat 8th Floor, Ministry of State-Owned Enterprises Building, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, RT 011/RW 002, Gambir, Central Jakarta	14.09 Waktu Indonesia Barat (WIB) 14.09 Western Indonesian Time (WIB)	1. Zulkifli Zaini - Komisaris Utama, merangkap Komisaris Independen 2. Amal Bakti Pulungan - Komisaris Independen 3. Wisto Prihadi - Komisaris Independen 4. Alhilal Hamdi - Komisaris 5. Asep Subarkah Yusuf - Komisaris 6. Ardan Adiperdana - Komisaris 1. Zulkifli Zaini - President Commissioner, concurrently Independent Commissioner 2. Amal Bakti Pulungan - Independent Commissioner 3. Wisto Prihadi - Independent Commissioner 4. Alhilal Hamdi - Commissioner 5. Asep Subarkah Yusuf - Commissioner 6. Ardan Adiperdana - Commissioner	1. Mohammad Abdul Ghani - Direktur Utama 2. Denaldy Mulino Mauna - Wakil Direktur Utama 3. M. Iswahyudi - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko 4. Mahmudi - Direktur Produksi dan Pengembangan 5. Dwi Sutoro - Direktur Pemasaran 6. Doni P. Gandamihardja - Direktur Umum 7. Seger Budiarjo - Direktur SDM 8. M. Arifin Firdaus - Direktur Hubungan Kelembagaan 1. Mohammad Abdul Ghani - President Director 2. Denaldy Mulino Mauna - Vice President Director 3. M. Iswahyudi - Director of Finance and Risk Management 4. Mahmudi - Director of Production and Development 5. Dwi Sutoro - Director of Marketing 6. Doni P. Gandamihardja - Director of General Affairs 7. Seger Budiarjo - Director of Human Resources 8. M. Arifin Firdaus - Director of Institutional Relations

Hasil Keputusan Resolution		Sudah/Belum Terlaksana Already/Not Yet Implemented
Agenda 1		
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai Laporan Nomor 00251/2.1032/AU.1/01/1609-4/1/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material". 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan perseroan.	1. To approve the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the Fiscal Year 2022 and the Report on the Implementation of Social and Environmental Responsibility for the Fiscal Year 2022, as well as to ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2022, which ended on December 31, 2022, audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, according to Report Number 00251/2.1032/AU.1/01/1609-4/1/III/2023 dated March 15, 2023, with an opinion of "fair in all material respects." 2. To grant full discharge and release (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management actions of the Company and the Board of Commissioners for the supervisory actions of the Company carried out during the fiscal year ending on December 31, 2022, as long as these actions do not constitute a criminal offense and are reflected in the Company's reports.	Sudah Terlaksana Implemented
Agenda 2		
1. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00910/2.1032/AU.2/01/1609-4/1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material." 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.	1. To ratify the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the Fiscal Year 2022, which ended on December 31, 2022, as part of the Social and Environmental Responsibility Report, audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, according to Report Number 00910/2.1032/AU.2/01/1609-4/1/IV/2023 dated April 18, 2023, with an opinion of "fair in all material respects." 2. To grant full discharge and release (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management actions of the Company and the Board of Commissioners for the supervisory actions of the Company on the Micro and Small Business Funding Program carried out during the Fiscal Year 2022, as long as these actions do not constitute a	Sudah Terlaksana Implemented
Agenda 3		
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 seluruhnya sebagai Cadangan Perseroan.	To allocate the entire net profit of the Company for the Fiscal Year 2022 as	Sudah Terlaksana Implemented
Agenda 4		
Penetapan tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta Gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun Buku 2023 akan ditetapkan secara tersendiri.	The determination of bonuses (tantiem) for the Fiscal Year 2022, as well as salaries for the Board of Directors and honorariums for the Board of Commissioners, along with facilities and other allowances for the Fiscal Year 2023, will be decided separately.	Sudah Terlaksana Implemented

Hasil Keputusan Resolution		Sudah/Belum Terlaksana Already/Not Yet Implemented
Agenda 5		
1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal, Evaluasi Kinerja Perseroan (Tingkat Kesehatan), dan *Key Performance Indicator* (KPI) serta jasa atestasi/ non atestasi lainnya untuk periode Tahun Buku 2023. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik Tersebut. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal, Evaluasi Kinerja Perseroan (Tingkat Kesehatan), dan *Key Performance Indicator* (KPI) serta jasa atestasi/non atestasi lainnya untuk periode Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti berikut.	1. Reappointing the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja as the Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements, Financial Statements of Micro and Small Business Funding Programs, Compliance with Laws and Regulations, Internal Controls, Company Performance Evaluation (Health Level), and Key Performance Indicators (KPIs), as well as other attestation/non-attestation services for the Fiscal Year 2023. 2. Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the reasonable amount of audit service fees and other requirements for the said Public Accounting Firm. 3. Authorizing the Board of Commissioners of the Company to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that Purwantono, Sungkoro, and Surja, for any reason, are unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of Micro and Small Business Funding Programs for the Fiscal Year 2023, Compliance with Laws and Regulations, Internal Controls, Company Performance Evaluation (Health Level), and Key Performance Indicators (KPIs), including determining the reasonable audit service fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.	Sudah Terlaksana Implemented
Agenda 6		
1. Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN tahun 2015 untuk periode Tahun Buku 2022. 2. Direksi meminta agar mengoptimalkan penyerapan dana PMN disesuaikan dengan rencana realokasi dana PMN dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Memastikan penyelesaian sengketa Anak Perusahaan dengan kontraktor; b. Memastikan penyelesaian Kajian realokasi dana PMN yang komprehensif yang disusun oleh anak perusahaan beserta pemenuhan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, c. Memastikan percepatan koordinasi yang dilakukan oleh anak perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait; d. Memastikan komitmen terhadap pencapaian penyerapan dana PMN di Anak Perusahaan; e. Memastikan penyerapan dana dan realisasi fisik sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	1. Reviewing the Report on the Utilization of Additional State Capital Injection Funds (PMN) derived from the State Budget for the year 2015 for the Fiscal Year 2022. 2. The Board requests optimizing the absorption of PMN funds in line with the planned reallocation of PMN funds, through the following actions: a. Ensuring resolution of disputes between Subsidiaries and contractors; b. Ensuring completion of a comprehensive study on the reallocation of PMN funds prepared by the Subsidiaries, along with the fulfillment of required documentation; c. Accelerating coordination efforts between Subsidiaries and relevant parties; d. Committing to achieving the absorption of PMN funds in Subsidiaries; e. Ensuring fund absorption and physical realization align with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and applicable laws and regulations.	Sudah Terlaksana Implemented

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2022 dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen

Selama tahun 2022, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Laporan Keuangan tahun 2021 pada tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil Keputusan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Decisions from the 2022 GMS and Their Follow-Up by Management

During 2022, the Company held a GMS for the 2021 Financial Report on June 28, 2022, with the following decisions:

Hasil Keputusan Decision Results	**Sudah/Belum Terlaksana** Already/Not Yet Implemented
Hasil keputusan agenda 1 Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2022 (dua ribu dua Puluh dua) **Decision for Agenda 1** Approval of the 2022 Work Plan and Budget (RKAP) and the 2022 Social and Environmental Responsibility Program Budget (RKA CSR)	Terlaksana Implemented
Hasil keputusan agenda 2 Menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2022 (dua ribu dua Puluh dua) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham **Decision for Agenda 2** Establishment of the 2022 Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors as outlined in the 2022 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders	Terlaksana Implemented
Hasil keputusan agenda 3 Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang tertuang dalam kontrak Manajemen Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham **Decision for Agenda 3** Establishment of the 2022 Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners as outlined in the 2022 Management Contract between the Board of Commissioners and the Shareholders	Terlaksana Implemented
Hasil keputusan agenda 4 Menyetujui Indikator aspek operasional tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) untuk menghitung tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 04-06-2002 (empat juni dua ribu dua) **Decision for Agenda 4** Approval of the 2022 Operational Aspect Indicators to calculate the company's health level based on the Decree of the Minister of SOEs No: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002	Terlaksana Implemented
Hasil keputusan agenda 5 Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi **Decision for Agenda 5** Approval for the delegation of authority to the Board of Commissioners to approve actions resulting in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% per investment program, provided it does not change the total investment value	Terlaksana Implemented

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Keberadaan Dewan Komisaris tersebut, terutama mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantauan Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi & Remunerasi.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris melibatkan serangkaian aktivitas, seperti rapat dengan Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham, memberikan masukan dalam permohonan rekomendasi atas tindakan Perseroan, kunjungan ke unit kebun, dan memberikan tugas khusus terkait pengawasan kepada Komite Dewan Komisaris.

Selanjutnya, setiap Komite dalam struktur Dewan Komisaris memiliki peran dan fungsi yang spesifik. Komite Audit, misalnya, bertugas membantu dalam mengevaluasi berbagai aspek kinerja korporasi. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam merancang kebijakan terkait manajemen risiko Perseroan dan menilai efektivitas pelaksanaan prosedur manajemen risiko. Sementara Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas mengawasi dan memberikan saran terkait kebijakan Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

The Board of Commissioners is an organ of the Company responsible for collectively supervising and advising the Board of Directors, ensuring that the Company implements Good Corporate Governance (GCG) at all levels of the organization. The existence of the Board of Commissioners is primarily based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. In performing its duties, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs such as the Audit Committee, the Risk Management Monitoring Committee, and the Nomination & Remuneration Committee.

The execution of the Board of Commissioners' duties involves a series of activities, including meetings with the Board of Directors or General Meetings of Shareholders, providing input on requests for recommendations on Company actions, visits to plantation units, and assigning special supervisory tasks to the Board Committees.

Each Committee within the Board of Commissioners structure has specific roles and functions. For instance, the Audit Committee assists in evaluating various aspects of corporate performance. The Risk Monitoring Committee is responsible for aiding the Board of Commissioners in designing policies related to the Company's risk management and assessing the effectiveness of risk management procedures. Meanwhile, the Nomination and Remuneration Committee oversees and provides advice on the Company's nomination and remuneration policies.

Kriteria dan Prosedur Pengangkatan Serta Pemberhentian Dewan Komisaris

Menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-10/MBU/10/2020.

Setiap individu yang dipilih sebagai anggota Dewan Komisaris melalui RUPS harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini mencakup keahlian teknis dalam bidang perkebunan, kemampuan

Criteria and Procedure for Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

According to the provisions in the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders (GMS) has the authority to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners, considering the regulations stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, as amended by Regulation No. PER-10/MBU/10/2020.

Each individual selected as a member of the Board of Commissioners through the GMS must possess relevant competencies and skills to perform their duties. This includes technical expertise in the plantation sector, strategic

strategis, pengalaman manajerial yang memadai, pengetahuan bisnis agroindustri, pemahaman akan regulasi terkait, serta keahlian dalam manajemen dan pengendalian risiko.

Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Pengangkatan harus memenuhi sejumlah kriteria formal, materiil, dan persyaratan lainnya. Dari segi materiil, penunjukan Dewan Komisaris didasarkan pada pertimbangan integritas, dedikasi, pemahaman yang mendalam tentang masalah manajemen Perseroan, memiliki pengetahuan yang relevan dalam industri Perseroan, serta ketersediaan waktu yang memadai untuk mengeksekusi tugasnya. Dalam hal formalitas, individu yang dipilih sebagai anggota Dewan Komisaris harus memiliki kapasitas hukum yang memadai, dengan pengecualian jika dalam 5 lima tahun terakhir pernah:

1. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Ketentuan-ketentuan tersebut selanjutnya perlu dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan Perseroan.

Komposisi dan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Tahun 2023

Pada tahun 2023, terdapat perubahan mengenai komposisi dan pergantian susunan keanggotaan Dewan Komisaris dengan rincian kronologis sebagai berikut.

Hingga akhir tahun 2022 susunan komposisi Dewan Komisaris terdiri atas 7 (tujuh) orang dengan satu orang sebagai ketua.

abilities, adequate managerial experience, knowledge of the agribusiness sector, understanding of relevant regulations, and skills in risk management and control.

Appointment and Term of Office of the Board of Commissioners

Appointments must meet several formal, material, and other requirements. Materially, the appointment of the Board of Commissioners is based on considerations of integrity, dedication, a deep understanding of the Company's management issues, relevant industry knowledge, and sufficient time availability to execute their duties. Formally, individuals selected as members of the Board of Commissioners must have adequate legal capacity, with exceptions if, in the last five years, they have:

1. Been declared bankrupt by a court;
2. Served as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt; or
3. Been convicted of a criminal offense that harmed state finances and/or was related to the financial sector.

These conditions must be evidenced by a declaration signed by the prospective member of the Board of Commissioners, which is then kept by the Company.

Composition and Structure of the Board of Commissioners in 2023

In 2023, there were changes regarding the composition and structure of the Board of Commissioners as detailed below:

As of the end of 2022, the composition of the Board of Commissioners consisted of seven members, with one serving as the head:

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2022
Composition and Structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Term
Zulkifli Zaini	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-398/ MBU/12/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-398/ MBU/12/2021	10 Desember 2021 - 10 Desember 2026 December 10, 2021 - December 10, 2026
Erwan Pelawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-56/ MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-56/ MBU/02/2020	26 Februari 2020 - 26 Februari 2025 February 26, 2020 - February 26, 2025
Amal Bakti Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-56/ MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-56/ MBU/02/2020	26 Februari 2020 - 26 Februari 2025 February 26, 2020 - February 26, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Description
Asep Subarkah Yusuf	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-56/ MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-56/ MBU/02/2020	26 Februari 2020 - 26 Februari 2025 February 26, 2020 - February 26, 2025
Arie Yuriwin	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-230/ MBU/10/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-230/ MBU/10/2019	19 Maret 2018 - 19 Maret 2023 March 19, 2018 - March 19, 2023
Wisto Prihadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-282/ MBU/08/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-282/ MBU/08/2021	25 Agustus 2021 - 25 Agustus 2026 August 25, 2021 - August 25, 2026
Ardan Adiperdana	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-86/MBU/03/2022 Minister of SOEs Decree No. SK-86/ MBU/03/2022	25 Maret 2022 - 25 Maret 2027 March 25, 2022 - March 25, 2027

Kemudian, di tahun 2023, terdapat perubahan susunan komposisi Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

In 2023, there were changes in the composition of the Board of Commissioners as detailed below:

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023
Composition and Structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Term
Zulkifli Zaini	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-398/ MBU/12/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-398/ MBU/12/2021	10 Desember 2021 - 10 Desember 2026 December 10, 2021 - December 10, 2026
Asep Subarkah Yusuf	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-56/ MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-56/ MBU/02/2020	26 Februari 2020 - 26 Februari 2025 February 26, 2020 - February 26, 2025
Wisto Prihadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-282/ MBU/08/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-282/ MBU/08/2021	25 Agustus 2021 - 25 Agustus 2026 August 25, 2021 - August 25, 2026
Ardan Adiperdana	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-86/MBU/03/2022 Minister of SOEs Decree No. SK-86/ MBU/03/2022	25 Maret 2022 - 25 Maret 2027 March 25, 2022 to March 25, 2027
Alhilal Hamdi	Komisaris Commissioner	SK Menteri BUMN No. SK-3/MBU/01/2023 Minister of SOEs Decree No. SK-3/ MBU/01/2023	4 Januari 2023 - 4 Januari 2028 January 4, 2023 - January 4, 2028
Suyus Windayana	Komisaris Commissioner	SK-394/MBU/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023 SK-394/MBU/12/2023 Dated December 19, 2023	19 Desember 2023 - 19 Desember 2028 December 19, 2023 - December 19, 2028
Tsamara Amany Alatas	Komisaris Commissioner	SK-394/MBU/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023 SK-394/MBU/12/2023 Dated December 19, 2023	19 Desember 2023 - 19 Desember 2028 December 19, 2023 - December 19, 2028

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat hingga akhir tahun 2023 telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Pemegang Saham. Tujuan dari uji tersebut adalah untuk memastikan bahwa setiap calon anggota Dewan Komisaris memiliki integritas yang tinggi, kompetensi yang sesuai, reputasi yang baik, serta bebas dari afiliasi atau potensi benturan kepentingan. Selain itu, mereka juga harus memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik.

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The members of the Company's Board of Commissioners appointed until the end of 2023 have undergone a fit and proper test conducted by the Shareholders. The purpose of this test is to ensure that each candidate member of the Board of Commissioners possesses high integrity, relevant competencies, good reputation, and is free from affiliations or potential conflicts of interest. Additionally, they must also have relevant experience and skills to effectively carry out their duties and functions.

The profiles of all Board of Commissioners' members can be found in the Company Profile section of this Annual Report.

Board Manual Atau Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Perseroan memiliki *Board Manual* yang berfungsi dalam mengatur tata tertib kerja dan hubungannya dengan Direksi. *Board Manual* yang dimiliki oleh Perseroan selalu di*review* dan dilakukan pembaruan. Berikut merupakan rincian mengenai isi *Board Manual* Perseroan:

1. Kebijakan;
2. Persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, komposisi, keanggotaan, dan masa jabatan Dewan Komisaris;
3. Program pengenalan Dewan Komisaris;
4. Tanggung jawab Dewan Komisaris;
5. Etika dan jabatan Dewan Komisaris;
6. Susunan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris;
7. Hak Dewan Komisaris;
8. Rapat Dewan Komisaris;
9. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris;
10. Fungsi pendukung.

Board Manual of the Board of Commissioners

The Company has a Board Manual that functions to regulate the rules of procedure and its relationship with the Board of Directors. The Company's Board Manual is regularly reviewed and updated. The following are details regarding the content of the Company's Board Manual:

1. Policies;
2. Requirements, appointment, dismissal, composition, membership, and term of office of the Board of Commissioners;
3. Board of Commissioners' orientation program;
4. Board of Commissioners' responsibilities;
5. Ethics and duties of the Board of Commissioners;
6. Structure, duties, and authorities of the Board of Commissioners;
7. Rights of the Board of Commissioners;
8. Board of Commissioners' meetings;
9. Evaluation of the Board of Commissioners' performance;
10. Supporting functions.

Tanggung jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi;
2. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
4. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Responsibilities of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners is responsible and authorized to supervise management policies, the general course of management, both concerning the Company and the Company's business, and provide advice to the Board of Directors.
2. Each member of the Board of Commissioners is personally liable for the Company's losses if they are at fault or negligent in performing their duties.
3. The responsibility as referred to in point 2 applies jointly and severally to each member of the Board of Commissioners.
4. For members of the Board of Commissioners who resign before or after the end of their term, except due to death, they remain responsible for their actions that have not been accounted for by the General Meeting of Shareholders.

Etika dan Jabatan Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip seperti profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Selain itu, Dewan Komisaris diharapkan untuk bertindak dengan kehati-hatian, memiliki niat baik, serta memikul tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kebaikan Perseroan dan sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

Selanjutnya, Dewan Komisaris juga mereka diberi tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan menghindari konflik kepentingan serta mengambil keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan Perseroan, kecuali jika itu terkait dengan penghasilan yang sah.

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan Dewan Komisaris di antaranya adalah pengawasan terhadap persetujuan dan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, dan menjaga agar Perseroan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan oleh Direksi, serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP serta menyampaikan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
4. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Ethics and Duties of the Board of Commissioners

In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Commissioners must adhere to the Articles of Association, laws and regulations, and principles such as professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and reasonableness. Additionally, the Board of Commissioners is expected to act with caution, have good intentions, and bear responsibility in supervising and advising the Board of Directors for the Company's benefit and in line with the Company's vision and mission.

Furthermore, the Board of Commissioners is also entrusted with maintaining the confidentiality of the Company's information, avoiding conflicts of interest, and refraining from personal gain from making decisions or carrying out Company activities unless it is related to legitimate income.

Duties and Obligations of the Board of Commissioners

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is tasked with supervising management policies, the general course of management, both concerning the Company and the Company's business, conducted by the Board of Directors, and providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners' supervision includes approval and oversight of the implementation of the Long-Term Company Plan (RJPP), Company Work Plan and Budget (RKAP), as well as oversight of the Directors' compliance with the Articles of Association, GMS Decisions, and ensuring that the Company always complies with applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in line with the Company's purposes and objectives.

The duties and obligations of the Board of Commissioners can be outlined as follows:

1. Providing advice to the Board of Directors in managing the Company.
2. Reviewing and signing the Long-Term Company Plan and the Company Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, and providing opinions and suggestions to the GMS regarding the RJPP and RKAP, and explaining the reasons why the Board of Commissioners signs the RJPP and RKAP.
3. Monitoring the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS on any issues deemed important for the Company's management.
4. Immediately reporting to the GMS if there are indications of declining Company performance.

5. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan, serta memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
6. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP.
7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan risalahnya.
9. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
10. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Hak Dewan Komisaris

Dalam mengembankan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki hak sebagai berikut:
1. Menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh akses atas informasi Perseroan secara akurat, lengkap dan tepat waktu.
3. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas biaya Perusahaan jika dianggap perlu.
4. Membentuk komite Audit dan satu Komite lain jika diperlukan.
5. Membentuk Komite lain lebih dari satu dan/atau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, apabila:
   a. Diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;atau
   b. Disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas Perseroan.
6. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris atas biaya Perseroan.
7. Mendapatkan fasilitas Perseroan sesuai dengan hasil penetapan RUPS.
8. Menerima tantiem atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan.
9. Melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dengan ketentuan:
   a. Mengajukan permohonan izin kepada Menteri Negara BUMN mencakup kepentingan perjalanan dinas, lama

5. Reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors, signing the annual report, and providing explanations, opinions, and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested.
6. Developing an annual work program and including it in the RKAP.
7. Proposing Public Accountants to the GMS.
8. Drafting the minutes of the Board of Commissioners' meetings and keeping them.
9. Providing a report on the supervisory tasks carried out during the past fiscal year to the GMS.
10. Fulfilling other obligations in the context of supervision and advisory duties, as long as they do not conflict with laws and regulations, the articles of association, and/or GMS decisions.

Rights of the Board of Commissioners

In carrying out its duties, the Board of Commissioners has the following rights:
1. Receiving honorariums and allowances/facilities, including post-employment benefits, the type and amount of which are determined by the GMS in accordance with applicable laws and regulations.
2. Obtaining access to accurate, complete, and timely Company information.
3. Using experts for specific matters and for a specific period at the Company's expense if deemed necessary.
4. Forming an Audit Committee and one other Committee if necessary.
5. Forming more than one other Committee and/or appointing the number of committee members who are not members of the Board of Commissioners to more than 2 (two) people if:
   a. Required by laws and regulations; or
   b. Approved by the Minister based on the complexity and burden faced by the Board of Commissioners in carrying out the Company's duties.
6. To assist in carrying out its duties, the Board of Commissioners may establish a Board of Commissioners Secretariat at the Company's expense.
7. Obtaining Company facilities according to the results of the GMS determination.
8. Receiving bonuses for their performance, the amount of which is determined by the GMS if the Company achieves a profit.
9. Conducting official trips abroad, subject to:
   a. Submitting a request for permission to the Minister of SOEs, including the purpose of the official trip,

waktu perjalanan dinas, pembiayaan dan informasi lain yang relevan;

b. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas, wajib melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Menteri Negara BUMN;

c. Dalam hal perjalanan ke luar negeri dilaksanakan atas kepentingan dan biaya pribadi, menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Negara BUMN.

duration of the official trip, financing, and other relevant information;

b. Within 14 (fourteen) days after the official trip, must report the implementation of the official trip to the Minister of SOEs;

c. In the event of a trip abroad for personal interests and expenses, notifying the Minister of SOEs.

Pembagian Tugas Antar Dewan Komisaris

Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Dewan Komisaris bertujuan untuk menciptakan efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. Hal ini diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-17/KOM/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris . Berikut merupakan rincian tugas yang dilaksanakan oleh setiap anggota Dewan Komisaris:

Division of Tasks Among the Board of Commissioners

The division of tasks and authorities among the members of the Board of Commissioners aims to create effectiveness in carrying out the functions of the Board of Commissioners. This is regulated in the Decision of the Board of Commissioners Number KEP-17/KOM/VIII/2022 dated August 29, 2022, concerning the Division of Tasks of the Board of Commissioners. Below is the detailed tasks performed by each member of the Board of Commissioners:

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervisory Duties
Zulkifli Zaini	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	Selaku Komisaris Utama sebagai Komisaris Independen memiliki tugas sebagai Koordinator Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris As the President Commissioner and Independent Commissioner, responsible for coordinating the Implementation of the Board of Commissioners' Tasks
Erwan Pelawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Selaku Komisaris Independen memiliki tugas di Bidang Audit Internal dan Eksternal serta Teknologi Informasi As an Independent Commissioner, responsible for Internal and External Audit, as well as Information Technology
Amal Bakti Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Selaku Komisaris memiliki tugas di bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJLS), Perbendaharaan dan Manajemen Risiko As Commissioner has duties in the fields of Partnership and Community Development Program (PCDP) and Social and Environmental Responsibility (SER),Treasury, and Risk Management
Asep Subarkah Yusuf	Komisaris Commissioner	Selaku Komisaris memiliki tugas di Bidang Teknologi Informasi, Organisasi, SDM, Pengadaan dan Umum As a Commissioner, responsible for Information Technology, Organization, Human Resources, Procurement and General Affairs
Arie Yuriwin	Komisaris Commissioner	Selaku Komisaris memiliki tugas di Bidang Pengadaan & Umum dan Optimalisasi Aset As a Commissioner, responsible for Procurement & General Affairs and Asset Optimization
Wisto Prihadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Selaku Komisaris Independen memiliki tugas di Bidang Operasional Tanaman, Teknik dan Pengolahan, serta Manajemen Risiko As Independent Commissioner, responsible for Plant Operations, Engineering and Processing, and Risk Management
Ardan Adiperdana	Komisaris Commissioner	Selaku Komisaris memiliki tugas di bidang Internal dan Eksternal, Akuntansi dan Pajak, serta Keuangan Strategis dan Pembiayaan Korporasi As Commissioner, responsible in the field of Internal and External Affairs, Accounting and Tax, and Strategic Finance and Corporate Finance
Alhilal Hamdi	Komisaris Commissioner	Selaku Komisaris memiliki tugas di bidang Pengembangan Bisnis dan Hilirisasi serta Hukum, dan Business Support As Commissioner, responsible in the fields of Business Development and Downstreaming as well as Legal, and Business Support

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervisory Duties
Suyus Windayana	Komisaris Commissioner	Selaku Komisaris memiliki tugas di bidang Perencanaan Strategis Korporasi dan Pemasaran & Retail As Commissioner responsible in the field of Corporate Strategic Planning and Marketing & Retail
Tsamara Amany Alatas	Komisaris Commissioner	Selaku Komisaris memiliki tugas di bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJLS), Perbendaharaan dan Optimalisasi Aset As Commissioner has duties in the fields of Partnership and Community Development Program (PCDP) and Social and Environmental Responsibility (SER), Treasury and Asset Optimization

Program Orientasi Bagi Dewan Komisaris

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas bagi anggota Dewan Komisaris yang baru, maka anggota baru tersebut akan diberikan program pengenalan dengan tujuan agar anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Rincian mengenai program Pengenalan bagi Dewan Komisaris dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang,posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Pemahaman tentang kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan Eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2023, Perseroan telah mengadakan Program Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.

Orientation Program for the Board of Commissioners

To enhance the effectiveness of new members of the Board of Commissioners, a new member orientation program will be provided with the aim of ensuring that newly appointed members of the Board of Commissioners can carry out their duties and responsibilities effectively. Details of the Orientation Program for the Board of Commissioners can be outlined as follows:

1. Implementation of corporate GCG principles;
2. Overview of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), related to objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Understanding of delegated authorities, Internal and External Audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Understanding of duties and responsibilities as members of the Board of Commissioners, and the Board of Directors as well as prohibited matters.

In 2023, the Company conducted an Orientation Program for newly appointed members of the Board of Commissioners.

Program Pengembangan Dewan Komisaris

Setiap tahunnya Dewan Komisaris selalu mengikuti program pengembangan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar Dewan Komisaris memiliki kualitas sera dapat melaksanakan tugasnya dalam mengawasi serta memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan Perseroan.

Sepanjang tahun 2023, Seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Board of Commissioners' Development Program

Every year, the Board of Commissioners always participates in a development program. This is done with the aim of ensuring that the Board of Commissioners has the quality and can carry out its duties in supervising and providing advice to the Board of Directors on the management of the Company.

Throughout 2023, all members of the Board of Commissioners have participated in training and competency enhancement activities, which can be detailed as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
Zulkifli Zaini	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	• Manajemen Risiko • Risk Management • Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) & 2024 *Price Outlook* • *Benchmark Sime Darby Malaysia* • *Short Course: Merger & Acquisition* • *Executive Risk Management Refreshment; Business Sustainability*	• 19 - 27 September 2023 • September 19-27, 2023 • 1-3 November 2023 • November 1-3, 2023 • 1-5 Maret 2023 • March 1-5, 2023 • 5-9 Juni 2023 • June 5-9, 2023 • 20-29 Oktober 2024 • October 20-29, 2024	• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) • Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) • Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) • Indonesian Palm Oil Association (GAPKI) • London Business School • London Business School • Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia • Indonesian Banking Development Institute
Erwan Pelawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	• IPOC & 2024 *Price Outlook* • *Benchmark Sime Darby Malaysia* • *Short Course: Merger & Acquition*	• 1-3 November 2023 • November 1-3, 2023 • 1-5 Maret 2023 • March 1-5, 2023 • 5-9 Juni 2023 • June 5-9, 2023	• Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) • Indonesian Palm Oil Association (GAPKI) • London Business School • London Business School
Amal Bakti Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Thailand *Sugar Conference* • IPOC & 2024 *Price Outlook* • *Benchmark Sime Darby* Malaysia	• 14 – 15 September 2023 • September 14-15, 2023 • 1-3 November 2023 • November 1-3, 2023 • 1-5 Maret 2023 • March 1-5, 2023	• Fireworks Trade Media Group • Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) • Holding PTPN III (Persero) • Fireworks Trade Media Group • Indonesian Palm Oil Association (GAPKI) • Holding PTPN III (Persero)
Asep Subarkah Yusuf	Komisaris Commissioner	• Thailand *Sugar Conference* • IPOC & 2024 *Price Outlook* • *Benchmark Sime Darby* Malaysia	• 14 – 15 September 2023 • September 14-15, 2023 • 1-3 November 2023 • November 1-3, 2023 • 1-5 Maret 2023 • March 1-5, 2023	• Fireworks Trade Media Group • Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) • *Holding* PTPN III (Persero) • Fireworks Trade Media Group • Indonesian Palm Oil Association (GAPKI) • Holding PTPN III (Persero)
Arie Yuriwin	Komisaris Commissioner	• *Benchmark Sime Darby* Malaysia	1-5 Maret 2023 March 1-5, 2023	*Holding* PTPN III (Persero) Holding PTPN III (Persero)
Wisto Prihadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Manajemen Risiko • Risk Management • Thailand *Sugar Conference* • *Benchmark Sime Darby* Malaysia	• 19 s.d 27 September 2023 • September 19-27, 2023 • 14 – 15 September 2023 • September 14-15, 2023 • 1-5 Maret 2023 • March 1-5, 2023	• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) • Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) • Fireworks Trade Media Group • Fireworks Trade Media Group • *Holding* PTPN III (Persero) • Holding PTPN III (Persero)

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
Ardan Adiperdana	Komisaris Commissioner	• IPOC & 2024 *Price Outlook* • *Benchmark Sime Darby* Malaysia • *Executive Risk Management Refreshment; Business Sustainability*	• 1-3 November 2023 • November 1-3, 2023 • 1-5 Maret 2023 • March 1-5, 2023 • 20-29 Oktober 2024 • October 20-29, 2023	• Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) • Indonesian Palm Oil Association (GAPKI) • *Holding* PTPN III (Persero) • Holding PTPN III (Persero) • Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia • Indonesian Banking Development Institute
Alhilal Hamdi	Komisaris Commissioner	• IPOC & 2024 *Price Outlook* • Thailand *Sugar Conference* • *Benchmark Sime Darby* Malaysia	• 1-3 November 2023 • November 1-3, 2023 • 14 – 15 September 2023 • September 14-15, 2023 • 1-5 Maret 2023 • March 1-5, 2023	• Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) • Indonesian Palm Oil Association (GAPKI) • Fireworks Trade Media Group • Fireworks Trade Media Group • *Holding* PTPN III (Persero) • Holding PTPN III (Persero)
Hamong Dhanardono	Thailand *Sugar Conference*	• Thailand *Sugar Conference*	14 – 15 September 2023 September 14-15, 2023	Fireworks Trade Media Group Fireworks Trade Media Group
Bahri Efendi Dongoran	Thailand *Sugar Conference*	• Thailand *Sugar Conference*	14 – 15 September 2023 September 14-15, 2023	Fireworks Trade Media Group Fireworks Trade Media Group

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris 2023

Hingga akhir tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan Perseroan di berbagai aspek, diantaranya:

1. **Aspek strategis**
   Dewan Komisaris telah memberikan nasihat untuk melanjutkan dan memastikan program-program strategis perusahaan (transformasi dan restrukturisasi, *operational excellence*, restrukturisasi organisasi dan *human resource*, divestasi aset, dan optimalisasi aset) yang dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), manajemen risiko serta pengendalian internal.

   Integrasi PTPN telah dilakukan melalui pembentukan Subholding. Dewan Komisaris juga telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk melakukan optimalisasi seluruh sumber daya agar tercapai tujuan dari integrasi yaitu Perseroan memperoleh manfaat/nilai tambah yang optimal dengan melakukan sinergi dan meningkatkan efisiensi di segala bidang.

2. **Aspek operasional**
   Dewan Komisaris menilai bahwa manajemen harus meningkatkan produktivitas dan rendemen semua komoditas dengan program *operational excellence* secara

Implementation of the Board of Commissioners' Duties in 2023

Until the end of 2023, the Board of Commissioners has carried out its duties by overseeing and providing advice to the Board of Directors on the management of the Company in various aspects, including:

1. **Strategic Aspects**
   The Board of Commissioners has provided advice to continue and ensure that the company's strategic programs (transformation and restructuring, operational excellence, organizational and human resource restructuring, asset divestment, and asset optimization) are implemented in accordance with the principles of good corporate governance (GCG), risk management, and internal control.

   The integration of PTPN has been achieved through the formation of a Subholding. The Board of Commissioners has also advised the Board of Directors to optimize all resources to achieve the objectives of the integration, which are to gain optimal benefits/value addition for the Company through synergy and increased efficiency in all areas.

2. **Operational Aspects**
   The Board of Commissioners assesses that management must increase the productivity and yield of all commodities through strict operational excellence programs and

ketat serta melaksanakan *reward and punishment*. Secara khusus Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat atas penting dan mendesaknya penataan komposisi umur tanaman kelapa sawit yang dimiliki Perseroan. Hal ini tetap menjadi perhatian pada beberapa tahun ke depan hingga komposisi umur tanaman ideal dapat direalisasikan.

3. Aspek pemasaran

Dewan Komisaris telah memberikan nasihat atas pemasaran komoditas rugi dan penjualan produk retail, Divisi Pemasaran diharapkan memiliki strategi khusus untuk minimalisir kerugian dalam menyusun target volume dan harga penjualan yang didukung dengan analisa *Break Event Point* (BEP).

4. Aspek keuangan

Dewan Komisaris mencermati bahwa kinerja PTPN Group merupakan hasil konsolidasi kinerja anak perusahaan dari seluruh kebun dan pabrik. Untuk itu, manajemen perlu segera mengimplementasikan penyusunan laporan laba rugi dari unit terkecil (kebun atau pabrik) serta laba rugi dari masing-masing regional.

5. Aspek Teknologi Informasi

Dewan Komisaris memberi perhatian pada tersedianya ruang kontrol tersebut dapat membantu dalam identifikasi penyakit, biaya per pohon, juga dapat memonitor penggunaan daya guna air untuk melihat tanaman yang kurang air maupun kurang pupuk. Tujuan akhirnya adalah mengurangi losis, menurunkan biaya, dan meningkatkan panen serta meningkatkan efektivitas pemupukan.

6. Aspek investasi

Dewan Komisaris mencermati bahwa untuk lebih menjamin keberhasilan realisasi program investasi perusahaan maka Dewan Komisaris memberikan perhatian dalam upaya memperkuat peran Komite Investasi untuk dapat mengelola dan memantau perkembangan investasi pada masing-masing PTPN dan masing-masing regional serta masing-masing project.

7. Aspek pengendalian internal dan manajemen risiko

Dewan Komisaris telah menyampaikan saran dan nasihat agar Direksi senantiasa melakukan sosialisasi kepada SDM *Holding* maupun Anak Perusahaan dalam rangka menumbuhkan budaya sadar risiko dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan serta membentuk organisasi risk management di Anak Perusahaan secara terpisah dari audit internal dengan didukung SDM yang kompeten.

8. Aspek Sumber Daya Manusia

Dewan Komisaris memberikan pengawasan dan nasihat untuk memastikan kecukupan jumlah SDM

implement a reward and punishment system. The Board of Commissioners has specifically supervised and advised on the importance and urgency of managing the age composition of the oil palm trees owned by the Company. This will remain a focus in the coming years until the ideal age composition of the plants can be realized.

3. Marketing Aspects

The Board of Commissioners has provided advice on the marketing of loss-making commodities and the sale of retail products. The Marketing Division is expected to have a special strategy to minimize losses by setting sales volume and price targets supported by Break-Even Point (BEP) analysis.

4. Financial Aspects

The Board of Commissioners observes that the performance of the PTPN Group is the result of the consolidated performance of subsidiaries from all plantations and factories. Therefore, management needs to immediately implement the preparation of profit and loss reports from the smallest units (plantations or factories) as well as profit and loss reports from each regional unit.

5. Information Technology Aspects

The Board of Commissioners emphasizes that the availability of a control room can assist in identifying diseases, tracking costs per tree, and monitoring water usage to identify plants that lack water or fertilizer. The ultimate goal is to reduce losses, lower costs, increase harvests, and improve the effectiveness of fertilization.

6. Investment Aspects

The Board of Commissioners observes that to ensure the successful realization of the company's investment programs, it is necessary to strengthen the role of the Investment Committee to manage and monitor investment developments in each PTPN, each regional unit, and each project.

7. Internal Control and Risk Management Aspects

The Board of Commissioners has advised the Board of Directors to continuously socialize risk awareness to the Human Resources of the Holding and Subsidiaries, fostering a risk-aware culture in corporate management. Additionally, they should establish a separate risk management organization in Subsidiaries, distinct from internal audit, supported by competent human resources.

8. Human Resources Aspects

The Board of Commissioners provides oversight and advice to ensure an adequate number of personnel in the

di Divisi Manajemen Risiko, Audit Internal, dan Legal serta meningkatkan kompetensi SDM untuk penguatan fungsi three lines of defense dalam pengelolaan dan pengendalian risiko PTPN Group serta meningkatkan produktivitas per pegawai.

9. **Aspek Pengawasan Penggunaan Dana PMN dan IP PEN**
   Dewan Komisaris telah memberikan nasehat agar Direksi memastikan bahwa pelaksanaan penyerapan dana dan pelaksanaan program yang bersumber dari PMN dan IP PEN dilakukan tepat guna dan sesuai dengan timeline yang telah disusun dengan berpedoman pada GCG dan Ketentuan Perundangan yang berlaku.

10. **Aspek Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan**
    Dewan Komisaris telah memberikan nasehat agar Direksi mengefektifkan penyaluran dana TJSL untuk mendukung pelaksanaan program strategis perusahaan, terutama bantuan sosial masyarakat sekitar kebun/unit usaha Perseroan dengan berpedoman pada GCG dan Ketentuan Perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris juga melaksanakan pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan melalui kegiatan rapat Dewan Komisaris, pemberian rekomendasi, maupun kunjungan ke unit kebun/anak perusahaan. Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 76 kali dan kunjungan kerja sebanyak 16 kali.

Selain itu, Dewan Komisaris juga melaksanakan evaluasi atas kinerja Direksi baik secara kolegial maupun individual. Kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan evaluasi dalam pencapaiannya untuk memastikan bahwa pengawasan dan pemberian nasihat sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

Penilaian Kinerja Organ dan Komite Pendukung di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengevaluasi setiap organ dan Komite yang berada di bawahnya secara kolektif dan individual. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kelengkapan dan pelaksanaan tugas dari setiap Organ dan Komite Pendukung Dewan Komisaris. Informasi terperinci mengenai metode dan hasil evaluasi disertakan dalam setiap sub bagian pembahasan tentang Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Risk Management, Internal Audit, and Legal Divisions, as well as to enhance the competencies of human resources to strengthen the three lines of defense in PTPN Group's risk management and control, and to improve productivity per employee.

9. **Monitoring of PMN and IP PEN Fund Usage Aspects**
   The Board of Commissioners has advised the Board of Directors to ensure that the absorption and implementation of programs funded by PMN and IP PEN are carried out effectively and in accordance with the timelines set, adhering to GCG principles and applicable regulations.

10. **Social and Environmental Responsibility Aspects**
    The Board of Commissioners has advised the Board of Directors to optimize the disbursement of social and environmental responsibility (TJSL) funds to support the implementation of the company's strategic programs, especially social assistance to communities around the company's plantations/business units, adhering to GCG principles and applicable regulations.

The Board of Commissioners also conducts oversight and advisory activities through Board of Commissioners meetings, providing recommendations, and visits to plantation units/subsidiaries. In 2023, the Board of Commissioners conducted 76 meetings and 16 working visits.

Furthermore, the Board of Commissioners also evaluates the performance of the Board of Directors both collectively and individually. The performance of the Board of Commissioners is also evaluated in its achievements to ensure that oversight and advisory duties have been carried out excellently.

Performance Evaluation of Subsidiary Organs and Supporting Committees Under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners evaluates each organ and Committee under its supervision collectively and individually. This evaluation is carried out by considering the completeness and performance of each Organ and Supporting Committee of the Board of Commissioners. Detailed information about the methods and results of the evaluation is included in each subsection discussing Corporate Governance in this Annual Report.

Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen untuk mewujudkan objektivitas, independen, *fairness*, serta dapat memberikan keseimbangan dan perlindungan bagi kepentingan para pemangku kepentingan. Penunjukan Komisaris Independen dalam Perseroan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Kementerian BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

Adapun persyaratan yang harus dimiliki oleh Komisaris Independen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), atau pemegang saham perusahaan, dalam perusahaan yang sama;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
4. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;
5. Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan
6. Berdomisili di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan di atas dan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris di PTPN III (Persero), pada tahun 2023 PTPN III (Persero) telah memiliki 4 (empat) orang anggota Komisaris Independen dengan susunan sebagai berikut:

1. Zulkifli Zaini: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen (sampai dengan 19 Desember 2023)
2. Amal Bakti Pulungan: Komisaris Independen (sampai dengan 19 Desember 2023)
3. Erwan Pelawi: Komisaris Independen (sampai dengan 19 Desember 2023)
4. Wisto Prihadi: Komisaris Independen

Independent Commissioners

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, managerial, shareholding, and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the Controlling Shareholders or relationships with the Company, which could affect their ability to act independently to achieve objectivity, independence, fairness, and provide balance and protection for stakeholders' interests. The appointment of Independent Commissioners in the Company is made in accordance with the Regulation of the Ministry of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance in SOEs.

The requirements to be fulfilled by Independent Commissioners can be outlined as follows:

1. Not having an Affiliate relationship with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board (DPS), or shareholders of the same company;
2. Has never been a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the DPS, or held a position 1 (one) level below the Board of Directors in the same company or another company that has an affiliate relationship with that company in the last 2 (two) years;
3. Understanding of financial regulations and other relevant regulations;
4. Have a good knowledge of the financial condition of the company where the Independent Commissioner serves;
5. Indonesian citizenship; and
6. Residing in Indonesia.

In accordance with the above provisions and the Minister of SOEs Decree regarding the appointment of members of the Board of Commissioners in PTPN III (Persero), in 2023 PTPN III (Persero) had 4 (four) Independent Commissioner with the following composition:

1. Zulkifli Zaini: President Commissioner, concurrently Independent Commissioner (until December 19, 2023)
2. Amal Bakti Pulungan: Independent Commissioner (until December 19, 2023)
3. Erwan Pelawi: Independent Commissioner (until December 19, 2023)
4. Wisto Prihadi: Independent Commissioner

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan instansi dalam Tata Kelola Perusahaan yang memiliki wewenang penuh dalam mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar.

Prinsip utama Direksi sebagai salah satu organ Perseroan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, adalah bekerja secara kolektif untuk mengelola Perseroan dengan tujuan menghasilkan nilai tambah dan memastikan kelangsungan usaha. Setiap anggota Direksi memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, namun pelaksanaannya tetap merupakan tanggung jawab bersama. Proses seleksi dan penunjukan anggota Direksi diawali dengan *fit and proper test*.

The Board of Directors is an entity within the Corporate Governance framework with full authority to manage the Company for the Company's interests in accordance with the purposes and objectives established and to represent the Company, both within and outside the court, in accordance with the provisions contained in the Articles of Association.

The main principle of the Board of Directors as one of the Company's organs, as regulated in the Company's Articles of Association, is to work collectively to manage the Company with the aim of creating added value and ensuring business continuity. Each member of the Board of Directors has a responsibility to make decisions in accordance with their respective duties and authorities, but its implementation remains a collective responsibility. The selection and appointment process of Board of Directors members begins with a fit and proper test.

Kriteria dan Persyaratan Anggota Direksi

Secara formal, DIreksi memiliki kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
2. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
4. Tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
5. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris;
6. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Direktur Utama atau anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
7. Tidak boleh merangkap jabatan lain dalam jabatan struktural dan/atau fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
8. Tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

Criteria and Requirements for Board of Directors Members

Formally, the Board of Directors has the following criteria and requirements:

1. Ability to perform legal acts;
2. Has not been declared bankrupt within 5 (five) years before nomination;
3. Has not been a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who has been found guilty of causing a company to go bankrupt within 5 (five) years before nomination;
4. Has not been convicted of harming state finances within 5 (five) years before nomination;
5. There should be no blood relationship up to the third degree, either by direct line or collateral line, or affinity (in-law) relationship with other Directors and/or members of the Board of Commissioners;
6. Shall not concurrently hold another position as President Director or member of the Board of Directors in State-Owned Enterprises (SOEs), Regional-Owned Enterprises (ROEs), and Private-Owned Enterprises or other positions related to company management;
7. Shall not concurrently hold another position in structural and/or other functional positions in central or regional government agencies;
8. Shall not hold other positions that may directly or indirectly cause conflicts of interest with the company and/or contravene applicable laws and the Articles of Association.

Secara material, seluruh anggota Direksi memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
2. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki:
   a. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;
   b. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
   c. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan Perseroan.
3. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam perbuatan:
   a. Rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
   b. Cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
   c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon Anggota Direksi, karyawan BUMN/Perusahaan/ Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik).
   d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku yang tidak baik).
4. Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:
   a. Memformulasikan dan mengartikulasikan visi Perusahaan;
   b. Mengarahkan pejabat dan karyawan Perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan Perusahaan;
   c. Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan Perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan Perusahaan.
5. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

Materially, all members of the Board of Directors have the following requirements:

1. Experience, meaning they have a track record showing success in managing SOEs/Companies/Institutions where they worked before nomination;
2. Expertise, meaning they have:
   a. Adequate knowledge in the company's business field;
   b. Understanding of corporate management and governance;
   c. Ability to formulate and implement strategic policies for the company's development.
3. Integrity, meaning they have not been involved in:
   a. Engineering and deviant practices in managing SOEs/ Companies/Institutions where they worked before nomination (dishonest conduct);
   b. Violations of commitments categorized as not fulfilling agreements agreed upon with SOEs/Companies/ Institutions where they worked before nomination (unethical behavior);
   c. Actions that may be categorized as providing unlawful benefits to the personal candidate, SOE/Company/ Institution employees, or certain groups before nomination (unethical behavior);
   d. Acts that can be categorized as violations of provisions related to the principles of sound corporate governance (unethical behavior).
4. Leadership, meaning they have the ability to:
   a. Formulate and articulate the company's vision;
   b. Direct officials and employees of the Company to be able to do something to achieve the Company's goals;
   c. Inspire (provide new energy) and motivate officials and employees of the Company to be able to achieve the Company's goals.
5. Strong willingness (enthusiasm) and high dedication to advance and develop the Company.

Persyaratan Lain

Pada persyaratan lainnya, anggota Direksi memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/ atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
2. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi Perusahaan;
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi;
5. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
6. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/ atau Pemegang Saham, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Other Requirements

In other requirements, Board of Directors members have the following requirements:

1. Not a member of a political party management, and/or legislative member, and/or not currently running as a legislative member candidate;
2. Not a head/deputy head of a region and/or not currently running as a head/deputy head of a region candidate;
3. Not serving as an official in an Institution, Board of Commissioners/Supervisory Board member in SOEs, Board of Directors member in SOEs and/or Companies, unless they sign a statement of willingness to resign from that position if elected as a member of the Board of Directors of the Company;
4. Not holding a position that is prohibited from being held concurrently with the position of Board of Directors member based on regulations, unless they sign a statement of willingness to resign from that position if elected as a member of the Board of Directors;
5. Shall not serve as a member of the Company's Board of Directors for 2 (two) consecutive terms;
6. Board of Directors members do not have financial, managerial, ownership, and family relationships with other members of the Board of Commissioners, other Directors, and/or Shareholders, which could affect their ability to act independently.

Komposisi dan Susunan Keanggotaan Direksi Tahun 2023

Pada tahun 2023, terdapat perubahan mengenai komposisi dan pergantian susunan keanggotaan Direksi dengan rincian kronologis sebagai berikut.

Hingga akhir tahun 2022 susunan komposisi Direksi terdiri atas 8 (delapan) orang dengan satu orang sebagai ketua.

Composition and Structure of the Board of Directors in 2023

In 2023, there were changes regarding the composition and structure of the Board of Directors with the chronological details as follows.

Until the end of 2022, the composition of the Board of Directors consisted of 8 (eight) individuals with one person as the head.

Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2022
Composition and Structure of the Board of Directors as of December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Term
Mohammad Abdul Ghani	Direktur Utama President Director	SK Menteri BUMN No. SK-231/ MBU/10/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-231/ MBU/10/2019	12 Februari 2020 – 17 Oktober 2024 February 12, 2020 – October 17, 2024
Denaldy Mulino Mauna	Wakil Direktur Utama Vice President Director	SK Menteri BUMN No.48/MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No.48/ MBU/02/2020	12 Februari 2020 – 12 Februari 2025 February 12, 2020 – February 12, 2025
Seger Budiarjo	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	SK Menteri BUMN No.SK-133/MBU/04/2021 Minister of SOEs Decree No.SK-133/ MBU/04/2021	28 April 2021 – 28 April 2026 April 28, 2021 – April 28, 2026
Dwi Sutoro	Direktur Pemasaran Marketing Director	SK Menteri BUMN No. SK-231/MBU/10/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-231/ MBU/10/2019	17 Oktober 2019 - 17 Oktober 2024 October 17, 2019 - October 17, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Term
Ahmad Haslan Saragih	Direktur Pelaksana Managing Director	SK Menteri BUMN No. SK-231/MBU/10/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-231/MBU/10/2019	17 Oktober 2019 – 28 Juni 2023 October 17, 2019 – June 28, 2023
M. Iswahyudi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	SK Menteri BUMN No.SK-48/MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No.SK-48/MBU/02/2020	12 Februari 2020 - 12 Februari 2025 February 12, 2020 - February 12, 2025
Mahmudi	Direktur Produksi dan Pengembangan Production and Development Director	SK Menteri BUMN No.SK-48/MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No.SK-48/MBU/02/2020	17 Oktober 2019 – 17 Oktober 2024 October 17, 2019 – October 17, 2024
Doni P. Gandamihardja	Direktur Umum General Affairs Director	SK Menteri BUMN No.SK-133/MBU/04/2021 Minister of SOEs Decree No.SK-133/MBU/04/2021	28 April 2021 - 28 April 2025 April 28, 2021 - April 28, 2025

Selanjutnya, pada tahun 2023, komposisi Direksi mengalami perubahan, dengan rincian komposisi keanggotaan berikut:

Furthermore, in 2023, the composition of the Board of Directors underwent changes, with the following membership composition details:

Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2023
Composition and Structure of the Board of Directors as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Description
Mohammad Abdul Ghani	Direktur Utama President Director	SK Menteri BUMN No. SK-48/ MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No.SK-48/MBU/02/2020	12 Februari 2020 – 17 Oktober 2024 February 12, 2020 – October 17, 2024
Denaldy Mulino Mauna	Wakil Direktur Utama Vice President Director	SK Menteri BUMN No. SK-48/MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-48 MBU/02/2020	12 Februari 2020 –12 Februari 2025 February 12, 2020 – February 12, 2025
Sucipto Prayitno	Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Human Resources & General Affairs Director	SK Menteri BUMN No. SK-395/MBU/12/2023 Decree of the Minister of SOEs No. SK-395/MBU/12/2023	19 Desember 2023 - 19 Desember 2028 December 19, 2023 - December 19, 2028
Dwi Sutoro	Direktur Pemasaran Marketing Director	SK Menteri BUMN No. SK-231/MBU/10/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-231/MBU/10/2019	17 Oktober 2019 - 17 Oktober 2024 October 17, 2019 - October 17, 2024
M. Iswahyudi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	SK Menteri BUMN No.SK-48/MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No.SK-48/MBU/02/2020	12 Februari 2020 - 12 Februari 2025 February 12, 2020 - February 12, 2025
Mahmudi	Direktur Produksi dan Pengembangan Production and Development Director	SK Menteri BUMN No.SK-48/MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No.SK-48/MBU/02/2020	17 Oktober 2019 – 7 Mei 2024 October 17, 2019 – May 7, 2024
M. Arifin Firdaus	Direktur Hubungan Kelembagaan Institutional Relations Director	SK Menteri BUMN No SK-4/MBU/01/2023 Minister of SOEs Decree No SK-4/MBU/01/2023	4 Januari 2023 - 4 Januari 2028 January 4, 2023 - January 4, 2028

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.

Profiles of all Directors can be found in the Company Profile section of this Annual Report.

Board Manual Atau Pedoman Kerja Direksi

Wujud Komitmen Direksi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dapat diperlihatkan melalui implementasinya dalam menjalankan *Board Manual* Perseroan. Implementasi Direksi pada *Board Manual* memiliki tujuan untuk membangun hubungan kerja yang seimbang dan efektif dalam mencapai tujuan PTPN III (Persero) *Holding* Perkebunan. Perseroan memiliki *Board Manual* yang berfungsi dalam mengatur tata tertib kerja dan hubungannya dengan Dewan Komisaris. *Board Manual* yang dimiliki oleh Perseroan selalu diulas dan mengalami pembaruan.

Berikut merupakan rincian mengenai isi *Board Manual* Direksi Perseroan:
1. Terciptanya satu pola hubungan kerja yang harmonis antar Organ Perseroan dalam mengelola perkebunan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
2. Memudahkan organ-organ Direksi dan organ-organ Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara organ-organ tersebut.

Materi yang diatur dalam Tata tertib kerja Direksi adalah sebagai berikut:
1. Fungsi Direksi;
2. Persyaratan Anggota Direksi;
3. Proses Pengangkatan Direksi;
4. Keanggotaan dan Komposisi Direksi, Masa Jabatan Direksi;
5. Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Direksi;
6. Wewenang dan Hak Direksi;
7. Program Pengenalan Perusahaan kepada Direksi Baru;
8. Program Pengembangan Direksi;
9. Rapat Direksi, Rapat Gabungan;
10. Rapat Direktorat;
11. Rapat Kerja Nasional;
12. Tata Tertib Rapat;
13. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
14. Penilaian Kinerja Direksi;
15. Pemberhentian, Berakhirnya Jabatan Direksi;
16. Larangan Rangkap Jabatan;
17. Karyawan Menjadi Anggota Direksi.

Pelaksanaan *Board Manual* merupakan salah satu bentuk komitmen dari Direksi dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, dengan harapan akan tercipta suatu pola hubungan kerja yang harmonis dalam upaya mencapai Visi dan Misi PTPN III (Persero) *Holding* Perkebunan.

Board Manual of the Board of Directors

The commitment of the Board of Directors to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) can be demonstrated through its implementation in the Company's Board Manual. The Board of Directors' implementation in the Board Manual aims to establish a balanced and effective working relationship in achieving the goals of PTPN III (Persero) Holding Perkebunan. The Company has a Board Manual that functions to regulate work rules and its relationship with the Board of Commissioners. The Company's Board Manual is constantly reviewed and updated.

The details regarding the content of the Company's Board Manual are as follows:
1. Establishment of a harmonious working relationship among Company Organs in managing plantations professionally in accordance with the principles of Good Corporate Governance;
2. Facilitating the Directors and the Board of Commissioners in understanding the tasks and responsibilities of the Directors and the Board of Commissioners as well as the task relations between these organs.

The materials regulated in the Directors' work rules are as follows:
1. The functions of the Directors;
2. Requirements for Directors;
3. Director Appointment Process;
4. Membership and Composition of the Board of Directors, Director Term of Office;
5. Duties, Obligations, and Responsibilities of the Directors;
6. Authorities and Rights of the Directors;
7. New Director Company Introduction Program;
8. Director Development Program;
9. Board Meetings, Joint Meetings;
10. Directorate Meetings;
11. National Work Meetings;
12. Meeting Rules;
13. Division of Tasks and Responsibilities of the Directors;
14. Director Performance Evaluation;
15. Termination, Expiry of Director Term of Office;
16. Prohibition of Concurrent Positions;
17. Employees Becoming Directors.

The implementation of the Board Manual is one form of commitment from the Directors to implement the principles of GCG, with the hope of creating a harmonious working relationship in efforts to achieve the Vision and Mission of PTPN III (Persero) Holding Perkebunan

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Direksi

Tugas Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi tertuang pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 21 Mei 2012 yang kemudian dituangkan Perseroan dalam Pedoman GCG Perseroan pada tanggal 26 Januari 2015. Rincian mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan;
c. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan atau perusahaan patungan dan atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas dan atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN;
d. Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;
e. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.

Kewajiban Direksi

Adapun kewajiban yang harus dijalankan oleh Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
b. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran

Duties, Obligations, and Authorities of the Board of Directors

Duties of the Board of Directors

The duties and responsibilities of the Board of Directors are stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 regarding the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises dated May 21, 2012, which was subsequently embodied by the Company in the Company's GCG Guidelines on January 26, 2015. The details regarding the duties and responsibilities of the Company's Board of Directors can be outlined as follows:

a. The Board of Directors must carry out its duties in good faith for the benefit of the State-Owned Enterprise (SOE) and in accordance with the purposes and objectives of the SOE, and ensure that the SOE fulfills its social responsibilities and considers the interests of various stakeholders in accordance with the provisions of laws and regulations;
b. One member of the Board of Directors is appointed by the Board of Directors as responsible for the implementation and monitoring of GCG in the respective SOE;
c. The Board of Directors must provide information regarding its identity, main tasks, positions on the Board of Commissioners in subsidiaries or joint venture companies, and/or other companies, including meetings held within one financial year (internal meetings or joint meetings with the Board of Commissioners or Supervisory Board), as well as salaries, facilities, and/or other benefits received from the respective SOE and its subsidiaries or joint venture companies, to be included in the SOE's Annual Report;
d. The Board of Directors is required to report to the SOE regarding its ownership of shares and/or those of its family members (spouse and children) in the respective SOE and other companies, including any changes thereto;
e. The Board of Directors is tasked with carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company, and representing the Company both inside and outside the Court regarding all matters and events with limitations as regulated in laws and regulations, Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Obligations of the Board of Directors

The obligations that must be fulfilled by the Company's Board of Directors are as follows:

a Endeavoring and ensuring the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purposes and objectives.
b. Preparing the Long-Term Company Plan (RJPP), which is a strategic plan containing the targets and objectives to be

dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 30 September dan kepada Pemegang Saham paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan untuk mendapatkan pengesahan RUPS. RJPP paling sedikit memuat:

1. Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;
2. Posisi Perusahaan saat ini;
3. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;
4. Penetapan Visi dan Misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang.
5. Pengesahan Rencana Jangka Panjang ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan Rencana Jangka Panjang secara lengkap. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari Rencana Jangka Panjang belum disahkan, maka Rancangan Rencana Jangka Panjang tersebut dianggap telah mendapat persetujuan Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran-sasaran dalam Rencana Jangka Panjang.

c. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJPP, serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 15 (lima belas) September sebelum periode RKAP tahun berjalan. RKAP paling sedikit memuat:
   a. Visi dan Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perseroan, dan program kerja/ kegiatan;
   b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
   c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaan; dan
   d. Hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/ Menteri.
   Permohonan persetujuan RKAP disampaikan oleh Direksi kepada RUPS paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran Perseroan. Pengesahan atas RKAP diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
   e. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
   f. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
   g. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perseroan.
   h. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

achieved within a period of 5 (five) years, and its revisions, and submitting it to the Board of Commissioners no later than September 30 and to the Shareholders no later than October 31 before the RJPP period for the year to receive approval from the General Meeting of Shareholders. The RJPP must include at least:

1. Evaluation of the implementation of the previous RJPP;
2. Current position of the Company;
3. Assumptions used in the preparation of the RJPP;
4. Establishment of Vision and Mission, objectives, strategies, policies, and long-term work programs.
5. Approval of the Long-Term Plan must be determined no later than 60 (sixty) days after the complete Long-Term Plan Draft is received. If within 60 (sixty) days the Long-Term Plan has not been approved, then the Long-Term Plan Draft is considered to have obtained the approval. The Board of Directors is responsible for the implementation and achievement of the targets in the Long-Term Plan.

c. Preparing the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as the annual elaboration of the RJPP, and submitting it to the Board of Commissioners no later than September 15 before the current RKAP period. The RKAP must include at least:
   a. Vision and Mission, business objectives, business strategies, Company policies, and work programs/ activities;
   b. Detailed Company budget for each work program/ activity;
   c. Financial projections of the Company and its subsidiaries; and
   d. Other matters requiring resolutions from the General Meeting of Shareholders/Ministers.
   The RKAP approval request is submitted by the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders no later than 60 (sixty) days before the start of the Company's fiscal year. Approval of the RKAP is given no later than 30 (thirty) days after the fiscal year begins.
   e. Providing explanations to the General Meeting of Shareholders regarding the Long-Term Company Plan (RJPP) and the Work Plan and Budget (RKAP).
   f. Creating the Shareholders List, Special List, Minutes of General Meeting of Shareholders, and Minutes of Board of Directors' Meetings.
   g. Preparing the Annual Report as a manifestation of the Company's management accountability, as well as the Company's financial documents as referred to in the Company Document Law.
   h. Compiling Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submitting them to the Public Accountant for auditing.

i. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta Laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain akibat penghapusbukuan piutang.
j. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dan dokumen perusahaan lainnya.

l. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana huruf j.

m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
n. Memberikan laporan berkala termasuk laporan pelaksanaan manajemen risiko menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham.
o. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan Lengkap dengan perincian dan tugasnya.
p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
q. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi Perseroan.
r. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
s. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
t. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
u. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
v. Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada

i. Submitting the Annual Report including the Financial Statements to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification, as well as Reports on the Company's rights not recorded in the bookkeeping, including the results of debt write-offs.
j. Providing explanations to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report.
k. Maintaining the Shareholders List, Special List, Minutes of General Meeting of Shareholders, Minutes of Board of Commissioners' Meetings, Minutes of Board of Directors' Meetings, Annual Report, and the Company's Financial Documents as referred to in items e and f, and other company documents.
l. Keeping at the Company's registered office: Shareholders List, Special List, Minutes of General Meeting of Shareholders, Minutes of Board of Commissioners' Meetings, Minutes of Board of Directors' Meetings, Annual Report, Company financial documents, and other company documents as referred to in item j.
m. Establishing an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on internal control principles, especially management, recording, storage, and supervision functions.
n. Providing periodic reports including risk management implementation reports in the manner and time specified by applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders.
o. Preparing the complete organizational structure of the Company with details and its duties.
p. Providing explanations regarding any matters stated or requested by the members of the Board of Commissioners and Shareholders.
q. Drafting and establishing the Company's organizational blueprint.
r. Fulfilling other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the General Meeting of Shareholders based on laws and regulations.
s. Devoting full effort, thought, attention, and dedication to the Company's tasks, obligations, and goals.

t. Complying with the Company's Articles of Association and laws and regulations, and must adhere to the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
u. Each member of the Board of Directors must act in good faith and with full responsibility in carrying out duties for the benefit and business of the Company while adhering to applicable laws and regulations.
v. The Board of Directors must report to the Company regarding its share ownership and/or that of its family members (spouse and children) in the Company and

Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban dimaksud dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan tersebut.

w. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
   1. Mengalihkan kekayaan Perseroan (transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku); atau
   2. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yaitu transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku;

x. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf v tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar;

y. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang usulan peluang bisnis ataupun isu-isu perubahan lingkungan bisnis untuk memperoleh arahan dari Dewan Komisaris.

Wewenang Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi memiliki berbagai wewenang yang dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan;
c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.
d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
e. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

other companies, including any changes, which are then recorded in a special list. Directors who fail to fulfill these obligations and cause losses to the Company are personally liable for those losses.

w. The Board of Directors must seek approval from the General Meeting of Shareholders for:
   1. Transfer of Company assets (net asset transfer transactions of the Company that occur within a period of 1 (one) fiscal year); or
   2. Making the Company's asset liabilities as collateral for debt more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, whether related or unrelated, namely net asset transfer transactions of the Company that occur within a period of 1 (one) fiscal year.

x. The provisions referred to in item v do not apply to the actions of transferring or collateralizing the Company's assets carried out by the Board of Directors as part of the Company's business activities in accordance with the Articles of Association.

y. Communicating to the Board of Commissioners about business opportunities or business environment change issues to obtain guidance from the Board of Commissioners.

Authorities of the Board of Directors

In carrying out its duties, the Board of Directors has various authorities which can be detailed as follows:

a. Establishing the management policies of the Company.
b. Regulating the delegation of authority by the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or to represent the Company both inside and outside the Court.
c. Regulating the delegation of authority by the Board of Directors to one or more Company employees, either individually or collectively, or to others, to represent the Company both inside and outside the Court.
d. Regulating provisions regarding Company personnel, including the determination of salaries, pensions, or old-age benefits, and other income for Company employees based on applicable regulations, with the provision that the determination of salaries, pensions, or old-age benefits, and other income for employees exceeding the obligations set by regulations must be approved by the General Meeting of Shareholders first.
e. Appointing and dismissing Company employees based on Company regulations and applicable regulations.

f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala SPI dengan persetujuan Dewan Komisaris;

g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;
h. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan ini tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, atau Keputusan RUPS. Keputusan RUPS dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/ atau Anggaran Dasar Perusahaan;
i. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;
j. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar;
k. Menyusun Kebijakan dan Strategi manajemen risiko Perseroan secara tertulis dan komprehensif, termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas kegiatan usaha. Kegiatan ini dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan;
l. Mengembangkan budaya manajemen risiko Perseroan pada seluruh jenjang di organisasi, antara lain melalui komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
m. Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko Perseroan, antara lain melalui program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko Perseroan;
n. Memastikan bahwa manajemen risiko Perseroan telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain dengan adanya pemisahan fungsi antara unit kerja manajemen risiko, yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan unit kerja operasional dan unit pengendalian intern Perseroan.

f. Appointing and dismissing the Company Secretary and the Head of Internal Audit (SPI) with the approval of the Board of Commissioners.
g. Taking all actions and other deeds regarding the management or ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company both inside and outside the court on all matters and all events, with limitations as regulated by laws and regulations, the Articles of Association, and/or the decisions of the General Meeting of Shareholders.
h. Representing the Company both inside and outside the court. This authority is unlimited and unconditional, unless otherwise specified in the Limited Liability Company Law, the Articles of Association, or the decisions of the General Meeting of Shareholders. The decisions of the General Meeting of Shareholders referred to must not contradict the provisions of the Limited Liability Company Law and/or the Articles of Association of the Company.
i. In the event that the Board of Directors consists of more than 1 (one) person, each member of the Board of Directors is authorized to represent the Company, unless otherwise specified in the Articles of Association.
j. Managing the Company's affairs for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company, as well as in accordance with policies deemed appropriate, within the limits specified in the Limited Liability Company Law and/or the Articles of Association.
k. Formulating written and comprehensive Company risk management policies and strategies, including the determination and approval of overall risk limits, by type of risk and by business activity. This activity is carried out at least once a year or at a higher frequency in the event of changes in factors affecting the Company's business activities significantly.

l. Developing the Company's risk management culture at all levels of the organization, including through adequate communication to all levels of the organization about the importance of effective internal controls.
m. Ensuring the improvement of Human Resources competence related to the application of the Company's risk management, including through continuous education and training programs, especially those related to the Company's risk management systems and processes.
n. Ensuring that the Company's risk management is implemented independently, reflected among other things by the separation of functions between the risk management unit, which identifies, measures, monitors, and controls risks, and the operational and internal control units of the Company.

Pembagian Tugas Masing-Masing Direksi

Setiap masing-masing anggota Direksi PTPN III (Persero) memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tugas dan tanggung jawab tersebut mengacu pada KPTS No. DIR/SKPTS/82/2023 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dijabarkan sebagai berikut:

Division of Tasks Among the Directors

Each member of the Board of Directors of PTPN III (Persero) has specific duties and responsibilities. These duties and responsibilities have been refers to KPTS No. DIR/SKPTS/82/2023 regarding the Division of Duties and Authorities of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero). The details of the duties and responsibilities of each board member are outlined as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervisory Duties	
Mohammad Abdul Ghani	Direktur Utama President Director	a. Memimpin Direksi menjalankan pengurusan Perseroan; b. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan/atau Keputusan Direksi ini; d. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan Unit Kerja yang dibawahinya; e. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan RJPP dan RKAP; f. Mengkoordinasikan perencanaan (termasuk penyusunan RKA Program TJSL), pelaksanaan, pengawasan, dan *monitoring* dan evaluasi Program TJSL pada lingkup Perseroan, Anak Perusahaan , dan Perusahaan Patungan; g. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan rencana kerja Perseroan yang dijabarkan dari RKAP dan RJPP; h. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan laporan tahunan dan laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada lingkup Perseroan; i. Mengkoordinasikan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi yang pengaturan tugas dan kewenangannya belum ditetapkan dalam Keputusan Direksi ini; j. Mengadakan rapat Direksi secara berkala; k. Memimpin rapat Direksi; l. Mengevaluasi pencapaian *Key Performance Indicators* kolegial Direksi secara berkala serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan;	a. Leading the Board of Directors in managing the Company; b. Undertaking all actions related to the management of the Company within his area of responsibility with good faith and prudence for the benefit of the Company and in accordance with the Company's objectives and purposes; c. Representing the Company both in and out of court regarding all matters and events with limitations as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and/or resolutions of the Board of Directors; d. Directing, evaluating, and coordinating the Work Units under his supervision; e. Coordinating the preparation of the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and the Annual Work and Budget Plan (RKAP); f. Coordinating the planning (including the preparation of the CSR Program Budget), implementation, supervision, monitoring, and evaluation of the CSR Program within the scope of the Company, its Subsidiaries, and Joint Ventures; g. Coordinating and synchronizing the Company's work plans derived from the RKAP and RJPP; h. Coordinating the preparation of the draft annual report and the implementation report of the social and environmental responsibility program within the Company; i, Coordinating the division of duties and authorities of Board members whose duties and authorities are not yet stipulated in this Board resolution; j, Holding regular Board meetings; k. Chairing Board meetings; l. Regularly evaluating the achievement of the collegial Key Performance Indicators of the Board and formulating necessary corrective actions;

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervisory Duties	
Mohammad Abdul Ghani	Direktur Utama President Director	m. Menindaklanjuti temuan audit baik internal maupun eksternal pada bidang tugasnya; n. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; o. Memimpin Direksi dalam mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan sesuai ketentuan yang berlaku; p. Menjalankan dan mematuhi Ketentuan Perusahaan, *Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance*, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi; q. Menjalankan tugas selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf p sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perusahaan, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS, dan/ atau rapat Direksi.	m. Following up on audit findings, both internal and external, within his area of responsibility; n. Overseeing the smooth operation of the Company in accordance with established strategies and policies; o. Leading the Board in overseeing and evaluating the management of Subsidiaries/ Joint Ventures in accordance with applicable regulations; p. Complying with and adhering to Company regulations, the Board Manual, the Code of Conduct, the Code of Corporate Governance, and the Gratuity Control Guidelines; q. Performing duties other than those specified in points a to p as stipulated in the Company's regulations, Articles of Association, laws and regulations, GMS resolutions, and/or Board meetings.
Denaldy Mulino Mauna	Wakil Direktur Utama Vice President Director	a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian sesuai bidang tugasnya dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan/ atau Keputusan Direksi ini; c. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan Unit Kerja yang dibawahinya; d. Menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan rencana kerja Perseroan pada bidang tugasnya yang dijabarkan dari RKAP dan RJPP; e. Mengadakan rapat internal secara berkala guna membahas permasalahan pada bidang tugasnya; f. Membantu Direktur Utama dalam mengkoordinasikan pengendalian atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan atau kebijakan strategis dan operasional Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sesuai ketentuan yang berlaku; g. Mengevaluasi pencapaian *Key Performance Indicators* individualnya secara berkala serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan; h. Menindaklanjuti temuan audit baik internal maupun eksternal pada bidang tugasnya; i. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; j. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan pada bidang perencanaan dan pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku;	a. Undertaking all actions related to the management of the Company within his area of responsibility with good faith and prudence for the benefit of the Company and in accordance with the Company's objectives and purposes; b. Representing the Company both in and out of court regarding all matters and events within his area of responsibility with limitations as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association, resolutions of the GMS, and/or resolutions of the Board of Directors; c. Directing, evaluating, and coordinating the Work Units under his supervision; d. Preparing, establishing, implementing, and controlling the Company's work plans within his area of responsibility as derived from the RKAP and RJPP; e. Holding regular internal meetings to discuss issues within his area of responsibility; f. Assisting the President Director in coordinating control or monitoring of the implementation of strategic and operational activities or policies of Subsidiaries/Joint Ventures in accordance with applicable regulations; g. Regularly evaluating the achievement of his individual Key Performance Indicators and formulating necessary corrective actions; h. Following up on audit findings, both internal and external, within his area of responsibility; i. Overseeing the smooth operation of the Company in accordance with established strategies and policies; j. Overseeing and evaluating the management of Subsidiaries/Joint Ventures in the areas of planning and development in accordance with applicable regulations;

Nama / Name	Jabatan / Position	Lingkup Tugas Pengawasan / Scope of Supervisory Duties	
Denaldy Mulino Mauna	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	k. Menjalankan dan mematuhi Ketentuan Perusahaan, *Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance*, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi; l. Menjalankan tugas selain sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Perusahaan, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS, dan/atau rapat Direksi.	k. Complying with and adhering to Company regulations, the Board Manual, the Code of Conduct, the Code of Corporate Governance, and the Gratuity Control Guidelines; l. Performing duties other than those specified in the Company's regulations, Articles of Association, laws and regulations, GMS resolutions, and/or Board meetings.
Seger Budiarjo	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Resources Director	a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian sesuai bidang tugasnya dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan/ atau Keputusan Direksi ini; c. Mengarahkan, mengevaluasi, dan meng-koordinasikan Unit Kerja yang dibawahinya; d. Menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan rencana kerja Perseroan pada bidang tugasnya sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; e. Mengadakan rapat internal secara berkala guna membahas permasalahan pada bidang tugasnya; f. Mengevaluasi pencapaian *Key Performance Indicators* individualnya secara berkala serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan; g. Menindaklanjuti temuan audit baik internal maupun eksternal pada bidang tugasnya; h. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; i. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan pada bidang sumber daya manusia dan teknologi informasi sesuai ketentuan yang berlaku; j. Menjalankan dan mematuhi Ketentuan Perusahaan, *Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance,* dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi; k. Menjalankan tugas selain sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Perusahaan, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS, dan/atau rapat Direksi.	a. Undertaking all actions related to the management of the Company within his area of responsibility with good faith and prudence for the benefit of the Company and in accordance with the Company's objectives and purposes; b. Representing the Company both in and out of court regarding all matters and events within his area of responsibility with limitations as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association, resolutions of the GMS, and/or resolutions of the Board of Directors; c. Directing, evaluating, and coordinating the Work Units under his supervision; d. Preparing, establishing, implementing, and controlling the Company's work plans within his area of responsibility in accordance with established strategies and policies; e. Holding regular internal meetings to discuss issues within his area of responsibility; f. Regularly evaluating the achievement of his individual Key Performance Indicators and formulating necessary corrective actions; g. Following up on audit findings, both internal and external, within his area of responsibility; h. Overseeing the smooth operation of the Company in accordance with established strategies and policies; i. Overseeing and evaluating the management of Subsidiaries/Joint Ventures in the areas of human resources and information technology in accordance with applicable regulations; j. Complying with and adhering to Company regulations, the Board Manual, the Code of Conduct, the Code of Corporate Governance, and the Gratuity Control Guidelines; k. Performing duties other than those specified in the Company's regulations, Articles of Association, laws and regulations, GMS resolutions, and/or Board meetings.
Dwi Sutoro	Direktur Pemasaran / Marketing Director	a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian sesuai bidang tugasnya dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan/ atau Keputusan Direksi ini;	a. Undertaking all actions related to the management of the Company within his area of responsibility with good faith and prudence for the benefit of the Company and in accordance with the Company's objectives and purposes; b. Representing the Company both in and out of court regarding all matters and events within his area of responsibility with limitations as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and/or resolutions of the Board of Directors;

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervisory Duties	
Dwi Sutoro	Direktur Pemasaran Marketing Director	c. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan Unit Kerja yang dibawahinya; d. Menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan rencana kerja Perseroan pada bidang tugasnya sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; e. Mengadakan rapat internal secara berkala guna membahas permasalahan pada bidang tugasnya; f. Mengevaluasi pencapaian *Key Performance Indicators* individualnya secara berkala serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan; g. Menindaklanjuti temuan audit baik internal maupun eksternal pada bidang tugasnya; h. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; i. Mengawasi dan mengevaluasi Perusahaan/ Perusahaan Patungan pada ketentuan yang berlaku; j. Mengevaluasi dan memantau kontrak penjualan komoditas utama (sawit, karet, gula, teh, kopi, kakao) pada Anak Perusahaan; k. Mengawasi dan mengevaluasi program Perseroan dan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan antara lain terkait sertifikasi produk berkelanjutan; l. Menjalankan dan mematuhi Ketentuan Perusahaan, *Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance,* dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi; m. Menjalankan tugas selain sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Perusahaan, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS, dan/atau rapat Direksi.	c. Directing, evaluating, and coordinating the Work Units under his supervision; d. Preparing, establishing, implementing, and controlling the Company's work plans within his area of responsibility in accordance with established strategies and policies; e. Holding regular internal meetings to discuss issues within his area of responsibility; f. Regularly evaluating the achievement of his individual Key Performance Indicators and formulating necessary corrective actions; g. Following up on audit findings, both internal and external, within his area of responsibility; h. Overseeing the smooth operation of the Company in accordance with established strategies and policies; i. Overseeing and evaluating the management of Subsidiaries/Joint Ventures in accordance with applicable regulations; j. Evaluating and monitoring sales contracts for main commodities (palm oil, rubber, sugar, tea, coffee, cocoa) in Subsidiaries; k. Overseeing and evaluating the Company's and Subsidiaries'/Joint Ventures' programs related to product sustainability certifications; l. Complying with and adhering to Company regulations, the Board Manual, the Code of Conduct, the Code of Corporate Governance, and the Gratuity Control Guidelines; m. Performing duties other than those specified in the Company's regulations, Articles of Association, laws and regulations, GMS resolutions, and/or Board meetings.
Ahmad Haslan Saragih	Direktur Pelaksana Managing Director	a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan lingkup Perseroan Operasional untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian pada lingkup Perseroan Operasional dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan/atau Keputusan Direksi ini; c. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan SEVP dan Unit Kerja yang dibawahinya; d. Menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan rencana kerja Perseroan pada lingkup Perseroan Operasional sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan e. Mengkoordinasikan perencanaan (termasuk penyusunan RKA Program TJSL Perseroan Operasional), pelaksanaan , pengawasan, monitoring, dan evaluasi Program TJSL lingkup Perseroan Operasional;	a. Undertaking all actions related to the management of the Company within the scope of Operational Company for the benefit of the Company and in accordance with the Company's objectives and purposes; b. Representing the Company both in and out of court regarding all matters and events within the scope of Operational Company responsibilities with limitations as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association, resolutions of the GMS, and/or resolutions of the Board of Directors; c. Directing, evaluating, and coordinating SEVP and the Work Units under his supervision; d. Preparing, establishing, implementing, and controlling the Company's work plans within the scope of Operational Company responsibilities in accordance with established strategies and policies; e. Coordinating the planning (including the preparation of the Budget for the Operational Company CSR Program), implementation, supervision, monitoring, and evaluation of the CSR Program within the scope of Operational Company responsibilities;

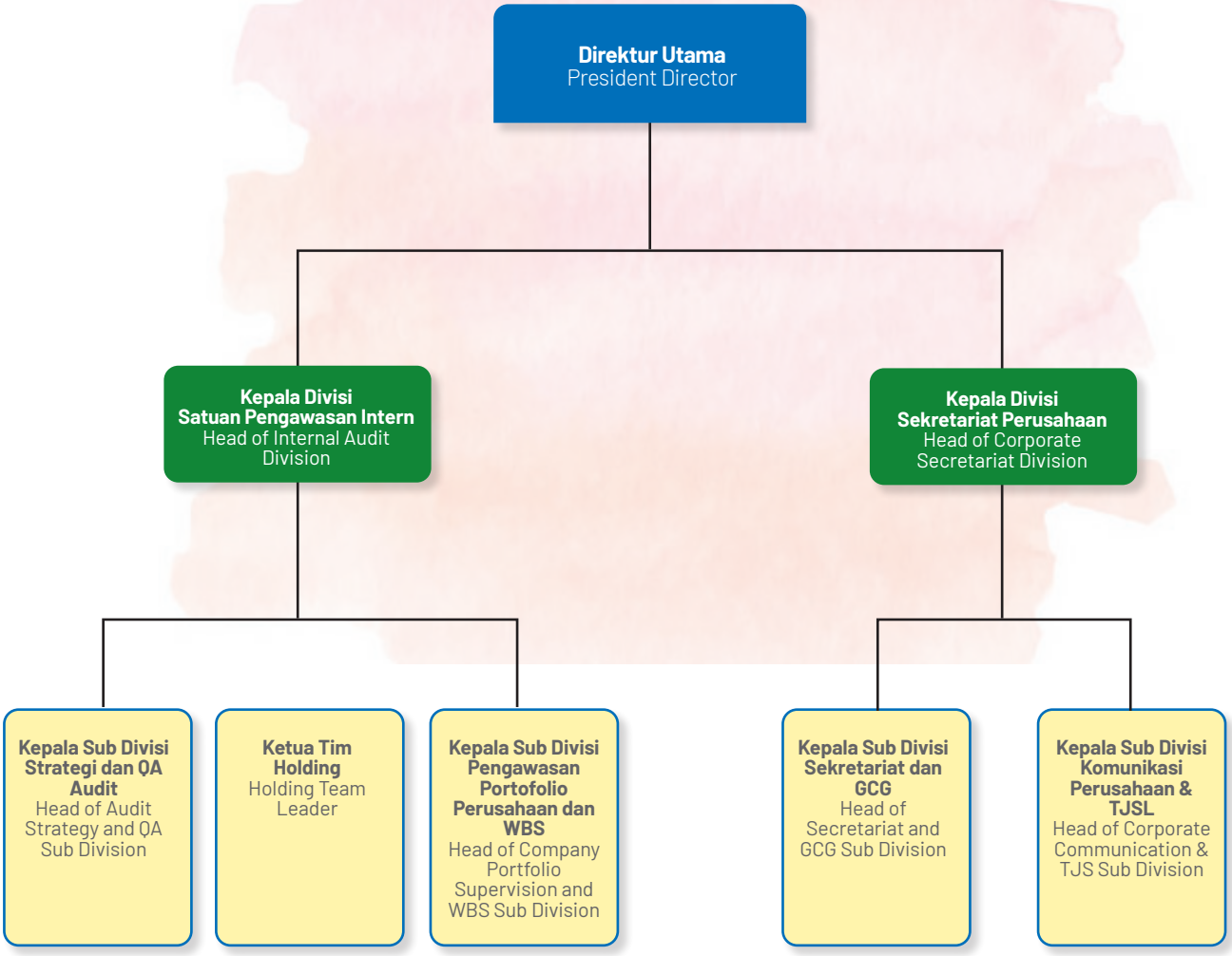
Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervisory Duties	
Ahmad Haslan Saragih	Direktur Pelaksana Managing Director	f. Mengadakan rapat internal secara berkala guna membahas permasalahan lingkup Perseroan Operasional; g. Mengevaluasi pencapaian *Key Performance Indicators* individualnya secara berkala serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan; h. Menindaklanjuti temuan audit baik internal maupun eksternal pada lingkup Perseroan Operasional; i. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; j. Mengusulkan kepada Direktur Utama atas rencana tindakan/perbuatan yang terkait dengan Perseroan Operasional yang memerlukan tanggapan tertulis/persetujuan Dewan Komisaris dan/atau persetujuan RUPS; k. Menyusun dan menyampaikan rancangan laporan tahunan lingkup Perseroan Operasional kepada Direksi; l. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Industri Sei Mangkei; m. Menjalankan dan mematuhi Ketentuan Perusahaan, *Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance,* dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi; n. Menjalankan tugas selain sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Perusahaan, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS, dan/atau rapat Direksi.	f. Holding regular internal meetings to discuss issues within the scope of Operational Company responsibilities; g. Regularly evaluating the achievement of his individual Key Performance Indicators and formulating necessary corrective actions; h. Following up on audit findings, both internal and external, within the scope of Operational Company responsibilities; i. Overseeing the smooth operation of the Company in accordance with established strategies and policies; j. Proposing action plans related to Operational Company activities requiring written responses/approvals from the Board of Commissioners and/or GMS approvals to the President Director; k. Preparing and presenting the draft annual report within the scope of Operational Company responsibilities to the Board of Directors; l. Coordinating, monitoring, and evaluating the management of Infrastructure Development at the Sei Mangkei Industrial Area; m. Complying with and adhering to Company regulations, the Board Manual, the Code of Conduct, the Code of Corporate Governance, and the Gratuity Control Guidelines; n. Performing duties other than those specified in the Company's regulations, Articles of Association, laws and regulations, GMS resolutions, and/or Board meetings.
M. Iswahyudi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian sesuai bidang tugasnya dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan/ atau Keputusan Direksi ini; c. Mengarahkan, mengevaluasi, dan meng-koordinasikan Unit Kerja yang dibawahinya; d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKAP lingkup Perseroan dan Anak Perusahaan; e. Mengkoordinasikan evaluasi terhadap rancangan RKAP Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan sebelum disahkan; f. Menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan rencana kerja Perseroan pada bidang tugasnya sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; g. Mengadakan rapat internal secara berkala guna membahas permasalahan pada bidang tugasnya;	a. Undertaking all actions related to the management of the Company within his area of responsibility with good faith and prudence for the benefit of the Company and in accordance with the Company's objectives and purposes; b. Representing the Company both in and out of court regarding all matters and events within his area of responsibility with limitations as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association, resolutions of the GMS, and/or resolutions of the Board of Directors; c. Directing, evaluating, and coordinating the Work Units under his supervision; d. Coordinating the preparation of the draft Annual Work and Budget Plan (RKAP) within the scope of the Company and its Subsidiaries; e. Coordinating the evaluation of the draft RKAP of Subsidiaries/Joint Ventures before its approval; f. Preparing, establishing, implementing, and controlling the Company's work plans within his area of responsibility in accordance with established strategies and policies; g. Holding regular internal meetings to discuss issues within his area of responsibility;

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervisory Duties	
M. Iswahyudi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	h. Mengevaluasi pencapaian *Key Performance Indicators* individualnya secara berkala serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan; i. Menindaklanjuti temuan audit baik internal maupun eksternal pada bidang tugasnya; j. Menyusun laporan keuangan Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit; k. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Anak Perusahaan; l. Mengevaluasi laporan keuangan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sebelum disahkan; m. Mengembangkan organisasi kerja manajemen risiko sehingga Perseroan memiliki kebijakan, prosedur, dan metode dalam menerapkan manajemen risiko; n. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; o. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan pada bidang keuangan, akuntansi, perbendaharaan, dan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku; p. Menjalankan dan mematuhi Ketentuan Perusahaan, *Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance,* dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi; q. Menjalankan tugas selain sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Perusahaan, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS, dan/atau rapat Direksi.	h. Regularly evaluating the achievement of his individual Key Performance Indicators and formulating necessary corrective actions; i. Following up on audit findings, both internal and external, within his area of responsibility; j. Preparing the Company's financial statements based on Financial Accounting Standards and submitting them to the public accountant for auditing; k. Coordinating the preparation of financial statements of Subsidiaries; l. Evaluating the financial statements of Subsidiaries/Joint Ventures before their approval; m. Developing the risk management organization to ensure that the Company has policies, procedures, and methods for implementing risk management; n. Overseeing the smooth operation of the Company in accordance with established strategies and policies; o. Overseeing and evaluating the management of Subsidiaries/Joint Ventures in the areas of finance, accounting, treasury, and risk management in accordance with applicable regulations; p. Complying with and adhering to Company regulations, the Board Manual, the Code of Conduct, the Code of Corporate Governance, and the Gratuity Control Guidelines; q. Performing duties other than those specified in the Company's regulations, Articles of Association, laws and regulations, GMS resolutions, and/or Board meetings.
Mahmudi	Direktur Produksi dan Pengembangan Production and Development Director	a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian sesuai bidang tugasnya dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan/ atau Keputusan Direksi ini; c. Mengarahkan, mengevaluasi, dan meng-koordinasikan Unit Kerja yang dibawahinya; d. Menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan rencana kerja Perseroan pada bidang tugasnya sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; e. Mengadakan rapat internal secara berkala guna membahas permasalahan pada bidang tugasnya; f. Mengevaluasi pencapaian Key *Performance Indicators* individualnya secara berkala serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan;	a. Undertaking all actions related to the management of the Company within his area of responsibility with good faith and prudence for the benefit of the Company and in accordance with the Company's objectives and purposes; b. Representing the Company both in and out of court regarding all matters and events within his area of responsibility with limitations as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and/or resolutions of the Board of Directors; c. Directing, evaluating, and coordinating the Work Units under his supervision; d. Preparing, establishing, implementing, and controlling the Company's work plans within his area of responsibility in accordance with established strategies and policies; e. Holding regular internal meetings to discuss issues within his area of responsibility; f. Regularly evaluating the achievement of his individual Key Performance Indicators and formulating necessary corrective actions;

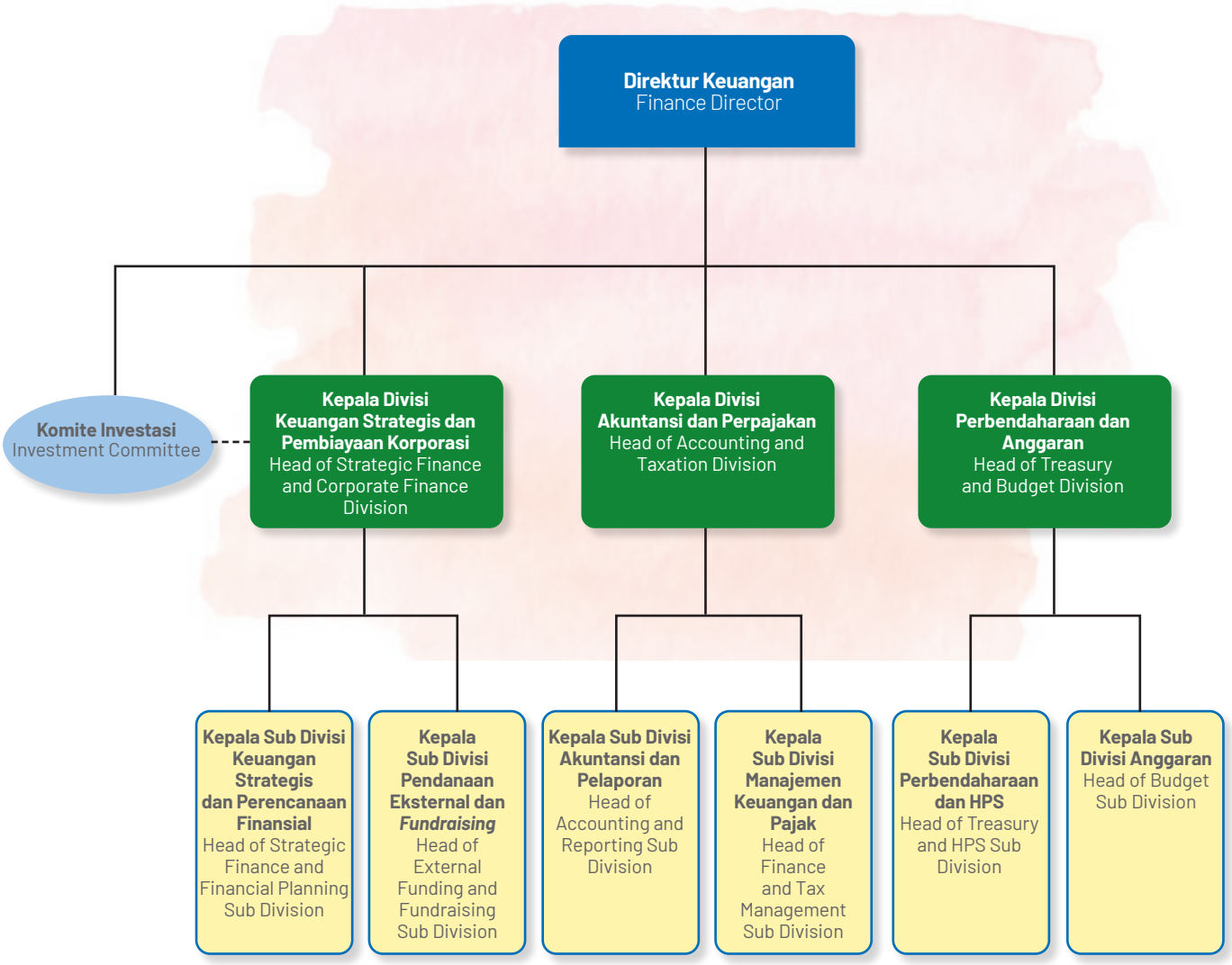
Nama / Name	Jabatan / Position	Lingkup Tugas Pengawasan / Scope of Supervisory Duties	
Mahmudi	Direktur Produksi dan Pengembangan / Production and Development Director	g. Menindaklanjuti temuan audit baik internal maupun eksternal pada bidang tugasnya; h. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; i. Mengawasi dan mengevaluasi Perusahaan/ Perusahaan Patungan pada pengembangan operasi; j. Menjalankan dan mematuhi Ketentuan Perusahaan, *Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance,* dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi; k. Menjalankan tugas selain sebagaimana dalam Ketentuan Perusahaan, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS, dan/atau rapat Direksi.	g. Following up on audit findings, both internal and external, within his area of responsibility; h. Overseeing the smooth operation of the Company in accordance with established strategies and policies; i. Overseeing and evaluating the development of operations within Subsidiaries/Joint Ventures; j. Complying with and adhering to Company regulations, the Board Manual, the Code of Conduct, the Code of Corporate Governance, and the Gratuity Control Guidelines; k. Performing duties other than those specified in the Company's regulations, Articles of Association, laws and regulations, GMS resolutions, and/or Board meetings.
Doni P. Gandamihardja	Direktur Umum / General Affairs Director	a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian sesuai bidang tugasnya dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan/ atau Keputusan Direksi ini; c. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan Unit Kerja yang dibawahinya; d. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Perseroan telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan serta menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; e. Menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan rencana kerja Perseroan pada bidang tugasnya sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; f. Mengadakan rapat internal secara berkala guna membahas permasalahan pada bidang tugasnya; g. Mengevaluasi pencapaian *Key Performance Indicators* individualnya secara berkala serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan; h. Menindaklanjuti temuan audit baik internal maupun eksternal pada bidang tugasnya; i. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; j. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan pada bidang hukum dan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; k. Menjalankan dan mematuhi Ketentuan Perusahaan *Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance,* dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi; l. Menjalankan tugas selain sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Perusahaan, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS, dan/atau rapat Direksi.	a. Undertaking all actions related to the management of the Company within his area of responsibility with good faith and prudence for the benefit of the Company and in accordance with the Company's objectives and purposes; b. Representing the Company both in and out of court regarding all matters and events within his area of responsibility with limitations as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, resolutions of the GMS, and/or resolutions of the Board of Directors; c. Directing, evaluating, and coordinating the Work Units under his supervision; d. Establishing necessary measures to ensure the Company complies with all laws and regulations and ensuring business activities do not deviate from such regulations; e. Preparing, establishing, implementing, and controlling the Company's work plans within his area of responsibility in accordance with established strategies and policies; f Holding regular internal meetings to discuss issues within his area of responsibility; g Regularly evaluating the achievement of his individual Key Performance Indicators and formulating necessary corrective actions; h. Following up on audit findings, both internal and external, within his area of responsibility; i. Overseeing the smooth operation of the Company in accordance with established strategies and policies; j. Overseeing and evaluating the management of Subsidiaries/Joint Ventures in the areas of law and procurement of goods/services in accordance with applicable regulations; k. Complying with and adhering to Company regulations, the Board Manual, the Code of Conduct, the Code of Corporate Governance, and the Gratuity Control Guidelines; l. Performing duties other than those specified in the Company's regulations, Articles of Association, laws and regulations, GMS resolutions, and/or Board meetings.

Nama Name	Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervisory Duties	
M. Arifin Firdaus	Direktur Hubungan Kelembagaan Institutional Relations Director	a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian sesuai bidang tugasnya dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan/atau Keputusan Direksi ini; c. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan Unit Kerja yang dibawahinya dan SEVP *Business Support* sesuai bidang tugasnya; d. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Perseroan telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan serta menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; e. Menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan rencana kerja Perseroan pada bidang tugasnya sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; f. Mengadakan rapat internal secara berkala guna membahas permasalahan pada bidang tugasnya; g. Mengevaluasi pencapaian *Key Performance Indicators* individualnya secara berkala serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan; h. Menindaklanjuti temuan audit baik internal maupun eksternal pada bidang tugasnya; i. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; j. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan pada bidang hukum, hubungan kelembagaan, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku; k. Mengkoordinasikan perencanaan (termasuk penyusunan RKA Program TJSL), pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Program TJSL pada lingkup Perseroan, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Patungan; l. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan laporan tahunan dan laporan pelaksanaan Program TJSL pada lingkup Perseroan; m. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan pada bidang hukum, hubungan kelembagaan, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan; n. Menjalankan dan mematuhi Ketentuan Perusahaan, *Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance*, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi; o. Menjalankan tugas selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perusahaan, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS, dan/atau rapat Direksi.	a. Conducting all actions related to the management of the Company within its area of responsibility with good faith and caution for the Company's interests and in accordance with the purpose and objectives of the Company; b. Representing the Company both inside and outside the court regarding all matters and events within its area of responsibility, subject to limitations as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and/or this Board of Directors' Decision; c. Directing, evaluating, and coordinating the Work Units under its supervision and the SEVP Business Support according to their respective areas of responsibility; d. Establishing necessary measures to ensure that the Company complies with all laws and regulations and to ensure that the Company's activities do not deviate from legal requirements; e. Developing, establishing, implementing, and controlling the Company's work plans within its area of responsibility in accordance with the established strategies and policies; f. Holding regular internal meetings to discuss issues within its area of responsibility; g. Periodically evaluating individual Key Performance Indicators' achievements and formulating necessary improvement actions; h. Following up on audit findings, whether internal or external, within its area of responsibility; i. Supervising the smooth operation of the Company in line with the established strategies and policies; j. Monitoring and evaluating the management of Subsidiaries/Joint Ventures in legal matters, institutional relations, and social and environmental responsibilities according to applicable regulations; k. Coordinating planning (including drafting the RKA Program TJSL), implementation, monitoring, and evaluation of the TJSL Program within the scope of the Company, Subsidiaries, and Joint Ventures; l. Coordinating the preparation of annual reports and the implementation reports of the TJSL Program within the Company's scope; m. Monitoring and evaluating the management of Subsidiaries/Joint Ventures in legal matters, institutional relations, and social and environmental responsibilities; n. Executing and complying with Company Regulations, Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance, and Gratification Control Guidelines; o. Carrying out tasks other than those mentioned in points a to n as stipulated in Company Regulations, Articles of Association, laws and regulations, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and/or Board of Directors meetings.

Struktur Organisasi Direktur Utama
Organizational Structure of the President Director

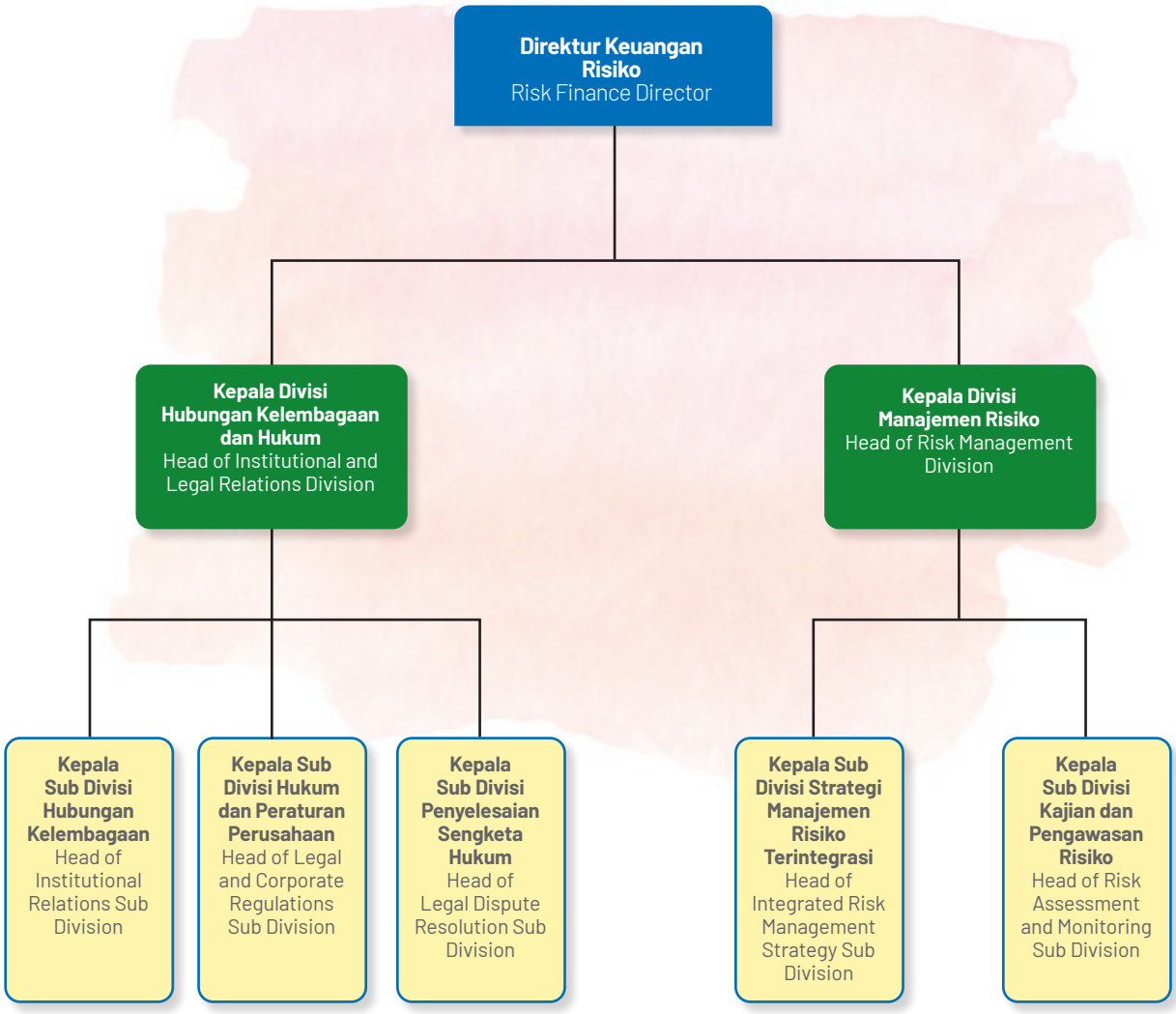


Struktur Organisasi Direktur Keuangan
Organizational Structure Of Finance Director



Garis Koordinasi
Coordination Line

Struktur Organisasi Direktur Manajemen Risiko
Organizational Structure of the Risk Management Director



Program Pengenalan Bagi Anggota Direksi

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas bagi anggota Direksi yang baru, maka anggota baru tersebut akan diberikan program pengenalan dengan tujuan agar anggota Direksi yang baru diangkat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Program Pengenalan bagi anggota Direksi telah tercatat pada pedoman GCG yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta ditandatangani pada Notulen Rapat No. 3.00/NR/5A/ III/2015 tanggal 17 Maret 2015. Rincian mengenai materi dan program pengenalan Perseroan bagi anggota Direksi yang baru diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.

Pada tanggal 22 Desember 2023 Perseroan telah mengadakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru.

Orientation Program for New Members of the Board of Directors

To enhance the effectiveness of the duties performed by newly appointed members of the Board of Directors, an orientation program is provided to ensure they can fulfill their responsibilities effectively. The Orientation Program for new members of the Board of Directors is documented in the GCG guidelines approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors, and recorded in Meeting Minutes No. 3.00/NR/5A/III/2015 dated March 17, 2015. The details of the material and orientation program for new members of the Board of Directors are outlined as follows:

1. Implementation of GCG principles by the Company;
2. Overview of the Company regarding its objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term work plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information regarding delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of the members of the Board of Directors, as well as prohibited matters.

On December 22, 2023, the Company conducted an orientation program for the new members of the Board of Directors.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Setiap tahun, seluruh anggota Direksi rutin mengikuti program pengembangan untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tanggung jawab mereka dalam mengelola Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar seluruh anggota Direksi dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Sepanjang tahun 2023, Seluruh anggota Direksi telah mengikuti kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Training and Competency Enhancement for the Board of Directors

Annually, all members of the Board of Directors participate in development programs to ensure that the Board of Commissioners possesses the necessary competencies to fulfill their responsibilities in managing the Company in accordance with applicable regulations. This is to ensure that all members of the Board of Directors meet the established standards.

Throughout 2023, all members of the Board of Directors participated in various training and competency enhancement activities, as detailed below:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Subject	Tanggal Pelaksanaan Date of Training	Penyelenggara Organizer
Mohammad Abdul Ghani	*Certified Risk Executive Leader* (CREL)	2023	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
Denaldy Mulino Mauna	• *Benchmark* ke Australia • *Benchmark* ke Brazil • Benchmark to Australia • Benchmark to Brazil	2023	*Holding* PTPN III (Persero)
Seger Budiarjo	• *Special Directorship Program* • CHRO *School* Tahun 2023 • Special Directorship Program • CHRO School in 2023	26-27 Juli 2023 July 26-27, 2023	Indonesia Institute For Corporate Directorship
Dwi Sutoro	CBDO *Innovation School Cohort 1*	• 10-11 Februari 2023 • 9, 16, 17, 24, dan 29 Maret 2023 • 5 April 2023 • February 10-11, 2023 • March 9, 16, 17, 24, and 29, 2023 • April 5, 2023	BUMN Leadership & Management Institute
M. Iswahyudi	*Special Directorship Program*	26-27 Juli 2023 July 26-27, 2023	Indonesia Institute For Corporate Directorship
Mahmudi	• *Benchmark Sime Darby* Malaysia • *Benchmark* ke Australia • Benchmark Sime Darby Malaysia • Benchmark to Australia	1-5 Maret 2023 March 1-5, 2023	Holding PTPN III (Persero)
Doni P. Gandamihardja	*Certified Risk Executive Leader* (CREL)	2023	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Selama Tahun 2023

Hingga akhir tahun 2023, seluruh anggota Direksi telah menjalankan tugas, tanggung jawab, serta kewajibannya dalam mengurus Perseroan. Berikut merupakan rincian mengenai keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi di tahun 2023.

Execution of Duties and Responsibilities of the Board of Directors in 2023

Until the end of 2023, all members of the Board of Directors have carried out their duties, responsibilities, and obligations in managing the Company. Below is a summary of the decisions made by the Board of Directors in 2023.

No.	Tanggal Date	Nomor Surat Letter No.	Perihal Subject
1.	10 Januari 2023 January 10, 2023	DIR/KEP/01/2023	Pemberian Pinjaman Pemegang Saham (*Shareholder Loan*) Kepada PT Perkebunan Mitra Ogan Provision of Shareholder Loan to PT Perkebunan Mitra Ogan
2.	10 Januari 2023 January 10, 2023	DKSK/KEP/02/2023	Penyesuaian Alokasi Program Kerja yang Dibiayai dana Pinjaman Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan ekonomi Nasional tahun 2023 Adjustment of Work Program Allocation Funded by Government Investment Loans for the National Economic Recovery Program 2023
3.	16 Januari 3023 January 16, 2023	DTRS/KEP/04/2023	Penetapan Rekanan Terseleksi Tertentu Katagori Penyedian Jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek (*Lead Underwriter*) Appointment of Selected Certain Partner Category for Lead Underwriter Services
4.	27 Januari 2023 January 27, 2023	DPMR/KEP/07/2023	Implementasi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("RKAP") PTPN *Tranche Green, Tranche Yellow, Tranche Red* tahun 2023 Implementation of the Company's Budget Work Plan ("RKAP") PTPN Tranche Green, Tranche Yellow, Tranche Red 2023
5.	07 Februari 2023 February 7, 2023	DKSK/KEP/09/2023	Pembahasan *Intercompany Loan Agreement* (ICLA) Perkebunan Nusantara III (Persero) Kepada PT Perkebunan Nusantara V untuk Pembayaran Kewajiban Jatuh Tempo Sukuk Ijarah II Discussion of Intercompany Loan Agreement (ICLA) Perkebunan Nusantara III (Persero) to PT Perkebunan Nusantara V for Payment of Due Sukuk Ijarah II Obligations
6.	27 Februari 2023 February 27, 2023	DOAT/KEP/14/2023	Persetujuan Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Kajian Kelayakan Peengembangan Areal tebu dalam Rangka Program Swasembada Gula dan Bethanol Approval of Procurement of Consultancy Services for Feasibility Study of Sugarcane Area Development for Sugar and Bioethanol Self-sufficiency Program
7.	06 Maret 2023 March 6, 2023	DBSS/KEP/15/2023	Perubahan atas Kompensasi pada KSO Kebun dan PKS PTPN VIII Changes in Compensation for KSO Plantation and PKS PTPN VIII
8.	16 Maret 2023 March 16, 2023	DSDM/KEP/19/2023	Sirkuler Pencadangan Bonus Tahun Buku 2022 Circular Bonus Reserves for Fiscal Year 2022
9.	27 Maret 2023 March 27, 2023	DTRS/KEP/20/2023	Persetujuan penghapusbukuan dan pemindahtanganan Aktiva tetap seluas 7,3265 Ha di Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Approval of Write-off and Transfer of Fixed Assets covering 7.3265 Ha in Serpong District, Tangerang Regency, Banten Province
10.	27 Maret 2023 March 27, 2023	DTRS/KEP/21/2023	Persetujuan Perubahan Penggunaan sisa dana tambahan penyertaan modal negara tahun 2015 Approval of Changes in the Use of Remaining Funds from State Capital Participation in 2015
11.	27 Maret 2023 March 27, 2023	DSDM/KEP/22/2023	Pengadaan jasa konsultasi implementasi grading remunerisasi dan remunerisasi pada pembentukan *Subholding* dan Anak Perusahaan Non PTPN *Holding* Perkebunan Procurement of Consultancy Services for Implementation of Grading and Remuneration System and Remuneration for the Formation of Sub Holdings and Non-PTPN Holding Perkebunan Subsidiaries
12.	30 Maret 2023 March 30, 2023	DKSK/KEP/ 24 /2023	Skema Realokasi Dana IP PEN *Off Farm* Komoditi Tebu Sehubungan Perkembangan Restrukturisasi Bisnis Gula Scheme for Reallocation of IP PEN Off-Farm Commodity Funds Related to the Development of Sugar Business Restructuring
13.	03 April 2023 April 3, 2023	DTRS/KEP/ 25 /2023	Penetapan Rekanan Terseleksi Tertentu Kategori Penyedia Jasa Konsultasi Transformasi Bisnis Gula PTPN Gula Appointment of Selected Certain Partner Category for Consultancy Services for Sugar Business Transformation PTPN Gula
14.	28 April 2023 April 28, 2023	DBSS/KEP/31/2023	Tentang Penambahan Objek Kerja Sama Sewa antara PTPN III (Persero) dan PT Sri Pamela Medika Nusantara Addition of Lease Cooperation Object between PTPN III (Persero) and PT Sri Pamela Medika Nusantara
15.	03 Mei 2023 May 3, 2023	DTRS/KEP/31.1/2023	Pemisahaan Tidak Murni *(Spin Off)* Sebagian Aset dan Liabilitas PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ke dalam PT Perkebunan Nusantara IV Partial Spin-off of Assets and Liabilities from PT Perkebunan Nusantara III (Persero) to PT Perkebunan Nusantara IV

No.	Tanggal Date	Nomor Surat Letter No.	Perihal Subject
16.	16 Mei 2023 May 16, 2023	DKSK/KEP/ 32 /2023	Transportasi Keuangan dengan Skema *Repackaging* dalam Rangka Integritas PTPN Financial Transportation with Repackaging Scheme for PTPN Integration
17.	29 Mei 2023 May 29, 2023	DKSK/KEP/33/2023	Pengajuan *Intercompany Loan Agreement* (ICLA) PTPN III (Persero) kepada PTPN V untuk Kebutuhan Modal Kerja Operasional Submission of Intercompany Loan Agreement (ICLA) PTPN III (Persero) to PTPN V for Operational Working Capital Needs
18.	29 Mei 2023 May 29, 2023	DKSK/KEP/ 34 /2023	Perubahan Pinjaman SHL PT Perkebunan Mitra Ogan Changes to SHL Loan for PT Perkebunan Mitra Ogan
19.	23 Juni 2023 June 23, 2023	DKSK/KEP/ 40 /2023	Keputusan Direksi PTPN III (Persero) di Luar Rapat Direksi tentang Perubahan Alokasi Dana IP PEN *On Farm* Komoditi Kelapa Sawit Periode Tahun 2023 Board of Directors Decision of PTPN III (Persero) Outside of Board Meetings on Changes to IP PEN On-Farm Commodity Fund Allocation for Palm Oil in 2023
20.	26 Juni 2023 June 26, 2023	TIMPEN/ KEP/42/2023	Perubahan Alokasi Dana IP PEN *On Farm* Komoditi Kelapa Sawit Periode Tahun 2023 Changes to IP PEN On-Farm Commodity Fund Allocation for Palm Oil in 2023
21.	26 Juni 2023 June 26, 2023	DRU/KEP/43/2023	Persetujuan Penghentian Kerjasama Penelitian Pengembangan dan penggunaan Bibit Kelapa Sawit Klonal Approval of Termination of Cooperation for Research and Development and Use of Clonal Palm Oil Seeds
22.	26 Juni 2023 June 26, 2023	DKSK/KEP/44/2023	Keputusan Direksi PTPN III (Persero) di Luar Rapat Direksi tentang Perubahan Persetujuan Direksi Terkait Transformasi Keuangan dengan Skema *Repackaging* Dalam Rangka Integrasi PTPN Board of Directors Decision of PTPN III (Persero) Outside of Board Meetings on Changes to Financial Transformation Approval with Repackaging Scheme for PTPN Integration
23.	13 Juli 2023 July 13, 2023	DSDM/KEP/ 48 /2023	Penghasilan Tahun 2023 dan Tantiem/insentif khusus tahun Buku 2022 Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Bonus SEVP anak Perusahaan PTPN III (Persero) 2023 Income and Tantiem/Special Incentives for the 2022 Fiscal Year for the Board of Directors, Board of Commissioners, and SEVP Bonuses for PTPN III (Persero) Subsidiaries
24.	21 Juli 2023 July 21, 2023	DKSK/KEP/ 51 /2023	Persetujuan Direksi terkait Pencairan Skema *Repackaging* diluar Hari Terakhir periode Bunga dan Pembayaran Tambahan Biaya Board Approval on Disbursement Scheme for Repackaging outside of the Last Interest Period and Additional Cost Payment
25.	18 Agustus 2023 August 18, 2023	DKSK/KEP/ 55 /2023	Pembahasan Pelunasan Sebagian MTN IV PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Discussion of Partial Repayment of MTN IV PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
26.	22 Agustus 2023 August 22, 2023	DSDM/KEP/ 59 /2023	Perubahan Peraturan Direksi Nomor: DIR/PER/7/2020 Tentang SEVP Anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Changes to Board of Directors Regulation Number: DIR/PER/7/2020 on SEVP of Subsidiaries of PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
27.	22 Agustus 2023 August 22, 2023	KOMIS/KEP/ 60 /2023	Pedoman Teknis Tata Kelola Investasi di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group Technical Guidelines for Investment Governance within Perkebunan Nusantara Group
28.	15 September 2023 September 15, 2023	DTRS/KEP/ 62 /2023	Persetujuan Prinsip Penjualan Aset Komplek Gembira Approval of Principle Sale of Gembira Complex Assets
29.	9 Oktober 2023 October 9, 2023	TIMPEN/KEP/ 65 /2023	Pembrian Pinjaman Kepada Anak Perusahaan yang Bersumber dari Pinjaman Dana Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional atas Persetujuan Rencana Anggaran Belanja dan Realokasi Tahun 2023 Provision of Loans to Subsidiaries Sourced from Government Investment Funds for the National Economic Recovery Program upon Approval of Budget and Reallocation Plan 2023
30.	11 Oktober 2023 October 11, 2023	TIMPEN/KEP/ 68 /2023	Perubahan Perjanjian Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia Kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Dalam Bentuk Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Changes to the Loan Agreement of Government Investment Funds to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the Framework of National Economic Recovery

No.	Tanggal Date	Nomor Surat Letter No.	Perihal Subject
31.	12 Oktober 2023 October 12, 2023	DTRS/KEP/70/2023	Persetujuan Perubahan Alas Hak Atas Tanah PT Perkebunan Nusanatara II Seluas 608,85 ha dari Hak Guna Usaha Menjadi Hak Guna Pengelolaan Approval of Changes to Land Rights of PT Perkebunan Nusantara II Covering 608.85 ha from Right to Cultivate to Management Rights
32.	19 Oktober 2023 October 19, 2023	DTRS/KEP/ 72 /2023	Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap di Kebun Adolina untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) UIP Sumbagut Approval of Write-off and Transfer of Fixed Assets in Adolina Plantation for Infrastructure Development by PT PLN (Persero) UIP Sumbagut
33.	23 Oktober 2023 October 23, 2023	DTRS/KEP/73/2023	Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Unit Tebenan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV PLTU Sumsel 1-Betung Approval of Write-off and Transfer of Fixed Assets in Tebenan Plantation for the Construction of 275 kV Ultra High Voltage Transmission Line (Sutet) from PLTU Sumsel 1 to Betung
34.	23 Oktober 2023 October 23, 2023	DTRS/KEP/74/2023	Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Kebun Gedeh (Goalpara) seluas 42.838 m^2 untuk Hunian Tetap Relokasi Korban Bencana Pergerakan Tanah di Kabupaten Sukabumi Approval of Write-off of Fixed Assets in Gedeh Plantation (Goalpara) covering 42,838 m^2 for Permanent Housing Relocation of Victims of Ground Movement Disaster in Sukabumi Regency
35.	24 oktober 2023 October 24, 2023	DTRS/KEP/76/2023	Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tanah Eks Hak Guna Usaha Seluas 1.133.915 m^2 Beserta Aset Tanaman Sawit Di Atasnya Approval of Write-off and Transfer of Former Cultivation Rights Land Covering 1,133,915 m^2 and Palm Oil Assets on It
36.	25 Oktober 2023 October 25, 2023	TIMPEN/KEP/77/2023	Penyesuaian Rencana Anggaran Belanja Final Dana IP PEN TAHUN 2023 Adjustment of Final Budget Plan for IP PEN Funds in 2023
37.	31 Oktober 2023 October 31, 2023	DHKM/KEP/ 80 /2023	Persetujuan Perubahan Tempat Kedudukan, Kantor Pusat, dan Alamat PT Perkebunan Nusantara III Approval of Changes in Location, Headquarters, and Address of PT Perkebunan Nusantara III
38.	10 November 2023 November 10, 2023	DKSK/KEP/ 84 /2023	Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Diluar Rapat Direksi tentang Pembahasan Pelaksanaan Pelunasan Sebagian (*Partial Buyback*) MTN Seri IV PTPN III (Persero) Setiap Kelipatan Rp 10 Milyar Board of Directors Decision of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Outside of Board Meetings on Partial Buyback Execution of MTN Series IV PTPN III (Persero) Every Multiple of Rp 10 Billion
39.	10 November 2023 November 10, 2023	DPDU/KEP/ 85 /2023	Persetujuan Penetapan Peraturan Direksi PTPN III Tentang Perubahan atas peraturan DIR PER 08 Approval of Board of Directors Regulation of PTPN III on Changes to Regulation DIR PER 08
40.	13 November 2023 November 13, 2023	TIMPEN/ KEP/89/2023	Pemberian Pinjaman kepada PTPN XIII yang Berumber dari Pinjaman Dana Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Provision of Loans to PTPN XIII Sourced from Government Investment Funds for the National Economic Recovery Program
41.	22 November 2023 November 22, 2023	DTRS/KEP/ 89.2 /2023	Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap untuk Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Seksi I Approval of Write-off and Transfer of Fixed Assets for the Construction of Probolinggo-Banyuwangi Section I Toll Road
42.	22 November 2023 November 22, 2023	DTRS/KEP/ 89.3 /2023	Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Sebagian HGU Nomor 126 untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Binjai-Langsa di Kebun Pulau Tiga Approval of Write-off and Transfer of Part of HGU Number 126 for the Construction of Binjai-Langsa Toll Road in Pulau Tiga Plantation
43.	23 November 2023 November 23, 2023	DIV/KEP/ 90 /2023	Persetujuan Skema Pendanaan Importasi Gula 79.095 ton Approval of Funding Scheme for Sugar Importation of 79,095 tons
44.	4 Desember 2023 December 4, 2023	DKSK/KEP/ 94 /2023	Pembaharuan Perjanjian Pinjaman kepada Anak Perusahaan yang Bersumber dari Pinjaman Dana Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi nasional Pasca Integrasi PTPN Group Renewal of Loan Agreement to Subsidiaries Sourced from Government Investment Funds for the National Economic Recovery Post-PTPN Group Integration

No.	Tanggal / Date	Nomor Surat / Letter No.	Perihal / Subject
45.	15 Desember 2023 / December 15, 2023	DSDM/KEP/97/2023	Penghasilan Tahun Buku 2023 bagi Direksi, Dewan Komisaris Region Head dan SEVP PTPN I, IV dan SGN / Income for Fiscal Year 2023 for Directors, Board of Commissioners Region Head and SEVP PTPN I, IV and SGN
46.	21 Desember 2023 / December 21, 2023	DTRS/KEP/ 99 /2023	Adendum Perjanjian Usaha Patungan / Addendum to Joint Venture Agreement

Hingga akhir tahun 2023, seluruh anggota Direksi telah menjalankan tugas, tanggung jawab, serta kewajibannya dalam mengurus Perseroan. Berikut merupakan rincian mengenai keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi di tahun 2023.

Until the end of 2023, all members of the Board of Directors have carried out their duties, responsibilities, and obligations in managing the Company. Below is a summary of the decisions made by the Board of Directors in 2023.

Informasi Tentang Komite di Bawah Direksi

Tidak terdapat informasi mengenai komite yang berada di bawah naungan Direksi, hal tersebut karena pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, serta Satuan Pengawasan Intern dan organ fungsional lainnya.

Information About Committees Under the Board of Directors

There is no information regarding committees under the supervision of the Board of Directors, as the execution of the duties and responsibilities of the Board of Directors has been assisted by the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit, and other functional organs.



TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

TRANSPARENCY OF INFORMATION ABOUT THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Asesmen Penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi

Setiap tahun, Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai organ utama dalam Perseroan, perlu diberikan *assesment* dan pemantauan Hasil Tata Kelola melalui mekanisme penilaian penerapan secara periodik. Hal tersebut merupakan suatu keharusan, karena Perseroan merupakan anak usaha dari BUMN yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN. Selain itu, penilaian penerapan GCG dilakukan dengan mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian ini mencakup kriteria yang mencakup aspek Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Assessment of GCG Implementation for the Board of Commissioners and Board of Directors

Every year, the Board of Commissioners and the Board of Directors, as the main organs of the Company, must undergo assessment and monitoring of governance results through periodic evaluation mechanisms. This is a necessity because the Company is a subsidiary of a State-Owned Enterprise (SOE) that is directed to implement GCG principles at SOE standards. Furthermore, the assessment of GCG implementation is conducted by referring to the Copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs. This assessment method includes criteria covering aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors, in accordance with the indicators stipulated in the regulation.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Setiap tahun, Dewan Komisaris dan Direksi akan diberikan evaluasi atas kinerja mereka dengan menggunakan realisasi *Key Performance Indicators* (KPI), yang merupakan indikator keberhasilan kinerja Dewan Komisaris secara kolektif. Pada tahun 2023, hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian KPI mencapai skor 93,9 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 Evaluasi kinerja Dewan Komisaris tersebut akan dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

Performance Evaluation of the Board of Commissioners and Board of Directors

Every year, the Board of Commissioners and the Board of Directors are evaluated on their performance using the realization of Key Performance Indicators (KPIs), which are the indicators of the collective performance success of the Board of Commissioners. In 2023, the performance evaluation results of the Board of Commissioners based on KPI achievement reached a score of 93.9 out of the target set at 100 The detailed evaluation of the performance of the Board of Commissioners is as follows:

No.	Aspek Aspect	Indikator Kinerja Performance Indicators	Satuan Bobot Unit Weight	Target Target		Realisasi Realization		Keluaran Output
				Target Target	Realisasi Realization	Skor Score		
I.	Pengawasan atas Perspektif Keuangan Supervision of Financial Perspectives	1. Telaah Pencapaian Kinerja Keuangan Korporasi Konsolidasi Review of Consolidated Corporate Financial Performance Achievements	Telaah Review	6	1	1	6	Laporan Evaluasi atas Kinerja Keuangan Perusahaan secara Korporasi Evaluation Report on Corporate Financial Performance
		2. Telaah Pencapaian Kinerja Keuangan Unit Bisnis/Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan Review of Financial Performance Achievements of Business Units/Subsidiaries/ Joint Companies	Telaah Review	6	1	1	6	Laporan Evaluasi atas Kinerja Keuangan Unit Bisnis/Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan Evaluation Report on the Financial Performance of Business Units/Subsidiaries/ Joint Companies
		3. Telaah Penggunaan Dana PMN Review of the Use of PMN Funds	Telaah Review	6	1	3	6,6	Laporan Evaluasi atas Realisasi Penggunaan PMN Evaluation Report on the Realization of PMN Use
		4. Telaah Penggunaan Dana PEN Review of the Use of PEN Funds	Telaah Review	6	1	1	6	Laporan Evaluasi atas Realisasi Penggunaan Dana PEN Evaluation Report on the Realization of the Use of PEN Funds
II.	Pengawasan atas Perspektif Produk dan Pelayanan Supervision of Product and Service Perspectives	1. Telaah Produksi dan Produktivitas Kebun Sendiri Review of Own Garden Production and Productivity	Telaah Review	4	1	12	4,4	Laporan Evaluasi Produksi dan Produktivitas Komoditas Utama Perusahaan Production and Productivity Evaluation Report of the Company's Main Commodities
		2. Telaah Pembelian Pihak Ketiga Review Third Party Purchases	Telaah Review	4	1	12	4,4	Laporan Evaluasi Pembelian Pihak Ketiga Third Party Purchase Evaluation Report
		3. Kunjungan Kerja ke Unit Bisnis/Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Working Visits to Business Units/Subsidiaries/Joint Companies	Telaah Review	12	12	16	13,2	Laporan Kunjungan Kerja ke Unit Bisnis/Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Work Visit Report to Business Unit/Subsidiary/Joint Company
		4. Telaah Pelaksanaan Investasi Review of Investment Implementation	Telaah Review	4	1	2	4,4	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Investment Implementation Evaluation Report
		5. Telaah Areal *Replanting* atau Konversi Lahan Review the Replanting or Land Conversion Area	Telaah Review	3	1	1	3	Laporan Evaluasi Pelaksanaan *Replanting* atau Konversi tanaman Evaluation Report on the Implementation of Replanting or Plant Conversion
		6 Telaah Kebijakan Pemasaran dan Implementasi Review of Marketing Policy and Implementation	Telaah Review	3	1	2	3,3	Laporan Evaluasi Realisasi Kuantum Penjualan dan Harga Penjualan Sales Quantum Realization and Sales Price Evaluation Report

No.	Aspek Aspect	Indikator Kinerja Performance Indicators	Satuan Bobot Unit Weight	Target Target		Realisasi Realization		Keluaran Output
				Target Target	Realisasi Realization	Skor		
III.	Pengawasan atas Perspektif *Stakeholder* Oversight of Stakeholder Perspectives	1. Telaah Pemantauan GCG Review of GCG Monitoring	Telaah Review	3	1	0	0	Laporan Evaluasi Tindak Lanjut *Area of Improvement* GCG GCG Area of Improvement Follow-up Evaluation Report
		2. Telaahan Pengawasan Ekstern Review of External Monitoring	Telaah Review	3	2	3	3,3	Laporan Evaluasi atas Kinerja KAP Evaluation Report on KAP Performance
IV.	Pengawasan atas Perspektif Proses Bisnis Oversight of the Business Process Perspective	1. Telaah RJPP, RKAP, RKA PKBL, dan Rekomendasi/ Persetujuan atas Aksi Korporasi Review of RJPP, RKAP, RKA PKBL, and Recommendations/ Approval of Corporate Actions	Telaah Review	4	2	2	4	Tanggapan atas Usulan RJPP 2020-2024 Response to the 2020-2024 RJPP Proposal
		2. Telaah terhadap Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Review of Risk Management and Internal Control	Telaah Review	4	2	3	4,4	
		3. Telaah atas Kinerja Direksi dan Perusahaan Review of the Performance of the Board of Directors and the Company	Telaah Review	2	1	1	2	Laporan Evaluasi atas Kinerja Direksi dan Perusahaan Evaluation Report on the Performance of the Board of Directors and the Company
		4. Telaah Kebijakan, Pengembangan, dan Produktivitas SDM Review of HR Policy, Development and Productivity	Telaah Review	2	1	4	2,2	
		5. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris Organizing Board of Commissioners Meetings	Telaah Review	12	12	79	13,2	Risalah Rapat Dewan Komisaris Minutes of Board of Commissioners Meetings
		6. Telaah atas Tata Kelola Teknologi Informasi Review of Information Technology Governance	Telaah Review	4	1		0	Telaah atas Kebijakan Tata Kelola Teknologi IT Review of IT Technology Governance Policies
V.	Pengawasan atas Perspektif Supervision of Learning Perspectives	1. Penyusunan Kebijakan Dewan Komisaris Preparation of Board of Commissioners Policies	Telaah Review	2	1	0	0	Laporan Evaluasi atas Struktur Organisasi PTPN Evaluation Report on PTPN Organizational Structure
		2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan Preparation of Work Plans and Budgets as well as Quarterly Reports and Annual Reports	Telaah Review	7	5	3	4,2	RKA Dewan Komisaris RKA of the Board of Commissioners
		3. Seminar/Pelatihan/ *Benchmark* Kepada Industri Leader Seminar/Training/ Benchmark for Industry Leaders	Telaah Review	3	3	12	3,3	Laporan Seminar/Pelatihan/ *Benchmark* Seminar/Training/ Benchmark Reports
	Jumlah Total			**100**	**52**	**158**	**93,9**	

Penilaian Direksi

Evaluasi atas kinerja Direksi setiap tahunnya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI). Selain itu, kriteria kinerja Direksi juga dapat diajukan secara individu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, atau Dewan Komisaris untuk disetujui dalam RUPS dengan batas minimal harus mencakup hal-hal berikut:

1. Penyusunan KPI pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya;
2. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris;
3. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perseroan;
4. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu;
5. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perseroan;
6. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan;
7. Pencapaian target Perseroan yang tertuang dalam RKAP dan Kontrak Manajemen.

Pencapaian KPI Direksi pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Evaluation of the Board of Directors

The performance evaluation of the Board of Directors is determined annually at the General Meeting of Shareholders (GMS) based on Key Performance Indicators (KPIs). Additionally, the performance criteria of the Board of Directors can also be individually proposed by the Nomination and Remuneration Committee, or the Board of Commissioners for approval at the GMS, and must at least include the following:

1. Formulation of KPIs at the beginning of the year and evaluation of their achievement;
2. Attendance at Board of Directors meetings and meetings with the Board of Commissioners;
3. Contribution to the company's business activities;
4. Involvement in specific assignments;
5. Commitment to advancing the company's interests;
6. Compliance with applicable laws and company policies;
7. Achievement of the company's targets outlined in the RKAP and Management Contract.

Achievements of Director KPIs in 2023 are as follows:



No	KPI	Formula Indikator Indicator Formula	Satuan Unit	Target Target	Realisasi Realization	Polaritas Polarity	Bobot Weight			
							Sub Sub			Total Total
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia | Economic and Social Value for Indonesia										
A.1 Finansial | Financial										
1	EBITDA	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	12.606,74	10.249.939	*Maximize*	10		8,27	
2	ROIC >= WACC	ROIC >= WACC	%	1,62	(3,18)	*Maximize*	5		2,54	
3	*Interest Bearing Debt to* EBITDA	*Interest Bearing Debt to* EBITDA	X	3,18	3,57	*Minimize*	5		4,46	
4	*Interest Bearing Debt to Invested Capital*	*Interest Bearing Debt: (Equity+Interest Bearing Debt)*	%	37,78	36,42	*Minimize*	7		7,31	
A.2 Operasional | Operational										
5	Produksi per Ha Production per Ha	Produksi per Ha (CPO, Tebu Sendiri, Teh Kering, Karet Kering dan Kopi) Production per Ha (CPO, Own Sugarcane, Dry Tea, Dry Rubber, and Coffee)	Ton/ Ha	5,017	4,32	*Maximize*	10		8,60	
								48		37,41
6	Sertifikasi CPO (RSPO) CPO Certification (RSPO)	Jumlah Unit tersertifikasi RSPO PTPN Group Unit Number of RSPO certified units PTPN Group Unit	%	100,00	92,31	*Maximize*	5		4,62	
A.3 Sosial | Social										
7	Pembelian Bahan Baku Dari Pihak III/ Petani/Plasma Purchase of Raw Materials From Third Parties/Farmers/ Plasma	Volume Pembelian TBS + Volume Pembelian Tebu seluruh PTPN dalam setahun FFB Purchase Volume + Total Sugar Cane Purchase Volume for all PTPN in a year	Ton	9.694.086	2.887.256	*Maximize*	3		0,89	
8	Peremajaan Sawit Rakyat Smallholder Oil Palm Rejuvenation	Peremajaan Sawit Rakyat Smallholder Oil Palm Rejuvenation	Ha	10.814	2.744	*Maximize*	3		0,76	

No	KPI	Formula Indikator Indicator Formula	Satuan Unit	Target Target	Realisasi Realization	Polaritas Polarity	Bobot Weight			
							Sub Sub			Total Total
B. Inovasi Model Bisnis | Business Model Innovation										
1.	Penataan komposisi tanaman melalui replanting/konversi/ kerja sama Plant composition arrangement through replanting/ conversion/ cooperation	Jumlah areal (TU/TK/TB) komoditi sawit + Jumlah areal Plant Cane (PC) Tebu + Jumlah areal (TU/ TK/TB) komoditi karet + Jumlah areal (TU/TK/TB) teh + Jumlah areal (TU/ TK/ TB) kopi Total area (TU/TK/TB) of oil palm commodity + Total area of Plant Cane (PC) for Sugar Cane + Total area (TU/TK/TB) of rubber commodity + Total area (TU/TK/TB) of tea + Total area (TU/TK/TB) of coffee	Ha	51.321,68	44.335,62	*Maximize*	8		6,91	15,01
2.	Integrasi Grup Usaha PTPN III (Persero) Integration of PTPN III Business Group (Persero)		%	100,00	90,00	*Maximize*	9		8,10	
C. Kepemimpinan Teknologi | Technology Leadership										
1.	Implementasi Sistem Informasi Geografis Implementation of Geographic Information Systems	Jumlah Kebun yang mengimplementasikan SIG/Total kebun untuk Komoditi Kelapa Sawit Number of plantations implementing GIS/Total plantations for Oil Palm Commodities	%	100	100	*Maximize*	2			
2.	Implementasi *Digital Farming* Digital Farming Implementation	Jumlah Kebun yang telah mengimplementasikan Digital Farming/Total Kebun PTPN Grup untuk Komoditi Kelapa Sawit Number of plantations that have implemented Digital Farming/Total PTPN Group Plantations for Oil Palm Commodities	%	100	100	*Maximize*	2	6	6,00	
3.	Implementasi *Automation Weather Station* (AWS) Implementation of Automation Weather Station (AWS)		Unit	26	26	*Maximize*	2			10,40
4.	Pemanfaatan Digitalisasi dan teknologi untuk kegiatan *Off-Farm* (*Mill Indicator Monitoring System* berbasis IOT) Utilization of Digitalization and technology for Off-Farm activities (Mill Indicator Monitoring System based on IOT)		%	30	60	*Maximize*	4		4,40	

No	KPI	Formula Indikator Indicator Formula	Satuan Unit	Target Target	Realisasi Realization	Polaritas Polarity	Bobot Weight			
							Sub Sub			Total Total
D. Pengembangan Investasi | Investment Development										
1.	Peningkatan kuantitas produk turunan CPO (Minyak Goreng, PFAD, Stearin dan RBDPO) Increase in quantity of derivative products CPO (Cooking Oil, PFAD, Stearin and RBDPO)	Total Production of CPO Derivative Products (Cooking Oil, PFAD, Stearin and RBDPO) Total Production of CPO Derivative Products (Cooking Oil, PFAD, Stearin and RBDPO)	Ton	742.000	486.985	*Maximize*	2		1,31	
2.	Pengurangan emisi karbon PTPN Grup Reduction of carbon emissions PTPN Group		Ha	5,5	5,9	*Maximize*	2	6	2,13	7,78
3.	Monetisasi dan/ atau Pelepasan Aset Non-Inti Monetization and/or Release of Non-Core Assets	Nilai yang diperoleh dari Pelepasan Aset PTPN Value obtained from Release of PTPN Assets	Rp. Billion	1.868	372,2	*Maximize*	2		0,40	
4.	Pencapaian KPI PMN Achievement of PMN KPI		%	100	78,7	*Maximize*	5		3,93	
E. Pengembangan Talenta | Talent Development										
1.	Rasio Pemenuhan kualifikasi organ Pengelola Risiko Ratio of Risk Manager Qualification Fulfillment		%	100	75	*Maximize*	5		3,75	
2.	Rasio Pengembangan *Nominated Talent* PTN Group Ratio of Nominated Talent Development PTPN Group	Rasio Top Talent PTPN Group Rasio Top Talent PTPN Group	%	18	18	*Maximize*	2		2,02	12,97
		Rasio Perempuan dalam Nominated Talent Ratio of Women in Nominated Talent	%	16	18	*Maximize*	2		2,02	
3.	Penyelesaian *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti Completion of the Defined Benefit Pension Fund Roadmap		%	100	100	*Maximize*	5		5,00	
Jumlah | Total								**100**		**83,56**

Keberagaman Komposisi

Proses pemilihan dan pergantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Tujuan dari proses tersebut adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tahun 2023, komposisi Dewan Komisaris *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah mencakup berbagai aspek, termasuk independensi, keahlian/pendidikan, dan pengalaman kerja. Semua anggota Dewan Komisaris *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik.

Berikut merupakan rincian mengenai komposisi keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi.

Diversity Composition

The process of selecting and replacing members of the Company's Board of Commissioners and Directors has adhered to the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 dated February 17, 2015, concerning Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Boards of State-Owned Enterprises, as well as Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/02/2015 dated February 17, 2015, regarding Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises. The objective of this process is to ensure transparency, accountability, and responsibility in the replacement of members of the Board of Commissioners and Directors.

In 2023, the composition of the Board of Commissioners of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) encompassed various aspects, including independence, expertise/education, and work experience. All members of the Board of Commissioners of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) possess integrity, competence, and a good reputation.

Below is a breakdown of the diversity composition of the Board of Commissioners and Directors.

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Pendidikan Terakhir Last Education	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Dewan Komisaris				
Zulkifli Zaini	Warga Negara Indonesia Indonesian	S2 Administrasi Bisnis Master of Business Administration	67 Tahun/Years	Laki-laki Male
Erwan Pelawi	Warga Negara Indonesia Indonesian	S2 Administrasi Bisnis Master of Business Administration	63 Tahun/Years	Laki-laki Male
Amal Bakti Pulungan	Warga Negara Indonesia Indonesian	S2 Manajemen Agribisnis Master of Agribusiness Management	67 Tahun/Years	Laki-laki Male
Asep Subarkah Yusuf	Warga Negara Indonesia Indonesian	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Indonesia's National Resilience Institute	62 Tahun/Years	Laki-laki Male
Arie Yuriwin	Warga Negara Indonesia Indonesian	S2 Ilmu Administrasi Master of Public Administration	63 Tahun/Years	Perempuan Female
Wisto Prihadi	Warga Negara Indonesia Indonesian	S2 Manajemen Master of Management	62 Tahun/Years	Laki-laki Male
Ardan Adiperdana	Warga Negara Indonesia Indonesian	S3 *Strategic Management* Doctor of Strategic Management	64 Tahun/Years	Laki-laki Male
Alhilal Hamdi	Warga Negara Indonesia Indonesian	S1 Teknik Perminyakan Bachelor of Petroleum Engineering	70 Tahun/Years	Laki-laki Male
Suyus Windayana	Warga Negara Indonesia Indonesian	S1 Teknik Geodesi Bachelor of Geodesy Engineering	56 Tahun/Years	Laki-laki Male
Tsamara Amany Alatas	Warga Negara Indonesia Indonesian	S1 Ilmu Komunikasi Bachelor of Communication Science	27 Tahun/Years	Perempuan Female

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Pendidikan Terakhir Last Education	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Direksi				
Mohammad Abdul Ghani	Warga Negara Indonesia Indonesian	S3 Perencanaan Wilayah Doctor of Regional Planning	64 Tahun/Years	Laki-laki Male
Denaldy Mulino Mauna	Warga Negara Indonesia Indonesian	S2 Administrasi Bisnis Master of Business Administration	52 Tahun/Years	Laki-laki Male
Seger Budiarjo	Warga Negara Indonesia Indonesian	S2 Agribisnis Master of Agribusiness	56 Tahun/Years	Laki-laki Male
Sucipto Prayitno	Warga Negara Indonesia Indonesian	S2 Manajemen Agribisnis Master of Agribusiness	61 Tahun/Years	Laki-laki Male
Dwi Sutoro	Warga Negara Indonesia Indonesian	S2 Manajemen Master of Management	52 Tahun/Years	Laki-laki Male
M. Iswahyudi	Warga Negara Indonesia Indonesian	S2 Manajemen Agribisnis Master of Agribusiness Management	50 Tahun/Years	Laki-laki Male
Mahmudi	Warga Negara Indonesia Indonesian	S2 *Science* Master of Science	44 Tahun/Years	Laki-laki Male
Doni P Gandamihardja	Warga Negara Indonesia Indonesian	S1 Ekonomi Bachelor of Economics	57 Tahun/Years	Laki-laki Male
M. Arifin Firdaus	Warga Negara Indonesia Indonesian	S1 Hukum Internasional Bachelor of International Law	55 Tahun/Years	Laki-laki Male

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Kebijakan dan Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun buku 2023 telah diatur sesuai dengan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SR-52/Wk1.MBU.C/07 tertanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2023. Kebijakan ini kemudian diteruskan dengan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. DSDM/SKPTS/R/109/2023 tanggal 10 Juli 2023, yang menetapkan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2023.

Policy and Structure of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors

The remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors for the fiscal year 2023 has been established in accordance with the Letter from the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SR-52/Wk1. MBU.C/07 dated July 5, 2023, regarding the Determination of the Income of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) for the Year 2023. This policy was subsequently formalized by the Directors' Decision Letter of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. DSDM/SKPTS/R/109/2023 dated July 10, 2023, which stipulates the 2023 Income of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Berikut ini merupakan uraian tentang honorarium dan gaji yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2023:

The following is a detailed description of the honorarium and salaries received by the Board of Commissioners and Directors in 2023:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	45% dari Direktur Utama 45% from the President Director
Anggota Dewan Komisaris Members of the Board of Commissioners	90% dari Komisaris Utama 90% from the President Director

Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	100%
Wakil Direktur Utama Vice President Director	90% dari Direktur Utama 90% from the President Director
Anggota Direksi Lainnya Other Members of the Board of Directors	85% x Direktur Utama 85% of the President Director

Penghitungan besar penghasilan yang didapatkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dihitung oleh manajemen dan dibantu oleh konsultasi independen dengan pedoman Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sementara pada tunjangan dan fasilitas yang didapatkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021, Rincian mengenai tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris dapat dilihat melalui tabel berikut:

The calculation of the income received by the Board of Commissioners and Directors is determined by the management and supported by independent consulting, following the guidelines of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises. Meanwhile, the allowances and facilities received by the Board of Commissioners and Directors are established based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, which was last amended by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-13/MBU/09/2021. Details regarding the allowances and facilities for the Board of Commissioners can be seen in the following table:

Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris
Allowances and Facilities for the Board of Commissioners

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan Decision	Keterangan Remarks
1.	**Tunjangan** Allowance		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 (satu) kali honorarium 1 (one) time honorarium	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-03/MBU/03/2023 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times lastly with PER-03/MBU/03/2023
	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar maksimal 25% dari honorarium dalam 1 tahun honorer honorarium dalam 1 tahun The premium borne bythe Company is maximum 25% of the honorarium in 1 year	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-03/MBU/03/2023 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times lastly with PER-03/MBU/03/2023

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan Decision	Keterangan Remarks
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of honorarium per month	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-03/MBU/03/2023 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times lastly with PER-03/MBU/03/2023
2.	**Fasilitas** Facilities		
	Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian (*at cost*) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses as much as usage (at cost)	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-03/MBU/03/2023 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times lastly with PER-03/MBU/03/2023
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facilities	Sebesar pemakaian (*at cost*) As much as usage (at cost)	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-03/MBU/03/2023 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times lastly with PER-03/MBU/03/2023

Tunjangan dan Fasilitas Direksi
Allowances and Facilities for the Board of Directors

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan Decision	Keterangan Remarks
1.	**Tunjangan** Allowance		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 (satu) kali honorarium 1 (one) time honorarium	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-03/MBU/03/2023 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-03/MBU/03/2023
	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar maksimal 25% dari honorarium dalam 1 tahun honorer Premiums covered by the Company up to a maximum of 25% of the honorarium within 1 year of service	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-03/MBU/03/2023 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-03/MBU/03/2023
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Rp25.000.000 per bulan Rp25.000.000 per month	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-03/MBU/03/2023 apabila menyediakan rumah jabatan maka wajib digunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Perumahan In accordance with PER-04/MBU/2014, as amended several times, most recently by PER-03/MBU/03/2023, if official residences are provided, they must be used until the end of the Directors' term of office, and no Housing Allowance will be given.
2.	**Fasilitas** Facilities		
	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan 1 (one) unit along with maintenance costs and operational costs, by taking into account the Company's financial condition	Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 100 kWh untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) Vehicle specifications and types are regulated by the Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500 cc for oil-fueled vehicles or a maximum limit of 100 kWh for battery electric vehicles

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan Decision	Keterangan Remarks
	Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian (*at cost*) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses as much as usage (at cost)	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-03/MBU/03/2023 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-03/MBU/03/2023
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facilities	Sebesar pemakaian (*at cost*) As much as usage (at cost)	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-03/MBU/03/2023 In accordance with PER-04/MBU/2014 as amended several times, most recently by PER-03/MBU/03/2023

Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023. Besaran remunerasi yang didapatkan oleh Dewan Komisaris dikaji oleh konsultan independen yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

Hasil penghitungan yang telah dikaji oleh konsultan independen kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk mendapatkan tanggapan. Setelah itu, Dewan Komisaris mengajukan usulan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, selaku pemegang saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Langkah tersebut diambil dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan yang berlaku, ketentuan mengenai remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Indikator untuk Penetapan Remunerasi

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengikuti pedoman yang tertera dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014, yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 mengenai panduan penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Selanjutnya, dalam menetapkan jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi, digunakan indikator kinerja manajemen. Indikator tersebut diatur dalam kontrak manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris yang berisi target-target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Procedure for Proposal and Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors

The amount of remuneration for the Board of Commissioners is based on the provisions of Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, last amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/03/2023. The amount of remuneration received by the Board of Commissioners is assessed by an independent consultant with competence in their respective field.

The results of the assessment conducted by the independent consultant are then presented to the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) for their feedback. Subsequently, the Board of Commissioners submits a proposal for remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister of State-Owned Enterprises, as the shareholder of PT Perkebunan Nusantara III (Persero). These steps are taken in accordance with the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and applicable regulations. The provisions regarding remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) are determined in the General Meeting of Shareholders.

Indicators for Determining Remuneration

The determination of remuneration for the Board of Commissioners and Directors follows the guidelines outlined in Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/2014, which has been revised with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/03/2023 regarding guidelines for determining the income of Board of Directors and Board of Commissioners.

Furthermore, in establishing the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors, management performance indicators are used. These indicators are set forth in the management contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners, which includes targets from

(RKAP) tahun 2023, termasuk target *Key Performance Indicator* (KPI) yang mencakup indikator, pembobotan, dan sasaran yang harus dicapai. Selain itu, dalam menetapkan jumlah remunerasi, dipertimbangkan juga kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia serta keuangan Perseroan.

the 2023 Company's Work Plan and Budget (RKAP), including Key Performance Indicators (KPIs) encompassing indicators, weighting, and objectives that must be achieved. Additionally, in determining the amount of remuneration, consideration is given to the labor market conditions in Indonesia as well as the Company's financial situation.

Jumlah Nominal Tiap-Tiap Komponen Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi Di Tahun 2023

Adapun rincian mengenai nominal remunerasi yang didapatkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Nominal Amount of Each Component of the Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Directors in 2023

The breakdown of the nominal remuneration received by the Board of Commissioners and Directors in 2023 can be outlined as follows:

Uraian Description	**Jumlah (Rp-juta)** Total (Rp-million)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration of the Board of Commissioners	21.397,18
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration of the Board of Directors	51.181,60
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023 Total Remuneration of the Board of Commissioners and Directors in 2023	60.807,17

Berikut merupakan pengelompokan nominal remunerasi yang didapatkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, berdasarkan kisaran tingkat penghasilan per bulan:

Below is the categorization of the nominal remuneration received by the Board of Commissioners and Directors, based on their monthly income range:

Jumlah Remunerasi Total Remuneration	**Jumlah Orang** Number of People	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	-	-
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar Above Rp1 billion - Rp2 billion	-	8
Di atas Rp500 Juta - Rp1 miliar Above Rp500 Million - Rp1 billion	8	-
Rp500 Juta ke bawah Below Rp500 million	-	-

Bonus Non-Kinerja dan Opsi Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan tidak memberikan bonus non-kinerja dan opsi saham kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Non-Performance Bonus and Stock Options for the Board of Commissioners and Directors

The Company does not provide non-performance bonuses or stock options to any member of the Board of Commissioners and Directors.



RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS MEETINGS

Rapat Dewan Komisaris merupakan rapat penting yang waktu pelaksanaanya diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Tujuan dari rapat ini adalah untuk membahas hal yang bersifat strategis dan membutuhkan keputusan langsung. Keputusan yang didapat melalui Rapat Dewan Komisaris diputuskan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun jika dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan mufakat, maka keputusan dari rapat ini akan diambil dengan cara sistem pengambilan suara.

Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat, jika seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas usulan yang diajukan secara tertulis serta memberikan tanda tangan atas persetujuan tersebut. Keputusan sah yang dilakukan ini juga memiliki kekuatan yang sama dengan rapat formal. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

The Board of Commissioners meeting is a crucial gathering held at least once a month. The purpose of this meeting is to discuss strategic matters that require immediate decisions. Decisions made during the Board of Commissioners meeting are reached through consensus. However, if consensus cannot be reached during deliberations, decisions are made through a voting system.

Moreover, the Board of Commissioners may also make valid and binding decisions without convening a meeting if all members of the Board of Commissioners agree to a proposal in writing and provide their signatures of approval. These valid decisions carry the same weight as formal meetings. All decisions made during the Board of Commissioners meeting are binding. Any dissenting opinions expressed during the Board of Commissioners meeting must be clearly documented in the meeting minutes along with the reasons for the dissent.

Rapat Internal Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 24 (dua puluh empat) kali agenda rapat internal, dan berikut merupakan rincian dari agenda rapat Dewan Komisaris di tahun 2023.

Internal Board of Commissioners Meetings

Throughout 2023, the Board of Commissioners has conducted 24 (twenty-four) internal meeting agenda sessions, and the following details the agenda of the Board of Commissioners meetings in 2023.

No.	No. Surat Undangan Invitation Letter No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Tempat Rapat Meeting Venue	Agenda Agenda
1	KOM/DIR/U-01/I/2023 03 Januari 2023 January 3, 2023	Rabu, 04 Januari 2023 10.00 WIB - Selesai Wednesday, January 4, 2023 10:00 AM - End	*Zoom Meeting*	1. Usulan Jadwal Dewan Komisaris 2023 2. Usulan Aspek Indikator Operasional 3. *Pending Matters* 1. Proposal for the 2023 Board of Commissioners Schedule 2. Proposal for Operational Indicator Aspects 3. Pending Matters
2.	KOM/DIR/U-05/I/2023 13 Januari 2023 January 13, 2023	Senin, 16 Januari 2023 13.00 - Selesai Monday, January 16, 2023 1:00 PM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Pembagian Tugas Dewan Komisaris 2. lain-lain yang menjadi usulan rapat 1. Division of Tasks for the Board of Commissioners 2. Other proposals for the meeting
3.	KOM/DIR/U-19/III/2023 15 Februari 2023 February 15, 2023	Rabu, 15 Maret 2023 14.00 WIB - Selesai Wednesday, March 15, 2023 2:00 PM - End	Graha Nusa Tiga, Jl. Proklamasi No.25 Menteng Jakarta Pusat Graha Nusa Tiga, Jl. Proklamasi No.25, Menteng Central Jakarta	Membahas Rancangan Pemisahan PTPN III (Integrasi Grup PTPN melalui Pembentukan *subholding* PTPN IV dan PTPN I) Discussion on the Draft Separation Plan for PTPN III (Integration of PTPN Group through the Formation of PTPN IV dan PTPN I subholding)

No.	No. Surat Undangan Invitation Letter No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Tempat Rapat Meeting Venue	Agenda Agenda
4.	KOM/DIR/U-22/III/2023 17 Maret 2023 March 17, 2023	Jum'at, 17 Maret 2023 16.00 WIB - Selesai Friday, March 17, 2023 4:00 PM - End	*Zoom Meeting*	Pembahasan Konsep Surat Persetujuan Rancangan Pemisahan PTPN III Discussion on the Concept of Approval Letter for the Separation Plan of PTPN III
5.	KOM/DIR/U-32/V/2023 09 Mei 2023 May 9, 2023	Rabu, 10 Mei 2023 13.00 WIB - Selesai Wednesday, May 10, 2023 1:00 PM - End	Gedung Agro Plaza Jakarta Agro Plaza Building, Jakarta	1. Pembahasan usulan remunerasi tahun 2023 2. Pembahasan Usulan KAP 3. Lain-lain yang menjadi pembahasan 1. Discussion on the proposed remuneration for 2023 2. Discussion on the proposed Public Accounting Firm 3. Other matters for discussion
6.	KOM/DIR/U-33/V/2023 11 Mei 2023 May 11, 2023	Jumat, 12 Mei 2023 08.00 WIB - Selesai Friday, May 12, 2023 8:00 AM - End	*Zoom Meeting*	1. *Update Pending Matters* Dekom 2. Persiapan RUPS Tahunan tahun Buku 2022 3. Pembahasan Isu Strategis Perusahaan (Bahan rapat Ketua Komite Audit dengan Wamen BUMN I 12 Mei 2023) 4. Hal-hal lain yang menjadi pembahasan 1. Update on the Board of Commissioners' Pending Matters 2. Preparation for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) 3. Discussion on Strategic Company Issues (Meeting materials for the Audit Committee Chair with Vice Minister of State-Owned Enterprises on May 12, 2023) 4. Other matters for discussion
7.	KOM/DIR/U-35/V/2023 15 Mei 2023 May 15, 2023	Selasa, 16 Mei 2023 09.00 WIB - Selesai Tuesday, May 16, 2023 9:00 AM - End	Graha Nusa Tiga, Jl. Proklamasi No.25 Menteng Jakarta Pusat Graha Nusa Tiga, Jl. Proklamasi No.25, Menteng Central Jakarta	1. *Update Pending Matters* Dekom 2. Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 3. Lain-lain yang menjadi usulan dalam rapat 1. Update on the Board of Commissioners' Pending Matters 2. Preparation for the 2022 Annual GMS 3. Other proposals for the meeting
8.	KOM/DIR/U-36.1/V/2023 24 Mei 2023 May 24, 2023	Rabu, 24 Mei 2023 13.00 WIB - Selesai Wednesday, May 24, 2023 1:00 PM - End	Gedung Plaza Agro, Lt 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update Pending Matters* Dekom 2. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Update on the Board of Commissioners' Pending Matters 2. Other matters arising in the meeting
9.	KOM/DIR/U-38/V/2023 26 Mei 2023 May 26, 2023	Senin, 29 Mei 2023 09.00 WIB - Selesai Monday, May 29, 2023 9:00 AM - End	Graha Nusa Tiga, Jl. Proklamasi No.25 Menteng Jakarta Pusat Graha Nusa Tiga, Jl. Proklamasi No.25 Menteng Central Jakarta	1. Penyiapan Bahan Rapat dengan Direktur Produksi & Pengembangan (Evaluasi Pembelian TBS Pihak III) 2. Lain-lain yang menjadi usulan rapat 1. Preparation of Meeting Materials with the Production & Development Director (Evaluation of FFB Purchase from Third Parties) 2. Other proposals for the meeting
10.	KOM/DIR/U-40/VI/2023 05 Juni 2023 June 5, 2023	Senin, 05 Juni 2023 13.00 WIB - Selesai Monday, June 5, 2023 1:00 PM - End	Gedung Plaza Agro, Lt 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update Pending Matters* Dekom 2. Rencana Kunjungan Kerja 3. Lain-lain yang menjadi usulan rapat 1. Update on the Board of Commissioners' Pending Matters 2. Work Visit Plan 3. Other proposals for the meeting
11.	KOM/DIR/U-45.1/VI/2023 27 Juni 2023 June 27, 2023	Jum'at, 30 Juni 2023 14.00 WIB - Selesai Friday, June 30, 2023 2:00 PM - End	*Zoom Meeting*	Pembahasan Surat Tanggapan Repackaging Discussion on Response Letter for Repackaging

No.	No. Surat Undangan Invitation Letter No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Tempat Rapat Meeting Venue	Agenda Agenda
12.	KOM/DIR/U-50/VII/2023 14 Juli 2023 July 14, 2023	Senin, 17 Juli 2023 14.00 WIB - Selesai Monday, July 17, 2023 2:00 PM - End	Ruang Rapat Graha Nusa Tiga, Jl. Proklamasi No.25 Menteng jakarta Pusat Graha Nusa Tiga Meeting Room, Jl. Proklamasi No.25, Menteng Central Jakarta	1. *Update Pending Matters* 2. Agenda Dewan Komisaris 3. Remunerasi Organ Dewan Komisaris 4. Hal-hal lain yang menjadi Pembahasan Rapat 1. Update on Pending Matters 2. Board of Commissioners Agenda 3. Board of Commissioners Organ Remuneration 4. Other matters for meeting discussion
13.	KOM/U-55/VIII/2023 01 Agustus 2023 August 1, 2023	Rabu, 02 Agustus 2023 14.30 - 15.30 WIB Wednesday, August 2, 2023 2:30 PM - 3:30 PM	Gedung Plaza Agro Lt.15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update Pending Matters* 2. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris 3. Update Pengembangan Dekom 4. Lain-lain yang menjadi pembahasan 1. Update on Pending Matters 2. Board of Commissioners Work Visit 3. Board of Commissioners Development Update 4. Other matters for discussion
14.	KOM/U-56/VIII/2023 01 Agustus 2023 August 1, 2023	Jumat, 04 Agustus 2023 10.30 - 11.00 WIB Friday, August 4, 2023 10:30 AM - 11:00 AM	Gedung Plaza Agro Lt.15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update Pending Matters* 2. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris 3. Update Pengembangan Dekom 4. Lain-lain yang menjadi pembahasan 1. Update on Pending Matters 2. Board of Commissioners Work Visit 3. Board of Commissioners Development Update 4. Other matters for discussion
15.	KOM/U-60/VIII/2023 25 Agustus 2023 August 25, 2023	Senin, 28 Agustus 2023 08.30 WIB - Selesai Monday, August 28, 2023 8:30 AM - End	Zoom *Meeting* Online User ID : 811 0907 4836 Pass : PTPNJUARA	1. *Update Pending Matters* Dewan Komisaris 2. Pembahasan Agenda Dewan Komisaris 1. Update on the Board of Commissioners' Pending Matters 2. Board of Commissioners Agenda Discussion
16.	KOM/U-63.A/X/2023 Oktober 2023 October 2023	Senin, 02 Okt 2023 15.00 WIB - Selesai Monday, October 2, 2023 3:00 PM - End	Gedung Agro Plaza Lt.15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update Pending Matters* Dewan Komisaris 2. Rencana Kunjungan Kerja 3. Lain-lain yang menjadi pembahasan 1. Update on the Board of Commissioners' Pending Matters 2. Work Visit Plan 3. Other matters for discussion
17.	KOM/U-65/X/2023 16 Oktober 2023 October 16, 2023	Rabu, 18 Okt 2023 10.00 WIB - Selesai Wednesday, October 18, 2023 10:00 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update Pending Matters* Dewan Komisaris 2. Lain-lain yang menjadi pembahasan 1. Update on the Board of Commissioners' Pending Matters 2. Other matters for discussion
18.	KOM/DIR/U-67.A/X/2023 16 Oktober 2023 October 16, 2023	Jum'at, 20 Okt 2023 16.00 WIB - Selesai Friday, October 20, 2023 4:00 PM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	Membahas Persetujuan atas Perubahan Alokasi Penggunaan Dana IP PEN Discussion on Approval of Changes in the Allocation of IP PEN Fund Usage
19.	KOM/U-70/X/2023 27 Oktober 2023 October 27, 2023	Senin, 30 Okt 2023 17.00 WIB -Selesai Monday, October 30, 2023 5:00 PM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Pending Matters* Dewan Komisaris 2. Rencana pengembangan Dewan Komisaris dalam Pelatihan IPOC 1. Board of Commissioners' Pending Matters 2. Development Plan for the Board of Commissioners in IPOC Training
20.	KOM/U-71/X/2023 31 Oktober 2023 October 31, 2023	Rabu, 01 Nov 2023 Wednesday, November 1, 2023	Sofitel Nusa Dua Bali Sofitel Nusa Dua Bali	Membahas kesesuaian usulan RKAP dengan APS 2024 Discussion on the Suitability of the proposed RKAP with APS 2024
21.	KOM/U-71/X/2023 31 Oktober 2023 October 31, 2023	Kamis, 02 Nov 2023 Thursday, November 2, 2023	Sofitel Nusa Dua Bali Sofitel Nusa Dua Bali	Rapat Kerja Internal Dewan Komisaris (Membahas surat ke Menteri terkait laporan terjadinya gejala penurunan kinerja Perseroan) Internal Board of Commissioners Work Meeting (Discussion on letter to the Minister regarding the report of declining performance symptoms of the Company)

No.	No. Surat Undangan Invitation Letter No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Tempat Rapat Meeting Venue	Agenda Agenda
22.	KOM/U-74/XI/2023 17 November 2023 November 17, 2023	Senin, 20 Nov 2023 08.30 - Selesai Monday, November 20, 2023 8:30 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	Pembahasan Surat Tanggapan Penugasan dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Komoditas Perkebunan Strategis Discussion on Response Letter for Assignment in Improving Production and Productivity, Value Added, and Competitiveness of Strategic Plantation Commodities
23.	KOM/U-77.A/XI/2023 22 November 2023 November 22, 2023	Senin, 27 Nov 2023 14.00 - 14.30 WIB Monday, November 27, 2023 2:00 PM - 2:30 PM	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Pending Matters* Dewan Komisaris 2. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Board of Commissioners' Pending Matters 2. Other matters arising in the meeting
24.	KOM/U-84/XII/2023 21 Desember 2023 December 21, 2023	Jum'at, 22 Des 2023 13.30 - 14.00 WIB Friday, December 22, 2023 1:30 PM - 2:00 PM	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Pembahasan *Pending Matters* 2. Pembagian Tugas Dewan Komisaris 1. Discussion on Pending Matters 2. Division of Tasks for the Board of Commissioners

Rekapitulasi kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal dapat dilihat di bawah ini:

Recapitulation of the Board of Commissioners' attendance at Internal Meetings can be seen below:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Total of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total of Attendances	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Zulkifli Zaini	24	24	100%
Erwan Pelawi	24	24	100%
Amal Bakti Pulungan	24	24	100%
Asep Subarkah Yusuf	24	24	100%
Arie Yuriwin	24	24	100%
Wisto Prihadi	24	24	100%
Ardan Adiperdana	24	24	100%
Alhilal Hamdi	24	24	100%
Suyus Windayana	1	1	100%
Tsamara Amany Alatas	1	1	100%
Rata-rata | Average			100%

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Hingga akhir tahun 2023, Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 52 kali. Berikut merupakan rincian dari agenda dan risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2023.

Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors

Until the end of 2023, the Board of Commissioners, together with the Board of Directors, had conducted 52 meetings. Below are the details of the agenda and minutes of the joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2023.

No.	No. Surat Undangan Invitation Letter No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Rapat Venue of Meeting	Agenda Agenda
1	KOM/DIR/U-04/I/2023 13 Januari 2023 January 13, 2023	Senin, 16 Januari 2023 10.30 - Selesai Monday, January 16, 2023 10:30 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update* PTPN IV dan PTPN I 2. Struktur Organisasi PTPN III (Persero) 1. Update on PTPN IV and PTPN I 2. Organizational Structure of PTPN III (Persero)
2.	KOM/DIR/U-02/I/2023 03 Januari 2023 January 3, 2023	Selasa, 24 Januari 2023 09.00 WIB - Selesai Tuesday, January 24, 2023 09:00 AM - End	*Zoom Meeting*	1. Tindak lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen sampai dengan bulan Bulan Desember 2022 (*Unaudited*) 3. Lain-lain yang menjadi usulan rapat 1. Follow-up on the Previous Meeting 2. Discussion on Management Report until December 2022 (Unaudited) 3. Other matters proposed in the meeting
3.	DKM/KOM/176/2023 17 Januari 2023 January 17, 2023	Selasa, 24 Januari 2023 13.00 WIB - Selesai Tuesday, January 24, 2023 01:00 PM - End	*Zoom Meeting*	*Progress Meeting* pelaksanaan *general audit* Laporan Keuangan Konsolidasian PTPN III (Persero) dan Entitas Anak tahun 2022 Progress Meeting on the Implementation of the 2022 General Audit of the Consolidated Financial Statements of PTPN III (Persero) and Subsidiaries
4.	KOM/DIR/U-06/I/2023 25 Januari 2023 January 25, 2023	Kamis, 26 Januari 2023 14.00 WIB - Selesai Thursday, January 26, 2023 02:00 PM - End	*Zoom Meeting*	1. Rencana Kerja Direktorat Pemasaran Tahun 2023 2. *Branding* 3. Hilirisasi 4. *Update* Minyak Makan Merah 1. Work Plan of the Marketing Directorate for 2023 2. Branding 3. Downstreamingi 4. Update on Red Cooking Oil
5.	KOM/DIR/U-11/II/2023 07 Februari 2023 February 7, 2023	Selasa, 21 Februari 2023 09.00 WIB - Selesai Tuesday, February 21, 2023 09:00 AM - End	*Zoom Meeting*	1. *Review* Kinerja Tahun 2022 Divisi Pengadaan & Umum 2. Paparan Rencana Kerja Tahun 2023 Divisi Pengadaan & Umum 3. Lain-lain yang menjadi usulan dalam rapat 1. Review of the 2022 Performance of the Procurement & General Division 2. Presentation of the 2023 Work Plan of the Procurement & General Division 3. Other matters proposed in the meeting
6.	KOM/DIR/U-12/II/2023 07 Februari 2023 February 7, 2023	Selasa, 21 Februari 2023 13.00 WIB - Selesai Tuesday, February 21, 2023 01:00 PM - End	*Zoom Meeting*	1. *Review* Kinerja tahun 2022 2. Paparan Rencana Kerja Tahun 2023 3. Lain-lain yang menjadi usulan dalam rapat 1. Review of 2022 Performance 2. Presentation of the 2023 Work Plan 3. Other matters proposed in the meeting
7.	KOM/DIR/U-13/II/2023 20 Februari 2023 February 20, 2023	Rabu, 22 Februari 2023 13.00 WIB - Selesai Wednesday, February 22, 2023 01:00 PM - End	*Zoom Meeting*	1. *Review* Kinerja PT SGN Tahun 2022 2. Paparan Rencana kerja tahun 2023 3. Lain-lain yang menjadi usulan rapat 1. Review of PT SGN's 2022 Performance 2. Presentation of the 2023 Work Plan 3. Other matters proposed in the meeting
8.	KOM/DIR/U-14/II/2023 20 Februari 2023 February 20, 2023	Kamis, 23 Februari 2023 14.00 - 16,00 WIB Thursday, February 23, 2023 02:00 PM - 04:00 PM	*Zoom Meeting*	1. *Review* Kinerja Direktorat Produksi dan Pengembangan Tahun 2022 2. Program Kerja Direktorat Produksi dan Pengembangan Tahun 2023 3. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Review of the 2022 Performance of the Directorate of Production and Development 2. Work Program of the Directorate of Production and Development for 2023 3. Other matters arising in the meeting

No.	No. Surat Undangan Invitation Letter No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Rapat Venue of Meeting	Agenda Agenda
9.	KOM/DIR/U-15/II/2023 22 Februari 2023 February 22, 2023	Senin, 27 Februari 2023 09.00 WIB - Selesai Monday, February 27, 2023 09:00 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen Januari 2023 3. Lain-lain yang menjadi usulan dalam rapat 4. Follow-up on the Previous Meeting 5. Discussion on the Management Report for January 2023 6. Other matters proposed in the meeting
10.	KOM/DIR/U-16/II/2023 24 Februari 2023 February 24, 2023	Senin, 27 Februari 2023 13.00 WIB - Selesai Monday, February 27, 2023 01:00 PM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Pembahasan uji tuntas kinerja Dapenbun 2. Lain-lain yang menjadi usulan dalam rapat 1. Discussion on the Due Diligence of Dapenbun's Performance 2. Other matters proposed in the meeting
11.	KOM/DIR/U-10/II/2023 06 Februari 2023 February 6, 2023 DKM/ PTPN,ANP/606/2023 23 Februari 2023 February 23, 2023	Selasa, 28 Februari 2023 09.00 WIB - Selesai Tuesday, February 28, 2023 09:00 AM - End	*Zoom Meeting*	1. Evaluasi *progress* pelaksanaan audit Tahun Buku 2022 2. Lain-lain yang menjadi usulan dalam rapat 1. Evaluation of the Progress of the 2022 Fiscal Year Audit Implementation 2. Other matters proposed in the meeting
12.	KOM/DIR/U-20/III/2023 15 Februari 2023 February 15, 2023	Kamis, 16 Maret 2023 09.00 WIB - Selesai Thursday, March 16, 2023 09:00 AM - End	Gedung Agro Plaza Lt.15 Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	Rencana Integrasi PTPN III dan Rancangan Pemisahan PTPN III Plan for Integration of PTPN III and the Draft Separation of PTPN III
13.	DRU/KOM/908/2023 17 Maret 2023 March 17, 2023	Senin, 20 Maret 2023 09.00 WIB - Selesai Monday, March 20, 2023 09:00 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	Pembahasan Program Kerja Komite Investasi PTPN III (Persero) Discussion on the Work Program of the Investment Committee of PTPN III (Persero)
14.	KOM/DIR/21/III/2023 16 Maret 2023 March 16, 2023 DRU/KOM/882/2023 15 Maret 2023 March 15, 2023	Selasa, 21 Maret 2023 09.00 WIB - Selesai Tuesday, March 21, 2023 09:00 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen sampai dengan bulan Februari 2023 3. Lain-lain yang menjadi usulan dalam rapat 1. Follow-up on the previous meeting 2. Discussion on the Management Report until February 2023 3. Other matters proposed in the meeting
15.	KOM/DIR/U-23/III/2023 31 Maret 2023 March 31, 2023	Selasa, 4 April 2023 14.00 - 16.00 WIB Tuesday, April 4, 2023 02:00 PM - 04:00 PM	*Zoom Meeting*	1. Program Kerja Direktorat Hubungan Kelembagaan Tahun 2023 2. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Work Program of the Institutional Relations Directorate for 2023 2. Other matters arising in the meeting
16.	KOM/DIR/U-27/IV/2023 05 April 2023 April 5, 2023	Kamis, 13 April 2023 09.00 WIB - Selesai Thursday, April 13, 2023 09:00 AM - End	*Zoom Meeting*	1. Pembahasan rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2023 - 2027 2. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Discussion on the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2023 - 2027 2. Other matters arising in the meeting
17.	DSPN/KOM/1276/2023 17 April 2023 17 April 2023 KOM/DIR/U-29/IV/2023 18 April 2023 April 18, 2023	Rabu, 26 April 2023 09.00 WIB - Selesai Wednesday, April 26, 2023 09:00 AM - End	*Zoom Meeting*	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen sampai dengan bulan Maret 2023 3. Lain-lain yang menjadi usulan dalam rapat 1. Follow-up on the previous meeting 2. Discussion on the Management Report until March 2023 3. Other matters proposed in the meeting

No.	No. Surat Undangan Invitation Letter No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Rapat Venue of Meeting	Agenda Agenda
18.	KOM/DIR/U-28/IV/2023 18 April 2023 April 18, 2023	Kamis, 27 April 2023 09.00 WIB - Selesai Thursday, April 27, 2023 09:00 AM - End	*Zoom Meeting*	Penjelasan terkait dengan Rencana Integrasi PTPN Group Explanation regarding the Integration Plan of PTPN Group
19.	KOM/DIR/U-30/V/2023 02 Mei 2023 May 2, 2023	Rabu, 3 Mei 2023 13.00 - 15.00 WIB Wednesday, May 3, 2023 01:00 PM - 03:00 PM		1. Pembahasan Struktur Organisasi PTPN Group 2. Lain-lain yang menjadi usulan dalam rapat 1. Discussion on the Organizational Structure of PTPN Group 2. Other matters proposed in the meeting
20.	KOM/DIR/U-31/V/2023 09 Mei 2023 May 9, 2023	Rabu, 10 Mei 2023 09.00 WIB - Selesai Wednesday, May 10, 2023 09:00 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, Jakarta	1. Pembahasan usulan remunerasi tahun 2023 2. Struktur Organisasi PTPN Group 1. Discussion on the 2023 remuneration proposal 2. Organizational Structure of PTPN Group
21.	KOM/DIR/U-36/V/2023 22 Mei 2023 May 22, 2023	Rabu, 24 Mei 2023 09.00 WIB - Selesai Wednesday, May 24, 2023 09:00 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen sampai dengan bulan April 2023 3. Lain-lain yang menjadi usulan dalam rapat 1. Follow-up on the previous meeting 2. Discussion on the Management Report until April 2023 3. Other matters proposed in the meeting
22.	KOM/DIR/U-39/V/2023 31 Mei 2023 May 31, 2023	Senin, 05 Juni 2023 09.00 WIB - Selesai Monday, June 5, 2023 09:00 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Konsolidasi Pencapaian Target Kinerja Operasional Tahun 2023 termasuk Kinerja Pembelian TBS Pihak III 2. Lain-lain yang menjadi usulan dalam rapat 1. Consolidation of Operational Performance Target Achievements for 2023 including the Performance of Third-Party FFB Purchases 2. Other matters proposed in the meeting
23.	KOM/DIR/U-41/2023 6 Juni 2023 July 3, 2023	Senin, 12 Juni 2023 14.00 WIB - Selesai Monday, June 12, 2023 02:00 PM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Pembahasan Kinerja Pembelian TBS Pihak III 2. Lain-lain yang menjadi usulan dalam rapat 1. Discussion on the Performance of Third-Party FFB Purchases 2. Other matters proposed in the meeting
24.	KOM/DIR/U-42/2023 9 Juni 2023 June 9, 2023	Senin, 20 Juni 2023 09.00 WIB - Selesai Monday, June 20, 2023 09:00 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen sampai dengan bulan Mei 2023 3. Lain-lain yang menjadi usulan dalam rapat 1. Other matters arising in the meeting 2. Discussion on the Management Report until May 2023 3. Other matters proposed in the meeting
25.	DRU/KOM/1883/2023 25 Juni 2023 June 25, 2023	Senin, 26 Juni 2023 13.00 WIB - Selesai Monday, June 26, 2023 01:00 PM - End	*Zoom Meeting*	Persetujuan Korporasi untuk *Repackaging* Hutang PTPN III Corporate Approval for Repackaging PTPN III's Debt
26.	KOM/DIR/U-44/VI/2023 23 Juni 2023 June 23, 2023	Senin, 26 Juni 2023 16.00 WIB - Selesai Monday, June 26, 2023 04:00 PM - End	*Zoom Meeting*	*Update* Mitigasi Plan atas Musim Kemarau Panjang terhadap Kinerja Operasional 2023 Update on Mitigation Plan against Prolonged Dry Season on Operational Performance 2023

No.	No. Surat Undangan Invitation Letter No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Rapat Venue of Meeting	Agenda Agenda
27.	KOM/DIR/U-48/VII/2023 3 Juli 2023 July 3, 2023	Senin, 3 Juli 2023 13.00 - 14.00 WIB Monday, July 3, 2023 01:00 PM - 02:00 PM	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	Pembahasan Lanjutan atas *Repackaging* Utang PTPN III (Persero) Group Continued Discussion on Repackaging PTPN III (Persero) Group's Debt
28.	KOM/DIR/U-47/VII/2023 03 Juli 2023 July 3, 2023	Senin, 3 Juli 2023 14.00 WIB - Selesai Monday, July 3, 2023 02:00 PM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update* Kerjasama PT SGN dengan Mitra 2. *Update* Kinerja PT SGN termasuk Prognosa 2023 3. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Update on PT SGN's Cooperation with Partners 2. Update on PT SGN's Performance including 2023 Forecast 3. Other matters arising in the meeting
29.	KOM/DIR/U-49/VII/2023 06 Juli 2023 July 6, 2023	Kamis, 20 Juli 2023 09.00 WIB - Selesai Thursday, July 20, 2023 09:00 AM - End	Gedung Agro Plaza Lt.15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen sampai dengan bulan Juni 2023 3. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Follow-up on the previous meeting 2. Discussion on the Management Report until June 2023 3. Other matters arising in the meeting
30.	KOM/DIR/U-51/VII/2023 28 Juli 2023 July 28, 2023	Rabu, 02 Agust 2023 09.00 - 10.30 WIB Wednesday, August 2, 2023 09:00 AM - 10:30 AM	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update Due Diligence* Dapenbun 2. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Update on Dapenbun Due Diligence 2. Other matters arising in the meeting
31.	KOM/DIR/U-52/VII/2023 28 Juli 2023 July 28, 2023	Rabu, 02 Agust 2023 10.30 WIB - Selesai Wednesday, August 2, 2023 10:30 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update* Program Kerja Kinerja Investasi 2. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Update on Investment Performance Work Program 2. Other matters arising in the meeting
32.	KOM/DIR/U-53/VII/2023 28 Juli 2023 July 28, 2023	Jumat, 04 Agust 2023 08.30 WIB - Selesai Friday, August 4, 2023 08:30 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update* Pelaksanaan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PTPN Group 2. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Update on the Implementation of Remuneration for PTPN Group Board of Directors and Board of Commissioners 2. Other matters arising in the meeting
33.	KOM/DIR/U-57/VIII/2023 07 Agustus 2023 August 7, 2023	KOM/DIR/U-57/VIII/2023 07 Agustus 2023 KOM/DIR/U-57/VIII/2023 August 7, 2023	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update* Realisasi Program Kerja Direktorat Pemasaran dan Prognosa 2023 2. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Update on the Realization of the Marketing Directorate's Work Program and 2023 Forecast 2. Other matters arising in the meeting
34.	KOM/DIR/U-58/VIII/2023 11 Agustus 2023 August 11, 2023	Senin, 14 Agust 2023 08.30 - 10.30 WIB Monday, August 14, 2023 08:30 AM - 10:30 AM	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update* Remunerasi 2. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Update on Remuneration 2. Other matters arising in the meeting
35.	KOM/DIR/U-59/VIII/2023 11 Agustus 2023 August 11, 2023	Senin, 14 Agust 2023 10.30 - 12.00 WIB Monday, August 14, 2023 10:30 AM - 12:00 PM	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update* Kerja Sama PTPN III dengan PTPN VIII 2. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Update on PTPN III's Partnership with PTPN VIII 2. Other matters arising in the meeting

No.	No. Surat Undangan Invitation Letter No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Rapat Venue of Meeting	Agenda Agenda
36.	KOM/DIR/U-54/VIII/2023 04 Agustus 2023 August 4, 2023	Selasa, 22 Agust 2023 09.00 WIB - Selesai Tuesday, August 22, 2023 09:00 AM - End	Gedung Agro Plaza Lt.15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen sampai dengan bulan Juli 2023 3. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Follow-up on the previous meeting 2. Discussion on the Management Report until July 2023 3. Other matters arising in the meeting
37.	KOM/DIR/U-61/VIII/2023 25 Agustus 2023 August 25, 2023	Selasa, 29 Agust 2023 09.00 WIB - Selesai Tuesday, August 29, 2023 09:00 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update* Struktur Organisasi PTPN Group 2. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Update on the Organizational Structure of PTPN Group 2. Other matters arising in the meeting
38.	KOM/DIR/U-62/IX/2023 07 September 2023 September 7, 2023	Kamis, 21 Sept 2023 09.00 WIB - Selesai Thursday, September 21, 2023 09:00 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen sampai dengan bulan Agustus 2023 3. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Follow-up on the previous meeting 2. Discussion on the Management Report until August 2023 3. Other matters arising in the meeting
39.	DRU/KOM/2806/2023 13 Oktober 2023 October 13, 2023 KOM/DIR/U-66/X/2023 16 Oktober 2023 October 16, 2023	Rabu, 18 Okt 2023 13.00 s.d 16.00 WIB Wednesday, October 18, 2023 01:00 PM - 04:00 PM	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen sampai dengan bulan September 2023 3. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Follow-up on the previous meeting 2. Discussion on the Management Report until September 2023 3. Other matters arising in the meeting
40.	DRU/KOM/2806/2023 13 Oktober 2023 October 13, 2023 KOM/DIR/U-67/X/2023 16 Oktober 2023 October 16, 2023	Senin, 23 Okt 2023 09.00 WIB - Selesai Monday, October 23, 2023 09:00 AM - End	*Zoom Meeting*	Rapat tentang Evaluasi Kinerja INL dan Hilirisasi PTPN Group Meeting on Performance Evaluation of INL and Downstreaming of PTPN Group
41.	DRU/KOM/2806/2023 13 Oktober 2023 October 13, 2023 KOM/DIR/U-68/X/2023 16 Oktober 2023 October 16, 2023	Selasa, 24 Okt 2023 09.00 WIB - Selesai Tuesday, October 24, 2023 09:00 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update* Kinerja Operasional dan Keuangan untuk Prognosa 2023 dan RKAP 2024 2. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Update on Operational and Financial Performance for 2023 Forecast and 2024 RKAP 2. Other matters arising in the meeting
42.	KOM/DIR/U-69/X/2023 27 Oktober 2023 October 27, 2023	Senin, 30 Okt 2023 14.30 WIB -Selesai Monday, October 30, 2023 02:30 PM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya 2. Pembahasan RKAP 2024 3. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Follow-up on the previous meeting 2. Discussion on 2024 RKAP 3. Other matters arising in the meeting
43.	KOM/DIR/U-72/XI/2023 13 November 2023 November 13, 2023	Jum'at, 17 Nov 2023 08.30 - Selesai Friday, November 17, 2023 08:30 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Tindak lanjut Rapat sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen sampai dengan bulan Oktober 2023 3. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Follow-up on the previous meeting 2. Discussion on the Management Report until October 2023 3. Other matters arising in the meeting
44.	KOM/DIR/U-73/XI/2023 13 November 2023 November 13, 2023	Jum'at, 17 Nov 2023 13.30 - Selesai Friday, November 17, 2023 01:30 PM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	Pembahasan Penugasan Impor Gula Kristal Putih (GKP) Discussion on the Assignment of White Crystal Sugar Import

No.	No. Surat Undangan Invitation Letter No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Rapat Venue of Meeting	Agenda Agenda
45.	KOM/DIR/U-75/XI/2023 17 November 2023 November 17, 2023	Selasa, 21 Nov 2023 08.30 - Selesai Tuesday, November 21, 2023 08:30 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Persiapan *Legal Day*-1 2. Persiapan IPO 3. *Roadmap* Komoditas Gula dalam rangka pelaksanaan Perpres No.40/2023 4. Pengembangan Food Estate Merauke 5. *Update* Prognosa Kinerja SGN 2023 1. Preparation for Legal Day-1 2. Preparation for IPO 3. Roadmap for Sugar Commodities in the framework of implementing Presidential Regulation No. 40/2023 4. Development of the Merauke Food Estate 5. Update on 2023 SGN Performance Forecast
46.	KOM/DIR/U-77/XI/2023 22 November 2023 November 22, 2023	Senin, 27 Nov 2023 08.30 - Selesai Monday, November 27, 2023 08:30 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Industri Hilir Kelapa Sawit 2. *Update* Transformasi EBITDA 3. Pembahasan RKAP Tahun 2024 4. *Business Turnaround* Karet, Teh dan Kopi 1. Palm Oil Downstream Industry 2. Update on EBITDA Transformation 3. Discussion on 2024 RKAP 4. Business Turnaround for Rubber, Tea, and Coffee
47.	KOM/DIR/U-78/XI/2023 22 November 2023 November 22, 2023	Selasa, 28 Nov 2023 08.30 - Selesai Tuesday, November 28, 2023 08:30 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Digitalisasi dan Penerapan Teknologi keSDM-an 2. Penerapan *Reward* dan *Punishment* 3. *Update Progress* serta Rencana *Profiling* & *Assessment Competency* Karyawan 4. Program Penyehatan Dapenbun 1. Digitalization and Implementation of HR Technology 2. Implementation of Reward and Punishment 3. Update on Progress and Plans for Employee Profiling & Competency Assessment 4. Dapenbun Recovery Program
48.	KOM/DIR/U-79/XII/2023 8 Desember 2023 December 8, 2023	Senin, 11 Des 2023 09.00 WIB - Selesai Monday, December 11, 2023 09:00 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	*Update* Pelaksanaan Integrasi/*Merger* & Struktur Organisasi Setelah *Legal Day*-1 Update on the Implementation of Integration/ Merger & Organizational Structure After Legal Day-1
49.	KOM/DIR/U-80/XII/2023 8 Desember 2023 December 8, 2023 DKM/KOM/3303/2023 08 Desember 2023 December 8, 2023	Selasa, 12 Des 2023 14.00 WIB - Selesai Tuesday, December 12, 2023 02:00 PM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update* Pelaksanaan Audit laporan Keuangan Tahun Buku 2023 2. *Update* Kondisi Likuiditas/*Cash Flow* Perusahaan (2023 dan 2024) 3. *Update* Pelaksanaan Investasi (*Replanting*/ Konversi, dan Investasi dari dana PMN dan IP PEN) 1. Update on the Implementation of the 2023 Financial Statements Audit 2. Update on the Company's Liquidity/Cash Flow Conditions (2023 and 2024) 3. Update on Investment Implementation (Replanting/Conversion, and Investment from PMN and IP PEN funds)
50.	KOM/DIR/U-81/XII/2023 8 Desember 2023 December 8, 2023	Rabu, 13 Des 2023 09.00 WIB - Selesai Wednesday, December 13, 2023 09:00 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. *Update* Kinerja Direktorat Hubungan Kelembagaan (Kasus-Kasus Hukum terakhir) 2. *Update* Kinerja Direktorat Umum 3. *Update* Kinerja Bidang Pemasaran (Penjualan Komoditas PTPN, termasuk mitigasi atas kontrak, *Terms of Payment*, dll) 1. Update on the Performance of the Institutional Relations Directorate (Latest Legal Cases) 2. Update on the Performance of the General Directorate 3. Update on the Performance of the Marketing (PTPN Commodity Sales, including mitigation of contracts, Terms of Payment, etc.)

No.	No. Surat Undangan Invitation Letter No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Tempat Rapat Venue of Meeting	Agenda Agenda
51.	KOM/DIR/U-82/XII/2023 8 Desember 2023 December 8, 2023	Senin, 18 Des 2023 09.00 WIB - Selesai Monday, December 18, 2023 09:00 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	1. Tindak lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen sampai dengan bulan November 2023 3. Lain-lain yang timbul dalam rapat 1. Follow-up on the Previous Meeting 2. Discussion on the Management Report until November 2023 3. Other matters arising in the meeting
52.	KOM/DIR/U-83/XII/2023 21 Desember 2023 December 21, 2023	Jum'at, 22 Des 2023 08.30 WIB - Selsesai Friday, December 22, 2023 08:30 AM - End	Gedung Plaza Agro, Lt. 15, Jakarta Agro Plaza Building, 15th Floor, Jakarta	Pembahasan RKAP dan RKA TJSL Tahun 2024 Discussion on 2024 RKAP and RKA TJSL

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan dapat dilihat di bawah ini:

Recapitulation of Attendance of the Board of Commissioners and Directors at Joint Meeting:

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Zulkifli Zaini	52	52	100%
Erwan Pelawi	52	52	100%
Amal Bakti Pulungan	52	52	100%
Asep Subarkah Yusuf	52	52	100%
Arie Yuriwin	52	52	100%
Wisto Prihadi	52	52	100%
Ardan Adiperdana	52	52	100%
Alhilal Hamdi	52	52	100%
Suyus Windayana	2	2	100%
Tsamara Amany Alatas	2	2	100%
Direksi Board of Directors			
Mohammad Abdul Ghani	12	12	100%
Denaldy Mulino Mauna	12	12	100%
Seger Budiarjo	12	12	100%
Sucipto Prayitno	0	0	100%
Dwi Sutoro	12	12	100%
Ahmad Haslan Saragih	12	12	100%
M. Iswahyudi	12	12	100%
Mahmudi	12	12	100%
Doni P. Gandamihardja	12	12	100%
M. Arifin Firdaus	12	12	100%

Keterangan | Note:
Sucipto Prayitno mulai menjabat pada tanggal 19 Desember 2023 | Sucipto Prayitno began his term of office on December 19, 2023.

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 16 kali agenda Kunjungan Kerja dan berikut merupakan rincian dari Kunjungan Kerja Dewan Komisaris di tahun 2023.

Board of Commissioners' Working Visit

During the year 2023, the Board of Commissioners has conducted 16 working visits, and here is the detailed schedule of the Board of Commissioners' working visits in 2023.

No.	Lokasi Tujuan Monitoring Destination Monitoring Locations	Tanggal Date	Tujuan Purpose
1	Kunjungan Kerja ke PTPN VIII Business Visit to PTPN VIII	17 - 20 Januari 2023 January 17-20,	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance
2	Kunjungan Kerja ke PT INL Business Visit to PT INL	13 Februari 2023 February 13, 2023	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance evaluation
3	Kunjungan Kerja ke PTPN IV Business Visit to PTPN IV	14-15 Februari 2023 February 14-15, 2023	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance evaluation
4	Benchmarking ke Genting Plantation, Malaysia Benchmarking to Genting Plantation, Malaysia	1-6 Maret 2023 March 1-6, 2023	Mengetahui proses bisnis perusahaan dan membandingkan dengan proses bisnis PTPN III Holding Understanding the company's business processes and comparing them with PTPN III Holding's business processes
5	Kunjungan Kerja ke PT RPN Business Visit to PT RPN	5 Aprill 2023 April 5, 2023	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance evaluation
6	Kunjungan kerja ke PTPN VI Jambi Business Visit to PTPN VI Jambi	13-15 Juni 2023 June 13-15, 2023	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance evaluation
7	Kunjungan Kerja ke PT SGN Business Visit to PT SGN	25-27 Juli 2023 July 25-27, 2023	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance evaluation
8	Kunjungan Kerja ke PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) Business Visit to PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II)	8-11 Agustus 2023 August 8-11, 2023	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance evaluation
9	Kunjungan Kerja ke PT Tiga Mutiara Nusantara (PT TMN) Business Visit to PT Tiga Mutiara Nusantara (PT TMN)	8-11 Agustus 2023 August 8-11, 2023	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance evaluation
10	Kunjungan Kerja ke PT Sri Pamela Medica Nusantara (PT SPMN) Business Visit to PT Sri Pamela Medica Nusantara (PT SPMN)	8-11 Agustus 2023 August 8-11, 2023	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance evaluation
11	Kunjungan Kerja ke PT Industri Karet Nusantara (PT IKN) Business Visit to PT Industri Karet Nusantara (PT IKN)	8-11 Agustus 2023 August 8-11, 2023	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance evaluation
12	Kunjungan Kerja ke PTPN X LPP Yogyakarta Business Visit to PTPN X LPP Yogyakarta	5-7 September 2023 September 5-7, 2023	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance evaluation
13	Kunjungan Kerja ke PTPN VII - Palembang Business Visit to PTPN VII - Palembang	3-5 Oktober 2023 October 3-5, 2023	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance evaluation
14	Kunjungan Kerja ke PTPN VIII (Kebun Ciater) Business Visit to PTPN VIII (Ciater Plantation)	13 Oktober 2023 October 13, 2023	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance evaluation
15	Kunjungan Kerja ke PTPN III (*Stand Alone*) Business Visit to PTPN III (Stand Alone)	13-15 November 2023 November 13-15, 2023	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance evaluation
16	Kunjungan Kerja ke PTPN IV Medan Business Visit to PTPN IV Medan	13-15 November 2023 November 13-15, 2023	Evaluasi kinerja keuangan dan operasional korporasi Financial and operational corporate performance evaluation

Rapat Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang ada dalam Perseroan, seluruh anggota Direksi dapat mengadakan rapat DIreksi paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. Hasil keputusan yang didapatkan pada Rapat Direksi diputuskan melalui musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terdapat mufakat melalui musyawarah tersebut, maka keputusan dalam Rapat Direksi ditentukan melalui pengambilan suara terbanyak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Hingga akhir tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan 40 (empat puluh) kali rapat Direksi. Rincian mengenai rapat Direksi pada tahun 2023 telah diuraikan melalui tabel berikut: tersebut:

Board of Directors Meeting

Based on the Articles of Association and the Board Manual of the Company, all members of the Board of Directors can hold Board of Directors meetings at least once every month. Decisions reached in Board of Directors meetings are made through deliberation and consensus. However, if consensus is not reached through deliberation, decisions in the Board of Directors meetings are determined by a majority vote. Dissenting opinions in the Board of Directors meetings must be clearly recorded in the meeting minutes along with the reasons for the dissenting opinions.

Until the end of 2023, the Board of Directors has held 40 (fourty) Board of Directors meetings. The details of the Board of Directors meetings in 2023 are outlined in the following table:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Lokasi Locations	Agenda Agenda	Peserta Percentage	Jumlah Kehadiran Total of Attendances	Persentase Percentage
1.	2 Januari 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	7	87,5%
2.	17 Januari 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	5	62,5%
3.	6 Februari 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	9	7	77,7%
4.	13 Februari 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	9	7	77,7%
5.	21 Februari 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	9	7	77,7%
6.	13 Maret 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	9	8	88,8%
7.	15 Maret 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	9	8	88,8%
8.	13 April 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	4	50%
9.	5 Mei 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	8	100%
10.	15 Mei 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	8	100%
11.	29 Mei 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	8	100%
12.	5 Juni 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	8	100%
13.	3 Juli 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	6	75%
14.	5 Juli 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	7	87,5%

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Lokasi Locations	Agenda Agenda	Peserta Percentage	Jumlah Kehadiran Total of Attendances	Persentase Percentage
15.	17 Juli 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	6	75%
16.	24 Juli 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	8	100%
17.	24 Juli 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	8	100%
18.	31 Juli 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	6	75%
19.	7 Agustus 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	8	100%
20.	23 Agustus 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	6	75%
21.	12 September 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	7	87,5%
22.	18 September 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	5	62,5%
23.	20 September 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	6	75%
24.	20 September 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	6	75%
25.	25 September 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	6	75%
26.	4 Oktober 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	7	87,5%
27.	16 Oktober 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	7	87,5%
28.	23 Oktober 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	8	100%
29.	27 Oktober 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	6	75%
30.	6 November 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	5	62,5%
31.	13 November 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	7	87,5%
32.	16 November 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	5	62,5%
33.	20 November 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	6	75%
34.	22 November 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	8	100%
35.	28 November 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	8	100%
36.	29 November 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	6	75%
37.	4 Desember 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	8	100%

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Lokasi Locations	Agenda Agenda	Peserta Percentage	Jumlah Kehadiran Total of Attendances	Persentase Percentage
38.	11 Desember 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	8	6	75%
39.	20 Desember 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	7	6	85,7%
40.	30 Desember 2023	Kantor *Holding* PTPN III (Persero) PTPN III (Persero) Holding Office	*Update Current Issues*	7	6	85,7%

Rekapitulasi kehadiran Direksi pada Rapat Internal Direksi dapat dilihat di bawah ini:

Recapitulation of Attendance of the Board of Directors at Internal Meetings:

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Total of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total of Attendances	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Mohammad Abdul Ghani	40	40	100%
Denaldy Mulino Mauna	40	25	62,5%
Seger Budiarjo	40	37	92,5%
Sucipto Prayitno	-	-	-
Dwi Sutoro	40	30	75%
Ahmad Haslan Saragih	-	-	-
M. Iswahyudi	40	37	92,5%
Mahmudi	40	31	77,5%
Doni P. Gandamihardja	38	38	100%
M. Arifin Firdaus	38	34	89,4%
Rata-rata / Average			**86%**

Keterangan | Note:
Sucipto Prayitno mulai menjabat pada tanggal 19 Desember 2023 | Sucipto Prayitno began his term of office on December 19, 2023.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

DISCLOSURE OF AFFILIATIONS BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJORITY AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Hingga akhir tahun tahun 2023, status pemegang saham dan pengendali dari *Holding* Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah Pemerintah Republik Indonesia, dengan 100% kepemilikan saham.

Information Regarding Major and Controlling Shareholders

As of the end of 2023, the status of the major and controlling shareholder of Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) is the Government of the Republic of Indonesia, with 100% ownership of the shares.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/ Pengendali

Untuk menghindari benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan di dalam Perseroan, seluruh Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama, serta Pemegang Saham Pengendali *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan. Rincian mengenai hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama dapat dirincikan sebagai berikut:

Disclosure of Affiliations Between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders

To avoid conflicts of interest in decision-making within the Company, all members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Major Shareholders, and Controlling Shareholders of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) do not have any affiliate relationships, either financially or through family ties. The details regarding affiliate relationships between the Board of Commissioners, Board of Directors, and Major Shareholders are as follows:

Nama Name	**Hubungan Afiliasi dengan** Affiliations with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan)** Government of the Republic of Indonesia (Major/Controlling Shareholders)
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Zulkifli Zaini	×	×	×
Erwan Pelawi	×	×	×
Amal Bakti Pulungan	×	×	×
Asep Subarkah Yusuf	×	×	×
Arie Yuriwin	×	×	×
Wisto Prihadi	×	×	×
Ardan Adiperdana	×	×	×
Alhilal Hamdi	×	×	×
Suyus Windayana	×	×	×
Tsamara Amany Alatas	×	×	×

Nama Name	Hubungan Afiliasi dengan Affiliations with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan)** Government of the Republic of Indonesia (Major/Controlling Shareholders)
Direksi / Board of Directors			
Mohammad Abdul Ghani	×	×	×
Denaldy Mulino Mauna	×	×	×
Seger Budiarjo	×	×	×
Sucipto Prayitno	×	×	×
Dwi Sutoro	×	×	×
Ahmad Haslan Saragih	×	×	×
M. Iswahyudi	×	×	×
Mahmudi	×	×	×
Doni P. Gandamihardja	×	×	×
M. Arifin Firdaus	×	×	×

✓= ada | × = tidak ada
✓ = applicable | ×= not applicable

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
DISCLOSURE OF CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Adapun rincian mengenai hubungan kepengurusan antar anggota Direksi pada Perseroan lain di tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

The details regarding the management relationships among the members of the Board of Directors in other companies in 2023 can be outlined as follows:

Nama Name	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Management in Other Companies/Institutions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As Member of Board of Directors	**Jabatan Lainnya** Other Position
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Zulkifli Zaini	×	×	×
Erwan Pelawi	×	×	×
Amal Bakti Pulungan	×	×	×
Asep Subarkah Yusuf	×	×	✓

Nama / Name	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain / Management in Other Companies/Institutions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris / As Member of Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi / As Member of Board of Directors	Jabatan Lainnya / Other Position
Arie Yuriwin	×	✓	✓
Wisto Prihadi	×	×	×
Ardan Adiperdana	×	×	×
Alhilal Hamdi	×	×	×
Suyus Windayana	×	×	×
Tsamara Amany Alatas	×	×	×
Direksi | Board of Directors			
Mohammad Abdul Ghani	✓	×	×
Denaldy Mulino Mauna	✓	×	×
Seger Budiarjo	×	×	×
Sucipto Prayitno	×	×	×
Dwi Sutoro	✓	×	×
Ahmad Haslan Saragih	✓	×	×
M. Iswahyudi	×	×	×
Mahmudi	×	×	×
Doni P. Gandamihardja	✓	×	×
M. Arifin Firdaus	×	×	×

✓= ada | × = tidak ada
✓ = applicable | ×= not applicable

Penjelasan terkait kepengurusan pada perusahaan/institusi lain, adalah sebagai berikut:

The explanation related to the management positions in other companies/institutions is as follows:

Nama / Name	Jabatan Pada Perusahaan/Instansi Lain / Position in Other Companies/Institutions
Dewan Komisaris | Board of Commissioners	
Zulkifli Zaini	Tidak ada / None
Erwan Pelawi	Tidak ada/ None
Amal Bakti Pulungan	Tidak ada/ None
Asep Subarkah Yusuf	Deputi Kontra Intelijen, Badan Intelijen Negara (BIN) Deputy of Counterintelligence, State Intelligence Agency (BIN)

Nama Name	Jabatan Pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Companies/Institutions
Arie Yuriwin	• Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Advisor di Bidang Pertanahan pada beberapa BUMN (PT Angkasa Pura I, PT Sucofindo, Perum Perumnas, PT KAI, PT Pertamina dan PT Pelindo II) dan SKK Migas) • Director General of Land Procurement, Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency • Advisor in the field of Land Affairs at several SOEs (PT Angkasa Pura I, PT Sucofindo, Perum Perumnas, PT KAI, PT Pertamina, and PT Pelindo II) and SKK Migas
Wisto Prihadi	Tidak ada / None
Ardan Adiperdana	Tidak ada / None
Alhilal Hamdi	Tidak ada / None
Suyus Windayana	Tidak ada / None
Tsamara Amany Alatas	Tidak ada / None
Direksi | Board of Directors	
Mohammad Abdul Ghani	Komisaris SGN Commissioner of SGN
Denaldy Mulino Mauna	Komisaris PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara Commissioner of PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
Seger Budiarjo	Ketua Dewan Pengawas DAPENBUN Chairman of the Supervisory Board of DAPENBUN
Sucipto Prayitno	Tidak ada / None
Dwi Sutoro	Tidak ada / None
Ahmad Haslan Saragih	Komisaris Utama PT Kawasan Industri Nusantara President Commissioner of PT Kawasan Industri Nusantara
M. Iswahyudi	Tidak ada / None
Mahmudi	Tidak ada / None
Doni P. Gandamihardja	Komisaris PT Asuransi Jasa Tania Tbk Commissioner of PT Asuransi Jasa Tania Tbk
M. Arifin Firdaus	Tidak ada / None

Seluruh rangkap jabatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota Direksi telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada rangkap jabatan yang dimiliki seluruh anggota Direksi Perseroan dengan entitas anak merupakan bagian representasi manajerial dalam kelompok usaha *Holding* Perkebunan Nusantara III (Persero). Sementara pada rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris dengan Kementerian merupakan bagian representasi pengawasan atas pengurusan Perseroan oleh Direksi oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku entitas pemilik akhir.

All concurrent positions held by each member of the Board of Directors comply with the applicable laws and regulations. The concurrent positions held by all members of the Company's Board of Directors with subsidiaries are part of the managerial representation within the Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) business group. Meanwhile, the concurrent positions of the members of the Board of Commissioners with the Ministry represent the supervision of the Company's management by the Board of Directors on behalf of the Government of the Republic of Indonesia as the ultimate owner entity.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ada di *Holding* Perkebunan Nusantara III (Persero) wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, kepemilikan saham yang dimiliki oleh setiap Dewan Komisaris dan Direksi juga akan diperbaharui setiap tahun. Berikut merupakan rincian kepemilikan saham yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2023:

Each member of the Board of Commissioners and Board of Directors at Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) is required to disclose their share ownership, both domestically and internationally. Additionally, the share ownership of each member of the Board of Commissioners and Board of Directors will be updated annually. The following is the detailed share ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023:

	Kepemilikan Saham / Share Ownership		
	Perusahaan / Company	**Entitas Anak dan Afiliasi** / Subsidiaries and Affiliates	**Perusahaan Lain (Lebih dari 5%)** / Other Companies (More Than 5%)
Dewan Komisaris | Board of Commissioners			
Zulkifli Zaini	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Erwan Pelawi	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Amal Bakti Pulungan	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Asep Subarkah Yusuf	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Arie Yuriwin	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Wisto Prihadi	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Ardan Adiperdana	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Alhilal Hamdi	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Suyus Windayana	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Tsamara Amany Alatas	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Direksi | Board of Directors			
Mohammad Abdul Ghani	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Denaldy Mulino Mauna	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Seger Budiarjo	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Sucipto Prayitno	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Dwi Sutoro	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Ahmad Haslan Saragih	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
M. Iswahyudi	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Mahmudi	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Doni P. Gandamihardja	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
M. Arifin Firdaus	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None

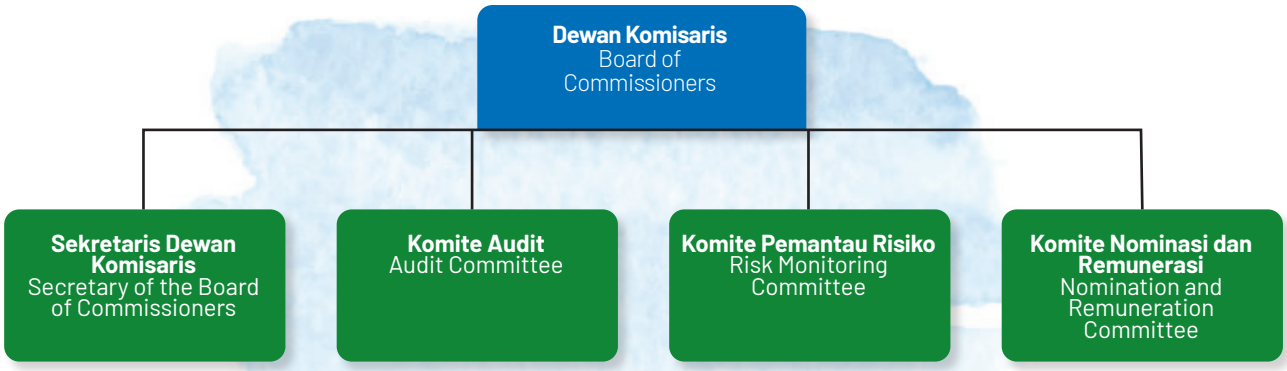
Perseroan dan entitas anak serta afiliasi tidak melakukan aksi perdagangan saham kepada publik, selain itu PTPN III (Persero) juga tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Oleh karena itu, manajemen tidak memiliki saham baik saham Perseroan maupun entitas anak serta afiliasi.

The Company and its subsidiaries and affiliates do not engage in stock trading with the public, and PTPN III (Persero) also does not have a management stock ownership program. Therefore, the management does not hold any shares, whether in the Company, subsidiaries, or affiliates.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGANS

Dalam menjalankan fungsinya, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, yakni, Komite Audit, Komite Pemantau risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

In carrying out its functions, duties, and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and Committees responsible to the Board of Commissioners, namely, the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee.



SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Salah satu organ pendukung kerja Dewan Komisaris yaitu Sekretaris Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris. Selain itu, peran Sekretaris Dewan Komisaris juga sangat penting dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan standar terbaik dan regulasi yang berlaku.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Hingga saat ini, Sekretaris Dewan Komisaris masih dijabat oleh Sutrisno. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan diatur berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-10/KOM/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III. Berikut merupakan rincian mengenai profil Sekretaris Dewan Komisaris PTPN III (Persero).

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

One of the supporting organs of the Board of Commissioners is the Secretary of the Board of Commissioners, who has tasks and functions in organizing administrative and secretarial activities related to all Board of Commissioners' activities. Additionally, the role of the Secretary of the Board of Commissioners is crucial in ensuring the implementation of GCG (Good Corporate Governance) principles according to the best standards and applicable regulations

Secretary of the Board of Commissioners

Until now, the Secretary of the Board of Commissioners is still held by Sutrisno. The appointment of the Company Secretary is governed by the Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-10/KOM/VIII/2022 dated August 26, 2022, regarding the Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Below are the details of the profile of the Secretary of the Board of Commissioners of PTPN III (Persero).

Sutrisno

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners



Periode Jabatan | Period of Position	
01 Juni 2022 – 31 Mei 2024, Periode Ke-2	June 1, 2022 – May 31, 2024, 2nd Period
Usia | Age	
43 tahun	43 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian citizen
Domisili | Residence	
Depok	Depok
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia	Bachelor's Degree, Economy, University of Indonesia
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Penata Kelola Perusahaan Negara Muda, 1 April 2021 - Sekarang • Koordinator, 29 Desember 2020—31 Maret 2021 • Pengendali Kelompok, 26 Oktober 2020—26 Desember 2020 • Pengendali Sub Kelompok, 9 Juni 2020—25 Oktober 2020 • Kepala Sub Bidang Industri Agro dan Farmasi, 30 Oktober 2015 -6 Juni 2020 • Kepala Sub Bidang Aneka Industri, 20 Mei 2014—29 Oktober 2015	• Junior SOE Corporate Portfolio Specialist, April 1, 2021 - present • Coordinator, December 29, 2020 - March 31, 2021 • Group Controller, October 26, 2020 - December 26, 2020 • Sub-Group Controller, June 9, 2020 - October 25, 2020 • Head of Agro and Pharmaceutical Industry Sub-Division, October 30, 2015 - June 6, 2020 • Head of Various Industries Sub-Division, May 20, 2014 - October 29, 2015
Penugasan BUMN Grup | Assignment of SOE Group	
• Sekretaris Dewan Komisaris PTPN III, 3 Juni 2019 - Sekarang • Sekretaris Dewan Pengawas Perum BULOG, Agustus 2017—Jun i 2019 • Sekretaris Dewan Komisaris PTPN XII, Agustus 2013 - Juni 2017	• Secretary of the Board of Commissioners of PTPN III, June 3, 2019 - Present • Secretary of the Board of Commissioners of PTPN III, June 3, 2019 - Present • Secretary of the Board of Commissioners of PTPN XII, August 2013 - June 2017

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
2. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
3. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat Dewan Komisaris;
4. Menyusun Rencana kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris:
   a. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris;
   b. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan GCG;
   c. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara Berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners are outlined as follows:

1. Prepare minutes of the Board of Commissioners' meetings in accordance with the Company's Articles of Association;
2. Administer Board of Commissioners' documents, including incoming and outgoing correspondence, meeting minutes, and other documents;
3. Prepare for meetings, including preparing materials for the Board of Commissioners' meetings;
4. Develop the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners.
5. Draft reports for the Board of Commissioners:
   a. Perform other tasks assigned by the Board of Commissioners;
   b. Ensure that the Board of Commissioners complies with regulations and applies Good Corporate Governance (GCG);
   c. Provide necessary information to the Board of Commissioners periodically and/or upon request;

d. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
e. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain.

d. Coordinate with committee members, if necessary, to facilitate the Board of Commissioners' tasks;
e. Act as a liaison between the Board of Commissioners and external parties.

KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Selain itu, pembentukan Komite Audit dalam Perseroan juga bertujuan membantu Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yaitu Perseroan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan adil.

Selain itu, keberadaan Komite Audit juga merupakan hal yang wajib dalam organ Perseroan agar tujuan tata kelola perusahaan yang baik dapat terwujud. Hal tersebut juga diatur berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

Kemudian, Pembentukan Komite Audit secara khusus mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, serta Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/ MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

AUDIT COMMITTEE

The Board of Commissioners establishes the Audit Committee to assist in promoting good corporate governance, ensuring adequate internal control structures, enhancing the quality of financial reporting and transparency, and reviewing the scope, accuracy, independence, and objectivity of public accountants. Additionally, the formation of the Audit Committee within the Company aims to assist in implementing good corporate governance principles, ensuring transparent, accountable, responsible, independent, and fair management of the Company.

Furthermore, the existence of the Audit Committee is mandatory within the Company's structure to achieve good corporate governance objectives. This is also regulated based on Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs) and Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs.

Moreover, the formation of the Audit Committee specifically refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 regarding the Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, and Minister of SOEs Decree No. 117/MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices, which has been updated with Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 regarding the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan Independensi
Berdasarkan persyaratan Independensi, untuk dapat menjadi anggota Komite Audit khususnya dari pihak independen, seseorang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah terikat dalam pekerjaan atau penugasan yang memberikan jasa audit, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan;
2. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah terikat dalam kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan;

Membership Requirements for the Audit Committee

Independence Requirements
Based on independence requirements, to become a member of the Audit Committee, particularly as an independent party, one must meet the following criteria:
1. Within the last 12 months prior to appointment by the Board of Commissioners, not engaged in work or assignments providing audit services, legal consulting services, or other consulting services to the Company;

2. Within the last 12 months prior to appointment by the Board of Commissioners, not involved in the authority and responsibility to plan, lead, or control the Company's activities;

3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
4. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;
5. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semendawa sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham;
6. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris/ Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada BUMN/ Perusahaan lain;
7. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit, anggota Komite Lain pada perusahaan dan/atau anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain.

Persyaratan Kompetensi

Sedangkan pada persyaratan secara kompetensi, terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh anggota Komite Audit:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/ pemeriksaan;
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
3. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis perusahaan dan pengetahuan yang cukup di bidang sistem dan teknologi informasi;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut BUMN dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan;
5. Mampu berkomunikasi secara efektif.

Ketentuan Masa Jabatan

Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan ialah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Audit Tahun 2023

Sampai akhir tahun 2023, susunan Komite Audit telah mengalami perubahan. Perubahan susunan Komite Audit diatur berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/ KOM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023. tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara. Berikut merupakan rincian komposisi Komponen Komite Audit di tahun 2023:

3. No direct or indirect business relationship related to the Company's activities;
4. No personal interests/connections that could have negative impact and conflicts of interest with the Company;
5. No consanguineous or affinal relationships up to the third degree with Board of Commissioners members, Directors, or Shareholders;
6. Not concurrently serving as a Board of Commissioners member, Secretary/Board Secretariat Staff at other SOEs/ companies;
7. Not concurrently serving as a member of the Audit Committee, other committees in companies, and/or committees in other SOEs/companies.

Competence Requirements

Regarding competence requirements, there are several criteria that Audit Committee members must fulfill:

1. Having good integrity and sufficient knowledge and work experience in the supervision/audit field;
2. One member of the Audit Committee must have an educational background or expertise in accounting or finance;
3. One member of the Audit Committee must understand the company's industry/business and have sufficient knowledge in information systems and technology;
4. Have adequate knowledge of regulations, especially those related to SOEs and regulations concerning the Company's operations;
5. Able to communicate effectively.

Provision on Term of Office

The term of office for Audit Committee members who are not Board of Commissioners members is 3 (three) years and may be extended once for an additional 2 (two) years, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss at any time.

Number, Composition, and Structure of the Audit Committee in 2023

As of the end of 2023, the composition of the Audit Committee has changed. The change in the Audit Committee's composition is regulated based on Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-01/KOM/I/2023 dated January 17, 2023, regarding the Appointment of Audit Committee Members of PT Perkebunan Nusantara (Persero). The following is a detailed breakdown of the Audit Committee components in 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Serving Period
Wisto Prihadi	Komisaris merangkap Ketua Commissioner concurrently serves as Head	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-03/KOM/IX/2021 Decree of the Board of Commissioners No. KEP-03/KOM/IX/2021	1 September 2021 – 19 Desember 2023 September 1, 2021 - December 19, 2023	Ke-1 1st
Amal Bakti Pulungan	Komisaris Independen merangkap Anggota Independent Commissioner concurrently serves as Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-05/KOM/II/2022 Decree of the Board of Commissioners No. KEP-05/KOM/II/2022	02 Februari 2022 – 19 Desember 2023 February 2, 2022 - December 19, 2023	Ke-1 1st
Arie Yuriwin	Komisaris Independen merangkap Anggota Independent Commissioner concurrently serves as Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-05/KOM/II/2022 Decree of the Board of Commissioners No. KEP-05/KOM/II/2022	02 Februari 2022 – 19 Desember 2023 February 2, 2022 - December 19, 2023	Ke-1 1st
Ardan Adiperdana	Komisaris Independen merangkap Anggota Independent Commissioner concurrently serves as Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-05/KOM/II/2022 Decree of the Board of Commissioners No. KEP-06/KOM/II/2022	31 Maret 2022 – 19 Desember 2023 March 31, 2022 - December 19, 2023	Ke-1 1st
Bahri Efendi Dongoran	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-01/KOM/III/2021 Decree of the Board of Commissioners No. KEP-01/KOM/III/2021	10 Maret 2021–Sekarang March 10, 2021 to present	Ke-2 2nd
Suka Edi Prasetyo	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-05/KOM/X/2021 Decree of the Board of Commissioners No. KEP-05/ KOM/X/2021	07 Oktober 2021–Sekarang October 7, 2021 to present	Ke-1 1st

Profil Ketua Komite Audit dan anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perseroan di buku laporan tahun ini. Adapun profil anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The profiles of the Head of Audit Committee and its members who are also Board of Commissioners can be found in the Company Profile section of this year's annual report. As for the profiles of Audit Committee members who are not Board of Commissioners, are as follows:

Bahri Efendi Dongoran

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Member of Audit Committee/ Independent Party



Periode Jabatan | Period of Position	
10 Maret 2021-Sekarang	March 10, 2021 - Present
Usia | Age	
64 tahun	64 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian citizen
Domisili | Residence	
Medan	Medan
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
Insinyur Agrometeorologi, Institut Pertanian Bogor (1984)	Engineer, Agro Meteorology, IPB University (1984)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Konsultan Hidrologis , 1984—1986, PT Multi Pihbeta • Asisten Kebun 1986—1992 , PT Socfindo • Asisten Kepala, 1992—1993, PT Socfindo • Estate Manager, 1994—2009 PT Socfindo • Group Manager Wilayah Serdang Bedagai dan batubara, Sumatera Utara • Kepala bagian Umum/Direktur SDM, 2010—2019, PT Socfindo • Konsultan Manajemen Agronomi, PT Mapoli Raya	• Hydrological Consultant, 1984 to 1986, PT Multi Pihbeta • Plantation Assistant 1986-1992, PT Socfindo • Assistant Head, 1992-1993, PT Socfindo • Estate Manager, 1994-2009 PT Socfindo • Group Regional Manager for Serdang Bedagai and Coal, North Sumatra • Head of General Affairs/Director of Human Resources, 2010-2019, PT Socfindo • Agronomy Management Consultant, PT Mapoli Raya

Suka Edi Prasetyo

Anggota Komite Audit/ Pihak Independen
Member of Audit Committee/ Independent Party



Periode Jabatan | Period of Position

7 Oktober 2021-Sekarang	October 7, 2021 - Present

Usia | Age

38 tahun	38 years old

Kewarganegaraan | Nationality

Warga Negara Indonesia	Indonesian citizen

Domisili | Residence

Depok	Depok

Riwayat Pendidikan | Educational Background

• Diploma, Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2005) • Sarjana, Akuntansi, Universitas Indonesia (2009) • Magister Manajemen, Program Studi Manajemen dan Bisnis, Institut Pertanian Bogor (2022)	• Diploma, Accounting, State College of Accountancy (2005) • Bachelor's Degree in Accounting, University of Indonesia (2009) • Master of Management, Management and Business Study Program, IPB University (2022)

Pengalaman Kerja | Work Experience

• Penata Kelola Perusahaan Negara Muda, 1 April 2021 - Sekarang, Kementerian BUMN	• Junior State-Owned Enterprise Governance Officer, April 1, 2021 - Present, Ministry of State-Owned Enterprises
• Sub Koordinator, 29 Desember 2020 - 31 Maret 2021, Kementerian BUMN	• Sub Coordinator, December 29, 2020 - March 31, 2021, Ministry of State-Owned Enterprises
• Pengendali Sub Kelompok, 9 Juni 2020 Oktober 2020 - 28 Desember 2020, Kementerian BUMN	• Sub Group Controller, June 9, 2020 December 28, 2020, Ministry of State-Owned Enterprises
• Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Ib2, 22 Oktober 2015 - 8 Juni 2020, Kementerian BUMN	• Head of Financial Services, Survey Services, and Consultant Business Subdivision, October 22, 2015 - June 8, 2020, Ministry of State-Owned Enterprises
• Kepala Subbagian Perlengkapan dan Pengelola Barang Milik Negara, 20 Mei 2014 - 21 Oktober 2015, Kementerian BUMN	• Head of Equipment and State-Owned Assets Management Subdivision, May 20, 2014 - October 21, 2015, Ministry of State-Owned Enterprises

Penugasan BUMN Grup | Assignment of SOE Group

• Anggota Komite Audit, 7 Oktober 2021-7 Oktober 2024, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) • Anggota Komite Audit, 1 Juli 2019-1 Oktober 2021, PT Angkasa Pura (Persero) • Anggota Komite Audit, 1 Juli 2014-1 Juli 2019, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) • Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, 23 Desember 2013 - 1 Juli 2014, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	• Member of the Audit Committee, October 7, 2021 - October 7, 2024, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) • Member of the Audit Committee, July 1, 2019 - October 1, 2021, PT Angkasa Pura (Persero) • Member of the Audit Committee, July 1, 2014 - July 1, 2019, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) • Secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board, December 23, 2013 - July 1, 2014, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

Independensi Komite Audit

Sebagaimana yang telah diatur dalam *Audit Committee Charter* yang diperbaharui secara berkala menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, untuk menguatkan independensi dalam Komite Audit, Komite Audit juga telah menandatangani pernyataan independensi Komite Audit. Adapun kriteria independensi anggota Komite Audit PTPN III (Persero) ialah sebagai berikut:

Independence of the Audit Committee

As stipulated in the periodically updated Audit Committee Charter in compliance with prevailing laws and regulations, the Audit Committee carries out its functions and duties professionally and independently, without interference from any parties not in accordance with the laws and regulations. Furthermore, to strengthen independence within the Audit Committee, the Audit Committee has also signed a statement of independence. The criteria for independence of members of the Audit Committee at PTPN III (Persero) are as follows:

Aspek Independensi Independency Aspect	Bahri Efendi Dongoran	Suka Edi Prasetyo
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having financial relations with the Board of Commissioners and Directors	×	×
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, entitas anak maupun entitas afiliasi Holding management positions in the Company, subsidiaries, or affiliated entities	×	×
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung Owning Company shares, directly or indirectly	×	×
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Having familial relationships with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow Committee members	×	×
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Holding positions in political parties, government offices, or agencies	×	×

✓= ada | × = tidak ada
✓ = applicable | ×= not applicable

Pedoman Kerja: Piagam Komite Audit

Komite Audit menetapkan pedoman Komite Audit pada bulan Mei 2019, piagam tersebut memiliki fungsi untuk mengatur hal-hal mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta mekanisme kerja Komite Audit serta hubungannya dengan manajemen.

Work Guidelines: Audit Committee Charter

The Audit Committee established its guidelines in May 2019. This charter functions to regulate matters concerning the tasks, responsibilities, authorities, and working mechanisms of the Audit Committee, as well as its relationship with management.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menilai Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
   a. Komite Audit memonitor kecukupan upaya Direksi dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan;
   b. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap keandalan sistem pengendalian internal Perseroan guna memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. Assessing the Effectiveness of the Internal Control System
   a. Monitoring the adequacy of the Board's efforts in implementing, developing, and maintaining an effective internal control system to safeguard the Company's investments and assets;
   b. Evaluating the reliability of the Company's internal control system to provide input and improvement suggestions to enhance the effectiveness of internal control systems, risk management, and information and

internal, manajemen risiko, dan sistem informasi dan komunikasi;

c. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek tata kelola sistem dan teknologi informasi yang dikembangkan oleh Perseroan.

2. Menilai Efektivitas Tugas Auditor Eksternal
   a. Setiap tahun, Laporan Keuangan tahunan Perseroan harus diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk melalui RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
   b. Komite Audit memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi calon auditor eksternal, merekomendasikan penunjukan, mengevaluasi independensi, mengawasi perencanaan dan pelaksanaan audit sampai memeriksa pelaporan serta monitor tindak lanjut hasil audit dari auditor eksternal;
   c. Komite Audit melakukan proses seleksi calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi Perseroan dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya;
   d. Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal;
   e. Komite Audit melakukan supervisi audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan bersikap objektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit.
3. Menilai Efektivitas Tugas Auditor Internal
   a. Komite Audit melakukan *monitoring* pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI);
   b. Analisis terhadap Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
   c. Penyelenggaraan rapat berkala dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas:
      i. Temuan hasil audit dan hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan sistem pengendalian intern, inefisiensi operasi Perseroan, kekeliruan penerapan standar akuntansi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
      ii. Tindak lanjut temuan hasil audit serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas SPI.
   d. Komite Audit melalui Dewan Komisaris dapat meminta SPI untuk melakukan audit khusus atau audit investigasi terhadap kemungkinan adanya indikasi penyelewengan/penggelapan atau penyimpangan di lingkungan Perseroan.
4. Melaksanakan Tugas Khusus
   a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh

communication systems;

c. Evaluating the long-term, medium-term, and short-term plans for governance of information systems and technology developed by the Company.

2. Assessing the Effectiveness of External Auditor Tasks
   a. Annually, the Company's Annual Financial Statements must be audited by an external auditor appointed through a General Meeting of Shareholders from a candidate proposed by the Board of Commissioners via the Audit Committee;
   b. The Audit Committee has the authority to carry out the selection process for the External Auditor candidates, recommend appointments, evaluate independence, oversee audit planning and execution, examine audit reports, and monitor follow-ups on the results of audits conducted by the external auditor;
   c. The Audit Committee conducts the selection process for External Auditor candidates in accordance with the prevailing procurement regulations for the Company and, if necessary, may seek the assistance of the Board of Directors in the procurement process;
   d. The Audit Committee may use reports or communicate with the External Auditor to identify potential weaknesses in internal controls;
   e. The Audit Committee supervises audits to ensure that the External Auditor adheres to the Standards of Professional Accountants and generally accepted accounting principles in Indonesia and maintains objectivity and independence in carrying out audit tasks.
3. Assessing the Effectiveness of Internal Auditor Tasks
   a. Monitoring the implementation of tasks by the Internal Audit Unit (IAU);
   b. Analyzing the Activity Implementation Reports of the IAU submitted to the Board of Commissioners via the Audit Committee;
   c. Holding regular meetings with the IAU at least once a month to discuss:
      i. Findings from audits and other indications of weaknesses in internal control systems, operational inefficiencies of the Company, misapplication of accounting standards, and violations of applicable regulations;
      ii. Follow-ups on audit findings and obstacles faced in carrying out IAU tasks.
   d. Through the Board of Commissioners, the Audit Committee may request the IAU to conduct special audits or investigative audits into potential indications of misconduct/embezzlement or deviations within the Company.
4. Performing Special Tasks
   a. Assigning special tasks to the Audit Committee by the

Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis dari Dewan Komisaris;

b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

c Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:

i. Memeriksa dan menganalisis semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris;

ii. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi bekerja sama dengan SPI atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit;

iii. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

Board of Commissioners is done through a written order from the Board of Commissioners;

b. The scope of work for special tasks assigned to the Audit Committee is entirely determined by the Board of Commissioners as long as it does not conflict with applicable laws and regulations;

c. In carrying out special tasks, the Audit Committee may:

i. Examine and analyze all records, documents, and other necessary information, including minutes of Board and Board of Commissioners meetings;

ii. If deemed necessary, conduct investigative audits in collaboration with the IAU or seek assistance from experts or consultants to assist the Audit Committee;

iii. The Audit Committee submits reports on the implementation of special tasks to the Board of Commissioners.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit memiliki fungsi dan tugas yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Division of Duties and Responsibilities in the Membership of the Audit Committee

All members of the Audit Committee have functions and tasks that can be outlined as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Responsibilities
Wisto Prihadi	Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	Sebagai koordinator anggota komite audit dalam memastikan pengawasan terhadap keuangan perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. As the coordinator of the audit committee members, I ensure oversight of the company's finances, compliance with internal procedures and applicable laws, as well as financial reporting in accordance with the applicable accounting standards.
Amal Bakti Pulungan	Komisaris Merangkap Anggota Komite Audit Commissioner concurrently serves as Member of the Audit Committee	• Berinteraksi dengan manajemen perusahaan untuk memahami isu-isu keuangan dan operasional yang mungkin mempengaruhi perusahaan • Memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan dengan akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. • Membimbing dan memberdayakan anggota komite audit non Dewan Komisaris agar dapat menjalankan tugas dengan baik. • Interacting with company management to understand financial and operational issues that may affect the company. • Ensuring that financial reports are prepared accurately and in accordance with applicable standards. • Guiding and empowering non-Board of Commissioners audit committee members to perform their duties effectively.
Arie Yuriwin	Komisaris Merangkap Anggota Komite Audit Commissioner concurrently serves as Member of the Audit Committee	
Ardan Adiperdana	Komisaris Merangkap Anggota Komite Audit Commissioner concurrently serves as Member of the Audit Committee	
Bahri Efendi Dongoran	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	• Mengawasi dan menilai efektivitas audit internal perusahaan. • Menyiapkan laporan rutin kepada dewan komisaris atau komite lainnya terkait kinerja operasional per komoditi. • Overseeing and evaluating the effectiveness of the company's internal audits. • Preparing regular reports to the board of commissioners or other committees regarding operational performance per commodity.

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Responsibilities
Suka Edi Prasetyo	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	• Berkomunikasi secara teratur dengan auditor eksternal untuk memastikan bahwa proses audit berjalan lancar. • Menyiapkan laporan rutin kepada dewan komisaris atau komite lainnya mengenai kinerja keuangan, hasil audit, temuan-temuan penting, dan rekomendasi perbaikan. • Communicating regularly with external auditors to ensure a smooth audit process. • Preparing regular reports to the board of commissioners or other committees regarding financial performance, audit findings, significant discoveries, and improvement recommendations.

Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi atas Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Komite Audit memiliki tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal. Adapun rincian mengenai tanggung jawab Komite Audit telah dirincikan sebagai berikut:

1. Setiap tahun, Laporan Keuangan Tahunan Perseroan harus diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk melalui RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
2. Komite Audit memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi calon auditor eksternal, merekomendasikan penunjukan, mengevaluasi independensi, mengawasi perencanaan dan pelaksanaan audit sampai memeriksa pelaporan serta monitor tindak lanjut hasil audit dari auditor eksternal;
3. Komite Audit melakukan proses seleksi calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi Perseroan dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya;
4. Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal;
5. Komite Audit melakukan supervisi audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan standar profesi akuntan publik dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan bersikap objektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit.

Audit Committee's Responsibility in Recommending the Appointment and Dismissal of External Auditor

The Audit Committee is responsible for providing recommendations regarding the appointment and dismissal of external auditors. The details of the Audit Committee's responsibilities are outlined as follows:

1. Annually, the Company's annual Financial Statements must be audited by an external auditor appointed through a GMS from candidates proposed by the Board of Commissioners via the Audit Committee;
2. The Audit Committee has the authority to conduct the selection process for external auditor candidates, recommend appointments, evaluate independence, oversee audit planning and execution, examine audit reporting, and monitor follow-up actions on audit findings from external auditors;
3. The Audit Committee conducts the selection process for external auditor candidates in accordance with the procurement regulations applicable to the Company and may seek assistance from the Board of Directors in the procurement process if necessary;
4. The Audit Committee may use reports or communicate with external auditors to identify potential weaknesses in internal controls;
5. The Audit Committee supervises audits to ensure that External Auditors comply with the standards of public accountancy profession and generally accepted accounting principles in Indonesia and maintain objectivity and independence in performing audit duties.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selalu berkomitmen untuk memfasilitasi setiap karyawan di Perseroan demi mewujudkan SDM yang unggul dan mampu bersaing. Pada pengembangan kompetensi Komite Audit, ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perseroan guna mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak mengimplementasikan program khusus yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi bagi anggota non-komisaris.

Competency Development of the Audit Committee

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is committed to facilitating every employee within the company to achieve excellent human resources capable of competing. The development of the Audit Committee's competencies is aimed at enhancing knowledge and skills relevant to the company's business to support the oversight duties of the Board of Commissioners.

Throughout 2023, the company did not implement any specific programs related to competency development for non-Commissioner members.

Rapat Komite Audit

Hingga akhir tahun 2023, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 46 (empat puluh enam) kali. Rincian mengenai rapat Komite Audit dapat dirincikan sebagai berikut:

Audit Committee Meeting

Until the end of 2023, the Audit Committee has conducted meetings 46 (fourty-six) times. Details regarding the Audit Committee meetings can be outlined as follows:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	
1.	3 Januari 2023 January 3, 2023	Pembahasan data kepemilikan Lahan Usulan Tanaman Ulang/Tanaman Konversi PTPN III *Stand Alone* Tahun 2023.	Discussion of Land Ownership Data for Proposed Replanting/PTPN III Stand Alone Conversion Plantation in 2023.
2.	12 Januari 2023 January 12, 2023	Menghadiri undangan pembahasan awal temuan uji tuntas Dana Pensiun.	Attend an invitation to discuss the initial findings of the Pension Fund due diligence.
3.	20 Januari 2023 January 20, 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan Desember 2022 (*Unaudited*).	Management Reports up to December 2022 (Unaudited).
4.	24 Januari 2023 January 24, 2023	Pembahasan *progress* audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.	Discussion of audit progress on the 2022 Financial Report.
5.	25 Januari 2023 January 25, 2023	Rencana struktur organisasi pasca integrasi PTPN.	Post PTPN integration organizational structure plan.
6.	26 Januari 2023 January 26, 2023	Pembahasan PKPT DAIN Tahun 2023.	Discussion of 2023 DAIN PKPT.
7.	31 Januari 2023 January 31, 2023	*Refreshment event* program Transformasi EBITDA Fase II .	Refreshment event for Phase II EBITDA Transformation program .
8.	2 Februari 2023 February 2, 2023	Pembahasan permohonan tanggapan atas rencana penyertaan modal pemerintah pusat terhadap barang milik negara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada PTPN III (Persero).	Discussion of requests for responses to the central government's capital investment plan for state-owned goods of the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia at PTPN III (Persero).
9.	07 Februari 2023 February 7, 2023	Pembahasan proses audit Tahun Buku 2022 dengan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN dengan agenda: 1. *Timeline* penyelesaian audit Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2022; 2. *Key Audit Matters* Standar Audit (SA) 701; 3. Indikasi temuan atau permasalahan audit Tahun Buku 2022; 4. Persiapan Standar Audit (SA) 600.	Discussion of the 2022 Financial Year audit process with the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of SOEs with the agenda: 1. Timeline for completing the audit of the 2022 Financial Year Consolidated Financial Statements; 2. Key Audit Matters Audit Standards (SA) 701; 3. Indication of audit findings or problems for the 2022 Financial Year; 4. Preparation of Auditing Standards (SA) 600.

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	
10.	09 Februari 2023 February 9, 2023	Realisasi pengawasan tahun 2022 dan Rencana Kerja Pengawasan Tahun 2023.	Realization of supervision in 2022 and Monitoring Work Plan for 2023.
11.	10 Februari 2023 February 10, 2023	1. Evaluasi program kerja Sub Divisi Manajemen Risiko; 2. Evaluasi efektivitas Manajemen Risiko PTPN III (Persero); 3. Profil risiko PTPN III (Persero); 4. *Update* RJPP 2023-2027 (Pemasaran, Retail, Hilirisasi, Integrasi Anak dan Cucu Perusahaan).	1. Evaluation of the Risk Management Sub Division work program; 2. Evaluation of the effectiveness of PTPN III (Persero) Risk Management; 3. PTPN III (Persero) risk profile; 4. Update on RJPP 2023-2027 (Marketing, Retail, Downstreaming, Integration of Company Children and Grandchildren).
12.	21 Februari 2023 February 21, 2023	Telaah Laporan Manajemen sampai dengan Januari 2023.	Review Management Reports up to January 2023.
13.	28 Februari 2023 February 28, 2023	*Progress meeting* pelaksanaan *general audit* Laporan Keuangan Konsolidasian PTPN III (Persero) dan Entitas Anak Tahun Buku 2022.	Progress meeting on the implementation of the general audit of the Consolidated Financial Statements of PTPN III (Persero) and Subsidiaries for the 2022 Fiscal Year.
14.	1 Maret 2023 March 1, 2023	*Kick Of Meeting Self Assessment Good Corporate Governance* Tahun Buku 2022.	Kick Of Meeting Self Assessment Good Corporate Governance Financial Year 2022.
15.	20 Maret 2023 March 20, 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan Februari 2023.	Evaluation of Management Reports up to February 2023.
16.	27 Maret 2023 March 27, 2023	Pembahasan tata kelola terintegrasi PTPN III (Persero) sebagai tindak lanjut PER-05/ MBU/09/2022.	Discussion of PTPN III (Persero) integrated governance as a follow- up to PER -05/ MBU/09/2022.
17.	15 April 2023 April 15, 2023	Evaluasi rencana Kerja Sama Operasional (KSO) PTPN III *Stand Alone* dan PTPN VIII.	Stand Alone and PTPN VIII Joint Operation plans.
18.	17 April 2023 April 17, 2023	1. *Update Monitoring* tindak lanjut temuan internal dan eksternal audit; 2. Temuan internal audit material/signifikan dari LHA tahun 2022/2023 di entitas PTPN Group dan rekomendasinya; 3. Rencana struktur organisasi, Penataan SDM (Auditor), Penyesuaian Program Kerja Divisi Internal Audit pasca aksi korporasi (pembentukan *subholding* PTPN IV dan PTPN I).	1. Update Monitoring follow-up to internal and external audit findings; 2. Material/significant internal audit findings from the 2022/2023 LHA in the PTPN Group entity and its recommendations; 3. Organizational structure plan, HR (Auditor) Arrangement, Internal Audit Division Work Program Adjustment after corporate action (establishment of PTPN IV and PTPN I subholdings).
19.	20 April 2023 April 20, 2023	Telaah Laporan Manajemen sampai dengan bulan Maret 2023.	Review Management Reports up to March 2023.
20.	27 April 2023 April 27, 2023	Pembahasan Surat Direksi PTPN III (Persero) tentang permohonan tanggapan tertulis Rencana Integrasi PTPN Group.	Discussion of the Letter from the Directors of PTPN III (Persero) regarding the request for a written response to the PTPN Group Integration Plan.
21.	9 Mei 2023 May 9, 2023	Pembahasan surat Direksi tentang Permohonan Persetujuan Tertulis atas Pemberian Pinjaman Pemegang Saham (*Shareholder Loan*) kepada PT Perkebunan Mitra Ogan.	Discussion of the Board of Directors' letter regarding the Request for Written Approval for Providing a Shareholder Loan to PT Perkebunan Mitra Ogan.
22.	10 Mei 2023 May 10, 2023	Rapat pembahasan isu-isu penting Perusahaan dengan Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan.	Meeting to discuss important Company issues with the Assistant Deputy for Plantations and Forestry.
23.	12 Mei 2023 May 12, 2023	Rapat pembahasan isu-isu strategis Holding dengan Wakil Menteri BUMN.	Meeting to discuss Holding's strategic issues with the Deputy Minister of SOEs.
24.	22 Mei 2023 May 22, 2023	Telaah Laporan Manajemen sampai dengan bulan April 2023.	Review Management Reports up to April 2023.

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	
25.	13 Juni 2023 June 13, 2023	Sosialisasi petunjuk teknis komposisi dan kualifikasi organ pengelola risiko oleh Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN.	Socialization of technical instructions for the composition and qualifications of risk management organs by the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of SOEs.
26.	16 Juni 2023 June 16, 2023	Telaah Laporan Manajemen sampai dengan bulan Mei 2023.	Review Management Reports up to May 2023.
27.	19 Juni 2023 June 19, 2023	Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2023 – 2027.	Discussion of the Company's Long Term Plan (RJPP) 2023 – 2027.
28.	27 Juni 2023 June 27, 2023	Membahas Surat Direksi No.DRU/KOM/1904/2023 dan DRU/KOM/1905 tentang permohonan tanggapan tertulis atas *repackaging* dalam rangka integrasi PTPN.	Discussing Directors' Letters No.DRU/KOM/1904/2023 and DRU/KOM/1905 regarding requests for written responses to repackaging in the context of PTPN integration.
29.	18 Juli 2023 July 18, 2023	Telaah Laporan Manajemen sampai dengan bulan Juni 2023.	Review Management Reports up to June 2023.
30.	03 Agustus 2023 August 3, 2023	1. *Review* pelaksanaan Audit sampai dengan bulan Juni 2023 (Semester 1); 2. *Review monitoring* tindak lanjut temuan audit yang lalu (internal dan eksternal); 3. Temuan audit khususnya audit tematik (Anper dan Komoditi Rugi); 4. *Update* Organisasi Audit setelah Aksi Korporasi (*subholding*); 5. Masalah-masalah yang dihadapi DAIN saat ini dan harapan ke Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti; 6. Optimalisasi peran DAIN dalam mengawal program integrasi PTPN Group.	1. Review of Audit implementation until June 2023 (Semester 1); 2. Monitoring review of follow-up to previous audit findings (internal and external); 3. Audit findings, especially thematic audits (Anper and Commodity Losses); 4. Audit Organization Update after Corporate Action (subholding); 5. Problems currently facing DAIN and expectations of the Board of Commissioners for follow-up; 6. Optimizing DAIN's role in overseeing the PTPN Group integration program.
31.	21 Agustus 2023 August 21, 2023	Telaah Laporan Manajemen sampai dengan bulan Juli 2023.	Review Management Reports up to July 2023.
32.	22 Agustus 2023 August 22, 2023	Penyampaian kinerja keuangan FY 2022 portofolio BUMN oleh Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko.	Submission of the FY 2022 financial performance of the BUMN portfolio by the Deputy for Finance and Risk Management.
33.	28 Agustus 2023 August 28, 2023	*Repackaging* PTPN Group.	repackaging .
34.	31 Agustus 2023 August 3, 2023	Pembahasan *update repackaging* PTPN Group.	Discussion of PTPN Group repackaging updates .
35.	4 September 2023 September 4, 2023	Pengadaan jasa audit konsolidasi PTPN Grup Tahun Buku 2023.	Procurement of PTPN Group consolidation audit services for the 2023 financial year.
36.	13 September 2023 September 13, 2023	Pembahasan *Inventory Turn Over* (ITO).	Discussion of Inventory Turn Over (ITO).
37.	20 September 2023 September 20, 2023	Telaah Laporan Manajemen sampai dengan bulan Agustus 2023.	Review Management Reports up to August 2023.
38.	26 September 2023 September 26, 2023	Forum penguatan governansi dan integrasi pelaporan Keuangan dengan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko.	Forum for strengthening governance and integration of financial reporting with the Deputy for Finance and Risk Management.
39.	2 Oktober 2023 October 2, 2023	Tata kelola terintegrasi PTPN III (Persero).	PTPN III (Persero) integrated governance.
40.	5 Oktober 2023 October 5, 2023	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024.	Board of Commissioners Work Plan and Budget for 2024.
41.	16 Oktober 2023 October 16, 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan September 2023.	Evaluation of Management Reports until September 2023.

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	
42.	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Evaluasi usulan RKAP Tahun 2024.	Evaluation of the 2024 RKAP proposal.
43.	16 November 2023 November 16, 2023	Telaah Laporan Manajemen sampai dengan bulan Oktober 2023.	Review Management Reports up to October 2023.
44.	24 November 2023 November 24, 2023	Pembahasan RKAP Tahun 2024 dengan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN.	Discussion of the 2024 RKAP with the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of SOEs.
45.	29 November 2023 November 29, 2023	1. *Review* PKPT sampai dengan bulan Oktober dan Prognosa 2023 serta temuan-temuan signifikan; 2. Rencana PKPT DAIN Tahun 2024; 3. Organisasi Audit pasca *Legal Day* 1, integrasi PTPN.	1. PKPT review up to October and 2023 Prognosis and significant findings; 2. DAIN PKPT Plan for 2024; 3. Audit Organization post Legal Day 1, PTPN integration.
46.	15 Desember 2023 December 15, 2023	Telaah Laporan Manajemen sampai dengan bulan November 2023.	Review Management Reports up to November 2023.

Berikut ini merupakan rekapitulasi dan tingkat kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat di tahun 2023.

The following is a summary and attendance rate of Audit Committee members in meetings throughout 2023.

Komite Audit Audit Committee	% Kehadiran % Attendance
Wisto Prihadi	100%
Amal Bakti Pulungan	100%
Arie Yuriwin	100%
Ardan Adiperdana	100%
Bahri Efendi Dongoran	100%
Suka Edi Prasetyo	100%

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit

Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Komite audit dinilai berdasarkan Piagam Komite Audit dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris menilai Komite melalui evaluasi terhadap perencanaan program kerja dan pelaksanaan program kerja yang telah disusun dan disahkan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga menilai kinerja Komite melalui pelaksanaan tugas khusus yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris serta melalui pemenuhan terhadap laporan-laporan Komite Dewan Komisaris (Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Penugasan, dan Laporan Kunjungan Kerja).

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the Audit Committee

The evaluation of the Audit Committee by the Board of Commissioners is based on the Audit Committee Charter and other regulations related to the Company. Additionally, the Board of Commissioners evaluates the Committee through an assessment of the planned work programs and the execution of these programs, which have been formulated and approved by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners also assesses the Committee's performance through the execution of special tasks assigned by the Board of Commissioners, as well as through the fulfillment of the Committee's reports to the Board of Commissioners (Quarterly Reports, Annual Reports, Assignment Reports, and Visit Reports).

Hingga akhir tahun 2023, Komite Audit telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan rincian sebagai berikut.

1. Menilai Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
2. Menilai efektivitas tugas Auditor Eksternal.
3. Menilai Efektivitas Tugas Auditor Internal.
4. Melaksanakan Tugas Khusus yang disampaikan melalui perintah tertulis dari Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penilaian Kinerja Komite Audit Oleh Dewan Komisaris

Hingga akhir tahun 2023, Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai pendukung Dewan komisaris. Penilaian yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Komite Audit dilaksanakan secara kualitatif, meliputi keaktifan Komite dalam menjalankan tugasnya, proses dokumentasi, dan rekomendasi yang diberikan.

Until the end of 2023, the Audit Committee had fulfilled its functions and tasks as follows:

1. Assessing the Effectiveness of Internal Control Systems.
2. Assessing the effectiveness of the External Auditor's tasks.
3. Assessing the Effectiveness of Internal Auditor's tasks.
4. Carrying out Special Tasks conveyed through written orders from the Board of Commissioners as long as they are not contrary to applicable regulations.

Performance Assessment of Audit Committee by the Board of Commissioners

Until the end of 2023, the Board of Commissioners evaluated that the Audit Committee had performed its role and functions as a supporter of the Board of Commissioners. The assessment conducted by the Board of Commissioners on the Audit Committee is qualitative, covering the Committee's activity in performing its tasks, documentation processes, and the recommendations provided.



KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat secara khusus dalam pengelolaan risiko Perusahaan. Adapun Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan kajian secara berkala atas kebijakan manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan atas kebijakan manajemen risiko;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi yang berkaitan dengan hubungan bisnis atau kegiatan usaha yang harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan melakukan analisis atas setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan aset perusahaan, dan kegiatan lain perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Komisaris;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan mengkaji Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Perusahaan, dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Perseroan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut;
6. Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RISK MONITORING COMMITTEE

The Board of Commissioners has established a Risk Monitoring Committee to assist the Board in overseeing and providing specific advice on the Company's risk management. The Risk Management Monitoring Committee has the following tasks:

1. Assisting the Board of Commissioners in conducting periodic reviews of risk management policies. These reviews serve as a basis for the Board of Commissioners' consideration and recommendation or approval of risk management policies;
2. Assisting the Board of Commissioners in reviewing and evaluating the accountability of the Board of Directors related to business relationships or activities that require recommendations or approvals from the Board of Commissioners;
3. Assisting the Board of Commissioners in evaluating and analyzing any proposals from the Board of Directors related to investment cooperation, capital injections, establishment of joint ventures, establishment of subsidiaries, divestment of corporate assets, and other company activities to obtain recommendations or approvals from the Board of Commissioners;
4. Assisting the Board of Commissioners in evaluating and reviewing the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Business Plan, and Long-Term Plan to obtain recommendations or approvals from the Board of Commissioners;
5. Assisting the Board of Commissioners in monitoring the main risks faced by the Company and ensuring that the Board of Directors has taken necessary steps to identify, measure, monitor, and control these risks;
6. Providing input to the Board of Commissioners for the improvement and development of the Company's Risk Management policies;
7. Carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners based on applicable laws and regulations.

Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Persyaratan Independen

Terdapat beberapa persyaratan independen yang perlu dipenuhi oleh Komite Pemantau Risiko, yaitu:

1. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah terikat dalam pekerjaan atau penugasan yang memberikan jasa manajemen risiko, jasa di bidang GCG, jasa konsultasi hukum, jasa audit dan jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan;

Membership Requirements of Risk Monitoring Committee

Independent Requirements

There are several independent requirements that need to be fulfilled by the Risk Monitoring Committee, namely:

1. In the last 12 (twelve) months prior to being appointed by the Board of Commissioners, they have not been involved in work or assignments providing risk management services, GCG services, legal consulting services, auditing services, and other consulting services to the Company;

2. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah terikat dalam kewenangan dan tanggung jawab merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
4. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;
5. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semendawa sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perseroan.

Persyaratan Kompetensi

Pada aspek kompetensi, terdapat beberapa persyaratan kompetensi yang perlu dimiliki oleh anggota Komite pemantau risiko, yaitu:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang Manajemen Risiko dan GCG;
2. Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki latar belakang Pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
3. Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko harus memahami industri/bisnis perusahaan dan pengetahuan yang cukup di bidang agroindustri;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut BUMN dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasional Perusahaan;
5. Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

Ketentuan Masa Jabatan

Adapun masa jabatan yang dimiliki oleh Komite Pemantau Risiko yang non- Dewan Komisaris paling lama ialah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2. In the last 12 (twelve) months prior to being appointed by the Board of Commissioners, they have not been involved in the authority and responsibility of planning, leading, or controlling the Company's activities;
3. They do not have any direct or indirect business relationships related to the Company's business activities;
4. They do not have personal interests/attachments that could have negative impacts and conflicts of interest with the Company;
5. They do not have any family relationships, whether by blood or marriage up to the third degree in a straight line or sideways, with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Shareholders of the Company.

Competency Requirements

In terms of competency, there are several requirements that members of the Risk Monitoring Committee need to meet, namely:

1. Having good integrity and sufficient knowledge and work experience in Risk Management and GCG;
2. One of the members of the Risk Monitoring Committee must have a background in education or expertise in accounting or finance;
3. One of the members of the Risk Monitoring Committee must understand the industry/business of the company and have sufficient knowledge in the agro-industry field;
4. Having adequate knowledge of legal regulations, especially those related to SOEs and regulations related to the Company's operations;
5. Able to communicate effectively and provide sufficient time to complete their tasks.

Provision on the Term of Office

The term of office for non-Board Commissioners members of the Risk Monitoring Committee is a maximum of 3 (three) years, and it can be extended once for an additional 2 (two) years during the term, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Pada tahun 2022, PTPN III (Persero) memiliki susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Number, Composition and Structure of Risk Monitoring Committee in 2023

In 2022, PTPN III (Persero) had the following composition of the Risk Management Committee membership:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks
1.	Erwan Pelawi	Ketua | Head	Komisaris | Commissioner
2.	Rini Widyastuti	Anggota | Member	Komisaris | Commissioner
3.	Asep Subarkah Yusuf	Anggota | Member	Komisaris | Commissioner
4.	Jones Batara Manurung	Anggota | Member	Komite | Committee
5.	Poerwitono Poedjiwahjono	Anggota | Member	Komite | Committee

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/KOM/I/2023 tanggal 8 Januari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, Hingga 31 Desember 2023 komposisi susunan Komite Pemantau Risiko telah mengalami perubahan sebagai berikut:

Based on the Board of Commissioners Decision No. KEP-02/KOM/I/2023 dated January 8, 2023 regarding the Appointment of Members of the Risk Monitoring Committee of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Until December 31, 2023, the composition of the Risk Monitoring Committee has changed as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Serving Period
Erwan Pelawi	Komisaris Independen merangkap Ketua Independent Commissioner concurrently serves as Head	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-02/KOM/I/2022 Board of Commissioners' Decision Letter Number KEP-02/KOM/I/2022	31 Januari 2022 – 19 Desember 2023 January 31, 2022 – December 19, 2023	Ke-1 1st
Wisto Prihadi	Komisaris Independen merangkap Ketua Independent Commissioner concurrently serves as Head	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-282/MBU/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-282/MBU/08/2021 dated August 25, 2021	25 Agustus 2021 – Sekarang August 25, 2021 – Present	Ke-1 1st
Asep Subarkah Yusuf	Komisaris merangkap Anggota Commissioner concurrently serves as Member	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-394/MBU/12/2023 Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-394/MBU/12/2023	31 Januari 2022 – Sekarang January 31, 2022 – Present	Ke-1 1st
Alhilal Hamdi	Komisaris merangkap Anggota Commissioner concurrently serves as Member	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-394/MBU/12/2023 Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-394/MBU/12/2023	08 Januari 2023 – Sekarang January 8, 2023 – Present	Ke-1 1st
Tsamara Amany Alatas	Komisaris merangkap Anggota Commissioner concurrently serves as Member	Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-394/MBU/12/2023 Minister of State-Owned Enterprises Decree No. SK-394/MBU/12/2023	19 Desember 2023 – Sekarang December 19, 2023 – Present	Ke-1 1st
Jones Batara Manurung	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-01/KOM/I/2022 Board of Commissioners' Decision Letter Number KEP-01/KOM/I/2022	31 Januari 2022 – Sekarang January 31, 2022 – Present	Ke-2 2nd

Profil tentang ketua Komite Pemantau Risiko dan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di buku laporan tahun ini, sedangkan profil tentang anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris dapat dilihat sebagai berikut:

Profile of the Chairperson of the Risk Monitoring Committee and committee members who are Board of Commissioners members can be found in the Company Profile section of this year's annual report. Meanwhile, the profiles of Risk Monitoring Committee members who are not Board of Commissioners members are as follows:

Jones Batara Manurung

Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen
Member of Risk Monitoring Committee/Independent Party



Periode Jabatan | Period of Position	
31 Januari 2022 – 31 Januari 2024, Periode Ke-2	January 31, 2022 - January 31, 2024, 2nd Period
Usia | Age	
48 tahun	48 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian citizen
Domisili | Residence	
Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Pertanian, Ilmu Tanah, Universitas Sumatera Utara (2003) • Magister Sains, Ilmu Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (2016)	• Bachelor of Agriculture, Soil Science, University of North Sumatra (2003) • Master of Science, Agricultural Economics, IPB University (2016)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Direktur Eksekutif Nasional dan Peneliti Ekonomi di Rumah Tani Indonesia 2010—2019 • Majelis Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) DKI Jakarta (2011—2017) • Ketua Badan Pengurus Ut Omnes Unum Sint Institute (2007—2011)	• National Executive Director and Economic Researcher at Rumah Tani Indonesia 2010 – 2019 • The Assembly of Members of the Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI) Jakarta (2011—2017) • Chairman of the Governing Body of Ut Omnes Unum Sint Institute (2007—2011)

Poerwitono Poedjiwahjono

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of Risk Monitoring Committee



Periode Jabatan | Period of Position	
26 Agustus 2022 –26 Agustus 2025, Periode Ke-1	August 26, 2022 - August 26, 2025, 1st Period
Usia | Age	
60 tahun	60 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian citizen
Domisili | Residence	
Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1988) • Magister Manajemen, Universitas Diponegoro (2005)	• Bachelor of Industrial Engineering, Bandung Institute of Technology (1988) • Master of Management, Diponegoro University (2005)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• PT Tripatra *Engineering, Project Management Consultant* bersama NTT Jepang di PT Telkom Bandung (1988—1989) • Direktorat Teknologi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara Bandung (1989) • *Staff Credit* urusan Pembiayaan Proyek, urusan Kredit besar bank Pembangunan Indonesia Kantor Pusat (1989—1999) • Senior Manager hingga Vice President PT Bank Mandiri (1999—2020) • Advisor Direktorat *Risk Management* PT Bank Syariah Mandiri (2020—2021) • Pengurus Bendahara-Direktur Koperasi Jasa Prima Perdana - Alco dengan anggota Alumni bank Mandiri	• PT Tripatra Engineering, project management consultant with NTT Japan at PT Telkom Bandung (1988—1989) • Directorate of Technology PT Industri Pesawat Terbang Nusantara Bandung (1989) • Credit Staff for Project Financing Affairs, Large Credit Affairs for Bank Pembangunan Indonesia Head Office (1989—1999) • Senior Manager to Vice President of PT Bank Mandiri (1999—2020) • Advisor to the Risk Management Directorate of PT Bank Syariah Mandiri (2020—2021) • Treasurer-Director of Jasa Prima Perdana Cooperative - Alco with Bank Mandiri Alumni membersri

Independensi Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana yang telah diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko yang diperbaharui secara terakhir kali pada Mei 2019 menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa kedudukan Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan fungsi, tugas dan pelaporan bersifat independen, objektif, dan profesional, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, untuk menguatkan independensi, Komite Pemantau Risiko telah menandatangani pernyataan independensi Komite Pemantau Risiko.

Adapun rincian mengenai aspek independensi Komite Pemantau Risiko, diuraikan sebagai berikut:

Independence of the Risk Monitoring Committee

As stipulated in the Risk Monitoring Committee Charter, last updated in May 2019 to align with applicable laws and regulations, the position of the Risk Monitoring Committee in performing its functions, duties, and reporting is independent, objective, and professional, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations. Furthermore, to strengthen its independence, the Risk Monitoring Committee has signed a statement of independence.

The details regarding the independence aspects of the Risk Monitoring Committee are outlined as follows:

Aspek Independensi Aspect of Independence	Jones Batara Manurung	Poerwitono Poedjiwahjono
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having financial relationships with the Board of Commissioners and the Board of Directors	×	×
Memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, entitas anak maupun entitas afiliasi Having management roles in the Company, subsidiaries, or affiliated entities	×	×

Aspek Independensi Aspek Independensi	Jones Batara Manurung	Poerwitono Poedjiwahjono
Memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung Holding shares in the Company, either directly or indirectly	×	×
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Having family relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow Committee members	×	×
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Serving as officials in political parties, government officials, and authorities	×	×

✓= ada | × = tidak ada
✓ = applicable | ×= not applicable

Pedoman Kerja: Piagam Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah menyusun Piagam Komite Pemantau Risiko dengan tujuan untuk memenuhi fungsi Komite Audit yang sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance*. Isi dari Piagam ini berisikan tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta mekanisme kerja Komite Pemantau Risiko.

Work Guidelines: Risk Monitoring Committee Charter

The Company has formulated the Risk Monitoring Committee Charter with the aim of fulfilling the functions of the Audit Committee in accordance with Good Corporate Governance provisions. The Charter contains duties, responsibilities, authorities, and the working mechanism of the Risk Monitoring Committee.

Tugas dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

Tugas Komite Pemantau Risiko

Adapun tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji secara berkala atas kebijakan manajemen risiko dan pemberian pendapat kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan atas kebijakan manajemen risiko;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi yang berkaitan dengan hubungan bisnis atau kegiatan usaha yang harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan melakukan analisis setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerja sama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan, pendirian anak Perusahaan, pelepasan aset perusahaan, dan kegiatan lain perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan mengkaji Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Perusahaan, dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan dan memastikan bahwa direksi telah mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko tersebut;
6. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan manajemen risiko Perusahaan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya. Adapun rincian mengenai wewenang dan tanggung jawab Komite Pemantau

Duties and Authorities of the Risk Monitoring Committee

Duties of the Risk Monitoring Committee

The duties of the Risk Monitoring Committee are as follows:

1. Assisting the Board of Commissioners in periodically reviewing risk management policies and providing opinions to the Board of Commissioners as a basis for consideration in making recommendations or approvals regarding risk management policies;
2. Assisting the Board of Commissioners in reviewing and evaluating the accountability of the Board of Directors concerning business relationships or business activities that require recommendations or approvals from the Board of Commissioners;
3. Assisting the Board of Commissioners in evaluating and analyzing proposals from the Board of Directors related to investment cooperation, capital participation, company establishment, subsidiary establishment, asset disposal, and other company activities to obtain recommendations or approvals from the Board of Commissioners;
4. Assisting the Board of Commissioners in evaluating and reviewing the company's Work Plan and Budget (RKAP), Business Plan, and Long-Term Plan to obtain recommendations or approvals from the Board of Commissioners;
5. Assisting the Board of Commissioners in monitoring the major risks faced by the company and ensuring that the Board of Directors has taken the necessary steps to identify, measure, monitor, and control these risks;
6. Providing input to the Board of Commissioners for the improvement and development of the company's risk management policies;
7. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners based on applicable laws and regulations.

Authorities and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee has the authority and responsibility to carry out its functions. The details regarding

Risiko dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Manajemen Risiko berwenang mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, aset serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam hal-hal tertentu, Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris setelah mendapat surat tugas yang ditandatangani oleh Komisaris Utama;
3. Melalui persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, bilamana diperlukan Komite Pemantau Risiko dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan yang biayanya menjadi beban Perseroan;
4. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya dipergunakan untuk kepentingan tugasnya;
5. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya;
6. Evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko, baik secara individual maupun secara kolektif akan dilakukan setiap tahun oleh Komisaris.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan pertimbangan kebutuhan Dewan Komisaris atas belum optimalnya peran manajemen risiko dalam pengelolaan perusahaan, terutama di anak perusahaan. Komite Pemantau Manajemen Risiko ini memiliki tugas, yaitu:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan dan mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko dalam pemberian pendapat kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan atas kebijakan manajemen risiko;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi yang berkaitan dengan hubungan bisnis atau kegiatan usaha yang harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan melakukan analisis atas setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerja sama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan aset perusahaan, dan kegiatan lain perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Komisaris;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan mengkaji Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Perusahaan, dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi

the authority and responsibility of the Risk Monitoring Committee can be elaborated as follows:

1. The Risk Monitoring Committee is authorized to access records or information about employees, assets, and other resources of the Company related to the performance of its duties;
2. In certain circumstances, the Risk Monitoring Committee may carry out tasks assigned by the Board of Commissioners after receiving a task letter signed by the Chief Commissioner;
3. With the written approval of the Board of Commissioners, if necessary, the Risk Monitoring Committee may seek assistance from experts and/or consultants whose costs are borne by the Company;
4. The Risk Monitoring Committee is responsible for maintaining the confidentiality of Company documents, data, and information from internal and external parties and may only be used for the purpose of its duties;
5. The Risk Monitoring Committee is accountable to the Board of Commissioners and is required to submit reports on the performance of its duties;
6. The performance evaluation of the Risk Monitoring Committee, both individually and collectively, will be conducted annually by the Commissioners.

Distribution of Duties and Responsibilities in Membership of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee was established based on the Board of Commissioners' need due to the suboptimal role of risk management in company management, especially at subsidiaries. This Risk Management Monitoring Committee has the following tasks:

1. Assisting the Board of Commissioners periodically in reviewing risk management policies and providing opinions to the Board of Commissioners as considerations for recommending or approving risk management policies;
2. Assisting the Board of Commissioners in reviewing and evaluating the responsibilities of the Board of Directors related to business relationships or business activities requiring recommendations or approval from the Board of Commissioners;
3. Assisting the Board of Commissioners in evaluating and analyzing any proposals from the Board of Directors related to investment cooperation, capital participation, establishment of joint ventures, establishment of subsidiaries, divestment of company assets, and other company activities to obtain recommendations or approval from the Board of Commissioners;
4. Assisting the Board of Commissioners in evaluating and reviewing the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Business Plan, and Long-Term Plan to obtain recommendations or approval from the Board of

atau persetujuan Dewan Komisaris;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut;
6. Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris, dan anggota non Dewan Komisaris.

Commissioners;
5. Assisting the Board of Commissioners in monitoring the major risks faced by the Company and ensuring that the Board of Directors have taken necessary steps to identify, measure, monitor, and control these risks;
6. Providing inputs to the Board of Commissioners for the improvement and development of the Company's Risk Management policies;
7. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners based on applicable laws and regulations.

The Risk Monitoring Committee consists of a Chairman who is a member of the Board of Commissioners and non-Board of Commissioners members.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Tugas** Duties
Erwan Pelawi	Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko Independent Commissioner concurrently serves as the Head of the Risk Monitoring Committee.	• Sebagai koordinator anggota Komite Pemantau Risiko dalam memastikan pengawasan pelaksanaan pengelolaan risiko utama perusahaan oleh Direksi berjalan sesuai kebijakan manajemen risiko perusahaan • Menangani bidang perencanaan strategis korposari, akuntansi, pajak serta pemasaran dan retail • Membimbing dan memberdayakan Anggota Komite Pemantau Risiko Non Dekom untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik • As the coordinator of the Risk Monitoring Committee members, ensuring the supervision of the company's main risk management implementation by the Board of Directors aligns with the company's risk management policies. • Handling the areas of corporate strategic planning, accounting, taxation, as well as marketing and retail. • Guiding and empowering Non-Board Risk Monitoring Committee Members to effectively perform their duties.
Asep Subarkah Yusuf	Komisaris Merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko Commissioner concurrently serves as a Member of the Risk Monitoring Committee	• Berinteraksi dengan manajemen perusahaan untuk memahami pelaksanaan pengelolaan risiko utama perusahaan oleh Direksi • Menangani bidang legal, ekonomi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku • Membimbing dan memberdayakan anggota komite audit non Dewan Komisaris agar dapat menjalankan tugas dengan baik • Interacting with company management to understand the implementation of the company's key risk management by the Board of Directors • Handling legal, economic, and compliance areas according to applicable regulations • Mentoring and empowering non-Board of Commissioners audit committee members to perform their duties effectively
Alhilal Hamdi	Komisaris Merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko Commissioner concurrently serves as a Member of the Risk Monitoring Committee	
Jones Batara Manurung	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	• *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan risiko perusahaan melalui koordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko dan Divisi lainnya • Menyiapkan laporan rutin kepada Dewan komisaris terkait kinerja operasional dan keuangan dari perspektif manajemen risiko • Koordinasi dengan Komite Audit dan Komite Nominasi dan remunerasi terkait dengan dukungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris • Monitoring and evaluating the implementation of company risk management through coordination with the Risk Management Division and other divisions • Preparing regular reports to the Board of Commissioners regarding operational and financial performance from a risk management perspective • Coordinating with the Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee regarding support for the execution of duties and

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
Poerwitono Poedjiwahjono	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	• *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan risiko perusahaan melalui koordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko dan Divisi lainnya. • Menyiapkan laporan rutin kepada Dewan komisaris terkait kinerja operasional dan keuangan dari perspektif manajemen risiko • Koordinasi dengan Komite Audit dan Komite Nominasi dan remunerasi terkait dengan dukungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris • Monitoring and evaluating the implementation of company risk management through coordination with the Risk Management Division and other divisions • Preparing regular reports to the Board of Commissioners regarding operational and financial performance from a risk management perspective • Coordinating with the Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee regarding support for the execution of duties and responsibilities of the Board of Commissioners

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

PTPN III memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Komite Pemantau Risiko merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dalam pengelolaan bisnis Perseroan khususnya dalam memberikan masukan bagi Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak mengadakan program peningkatan kompetensi Komite Pemantau Risiko.

Competency Development of Risk Monitoring Committee

PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) is committed to creating a highly skilled and competitive workforce by conducting competency development programs for all employees. The development of the Risk Monitoring Committee's competencies is an effort to update knowledge to support the supervisory tasks in managing the company's business, especially in providing input to the Board of Commissioners. Throughout 2023, the Company did not hold competency enhancement programs for the Risk Monitoring Committee.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali. Adapun tujuan dari rapat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan Perseroan. Rincian mengenai rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Meeting

During 2023, the Risk Monitoring Committee held meetings a total of 35 (thirty-five) times. The purpose of these meetings is to assist the Board of Commissioners in overseeing the management of the company. Details regarding the Risk Monitoring Committee meetings in 2023 are as follows:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	
1.	Selasa, 3 Januari 2023 Tuesday, January 3 2023	Pembahasan data kepemilikan lahan usulan Tanaman Ulang/Tanaman Konversi PTPN III *Stand Alone* tahun 2023.	Stand Alone Replanting/Conversion Plantation proposals in 2023.
2.	Selasa, 20 Januari 2023 Tuesday, January 20 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan Desember 2022 (*Unaudited*).	Evaluation of Management Reports up to December 2022 (Unaudited).
3.	Selasa, 24 Januari 2023 Tuesday, January 24 2023	*Progress* audit atas Laporan Keuangan tahun buku 2022.	Progress audit of the 2022 financial report.
4.	Rabu, 25 Januari 2023 Wednesday, January 25 2023	Rencana struktur organisasi pasca integrasi PTPN.	Post PTPN integration organizational structure plan.

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	
5.	Kamis, 26 Januari 2023 Thursday, January 26 2023	Pembahasan PKPT DAIN tahun 2023.	Discussion of PKPT DAIN in 2023.
6.	Kamis, 2 Februari 2023 Thursday, February 2 2023	Pembahasan permohonan tanggapan atas rencana penyertaan modal pemerintah pusat terhadap barang milik negara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada PTPN III (Persero).	Discussion of requests for responses to the central government's capital investment plan for state-owned goods of the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia at PTPN III (Persero).
7.	Kamis, 09 Februari 2023 Thursday, 09 February 2023	Realisasi pengawasan tahun 2022 dan Rencana Kerja Pengawasan tahun 2023.	Realization of supervision in 2022 and Supervision Work Plan in 2023.
8.	Jumat, 10 Februari 2023 Friday, February 10, 2023	1. Evaluasi program kerja sub divisi Manajemen Risiko. 2. Evaluasi efektivitas manajemen risiko PTPN III (Persero). 3. Profil risiko PTPN III (Persero). 4. *Update* RJPP 2023-2027 (Pemasaran, Retail, Hilirisasi, Integrasi Anak dan Cucu Perusahaan).	1. Evaluation of the work program of the Risk Management sub-division. 2. Evaluation of the effectiveness of PTPN III (Persero) risk management. 3. PTPN III (Persero) risk profile. 4. Update on RJPP 2023-2027 (Marketing, Retail, Downstreaming, Integration of Company Children and Grandchildren).
9.	Selasa, 21 Februari 2023 Tuesday, February 21 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan Januari 2023.	Evaluation of Management Reports up to January 2023.
10.	Selasa, 28 Februari 2023 Tuesday, February 28 2023	*Progress meeting* pelaksanaan *general audit* Laporan Keuangan Konsolidasian PTPN III (Persero) dan Entitas Anak tahun buku 2022.	Progress meeting on the implementation of the general audit of the Consolidated Financial Statements of PTPN III (Persero) and Subsidiaries for the 2022 financial year.
11.	Senin, 20 Maret 2023 Monday, March 20 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan Februari 2023.	Evaluation of Management Reports up to February 2023.
12.	Senin, 27 Maret 2023 Monday, March 27 2023	Pembahasan tata kelola terintegrasi PTPN III (Persero) sebagai tindak lanjut PER-05/MBU/09/2022.	Discussion of PTPN III (Persero) integrated governance as a follow-up to PER-05/MBU/09/2022.
13.	Sabtu, 15 April 2023 Saturday, April 15 2023	Evaluasi rencana Kerja Sama Operasional (KSO) PTPN III *Stand Alone* dan PTPN VIII.	Stand Alone and PTPN VIII Joint Operations plans.
14.	Senin, 17 April 2023 Monday, April 17 2023	1. *Update monitoring* tindak lanjut temuan internal dan eksternal audit. 2. Temuan internal audit material/signifikan dari LHA tahun 2022/2023 di entitas PTPN Group dan rekomendasinya. 3. Rencana struktur organisasi, penataan SDM (Auditor), penyesuaian program kerja Divisi Internal Audit pasca aksi korporasi (pembentukan *subholding* PTPN IV dan PTPN I).	1. Monitoring updates to follow up on internal and external audit findings. 2. Material/significant internal audit findings from the 2022/2023 LHA in PTPN Group entities and recommendations. 3. Organizational structure plans, structuring human resources (Auditors), adjustments to the work program of the Internal Audit Division after corporate actions (formation of PTPN IV and PTPN I subholdings).
15.	Kamis, 20 April 2023 Thursday, April 20, 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan Maret 2023.	Evaluation of Management Reports up to March 2023.
16.	Kamis, 27 April 2023 Thursday, April 27 2023	Pembahasan Surat Direksi PTPN III (Persero) tentang permohonan tanggapan tertulis rencana integrasi PTPN Group.	Discussion of the Letter from the Directors of PTPN III (Persero) regarding the request for a written response to the PTPN Group integration plan.
17.	Selasa, 9 Mei 2023 Tuesday, May 9, 2023	Pembahasan surat Direksi tentang Permohonan Persetujuan Tertulis atas Pemberian Pinjaman Pemegang Saham (*Shareholder Loan*) kepada PT Perkebunan Mitra Ogan.	Discussion of the Board of Directors' letter regarding the Request for Written Approval for Providing a Shareholder Loan to PT Perkebunan Mitra Ogan.
18.	Senin, 22 Mei 2023 Monday, May 22 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan April 2023.	Evaluation of Management Reports up to April 2023.
19.	Jumat, 16 Juni 2023 Friday, June 16 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan Mei 2023.	Evaluation of Management Reports up to May 2023.

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	
20.	Senin, 19 Juni 2023 Monday, June 19 2023	Pembahasan RJPP 2023 – 2027.	Discussion of RJPP 2023 – 2027.
21.	Selasa, 27 Juni 2023 Tuesday, June 27 2023	Membahas Surat Direksi No.DRU/KOM/1904/2023 dan DRU/KOM/1905 tentang permohonan tanggapan tertulis atas repackaging dalam rangka integrasi PTPN.	Discussing Directors' Letters No.DRU/KOM/1904/2023 and DRU/KOM/1905 regarding requests for written responses to repackaging in the context of PTPN integration.
22.	Selasa, 18 Juli 2023 Tuesday, July 18 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan Juni 2023.	Evaluation of Management Reports until June 2023.
23.	Kamis, 03 Agustus 2023 Thursday, 03 August 2023	1. *Review* pelaksanaan audit sampai dengan Juni 2023 (Semester 1). 2. *Review monitoring* tindak lanjut temuan audit yang lalu (internal dan eksternal). 3. Temuan audit khususnya audit tematik (Anper dan Komoditi Rugi). 4. *Update* organisasi audit setelah aksi korporasi (*subholding*). 5. Masalah-masalah yang dihadapi DAIN saat ini dan harapan ke Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti. 6. Optimalisasi Peran DAIN dalam mengawal program integrasi PTPN Group.	1. Review of audit implementation until June 2023 (Semester 1). 2. Monitoring review of follow-up to previous audit findings (internal and external). 3. Audit findings, especially thematic audits (Anper and Commodity Loss). 4. Update on audit organization after corporate action (subholding). 5. Problems currently facing DAIN and expectations of the Board of Commissioners for follow-up. 6. Optimizing DAIN's role in overseeing the PTPN Group
24.	Senin, 21 Agustus 2023 Monday, August 21 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan Juli 2023.	Evaluation of Management Reports up to July 2023.
25.	Senin, 28 Agustus 2023 Monday, August 28 2023	*Repackaging* PTPN Group.	repackaging .
26.	Senin, 4 September 2023 Monday, September 4 2023	Pengadaan jasa audit konsolidasi PTPN Group tahun buku 2023.	Procurement of PTPN Group consolidation audit services for the 2023 financial year.
27.	Rabu, 13 September 2023 Wednesday, September 13 2023	Pembahasan *Inventory Turn Over* (ITO).	Discussion of Inventory Turn Over (ITO).
28.	Rabu, 20 September 2023 Wednesday, September 20 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan Agustus 2023.	Evaluation of Management Reports until August 2023.
29.	Senin, 2 Oktober 2023 Monday, October 2, 2023	Tata kelola terintegrasi PTPN III (Persero).	PTPN III (Persero) integrated governance.
30.	Kamis, 5 Oktober 2023 Thursday, October 5 2023	Rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris tahun 2024.	Board of Commissioners work plan and budget for 2024.
31.	Senin, 16 Oktober 2023 Monday, October 16 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan September 2023.	Evaluation of Management Reports until September 2023.
32.	Jumat, 27 Oktober 2023 Friday, October 27 2023	Evaluasi usulan RKAP tahun 2024.	Evaluation of the 2024 RKAP proposal.
33.	Kamis, 16 November 2023 Thursday, November 16 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan Oktober 2023.	Evaluation of Management Reports until October 2023.
34.	Rabu, 29 November 2023 Wednesday, November 29 2023	1. *Review* PKPT sampai dengan bulan Oktober dan Prognosa 2023 serta temuan-temuan signifikan. 2. Rencana PKPT DAIN tahun 2024. 3. Organisasi audit pasca *Legal Day* 1, integrasi PTPN.	4. PKPT review up to October and 2023 Prognosis and significant findings. 5. DAIN's PKPT plan for 2024. 6. Audit organization post Legal Day 1, PTPN integration.
35.	Jumat, 15 Desember 2023 Friday, December 15 2023	Evaluasi Laporan Manajemen sampai dengan bulan November 2023	Evaluation of Management Reports until November 2023

Berikut ini merupakan rekapitulasi dan tingkat kehadiran Anggota Komite Pemantau RIsiko dalam Rapat di tahun 2023.

The following is the recapitulation and attendance rate of Risk Monitoring Committee Members in meetings during 2023.

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	% Kehadiran % Attendance
Erwan Pelawi	100
Wisto Prihadi	100
Asep Subarkah Yusuf	94
Alhilal Hamdi	94
Tsamara Amany Alatas	-
Jones Batara Manurung	100
Poerwitono Poedjiwahjono	100

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Komite Pemantau Risiko dinilai berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris juga menilai kinerja Komite Pemantau Risiko melalui evaluasi terhadap perencanaan program kerja dan pelaksanaan program kerja yang telah disusun dan disahkan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga menilai kinerja Komite Pemantau Risiko melalui pelaksanaan tugas khusus yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris serta melalui pemenuhan terhadap laporan-laporan Komite Dewan Komisaris (Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Penugasan, dan Laporan Kunjungan Kerja).

Berikut ini merupakan rincian tugas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2023:

1. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap risiko operasional, risiko keuangan dan risiko pasar yang dilakukan melalui evaluasi dan *monitoring* Laporan Manajemen yang disampaikan manajemen dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris dan hasil evaluasi dituangkan dalam Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Laporan Manajemen (LM).
2. Melakukan pemantauan risiko dengan melakukan *review* dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko dan berbagai laporan risiko.
3. Mengikuti Rapat internal Komite Pemantau Risiko, Rapat Organ Dewan Komisaris (Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris), Rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi.
4. Mendampingi Dewan Komisaris melakukan kunjungan kerja ke unit-unit usaha dan anak perusahaan serta

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the Risk Monitoring Committee

The assessment of the Risk Monitoring Committee by the Board of Commissioners is based on the Risk Monitoring Committee Charter and other regulations related to the company. Additionally, the Board of Commissioners evaluates the performance of the Risk Monitoring Committee through an evaluation of the work program planning and implementation, which has been prepared and approved by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners also assesses the performance of the Risk Monitoring Committee through the execution of specific tasks assigned by the Board of Commissioners and through compliance with the reports of the Board of Commissioners Committee (Quarterly Reports, Annual Reports, Assignment Reports, and Field Visit Reports).

The following is a detailed description of the Risk Monitoring Committee's tasks during 2023:

1. Evaluate and monitor operational, financial, and market risks through an evaluation and monitoring of Management Reports submitted by management and report them to the Board of Commissioners, and the evaluation results are incorporated into the Board of Commissioners' Response to the Management Report Performance (MRP).
2. Monitor risks by reviewing and evaluating risk management implementation and various risk reports.
3. Attend internal Risk Monitoring Committee meetings, Board of Commissioners' Organ meetings (Risk Monitoring Committee, Audit Committee, and Board of Commissioners' Secretary), Internal Board of Commissioners meetings, and Board of Commissioners and Directors meetings.
4. Accompany the Board of Commissioners on field visits to business units and subsidiaries and create visit reports

membuat laporan hasil kunjungan dengan saran dan nasihat dalam usaha meningkatkan kinerja perusahaan.
5. Komunikasi dengan manajemen mengenai tindak lanjut hal-hal yang dinasihatkan/dimintakan perhatian yang tercantum di dalam risalah rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dan hasil kunjungan kerja.
6. Mengadakan rapat dengan divisi-divisi terkait dalam melakukan evaluasi kinerja untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, secara khusus melaksanakan rapat dan komunikasi yang intensif dengan Divisi Manajemen Risiko dan Divisi SPI dalam melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pengelolaan risiko perusahaan.
7. Melakukan pengkajian/evaluasi atas setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan/anak perusahaan, pelepasan aset perusahaan, dan kegiatan lain untuk mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dilakukan dengan tepat dan baik sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.
9. Mengikuti program pengembangan kompetensi di bidang manajemen risiko.

with recommendations and advice to enhance company performance.
5. Communicate with management regarding follow-up on matters advised/requested for attention as recorded in the minutes of the Board of Commissioners' meetings with the Directors, and the results of field visits.
6. Conduct meetings with related divisions to evaluate performance for presentation to the Board of Commissioners, specifically conducting intensive meetings and communication with the Risk Management Division and Internal Audit Division in evaluating and monitoring company risk management.
7. Review/evaluate any proposals from the Directors related to investment cooperation, capital injection, establishment of joint ventures/subsidiaries, disposal of company assets, and other activities to obtain Board of Commissioners' recommendations.
8. Evaluate and monitor the implementation of Good Corporate Governance practices accurately and effectively in accordance with applicable laws and regulations.
9. Participate in competence development programs in risk management.

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko Oleh Dewan Komisaris

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas telaah/saran/rekomendasi kepada Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris telah menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PTPN III (Persero) tentang penilaian kinerja Komite-Komite berdasarkan target-target dalam rencana kerja. Dewan Komisaris melakukan dan menyampaikan hasil penilaian kinerja komite-komite secara individu dan kolegial kepada pemegang saham sebagai bagian dari tugas pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris. Hasil penilaian yang disampaikan tersebut merupakan nilai rata-rata yang diberikan oleh masing-masing Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada setiap komite disampaikan baik secara individual maupun secara kolektif kepada pemegang saham sebagai bagian dari fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Evaluasi tersebut mencerminkan nilai rata-rata yang diberikan oleh setiap anggota Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja dilakukan oleh Dewan Komisaris mencakup aspek dan kriteria sebagai berikut:
1. Aspek Kolektif, yakni penilaian yang didasarkan pada penyusunan dan penyampaian Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Kolektif Komite secara berkala (Bobot 40%).
2. Aspek Individu, yakni penilaian yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan

Performance Assessment of Risk Monitoring Committee by the Board of Commissioners

As part of efforts to enhance the quality of reviews/advice/recommendations to the Board of Commissioners, the Board of Commissioners of PTPN III (Persero) has established a Board of Commissioners Decision regarding the assessment of Committee performance based on targets in the work plan. The Board of Commissioners conducts and presents the performance assessment results of the committees individually and collectively to shareholders as part of their supervisory duties. The assessment results presented represent the average ratings provided by each Board of Commissioner member.

The evaluation results given by the Board of Commissioners to each committee are communicated both individually and collectively to shareholders as part of the Board of Commissioners' oversight function. The evaluation reflects the average score given by each member of the Board of Commissioners.

The performance assessment conducted by the Board of Commissioners includes the following aspects and criteria:
1. Collective Aspect, which is an evaluation based on the preparation and presentation of Collective Task and Responsibility Reports by the committee periodically (Weight 40%).
2. Individual Aspect, which is an evaluation based on the knowledge, skills, and attitude in carrying out individual

tugas dan tanggung jawab Komite secara individu (Bobot 60 %) yang meliputi:
a. Kualitas Telaah (Bobot 20%);
b. Integritas (Bobot 20%);
c. Kekompakan Tim (Bobot 20%).

Berdasarkan kriteria penilaian tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Pemantau Risiko telah menjalan peran dan fungsinya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris.

committee tasks and responsibilities (Weight 60%), including:
a. Quality of Review (Weight 20%);
b. Integrity (Weight 20%);
c. Team Cohesion (Weight 20%).

Based on the assessment criteria, the Board of Commissioners has evaluated that the Risk Monitoring Committee has fulfilled its role and function as a supporting organ to the Board of Commissioners.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, hal tersebut sesuai dengan arahan yang tertuang dalam Surat Kementerian BUMN No. S-254/MBU/04/2020 pada tanggal 17 April 2020 perihal *Talent & Succession Management* Direksi BUMN dan surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KEP-05/KOM/ IV/2020 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee is a Committee established by the Board of Commissioners with the aim of assisting in the implementation of the Board of Commissioners' duties, in accordance with the directives stated in the Ministry of SOEs Letter No. S-254/MBU/04/2020 dated April 17, 2020 regarding Talent & Succession Management for SOE Directors and the Board of Commissioners' Decision No. KEP-05/KOM/ IV/2020 regarding the Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Persyaratan Kompetensi

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tata kelola perusahaan serta mengkomunikasikan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku;
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip dan proses Komite Nominasi dan Remunerasi secara umum, prinsip-prinsip fungsi pengawasan dan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan tentang Perseroan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan;
4. Mampu mempelajari kegiatan Perseroan secara cepat sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang memadai tentang kegiatan Perseroan dan kaitannya dengan aspek Komite Nominasi dan Remunerasi;
5. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan santun serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah.

Nomination and Remuneration Committee Membership Requirements

Competency Requirements

1. Demonstrating integrity, dedication, capability, education, independence, knowledge, and experience to carry out corporate governance oversight duties and communicate in writing the results of their tasks and functions to the Board of Commissioners according to applicable procedures;
2. Having sufficient knowledge to understand the principles and processes of the Nomination and Remuneration Committee in general, principles of oversight functions, and the Company's Articles of Association;
3. Having adequate knowledge of the Company's regulatory framework and legislation related to the Company's operations;
4. Ability to quickly grasp Company activities to acquire adequate knowledge about Company activities and their relevance to the Nomination and Remuneration Committee aspects;
5. Capable of collaborating and communicating effectively and courteously and providing sufficient time to perform their duties well and add value.

Persyaratan Independensi

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi;
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
3. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepada daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
4. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
5. Bukan merupakan karyawan kunci yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
6. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perseroan;
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultansi lainnya kepada Perseroan dalam waktu satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
8. Tidak keberatan dan bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi sebagaimana yang tercantum di atas.

Independence Requirements

1. Nomination and Remuneration Committee members who are also Board of Commissioners members do not have blood relations up to the third degree, either by direct lineage or collateral lineage, or relationships arising from marriage with other Board of Commissioners members or with Board of Directors members;
2. Nomination and Remuneration Committee members who are not Board of Commissioners members are prohibited from having blood relations and in-laws up to the third degree, either by direct lineage or collateral lineage, with Board of Commissioners and Board of Directors members of the Company;
3. Not holding dual positions as officials of political parties and/or legislative candidates/members or regional leaders/deputy regional heads, and other positions as stipulated by legal regulations that may cause conflicts of interest;
4. Not having any direct or indirect business relations related to the Company's business activities that may cause conflicts of interest;
5. Not being a key employee, meaning a person with the authority and responsibility to plan, lead, or control the Company's activities in the last year before being appointed by the Board of Commissioners;
6. Not having any direct or indirect personal interests in material information related to the Company;
7. Not being an insider in a Public Accounting Firm, Law Consultancy Firm, or other parties providing audit services, non-audit services, and/or other consultancy services to the Company in the last year before being appointed by the Board of Commissioners;
8. Not objecting to and willing to create and sign a written statement regarding independence requirements as mentioned above.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023

Hingga akhir tahun 2023, susunan komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengalami perubahan susunan. Berikut merupakan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi hingga akhir tahun 2022:

Number, Composition and Structure of the Nomination and Remuneration Committee in 2023

Until the end of 2023, the composition of the Nomination and Remuneration Committee has undergone changes. Here is the composition of the Nomination and Remuneration Committee until the end of 2022:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Serving Period
Erwan Pelawi	Ketua/Komisaris Head/ Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/ KOM/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-02/ KOM/I/2022 dated January 31, 2022	31 Januari 2022 – 31 Januari 2025 January 31, 2022 – January 31, 2025	Ke-1 1st
Rini Widyastuti	Anggota/ Komisaris Member/ Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/ KOM/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-02/ KOM/I/2022 dated January 31, 2022	31 Januari 2022 – 31 Januari 2025 January 31, 2022 – January 31, 2025	Ke-1 1st
Asep Subarkah Yusuf	Anggota/ Komisaris Member/ Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/ KOM/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-02/ KOM/I/2022 dated January 31, 2022	31 Januari 2022 – 31 Januari 2025 January 31, 2022 – January 31, 2025	Ke-1 1st
Jones Batara Manurung	Anggota/Pihak Independen Member / Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/ KOM/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-01/ KOM/I/2022 dated January 31, 2022	31 Januari 2022 – 31 Januari 2024 January 31, 2022 – January 31, 2025	Ke-2 2nd
Poerwitono Poedjiwahjono	Anggota/Pihak Independen Member / Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-14/ Kom/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2019 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-14/ KOM/VIII/2022 dated August 20, 2019	26 Agustus 2022 –26 Agustus 2025 August 26, 2022 – August 26, 2025	Ke-1 1st

Kemudian, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/ KOM/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), komposisi susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sampai 31 Desember 2023 telah mengalami perubahan sebagai berikut:

Subsequently, pursuant to Board of Commissioners' Decision No. KEP-02/ KOM/I/2022 dated January 31, 2022 regarding the Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), the composition of the Nomination and Remuneration Committee until December 31, 2023, has undergone the following changes:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks
1.	Zulkifli Zaini	Ketua / Head	Komisaris Independen / Independent Commissioner
2.	Erwan Pelawi	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner
3.	Hamong Dhanardono	Anggota / Member	Komisaris Independen / Independent Commissioner

Adapun profil Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di buku laporan tahun ini. Sedangkan Profil mengenai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut:

The profiles of the Head and members of the Nomination and Remuneration Committee who are members of the Board of Commissioners can be found in the Company Profile section of this year's annual report. Meanwhile, the profiles of the members of the Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners can be seen in the following table:

Hamong Dhanardono

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee



Periode Jabatan | Period of Position	
26 Agustus 2022 - 26 Agustus 2025, Periode Ke-1	August 26, 2022 - August 26 2025, 1st Period
Usia | Age	
60 tahun	60 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian citizen
Domisili | Residence	
Bekasi	Bekasi
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Sarjana Hukum Perdata, Universitas Padjadjaran (1990) • Magister Business Law, Universitas Tarumanagara (1998)	• Bachelor of Civil Laws, Padjadjaran University (1990) • Master of Business Laws, Tarumanagara University (1998)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Kepala Seksi Sengketa di Bagian Hukum PT Bank Dagang Negara (Persero) Jakarta (1992—1999) • *Professional Staff Legal Advisor* di Credit Recovery Group (CRG) PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta (1999—2008) • *Team Leader Legal Advice* di Special Asset Management (SAM) Group, PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta (2008—2010) • *Department Head Auction, Budgeting & Legal* di Retail Risk Group, PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta (2010—2016) • *Departement Head Wholesale Credit Counsel* - Legal Group, PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta (2016—2020) • PT Asuransi Mandiri Inhealth, *Legal Consultant* (2021-2022) • Kantor Hukum "HamongDwi & Partners" (2022-sekarang)	• Head of the Dispute Section in the Legal Department of PT Bank Dagang Negara (Persero) Jakarta (1992—1999) • Professional Legal Advice Staff at Credit Recovery Group (CRG) PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta (1999—2008) • Legal Advice Team Leader at Special Asset Management (SAM) Group, PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta (2008—2010) • Department Head Auction, Budgeting & Legal at Retail Risk Group, PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta (2010—2016) • Department Head Wholesale Credit Counsel - Legal Group, PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta (2016—2020) • PT Asuransi Mandiri Inhealth, Legal Consultant (2021-2022) • Law Firm "HamongDwi & Partners" (2022-present)

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan remunerasi Perseroan telah memenuhi semua kriteria independensi. Hal tersebut sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Selain itu, penguatan independensi seluruh anggota Nominasi dan Remunerasi telah dicerminkan melalui penandatanganan pernyataan Independensi Komite Nominasi dan remunerasi.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

All members of the Nomination and Remuneration Committee of the Company have met all independence criteria. This is in accordance with the Nomination and Remuneration Committee Charter. Furthermore, the strengthening of independence among all Nomination and Remuneration Committee members has been reflected through the signing of the Independence Statement of the Nomination and Remuneration Committee.

Berikut ini merupakan kriteria Independensi anggota Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

The following are the independence criteria for members of the Company's Nomination and Remuneration Committee:

Aspek Independensi Aspect of Independence	Zulkifli Zaini	Erwan Pelawi	Hamong Dhanardono
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Have a financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	×	×	×
Memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, entitas anak maupun entitas afiliasi Have a management relationship in the Company, subsidiaries or affiliated entities	×	×	×
Memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung Owned the Company's shares, either directly or indirectly	×	×	×
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Have a family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or fellow members of the Committee	×	×	×
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Serve as administrator of political parties, officials and government	×	×	×

✓= ada | × = tidak ada
✓ = applicable | ×= not applicable

Pedoman Kerja: Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dijalankan dengan mengacu pada ketentuan Piagam Komite Nominasi dan remunerasi. Isi dari piagam ini mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta mekanisme kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      i. Komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
      ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
      ii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
      iv. Calon anggota Dewan Komisaris anak perusahaan dan/ atau Direksi anak perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada kepada Pemegang Saham/ Rapat Umum Pemegang Saham;
   b. Melakukan kegiatan terkait nominasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. Dalam hal komite menganggap perlu menggunakan konsultan independen untuk melakukan penelaahan kembali atas nominasi yang telah ditentukan, maka tugas komite:

Work Guidelines: Nomination and Remuneration Committee Charter

The execution of the Nomination and Remuneration Committee's tasks is conducted in accordance with the provisions of the Nomination and Remuneration Committee Charter. The content of this charter regulates the tasks, responsibilities, authorities, and mechanisms of the Nomination and Remuneration Committee.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

1. Regarding Nomination Policy:
   a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      i. Composition of positions in the Board of Directors and Board of Commissioners;
      ii. Policies and criteria required in the nomination process;
      iii. Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
      iv. Candidates for subsidiary Board of Commissioners and/or subsidiary Board of Directors to be presented to the Board of Commissioners for submission to Shareholders/General Meeting of Shareholders;
   b. Conduct nomination-related activities and report them to Shareholders/General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations;
   c. If the committee deems it necessary to use an independent consultant to review the nominations that have been determined, the committee's tasks include:

i. Memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan;
ii. Melakukan monitoring pekerjaan konsultan melalui human capital.

2. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:
   a. Melakukan kegiatan terkait remunerasi dan melaporkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku;
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      i. Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham;
      ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
   c. Dalam hal komite menganggap perlu menggunakan konsultan independen untuk melakukan penelaahan kembali atas remunerasi yang telah ditentukan, maka tugas komite:
      i. Memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan;
      ii. Melakukan monitoring pekerjaan konsultan melalui human capital.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan kepada Dewan Komisaris.

i. Provide input on consultant criteria and competencies;
ii. Monitor the consultant's work through human capital.

2. Regarding Remuneration Policy:
   a. Perform remuneration-related activities and report them to the Board of Commissioners in accordance with legal procedures;
   b. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      i. Structure, policies, and amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors to be submitted to Shareholders/General Meeting of Shareholders;
      ii. Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors;
   c. If the committee deems it necessary to use an independent consultant to review the remuneration that has been determined, the committee's tasks include:
      i. Provide input on consultant criteria and competencies;
      ii. Monitor the consultant's work through human capital.
3. Carry out other tasks and responsibilities assigned by the Board of Commissioners.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi 2023

Seluruh Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas yang mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/ KOM/ IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Pengangkatan Anggota Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Adapun rincian mengenai tugas dan jabatan masing-masing Komite Nominasi dan Remunerasi ialah sebagai berikut:

Division of Duties and Responsibilities in the Membership of the Nomination and Remuneration Committee in 2023

All members of the Nomination and Remuneration Committee have duties referring to the Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-05/KOM/IV/2020 dated April 24, 2020 regarding the Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Persero). The details regarding the tasks and positions of each member of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duty
Zulkifli Zaini	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Head of the Nomination and Remuneration Committee	• Bertanggung jawab untuk menangani bidang Nominasi dan Remunerasi. • Mengusulkan penggantian anggota komite nominasi dan remunerasi yang bukan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, jika anggota komite tersebut berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya. • Responsible for handling the areas of Nomination and Remuneration. • Proposing the replacement of non-Board of Commissioners members of the Nomination and Remuneration Committee to the Board of Commissioners if such committee members reach the end of their term, resign, or demonstrate incompetence in carrying out their duties.

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duty
Erwan Pelawi	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	Bertanggung jawab untuk menangani bidang Nominasi dan Remunerasi. Responsible for handling matters related to Nomination and Remuneration.
Hamong Dhanardono	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	• Bertanggung jawab untuk menangani bidang Nominasi dan Remunerasi. • Menyiapkan dan menyampaikan telaah, saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris dalam hal penerapan mekanisme nominasi dan remunerasi. • Responsible for handling matters related to Nomination and Remuneration • Preparing and presenting reviews, suggestions, and opinions to the Board of Commissioners regarding the implementation of nomination and remuneration mechanisms.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Hingga akhir tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Adapun tujuan dari rapat ini ialah untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan Perseroan. Berikut ini merupakan rincian rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2023:

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Until the end of 2023, the Nomination and Remuneration Committee convened a total of 6 (enam) meetings. The objective of these meetings was to assist the Board of Commissioners in overseeing the management of the Company. The following are the details of the Nomination and Remuneration Committee meetings held in 2023:

No.	Tanggal Rapat Date Of Meeting	Agenda
1.	24 Februari 2023 February 24, 2023	Sosialisasi *Updating Talent Pool* Direksi BUMN 2023 Socialization of Updating Talent Pool for State-Owned Enterprises (BUMN) 2023
2.	9 Maret 2023 March 9, 2023	*Update Talent Pool* BUMN Klaster Perkebunan dan Kehutanan Update on Talent Pool for State-Owned Enterprises (BUMN) in the Plantation and Forestry Cluster
3.	26 Juni 2023 June 26, 2023	Laporan *Cluster Talent Committee* BUMN Perkebunan dan Kehutanan Report from the Talent Committee Cluster for State-Owned Enterprises (BUMN) in the Plantation and Forestry Sector
4.	17 Juli 2023 July 17, 2023	Remunerasi Organ Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Commissioners' Organ
5.	4 Agustus 2023 August 4, 2023	*Update* Pelaksanaan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 Update on the Implementation of Remuneration for Directors and the Board of Commissioners for the Year 2023
6.	14 Agustus 2023 August 14, 2023	*Update* Pelaksanaan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 Update on the Implementation of Remuneration for Directors and the Board of Commissioners for the Year 2023

Berikut ini merupakan rekapitulasi dan tingkat kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat di tahun 2023.

The following is a summary and the attendance rate of the Nomination and Remuneration Committee members in the meetings during 2023.

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	% Kehadiran % Attendance
Zulkifli Zaini	100
Erwan Pelawi	100
Hamong Dhanardono	100

Pengembangan Kompetensi Nominasi dan Remunerasi

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selalu berkomitmen untuk memfasilitasi setiap karyawan di Perseroan demi mewujudkan SDM yang unggul dan mampu bersaing. Pada pengembangan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi, ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perseroan guna mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Hingga akhir tahun 2023, Perseroan tidak meng-implementasikan program khusus yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi bagi anggota non-Komisaris. Namun, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi secara mandiri selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi mereka sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Nominasi Dan Remunerasi

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Komite Pemantau Nominasi dan Remunerasi dinilai berdasarkan Piagam Komite Pemantau Nominasi dan Remunerasi serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris juga menilai kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi melalui evaluasi terhadap perencanaan program kerja dan pelaksanaan program kerja yang telah disusun dan disahkan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga menilai kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi melalui pelaksanaan tugas khusus yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris serta melalui pemenuhan terhadap laporan-laporan Komite Dewan Komisaris (Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Penugasan, dan Laporan Kunjungan Kerja).

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan pelaksanaan proses pencalonan posisi strategis dalam manajemen dan proses penetapan besaran remunerasi berjalan secara objektif, efektif dan efisien, sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku. Komite Remunerasi dan nominasi membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis data bakal calon Direksi dari talent pool pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat.

Selain sistem nominasi, Komite Remunerasi dan nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan berupa sistem penggajian/ honorarium, fasilitas/ tunjangan, dan tantiem untuk tahun 2023.

Competency Development of the Nomination and Remuneration Committee

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is committed to facilitating each employee within the Company to develop superior and competitive human resources. The competency development of the Nomination and Remuneration Committee aims to enhance knowledge and competencies relevant to the Company's business to support the supervisory duties of the Board of Commissioners.

Until the end of 2023, the Company had not implemented any specific programs related to competency development for non-Commissioner members. However, members of the Nomination and Remuneration Committee independently strive to develop their competencies according to their respective areas of expertise.

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the Nomination and Remuneration Committee

Assessment by the Board of Commissioners on the Nomination and Remuneration Monitoring Committee is conducted based on the Nomination and Remuneration Monitoring Committee Charter and other regulations related to the Company. Additionally, the Board of Commissioners evaluates the performance of the Nomination and Remuneration Committee through an assessment of the work program planning and execution that has been prepared and approved by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners also evaluates the performance of the Nomination and Remuneration Committee through the execution of special tasks assigned by the Board of Commissioners and through the fulfillment of reports from the Board of Commissioners' Committees (Quarterly Reports, Annual Reports, Assignment Reports, and Work Visit Reports).

The Remuneration and Nomination Committee is established to assist the Board of Commissioners in carrying out oversight functions and ensuring that the nomination process for strategic management positions and the determination of remuneration levels are conducted objectively, effectively, and efficiently, in accordance with applicable regulations. The Remuneration and Nomination Committee helps the Board of Commissioners obtain and analyze data on potential Director candidates from the talent pool of officials one level below the Directors, as well as identify qualified candidates for the Board of Commissioners.

In addition to the nomination system, the Remuneration and Nomination Committee has also assisted the Board of Commissioners in proposing an appropriate remuneration system for the Directors and the Board of Commissioners of the Company, including salary/honorarium systems, facilities/ allowances, and bonuses for the year 2023.

Uraian Terkait Sistem Gaji dan Insentif

Sistem pemberian gaji dan insentif yang digunakan oleh Perseroan kepada karyawan ialah dengan menggunakan sistem *job grading*. Sistem penghitungan yang ada dalam Job grading bekerja dengan cara menilai beberapa elemen, yakni *knowhow*, *problem solving* dan akuntabilitas dalam pekerjaan tersebut. Sistem ini juga berfungsi untuk memacu setiap karyawan untuk semakin meningkatkan kinerja guna mencapai tingkat karir ke jabatan yang lebih tinggi yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan karyawan.

Description Regarding Salary and Incentive System

The Company uses a job grading system for determining salaries and incentives for employees. The calculation within the job grading system assesses several elements, including know-how, problem-solving, and job accountability. This system also serves to motivate each employee to improve their performance to reach higher career levels, which in turn, will automatically increase their income.

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam mempersiapkan kandidat pengganti atau suksesor Direksi, Perseroan memiliki mekanisme bernama "*Talent Pool*" yang tingkatannya berada satu tingkat di bawah Direksi. Penilaian kandidat ini dilakukan dengan melibatkan konsultan independen, dan kemudian *Talent Pool* tersebut akan diajukan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

Succession Policy of the Board of Directors

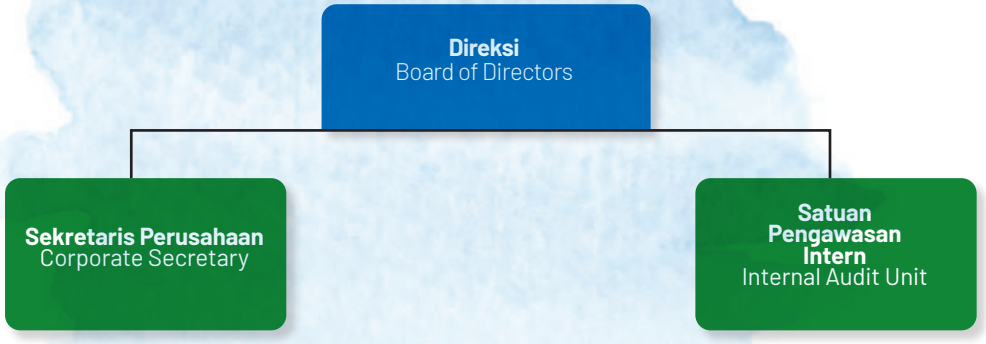
To prepare candidates for the replacement or succession of the Board of Directors, the Company has a mechanism called the "Talent Pool," which is positioned one level below the Directors. The evaluation of these candidates involves independent consultants, and the Talent Pool is then submitted by the Board of Commissioners to the Shareholders.



ORGAN PENDUKUNG DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS SUPPORTING ORGANS

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi membentuk Komite-komite di tingkat Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan Perseroan dengan tetap berpegang pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku bagi masing-masing organ pendukung. Adapun organ yang mendukung Direksi dalam menjalankan fungsinya yakni Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern/Internal Audit.

To execute its managerial duties, the Board of Directors forms various committees at the board level according to the Company's business needs. These committees are tasked with assisting in the supervision, oversight, and management activities of the Company, adhering to the prevailing rules and regulations applicable to each supporting organ. The supporting organs that assist the Board of Directors in fulfilling its functions include the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit.



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan, sebagai penghubung yang memfasilitasi komunikasi antara Perseroan dan Pemangku Kepentingan, memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga persepsi publik terhadap citra Perseroan. Sebagai organ pendukung, Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam memperlancar komunikasi di antara berbagai organ Perseroan serta dalam menjalin hubungan yang solid dengan pemegang saham, regulator, dan Pemangku Kepentingan lainnya. Penunjukan Sekretaris Perusahaan didasarkan pada prosedur internal Perseroan, dan mereka memiliki kewajiban langsung untuk melaporkan kegiatan mereka secara berkala kepada Direktur Utama. Selain itu, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perseroan mematuhi regulasi dan persyaratan terkait transparansi informasi sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini mencakup memastikan bahwa laporan tahunan Perseroan telah mengimplementasikan GCG ke seluruh lingkungan Perseroan serta koordinasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary, as a liaison facilitating communication between the Company and its stakeholders, plays a vital role in maintaining the public perception of the Company's image. As a supporting organ, the Corporate Secretary also facilitates communication among the various organs within the Company and fosters strong relationships with shareholders, regulators, and other stakeholders. The appointment of the Corporate Secretary is based on the Company's internal procedures, and they are required to report their activities regularly to the President Director. Additionally, the Corporate Secretary is responsible for ensuring the Company complies with regulations and requirements related to information transparency in line with Good Corporate Governance (GCG) principles. This includes ensuring that the Company's annual report implements GCG throughout the organization and coordinating the organization of the General Meeting of Shareholders (GMS).

Pihak Yang Mengangkat Dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki wewenang untuk mengangkat Sekretaris Perusahaan. Adapun pengangkatan Sekretaris

Party Appointing and Dismissing Corporate Secretary

The Corporate Secretary has the authority to appoint the Corporate Secretary. The appointment of the Corporate

Perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk membantu tugas Direksi dan memberikan dukungan administratif serta kesekretariatan kepada Direksi.

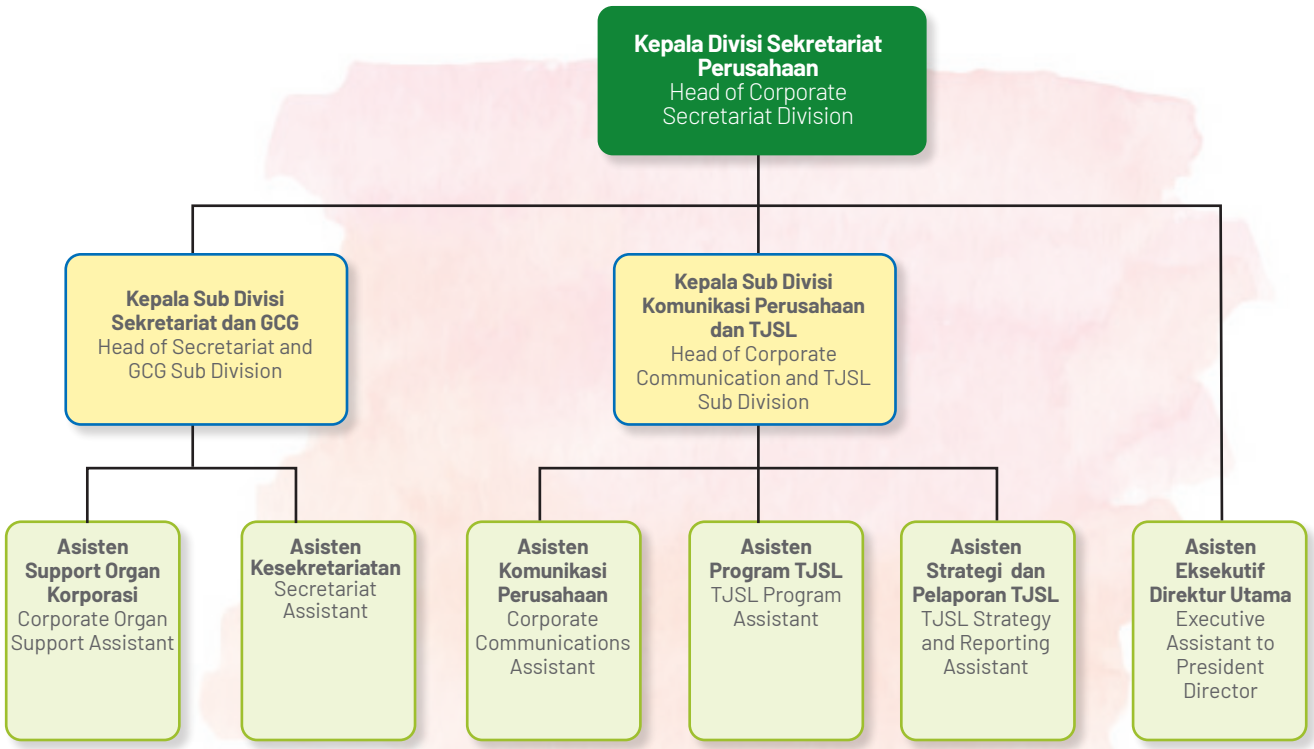
Secretary is intended to assist the Board of Directors in their duties and provide administrative and secretarial support to the Board of Directors.

Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan

Kedudukan dan Struktur organisasi Sekretaris di Perusahaan mengacu kepada surat Keputusan Direksi PTPN III (Persero) No. DSDM/SKPTS/64/2024 tanggal 17 April 2024 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Nomor DSDM/SKPTS/19/2024 tentang Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Organizational Structure of Corporate Secretariat Division

The position and organizational structure of the Corporate Secretary are based on the Board of Directors' Decision Letter No. DSDM/SKPTS/64/2024 dated April 17, 2024, regarding Amendments to Decree No. DSDM/SKPTS/19/2024 regarding the Organizational Structure of PT Perkebunan Nusantara III (Persero).



Tugas Pokok dan Fungsi / Main Tasks and Functions:

Sub Divisi Sekretariat & GCG:
- Kesekretariatan
- Costodian/ Pengelolaan Arsip Perusahaan
- *Support* Organ Korporasi
- GCG
- Protokoler Direksi
- Penyelenggaraan Kegiatan Perusahaan

Secretariat & GCG Sub Division:
- Secretarial
- Costodian/Corporate Records Management
- Corporate Organ Support
- GCG
- Protocol of the Board of Directors
- Organization of Company Activities

Sub Divisi Komunikasi Perusahaan & TJSL:
- Komunikasi Perusahaan
- *Corporate Branding*
- *Media Handling*
- Pengelolaan Sosial Media Korporasi
- Strategi dan perencanaan Tanggung Jawab Sosial & PKBL/CSR
- *Sustainable Development Goals* (SDG's)
- *Monitoring* & Pelaporan Pelaksanaan TJSL
- Implementasi Program TJSL

Sub Division of Corporate Communication & TJSL:
- Corporate Communication
- Corporate Branding
- Media Handling
- Corporate Social Media Management
- Social Responsibility & PKBL/CSR strategy and planning
- Sustainable Development Goals (SDG's)
- Monitoring & Reporting of CSR Implementation
- Implementation of CSR Program

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, posisi Sekretaris Perusahaan diduduki oleh Bambang Agustian. Dasar pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. DSDM/SKPTS/R/112/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Adapun profil dari Sekretaris Perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Corporate Secretary

As of December 31, 2023, the position of Corporate Secretary is held by Bambang Agustian. The basis for the appointment of the Corporate Secretary is the Board of Directors' Decision Letter No. DSDM/SKPTS/R/112/2022 dated May 31, 2022, regarding the Appointment of the Head of the Corporate Secretariat Division of PT Perkebunan Nusantara III (Persero). The profile of the Corporate Secretary is as follows:

Bambang Agustian

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary



Periode Jabatan | Period of Position	
1 Juni 2022, Periode Ke-1	June 1, 2022, 1st Period
Usia | Age	
46 tahun	46 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian citizen
Domisili | Residence	
Medan	Medan
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• Diploma Teknik Mesin, Poltek Universitas Indonesia (2000) • S1 Teknik Mesin, Universitas Gadjah mada (2003) • S2 Magister Manajemen, Universitas Sumatera Utara (2022)	• Diploma in Mechanical Engineering, Polytechnic, University of Indonesia (2000) • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, Gadjah Mada University (2003) • Master of Management, University of North Sumatra (2022)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Asisten Urusan IT Bagian Perencanaan, Pengkajian, Pengembangan PT Perkebunan Nusantara IV (2006—2007) • Asisten Urusan Bagian Sekretaris Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV (2007—2011) • Asisten Teknik PMT PT Perkebunan Nusantara IV (2011—2013) • Kepala Dinas Teknik PMT PT Perkebunan Nusantara IV (2013—2015) • Manajer Unit PMT PT Perkebunan Nusantara IV (2015—2019) • Manajer PKS Berangir PT Perkebunan Nusantara IV (2019) • Kepala Bagian SDM PT Perkebunan Nusantara IV (2019—2022) • Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2022-sekarang)	• IT Affairs Assistant for Planning, Assessment, Development of PT Perkebunan Nusantara IV (2006-2007) • Assistant for Corporate Secretary Affairs of PT Perkebunan Nusantara IV (2007-2011) • PMT Technical Assistant of PT Perkebunan Nusantara IV (2011-2013) • Head of PMT Engineering Service of PT Perkebunan Nusantara IV (2013-2015) • PMT Unit Manager of PT Perkebunan Nusantara IV (2015-2019) • Berangir Plantation Manager of PT Perkebunan Nusantara IV (2019) • Head of HR Department of PT Perkebunan Nusantara IV (2019-2022) • Head of Corporate Secretariat Division of PT Perkebunan Nusantara III (Persero)(2022-presents)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan Perseroan dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan;
2. Mengatur dan mengurus surat menyurat Dewan Komisaris serta membina hubungan yang serasi baik internal maupun eksternal;
   a. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

1. Assisting the Board of Commissioners in carrying out the supervision tasks of the Company and being responsible for the assigned tasks;
2. Organizing and managing correspondence of the Board of Commissioners and fostering harmonious relationships both internally and externally;
   a. Preparing the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners.

b. Mempersiapkan rencana rapat rutin bulanan Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Bersama dengan Direksi berupa:
   i. Membuat Undangan Rapat;
   ii. Jadwal dan Tempat Rapat;
   iii. Mempersiapkan bahan rapat;
   iv. Membuat Risalah Rapat.
3. Membuat Surat Rekomendasi/Persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Direksi Perseroan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Preparing the agenda for routine monthly internal Board of Commissioners meetings as well as Joint Meetings with the Board of Directors, including:
   i. Sending Meeting Invitations;
   ii. Schedule and Venue of the Meeting;
   iii. Preparing meeting materials;
   iv. Drafting Meeting Minutes.
3. Drafting Recommendation/Approval Letters from the Board of Commissioners for proposals from the Company's Board of Directors;
4. Carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners based on applicable legal provisions.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perseroan selalu berupaya untuk memfasilitasi setiap karyawan agar mencapai SDM yang unggul dan dapat bersaing. Pada tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menerima program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan Sekretaris perusahaan dalam melaksanakan tugas. Adapun rincian mengenai program pengembangan yang telah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan ialah sebagai berikut:

Competency Development Program for the Corporate Secretary

The Company always strives to facilitate every employee to achieve excellent human resources and competitiveness. In 2023, the Corporate Secretary participated in training and competency development programs aimed at enhancing the knowledge of the Corporate Secretary in performing tasks. The details of the development program attended by the Corporate Secretary are as follows:

Nama Name	**Materi Pendidikan dan pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal Pelaksanaan** Date of Training	**Penyelenggara** Organizer
Bambang Agustian	-	-	-
Isna Hidayah	• *Plantation Leadership Development Program* (PLDP) 2 Angkatan XXIV • Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan • Pelatihan Sekretariat Perusahaan • Plantation Leadership Development Program (PLDP) 2 Generation XXIV • Anti-Corruption Management System Training • Corporate Secretary Training	• 29 Mei - 19 Agustus 2023 • 2 - 4 Oktober 2023 • 2- 5 Oktober 2023 • May 29 - August 19, 2023 • October 2 - 4, 2023 • October 2 - 5, 2023	PT LPP Agro Nusantara PT LPP Agro Nusantara PT LPP Agro Nusantara
Dahlia Mutiara Chairuman	Pelatihan *Team Building* Mini Raker Transformasi & *Sustainability* PTPN 2023 Mini Retreat Team Building Training for Transformation & Sustainability PTPN 2023	01 September 2023 September 1, 2023	PT LPP Agro Nusantara
Denri Kurniawan	-	-	-
Aditya Maulana	*Workshop* Retail Perkebunan Nusantara Group Retail Workshop for Perkebunan Nusantara Group	26 - 27 Januari 2023 January 26 - 27, 2023	PT LPP Agro Nusantara
Agung Permana Putra	*Workshop* Retail Perkebunan Nusantara Group Retail Workshop for Perkebunan Nusantara Group	26 - 27 Januari 2023 January 26 - 27, 2023	PT LPP Agro Nusantara
Andri Putra Pandjaitan	-	-	-
Hadyopie Sandy Putra Agung Siregar	• Pelatihan Transformasi & *Sustainability* • Pelatihan Sekretariat Perusahaan • Transformation & Sustainability Training • Corporate Secretary Training	• 01 September 2023 • 2 - 5 Oktober 2023 • September 1, 2023 • October 2 - 5, 2023	PT LPP Agro Nusantara PT LPP Agro Nusantara

Nama Name	Materi Pendidikan dan pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Pelaksanaan Date of Training	Penyelenggara Organizer
Benny Wijaya	• Pelatihan *How To Deliver A Good Presentation & Slide Writing Module Training* • Pelatihan Sekretariat Perusahaan • How To Deliver A Good Presentation & Slide Writing Module Training • Corporate Secretary Training	• 29 Agustus 2023 • 2 - 5 Oktober 2023 • August 29, 2023 • October 2 - 5, 2023	PT Boston Consulting Indonesia PT LPP Agro Nusantara
Nishrina Nurul Amirah	-	-	-
Zulkhairi Lubis	-	-	-
Renno Afriansyah	-	-	-
Agus Budhiyanto	-	-	-
Fitria Fatma Amiranti	-	-	-
Meyta	• Pelatihan Sekretaris Eksekutif • Executive Secretary Training	• 16 - 17 November 2023 • November 16 - 17, 2023	LPK FHCI PRIMA UNGGUL
Kevin Maulana	-	-	-
Rachmat Zainuddin	-	-	-

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2023

Hingga akhir tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan sejumlah kegiatan. Adapun kegiatan tersebut ialah penyelenggaraan Rapat Unit Sekretaris Direksi. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas kelancaran Rapat yang dilaksanakan oleh Direksi. Berikut merupakan rincian rapat yang telah diselenggarakan oleh Unit Sekretaris Perusahaan di tahun 2023:

1. Rapat Rutin Direksi yang dilaksanakan 1 (satu) kali setiap minggu.
2. Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris (BOD dan BOC); yang dilaksanakan 1 hingga 2 kali setiap bulannya.
3. Rapat Direksi dengan Pemegang Saham.
4. Perencanaan dan penyelenggaraan RUPS baik yang bersifat tahunan maupun yang bersifat luar biasa atau pertemuan lainnya dengan Pemegang Saham.
5. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Direksi dengan DPR Dalam penyelenggaraan rapat, Unit Kerja Dukungan Layanan Korporasi memiliki tugas utama, yaitu:
   a. Berperan sebagai gatekeeper informasi dan komunikasi bagi Manajemen;
   b. Menyiapkan agenda rapat Direksi setiap minggu;
   c. Membuat Undangan Rapat Direksi;
   d. Membuat dan menindaklanjuti Risalah Rapat Direksi; AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif 118;
   e. Mengoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat dengan Dewan Komisaris serta;

Implementation of Corporate Secretary's Duties in 2023

Until the end of 2023, the Corporate Secretary has carried out several activities. These activities include organizing the Board of Directors Secretariat Unit Meeting. The Corporate Secretary is responsible for the smooth conduct of meetings held by the Board of Directors. The following are the details of the meetings organized by the Corporate Secretary Unit in 2023:

1. Regular Board of Directors (BOD) meetings held once a week.
2. Joint Board of Directors with the Board of Commissioners (BOD and BOC); held 1 to 2 times per month.
3. Board of Directors meetings with Shareholders.
4. Planning and conducting GMS as well as Extraordinary GMS or other meetings with Shareholders.
5. Consultative Meeting (RDP) between the Directors and the Parliament. In the organization of meetings, the Corporate Support Services Unit has the main tasks:
   a. Acting as the gatekeeper of information and communication for Management;
   b. Preparation of the Board of Directors' agenda every week;
   c. Sending out Board of Directors' Meeting Invitations;
   d. Preparing and following up on the Minutes of Board of Directors' Meetings;
   e. Coordinating report materials for meetings with the Board of Commissioners as well as;

f. Menindaklanjuti Risalah dan temuan Dewan Komisaris pada setiap Rapat Gabungan;
g. Berperan sebagai penyambung komunikasi bagi Manajemen pada fungsi-fungsi dalam bentuk pembuatan kutipan risalah rapat untuk kebijakan-kebijakan tertentu yang dihasilkan Manajemen dalam setiap rapat dan dijadikan landasan bagi penyelenggaraan program fungsi bersangkutan;
h. Bertanggung jawab terhadap pembuatan dan proses pengesahan risalah rapat.

Hingga Desember 2023, Sekretaris Perusahaan telah menyelenggarakan rapat dengan rincian sebagai berikut:
1. Rapat Direksi sebanyak 40 kali;
2. Rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 24 kali;
3. Rapat dengan Pemegang Saham sebanyak 3 kali.

f. Following up on the Minutes and findings of the Board of Commissioners at each Joint Meeting;
g. Acting as a communication liaison for Management on functions in the form of drafting minutes of meetings for specific policies generated by Management in each meeting and using them as a basis for organizing the respective function programs;
h. Responsible for drafting and approving meeting minutes.

Until December 2023, the Corporate Secretary has held meetings as follows:
1. Board of Directors meetings 40 times;
2. Meetings with the Board of Commissioners 24 times;
3. Meetings with Shareholders 3 times.

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Fungsi Audit Internal di lingkup Perseroan dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang membantu Direksi dalam melaksanakan audit internal Perseroan guna menilai efektivitas sistem pengendalian internal, memastikan seluruh sistem dan prosedur yang ditetapkan Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, pengelolaan risiko dan proses tata kelola Perusahaan serta memberikan saran perbaikan. Selain itu SPI juga memiliki tugas memastikan bahwa keandalan informasi operasional dan keuangan bagi manajemen serta memastikan kepatuhan atas ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan Perseroan.

INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit function within the Company is carried out by the Internal Audit Unit (IAU), which assists the Directors in conducting internal audits of the Company to assess the effectiveness of internal control systems, ensure that all Company-established systems and procedures are implemented in accordance with regulations and in a timely manner, manage risk and corporate governance processes, and provide improvement suggestions. Additionally, the IAU also ensures the reliability of operational and financial information for management and ensures compliance with established Company regulations and policies.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal

Direktur Utama memiliki kewenangan untuk menunjuk dan mencopot Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Appointment and Dismissal Authority of the Head of Internal Audit Unit

The President Director has the authority to appoint and dismiss the Head of the Internal Audit Unit (IAU) upon approval from the Board of Commissioners.

Pejabat Kepala Satuan Pengawas Intern

Pelaksanaan fungsi SPI dalam *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengacu pada Bab VI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, keberadaan SPI Perseroan juga tunduk pada peraturan dan ketentuan hukum sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah RI No.12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan, tercantum pada bab III Satuan Pengawasan Intern: Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30;

Head of Internal Audit Unit

The implementation of the IAU function within the Perkebunan Nusantara PTPN III (State-Owned Enterprise) Holding refers to Chapter VI of Republic of Indonesia Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. Additionally, the existence of the Company's IAU is subject to the following legal regulations and provisions:
1. Government Regulation of the Republic of Indonesia No.12 of 1998 dated January 17, 1998, concerning Companies, specified in Chapter III Internal Audit Units: Article 28, Article 29, and Article 30;

2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DPPS/SKPTS/R/214/2020 tentang Pengangkatan Karyawan Pimpinan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Perseroan telah menunjuk Hery Nurudin sebagai Kepala SPI.

2. Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
3. Based on Board of Directors Decision Letter No. DPPS/SKPTS/R/214/2020 regarding the Appointment of Management Employees of PT Perkebunan Nusantara III (State-Owned Enterprise), the Company has appointed Hery Nurudin as the Head of IAU.

Hery Nurudin

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit



Periode Jabatan | Period of Position	
Sejak Juli 2020	since July 2020
Usia | Age	
48 tahun	48 years old
Kewarganegaraan | Nationality	
Warga Negara Indonesia	Indonesian citizen
Domisili | Residence	
Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan | Educational Background	
• SMA Negeri 1 Pemalang, Jawa Tengah. *Major in Physics* • *Industrial Engineering*, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta (1994) • *Magister Management*, University of Trisakti (2003)	• SMA Negeri 1 Pemalang, Central Java. Major in Physics • Industrial Engineering, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta (1994) • Magister Management, University of Trisakti (2003)
Pengalaman Kerja | Work Experience	
• Investigator KPK (16 Desember 2005) • Senior Pengembangan dan Pemeliharaan *Local Area* (Juni 2000-Desember 2005) • Auditor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Tim Penertiban Barang Milik Negara di KPK Konsultan, Senior Auditor dan Kepala IT di KAP Drs. CHAERONI & Rekans Network (LAN), dan sistem server klien di KAP Drs. CHAERONI & INDRA (16 Desember 2005 - Desember 2011) • Pemimpin Tim Koordinasi & Supervisi Pencegahan KPK (Januari 2012 - Desember 2012) • Kepala Grup Koordinasi & Supervisi Pencegahan KPK (Januari 2013 - Desember 2014) • Pemimpin Proyek Pengembangan eLHKPN dan Optimalisasi Direktorat LHKPN (Januari 2015 - Februari 2016) • Kepala Grup Pendaftaran & Audit Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wilayah (Februari 2016 - Desember 2016) • Koordinator Wilayah & Supervisi Kalimantan Tengah Pencegahan KPK (Januari 2017 - Desember 2017) • Koordinator Wilayah & Supervisi Sulawesi Tenggara Korsup Pencegahan KPK (Januari 2018 - Desember 2018) • Kepala Bidang Politik, Satuan Tugas Pencegahan & Pendidikan KPK (Januari 2019 - Juni 2020) • Kepala Divisi Audit Internal & Manajemen Risiko di PTPN III (Persero) (Juli 2020 - Sekarang)	• Investigator at the Corruption Eradication Commission (KPK) (December 16, 2005) • Senior in Local Area Development and Maintenance (June 2000-December 2005) • Auditor for State Officials' Wealth Reports (LHKPN), part of the State-Owned Goods Regulation Team at KPK, Consultant, Senior Auditor, and IT Head at KAP Drs. CHAERONI & Rekans Network (LAN), and client server system at KAP Drs. CHAERONI & INDRA (December 16, 2005 - December 2011) • Leader of the Coordination & Supervision Team for KPK Prevention (January 2012 - December 2012) • Head of Coordination & Supervision Group for KPK Prevention (January 2013 - December 2014) • Leader of the eLHKPN Development Project and Optimization of LHKPN Directorate (January 2015 - February 2016) • Head of Registration & Audit Group for State Officials' Wealth Reports (LHKPN) Region (February 2016 - December 2016) • Coordinator & Supervision for Central Kalimantan Region for KPK Prevention (January 2017 - December 2017) • Coordinator & Supervision for Southeast Sulawesi Region for KPK Prevention (January 2018 - December 2018) • Head of Political Affairs, Prevention & Education Task Force at KPK (January 2019 - June 2020) • Head of Internal Audit & Risk Management Division at PTPN III (Persero) (July 2020 - Present)

Satuan Pengawasan Intern (SPI) memiliki kewajiban langsung kepada Direktur Utama dan berperan sebagai rekan kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan, dan tindak lanjut atas hasil audit serta perkembangan proses audit.

Temuan yang diperoleh oleh SPI kemudian disampaikan kepada Manajemen dan Komite Audit sebagai masukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal serta untuk melakukan tindak lanjut terhadap implementasinya.

Sebagai bagian dari struktur organisasi Perseroan yang berada di bawah otoritas Direktur Utama, SPI memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan dan pemikiran yang independen, tidak terpengaruh atau ditekan oleh pihak manapun.

Perubahan dalam struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), termasuk pengangkatan pegawai Divisi Satuan Pengawas Intern diatur dalam Surat di tahun 2023 ialah:

The Internal Audit Unit (IAU) has a direct obligation to the President Director and serves as a colleague to the Audit Committee in carrying out oversight, monitoring, and follow-up functions on audit results and developments in the audit process.

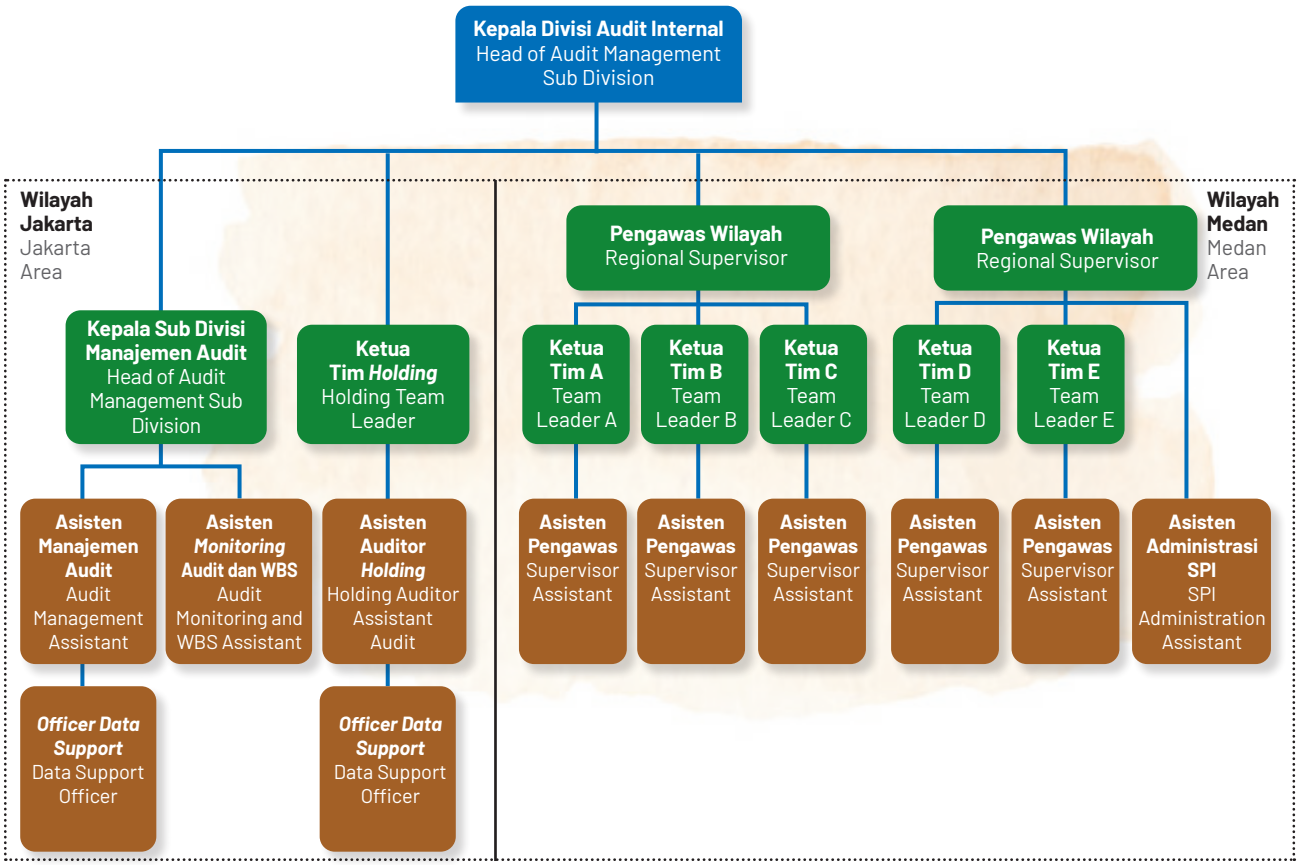
Findings obtained by the IAU are then presented to Management and the Audit Committee as input to enhance the effectiveness of internal controls and to follow up on their implementation.

As part of the Company's organizational structure under the authority of the President Director, the IAU has a responsibility to provide independent views and thoughts that are not influenced or pressured by any party.

Changes in the organizational structure of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), including the appointment of employees in the Internal Audit Unit Division, are regulated in a letter issued in 2023, which states:

Jabatan Position	**Jumlah** Total
Kepala Divisi Division Head	1
Pengawas Wilayah Regional Supervisor	1
Ketua Tim/Kepala Sub Team Leader/Sub Leader	7
Staf Pengawas Bidang Tanaman Plant Supervisory Staff	6
Staf Pengawas Bidang Teknik/Pengolahan Engineering/Processing Supervisory Staff	6
Staf Pengawas Bidang Keuangan/Umum Finance/General Affairs Supervisory Staff	5
Staf Sub Divisi Sub Division Staff	3
Staf Urusan Administrasi Administration Affairs Staff	1
Jumlah | Total	**30**

Bagan Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI)
Organization Structure of Internal Audit Unit (IAU)



Tugas Pokok dan Fungsi:
Main Tasks and Functions:

Ketua Tim *Holding* | Holding Team Leader:
Perencanaan dan pelaksanaan Audit Internal Kantor *Holding* dan Anak Perusahaan serta *Parenting Program* Audit Eksternal
Planning and implementation of Internal Audit of Holding Office and Subsidiaries as well as External Audit Parenting Program

Pengawas Wilayah | Regional Supervisor:
Perencanaan dan pelaksanaan Audit Internal Wilayah Operasional
Planning and implementation of Internal Audit of Operational Areas

Sub Divisi Manajemen Audit | Audit Management Sub Division:
- Perencanaan, Pengembanan Sistem Audit
- Evaluasi dan *Monitoring Sistem* Audit.
- Kerjasama *Stakeholders* terkait fungsi Eksternal Audit
- *Monitoring* WBS dan tindak lanjut Audit
- Planning, Development of the Audit System
- Evaluation and Monitoring of the Audit System
- Cooperation with Stakeholders regarding the External Audit function
- WBS Monitoring and Audit follow-up

Kualifikasi/Persyaratan Auditor Profesional

Untuk memenuhi syarat sebagai Auditor Profesional, maka diperlukan kemampuan menganalisis beban kerja yang telah dihitung oleh SPI dan atau Divisi SDM. Sedangkan pada kualifikasinya, Auditor Internal perlu memiliki kecakapan

Qualifications/Requirements of Professional Auditor

To qualify as a Professional Auditor, one needs the ability to analyze workloads calculated by the Internal Audit Unit (IAU) and/or the HR Division. Regarding qualifications, Internal Auditors need to have adequate skills and good precision.

yang memadai dan kecermatan yang baik. Adapun kriteria tenaga Auditor yang akan ditugaskan di bagian SPI ialah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Kepala Bagian SPI memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (*Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor*);
3. Staf Bagian SPI memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Auditor Internal;
4. Mengikuti program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf auditor internal, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun ikut serta dalam pendidikan yang mendukung usaha-usaha memperoleh sertifikasi profesi;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal dan mematuhi kode etik Audit Internal;
6. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif; dan Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.

The criteria for Auditor personnel assigned to the IAU are as follows:

1. Having good integrity and professional behavior, be independent, honest, and objective in carrying out their duties;
2. The Head of the IAU must have recognized expertise in the internal auditor profession by obtaining the appropriate professional certification (Certified Internal Auditor/ Qualified Internal Auditor);
3. IAU staff members must have the necessary knowledge and skills by obtaining the appropriate professional certification at the appropriate level in the Internal Auditor Function;
4. Participate in continuous professional development programs for internal audit staff, both to maintain their professional certification and to participate in education supporting efforts to obtain professional certification;
5. Must comply with professional standards issued by the Internal Audit association and adhere to the Internal Audit code of ethics;
6. Have the ability to interact and communicate effectively, both orally and in writing, and understand the principles of good corporate governance and risk management.

Sertifikasi Sebagai Profesi Audit Internal

Untuk memastikan kualitas dan hasil audit yang optimal dalam menjalankan tugasnya, semua anggota Satuan Pengawasan Intern (SPI) di *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah mengadopsi Standar Profesi Auditor Intern. Standar ini mencakup standar atribut, standar kinerja, dan standar implementasi.

Standar atribut mengacu pada karakteristik organisasi, individu, dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan audit internal. Standar kinerja menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan mengukur kualitas pekerjaan audit dari tahap perencanaan hingga pemantauan tindak lanjut. Sementara itu, Standar implementasi berlaku untuk penugasan spesifik yang meliputi kegiatan *Assurance* (A), *Consulting* (C), *Investigation* (I), dan *Control Self-Assessment* (CSA).

Dalam menjalankan tugasnya, Bagian SPI mengikuti pedoman Standar Profesional Internasional yang diatur oleh Institut Auditor Internal (IIA) yang dikenal sebagai *Internal Professional Practices Framework* (IPPF). Ini memastikan bahwa praktik audit internal berjalan sesuai dengan standar profesional yang diakui secara internasional

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kecakapan seluruh anggota SPi. Untuk itu, Perseroan

Certification as Internal Auditor

To ensure optimal audit quality and results in performing their duties, all members of the Internal Audit Unit (IAU) at PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding have adopted the Internal Auditor Profession Standards. These standards include attribute standards, performance standards, and implementation standards.

Attribute standards refer to the characteristics of the organization, individuals, and parties involved in the execution of internal audits. Performance standards describe the nature of internal audit activities and measure the quality of audit work from planning to monitoring follow-up actions. Meanwhile, Implementation standards apply to specific assignments covering Assurance (A), Consulting (C), Investigation (I), and Control Self-Assessment (CSA) activities.

In carrying out their duties, the IAU follows the guidelines of the International Professional Standards set by the Internal Professional Practices Framework (IPPF). This ensures that internal audit practices adhere to internationally recognized professional standards.

The Company is committed to continually improving the capabilities of all IAU members. Therefore, the Company

senantiasa mengadakan program pengembangan kompetensi auditor secara berjenjang melalui program sertifikasi. Berikut ini merupakan data jumlah karyawan SPI yang telah mengikuti program sertifikasi:

consistently conducts competency development programs for auditors through certification programs. Below are the data on the number of IAU employees who have participated in certification programs:

Jenis dan Level Sertifikasi Type and Level of Certification	Jumlah Karyawan SPI yang Memiliki Number of Internal Audit Unit Employees with Certification
Certified Fraud Examiner (CFE)	1
Chief Internal Audit Executive (CIAE)	2
Qualified Risk Management Professional (QRMP)	15
Qualified Internal Auditor (QIA)	28

Pada tahun 2023, jumlah karyawan SPI yang telah memiliki sertifikasi ialah sebanyak 28 orang atau 93% dari jumlah seluruh karyawan SPI.

In 2023, the number of IAU employees who have obtained certification is 28 people. This represents 93% of the total IAU workforce.

Kode Etik Satuan Pengawasan Intern

Seluruh anggota SPI selalu bekerja dengan memperhatikan pedoman etika pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun kode etik Satuan Pengawasan Intern ialah sebagai berikut:

1. Jujur, obyektif, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya;
2. Loyal terhadap Perseroan, namun tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum;
3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor intern atau Perseroan;
4. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Perseroan, atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara obyektif;
5. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari auditan, karyawan, maupun mitra bisnis Perseroan, yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya;
6. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;
7. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Audit Internal, kebijakan dan peraturan Perseroan;
8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, atau menimbulkan kerugian terhadap Perseroan;
9. Mengungkapkan semua fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum; dan

Code of Ethics for the Internal Audit Unit

All members of the IAU always work according to ethical guidelines in conducting examinations that comply with applicable laws. The code of ethics for the Internal Audit Unit is as follows:

1. Be honest, objective, and diligent in carrying out tasks and fulfilling responsibilities;
2. Be loyal to the Company but must not consciously engage in activities that deviate or violate the law;
3. Must not engage in actions or activities that could discredit the internal audit profession or the Company;
4. Refrain from activities that may create conflicts of interest with the Company, or activities that may raise doubts about their ability to perform tasks and responsibilities objectively;
5. Must not accept any form of compensation from auditees, employees, or business partners of the Company that could reasonably be perceived to influence their professional judgment;
6. Carry out all assignments using their professional competence;
7. Fully comply with Internal Audit Professional Standards, Company policies, and regulations;
8. Must not exploit information obtained for personal gain, violate the law, or cause harm to the Company;
9. Disclose all facts that, if not disclosed, could (i) distort reports on reviewed activities, or (ii) conceal practices that violate the law; and;

10. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, dan wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Lingkup Hubungan Kerja Satuan Pengawasan Intern

Pada lingkup kerjanya, Satuan Pengawas Intern memiliki hubungan kerja dengan manajemen, Komite Audit, serta Audit Eksternal. Adapun rincian mengenai lingkup kerja SPI ialah sebagai berikut:

1. **Hubungan Kerja dengan Manajemen**
   SPI sebagai mitra bagi semua tingkatan manajemen serta sebagai *advisor* yang memberikan masukan konstruktif kepada Direksi, berwenang setiap saat melaksanakan fungsinya pada semua unit kerja dalam lingkup Perseroan guna memastikan bahwa kebijakan Direksi dan Sistem Pengendalian Internal dijalankan secara konsisten.

2. **Hubungan Kerja dengan Komite Audit**
   Dalam pelaksanaan tugasnya, SPI dan Komite Audit merupakan mitra kerja, di mana Komite Audit melakukan penilaian atas aktivitas hasil audit yang dilakukan oleh SPI, dan memberikan masukan yang konstruktif kepada SPI sebagai umpan balik atas pelaksanaan tugas yang dilakukan SPI, yang diwujudkan dengan rapat koordinasi yang dilakukan sekali dalam sebulan.

3. **Hubungan dengan Auditor Eksternal**
   Untuk mendukung audit yang dilakukan pihak eksternal (Kantor Akuntan Publik, BPK dan BPKP), maka SPI mendukung sepenuhnya dengan memberikan informasi yang relevan berkaitan dengan tujuan audit eksternal yang dilakukan, dan secara jabatan SPI menjadi mitra kerja KAP, BPK dan BPKP untuk mendukung proses audit berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi dan Tugas Masing-Masing Anggota Unit Kerja SPI

SPI bekerja dan bertanggung jawab untuk mengawasi secara efektif sehingga Perseroan dapat mencapai tujuan *zero fraud*. Adapun tugas-tugas ini mencakup:

Audit Keuangan
Audit ini mencakup audit transaksi, perkiraan, kegiatan fungsi dan pertanggungjawaban keuangan untuk menentukan apakah:
1. Unit kerja telah melaksanakan kegiatan pengendalian yang berhasil guna;
2. Unit kerja telah melaksanakan pencatatan dengan tepat

10. Continually improve skills, effectiveness, and quality of task execution and participate in ongoing professional education.

Scope of Work Relations for the Internal Audit Unit

In its scope of work, the Internal Audit Unit has working relationships with management, the Audit Committee, and External Auditors. The details regarding the scope of work for the IAU are as follows:

1. **Working Relationship with Management**
   The IAU serves as a partner to all levels of management and as an advisor providing constructive input to the Board of Directors. It is authorized to perform its functions at all units within the Company to ensure that the Board's policies and Internal Control Systems are consistently implemented.

2. **Working Relationship with the Audit Committee**
   In carrying out its duties, the IAU and the Audit Committee are working partners, where the Audit Committee assesses the results of audit activities conducted by the IAU and provides constructive feedback to the IAU on its task execution. This is manifested in monthly coordination meetings.

3. **Relationship with External Auditors**
   To support external audit activities (Public Accounting Firm, Supreme Audit Board, and Financial and Development Supervisory Agency), the IAU fully supports by providing relevant information related to the objectives of external audits, and officially, the IAU collaborates as working partners with the Public Accounting Firm, Supreme Audit Board, and Financial and Development Supervisory Agency to support the audit process in accordance with applicable regulations.

Functions and Tasks of Each Member of the Internal Audit Unit

The IAU works and is responsible for effectively overseeing so that the Company can achieve zero fraud. These tasks include:

Financial Audit
This audit includes reviewing transactions, estimates, financial function activities, and financial accountabilities to determine whether:
1. The unit has successfully implemented effective control activities;
2. The unit has accurately recorded resources, liabilities, and

atas sumber daya, kewajiban dan operasi Perseroan; serta
3. Laporan manajemen memuat data yang teliti, lengkap, dapat dipercaya dan bermanfaat serta disajikan secara layak.

Audit Operasional

Audit Operasional merupakan penelaahan yang sistematis atas kegiatan pada Perseroan dengan tujuan untuk memeriksa efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Audit operasional bertujuan untuk menilai apakah sumber daya ekonomi yang tersedia telah dikelola secara ekonomis, efisiensi, dan efektif.

Manfaat audit operasional adalah:

1. Memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan;
2. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil;
3. Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil pemborosan; serta
4. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran Perseroan yang telah ditetapkan.

Audit Investigasi/Khusus

Audit investigasi/khusus bertujuan untuk memperoleh kepastian tentang ada tidaknya penyimpangan atau kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan.

Audit Kepatuhan

Audit Kepatuhan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kondisi/ pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsultasi/Bimbingan Teknis

Bagian SPI dapat membantu auditor memberi solusi berupa saran dan rekomendasi audit yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit. Peran Bagian SPI sebagai konsultan diharapkan dapat meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuan Perseroan.

Evaluasi/Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Company operations;
3. Management reports contain accurate, complete, reliable, useful, and appropriately presented data.

Operational Audit

Operational Audit is a systematic review of activities within the Company to examine the efficiency and effectiveness of an activity. The purpose of operational audit is to assess whether economic resources have been managed economically, efficiently, and effectively.

The benefits of operational audit are:

1. Providing relevant and timely operational information for decision making;
2. Identifying potential problem areas at an early stage to determine preventive actions;
3. Evaluating economization and efficiency in resource utilization, including reducing waste;
4. Assessing effectiveness in achieving Company goals and objectives.

Special/Investigative Audit

Special/investigative audit aims to ascertain whether there are any deviations or fraud in the implementation of Company operational activities.

Compliance Audit

Compliance Audit is conducted to assess the conformity of conditions/activities with applicable regulations.

Consultation/Technical Guidance

The IAU can assist auditors by providing solutions in the form of audit advice and recommendations documented in the Audit Result Report. The role of the IAU as a consultant is expected to assure that the organization has used organizational resources economically, efficiently, and effectively, thereby assessing whether management has carried out organizational activities that lead to Company goals.

Evaluation/Review

Review is a re-examination of evidence of an activity to ensure that the activity has been carried out in accordance with established provisions, standards, plans, or norms. Evaluation is a series of activities comparing the results or performance of an activity with established standards, plans, or norms, and determining factors that influence the success/failure of an activity in achieving objectives.

Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Intern

Selama tahun 2023, Satuan Pengawas Intern telah mengikuti 8 kali program pengembangan yang terdiri atas seminar, pendidikan, atau pelatihan. Berikut ini merupakan rincian mengenai program pelatihan yang telah diikuti oleh SPI sepanjang tahun 2023.

Competency Development of Internal Audit Unit

During 2023, the Internal Audit Unit has participated in 8 competency development programs, including seminars, education, or training. Below are the details of the training programs attended by the IAU throughout 2023.

No.	Materi Pelatihan Training Material	Tanggal Pelaksanaan Training Date	Penyelenggara/Pembicara Organizer/Speaker
1.	Pembelajaran Bahasa Inggris English Language Learning	24 Januari - 24 Juni 2023 January 24 - June 24, 2023	Wallstreet English
2.	Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Corruption Management System Training	2 s.d 4 Oktober 2023 October 2 - 4, 2023	PT LPP Agro Nusantara
3.	*Plantation Leadership Development Program* (PLDP) 2 Angkatan XXIV Plantation Leadership Development Program (PLDP) 2 Batch XXIV	29 Mei - 19 Agustus 2023 May 29 - August 19, 2023	PT LPP Agro Nusantara
4.	Pelatihan *How To Deliver A Good Presentation & Slide Writing Module Training* How To Deliver A Good Presentation & Slide Writing Module Training	29 Agustus 2023 August 29, 2023	PT Boston Consulting Indonesia
5.	Pelatihan *How To Deliver A Good Presentation & Slide Writing Module Training* How To Deliver A Good Presentation & Slide Writing Module Training	29 Agustus 2023 August 29, 2023	PT Boston Consulting Indonesia
6.	*Plantation Leadership Development Program* (PLDP) 3 Bidang Keuangan & Akuntansi Angkatan XVI Plantation Leadership Development Program (PLDP) 3 Finance & Accounting Batch XVI	31 Juli - 23 September 2023 July 31 - September 23, 2023	PT LPP Agro Nusantara
7.	Diklat *Probity Audit* Probity Audit Training	21 - 23 Agustus 2023 August 21 - 23, 2023	Badan Diklat BPK RI
8.	Pelatihan *Office Administration & Management* Office Administration & Management Training	12 - 13 Oktober 2023 October 12 - 13, 2023	PT LPP Agro Nusantara

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal dilakukan oleh jajaran Satuan Pengawas Intern dengan cara memantau efektivitas sistem pengendalian internal dalam kegiatan operasional di kantor pusat, kantor wilayah, maupun pada entitas anak. Auditor Internal melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengawasan Internal untuk melihat SOP dan kebijakan yang dibuat oleh manajemen terkait proses bidang keuangan, operasional, SDM, Logistik, TI dan TJSL serta sarana pendukung lainnya dengan melakukan pemeriksaan atas keakuratan data keuangan dan operasional serta kepatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2023, hasil dari pemeriksaaan yang telah dilakukan oleh SPI atas efektivitas SIstem Pengendalian

Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System

The evaluation of the implementation of the internal control system is conducted by the Internal Audit Unit by monitoring the effectiveness of the internal control system in operational activities at the headquarters, regional offices, and subsidiary entities. Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of the Internal Control System to review Standard Operating Procedures (SOPs) and policies created by management related to financial, operational, HR, logistics, IT, and legal processes as well as other supporting facilities by examining the accuracy of financial and operational data and compliance with laws and regulations.

In 2023, the results of the examinations conducted by the Internal Audit Unit regarding the effectiveness of the Internal

Intern menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Intern Perseroan telah berjalan dengan baik dengan batas risiko yang terukur.

Control System showed that the Company's Internal Control System has been functioning well within measured risk limits.

Pernyataan atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Setelah melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris dan Komite Audit, bersama dengan Direksi, menyimpulkan bahwa sistem tersebut berjalan secara memuaskan dan batas risiko yang dapat diukur telah terpenuhi.

Statement on the Adequacy of the Internal Control System

After evaluating the effectiveness of the internal control system, the Board of Commissioners and the Audit Committee, along with the Board of Directors, concluded that the system is functioning satisfactorily and that measurable risk limits have been met.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Internal Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, jumlah rencana dan realisasi program kerja SPI ialah sebagai berikut:

Brief Report on the Implementation of Duties of the Internal Audit Unit in 2023

Throughout 2023, the number of planned and realized work programs of the Internal Audit Unit was as follows:

Rencana Audit Audit Plan	Realisasi Audit Audit Realization	Jumlah Rekomendasi Number of Recommedations
117	140	4.729

Penilaian Kinerja SPI

Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengacu pada target indikator kinerja Divisi yang mencakup:

1. Laporan Audit (Hasil penilaian: selesai 100%);
2. Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) (Hasil penilaian: Skala 5);
3. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Audit (Hasil Penilaian: Skala 5);
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut (*Monitoring*) (Hasil penilaian: 98,60% dari target 98,00%).

Performance Assessment of Internal Audit Unit

Performance evaluation is conducted based on performance indicator targets of the Division, which include:

1. Audit Reports (Assessment Result: completed 100%);
2. Timeliness of Audit Report Completion (Assessment Result: Scale 5);
3. Timeliness of Audit Implementation (Assessment Result: Scale 5);
4. Follow-Up Report (Monitoring) (Assessment Result: 98.60% of the target 98.00%).

AUDIT EKSTERNAL/AKUNTAN PUBLIK
EXTERNAL AUDIT/ PUBLIC ACCOUNTANT

Audit Eksternal merupakan organ eksternal Perseroan yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perseroan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

External Audit is an external organ of the Company that functions to provide an opinion regarding the compliance of the Company's financial statements with the applicable Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia. The Company appoints Public Accounting Firms as determined through the Annual General Meeting based on the recommendations of the Board of Commissioners and the Audit Committee. The selection process is carried out according to the applicable mechanism. To ensure independence and the quality of the examination results, the appointed External Auditors must not have any conflicts of interest with the Company.

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

PTPN III (Persero) memiliki tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi Perkebunan PTPN yang beranggotakan dari seluruh PTPN sesuai Surat Keputusan Direksi PTPN III (Persero) No. 3.05/SKPTS/130/2017 tentang Tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi Perkebunan PTPN tanggal 30 November 2017. Pembentukan tim tersebut dilakukan agar Perseroan dapat terus mengikuti perubahan IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Adapun tim ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun *Chart Of Account* (COA) berbasis ERP;
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan Akuntansi Perkebunan PTPN berdasarkan PSAK terkini berbasis IFRS yang selaras dan terintegrasi dengan program ERS PTPN I s.d XIV;
3. Melaksanakan sosialisasi terhadap kebijakan akuntansi perkebunan yang telah diperbaharui;
4. Melakukan evaluasi terhadap penerapan penerapan kebijakan akuntansi yang berlaku di PTPN I s.d XIV.

Seluruh anggota Tim telah mengikuti agenda *inhouse training* PSAK terkait update kebijakan perkebunan Pelatihan ini melibatkan narasumber dari kalangan profesional dan akademisi dengan tujuan melakukan analisis celah (*Gap analysis*) dan diskusi mengenai penerapan PSAK terkini, terutama yang berkaitan dengan PSAK 69 Agrikultur (penyelarasan dengan IAS 41-Agriculture), yang memiliki dampak signifikan bagi industri perkebunan. Penerapan PSAK 69 Agrikultur ini telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No. 3.05/SE/PTPN/15/2017 tentang Kebijakan Akuntansi Agrikultur.

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

PTPN III (Persero) has a team for the Preparation of PTPN Plantation Accounting Policies, composed of members from all PTPN companies according to the Board of Directors' Decision Letter No. 3.05/SKPTS/130/2017 regarding the PTPN Plantation Accounting Policy Preparation Team dated November 30, 2017. The formation of this team was done so that the Company can continue to comply with changes in IFRS (International Financial Reporting Standards). This team has the following tasks:

1. Developing an ERP-based Chart Of Account (COA);
2. Formulating and establishing PTPN Plantation Accounting policies based on the latest PSAK (Indonesian Financial Accounting Standards) aligned with IFRS and integrated with the ERS (Electronic Records System) of PTPN I to XIV;
3. Conducting socialization on updated plantation accounting policies;
4. Evaluating the implementation of accounting policies in PTPN I to XIV.

All members of the team have participated in in-house PSAK training related to the plantation policy update. This training involved speakers from professional and academic backgrounds with the aim of conducting Gap analysis and discussing the implementation of the latest PSAK, especially PSAK 69 Agriculture (alignment with IAS 41-Agriculture), which has a significant impact on the plantation industry. The implementation of PSAK 69 Agriculture has been effective since January 1, 2018, as stipulated in Circular Letter No. 3.05/SE/PTPN/15/2017 regarding Agriculture Accounting Policies.

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa;

2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan;
3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut;

4. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perseroan;
5. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku;
6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

Mechanism of Public Accountant Appointment

Stages of the mechanism for the appointment of Public Accounting Firm:

1. The Board of Commissioners through the Audit Committee initiates the process of appointing external auditor candidates by requesting assistance from the Board of Directors in the appointment process according to procurement regulations;
2. The Board of Commissioners may reappoint the external auditor based on an evaluation of the external auditor's performance in auditing the Financial Statements;

3. The Board of Commissioners presents the reasons for the nomination to the Annual General Meeting (GMS) and proposes the honorarium/service fee for the external auditor;
4. The proposal to the GMS can be submitted through a separate letter, which is part of the Board of Commissioners' annual performance response to the Company;
5. The Board of Commissioners evaluates the external auditor's performance through the Audit Committee in accordance with applicable regulations and standards;
6. For the process of appointing external auditor candidates or reappointing external auditors done by the GMS, the Board of Commissioners delegates authority to the GMS to determine the auditor.

Akuntan Publik Tahun 2023

Pada tahun 2023, Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Penunjukan KAP ini diatur berdasarkan *Engagement Letter* No. 0474/PSS/10/2023 tanggal 27 Oktober dan telah dilakukan Addendum dengan No. 099/PSS/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Penyediaan Jasa Audit Keuangan Holding Perkebunan (PTPN III) Tahun buku 2023. Uraian mengenai profil Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh Perseroan di tahun 2023 ialah sebagai berikut:

Public Accountant in 2023

In 2023, the Company appointed the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year. The appointment of this Public Accounting Firm is regulated based on Engagement Letter No. 0474/PSS/10/2023 dated October 27 and an Addendum with No. 099/PSS/02/2024 dated February 26, 2024, regarding the Provision of Financial Audit Services for the Holding Perkebunan (PTPN III) for the 2023 Fiscal Year. The description of the profile of the Public Accounting Firm used by the Company in 2023 is as follows:

Kantor Akuntan Publik | Public Accounting Firm	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja
Akuntan | Accountant	Damestar Hutagalung
Tahun Audit | Year of Audit	Tahun Buku 2023 / Fiscal Year 2023
Periode Penugasan | Assignment Period	2019-2023
Jasa | Service	*Assurance*
Jasa Lainnya | Other Services	Auditor
Biaya | Fee	Rp3.624.982.500

Hasil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 telah mendapatkan Opini wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kasnya tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

The Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2023 have received an unqualified opinion, indicating compliance with all material aspects, and its financial performance and cash flows are deemed to be in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability in Indonesia.

Daftar Akuntan Publik dan Biaya

Setiap tahunnya Perseroan menunjuk 1 (satu) Kantor Akuntan Publik untuk audit. Kemudian, untuk ,menjaga independensi serta profesionalitas KAP, maka pemilihan Auditor Eksternal perlu memenuhi kriteria Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur bahwa 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit maksimal 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan dengan Akuntan Publik (Partner) maksimal 3 (tiga) Tahun Buku berturut-turut.

Berikut ini merupakan daftar Kantor Akuntan Publik selama 5 tahun terakhir dan opini yang diberikan dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan.

List of Public Accounting Firms and Fees

Annually, the Company appoints 1 (one) Public Accounting Firm for the audit. To ensure independence and professionalism of the Public Accounting Firm, the selection of External Auditors must adhere to the criteria outlined in Minister of Finance Regulation No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008, governing Public Accounting Services. This regulation stipulates that 1 (one) Public Accounting Firm (KAP) may conduct audits for a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years, with the Public Accountant (Partner) serving for a maximum of 3 (three) consecutive fiscal years.

The following is a compilation of Public Accounting Firms over the past 5 years and the opinions rendered in auditing the Company's Financial Statements.

Daftar Akuntan Publik 5 (lima) Tahun Terakhir 2018-2022
List of Public Accountant in the Last 5 (Five) Years 2018-2022

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Opini Opinion
2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material aspects
2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material aspects
2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material aspects
2020	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material aspects
2019	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material aspects

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Perseroan menyadari bahwa kegiatan usaha yang dijalankan tidak terlepas dari beberapa risiko yang timbul dalam proses menjalankan usaha. Risiko yang muncul dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal Perseroan. Guna menghadapi hal tersebut, maka Perseroan melakukan asesmen risiko, yaitu identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, serta melakukan pemantauan risiko agar terkelola dengan baik.

The Company acknowledges that its business activities are not immune to various risks arising from both external and internal factors. To address this, the Company conducts risk assessment, which includes risk identification, analysis, and evaluation, as well as ongoing risk monitoring to ensure effective risk management.

Setiap tahunnya, Perseroan perlu menjaga kesinambungan Perseroan serta memastikan bahwa pencapaian *Key Performance Indicator* yang ditetapkan oleh pemegang saham dapat terpenuhi. Untuk menghadapi hal tersebut, Perseroan selalu berupaya untuk mengelola risiko secara efektif dan efisien serta memastikan kesinambungan dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan melalui pengelolaan risiko secara proaktif, berfokus pada risiko yang utama, dan memberikan perhatian pada proses pengendalian dan penanganan risiko Perseroan.

Each year, the Company must maintain continuity and ensure that the Key Performance Indicators set by shareholders are met. To achieve this, the Company always strives to manage risks effectively and efficiently, ensuring business continuity and sustainable growth through proactive risk management, focusing on key risks, and emphasizing control processes and risk mitigation.

Konteks Aspek Global dan Perkebunan

Tantangan ekonomi global pada tahun 2023 masih meliputi berbagai aspek, seperti tren inflasi yang terjadi di berbagai negara ekonomi serta ketegangan konflik antara Rusia dan Ukraina yang belum mereda. Ketegangan antara kedua negara tersebut terus menjadi pemicu percepatan perlambatan aktivitas ekonomi global, menciptakan kekacauan lonjakan harga komoditas, gangguan pasokan, dan meningkatkan ketidakpastian pangan, serta masalah kemiskinan dan inflasi.

Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global yang tidak stabil, di tahun 2023 Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%. Pada Triwulan IV-2023, pertumbuhan ini bahkan meningkat menjadi 5,04% (YoY), melebihi pertumbuhan dari triwulan sebelumnya yang mencapai 4,94%.

Pencapaian positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan IV-2023 didukung oleh beberapa sektor lapangan usaha. Pada sektor ekspor dan impor, khususnya ekspor batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet, terus mengalami peningkatan permintaan di pasar global. Sementara, di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga berkontribusi signifikan, menyumbangkan pertumbuhan sebesar 1,30% selama Triwulan IV-2023, dan menjadi salah satu dari lima penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Global and Plantation Context

Global economic challenges in 2023 encompass various aspects, such as inflation trends in several economic countries and ongoing tensions between Russia and Ukraine. The tension between these countries continues to contribute to accelerated global economic slowdown, creating disruptions in commodity prices, supply chain disturbances, increased food uncertainty, and issues related to poverty and inflation.

Despite facing unstable global economic challenges, Indonesia recorded a 5.05% economic growth in 2023. In the fourth quarter of 2023, this growth even increased to 5.04% (YoY), surpassing the growth from the previous quarter, which was at 4.94%.

The positive achievement in national economic growth in the fourth quarter of 2023 was supported by several business sectors. In the export and import sector, particularly coal, palm oil, and rubber exports, there was a continuous increase in demand in the global market. Meanwhile, the agricultural, forestry, and fisheries sector also made significant contributions, contributing to a 1.30% growth during the fourth quarter of 2023, and becoming one of the top five contributors to national economic growth.

Selanjutnya, pada tahun 2023 juga tercatat ekspor non-migas Indonesia 2023 mencapai US$242,87 miliar, dengan sekitar US$28,45 miliar berasal dari ekspor lemak dan minyak hewan/nabati, termasuk minyak kelapa sawit. Bahkan harga minyak kelapa sawit (CPO) cenderung stabil di tahun 2023, tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Harga CPO CIF Rotterdam berkisar antara US$905/MT – US$1.019/MT, dengan rata-rata sebesar US$964/MT. Sementara itu, harga patokan ekspor CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan berkisar antara US$723,45 – US$955,53/MT, dengan rata-rata sebesar US$832,26/MT. Demikian pula, harga tandan buah segar kelapa sawit juga relatif stabil, dengan penetapan Gubernur berkisar antara Rp2.180 – Rp2.718/Kg, atau rata-rata sebesar Rp2.425/Kg.

Namun, pada sektor karet, terjadi penurunan pada PDB ADHK dari industri karet, barang dari karet, dan plastik sebesar Rp15,74 triliun pada kuartal III/2023, mengalami penurunan sebesar 4,34% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Furthermore, in 2023, Indonesia's non-oil and gas exports reached US$242.87 billion, with around US$28.45 billion coming from fat and animal/plant oil exports, including palm oil. Even the price of palm oil (CPO) remained stable in 2023, without significant increases compared to previous years. The CIF Rotterdam CPO price ranged from US$905/MT – US$1,019/MT, with an average of US$964/MT. Meanwhile, the benchmark export price for CPO set by the Ministry of Trade ranged from US$723.45 – US$955.53/MT, with an average of US$832.26/MT. Similarly, the price of fresh palm fruit bunches also remained relatively stable, with the Governor's determination ranging from Rp2,180 – Rp2,718/Kg, or an average of Rp2,425/Kg.

However, in the rubber sector, there was a decrease in the ADHK GDP from the rubber industry, rubber products, and plastics by Rp15.74 trillion in the third quarter of 2023, experiencing a 4.34% decline compared to the same period in the previous year.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

PTPN III (Persero) selalu memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku saat menerapkan manajemen risiko, adapun ketentuan dan regulasi tersebut ialah:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011, Bagian Keenam Pasal 25 di mana Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/ Tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha dan wajib membangun serta melaksanakan program manajemen risiko secara terpadu;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2014, terkait aktivitas Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku *Holding* yang memegang saham dari PTPN I, II, IV s.d. XIV selain menjalankan aktivitas *stand alone* melalui sinergi dan koordinatif dalam upaya penyehatan anak perusahaan dan pelaksanaan aksi-aksi korporasi lainnya;
3. Surat Keputusan Direksi PTPN III (Persero) Nomor: DSDM/ SKPTS/65/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), di mana adanya perubahan struktur organisasi yang memindahkan struktur sub divisi manajemen risiko dari Divisi Audit Internal dan Manajemen Risiko ke Divisi Perbendaharaan, Anggaran, dan Manajemen Risiko;
4. Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018 *Risk Management – Guidelines* sebagai kerangka kerja, prinsip, dan proses manajemen risiko di PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
5. Pedoman Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berbasis ISO 31000 : 2018

Basis of Risk Management Implementation

PTPN III (Persero) always adheres to the applicable provisions and regulations when implementing risk management. The provisions and regulations include:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011, Part Six Article 25, where the Board of Directors must consider business risks in every decision/action and is obliged to develop and implement an integrated risk management program;
2. Government Regulation Number: 72 of 2014, related to the activities of Perkebunan Nusantara III (Persero) as a Holding Company holding shares of PTPN I, II, IV to XIV, besides conducting stand-alone activities through synergy and coordination efforts for the health of subsidiaries and implementation of other corporate actions;
3. Decision Letter of the Board of Directors of PTPN III (Persero) Number: DSDM/SKPTS/65/2022 dated March 30, 2022, regarding the Organizational Structure Change of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), which includes the restructuring transferring the risk management sub-division from the Internal Audit and Risk Management Division to the Treasury, Budget, and Risk Management Division;
4. Risk Management based on ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines as the framework, principles, and processes of risk management at PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
5. Integrated Corporate Risk Management Guidelines of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) based on ISO 31000:2018;

6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-5/MBU/09/2022 tanggal 02 September 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara

Pengelola Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko korporasi, Perseroan melakukan pendekatan konsep *Three Lines of Model* yang terdiri dari tiga lini sebagai berikut:

1. Lini pertama: *Manages the risk,* sebagai unit pemilik risiko merupakan unit bisnis yang langsung mengidentifikasi dan mengelola dalam proses bisnis.
2. Lini kedua: *Sets risk guidelines,* sebagai fungsi manajemen risiko merupakan unit yang memantau dan membantu lini pertama dalam menyiapkan pedoman manajemen risiko yang menjadi panduan bagi lini pertama.
3. Lini ketiga: *Independent audit and assurance,* sebagai fungsi pengawasan dan asuransi yang memastikan tata kelola dan pengendalian risiko diterapkan secara efektif oleh Perseroan.

Terdapat 7 (tujuh) Organ Pengelola risiko yang dimiliki oleh PTPN III (Persero), yaitu:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Komite Audit;
4. Komite Pemantau Risiko;
5. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
6. Sub Divisi Manajemen Risiko;
7. Divisi Audit Internal.

Implementasi Manajemen Risiko Korporasi PTPN III (Persero)

Selama tahun 2023, terdapat beberapa penerapan manajemen risiko dengan program kerja di bidang manajemen risiko, yakni:

1. Penyusunan & *review* pemenuhan aspek-aspek dalam PER-2;
2. Pengembangan kapasitas & kompetensi organ pengelola risiko;
3. Pengembangan Aplikasi Manajemen Risiko;
4. Pengisian *content knowledge management* - Manajemen Risiko;
5. *Focus group discussion* dengan entitas anak;
6. Koordinasi dengan KBUMN dan BPKP atau pihak eksternal lainnya;
7. Reviu kajian risiko dari Divisi/ *Risk Owner* terkait;
8. Pengukuran *risk maturity index* tahun 2022.

6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-5/MBU/09/2022 dated September 2, 2022, concerning the Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises.

Risk Management Manager

In corporate risk management implementation, the company adopts the concept of the Three Lines of Model consisting of three lines as follows:

1. First Line: Risk Ownership, where the business units directly identify and manage risks in the business process.
2. Second Line: Risk Guidelines, which monitor and assist the first line in preparing risk management guidelines as a guide for the first line.
3. Third Line: Independent Audit and Assurance, ensuring that risk governance and control are effectively implemented by the company.

There are 7 Risk Management Entities owned by PTPN III (Persero):

1. Board of Commissioners;
2. Board of Directors;
3. Audit Committee;
4. Risk Monitoring Committee;
5. Finance Director and Risk Management;
6. Risk Management Sub Division;
7. Internal Audit Division.

Corporate Risk Management Implementation at PTPN III (Persero)

During 2023, several risk management implementations and work programs were carried out in the field of risk management, including:

1. Compilation and review of compliance aspects in PER-2;
2. Capacity and competency development of risk management entities;
3. Development of Risk Management Applications;
4. Filling content knowledge management - Risk Management;
5. Focus group discussions with subsidiary entities;
6. Coordination with SOEs and BPKP or other external parties;
7. Review of risk studies from Divisions/Risk Owners;
8. Measurement of risk maturity index for 2022.

Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Perseroan menerapkan proses manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018, yang menekankan pada penyatuan kerangka, prinsip, dan proses pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan sistem manajemen *Holding* Perkebunan Nusantara III (Persero). Pendekatan ini dianggap cukup ideal untuk perusahaan perkebunan, karena memperhatikan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko dan usaha meningkatkan kesadaran risiko bagi pemilik risiko.

Company Risk Management System

The Company implements a risk management process based on ISO 31000:2018, emphasizing the integration of frameworks, principles, and risk management processes integrated with the management system of Holding Perkebunan Nusantara III (Persero). This approach is considered ideal for plantation companies as it emphasizes accountability in risk management and enhances risk awareness for risk owners.

Jenis Risiko dan Cara Pengelolaannya

Selama tahun 2023, *top ten risk* yang dikelola oleh PTPN III (Persero) ialah:

1. Tidak tercapainya target pembelian bahan baku TBS dari Pihak Ketiga/Petani/Plasma ;
2. Tidak Tercapainya target produktivitas teh ;
3. Risiko keterlambatan penyediaan benih sesuai varietas dari produsen, pengadaan paket pekerjaan terlambat, keterbatasan *resources* (vendor) pada proses penataan kompisisi tanaman kelapa sawit ;
4. Keterlambatan penyiapan lahan dan masa tanam tebu ;
5. Tidak tercapainya target peningkatan EBITDA Operasional PTPN Group ;
6. Tidak tercapainya target pelepasan aset non inti sesuai target ;
7. Risiko keterlambatan penyediaan bibit dan keterlambatan proses pengadaan pekerjaan pada proses penataan komposisi tanaman komoditi karet ;
8. Risiko tidak tercapainya kualitas produk turunan CPO yang telah ditargetkan ;
9. Pencapaian target produktivitas TBS kelapa sawit kebun sendiri sesuai dengan RKAP 2023 ;
10. Pencapaian target produktivitas karet kebun sendiri sesuai dengan RKAP 2023.

Types of Risks and Its Management

During 2023, the top ten risks managed by PTPN III (Persero) were:

1. Failure to achieve FFB third-party/farmer/plasma raw material purchase targets ;
2. Failure to achieve tea productivity targets ;
3. Risks of delays in providing seeds according to varieties from producers, late procurement of work packages, resource limitations (vendors) in the process of arranging oil palm plant compositions ;
4. Delays in land preparation and sugarcane planting periods
5. Failure to achieve Operational EBITDA Group target ;
6. Failure to achieve non-core asset release targets as per target ;
7. Risks of delays in providing seeds and delays in the procurement process in arranging the composition of rubber crop plants ;
8. Risk of not achieving the targeted quality of CPO derivative products ;
9. Achieving oil palm FFB productivity targets according to 2023 RKAP ;
10. Achieving rubber productivity targets according to 2023 RKAP.

Perhitungan Peringkat Komposit Risiko Tahun 2023

Perhitungan atas Peringkat Komposit Risiko PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada parameter yang telah ditetapkan di dalam SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara.

Composite Risk Rating Calculation for 2023

The calculation of the Composite Risk Rating for PT Perkebunan Nusantara III (Persero) for the year 2023 was conducted based on the parameters established in SK-7/DKU.MBU/10/2023 regarding the Technical Guidelines for Risk Management Reporting for State-Owned Enterprises.

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Risk Management Implementation Quality Assessment

No	Indikator Indicator	Bobot Weight	Hasil Penilaian Assessment Results	Skor Penilaian Assessment Score
1	Pencapaian nilai eksposur risiko dibandingkan dengan target risiko residual Achievement of risk exposure value compared to residual risk target	30%	90	27
2	Pencapaian *output* pelaksanaan perlakuan risiko dibandingkan dengan target total output perlakuan risiko Achievement of risk treatment Implementation outputs compared to total risk treatment output target	20%	60	12
3	Realisasi biaya pelaksanaan perlakuan risiko dibandingkan dengan anggaran Actual cost of risk treatment implementation compared to budget	20%	80	16
4	Ketepatan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko, kuantifikasi risiko, rencana perlakuan risiko, dan prioritisasi risiko Accuracy of risk assessment, including risk identification, risk quantification, risk treatment plan, and risk prioritization	30%	80	24
Total				**79**
Konversi Skor Score Conversion				***Marginal***

Penilaian terhadap Pencapaian Kinerja
Performance Achievement Assessment

No	Indikator Indicator	Bobot Weight	Hasil Penilaian Assessment Results	Skor Penilaian Assessment Score
1	Capaian KPI Kolegial Achievement of Collegial KPIs	30%	50	15
2	Capaian Kinerja Keuangan Financial Performance Achievement	30%	65	19,5
3	Capaian Kinerja Operasi/ Produksi Utama Main Operational/Production Performance Achievement	40%	50	20
Total				**54,5**
Konversi Skor Score Conversion				**Buruk** Poor

Penilaian terhadap Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan peringkat komposit Risiko dari kombinasi variabel kualitas penerapan Manajemen Risiko serta variabel pencapaian kinerja yang diuraikan di poin 1 dan 2 di atas, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berada di kuadran 5 (*Marginal* dan Buruk), yang dapat dilihat pada matriks berikut:

Performance Achievement Assessment

Based on the composite risk rating calculation from the combination of variables such as Risk Management Implementation Quality and Performance Achievement outlined in points 1 and 2 above, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is positioned in quadrant 5 (Marginal and Poor), as depicted in the matrix below:

Kinerja Performance:	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Quality of Risk Management Implementation				
	Strong	*Satisfactory*	*Fair*	*Marginal*	*Unsatisfactory*
Sangat Baik Excellent	1	1	2	3	3
Baik Good	1	2	2	3	4
Cukup Adequate	2	2	3	4	4
Kurang Insufficient	2	3	4	4	5
Buruk Poor	3	3	4	5	5

Deskripsi Peringkat Komposit Risiko:
Description of Composite Risk Rating

Peringkat Rating	Deskripsi Description
1	Risiko terkendali sangat baik dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong sangat rendah Risk is well controlled and the likelihood of performance target not being achieved is very low
2	Risiko terkendali baik dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong rendah Risk is adequately controlled and the likelihood of performance target not being achieved is low
3	Risiko terkendali cukup dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong cukup Risk is moderately controlled and the likelihood of performance target not being achieved is moderate
4	Risiko tidak terkendali dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong tinggi Risk is not well controlled and the likelihood of performance target not being achieved is high
5	Risiko sangat tidak terkendali dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong sangat tinggi Risk is poorly controlled and the likelihood of performance target not being achieved is very high

Penanganan Risiko

Dalam menghadapi pengelolaan atas *top ten risk* di tahun 2023, maka telah dilakukan penanganan utama seperti berikut:

1. Tidak tercapainya target pembelian bahan baku TBS dari Pihak Ketiga/Petani/Plasma.
   Mitigasi:
   a. Meningkatkan pengawasan Pelaksanaan Pembelian TBS
   b. Melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembiayaan pembelian
   c. Pemeliharaan PKS agar tidak sering rusak
   d. Penerapan sistem perhitungan pembelian yang kompetitif namun masih menguntungkan
   e. Penerapan sistem pembayaran TBS yang lebih
   f. Perbaikan dan penambahan jumlah tangki timbun

Risk Treatment

In dealing with the management of the top ten risks in 2023, the following main treatments have been implemented:

1. Failure to achieve FFB third-party/farmer/plasma raw material purchase targets.
   Mitigation:
   a. Increase supervision of FFB Purchase Implementation
   b. Collaborate with banks for purchase financing
   c. Maintenance of palm oil mills to prevent frequent breakdowns
   d. Implementation of a competitive yet profitable purchasing calculation system
   e. Implementation of a more efficient FFB payment system
   f. Improvement and addition of bulk tank quantities

2. Tidak Tercapainya target produktivitas teh.
   Mitigasi:
   a. *Recovery* tanaman
   b. Panen sesuai norma (tidak memaksakan panen yang bukan pucuk)
   c. Pengawalan dengan *monitoring* dan evaluasi (rapat mingguan bersama konsultan BCG)
3. Risiko keterlambatan penyediaan benih sesuai varietas dari produsen, pengadaan paket pekerjaan terlambat, keterbatasan *resources* (vendor) pada proses penataan komposisi tanaman kelapa sawit.
   Mitigasi:
   a. Mempercepat pengurusan SP2BKS
   b. Pengadaan bibit unggul secara selektif sebelum ditanam
   c. Pedoman pengadaan dan standarisasi bibit
   d. Pelaporan seleksi dan pemindahan bibit yang akan ditanam
   e Pengadaan lebih awal dan mencari sumber daya melalui kerjasama /kontrak
   f. Melaksanakan *replanting* sesuai standar (tumbang dan *chipping*)
   g. Menunjuk Vendor pelaksana pekerjaan yang kompeten
4. Keterlambatan penyiapan lahan dan masa tanam tebu.
   Mitigasi:
   a. Melakukan pengajuan permintaan kebutuhan pendanaan secara periodik
   b. Percepatan pengolahan lahan dengan menggunakan tambahan traktor (tambahan vendor)
5. Tidak tercapainya target peningkatan EBITDA Operasional PTPN Group.
   Mitigasi:
   a. Melaksanakan program percepatan EBITDA Group dengan pendampingan konsultan BCG, melalui program kerja: *Revenue Enhancement, Operational Control Tower*, Implementasi *dashboard* sawit, karet, teh dan gula pada DOMO, *Logistics Optimization*, Pengoptimalan Kontrak, *Procurement Excellence*, Menciptakan *value creation, Zero Based Budgeting, Organizational Excellence, Cash Office, Management Review Cycle, Strategic Transformation Office*.
   b. Melaksanakan rangkaian pertemuan untuk meninjau progres, mengidentifikasi masalah, dan mendapatkan keputusan per program
   c. Melaksanakan inisiatif-inisiatif yang berpengaruh pada peningkatan volume produksi, kualitas dan pengawasan terhadap proses change management yang berada pada lingkup *operational excellence*
6. Tidak tercapainya target pelepasan aset non inti sesuai target.
   Mitigasi:
   a. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka penilaian disposal aset PTPN 2 untuk Lanud Soewondo

2. Failure to achieve tea productivity targets.
   Mitigation:
   a. Crop recovery
   b. Harvest in accordance with norms (avoiding forced harvesting)
   c. Monitoring and evaluation with weekly meetings with BCG
3. Risks of delays in providing seeds according to varieties from producers, late procurement of work packages, limited resources (vendors) in arranging oil palm plant compositions.
   Mitigation:
   a. Expedite the SP2BKS processing
   b. Selectively procure superior seeds before planting
   c. Procurement guidelines and seed standardization
   d. Reporting on seed selection and transfer for planting
   e. Early procurement and resource sourcing through cooperation/contracts
   f. Replanting according to standards (fallen and chipping)
   g Appoint competent work execution vendors
4. Delays in land preparation and sugarcane planting periods
   Mitigation:
   a. Submit periodic funding requests
   b. Accelerate land processing using additional tractors (vendor additions)
5. Failure to achieve Operational EBITDA Group target.
   Mitigation:
   a. Implement the EBITDA Group acceleration program with BCG consultant support, with work programs: Revenue Enhancement, Operational Control Tower, Implementation of palm oil, rubber, tea, and sugar dashboards on DOMO, Logistics Optimization, Contract Optimization, Procurement Excellence, Creating value creation, Zero Based Budgeting, Organizational Excellence, Cash Office, Management Review Cycle, Strategic Transformation Office.
   b. Conduct a series of meetings to review progress, identify issues, and make program-based decisions
   c. Implement initiatives that impact production volume improvement, quality, and process change management supervision within the scope of operational excellence
6. Failure to achieve non-core asset release targets as per target.
   Mitigation:
   a. Coordinate with the Ministry of Finance for the assessment of asset disposal for PTPN 2 for Lanud Soewondo

b. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk percepatan pelaksanaan disposal aset antara lain: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN

7. Risiko keterlambatan penyediaan bibit dan keterlambatan proses pengadaan pekerjaan pada proses penataan komposisi tanaman komoditi karet.
   Mitigasi:
   a. Pekerjaan okulasi dilakukan sesuai kultur teknis
   b. Persiapan lahan dilakukan sesuai kultur teknis sehingga meminimalisir serangan JAP
   c. Persiapan lahan dilakukan sesuai jadwal sehingga penanaman tepat waktu
8. Risiko tidak tercapainya kualitas produk turunan CPO yang telah ditargetkan.
   Mitigasi:
   a. Memperluas jaringan pemasaran minyak goreng dalam negeri untuk mempercepat penjualan produk minyak goreng dalam negeri sesuai target volume penugasan sehingga izin ekspor dapat cepat diperoleh dan tidak terjadi penumpukan produk di tangki timbun
   b. Meningkatkan *monitoring* pengawasan operasional PT INL khususnya untuk memastikan kelancaran suplai CPO dan penjualan produk
9. Pencapaian target produktivitas TBS kelapa sawit kebun sendiri sesuai dengan RKAP 2023.
   Mitigasi:
   a. *Monitoring* losis TBS secara rutin baik harian, mingguan dan bulanan
   b. *Monitoring* mutu panen TBS di lapangan
   c. *Monitoring* dan evaluasi pemeliharaan tanaman untuk mendukung produksi
   d. Percepatan TBM Kelapa Sawit untuk meningkatkan Produksi 23,37 Ton/Ha
10. Pencapaian target produktivitas karet kebun sendiri sesuai dengan RKAP 2023.
    Mitigasi:
    a. *Monitoring* dan evaluasi pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan alat dan perlengkapan sadap untuk kegiatan sadap dan pemeliharaan tanaman
    b. *Monitoring* dan evaluasi terhadap pemenuhan kebutuhan pupuk dan efisiensi aplikasinya
    c. *Monitoring* langsung kelapangan dan memberikan saran serta kebijakan teknis terhadap penyelesaian permasalahan
    d. *Monitoring* dan evaluasi program perbaikan infrastruktur serta program peningkatan disiplin sadap
    e. *Monitoring* dan evaluasi kinerja produksi melalui *weekly meeting*
    f. *Focus Group Discussion*
    g. Kunjungan lapangan.

b. Coordinate with Ministries/Agencies for accelerating asset disposal, including: Coordinating Economic Affairs, Ministry of ATR/BPN, and Ministry of SOEs

7. Risks of delays in providing seeds and delays in the procurement process in arranging the composition of rubber crop plants.
   Mitigation:
   a. Implement grafting work according to technical culture
   b. Land preparation done according to technical culture to minimize JAP attacks
   c. Land preparation done on schedule for timely planting
8. Risk of not achieving the targeted quality of CPO derivative products.
   Mitigation:
   a. Expand domestic cooking oil marketing networks to accelerate domestic cooking oil product sales according to volume assignment targets so that export permits can be obtained quickly and product accumulation in bulk tanks does not occur
   b. Increase operational monitoring oversight of PT INL, especially to ensure smooth CPO supply and product sales
9. Achieving oil palm FFB productivity targets according to 2023 RKAP.
   Mitigation:
   a. Routinely monitor FFB losses daily, weekly, and monthly
   b. Monitor harvest quality in the field
   c. Monitor and evaluate plant maintenance to support production
   d. Accelerate Oil Palm TBM to increase Production to 23.37 Ton/Ha
10. Achieving rubber productivity targets according to 2023 RKAP.
    Mitigation:
    a. Monitor and evaluate meeting needs and availability of tapping tools and equipment for tapping and plant maintenance activities
    b. Monitor and evaluate meeting fertilizer needs and application efficiency
    c. Direct field monitoring and provide technical advice and policies for issue resolution
    d. Monitor infrastructure improvement programs and tapping discipline enhancement programs
    e. Monitor and Evaluate Production Performance through Weekly Meetings
    f. Focus Group Discussion
    g. Field visits.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Pada tahun 2023, Perseroan telah melakukan pengukuran *Risk Maturity Index* (RMI). RMI merupakan angka atau indeks yang menunjukan tingkat atau level dalam implementasi manajemen risiko yang telah diformulasikan sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Perseroan. Hasil pengukuran RMI yang dilakukan pada tahun 2023 menunjukan nilai sebesar 3,59, lebih tinggi dibanding tahun 2022 yaitu 3,58 (*managed*).

Namun, pengukuran RMI pada tahun 2023 akan dilaksanakan kembali dengan mengacu pada indikator-indikator yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN.

Landasan penerapan RMi, ialah sebagai berikut:
Pedoman Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi berbasis ISO 31000:2018;

1. Surat Kementerian BUMN Nomor: S-6/Wk.1.MBU.F/02/2021 perihal Penilaian Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (Risk Maturity Index) BUMN 2020;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara.

Tujuan Pengukuran RMI antara lain:

1. Mengetahui kapasitas dan kapabilitas manajemen risiko;
2. Sebagai pertimbangan pengambilan langkah perbaikan terkait proses manajemen risiko;
3. Sebagai dasar *roadmap* implementasi manajemen risiko.

Indikator Penilaian RMI, antara lain:

1. **Tata Nilai dan Tata Kelola**
   Indikator yang menunjukkan sejauh mana risk owner menerapkan pengelolaan risiko dalam aktivitasnya yang tercermin pada budaya risiko.
2. **Penilaian Risiko**
   Indikator yang menunjukkan kemampuan dan tingkat pengetahuan *risk owner* dalam melakukan penilaian risiko.
3. **Pengelolaan TI**
   Indikator yang menunjukkan ketersediaan aplikasi dan kemampuan *risk owner* dalam mengadopsi dan mengaplikasikannya.
4. **Orientasi Strategis**
   Indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan ERM dalam melakukan pengelolaan risiko secara terintegrasi dengan orientasi strategis Perseroan.

Evaluation of Risk Management System Effectiveness

In 2023, the Company conducted a measurement of the Risk Maturity Index (RMI). RMI is a number or index that indicates the level of risk management implementation formulated according to the performance indicators set by the Company. The RMI measurement results for 2023 showed a value of 3.59, higher than in 2022, which was 3.58 (managed). However, the RMI measurement in 2023 will be conducted again with reference to the indicators set by the Ministry of SOEs.

However, the RMI measurement in 2023 will be conducted again by referring to the indicators established by the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs).

The basis for implementing RMI includes:
Integrated Corporate Risk Management Guidelines based on ISO 31000:2018;

1. Ministry of SOEs Letter Number: S-6/Wk.1.MBU.F/02/2021 regarding Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation and Risk Management Maturity Level (Risk Maturity Index) of SOEs 2020;
2. Ministry of SOEs Regulation Number: PER-5/MBU/09/2022 concerning Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises.

The objectives of measuring RMI include:

1. Understanding risk management capacity and capability;
2. Considering improvement measures related to risk management processes;
3. Providing a basis for risk management implementation roadmap.

RMI Assessment Indicators include:

1. **Values and Governance**
   Indicators that show the extent to which risk owners implement risk management in their activities reflected in risk culture.
2. **Risk Assessment**
   Indicators showing the ability and level of risk owners' knowledge in risk assessment.
3. **IT Management**
   Indicators showing the availability of applications and risk owners' ability to adopt and apply them.
4. **Strategic Orientation**
   Indicators showing the success level of ERM in integrated risk management with the company's strategic orientation.

Pernyataan Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris Atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Secara berkala, Manajemen PTPN III selalu melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Adapun rangka implementasi yang akan menjadi rencana strategis Perseroan ialah:

1. Melakukan adendum kebijakan *risk appetite* untuk menyesuaikan dengan kondisi bisnis terkini.
2. Melakukan *review* kebijakan manajemen risiko.
3. Melakukan *review* kebijakan manajemen risiko pasar dan likuiditas.
4. Melakukan *review* kebijakan pengelolaan permodalan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko, Perseroan terus meningkatkan efisiensi pelaksanaan fungsi Komite Audit, dengan tujuan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.

Statements from the Board of Directors and/or Board of Commissioners or Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System

Periodically, Management of PTPN III always evaluates the effectiveness of the risk management system. The strategic implementation framework that will become the company's strategic plan includes:

1. Adding an addendum to the risk appetite policy to adjust to current business conditions.
2. Reviewing risk management policies.
3. Reviewing market and liquidity risk management policies.
4. Reviewing capital management policies.

In order to improve the quality of risk management implementation, the Company continues to improve the efficiency of the Audit Committee's functions, with the aim of supporting the effectiveness of the Board of Commissioners' and Directors' duties.



PERKARA PENTING
SIGNIFICANT CASES

Permasalahan Hukum

Berikut ini merupakan data permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) baik di *Holding* Jakarta maupun Operasional selama tahun 2023 dan 2022.

Legal Issues

The following are legal issues faced by PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in both Jakarta Holding and Operational during 2023 and 2022.

Permasalahan Hukum Legal Issues	2023		2022	
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perdata Civil	Pidana Criminal
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Resolved with permanent legal force	2	0	1	0
Dalam proses penyelesaian Under resolution process	6	0	2	0
Jumlah | Total	**8**	**0**	**3**	**0**

Dampak Permasalahan Hukum terhadap Perusahaan

Sepanjang tahun 2023, terdapat 7 permasalahan hukum yang masih berproses di peradilan sebagai berikut :

Impact of Legal Issues to the Company

Throughout 2023, there were 7 legal cases still ongoing in the courts as follows:

Kasus Hukum Anak Perusahaan PTPN III (Persero) Tahun 2023
Legal Cases Of The Company's Subsidiaries In 2023

PTPN	Pertanahan Land			Non Pertanahan Non-Land			Total Perkara Total Case			
	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Jumlah Total
III	5	1	0	1	0	0	6	1	0	7

Selanjutnya pada sepanjang tahun 2023 terdapat 3 (tiga) permasalahan hukum perdata yang ada pada PTPN III operasional di medan yang mana telah diputus *inkracht*, yakni:

1. Perkara Perdata No. Register 23/Pdt.G/2022/PN Srh tanggal 30 Maret 2022 antara Penggugat PTPN III melawan Juniar Pane Dkk (11 Orang) atas Objek tanah seluas ± 3.078 m^2 yang merupakan sebahagian dari areal HGU No. 163/2005 Kebun Sarang Giting. Adapun perkara telah

Furthermore, during 2023, there were 3 (three) civil legal cases at PTPN III operational in Medan, which have been finalized, as follows:

1. Civil Case No. Register 23/Pdt.G/2022/PN Srh dated March 30, 2022, between Plaintiff PTPN III against Juniar Pane et al (11 Persons) concerning a land area of ± 3,078 m^2 which is part of HGU No. 163/2005 Sarang Giting Plantation. The case has been finalized at the appellate level, primarily

diputus *inkracht* pada tingkat banding yang pada pokoknya mengabulkan gugatan PTPN III (Persero) untuk sebagian.

2. Perkara Perdata No. Register 55/Pdt.G/2022/PN Srh tanggal 19 September 2022 antara Penggugat Sdr. Edy Syahputra saragih (6 orang) melawan PTPN III atas Objek tanah seluas 51,44 Ha di Desa Bah Sumbu Kecamatan Tebing Tinggi, kabupaten Serdang Bedagai. Adapun perkara telah diputus *inkracht* pada tingkat pertama yang pada pokoknya Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Perkara Perdata No. Register 147/Pdt.G/2022/PN.Sim tanggal 29 November 2022 antara Penggugat Sdr. Satiman melawan PTPN III atas Objek tanah seluas 2 Ha di Desa Talun Kondot, Kecamatan Pabombeian Panei, Kabupaten Simalungun. Adapun diputus pada tanggal 13 April 2023 bahwa gugatan gugur karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan.

Hal ini karena Perseroan telah mengambil langkah hukum/ mitigasi yang tepat sehingga putusan majelis hakim menempatkan PTPN III pada posisi yang menang.

granting PTPN III's lawsuit partially.

2. Civil Case No. Register 55/Pdt.G/2022/PN Srh dated September 19, 2022, between Plaintiff Mr. Edy Syahputra Saragih (6 persons) against PTPN III concerning a land area of 51.44 Ha in Bah Sumbu Village, Tebing Tinggi Subdistrict, Serdang Bedagai Regency. The case has been finalized at the first level, essentially declaring the Plaintiffs' lawsuit inadmissible (niet ontvankelijke verklaard).

3. Civil Case No. Register 147/Pdt.G/2022/PN.Sim dated November 29, 2022, between Plaintiff Mr. Satiman against PTPN III concerning a land area of 2 Ha in Talun Kondot Village, Pabombeian Panei Subdistrict, Simalungun Regency. The case was ruled on April 13, 2023, that the lawsuit was dropped because the Plaintiff did not attend the trial.

This is because the Company took appropriate legal steps/ mitigations, resulting in the judges' decision favoring PTPN III.

Pengungkapan Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Yang Sedang Menjabat

Hingga akhir tahun 2023, tidak ada Dewan Komisaris maupun Direksi yang terkena permasalahan hukum ketika sedang menjabat di Perseroan.

Disclosure of Legal Issues Being Faced by the Board of Commissioners and Board of Directors

Until the end of 2023, no Board of Commissioners or Directors faced legal issues while serving in the Company.

Pengungkapan Permasalahan Hukum yang sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Disclosure of Legal Issues Currently Faced by the Company's Subsidiaries

Kasus Hukum Anak Perusahaan PTPN III (Persero) Tahun 2023
Legal Cases of the Company's Subsidiaries in 2023

PTPN	Pertanahan Land			Non Pertanahan Non-Land			Total Perkara Total Case		
	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	44	1	0	1	0	0	45	1	0
IV	6	1	0	1	0	0	7	1	0
V	1	0	0	3	0	0	4	0	0
VI	1	0	0	0	0	0	1	0	0

Kasus Hukum Anak Perusahaan PTPN III (Persero) Tahun 2023
Legal Cases Of The Company's Subsidiaries In 2023

PTPN	Pertanahan Land			Non Pertanahan Non-Land			Total Perkara Total Case		
	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal	Perdata Umum dan Khusus General and Special Civil	TUN State Administration	Pidana Criminal
VII	8	0	0	12	0	1	20	0	1
VIII	10	1	0	0	0	0	10	1	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	1	0	0	14	0	0	15	0	0
XI	0	0	0	2	0	1	2	0	1
XII	1	0	0	0	0	0	1	0	0
XIII	1	0	0	0	0	0	1	0	0
XIV	3	0	0	0	0	0	3	0	0
LPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KPBN	0	0	0	1	0	0	1	0	0
RPN	1	0	0	0	0	0	1	0	0
SGN	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Total	**78**	**3**	**0**	**34**	**0**	**2**	**112**	**3**	**2**

Pengungkapan Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait

Selama tahun 2023, Perseroan tidak menghadapi sanksi administratif atau masalah hukum yang dikenakan kepada Perusahaan sebagai organisasi, anak perusahaan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Disclosure of Administrative Sanctions by Relevant Authorities

During 2023, the Company did not face administrative sanctions or legal issues imposed on the Company as an organization, subsidiaries, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners by Authorities that could potentially affect the Company's business continuity.

Perkara Penting di Luar Aspek Hukum

Hingga akhir tahun 2023, Perseroan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perseroan sebagai organisasi, entitas anak, Dewan Komisaris maupun Direksi.

Important Matters Outside Legal Aspects

As of 2023, the Company did not encounter any important matters outside legal aspects involving the Company as an organization, subsidiaries, Board of Commissioners, or Directors.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi banyak pihak, termasuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Sebagai *Holding* yang memiliki beberapa unit bisnis dalam industri perkebunan, Perseroan memiliki beragam informasi yang harus dikelola dan disampaikan ke berbagai pihak seperti *stakeholder* dan masyarakat luas. Oleh karena itu, dibutuhkan layanan informasi yang baik dan terintegrasi yang dapat memudahkan akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Perseroan senantiasa memberikan kemudahan akses informasi dan data Perseroan. Penyebaran Informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari implementasi prinsip transparansi Informasi. informasi tentang Perseroan secara terbuka dapat diperoleh melalui situs www.holdingperkebunan.com yang tersaji dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan menyediakan berbagai informasi Perseroan. Selain itu, pada situs resmi Perseroan juga terdapat sub kanal khusus tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui sub kanal Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID). Keberadaan PPID di Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) adalah dalam rangka memenuhi Undang-Undang.

Pembentukan PPID diawali dengan pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan layanan informasi sesuai Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, hal Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Publik dapat mengajukan permohonan layanan informasi melalui link: https://holding-perkebunan.com/ppid/kontak-ppid/ yang terdapat pada situs resmi Perseroan.

Dalam penerapan keterbukaan informasi untuk keperluan internal yang berkaitan dengan perencanaannya, Perseroan juga memberikan informasi terbaru lainnya tentang Perseroan melalui berbagai media komunikasi seperti Situs, Siaran Pers, Portal, Media Cetak, Media Elektronik dan Surat Edaran. Berdasarkan media yang digunakan informasi dan data mengenai Perseroan dapat diperoleh melalui sejumlah saluran komunikasi.

Information is a crucial necessity for many parties, including PT Perkebunan Nusantara III (Persero). As a Holding Company with several business units in the plantation industry, the Company manages a variety of information that needs to be communicated to various parties such as stakeholders and the general public. Therefore, a good and integrated information service is needed to facilitate access to information for those who need it.

The Company consistently provides ease of access to information and data. Disseminating information to all stakeholders is an essential part of implementing the transparency principle of information. Information about the Company is openly available through the website www.holdingperkebunan.com, which is available in both Indonesian and English and provides various Company information. Additionally, the Company's official website also features a specific sub-channel on Public Information Disclosure through the Officer of Documentation and Information Management (PPID) sub-channel. The presence of PPID at Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is in compliance with the law.

The establishment of PPID begins with a declaration of readiness to provide information services in accordance with Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and the Public Information Commission Regulation No. 1 of 2021 regarding Public Information Service Standards. Public Information Disclosure is a means to optimize public supervision of state institutions and other public bodies and anything that affects public interests. Among other things, it aims to ensure that state institutions are overseen by the public, and public involvement in the process of determining public policies is increased. The public can request information services through the link: https://holding-perkebunan.com/ppid/kontak-ppid/ available on the Company's official website.

In the application of information disclosure for internal purposes related to planning, the Company also provides other updated information about the Company through various communication media such as Websites, Press Releases, Portals, Print Media, Electronic Media, and Circulars. Based on the media used, information and data about the Company can be obtained through several communication channels.

Adapun rincian mengenai informasi Perusahaan ialah sebagai berikut:

The detailed information about the Company is as follows:

Kantor Pusat
Gedung Agro Plaza Lt.15,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2, No. 1, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950
Telp. (+62 21) 2918 3300
Fax. (+62 21) 520 3003
Surel: sekretariat@holding-perkebunan.com
Situs www.holding-perkebunan.com

Head Office
Agro Plaza Building, 15th Floor,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2, No. 1, Setiabudi
South Jakarta, 12950
Phone: (+62 21) 2918 3300
Fax: (+62 21) 520 3003
Email: sekretariat@holding-perkebunan.com
Website: www.holding-perkebunan.com

Korespondensi dan Laporan Berkala

Perseroan secara berkala selalu menyusun laporan informasi keuangan dan non-keuangan secara transparan, dan kemudian diberikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. pemberian informasi ini dilakukan sesuai dengan target waktu, dan harus disajikan secara lengkap, utuh, terkini, dan akurat, serta memadai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perseroan. berikut merupakan informasi yang dipaparkan lewat laporan:

1. Laporan Tahunan;
2. Laporan Keuangan Triwulan; dan
3. Surat kepada Pemegang Saham.

Correspondence and Periodic Reports

The Company regularly prepares transparent financial and non-financial information reports and then provides them to shareholders, stakeholders, and other required institutions. This information is provided according to the target time and must be presented in a complete, updated, accurate, and adequate manner, and in accordance with the procedures, types, and scope as regulated in the provisions regarding Company Financial Condition Transparency. The information presented through reports includes:

1. Annual Reports;
2. Quarterly Financial Reports; and
3. Letters to Shareholders.

Mekanisme Pemberian Informasi bagi Pemangku Kepentingan dan Internal Perseroan

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Perseroan ialah dengan menggunakan media surat, *email blast*, pesan grup di *instant messenger*, dan pertemuan langsung (forum, rapat, *gathering*). Selain itu, Perseroan juga terus berupaya dalam membangun komunikasi kepada pemangku kepentingan dan internal perusahaan melalui teknologi informasi dan Komunikasi berupa:

Mechanism for Providing Information to the Company's Stakeholders and Internal

The information conveyed by the Company is done through various channels such as letters, email blasts, group messages on instant messengers, and direct meetings (forums, meetings, gatherings). In addition, the Company also continues to build communication with stakeholders and internal company through Information and Communication Technology such as:

Situs Perusahaan

Perseroan telah memiliki media untuk penyediaan informasi publik berupa situs web yang ditangani secara langsung oleh Sekretaris Perusahaan. Situs ini dapat diakses melalui link www. holding-perkebunan.com. Situs ini merupakan media daring yang ditujukan untuk publik yang memuat berbagai informasi dan data mengenai Perseroan.

Website

The Company has a media for public information provision in the form of a website managed directly by the Corporate Secretary. This site can be accessed through the link www. holding-perkebunan.com. This site is an online medium intended for the public containing various information and data about the Company

Sub Kanal PPID pada Situs Resmi Perseroan

Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008, Publik dapat mengajukan permohonan layanan informasi melalui link : http://ptpn.group/permohonanPPID yang terdapat pada *website* resmi Perseroan.

PPID Sub Channel on the Company's Official Website

In order to comply with the Republic of Indonesia Law on Public Information Disclosure No. 14 of 2008 dated April 30, 2008, the Public can request information services through the link: http://ptpn.group/permohonanPPID available on the Company's official website.

Media Daring Internal

Perseroan mengoptimalkan jejaring sosial/*social media* sebagai sarana komunikasi dua arah antara Perseroan dengan *stakeholders* maupun dengan pelanggan dan masyarakat. Sarana komunikasi ini digunakan sebagai penyebaran informasi produk maupun sarana *customer care*. Sosial media Perseroan dapat diakses melalui:

Internal Online Media

The Company optimizes social media as a two-way communication tool between the Company and stakeholders as well as customers and the public. This communication tool is used for product information dissemination and customer care. The Company's social media can be accessed through:

Facebook : @holdingperkebunan
X : @holding_ptpn
Instagram : holdingperkebunan
Youtube : holding perkebunan

Majalah Internal atau Buletin

Upaya untuk menjembatani komunikasi antara manajemen dengan karyawan dan antar-karyawan dilakukan dengan membuat media internal berjudul Media Nusa Tiga. Selain itu, media ini juga berperan sebagai media promosi untuk membentuk citra (*image building*) Perseroan dan komunikasi dengan *stakeholder*. Setiap dua bulan sekali, Meida Nusa Tiga terbit dan hanya menjangkau khalayak tertentu yang memuat informasi tentang kegiatan, keputusan, dan kebijakan yang terjadi di lingkungan email Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Internal Magazine or Bulletin

Efforts to bridge communication between management and employees, as well as among employees, are carried out by creating an internal media titled Media Nusa Tiga. Additionally, this media also serves as a promotional tool to shape the company's image (image building) and communication with stakeholders. Media Nusa Tiga is published every two months and reaches a specific audience, containing information about activities, decisions, and policies that occur within the Company's environment.

Rilis Media

Perseroan menganggap media sebagai mitra yang efektif dalam menyampaikan kemajuan dan citra Perseroan kepada publik. Selama tahun 2023, Perseroan telah mengeluarkan sejumlah rilis pers kepada media massa, yang berisi informasi terkait kinerja dan kegiatan korporat Perseroan. berikut merupakan rinciannya:

Media Releases

The Company considers media as an effective partner in conveying the progress and image of the company to the public. During 2023, the Company has issued several press releases to mass media, containing information related to the Company's performance and corporate activities. Below are the details:

No.	Kegiatan Media Media Activities	Jumlah Amount	*PR Value* (Rp)
Januari | January			
1.	Perayaan Natal 2022 Jadi Momentum PTPN III (Persero) Kobarkan Semangat Sambut Tahun 2023 Celebrating Christmas 2022 as a Momentum for PTPN III (Persero) to Ignite the Spirit of Welcoming 2023	18	397.500.000
2.	PTPN III (Persero) dan Nusakita Jadi Sponsor Utama Indonesia *Open Aquatic Championship* (LOAC) 4th 2022 PTPN III (Persero) and Nusakita Become Main Sponsors of the Indonesia Open Aquatic Championship (LOAC) 4th 2022	12	315.000.000
3.	Menteri BUMN Tinjau Progres Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah di Sumatera Utara Minister of State-Owned Enterprises Reviews Progress of Red Cooking Oil Factory Development in North Sumatra	78	2.002.875.000
4.	Kerja Sama PTPN III (Persero) dengan FGV *Holdings* Perkuat Daya Saing Bisnis Kelapa Sawit Indonesia dan Malaysia Collaboration between PTPN III (Persero) and FGV Holdings Strengthens the Competitiveness of Palm Oil Business in Indonesia and Malaysia	50	1.499.205.000
5.	Holding Perkebunan Nusantara Bersama Satgas Bencana BUMN Bantu Korban Gempa Bumi Cianjur Holding Perkebunan Nusantara, Along with the SOE Disaster Task Force, Assists Victims of the Earthquake in Cianjur	16	382.500.000
6.	PTPN III (Persero) Jalin Kerjasama dengan Polri Terkait Pengamanan Aset dan Penegakan Hukum PTPN III (Persero) Engages in Cooperation with the Indonesian National Police Regarding Asset Security and Law Enforcement	20	477.000.000
7.	PTPN III (Persero) Sampaikan Keprihatinan Atas Bentrokan Petugas Keamanan dan Warga di Areal HGU Kebun Bangun Sumatera Utara PTPN III (Persero) Expresses Concern over Clashes between Security Personnel and Residents in the HGU Bangun Plantation Area, North Sumatra	16	451.500.000
8.	PTPN III Berikan Penghargaan Karyawan Terbaik *Most Valuable Planters* (MVP) Award Tahun 2022 PTPN III Awards the Best Employees with the Most Valuable Planters (MVP) Award 2022	27	420.000.000
Februari | February			
1.	*Holding* Perkebunan Nusantara Cetak Produktivitas dan Laba Tertinggi Sepanjang Sejarah (1 Februari 2023) Holding Perkebunan Nusantara Achieves Highest Productivity and Profit in History (February 1, 2023)	33	1.058.655.000
2.	*Holding* Perkebunan Nusantara Dorong Generasi Muda PTPN Group Jadi Bagian dari Kesuksesan Transformasi Perusahaan (6 Februari 2023) Holding Perkebunan Nusantara Encourages the Young Generation of PTPN Group to Be Part of the Company's Transformation Success (February 6, 2023)	15	277.500.000
3.	Perluas Jaringan Bisnis Global, PTPN III (Persero) Gandeng Mitra Strategis dari Korea Selatan Expanding Global Business Network, PTPN III (Persero) Collaborates with Strategic Partners from South Korea	26	562.500.000
4.	Direktur Utama Holding PTPN III (Persero) Kunjungi PTPN II:PTPN II Kejar Target 40 Ribu Ton Gula (10 Februari 2023) President Director of Holding PTPN III (Persero) Visits PTPN II: PTPN II Aims for a Target of 40 Thousand Tons of Sugar (February 10, 2023)	5	127.500.000
5.	Mitra Binaan PTPN Group Pamerkan Helm Berbahan Dasar Limbah Sawit dalam Acara *Safety Riding* (27 Februari 2023) PTPN Group's Partner Exhibits Helmets Made from Palm Waste at Safety Riding Event (February 27, 2023)	2	37.500.000
6.	*Holding* Perkebunan Nusantara Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang di Kalibaru Banyuwangi (15 Februari 2023) Holding Perkebunan Nusantara Distributes Aid to Flash Flood Victims in Kalibaru Banyuwangi (February 15, 2023)	20	457.500.000
7.	BUMN Tingkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan Petani Kopi Nusantara (23 Februari 2023) State-Owned Enterprises Enhance Capacity and Welfare of Indonesian Coffee Farmers (February 23, 2023)	10	225.000.000

No.	Kegiatan Media Media Activities	Jumlah Amount	*PR Value* (Rp)
8.	Pemberian Suguh Hati Terus Berlanjut, 20 Warga Kembalikan Lahan Garapan ke PTPN III (27 Februari 2023) Continued Return of Cultivated Land to PTPN III, with 20 Residents Giving Back Their Land (February 27, 2023)	11	232.500.000
9.	Pola Kemitraan PTPN Dianugerahi *Role Model* Terbaik (27 Februari 2023) PTPN Partnership Model Awarded Best Role Model (February 27, 2023)	25	472.500.000
Maret | March			
1	*Holding* Perkebunan Nusantara Dukung Pembentukan Bursa Berjangka CPO Indonesia (02 Maret 2023) Holding Perkebunan Nusantara Supports the Establishment of the Indonesian CPO Futures Exchange (March 2, 2023)	28	572.075.000
2	Sawit Indonesia Bisa Dikte Dunia (8 Maret 2023) Indonesia's Palm Oil Can Dictate the World Market (March 8, 2023)	19	412.500.000
3	Sukses Lakukan Transformasi Perusahaan, *Holding* Perkebunan Nusantara Sabet Dua Penghargaan di Ajang Anugerah BUMN 2028 (16 Maret 2023) Successfully Transforming the Company, Holding Perkebunan Nusantara Wins Two Awards at the SOE Awards 2028 (March 16, 2023)	15	307.500.000
4	Dorong Inovasi Sektor Hilir, PTPN III (Persero) Gandeng IPB Bangun Laboratorium Riset Pengolahan Kelapa Sawit Mini (17 Maret 2023) Promoting Downstream Sector Innovation, PTPN III (Persero) Collaborates with IPB to Establish a Mini Palm Oil Processing Research Laboratory (March 17, 2023)	11	232.500.000
5	Kembangkan Biomethane dari POME, PTPN III (Persero) Kerjasama PGN & Konsorsium Perusahaan Jepang Developing Biomethane from POME, PTPN III (Persero) Partners with PGN & a Consortium of Japanese Companies	85	2.011.650.000
6	Dua *Sub Holding* Perkebunan akan Segera Terbentuk: PTPN IV dan PTPN I (20 Maret 2023) Two Sub-Holdings in the Plantation Sector Will Soon Be Established: PTPN IV and PTPN I (March 20, 2023)	81	1.911.540.000
April | April			
1	Berhasil Pecahkan Permasalahan Aset di Gunung Mas, Pola Kerja Sama PTPN Group Diapresiasi Menteri ATR/BPN Successfully Resolving Asset Issues in Gunung Mas, PTPN Group's Collaborative Approach Appreciated by the Minister of ATR/BPN	15	330.000.000
2	Relokasi Tempat Tinggal, PTPN Group Kedepankan Konsep *Environmental, Social, Governance* (ESG) Bersama dengan Masyarakat Megamendung Relocation of Residences, PTPN Group Prioritizes the Environment, Social, Governance (ESG) Concept Together with the Megamendung Community	14	330.000.000
3	Gelar Program Mudik Bersama BUMN 2023, *Holding* Perkebunan Nusantara Berangkatkan 400 Pemudik ke Sejumlah Daerah Hosting the Joint Homecoming Program with SOE 2023, Holding Perkebunan Nusantara Sends 400 Travelers to Various Areas	38	787.500.000
4	PTPNI III Komitmen Menjaga Kondusifitas Areal HGU di Siantar PTPNI III Committed to Maintaining the Conduciveness of HGU Areas in Siantar	18	374.100.000
Mei | May			
1	*Holding* Perkebunan Nusantara Berangkatkan Petani Tebu Berprestasi Umroh ke Tanah Suci Holding Perkebunan Nusantara Sends High-Achieving Sugarcane Farmers on Umrah to the Holy Land	5	127.500.000
2	PTPN III (Persero) dan Pusat Intelijen TNI AD Jalin Kerjasama Pengamanan dan Penyelamatan Aset Negara PTPN III (Persero) and the Army Intelligence Center Forge Cooperation in Security and Asset Protection for the State	13	270.000.000

No.	Kegiatan Media Media Activities	Jumlah Amount	*PR Value* (Rp)
3	Sinergi BUMN Muda Perkebunan Ambil Peran Meningkatkan *Values* dan *Brand Awareness Corporate* untuk menyukseskan Transformasi PTPN Group Young BUMN Synergy in the Plantation Sector Plays a Role in Increasing Values and Corporate Brand Awareness to Ensure the Success of PTPN Group's Transformation	11	240.000.000
4	PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Raih Penghargaan Bisnis Hijau (*Green Business Ratings*) pada *Green Economic* Forum 2023 dari CNBC PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Receives Green Business Ratings Award at the Green Economic Forum 2023 from CNBC	3	60.000.000
5	Gelar Rapat Koordinasi, PTPN Group Terus Akselerasikan Transformasi untuk Memperkuat Pertumbuhan Bisnis Secara Berkelanjutan Conducting Coordination Meetings, PTPN Group Continues to Accelerate Transformation to Strengthen Sustainable Business Growth	31	615.000.000
6	Resmikan Pabrik Pengemasan Teh Retail, PTPN Group Perkuat Industri Teh Nasional di Pasar Global Inaugurate Retail Tea Packaging Plant, PTPN Group Strengthens the National Tea Industry in the Global Market	9	195.000.000
Juni | June			
1	Persentase Plasma PTPN V Terluas di Riau Percentage of PTPN V's Widest Plasma in Riau	33	675.000.000
2	Bantu Kelompok Nelayan di Bali, Ptpn Group Dorong Keberlanjutan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Supporting Fishermen Groups in Bali, PTPN Group Promotes Environmental Sustainability and Community Empowerment	14	330.000.000
3	El Nino akan Terjadi di Semester II 2023, Ini Perlu Disiapkan oleh Petani Kopi Indonesia El Nino Expected in the Second Semester of 2023, What Indonesian Coffee Farmers Need to Prepare For	11	300.000.000
4	Gelar RUPS, PTPN III (Persero) Sampaikan Kinerja Keuangan Positif di Tahun Buku 2022 Holding GMS, PTPN III (Persero) Reports Positive Financial Performance in the 2022 Fiscal Year	14	433.500.000
5	Gelar Vendor *Gathering* PTPN III (Persero) Sosialisasikan Percepatan Transformasii Vendor Gathering Held by PTPN III (Persero) to Promote Acceleration of Transformation	25	549.900.000
6	Bensin Etanol Mulai Diuji Coba, PTPN Group Dukung Akselerasi Program Bahan Bakar Ramah Lingkungan Ethanol Gasoline Trial Begins, PTPN Group Supports Acceleration of Environmentally Friendly Fuel Program	53	1.595.400.000
7	Kisah Sukses Teguh Cahyono Mengubah Hidup dari Bertani Tebu Success Story of Teguh Cahyono Transforming Life through Sugarcane Farming	14	315.000.000
8	PTPN III (Persero) dan ANRI Sepakat Membangun Sistem Pengelolaan Arsip Bersama PTPN III (Persero) and ANRI Agree to Build a Joint Record Management System	10	210.000.000
9	Kopi Arabika Ijen Panen Raya, Harga Dan Produktivitas Petani Meningkat Arabica Ijen Coffee Harvest Festival, Farmers' Prices and Productivity Increase	14	285.000.000
10	Dorong Prestasi Atlet Indonesia, *Holding* Perkebunan Nusantara Perkuat Kontribusi untuk Olahraga Nasional Boosting Indonesian Athletes' Achievements, Holding Perkebunan Nusantara Strengthens Contribution to National Sports	11	285.000.000
11	SGN Gandeng LPDP UMKM Bantu Permodalan Usaha untuk Petani Tebu SGN Collaborates with LPDP UMKM to Support Business Capital for Sugarcane Farmers	18	375.000.000
12	Binaan PTPN Group Raih Transaksi Tertinggi di Padi UMKM *Hybrid Expo* 2023 PTPN Group's Mentees Achieve Highest Transactions in the UMKM Hybrid Expo 2023	14	345.000.000
13	PTPN II Berikan Penghargaan Medali Jubileum 25 Tahun Bekerja kepada 2.539 Karyawan dan Pensiunan PTPN II Awards Jubellium 25-Year Service Medals to 2,539 Employees and Retirees	7	165.000.000

No.	Kegiatan Media Media Activities	Jumlah Amount	*PR Value* (Rp)
14	Srikandi BUMN Goes To Campus: Peruri dan PTPN II Bagikan Pengalaman Menarik Bekerja di Bumn Kepada Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Srikandi BUMN Goes To Campus: Peruri and PTPN II Share Interesting Working Experiences in SOE with Students at the University of North Sumatra	26	615.000.000
15	Kisruh Lahan PTPN VII Way Berulu, Pengamat: Buktikan di Pengadilan Land Dispute at PTPN VII Way Berulu, Observer: Prove It in Court	23	397.500.000
Juli | July			
1	PTPN Group Dorong Pertumbuhan Ekonomi Industri Pandai Besi Di Kabupaten Kampar PTPN Group Boosts Economic Growth of the Iron Industry in Kampar Regency	8	142.500.000
2	Srikandi BUMN *Goes to Campus* Berikan Inspirasi pada Mahasiswa Srikandi BUMN Goes to Campus Provides Inspiration to Students	20	502.500.000
3	*Holding Statement* Terkait Penggeledahan Kantor PTPN Xi oleh KPK, Dukung Upaya Penyelidikan oleh KPK, *Holding* Perkebunan Nusantara akan Buka Akses Informasi Seluas-luasnya Holding Statement Regarding the Raid on PTPN XI's Office by the KPK, Supports Investigation Efforts by the KPK, Holding Perkebunan Nusantara will Open Access to Information as Widely as Possible	70	169.500.000
4	*Holding* Perkebunan Nusantara Berkomitmen Jalin Kerjasama yang saling Mendukung dengan para Vendor Holding Perkebunan Nusantara is Committed to Establishing Mutually Supportive Partnerships with Vendors	12	277.500.000
5	Vendor BUMN Perkebunan Puas, Ini Formula yang Dilakukan *Holding* Perkebunan Nusantara Holding Perkebunan Nusantara Receives Positive Feedback from SOE Vendors, Here's the Formula Implemented by Holding Perkebunan Nusantara	15	352.500.000
6	*Holding* Perkebunan Nusantara Lepas Ekspor Perdana *Palm Kernel Expeller* ke Tiongkok Senilai Rp18,2 Miliar Holding Perkebunan Nusantara Completes First Export of Palm Kernel Expeller to China Valued at Rp18.2 Billion	12	607.500.000
7	Peduli Kebersihan Sungai Deli Medan, Erick Thohir Aktivasi Millenial dan Masyarakat Melalui BUMN *Environmental Movement* Concerned About the Cleanliness of the Deli Medan River, Erick Thohir Activates Millennials and the Community Through the SOE Environmental Movement	14	285.000.000
Agustus | August			
1	Kontingen PTPN III (Persero) Raih Juara 1 Seni Videografi dan Juara 2 Sepakbola di BUMN *Fest* 2023 PTPN III (Persero) Contingent Wins 1st Place in Videography Art and 2nd Place in Football at BUMN Fest 2023	12	285.500.000
2	PTPN Group Meraih Posisi Teratas Secara Global untuk Sektor Pertanian Berdasarkan Peringkat *Sustainalytic* PTPN Group Tops Global Rankings for Agriculture Sector by Sustainalytics	16	397.500.000
3	PTPN Group and Suntory Garuda *Open New Market*: *First Export of Indonesian Oolong Tea to Vietnam* PTPN Group and Suntory Garuda Open New Market: First Export of Indonesian Oolong Tea to Vietnam	133	2.178.750.000
4	Perluas Pemanfaatan EBT, PTPN Group Raih Penghargaan *Asean Energy Awards* 2023 Expanding the Use of Renewable Energy, PTPN Group Receives ASEAN Energy Awards 2023	34	742.500.000
5	Peduli Kebersihan Sungai Deli Medan, Erick Thohir Aktivasi Millenial dan Masyarakat Melalui BUMN *Environmental Movement* Concerned About the Cleanliness of the Deli Medan River, Erick Thohir Activates Millennials and the Community Through the SOEs Environmental Movement	14	285.000.000

No.	Kegiatan Media Media Activities	Jumlah Amount	*PR Value* (Rp)
September | September			
1	*Press Release* Kerjasama reNIKOLA & PTPN IV Press Release: Collaboration between reNIKOLA & PTPN IV	25	577.500.000
2	Peduli Pendidikan, *Holding* Perkebunan Nusantara Dukung Pengembangan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta In line with our commitment to education, Holding Perkebunan Nusantara supports the development of Nahdlatul Ulama University in Yogyakarta.	21	502.500.000
3	Tingkatkan Akses Kesehatan, PTPN III (Persero) Hibahkan Satu Unit Ambulans untuk Masyarakat Tanjung Selor Timurr Improving healthcare access, PTPN III (Persero) donates one ambulance unit to the community of Tanjung Selor Timur.	15	330.000.000
4	PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Responsif Terhadap Tuntutan Aksi Damai KSPSI AGN Sumatera Utara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) responds to the demands of peaceful actions by KSPSI AGN in North Sumatra.	4	105.000.000
Oktober | October			
1	Sinergi PTPN V-Aiken Jepang Maksimalkan Pemanfaatan EBT Melalui Teknologi EGSB PTPN V-Aiken Japan Synergy Maximizes the Utilization of Renewable Energy Sources Through EGSB Technology.	33	697.500.000
2	Peringati Hari Kesaktian Pancasila, PTPN Group Serahkan Tali Asih Kepada Keluarga Letda Sujono In Commemoration of Pancasila Sanctity Day, PTPN Group Extends Condolences to the Family of Letda Sujono.	14	262.500.000
3	*Holding* Perkebunan Nusantara dan Jamdatun Teken Perpanjangan Kerja Sama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Holding Perkebunan Nusantara and Jamdatun Extend Cooperation in Civil Law and State Administration.	4	97.500.000
4	Jalankan Praktik Keterbukaan Informasi, PTPN III (Persero) Raih Dua Penghargaan di Ajang Keterbukaan Informasi Publik *Awards* 2023 Implementing Information Transparency Practices, PTPN III (Persero) Receives Two Awards at the Public Information Transparency Awards 2023.	12	307.500.000
5	*Holding* PTPN III (Persero) Terus Lakukan Berbagai Inisiatif Strategis untuk Transformasi Berkelanjutan PTPN III (Persero) Holding Continues Various Strategic Initiatives for Sustainable Transformation	55	1.222.500.000
November | November			
1	PTPN III (Persero) Tegaskan Pembentukan *subholding* PTPN IV, PTPN I, dan PT SGN untuk Kepentingan Negara Dan Masyarakat PTPN III (Persero) Affirms the Establishment of PTPN IV, PTPN I, dan PT SGN subholding for the Benefit of the Country and Society.	39	1.267.500.000
2	PTPN III (Persero) Dan PLN Jalin Kerja Sama Optimalisasi Energi Terbarukan untuk Pabrik Kelapa Sawit Ptpn Group PTPN III (Persero) and PLN Forge Collaboration for Renewable Energy Optimization in PTPN Group's Palm Oil Mills.	52	1.414.650.000
3	PTPN Group Raih Tiga Penghargaan Indonesia *Digital Innovation And Achievement Awards* PTPN Group Receives Three Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards.	28	729.000.000
4	Peringati Hari Pahlawan, PTPN Group Serahkan Bantuan Kepada Keluarga Pejuang Kemerdekaan In Commemoration of Heroes' Day, PTPN Group Provides Assistance to Families of Independence Fighters.	3	67.000.000
5	PTPN III (Persero) Jadi Perusahaan Sektor Pertanian Terbaik Dunia Yang Memiliki Risiko ESG Rendah Menurut Sustainalytic PTPN III (Persero) Named World's Best Agricultural Sector Company with Low ESG Risk According to Sustainalytics.	23	847.000.000

No.	Kegiatan Media Media Activities	Jumlah Amount	*PR Value* (Rp)
6	Pondasi Jembatan Antar Desa Diperbaiki, Warga Gunung Malela Sampaikan Apresiasi Kepada PTPN III (Persero) Inter-Village Bridge Foundation Improved, Mount Malela Residents Express Appreciation to PTPN III (Persero).	15	300.000.000
7	Inovasi PTPN Group Wujudkan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan PTPN Group's Innovations Realize Sustainable Palm Oil Plantations.	28	592.500.000
8	Akselerasi Transformasi Perusahaan, PTPN III (Persero) Tandatangani Perjanjian Kerja Bersama Dengan Federasi Serikat Pekerja Accelerating Company Transformation, PTPN III (Persero) Signs Collective Labor Agreement with Workers' Union Federation.	31	780.000.000
9	PTPN III (Persero) Bersama PT RPN Gelar Ekspose Hasil Riset Dan *Launching* Sejumlah Produk Unggulan PTPN III (Persero) and PT RPN Host Research Results Exposition and Launch Several Flagship Products.	18	420.000.000
10	PTPN III (Persero) Hibahkan Dua Unit Golf *Car* Untuk Fasilitas Pendukung Di Area Kantor Lemhannas PTPN III (Persero) Donates Two Golf Cart Units for Supporting Facilities in Lemhannas Office Area.	4	97.500.000
Desember | December			
1	*Subholding* PTPN IV dan PTPN I Resmi Terbentuk Subholding PTPN IV and PTPN I Officially Formed.	97	2.648.100.000
2	*Holding* Perkebunan Nusantara Jamin Pembentukan PTPN IV dan PTPN I Tidak Merugikan Karyawan Holding Perkebunan Nusantara Ensures PTPN IV and PTPN I Formation is Not Detrimental to Employees.	9	187.500.000
3	Sinergi *Subholding* PTPN IV-BBKSDA Riau Komitmen Perkuat Konservasi Gajah Sumatera PTPN IV Subholding BBKSDA Riau Synergy is Committed to Strengthening Sumatran Elephant Conservation.	21	427.500.000
4	PTPN VII Tolak Eksekusi Lahan Oleh PN Blambangan Umpu PTPN VII Rejects Land Execution by PN Blambangan Umpu.	16	322.500.000
5	Eksekusi Kucing-Kucingan ala Pengadilan Negeri Blambangan Umpu di Lahan PTPN VII Cat-and-Mouse Execution ala Blambangan Umpu District Court on PTPN VII Land.	11	202.500.000
6	Raih Indonesia Best CMO Awards 2023, ini strategi Dwi Sutoro Dorong Hilirisasi Komoditas Perkebunan BUMN Achieving Indonesia Best CMO Awards 2023, Dwi Sutoro's Strategy to Drive Downstream Commodities of State-Owned Plantations.	7	150.000.000
7	Usai Dibentuk, *Subholding* PTPN IV Gandeng Aspekpir Kebut Program PSR di Kalimantan Aspekpir Siap Dukung PTPN IV Akselerasi PSR di Borneo After Formation, PTPN IV Subholding Teams Up with Aspekpir to Accelerate PSR Program in Kalimantan; Aspekpir Ready to Support PPN IV's PSR Acceleration in Borneo.	22	868.125.000
8	Berkah Kopi Indonesia di Tahun 2023: Produksi Naik, Harga Meningkat, Hingga Jadi Juara Dunia Blessings for Indonesian Coffee in 2023: Production Increases, Prices Rise, Becomes World Champion.	14	360.000.000
9	*Subholding* PTPN IV dan PTPN I Resmi dibentuk, Pemegang Saham Tetapkan Dewan Komisaris dan Direksi Subholding PTPN IV and PTPN I Formed Officially, Shareholders Appoint Board of Commissioners and Board of Directors.	19	558.000.000
10	PTPN III (Persero) Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat PTPN III (Persero) Receives Public Information Transparency Award from Central Information Commission.	17	337.500.000
11	Dirut *Holding* Perkebunan Nusantara Dampingi Wakil Menteri BUMN Tinjau Program Percepatan Swasembada Gula Nasional di PTPN Regional 4 Holding Perkebunan Nusantara President Director Accompanies Vice Minister of State-Owned Enterprises in Reviewing National Sugar Self-Sufficiency Acceleration Program at PTPN Regional 4.	17	367.500.00

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

Perseroan menyadari bahwa kemajuan teknologi informasi dalam era saat ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis secara berkelanjutan. Perubahan dalam teknologi informasi telah mempengaruhi preferensi konsumen, yang kini mengharapkan kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan peningkatan layanan. Oleh karena itu, Perseroan perlu mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses kerja, serta memperkuat daya saing dan keunggulan kompetitif Perseroan dengan mengikuti dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah. Perseroan berkomitmen untuk mengintegrasikan strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis guna mencapai tujuan Perseroan melalui implementasi teknologi informasi yang tepat.

The Company recognizes that advancements in information technology in today's era play a crucial role in supporting sustainable business growth and development. Changes in information technology have influenced consumer preferences, now expecting speed, accuracy, efficiency, and improved services. Therefore, the Company needs to develop information technology systems that can enhance operational efficiency through process automation and strengthen the Company's competitiveness and competitive advantage by keeping up with the dynamics of the ever-changing business environment. The Company is committed to integrating information technology strategies with business strategies to achieve the Company's goals through the implementation of appropriate information technology.

Strategi Pengelolaan dan *Roadmap* Teknologi Informasi

Pengembangan serta penerapan teknologi informasi ke dalam bisnis Perseroan merupakan hal yang penting pada saat ini. Melalui kecanggihan teknologi informasi, maka pengambilan keputusan berbasi fakta dan data dapat cepat dilakukan. Selain itu, teknologi informasi juga merupakan "*strategic tools*" bagi Perseroan, karena lewat hal ini maka Perseroan dapat memenangkan persaingan di industri perkebunan dan pendukungnya yang mampu mensimplifikasi proses bisnis menjadi lebih optimal, menumbuhkan inovasi, dan menciptakan nilai tambah.

Pengembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh Perseroan saat ini dituangkan melalui penyusunan *Plantation Digitalization Roadmap* 2021-2025 yang diselaraskan dengan 5 (lima) prioritas utama Kementerian BUMN terutama Aspek C Kepemimpinan Teknologi dan *Strategic House Indicator*. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Anak Perusahaan terutama *System & Technology Enhancement* (Memanfaatkan digitalisasi dan teknologi untuk operasional dan bisnis).

Pada tahun 2023 pengembangan teknologi informasi dan inisiatif *digital* yang dilaksanakan sesuai dengan *roadmap* adalah:

1. *Digital Farming* Kelapa Sawit
2. *Digital Farming* Karet
3. *Mill Indicator Monitoring System*

Information Technology Management Strategy And Roadmap

The development and implementation of information technology into the company's business are crucial at this time. Through the sophistication of information technology, fact-based decision-making can be done quickly. In addition, information technology is also a "strategic tool" for the company, as through this, the company can win the competition in the plantation industry and its supporters by simplifying business processes to be more optimal, fostering innovation, and creating added value.

The current development of information technology by the company is reflected in the formulation of the Plantation Digitalization Roadmap 2021-2025, which is aligned with the 5 (five) main priorities of the Ministry of State-Owned Enterprises, especially Aspect C Technology Leadership and Strategic House Indicator. Perkebunan Nusantara III (Persero) and its subsidiaries, especially System & Technology Enhancement (Leveraging digitization and technology for operations and business).

In 2023, the development of information technology and digital initiatives carried out according to the roadmap include:

1. Digital Farming for Palm Oil
2. Digital Farming for Rubber
3. Mill Indicator Monitoring System



- Integrasi IOT (*machine to machine*): Mengintegrasikan antara IoT (*Mill Excellenc* Indikator, *Tank Control, Digital Farming* dalam *Single System* dan ERP SAP HANA)
- *Digital Manufacturing*: Proses Pengolahan (*Off Farm*) Secara *digital end to end*
- *Integrated Sales*: Integrasi seluruh kanal penjualan elektronik dengan ERP SAP HANA
- *Customer Relationship Management* (CRM)
- *Geographic Information System* (GIS)

- IoT Integration (machine to machine): Integrating IoT (Mill Excellence Indicator, Tank Control, Digital Farming in Single System and ERP SAP HANA)
- Digital Manufacturing: End-to-end digital processing (Off Farm)
- Integrated Sales: Integrating all electronic sales channels with ERP SAP HANA
- Customer Relationship Management (CRM)
- Geographic Information System (GIS)

Pada tahun 2023 PTPN III dan PTPN VIII sebagai *pilot project* telah menyelesaikan seluruh tahapan *assessment* CSM dan TMPI dan akan dilanjutkan oleh PTPN lainnya di tahun 2024.

In 2023, PTPN III and PTPN VIII as pilot projects completed all stages of the CSM and TMPI assessments, which will be continued by other PTPN in 2024.

Komitmen Investasi Teknologi Informasi

Sebagai upaya untuk mengembangkan Teknologi Informasi pada tahun 2023, Perseroan mengalokasikan dana sebesar Rp468.262.902.000 yang digunakan untuk *managed service* dan *change request Enterprise Resource Planning* (ERP SAP), implementasi aplikasi *digital farming* komoditas kelapa sawit dan karet, implementasi *Geographic Information System* (GIS), tata kelola teknologi informasi, infrastruktur pendukung operasional, dan *supporting*.

Commitment To Information Technology Investment

As part of our efforts to develop Information Technology in 2023, the Company allocated funds amounting to Rp468,262,902,000. These funds were utilized for managed services and change requests for Enterprise Resource Planning (ERP SAP), the implementation of digital farming applications for oil palm and rubber commodities, the implementation of a Geographic Information System (GIS), IT governance, operational support infrastructure, and other supporting activities.

Mitigasi Disrupsi Ti, Cyber Security, Dan Disaster Recovery

Mitigasi Disrupsi TI

Dalam menghadapi potensi perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan bisnis, Perseroan melakukan identifikasi potensi disrupsi dan terus-menerus mengevaluasi situasi untuk mengantisipasi dampak perubahan yang mungkin mempengaruhi organisasi. Berikut merupakan langkah telah diambil oleh Perseroan untuk menghadapi hal tersebut:

1. Kemitraan dan Kolaborasi dengan PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai bagian dari PTPN Group terkait riset yang berfokus pada inovasi teknologi. Kolaborasi dapat memperluas akses terhadap pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi baru.
2. Budaya Inovasi dilaksanakan melalui penyelenggaraan *Plantation Innovation Summit* (PIS). Kegiatan PIS tahun 2022 ini merupakan tahun kedua kali dilaksanakan diikuti dari karyawan PTPN Group dengan jumlah karya inovasi yang mengikuti sebanyak 320 proposal atau meningkat sebesar 160% dari tahun sebelumnya sejumlah 120 proposal. Melalui PIS ini diharapkan membangun budaya inovasi yang mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, mengusulkan perubahan, dan mencoba solusi baru. Memberikan ruang bagi eksperimen dan pembelajaran dari kegagalan juga merupakan aspek penting dalam mendukung disrupsi teknologi.
3. Penggunaan Teknologi Pendukung Mengadopsi dan memanfaatkan teknologi pendukung di *on farm* dan *off farm* seperti teknologi *cloud, big data analytics, internet of things* (IoT), dan kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing Perseroan.
4. Sebagaimana Arahan Pemegang Saham, PTPN III (Persero) pada tahun 2022 telah melaksanakan Asesmen Indonesia Industry 4.0 *Readiness Index* (INDI 4.0) asesmen ini dilaksanakan bekerjasama dengan PT Surveyor Indonesia meliputi 5 pilar meliputi Manajemen dan Organisasi, Orang dan Budaya, Produk dan Layanan, Teknologi, dan Operasi Perseroan. Asesmen INDI 4.0 juga diikuti PTPN V

Mitigation of IT Disruptions, Cyber Security, and Disaster Recovery

Mitigation of IT Disruptions

In facing potential changes in the business environment, the Company identifies potential disruptions and continuously evaluates situations to anticipate the impact of changes that may affect the organization. The following are steps taken by the Company to address this:

1. Partnership and collaboration with PT Riset Perkebunan Nusantara as part of the PTPN Group related to research focusing on technological innovation. Collaboration can expand access to the knowledge and resources needed to adopt and implement new technologies.
2. Implemented innovation culture through the Plantation Innovation Summit (PIS). The 2022 PIS marked the second time this event was held, with participation from PTPN Group employees submitting a total of 320 innovation proposals, a 160% increase from the previous year's 120 proposals. Through PIS, it is hoped to build an innovation culture that encourages employees to think creatively, propose changes, and try new solutions. Providing space for experimentation and learning from failure is also an important aspect in supporting technological disruption.
3. Use of Supporting Technologies Adoption and utilization of supporting technologies on-farm and off-farm, such as cloud technology, big data analytics, the Internet of Things (IoT), and artificial intelligence (AI). These technologies can help the organization increase efficiency, innovation, and competitiveness.
4. As directed by Shareholders, in 2022, PTPN III (Persero) conducted the Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) assessment in collaboration with PT Surveyor Indonesia, covering five pillars: Management and Organization, People and Culture, Products and Services, Technology, and Operations. The INDI 4.0 assessment was also participated in by PTPN V representing the

sebagai representasi komoditas kelapa sawit dan PTPN XI representasi komoditas tebu.

5. PTPN III (Persero) pada tahun 2022 juga telah melaksanakan pengukuran IT *Maturity Level* di Anak Perusahaan PTPN dan Anak Perusahaan Non PTPN.
6. Pengembangan keterampilan yang relevan dengan teknologi yang sedang berkembang melalui pelatihan, kursus, dan sertifikasi, karyawan dapat mengasah keterampilan dalam bidang seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), analitika data, pengembangan perangkat lunak, keamanan siber, dan teknologi lainnya yang berpotensi mengalami disrupsi.

Cyber Security (Keamanan Dunia Maya)

Bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Perseroan membentuk *Cyber Incident Response Team* (CSIRT) di lingkungan PTPN Group. Pembentukan CSIRT PTPN Group ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan siber. Selain itu, Perseroan juga telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengukuran Kematangan Keamanan Siber (CSM) dan Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI).

Perseroan telah mengambil serangkaian langkah untuk melindungi sistem teknologi informasi dari serangan di dunia maya, mulai dari penerapan *firewall*, sistem deteksi dan pencegahan intrusi, penggunaan perangkat lunak antivirus, hingga melakukan pembaruan keamanan secara berkala. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan pelatihan kepada karyawan mengenai praktik terbaik dalam keamanan siber dan menjalankan program kesadaran keamanan.

Pemulihan Bencana

Untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul, Perseroan telah mengatur *managed operation* layanan *cloud* yang dikelola oleh pihak ketiga. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak risiko dan telah mencakup tindakan pencegahan seperti penyediaan *backup* data serta pelaksanaan pengujian saat pemulihan data untuk memverifikasi keabsahan dan kesesuaian data pada saat kejadian bencana.

palm oil commodity and PTPN XI representing the sugar commodity.

5. In 2022, PTPN III (Persero) also measured the IT Maturity Level in PTPN subsidiaries and non-PTPN subsidiaries.

6. Development of skills relevant to emerging technologies through training, courses, and certifications, allowing employees to hone skills in fields such as artificial intelligence, data analytics, software development, cybersecurity, and other technologies that are likely to experience disruption.

Cyber Security

In collaboration with the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), the Company formed the Cyber Incident Response Team (CSIRT) within the PTPN Group. The formation of the PTPN Group CSIRT aims to enhance cyber security and resilience. The Company has also conducted technical guidance on Cyber Security Maturity (CSM) measurement and Incident Handling Maturity Level (TMPI).

The Company has taken a series of steps to protect its information technology systems from cyber-attacks, including implementing firewalls, intrusion detection and prevention systems, using antivirus software, and conducting regular security updates. Additionally, the Company has trained employees on best practices in cybersecurity and runs a security awareness program.

Disaster Recovery

To anticipate various risks that may arise, the Company has arranged managed cloud operation services handled by third parties. This measure aims to reduce risk impacts and includes preventive actions such as data backup and conducting recovery tests to verify the validity and suitability of data in the event of a disaster.

KODE ETIK
CODE OF ETHICS

Kode Etik merupakan pedoman etika kerja yang menjadi dasar penerapan praktik tata kelola perusahaan yang berkualitas. Kode Etik yang diterapkan oleh Perseroan dirancang sebagai acuan hukum dan aturan bagi seluruh anggota organisasi, termasuk pejabat, manajemen, dan karyawan. Lebih dari itu, Kode Etik ini juga mengatur agar dapat mematuhi budaya Perseroan, menghindari kegiatan yang menyebabkan benturan kepentingan, serta menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis Perseroan dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang memiliki hubungan dengan Perseroan.

Isi Kode Etik dan Penerapannya di Lingkup Perseroan

PTPN III (Persero) memiliki Kode Etik yang berisikan tentang sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan di Perseroan yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran yang ada di Perusahaan dan pelaku bisnis yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan dalam dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders.* Berikut merupakan rincian dari Kode Etik yang dimiliki oleh Perseroan:

Sistem Nilai:

1. **Paradigma Baru**
   a. Perubahan, perbaikan dan peningkatan metode dan kinerja adalah satu keharusan;
   b. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama dalam memenangkan persaingan;
   c. Setiap kegiatan bisnis harus menghasilkan nilai tambah bagi Perseroan;
   d. Pengembangan hubungan industrial yang egaliter berdasarkan keterbukaan, kesetaraan dan kebhinekaan;
   e. Pengembangan SDM yang terintegrasi untuk membangun kapital insani (*human and intellectual capital*) yang dibutuhkan Perseroan;
   f. Kepemimpinan yang efektif membangun pengaruh melalui kemampuan mengajar dan membagi ilmu, membina hubungan baik dan menjadi panutan;
   g. Penghargaan diberikan kepada karyawan berdasarkan kompetensi dan kinerjanya;
   h. Efektivitas operasional harus didukung oleh struktur organisasi yang sederhana dan dinamis;
   i. Pemanfaatan teknologi sebagai perangkat untuk peningkatan produktivitas kerja dan keunggulan kompetitif;

The Code of Ethics is a work ethic guideline that forms the foundation for implementing quality corporate governance practices. The Company's Code of Ethics is designed as a legal and regulatory reference for all members of the organization, including officials, management, and employees. Additionally, this code also ensures adherence to the Company's culture, avoidance of activities leading to conflicts of interest, and the protection and confidentiality of the Company's business information and information related to parties having relationships with the Company.

Content of The Company's Code of Ethics and Its Implementation

PTPN III (Persero) has a code of ethics that includes value systems, business ethics, work ethics, commitment, and the enforcement of regulations within the Company. This code must be adhered to by all levels within the Company and business actors who have business relations with the Company in conducting business, other activities, and interactions with stakeholders. The details of the Company's Code of Ethics are as follows:

Value System:

1. **New Paradigm:**
   a. Change, improvement, and performance enhancement are a must.
   b. Customer satisfaction is the top priority in winning the competition.
   c. Every business activity must add value to the Company.
   d. Development of egalitarian industrial relations based on openness, equality, and diversity.
   e. Integrated human resource development to build the human and intellectual capital needed by the Company.
   f. Effective leadership builds influence through the ability to teach, share knowledge, foster good relationships, and serve as role models.
   g. Rewards are given to employees based on their competencies and performance.
   h. Operational effectiveness must be supported by a simple and dynamic organizational structure.
   i. Utilization of technology as a tool to increase work productivity and competitive advantage.

j. Keputusan bisnis diambil berdasarkan fakta dan data yang akurat;
k. Setiap tugas dan operasional Perseroan dilaksanakan dengan cepat tanggap, cepat tindak lanjut, tuntas, berkualitas, dan penuh tanggung jawab;
l. Seluruh aktivitas Perseroan harus berorientasi pada peningkatan mutu dan lingkungan.

2. Tata Nilai

a. *Proactivity*, selalu bersikap proaktif dengan penuh inisiatif mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi;
b. *Excellence*, selalu memperlihatkan gairah keunggulan dan berusaha bekerja keras untuk hasil maksimal sesuai kompetensi;
c. *Team Work*, Perseroan selalu mengutamakan kerja sama tim agar mampu menghasilkan sinergi optimal bagi Perseroan;
d. *Innovation*, selalu menghargai kreativitas dan menghasilkan inovasi dalam metode baru dan produk baru;
e. *Responsibility*, selalu bertanggung jawab atas akibat keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan.

3. Visi dan Misi Perseroan

Visi

Menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa.

Misi

a. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan;
b. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik;
c. Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insani;
d. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbal hasil terbaik;
e. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan.

4. Strategi

a. Menjalin dan mengembangkan hubungan sinergis yang efektif dengan mitra strategis untuk mewujudkan peluang bisnis;
b. Melaksanakan manajemen berorientasi pasar, sensitif terhadap kecenderungan industri dan pergerakan pasar mencermati pesaing;
c. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dengan kemampulabaan (*profitability*);
d. Mematuhi aturan *Health, Safety, and Environment* (HSE) kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;

j. Business decisions are made based on accurate facts and data.
k. Every task and operation of the Company is carried out with prompt responsiveness, quick follow-up, thoroughness, quality, and full responsibility.
l. All Company activities must be oriented towards improving quality and the environment.

2. Core Values:

a Proactivity, always act proactively with full initiative to evaluate potential risks.
b. Excellence, always show a passion for excellence and strive to work hard for maximum results according to competencies.
c. Team Work, the Company always prioritizes teamwork to generate optimal synergy for the Company.
d. Innovation, always value creativity and produce innovations in new methods and products.
e. Responsibility, always take responsibility for the consequences of decisions made and actions taken.

3. Company Vision and Mission:

Vision:

To become a superior and world-class competitive national agribusiness company that contributes sustainably to the nation's progress.

Mission:

a. Produce high-quality products for customers;
b. Develop superior work process capabilities through continuous improvement and innovation with good corporate governance;
c. Develop an excellent organization and culture, and competent and prosperous human resources to realize each individual's potential;
d. Optimize asset utilization to provide the best returns;
e. Participate in improving community welfare and preserving the environment for the benefit of future generations.

4. Strategy:

a. Establish and develop effective synergistic relationships with strategic partners to realize business opportunities;
b. Implement market-oriented management, sensitive to industry trends and market movements, observing competitors;
c. Maintain a balance between growth and profitability;
d. Comply with Health, Safety, and Environment (HSE) regulations;

e. Melaksanakan keunggulan operasional agar Perusahaan menjadi efisien dan efektif dalam biaya;
f. Membangun budaya kerja yang kondusif dengan melaksanakan tata nilai dan paradigma baru;
g. Membangun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan kinerja.

Pemberlakuan Kode Etik bagi Seluruh Level Organisasi

Penegakkan Kode Etik di Perseroan merupakan tanggung jawab kolektif bagi seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, serta Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris untuk bertingkah sesuai dengan norma hukum dan budaya Perseroan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sikap yang profesional, bertanggung jawab, wajar, layak, dan dapat dipercaya dalam menjalin hubungan bisnis dengan rekan kerja maupun mitra bisnis.

Pelaksanaan Kode Etik ini merupakan upaya untuk:
1. Memberikan pemahaman kepada seluruh Insan Perseroan bahwa Perseroan beroperasi secara jujur dan terbuka, sehingga tercipta lingkungan kerja yang baik, dengan tingkat perputaran karyawan yang rendah dan peningkatan kesejahteraan;
2. Menjadi bagian dari komunitas tertentu, di mana menjaga hubungan baik merupakan hal mendasar bagi sukses jangka panjang Perseroan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi;
3. Menjadi bagian dari industri perkebunan nasional, dimana pelaksanaan dan komitmen terhadap Kode Etik dapat mendukung Perseroan dalam berbagai perkara penting, serta menjadi bagian dari manajemen risiko yang baik, dan mampu membangun reputasi Perseroan.

Sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku Serta Penandatanganan Pakta Integritas: Upaya Penyebaran Dan Sosialisasi Kode Etik

Pada tahun 2023, Perseroan telah melakukan sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan. Sosialisasi tersebut dilakukan mulai dari kepada Dewan Komisaris serta organ pendukungnya, Direksi dan pejabat yang berada satu tingkat di bawahnya, serta seluruh karyawan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Kebijakan Penegakan Disiplin dan Penanganan Pelanggaran

Perseroan secara berkala selalu melakukan pemantauan terhadap penegakan. Selain itu, Perseroan juga telah menyediakan fasilitas pengaduan terhadap pelanggaran etika Perseroan melalui WBS.

e. Implement operational excellence to make the Company efficient and cost-effective;
f. Build a conducive work culture by implementing core values and a new paradigm;
g. Build and implement competency and performance-based human resource management.

Enforcement of the Code of Ethics at All Organizational Levels

The enforcement of the Code of Ethics in the Company is a collective responsibility for all employees, Directors, Board of Commissioners, and Committees under the Board of Commissioners to act in accordance with the Company's legal norms and culture. This approach is intended to foster professionalism, responsibility, fairness, propriety, and trustworthiness in business relations with colleagues and business partners.

The implementation of this Code of Ethics aims to:
1. Provide all Company Personnel with the understanding that the Company operates honestly and transparently, thereby creating a good working environment with low employee turnover and improved welfare;
2. Become part of a specific community where maintaining good relationships is fundamental for the Company's long-term success in achieving social welfare and economic improvement;
3. Become part of the national plantation industry, where the implementation and commitment to the Code of Ethics can support the Company in various important matters, serve as part of good risk management, and build the Company's reputation.

Dissemination of the Code of Ethics and Conduct Guidelines and Signing of the Integrity Pact: Efforts to Spread and Disseminate the Code of Ethics

In 2023, the Company disseminated the Corporate Ethics and Conduct Guidelines. This dissemination was carried out from the Board of Commissioners and their supporting organs, the Directors and officials at one level below them, to all employees of PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Discipline Enforcement and Violation Management Policy

The Company regularly monitors the enforcement of the Code of Ethics. Additionally, the Company has provided facilities for reporting ethical violations through the Whistleblowing System (WBS).

Dalam pedoman Etika dan Perlikau yang dimiliki Perseroan, apabila terdapat pelanggaran etika maka, akan diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

According to the Company's Ethics and Conduct Guidelines, any ethical violations will result in sanctions in accordance with applicable regulations and policies.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah merealisasikan penegakan Standar Etika Perseroan. Berikut merupakan rincian mengenai penegakan Kode Etik Perseroan selama tahun 2023 dan 2022.

Number of Code of Ethics Violations

Throughout 2023, the Company has enforced its Code of Ethics. Below are details regarding the enforcement of the Company's Code of Ethics during 2023 and 2022.

Sanksi Sanction	**2023**	**2022**
Tindakan Disiplin Ringan Minor Disciplinary Action	Nihil None	Nihil None
Tindakan Disiplin Sedang Moderate Disciplinary Action		
Tindakan Disiplin Berat Severe Disciplinary Action		
Jumlah | Total		

KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA
PERFORMANCE-BASED LONG-TERM COMPENSATION

Sampai dengan akhir tahun 2023, Perseroan belum menetapkan kebijakan terkait pemberian insentif jangka panjang berdasarkan kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan, baik dalam bentuk program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Ownership Program*/MSOP) maupun program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program*/ESOP).

As of the end of 2023, the Company has not established a policy regarding the provision of long-term performance-based incentives for management and/or employees. This includes both a Management Stock Ownership Program (MSOP) and an Employee Stock Ownership Program (ESOP).

KOMITMEN TERHADAP ANTIKORUPSI
Commitment to Anti-Corruption

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Untuk membentuk tata kelola perusahaan yang bersih, menghindari segala tindakan, perilaku, atau praktik yang dapat mengarah pada konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan yang dapat menempatkan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang serta jabatan, Perseroan telah menerapkan pengendalian gratifikasi dari pihak lain melalui Pengelolaan Budaya Kepatuhan Terhadap Gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi No.PD-DSPN-003.

Kebijakan pengendalian gratifikasi ini penting dalam implementasi Kode Etik yang telah disebutkan sebelumnya, karena bertujuan secara tegas untuk membatasi penerimaan gratifikasi, hadiah, atau pemberian lainnya yang dapat berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Selain mendukung prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlandaskan pada prinsip pengelolaan korporasi yang sehat, kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah setiap anggota PTPN III dari praktik korupsi serta menegakkan integritas dalam setiap tindakan.

Gratification Control Policy

To establish clean corporate governance and to avoid actions, behaviors, or practices that may lead to conflicts of interest, corruption, collusion, and nepotism, which prioritize company interests above personal, family, group, or factional interests, the Company has implemented gratification control from external parties through the Management of Compliance Culture Against Gratification according to Gratification Control Guidelines No. PD-DSPN-003.

This gratification control policy is essential in the implementation of the previously mentioned Code of Ethics, as it aims to explicitly limit the acceptance of gratifications, gifts, or other offerings that could be associated with the misuse of authority and position. Besides supporting the principles of Good Corporate Governance (GCG), which are based on healthy corporate management, this policy also aims to prevent any member of PTPN III from engaging in corrupt practices and to uphold integrity in all actions.

Pelatihan/Sosialisasi Antikorupsi Kepada Karyawan

Selama tahun 2023, Perseroan telah mengadakan pelatihan antikorupsi. Berikut merupakan rincian mengenai pelatihan anti korupsi yang telah diadakan oleh Perseroan:

Anti-Corruption Training/Dissemination to Employees

Throughout 2023, the Company has conducted anti-corruption training. Below are the details of the anti-corruption training held by the Company:

Tanggal Date	Materi Kegiatan Activity Material	Jumlah peserta Number of Participants
2-4 Oktober 2023 October 2-4, 2023	Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System Training	19

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

REPORT OF STATE OFFICIAL ASSETS BASIC PRINCIPLES OF THE STATE OFFICIAL'S ASSETS

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN merujuk pada daftar seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara, yang diatur dalam formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, termasuk pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengharuskan setiap penyelenggara negara untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa pejabat dengan fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD, juga harus melaporkan LHKPN.

Pemeriksaan LHKPN yang dilakukan oleh KPK bertujuan untuk menciptakan penyelenggara negara yang mematuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindakan tercela lainnya. Setiap penyelenggara negara diharapkan untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN dengan jujur, akurat, dan lengkap, sehingga KPK dapat melakukan analisis, evaluasi, dan penilaian atas seluruh harta kekayaan yang dilaporkan dengan tepat dan bertanggung jawab.

As a state-owned enterprise, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is obliged to comply with the regulations regarding the reporting of State Officials' Assets (LHKPN). LHKPN refers to a comprehensive list of assets owned by state officials, as outlined in a form established by the Corruption Eradication Commission (KPK) according to KPK Decision Letter No. KEP 07/KPK/02/2005 concerning the Procedures for Registration, Examination, and Announcement of State Officials' Assets Reports.

Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission authorizes the KPK to undertake preventive measures against corruption, including the registration and examination of LHKPN. Additionally, Law No. 28 of 1999 concerning State Officials who are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism mandates that every state official report and announce their assets before and after holding office and be willing to have their assets examined before and after their tenure. The law specifies that officials with strategic functions in state administration, including members of the Board of Commissioners, Directors, and other structural officials in state-owned enterprises (SOEs) and regional-owned enterprises, must also report LHKPN.

The examination of LHKPN conducted by the KPK aims to create state officials who adhere to the principles of governance free from corruption, collusion, nepotism, and other improper actions. Every state official is expected to report their assets honestly, accurately, and completely using the LHKPN form, enabling the KPK to analyze, evaluate, and assess all reported assets appropriately and responsibly.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perseroan

Terdapat beberapa dasar hukum dan peraturan yang digunakan Perseroan sebagai pijakan untuk menerapkan LHKPN di lingkungan Perseroan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Legal Basis and Regulations for Implementing LHKPN in the Company

Several legal bases and regulations serve as the foundation for implementing LHKPN within the Company, including:

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Officials who are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism;

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, dan perubahannya;
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

2. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, and its amendments;
4. Decision of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation.

Kebijakan LHKPN Perseroaan

Peraturan Direksi No. 3.06/Per/01/2017 yang dikeluarkan oleh Perseroan mengatur kebijakan pelaporan harta kekayaan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan semua tingkat manajemen hingga BOD-1. Kebijakan ini juga berlaku untuk entitas anak yang tergabung dalam *Holding* Perkebunan Nusantara, dengan menetapkan standar pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk tingkat-tIngkat tertentu dalam struktur organisasi entitas anak Perusahaan.

Company's LHKPN Policy

The Company's Board of Directors Regulation No. 3.06/Per/01/2017 governs the assets reporting policy for the Board of Commissioners, Directors, and all management levels up to BOD-1. This policy also applies to subsidiaries within the Holding Perkebunan Nusantara, establishing reporting standards for the State Officials' Assets Report (LHKPN) for certain levels within the organizational structure of the Company's subsidiaries.

Ruang Lingkup dan Pengelola Pelaporan Kekayaan Pejabat

Semua individu yang diwajibkan untuk melaporkan kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan aplikasi e-LHKPN. Bagian Tata Kelola Korporat ditunjuk sebagai koordinator yang bertanggung jawab menyediakan data dan informasi terkait perubahan dan penggantian pelapor wajib di Perseroan, menyelenggarakan penyuluhan mengenai pengisian formulir LHKPN, dan memantau tingkat kepatuhan terhadap proses pelaporan tersebut.

Sebagai bagian dari *Holding* Perkebunan Nusantara III (Persero), yang juga terdaftar sebagai pelapor wajib LHKPN, Perseroan telah diberi arahan mengenai kebijakan pelaporan harta penyelenggara negara. Direksi dan Dewan Komisaris telah secara konsisten dan tepat waktu menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pelaporan LHKPN dilakukan langsung oleh individu yang bersangkutan, setelah melalui tahap verifikasi oleh KPK, dan kemudian diumumkan oleh Bagian Tata Kelola Korporat melalui saluran internal Perseroan.

Scope and Management of Assets Reporting for Officials

All individuals required to report their assets to the Corruption Eradication Commission (KPK) use the e-LHKPN application. The Corporate Governance Division is designated as the coordinator responsible for providing data and information related to changes and replacements of mandatory reporters within the Company, conducting training on filling out the LHKPN form, and monitoring compliance with the reporting process.

As part of Holding Perkebunan Nusantara III (Persero), which is also registered as a mandatory LHKPN reporter, the Company has been guided on the state officials' assets reporting policy. The Board of Directors and the Board of Commissioners have consistently and timely submitted LHKPN in accordance with applicable legal provisions. The LHKPN reporting process is conducted directly by the respective individual, verified by the KPK, and subsequently announced by the Corporate Governance Division through the Company's internal channels.

Transparansi LHKPN Pejabat Perseroan Tahun 2023

Berikut merupakan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perseroan wajib lapor di tahun 2023.

Transparency of LHKPN of the Company's Officials in 2023

Transparency of LHKPN submission of the Company's Mandatory Reporters in 2023 is described below.

Pejabat Wajib LHKPN Mandatory Reporters of LHKPN	Jumlah Wajib Lapor Number of Mandatory Reporters	Telah Melaporkan Already Reported	
		Jumlah Amount	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	7	7	100
Direksi Board of Directors	7	7	100
Kepala Divisi Head of Division	17	17	100
Jumlah | Total	**31**	**31**	**100**



KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY

Proses penerapan pengadaan barang dan jasa yang ada di Perseroan sudah sesuai dengan standar *Good Corporate Governance*, yaitu dengan menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, *fairness* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan uraian mengenai proses pengadaan barang dan jasa, yaitu:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/Perusahaan;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan/atau
8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

The Company's implementation of goods and services procurement processes adheres to the standards of Good Corporate Governance by upholding principles of transparency, cost efficiency, competitiveness, and fairness in accordance with prevailing laws and regulations. The goods and services procurement process is outlined as follows:

1. Execute tasks orderly with a sense of responsibility to achieve the targets, smooth operation, and accuracy of the Goods/Services Procurement objectives;
2. Work professionally and independently while maintaining the confidentiality of information that must be kept secret to prevent irregularities in the Goods/Services Procurement;
3. Avoid mutual influence, whether directly or indirectly, that results in unhealthy business competition;
4. Accept and be accountable for all decisions made in accordance with the written agreements of the involved parties;
5. Avoid and prevent conflicts of interest among involved parties, both directly and indirectly, that result in unhealthy business competition in Goods/Services Procurement;
6. Avoid and prevent wastage and leakage of state/company finances;
7. Avoid and prevent the abuse of authority and/or collusion;
8. Do not accept, offer, or promise to give or receive gifts, rewards, commissions, rebates, and anything from or to anyone known or suspected to be related to Goods/Services Procurement.

Prosedur dan Tata Cara Pengadaan

Dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan, prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan efisien dan terbuka. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan terkait pengadaan barang dan jasa di Perseroan, yang antara lain mencakup:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang/Jasa untuk mengoptimalkan *value for money*;
2. Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan Perseroan;
3. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;

Procurement Procedures and Mechanisms

By implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company can carry out the procedures and methods of goods and services procurement efficiently and transparently. This is in line with the policies established concerning the procurement of goods and services within the Company, which include:

1. Improving the quality of consolidated planning and procurement strategies to optimize value for money;
2. Aligning procurement objectives with the achievement of the Company's goals;
3. Conducting Goods/Services Procurement that is more transparent, competitive, and accountable;

4. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri;
5. Memberikan kesempatan pada Pelaku Usaha nasional dan usaha kecil;
6. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
7. Memanfaatkan teknologi informasi;
8. Memberikan kesempatan kepada Perseroan lingkup PTPN Group/BUMN/Anak Perusahaan BUMN/ Perusahaan Terafiliasi BUMN;
9. Melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif; dan/atau
10. Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Perseroan senantiasa menjunjung prinsip kejujuran dan kemandirian dalam pelaksanaan proses serta prosedur pengadaan barang dan jasa yang terlibat kegiatan pokok operasi tersebut. Berikut merupakan mekanisme proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Perseroan:

1. **Tender/Seleksi Umum**
   Tender/Seleksi Umum adalah metode Pemilihan Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi/ Penyedia Jasa Lainnya (Konsultansi Konstruksi/ Penyedia Jasa Konsultansi dengan Seleksi) dengan cara mengumumkannya melalui media massa.
2. **Tender/Seleksi Terbatas**
   Tender/Seleksi Terbatas adalah metode Pemilihan Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi/ Penyedia Jasa Lainnya (Konsultansi Konstruksi/ Penyedia Jasa Konsultansi dengan Seleksi) dengan cara menawarkan paket pekerjaan kepada Rekanan Terseleksi/Rekanan Terseleksi Tertentu.
3. **Penunjukan Langsung**
   Penunjukan Langsung adalah metode Pemilihan Penyedia Barang/Penyedia Jasa Konstruksi/Penyedia Jasa Lainnya/ Penyedia Jasa Konsultansi dengan cara menunjuk secara langsung 1 (satu) Pelaku Usaha, baik yang telah menjadi Rekanan Terseleksi/Rekanan Terseleksi Tertentu maupun non Rekanan Terseleksi/non Rekanan Terseleksi Tertentu.
4. **Pengadaan Langsung**
   Pengadaan Langsung adalah metode Pemilihan tanpa melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung; atau pembelian Barang/ Jasa yang terdapat di pasar

4. Prioritizing domestic products in accordance with the provisions for utilizing domestic production;
5. Providing opportunities for national business actors and small enterprises;
6. Strengthening the institutional capacity and human resources for Goods/Services Procurement;
7. Utilizing information technology;
8. Providing opportunities for companies within the PTPN Group/State-Owned Enterprises (SOEs)/Subsidiaries of SOEs/Affiliated Companies of SOEs;
9. Conducting strategic, modern, and innovative procurement;
10. Strengthening procurement performance measurement and risk management.

Goods and Services Procurement Process

The Company always upholds principles of honesty and independence in carrying out the processes and procedures involved in the procurement of goods and services related to core operational activities. The mechanisms for the procurement process within the Company include:

1. **Open Tender/Selection**
   Open Tender/Selection is a method for selecting suppliers of goods/construction work/other services (construction consultancy/consultancy services by selection) by announcing it through mass media.
2. **Limited Tender/Selection**
   Limited Tender/Selection is a method for selecting suppliers of goods/construction work/other services (construction consultancy/consultancy services by selection) by offering work packages to selected partners/ certain selected partners.
3. **Direct Appointment**
   Direct Appointment is a method for selecting suppliers of goods/construction services/other services/consultancy services by directly appointing 1 (one) business entity, whether it has become a selected partner/certain selected partner or not.
4. **Direct Procurement**
   Direct Procurement is a selection method without going through Tender/Selection/Direct Appointment; or purchasing goods/services available in the market.

KEBIJAKAN TERKAIT *INSIDER TRADING*
INSIDER TRADING POLICY

Sebagai perusahaan milik Negara, Perseroan tidak memiliki kebijakan mengenai jual beli saham. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai kebijakan terkait *insider trading* dikarenakan Perseroan merupakan perusahaan yang sahamnya tidak diperjualbelikan.

As a state-owned company, the Company does not have a policy regarding the trading of shares. Therefore, there is no information on policies related to insider trading as the Company is a company whose shares are not publicly traded.



WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perseroan menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bertanggung jawab melalui penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS). WBS merupakan bagian integral dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang memungkinkan pihak internal dan eksternal Perseroan melaporkan dugaan pelanggaran dengan mudah. Sistem ini berfungsi sebagai fondasi untuk membangun budaya korporat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG dan praktik bisnis yang beretika. Dengan WBS yang efektif, semua *stakeholders*, termasuk pimpinan, karyawan, dan pihak luar yang terkait dengan Perseroan, dapat dengan nyaman melaporkan dugaan pelanggaran.

The Company reaffirms its commitment to creating a clean and responsible work environment through the implementation of the Violation Reporting System (Whistleblowing System/WBS). WBS is an integral part of implementing Good Corporate Governance (GCG) that allows internal and external parties of the Company to easily report suspected violations. This system serves as the foundation for building a corporate culture based on GCG principles and ethical business practices. With an effective WBS, all stakeholders, including leaders, employees, and external parties associated with the Company, can comfortably report suspected violations.

Komitmen dan Kebijakan Perseroan

Perseroan melalui manajemen senantiasa berkomitmen untuk membangun dan mengawasi Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perseroan yakin, melalui sistem WBS, maka infrastruktur penting dalam penerapan dan penegakan GCG Perseroan serta kultur Perseroan yang sehat, bersih, dan kuat dapat terwujud. Selain itu, sistem pengelolaan WBS juga dapat ditingkatkan melalui sistem teknologi informasi yang semakin terencana, canggih, dan terintegrasi.

The Company's Commitment and Policy

Through management, the Company is committed to building and overseeing the Company by applying the principles of Good Corporate Governance. The Company believes that through the WBS system, essential infrastructure for the implementation and enforcement of the Company's GCG and a healthy, clean, and strong corporate culture can be realized. Furthermore, the management of the WBS system can also be enhanced through increasingly planned, advanced, and integrated information technology systems.

Pengelola Whistleblowing System

Unit Pengelola *Whistleblowing System* (UPW) yang ditetapkan oleh Direktur Utama melalui surat keputusan untuk mengelola WBS, yang terdiri atas:

1. Ketua: yaitu 1 (satu) orang Kepala Divisi yang menangani Audit Internal.
2. Anggota: yaitu 2 (dua) orang Kepala Divisi yang menangani Sekretariat Perusahaan dan Hukum.
3. Sekretaris: yaitu 1 (satu) orang Kepala Sub Divisi atau Staf Divisi yang menangani Audit Internal.

Whistleblowing System Manager

The Whistleblowing System Management Unit designated by the President Director through a decision letter to manage WBS consists of:

1. Chairperson: 1 (one) Head of Division handling Internal Audit.
2. Members: 2 (two) Heads of Divisions handling Corporate Secretariat and Legal Affairs.
3. Secretary: 1 (one) Head of Sub Division or Staff of Division handling Internal Audit.

Ruang Lingkup dan Cakupan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan menetapkan batasan dalam laporan yang dapat diproses oleh tim yang bertanggung jawab atas *Whistleblowing System* (WBS). Kasus-kasus yang dapat dilaporkan mencakup pelanggaran terhadap kode etik dan aturan Perseroan, konflik kepentingan, tindakan curang,

Scope and Coverage of Whistleblowing System

The Company sets limitations on reports that can be processed by the team responsible for the Whistleblowing System (WBS). Reportable cases include violations of the Company's code of ethics and regulations, conflicts of interest, fraudulent activities, corruption, and fraud. The

korupsi, dan penipuan. Perseroan juga menyediakan saluran untuk melaporkan pemerasan, penggelapan, suap, dan gratifikasi yang merupakan tindakan yang dilarang.

Sistem Pelaporan Pelanggaran akan menindaklanjuti laporan terkait perbuatan yang masuk dalam cakupan tersebut. Sebaliknya, untuk pengaduan lain, seperti yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3LH), manajemen sumber daya manusia (SDM), dan fasilitas Perseroan, pelapor diminta untuk menggunakan mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan oleh Perseroan kepada pihak yang terkait.

Media Pelaporan

Pelapor dapat menyampaikan dugaan pelanggaran atau penyimpangan kepada Perseroan melalui media yang telah disediakan, yakni:

Situs: https://wbs.holding-perkebunan.com
Surel: wbs@holdingperkebunan.co.id
Surat:

a Unit Pengelola WBS PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* Perkebunan Nusantara Gedung Agro Plaza Lantai 15
Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 No.1
Kuningan, Jakarta Selatan - 12950
b SMS dan Whatsapp: 08116074003

Company also provides channels for reporting extortion, embezzlement, bribery, and gratuities, which are prohibited acts.

The Whistleblowing System will follow up on reports related to actions within that scope. Conversely, for other complaints, such as those related to occupational health and safety (OHS), human resources (HR) management, and Company facilities, reporters are requested to use the reporting mechanisms established by the Company to the relevant parties.

Reporting Media

Reporters can convey suspected violations or deviations to the Company through the provided media:

Website: https://wbs.holding-perkebunan.com
Email: wbs@holdingperkebunan.co.id
Letter:

a Whistleblowing System Management Unit PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan Nusantara Agro Plaza Building, 15th Floor Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 No.1 Kuningan, South Jakarta – 12950
b SMS and Whatsapp: 08116074003

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi mengenai WBS kepada seluruh insan Perseroan yang memiliki pemahaman yang memadai. Hal tersebut dilakukan agar tidak terdapat multitafsir atas penerapan WBS. Selain itu, penerapan WBS juga dapat membantu meningkatkan kinerja dan reputasi *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). Pelaksanaan sosialisasi khususnya kepada seluruh Insan Perseroan dapat dilakukan melalui:

1. Situs resmi *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) di www.holding-perkebunan.com.
2. Papan informasi berupa pamflet, spanduk dan stiker yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang mudah diakses oleh publik di seluruh kantor dan unit kerja *Holding* Perkebunan Nusantara.
3. Surel dan aplikasi Whatsapp.

Pedoman WBS dengan pelaksanaan operasional sehari-hari, dapat diwujudkan dengan cara disiplin pegawai, kode etik, pelaksanaan fungsi dan tugas operasional kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa dan lainnya.

Penayangan WBS pada situs *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) juga merupakan salah satu bentuk penerapan dan pemberitahuan kepada pemangku

Dissemination of Whistleblowing System

The Company consistently conducts dissemination regarding the WBS to all Company stakeholders with adequate understanding. This is done to avoid misinterpretation in the implementation of WBS. Additionally, the implementation of WBS can also help improve the performance and reputation of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). The dissemination, especially to all Company stakeholders, can be carried out through:

1. The official website of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) at www.holding-perkebunan.com.
2. Information boards such as pamphlets, banners, and stickers placed in strategic locations easily accessible to the public in all offices and working units of Holding Perkebunan Nusantara.
3. Email and WhatsApp applications.

The WBS guidelines with daily operational implementation can be realized through employee discipline, code of ethics, operational function execution, such as procurement of goods and services, and others.

Displaying the WBS on the website of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is also a form of implementation and notification to stakeholders that reporting violations is an

kepentingan bahwa pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari implementasi *Good Corporate Governance* di *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

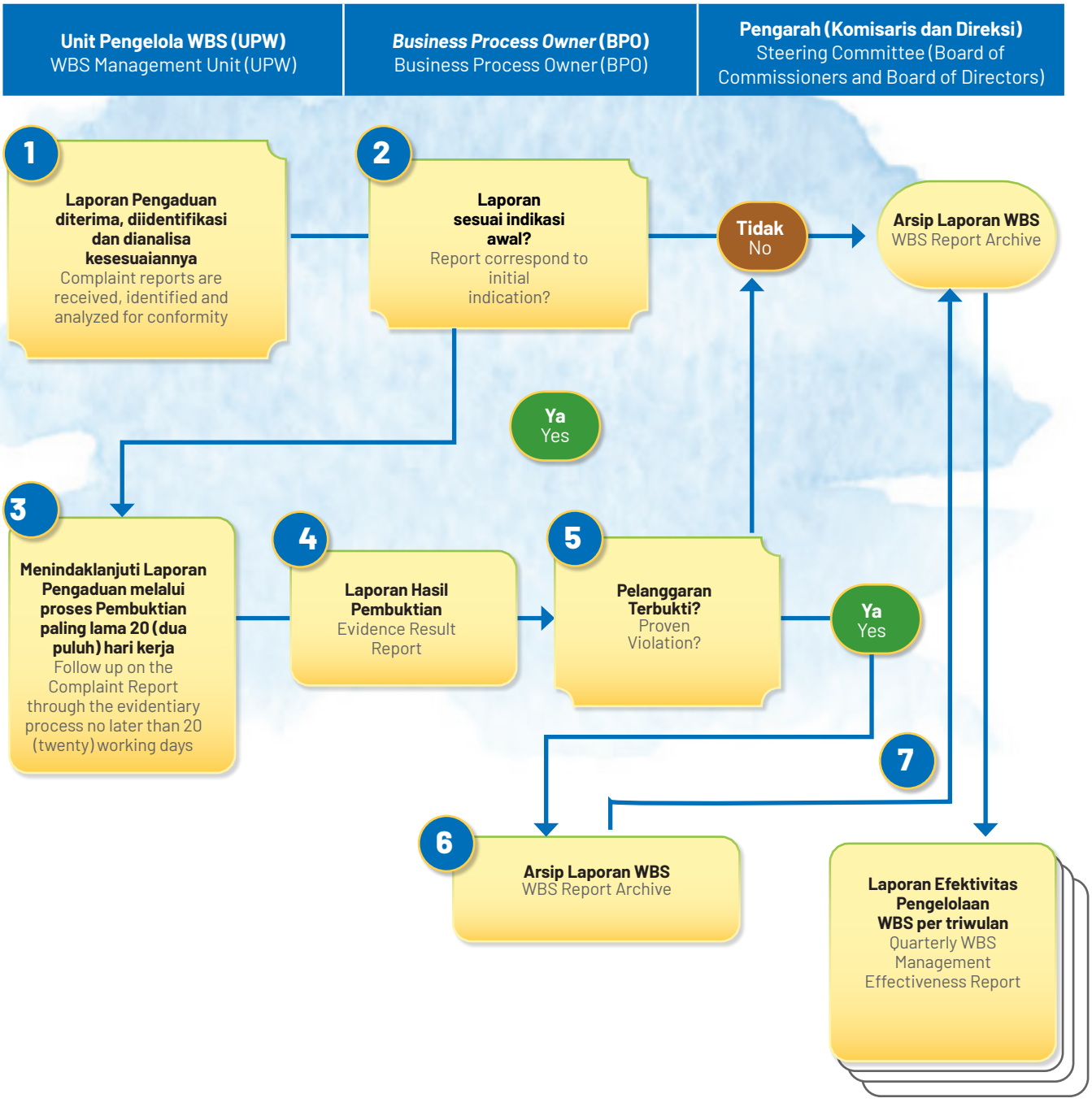
integral part of Good Corporate Governance implementation in Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Mekanisme Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran

Seluruh insan perusahaan beserta pihak eksternal dapat melakukan pelaporan WBS dugaan pelanggaran dengan cara berikut:

Reporting Mechanism and Handling of Violations

All company stakeholders and external parties can report suspected violations through the following methods:



Perlindungan terhadap Pelapor

Setiap individu yang melaporkan melalui sistem *Whistleblowing System* akan diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Perseroan juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi, sehingga penting bagi Perseroan untuk menyediakan saluran pelaporan yang independen, bebas, dan bersifat rahasia bagi pelapor. Hal ini bertujuan agar pelapor merasa aman dan nyaman. Selain itu, Perseroan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor guna melindungi mereka dan anggota keluarga dari kemungkinan tindakan balasan yang mungkin dilakukan oleh pihak terlapor atau organisasi terkait.

Protection for Whistleblower

Any individual reporting through the Whistleblowing System will be provided with protection as stipulated in Law No. 13 of 2006 concerning Witness Protection. The Company is also responsible for providing protection to witnesses, making it crucial for the Company to establish an independent, free, and confidential reporting channel. This is aimed at ensuring that reporters feel safe and comfortable. Additionally, the Company is committed to maintaining the confidentiality of the reporters' identities to protect them and their family members from potential retaliatory actions by the reported party or related organizations.

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses

Sampai akhir tahun 2023, sudah terdapat 4 jumlah pengaduan pengaduan *Whistleblowing System* yang masuk. Setelah pengaduan tersebut masuk, maka akan dilakukan verifikasi ke tahap tindak lanjut. Berikut laporan yang masuk ke tahap tindak lanjut sepanjang tahun 2023 dan 2022.

Number of Complaints Received and Processed

As of the end of 2023, there have been a total of 4 complaints received through the Whistleblowing System. Upon receipt, these complaints undergo verification for further action. Below is the report of complaints that have progressed to the next stage throughout 2023 and 2022.

	2023	2022
Jumlah pengaduan yang masuk Complaints received	4	2
Jumlah pengaduan yang diproses Complaints processed	4	2
Komposisi pengaduan yang masuk dan yang diproses Composition of received and processed complaints	100%	100%



PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

Komitmen Perseroan terhadap perundang-undangan yang berlaku diperlihatkan melalui ketaatan Perseroan dalam membayar pajak. Hingga akhir tahun 2023, Perseroan sudah melakukan pembayaran pajak kepada Negara sebesar Rp4,85 miliar. Rincian mengenai pembayaran pajak Perseroan dapat diuraikan sebagai berikut:

The Company's commitment to applicable laws is demonstrated through its compliance in paying taxes. Until the end of 2023, the Company has already made tax payments to the State amounting to Rp4.85 billion. Details regarding the Company's tax payments can be outlined as follows:

Uraian Description	2023
PBB Land and Building Tax	528.691.369
PPN Value Added Tax	1.608.162.414
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	557.991.056
PPh Pasal 21 Income Tax Article 22	28.932.875
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	170.266.142
PPh Pasal 4.2 Income Tax Article 4.2	158.134.559
PPh Badan 25/29 Corporate Income Tax 25/29	1.716.170.800
PPh Lainnya (Revaluasi Aset + STP) Other Taxes (Asset Revaluation + Tax Correction Slip)	79.859.307
Total Pajak Total Tax	**4.848.208.522**

TRANSPARANSI PRAKTIK *GOVERNANCE*
TRANSPARENCY IN GOVERNANCE PRACTICES

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Sejalan dengan komitmen Perseroan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), berikut adalah pengungkapan mengenai tindakan yang terkait dengan praktik kurang baik dalam tata kelola korporat:

Report on Company Activities Impacting the Environment

In line with the Company's commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG), the following is a disclosure regarding actions related to less-than-ideal practices in corporate governance:

Transparansi Praktik *Bad Corporate Governance* Tahun 2021-2023
Transparency of Bad Corporate Governance Practices 2021-2023

No.	Praktik / Practice	Tahun / Year		
		2023	2022	2021
1.	Aktivitas perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang melibatkan direksi/ komisaris, manajemen dan karyawan Insider trading activities involving board of directors/board of commissioners, management and employees	×	×	×
2.	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun Non-compliance in the disclosure of the fulfillment of tax obligations including guilty verdicts from the highest tax court related to any taxation issue	×	×	×
3.	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK Non-compliance of the presentation of the Annual Report and Financial Statements with applicable regulations and Financial Accounting Standards	×	×	×
4.	Kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material Cases of non-compliance with laws, rules and regulations relating to significant or material related party transactions	×	×	×
5.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan No disclosure of operating segments in the Financial Statements	×	×	×
6.	Pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan Violation of any law relating to labor/ employment/ consumer/ insolvency/ commercial/ competition or environmental matters	×	×	×
7.	Sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting Sanctions from regulators for failing to make significant event announcements within the prescribed timeframe	×	×	×
8.	Bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apapun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan Evidence that the company did not comply with any listing rules and regulations other than disclosure rules during the previous year	×	×	×

✓ = ada / applicable
× = tidak ada / not applicable



Fungsi Penunjang Bisnis

BUSINESS SUPPORT FUNCTIONS





SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan krusial dalam mendukung terwujudnya visi dan misi, pencapaian target bisnis, serta berkontribusi pada pertumbuhan dan kelestarian bisnis perusahaan. *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) senantiasa berdedikasi untuk mengembangkan dan mengelola SDM dengan cara yang akurat, terstruktur, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memperkuat performa serta membekali perusahaan dalam mengatasi berbagai tantangan dan persaingan di industri yang terus meningkat dinamikanya.

Human Resources (HR) plays a crucial role in supporting the realization of the vision and mission, achieving business targets, and contributing to the growth and sustainability of the company's business. Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) is always dedicated to developing and managing human resources in an accurate, structured, and sustainable manner. The aim is to strengthen performance and equip the company to overcome various challenges and competition in an industry that continues to increase in dynamics.

Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pelaksanaan pengelolaan SDM adalah berkaitan dengan:
1. Sistem rekrutmen dan seleksi;
2. Sistem pengembangan SDM
3. Sistem manajemen pengetahuan
4. Sistem manajemen kinerja
5. Sistem Karier dan Suksesi berdasarkan *Talent Management*;
6. Sistem retensi
7. Sistem remunerasi
8. *Talent management* (*acceleration pool*);
9. Hubungan industrial;
10. Fungsi Pengembangan dan Perubahan Organisasi
11. Pengembangan Sistem Informasi.

Scope

The scope of implementation of HR management is related to:
1. Recruitment and selection system;
2. HR development system
3. Knowledge management system
4. Performance management system
5. Career System and Succession based on Talent Management;
6. Retention system
7. Remuneration system
8. Talent management (acceleration pool);
9. Industrial relations;
10. Organizational Development and Change Function
11. Information Systems Development.

DEMOGRAFI KARYAWAN
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

Hingga 31 Desember 2023, tenaga kerja tetap konsolidasi PTPN adalah sebanyak 86.737 karyawan dengan rincian jumlah karyawan tetap masing-masing per PTPN sebagai berikut:

Until 31 December 2023, PTPN's consolidated permanent workforce is as many as 86,737 employees, with details of the number of permanent employees per PTPN as follows:

Jumlah Tenaga Kerja Per PTPN Tahun 2022 (Orang)
Number of Employees Per PTPN in 2022 (Person)

PTPN	2022	
	Jumlah / Total	%
PTPN IIII (Persero)	18.261	18,94%
PTPN I	4.130	4,28%
PTPN II	4.212	4,37%
PTPN IV	15.392	15,96%

PTPN	2022	
	Jumlah Total	%
PTPN V	8.191	8,49%
PTPN VI	4.378	4,54%
PTPN VII	6.288	6,52%
PTPN VIII	7.848	8,14%
PTPN IX	8.404	8,71%
PTPN X	1.904	1,97%
PTPN XI	2.177	2,26%
PTPN XII	1.985	2,06%
PTPN XIII	6.800	7,05%
PTPN XIV	1.613	1,67%
PT SGN*	-	-
Jumlah | Total	**91.583**	**100%**

* PT SGN tahun 2022 belum memiliki karyawan, karena status karyawan masih berada pada entitas masing-masing.
In 2022, PT SGN did not have any employees, as the employees were still under their respective entities

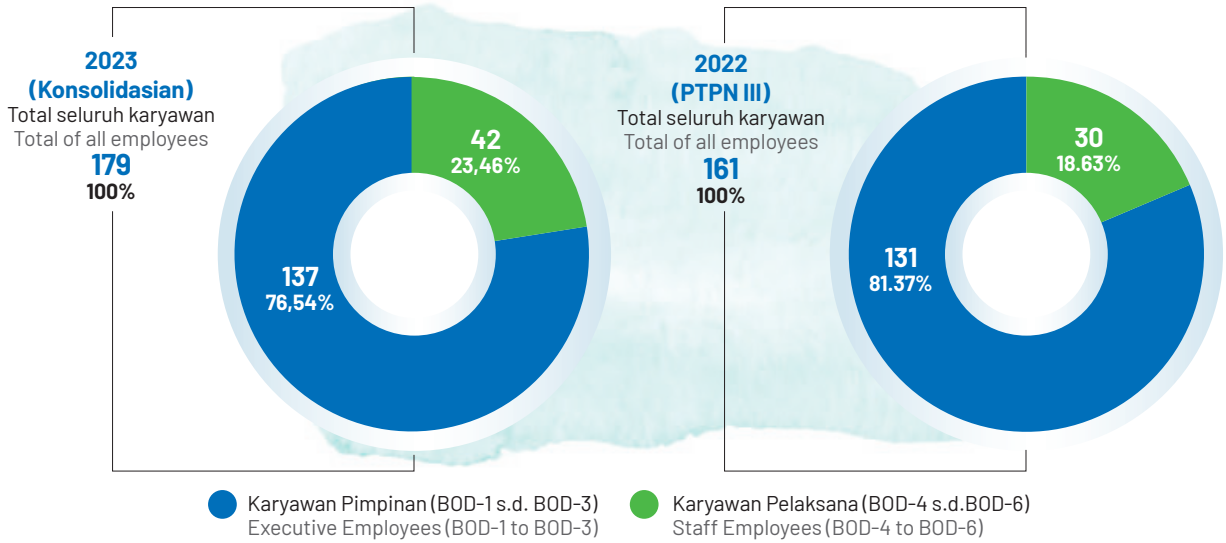
Pada Desember 2023, Perseroan melakukan konsolidasi struktur grup Perusahaan hingga jumlah karyawan PTPN Konsolidasi per 31 Desember 2023 menjadi berikut:

In December 2023, the Company consolidated the group structure, resulting in the number of PTPN Consolidated employees as of December 31, 2023, being as follows:

PTPN	2023	
	Jumlah/ Total	%
PTPN III (Persero)		
a. *Holding*	179	0,21%
b. Unit KSO / Joint Venture	1.102	1,27%
PTPN IV		
- Regional 1 (*ex* PTPN III)	16.953	19,55%
- Regional 2 (*ex* PTPN IV)	14.178	16,35%
- Regional 3 (*ex* PTPN V)	8.024	9,25%
- Regional 4 (*ex* PTPN VI)	4.195	4,84%
- Regional 5 (*ex* PTPN XIII)	6.423	7,41%
PTPN I		
- Regional 1 (*ex* PTPN II)	3.678	4,24%
- Regional 2 (*ex* PTPN VIII)	6.921	7,98%
- Regional 3 (*ex* PTPN IX)	6.869	7,92%
- Regional 4 (*ex* PTPN X-XI)	821	0,85%
- Regional 5 (*ex* PTPN XII)	1.801	2,08%
- Regional 6 (*ex* PTPN I)	4.001	4,61%

PTPN	2023	
	Jumlah	%
- Regional 7 (*ex* PTPN VII)	5.750	6,63%
- Regional 8 (*ex* PTPN XIV)	1.341	1,55%
PT SGN	4.501	5,19%
Jumlah | Total	**86.737**	**100%**

Jumlah Karyawan PTPN III (Persero) *Holding*
Number of Employees PTPN III (Persero) Holding



Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Number of Employees by Gender

Strata Level	Jenis Kelamin Gender		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
I (BOD-6)	45.345	5.937	51.282
II (BOD-5)	21.401	2.133	23.534
III (BOD-4)	5.463	471	5.934
Karyawan Pelaksana **Operational Employees**	**72.209**	**8.541**	**80.750**
IV (BOD-3)	3.628	443	4.071
V (BOD-2)	1.189	135	1.324
VI/VII (BOD-1)	562	30	592
Karyawan Pimpinan **Executive Employees**	**5.379**	**608**	**5.987**
Jumlah | Total	**77.588**	**9.149**	**86.737**
%	**89,45%**	**10,55%**	**100,00%**

Demografi Karyawan Berdasarkan Jenis Strata Golongan
Employee Demographics Based on Group Strata Type

Strata Level	Golongan Group									
	NG	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I (BOD-6)	9.431	16.819	23.494	1.390	118	20	5	4	1	0
II (BOD-5)	862	2.998	7.850	5.780	5.927	115	2	0	0	0
III (BOD-4)	8	105	318	1.222	2.589	1.692	0	0	0	0
IV (BOD-3)	61	0	1	3	7	45	2.053	1.507	251	132
V (BOD-2)	7	0	0	0	0	0	38	96	314	379
VI/VII (BOD-1)	2	0	0	0	0	0	0	0	11	40
Karyawan Pimpinan Executive Employees	70	0	1	3	7	45	2.091	1.603	576	551
Jumlah | Total	**10.371**	**19.922**	**31.663**	**8.395**	**8.641**	**1.872**	**2.098**	**1.607**	**577**	**551**
%	**11,96%**	**22,97%**	**36,50%**	**9,68%**	**9,96%**	**2,16%**	**2,42%**	**1,85%**	**0,67%**	**0,64%**

Demografi Karyawan Berdasarkan Jenis Strata Golongan
Employee Demographics by Stratum Type

Strata Level	Golongan Group								Jumlah Total
	15	16	17	18	19	20	21	22	
I (BOD-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	51.283
II (BOD-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	23.533
III (BOD-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.934
IV (BOD-3)	8	3	0	0	0	0	0	0	4.071
V (BOD-2)	313	120	23	33	1	0	0	0	1.324
VI/VII (BOD-1)	163	184	63	87	14	10	6	12	592
Jumlah | Total	**484**	**307**	**86**	**120**	**15**	**10**	**6**	**12**	**86.737**
%	**0,56%**	**0,35%**	**0,10%**	**0,14%**	**0,02%**	**0,01%**	**0,01%**	**0,01%**	**100,00%**

Demografi Karyawan Berdasarkan Sebaran Kelompok Usia
Employee Demographics Based on Age Group Distribution

Strata Level	Usia/ Age							Jumlah Total
	<26	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	
I (BOD-6)	1.369	2.779	5.916	8.202	9.962	10.632	12.422	51.282
II (BOD-5)	326	661	1.309	2.540	4.788	6.659	7.251	23.534
III (BOD-4)	14	88	247	538	1.068	1.804	2.175	5.934
IV (BOD-3)	150	778	693	755	430	494	771	4.071
V (BOD-2)	2	15	70	326	344	233	334	1.324
VI/VII (BOD-1)	0	1	3	25	105	175	283	592
Jumlah | Total	**1.861**	**4.322**	**8.238**	**12.386**	**16.697**	**19.997**	**23.236**	**86.737**
%	**2,15%**	**4,98%**	**9,50%**	**14,28%**	**19,25%**	**23,06%**	**26,79%**	**100,00%**

Demografi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Demographics by Education Level

Strata Level	Pendidikan Education							Jumlah Total
	SD Elementary School	SMP Junior High School	SMA Senior High School	D1-D3	S1	S2	S3	
I (BOD-6)	21.024	10.338	18.915	361	641	4	0	51.283
II (BOD-5)	4.027	4.292	13.154	553	1,487	20	0	23.533
III (BOD-4)	567	694	3.955	141	574	3	0	5.934
IV (BOD-3)	27	39	581	274	3.003	147	0	4.071
V (BOD-2)	1	0	42	44	1.073	164	0	1.324
VI/VII (BOD-1)	0	0	5	14	452	116	5	592
Jumlah | Total	**25.646**	**15.363**	**36.652**	**1.387**	**7.230**	**454**	**5**	**86.737**
%	**29,57%**	**17,71%**	**42,26%**	**1,60%**	**8,34%**	**0,52%**	**0,01%**	**100,00%**

PEJABAT DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES DIVISION OFFICER

Perusahaan memiliki Direktorat Sumber Daya Manusia yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menghasilkan tenaga kerja unggul untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan ke depan. Direktorat Sumber Daya Manusia melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait perencanaan kerja dan anggaran, manajemen sumber daya manusia, evaluasi kinerja dan kompetensi, serta pemantauan sistem, proses kerja, program, dan aspek lainnya.

The Company has a Human Resources Directorate, which is tasked and responsible for producing a superior workforce to support the Company's future business growth. The Human Resources Directorate carries out duties and responsibilities related to work planning and budgeting, human resource management, performance and competency evaluation, monitoring systems, work processes, and programs.

Sepanjang tahun 2023, pejabat Divisi SDM diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor DSDM/SKPTS/R/147/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan Pimpinan PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Adapun pejabat terkait SDM adalah Yefri Yudianto selaku Kepala Divisi SDM.

Throughout 2023, HR Division officials are appointed based on Decree Number DPPS/SKPTS/R/138/2021 dated 18 August 2021 regarding Transfers of Employees of Strata VI and VIII Leadership of PT Perkebunan Nusantara III (Persero). The official related to HR is Yudhi Cahyadi, Head of the HR Division.

Yefri Yudianto
Kepala Divisi SDM
Head of HR Division



Usia | Age	
37 tahun per 31 Desember 2023	37 years old as of December 31, 2023
Kewarganegaraan | Citizenship	
Warga Negara Indonesia	Indonesian citizen
Domisili | Domicile	
Bekasi, Jawa Barat	Bekasi, West Java
Riwayat Pendidikan | Education History	
Sarjana Psikologi, Universitas Sumatera Utara, 2009	Bachelor of Psychology, University of North Sumatra, 2009
Pengalaman Kerja | Citizenship	
Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Sub Divisi Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Periode 2021-2023.	Previously he served as Head of the Sub Division of Organization and Manpower Planning of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) for the 2021-2023 period.

ARAH KEBIJAKAN SDM
HR POLICY DIRECTION

Misi yang dimiliki oleh Divisi SDM memiliki keselarasan dengan misi *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), terutama untuk misi ketiga.

The mission of the HR Division is in harmony with the mission of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), especially for the third mission.

Misi *Holding* Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

Sebagai grup usaha berbasis sumber daya perkebunan yang terintegrasi dan bersinergi dalam memberi nilai tambah (*value creation*) bagi segenap *stakeholders* dengan: (Misi Perusahaan poin 3) Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insani.

Mission of Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)

As a plantation resource-based business group that is integrated and synergized in providing added value (value creation) for all stakeholders by (Company Mission point 3) Developing an excellent organization and culture as well as competent and prosperous human resources in realizing the potential of every human being.

Misi *Human Capital* (SDM)

Peningkatan Kapabilitas SDM: Sebagai mitra strategis dalam mengelola Sumber Daya Manusia yang unggul dan berintegritas untuk meningkatkan kapabilitas PT Perkebunan Nusantara Group yang berdaya saing tinggi dan berkesinambungan.

Human Capital (HR) Mission

Increasing HR Capability: As a strategic partner, we manage superior human resources with integrity to enhance the capability of PT Perkebunan Nusantara Group, making it highly competitive and sustainable.

INISIASI STRATEGIS DAN PROGRAM KERJA SDM TAHUN 2023
STRATEGIC INITIATION AND HR WORK PROGRAM FOR 2023

Perusahaan memiliki inisiasi strategis dan program kerja SDM sepanjang tahun 2023 dengan fokus sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Organisasi dan Penataan Tenaga Kerja
   - Restrukturisasi dan Standarisasi Organisasi
   - Desain Perencanaan Tenaga Kerja
2. *Implementation Information System*
   - Membangun dan mengimplementasikan *Human Resources Information System* (HRIS)
3. *Design Capability & Leadership Development*
   - Merancang skema *talent* dan *succession*
   - Membangun *Leadership Development Program* & HC *Committee*
4. Standarisasi Sistem Pelatihan
   - Memaksimalkan sarana pembelajaran
   - Membangun sistem pembelajaran dan pengetahuan berbasis *digital* AgroNow
5. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja
   - Mengimplementasikan sistem *competency-based performance*

The company has strategic initiatives and HR work programs throughout 2023 with the following focus:

1. Organizational Restructuring and Workforce Management
   - Restructuring and Standardizing the Organization
   - Designing Workforce Planning
2. Implementation of Information Systems
   - Developing and Implementing the Human Resources Information System (HRIS)
3. Designing Capability and Leadership Development
   - Creating Talent and Succession Schemes
   - Developing Leadership Development Programs and Human Capital Committees
4. Standardizing Training Systems
   - Maximizing Learning Facilities
   - Developing the AgroNow Digital Learning and Knowledge System
5. Developing Performance Management Systems
   - Implementing a Competency-Based Performance System

- Mengimplementasikan *grading* dan *total reward system*

6. *Overview: Challenges & Strategies Initiative*
   - Menginternalisasikan program budaya perusahaan
   - Desain sistem *monitoring, coaching and counselling*
   - Mempercepat implementasi *"Back to Basic" Planters Program*

- Implementing a Grading and Total Reward System

6. Overview: Challenges and Strategic Initiatives
   - Internalizing the Corporate Culture Program
   - Designing Monitoring, Coaching, and Counseling Systems
   - Accelerating the Implementation of the "Back to Basics" Planters Program

Perencanaan Tenaga Kerja

Perencanaan Sumber Daya Manusia dapat diuraikan sebagai suatu proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis pegawai yang tepat akan tersedia pada tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk waktu yang akan datang, mampu melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi dapat terus mencapai tujuannya.

Perusahaan memiliki pedoman dalam melaksanakan perencanaan tenaga kerja di Perusahaan dengan proses sebagai berikut:

a. Analisis pekerjaan dalam bentuk uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan;
b. Desain pekerjaan dengan mempertimbangkan faktor elemen organisasi, elemen lingkungan, dan elemen perilaku;
c. Teknik desain pekerjaan yang dimaksud pada poin b dapat dilaksanakan dengan teknik/metode mendesain ulang pekerjaan berupa *job enlargement*, *job enrichment*, dan *job rotation*;
d. Pelaksanaan penarikan karyawan dalam bentuk:
   i. Penarikan dari internal Perusahaan, dilaksanakan dalam bentuk promosi jabatan, mutasi/transfer/rotasi jabatan, dan demosi jabatan;
   ii. Penarikan dari eksternal Perusahaan, dilaksanakan dalam bentuk penerimaan karyawan/rekrutmen. Hal ini akan senantiasa dilakukan oleh Perusahaan karena akan terus menerus terdapat jabatan yang kosong akibat adanya karyawan yang pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri ataupun adanya pengembangan struktur organisasi.

Workforce Planning

Human Resource Planning can be described as a process that seeks to ensure that the correct number and type of employees will be available in the right place at the right time for the foreseeable future, capable of doing the things necessary so that the organization can continue to achieve the goal.

The Company has guidelines for implementing workforce planning in the Company with the following process:

a. Job analysis in the form of job descriptions and job specifications;
b. Job design by considering organizational elements, environmental elements, and behavioral elements;
c. The job design techniques referred to in point b can be implemented using job redesign techniques/methods in the form of job enlargement, job enrichment, and job rotation;
d. Implementation of employee withdrawals in the form of:
   i. Withdrawals from internal Company positions are carried out in the form of position promotions, transfers/position rotations, and position demotions;
   ii. Withdrawals from external companies are carried out through employee acceptance/recruitment. The Company will always do this because there will continue to be vacant positions due to employees retiring, passing away, resigning, or the development of the organizational structure.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Pelatihan dan pengembangan karyawan berhubungan dengan usaha-usaha terencana yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan teknis, teoritis, konseptual, dan sikap karyawan atau anggota Perusahaan.

Pengembangan kompetensi karyawan perlu dilaksanakan secara rutin dengan alasan di antaranya:

a. Karyawan baru sering kali belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan;

Employee training and development relates to planned efforts to improve the technical, theoretical, and conceptual knowledge and attitudes of employees or members of the Company.

Employee competency development needs to be carried out regularly for reasons including:

a. New employees often don't understand how to do the job;

b. Terjadi perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja yang meliputi perubahan-perubahan dalam teknologi proses, munculnya metode kerja baru dan semakin beragamnya tenaga kerja yang memiliki latar belakang keahlian, nilai, dan sikap;
c. Daya saing Perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan modal yang dimiliki. Sumber daya manusia merupakan elemen yang terpenting untuk meningkatkan daya saing, karena sumber daya manusia merupakan aspek penentu utama daya saing yang langgeng. Keunggulan bersaing hanya dapat dicapai melalui SDM yang berkualitas;
d. Menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, contohnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan Pemerintah untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja.

Perusahaan senantiasa berupaya untuk menciptakan tenaga kerja yang unggul dan profesional dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis, Perusahaan dengan konsisten berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang meningkatkan kompetensi karyawan, termasuk program pembelajaran dan pengembangan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Program-program yang disusun oleh Divisi Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disesuaikan dengan kebijakan transformasi dan restrukturisasi perusahaan di bidang sumber daya manusia yang berhubungan dengan peningkatan kapabilitas.

Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi karyawan, Perusahaan memiliki metode yang dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:
a. *Job Instruction Training* (latihan instruksi jabatan) yaitu pelatihan yang menggunakan manajer atau supervisor bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja;
b. *Coaching* yaitu bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal dan biasanya tidak terencana, misalnya bagaimana melakukan pekerjaan, bagaimana memecahkan masalah;
c. *Job rotation* yaitu program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda dan dalam bagian yang berbeda dengan organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaan dalam organisasi;
d. *Apprenticeship* yaitu pelatihan yang mengombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktik di lapangan, yaitu setelah sejumlah teori diberikan kepada peserta, peserta dibawa praktik ke lapangan.

Sepanjang tahun 2023, pengembangan kompetensi karyawan telah dilakukan Perusahaan dengan jumlah peserta yang mengikuti program peningkatan kompetensi mencapai 298.800 peserta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 201.833 peserta.

b. There have been changes in the work environment and workforce, which include changes in process technology, the emergence of new work methods, and an increasingly diverse workforce with skill backgrounds, values , and attitudes;
c. Company competitiveness can no longer rely on the capital it has. Human resources are essential for increasing competitiveness because they are the primary determining aspect of lasting competitiveness. Competitive advantage can only be achieved through quality human resources;

d. Adapt to existing regulations, for example, work implementation standards issued by industry associations and the Government to guarantee production quality or occupational safety and health.

The Company always strives to create a superior and professional workforce while facing increasingly dynamic business challenges. The Company is consistently committed to implementing programs that increase employee competency, including learning and development programs for the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees. The programs prepared by the Human Resources Planning and Development Division are adapted to the company's transformation and restructuring policies in human resources related to increasing capabilities.

In implementing employee competency development, the Company has a method which is implemented in the following form:
a. Job Instruction Training is training that uses managers or supervisors to act as trainers to instruct how to do specific jobs in the work process;

b. Coaching is a form of training and development carried out in the workplace by superiors by guiding officers to carry out work informally and usually unplanned, for example, how to do work, how to solve problems;

c. Job rotation is a formally planned program that assigns employees to various jobs in different parts of the organization to increase knowledge about work.;

d. Apprenticeship is training that combines classroom lessons with practice in the field; after several theories have been given to participants, the participants are taken to practice in the field.

Throughout 2023, the Company has carried out employee competency development, with the number of participants participating in the competency improvement program reaching 298,800 participants, an increase compared to 201,833 participants recorded in 2022.

Biaya Pengembangan Kompetensi
Competency Development Costs

	2023 (Rp) (Rp)	2022 (Rp) (Rp)	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp) Difference (Rp)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	147.655.627.298	146.823.415.903	832.211.395	1%

Tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2023, terdapat peningkatan realisasi biaya pelaksanaan program pembelajaran sebesar 1% dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh implementasi *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan kepada seluruh entitas guna memastikan optimalisasi pelaksanaan program learning and development PTPN Group Tahun 2023.

The table above shows that in 2023, there was a 1% increase in the realization of program implementation costs compared to 2022. This increase was due to the implementation of monitoring and evaluation conducted across all entities to ensure the optimization of the PTPN Group's learning and development program in 2023.

Pengembangan Kompetensi SDM Tahun 2023
HR Competency Development in 2023

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
1	*Training Leader as a Coach* dengan tema *"Coaching to Unleash Your Employees Potential"* Training Leader as a Coach with the theme " Coaching to Unleash Your Employees Potential "		Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Indonesian Human Capital Forum (FHCI)	1.000.000		19	Februari February	2023	1
2	19th *Indonesia Palm Oil Conference & 2024 Price Outlook* 19th Indonesia Palm Oil Conference & 2024 Price Outlook		PT Sarana Komunikasi Sawit Indonesia	42.000.000		1	November November	2023	7
3	*Asia Women Leadership Program (AWLP) for* Srikandi - Indonesia Asia Women Leadership Program (AWLP) for Srikandi - Indonesia		Kementerian BUMN Ministry of SOEs			25	Januari January	2023	1

No.	Judul Pelatihan / Training Title	Lembaga Pelaksana / Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) / Training Costs		Waktu Pelaksanaan / Execution time			Jumlah Peserta / Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* / Holding Expenses	Beban Entitas / Entity Expenses	Tanggal / Date	Bulan / Month	Tahun / Year	
4	*Benchmarking* pengelolaan wisata teh di Nishihagima, Kota Makinohara, Prefektur Shizuoka, Jepang / Benchmarking tea tourism management in Nishihagima, Makinohara City, Shizuoka Prefecture, Japan		Forever World LLC 874-2 / FOREVER WORLD LLC 874-2			14	Oktober / October	2023	1
5	*Benchmarking* perkebunan tebu (*On Farm*), pabrik gula (*Off Farm*) dan pengembangan varietas tebu dengan *Sugar Research Australia* / Benchmarking of sugar cane plantations (On Farm), sugar mills (Off Farm) and development of sugar cane varieties with Sugar Research Australia		Bolney Ptd Lte			22	Agustus / August	2023	1
6	CBDO *Innovation School Cohort 1* / CBDO Innovation School Cohort 1		BUMN Leadership & Management Institute / BUMN Leadership & Management Institute	115.000.000		10	Februari / February	2023	1
7	*Certified Securities Analyst* (CSA) / Certified Securities Analyst (CSA)		CSA Institute	10.000.000		10	Juni / June	2023	1
8	CFE *Exam Preparation Course* / CFE Exam Preparation Course		Kementerian BUMN / Ministry of SOEs	30.500.000		4	Juli / July	2023	1
9	*Conference* dan Expo Teknologi Pabrik Kelapa Sawit / Palm Oil Mill Technology Conference and Expo		Media Perkebunan dan Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) / Plantation Media and the Indonesian Plantation Professional Practitioners Association (P3PI)	17.500.000		7	Maret / March	2023	5

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
10	Diklat *Probity* Audit Audit Probity Training		Badan Diklat BPK RI BPK RI Training Agency	9.040.000		21	Agustus August	2023	2
11	*Dual Certification; Regular Technical Analyst* (RTA) & *Reguler Securities Analyst* (RSA) Dual Certification; Regular Technical Analyst (RTA) & Regular Securities Analyst (RSA)		CSA Institute CSA Institute	115.500.000		25	Maret March	2023	11
12	*Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organization Batch 1* Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organization Batch 1	PT LPPAN		67.500.000		14	Agustus August	2023	17
13	*Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organization Batch 2* Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organization Batch 2	PT LPPAN		13.500.000		22	Agustus August	2023	3
14	*Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organization Batch 3* Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organization Batch 3	PT LPPAN		9.000.000		24	Agustus August	2023	2

No.	Judul Pelatihan / Training Title	Lembaga Pelaksana / Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) / Training Costs		Waktu Pelaksanaan / Execution time			Jumlah Peserta / Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* / Holding Expenses	Beban Entitas / Entity Expenses	Tanggal / Date	Bulan / Month	Tahun / Year	
15	*Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organization Batch 4* / Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organization Batch 4	PT LPPAN / PT LPPAN		13.500.000		22	Agustus / August	2023	3
16	*Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organizations Batch 2* / Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organizations Batch 2	PT LPPAN / PT LPPAN		4.500.000		22	Agustus / August	2023	1
17	*Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organizations Batch 4* / Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organizations Batch 4	PT LPPAN / PT LPPAN		4.500.000		28	Agustus / August	2023	1
18	*Enhancing Operational Excellence; Off Farm Program* / Enhancing Operational Excellence; Off Farm Program	PT LPPAN / PT LPPAN		9.000.000		6	November / November	2023	10
19	*ESG Training* / ESG Training		Forum Ekselen Bisnis Indonesia / Indonesian Business Excellence Forum	1.750.000		9	Agustus / August	2023	1
20	*Excellent Public speaking Skills Melalui Agro Wallet* / Excellent Public Speaking Skills Through Agro Wallet	PT LPPAN / PT LPPAN		180.000.000		4	Juli / July	2023	36

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
21	*Executive Risk Management Refreshment Program Batch 4: Sustainable Banking & Finance* Executive Risk Management Refreshment Program Batch 4: Sustainable Banking & Finance		LPPI LPPI	584.750.000		20	Oktober October	2023	2
22	*Financial Skill* Financial Skills	PT LPPAN PT LPPAN				20	Januari January	2023	1
23	*Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2023,* Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2023,		Hukumonline Hukumonline	3.000.000		19	Oktober October	2023	1
24	*Indonesian Oil Palm Conference (IOPC)* Indonesian Oil Palm Conference (IOPC)		Indonesia Oil Palm Research Institute Indonesian Oil Palm Research Institute	65.000.000		14	Maret March	2023	10
25	*International Tax Conference* International Tax Conference		Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)	7.500.000		19	Oktober October	2023	5
26	Kegiatan Konferensi Auditor Internal Internal Auditor Conference Activities		Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)	18.000.000		5	Juli July	2023	3
27	Keluarga Milenial Di Masa Tanggap Corona COVID Millennial Families During the Corona COVID Response Period	PT LPPAN PT LPPAN				20	Januari January	2023	1
28	*Leadership Bootcamp* BUMN Muda Young BUMN Leadership Boot Camp		Forum Human Capital Indonesia (FHCI) The Indonesian Human Capital Forum (FHCI)			27	Oktober October	2023	2
29	LOOP Mentor *Coaching Program Road to* ACC LOOP Mentor Coaching Program Road to ACC		LOOP Institute of Consulting LOOP Institute of Consulting	15.000.000		15	Maret March	2023	1

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
30	Manajemen Anggaran *Batch* 5 Batch 5 Budget Management	PT LPPAN PT LPPAN		6.000.000		25	Oktober October	2023	1
31	MPOB *International Palm Oil Congress and Exhibition* 2023 MPOB International Palm Oil Congress and Exhibition 2023		Malaysian Palm Oil Board Malaysian Palm Oil Board			7	September September	2023	4
32	Musyawarah Nasional dan Konferensi Nasional Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern Tahun 2019 2019 National Conference and National Conference of Internal Audit Unit Communication Forum	PT LPPAN PT LPPAN		18.000.000		3	September September	2023	4
33	*One Day Public Training; Excellent Public Speaking Skills* One Day Public Training; Excellent Public Speaking Skills		Talk Inc Talk Inc	2.500.000		31	Mei May	2023	1
34	*Online Learning:* Penguatan Kompetensi Strategic *Orientation & Driving Execution (Strategic Management in Practices)* Online Learning: Strengthening Strategic Orientation & Driving Execution Competencies (Strategic Management in Practices)	PT LPPAN PT LPPAN		8.000.000		11	November November	2023	12
35	*Online Learning "A Perspective From A True Leader; how to stay sane in uncertain times* Online Learning "A Perspective From A True Leader; how to stay sane in uncertain times	PT LPPAN PT LPPAN				19	Januari January	2023	1

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
36	*Online Learning Legal Aspect of Fraud Investigation and Litigation* Online Learning Legal Aspect of Fraud Investigation and Litigation		Association Certified Fraud Examiners (ACFE) Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)			14	Mei May	2023	5
37	*Online Learning Legal Aspect of Fraud Investigation and Litigation* Online Learning Legal Aspects of Fraud Investigation and Litigation		Association Certified Fraud Examiners (ACFE) Association Certified Fraud Examiners (ACFE)			19	Januari January	2023	4
38	*Online Training GML Performance* & DDI Mengatur Keuangan Keluarga Milenial Di Masa Tanggap Corona COVID 19 Online Training GML Performance & DDI Managing Millennial Family Finances During the Corona COVID 19 Response Period	PT LPPAN PT LPPAN				19	Januari January	2023	1
39	Pelatihan & Sertifikasi dan *Management Body of Knowledge* (DMBOK) Training & Certification and Management Body of Knowledge (DMBOK)		Multimatics Multimatics	29.000.000		13	Maret March	2023	2
40	Pelatihan Akuntansi & Pelaporan Accounting & Reporting Training	PT LPPAN PT LPPAN		64.000.000		17	Oktober October	2023	8
41	Pelatihan ArcGIS Pro ArcGIS Pro Training	PT LPPAN PT LPPAN		425.000.000		30	Januari January	2023	34

No.	Judul Pelatihan / Training Title	Lembaga Pelaksana / Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) / Training Costs		Waktu Pelaksanaan / Execution time			Jumlah Peserta / Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* / Holding Expenses	Beban Entitas / Entity Expenses	Tanggal / Date	Bulan / Month	Tahun / Year	
42	Pelatihan Aspek Akuntansi, Perpajakan dan Legal *Merger*, Akuisisi dan *Spin Off* Training on Accounting, Taxation and Legal Aspects of Mergers, Acquisitions and Spin Offs		Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)	3.500.000		25	Oktober October	2023	2
43	Pelatihan *Certified Securities Analyst* (CSA) Certified Securities Analyst (CSA) Training		CSA Institute CSA Institute	10.000.000		23	September September	2023	1
44	Pelatihan *Coaching for Unleash Potential to Increase Performance* Training for Unleash Potential to Increase Performance		Bulog Corporate University Bulog Corporate University	3.000.000		3	Maret March	2023	1
45	Pelatihan *Company Strategic Planning* Company Strategic Planning Training	PT LPPAN PT LPPAN		8.000.000		1	Agustus August	2023	1
46	Pelatihan dan Uji Kompetensi Auditor ISPO ISPO Auditor Competency Training and Testing	PT LPPAN PT LPPAN		14.000.000		24	Oktober October	2023	2
47	Pelatihan DOMO *Dashboard* PTPN Holding PTPN Holding DOMO Dashboard Training		PT Boston Consulting Indonesia PT Boston Consulting Indonesia			9	November November	2023	30
48	Pelatihan *Effective Performance Management* Effective Performance Management Training	PT LPPAN PT LPPAN		8.000.000		25	September September	2023	2

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
49	Pelatihan *Enhancing Operational Excellence* Program Komoditi Kelapa Sawit *Batch* 6 Training on Enhancing Operational Excellence Palm Oil Commodity Program Batch 6	PT LPPAN PT LPPAN		259,000,000		15	Mei May	2023	14
50	Pelatihan *Enhancing Operational Excellence* Program Komoditi Kelapa Sawit *Batch* 7 Training on Enhancing Operational Excellence Palm Oil Commodity Program Batch 7	PT LPPAN PT LPPAN		166.500.000		15	Mei May	2023	9
51	Pelatihan *Enhancing Operational Excellence* Program Komoditi Kelapa Sawit *Batch* 8 Training on Enhancing Operational Excellence Palm Oil Commodity Program Batch 8	PT LPPAN PT LPPAN		55.500.000		29	Mei May	2023	3
52	Pelatihan *Enhancing Operational Excellence* Program Komoditi Kelapa Sawit *Batch* 9 Training on Enhancing Operational Excellence Palm Oil Commodity Program Batch 9	PT LPPAN PT LPPAN		55.500.000		29	Mei May	2023	3

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
53	Pelatihan *Enhancing Operational Excellence* Program Komoditi Kelapa Sawit Training on Enhancing Operational Excellence for Palm Oil Commodity Program	PT LPPAN PT LPPAN		555.000.000		9	Januari January	2023	30
54	Pelatihan *Excellent Speaking Skills* BOM & BOM-1 Excellent Speaking Skills BOM & BOM-1 Training	PT LPPAN PT LPPAN		19.500.000		25	Agustus August	2023	3
55	Pelatihan *Finance Non Finance* Non-Finance Finance Training	PT LPPAN PT LPPAN		12.000.000		22	Mei May	2023	2
56	Pelatihan *Financial Projection & Valuation* Financial Projection & Valuation Training	PT LPPAN PT LPPAN		6.800.000		15	Agustus August	2023	1
57	Pelatihan *Financial Skills & Corporate Planning Enhancement* Melalui Agro *Wallet* Financial Skills & Corporate Planning Enhancement Training Through Agro Wallet	PT LPPAN PT LPPAN		104.000.000		21	Agustus August	2023	13
58	Pelatihan *Health, Safety, Security, and Environment* (HSSE) Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Training	PT LPPAN PT LPPAN		4.000.000		5	Oktober October	2023	38
59	Pelatihan *How To Deliver A Good Presentation & Slide Writing Module Training* Training How To Deliver A Good Presentation & Slide Writing Module Training		PT Boston Consulting Indonesia PT Boston Consulting Indonesia	4.500.000		29	Agustus August	2023	44

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
60	Pelatihan *How to Pitch Insight through Deep Dive into Data* How to Pitch Insight through Deep Dive into Data training	PT LPPAN LPPAN PT		21.000.000		18	Oktober October	2023	3
61	Pelatihan Hukum & Regulasi Legal & Regulatory Training	PT LPPAN PT LPPAN		6.000.000		25	Oktober October	2023	3
62	Pelatihan *Human Capital Business Partner* Human Capital Business Partner Training	PT LPPAN PT LPPAN		269.800.002		4	September September	2023	38
63	Pelatihan *Infection Update: Practical Diagnostic Stewardship & Therapeutic Skills in Internal Medicine* Training : Practical Diagnostic Stewardship & Therapeutic Skills in Internal Medicine		FK USU USU Faculty of Medicine	1.750.000		27	Oktober October	2023	1
64	Pelatihan *Innovation Through Design* Innovation Through Design Training	PT LPPAN PT LPPAN		4.500.000 4,500,000		22	Agustus August	2023	1
65	Pelatihan Internal *Audit for New Internal Auditor* Internal Audit Training for New Internal Auditors		YPIA YPIA	2.000.000		16	November November	2023	1
66	Pelatihan ISO 20000-1:2018 dan ISO 27001:2022 melalui Agro *Wallet* ISO 20000-1:2018 and ISO 27001:2022 training via Agro Wallet	PT LPPAN PT LPPAN		342.000.000		25	Juli July	2023	57
67	Pelatihan ISO 9001, ISO 14001 dan SMK3 melalui Agro *Wallet* ISO 9001, ISO 14001 and SMK3 training through Agro Wallet	PT LPPAN PT LPPAN		192.000.000		9	Agustus August	2023	32

No.	Judul Pelatihan / Training Title	Lembaga Pelaksana / Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) / Training Costs		Waktu Pelaksanaan / Execution time			Jumlah Peserta / Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* / Holding Expenses	Beban Entitas / Entity Expenses	Tanggal / Date	Bulan / Month	Tahun / Year	
68	Pelatihan Kesadaran dan Inklusi Disabilitas bagi Tim Human Capital BUMN / Disability Awareness and Inclusion Training for the BUMN Human Capital Team		POTENSI Inclusive Talent Management / POTENTIAL Inclusive Talent Management			24	Agustus / August	2023	1
69	Pelatihan Komunikasi Efektif & Teknik Negosiasi / Effective Communication & Negotiation Techniques Training	PT LPPAN / PT LPPAN		2.700.000		15	Desember / December	2023	3
70	Pelatihan *Learn* SAP-ABAP *Reporting Training* / Training Learn SAP-ABAP Reporting Training		PT Perwira Samudera Teknologi / PT Perwira Samudera Teknologi	26.000.000		27	Februari / February	2023	4
71	Pelatihan Manajemen Anggaran / Budget Management Training	PT LPPAN / PT LPPAN		6.000.000		25	Oktober / October	2023	1
72	Pelatihan Manajemen Kas Menengah / Intermediate Cash Management Training	PT LPPAN / PT LPPAN		4.000.000		20	Desember / December	2023	3
73	Pelatihan Manajemen Keuangan / Financial Management Training	PT LPPAN / PT LPPAN		6.000.000		28	Agustus / August	2023	1
74	Pelatihan Manajemen Keuangan Dasar / Basic Financial Management Training	PT LPPAN / PT LPPAN				19	September / September	2023	1
75	Pelatihan Manajemen Risiko / Risk Management Training	PT LPPAN / PT LPPAN		8.000.000		12	Oktober / October	2023	3
76	Pelatihan Manajemen Strategis / Strategic Management Training	PT LPPAN / PT LPPAN		6.000.000		25	September / September	2023	3

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
77	Pelatihan *Masterclass Program Series* XII Masterclass Training Program Series XII		Lemabaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)	10.000.000		31	Agustus August	2023	2
78	Pelatihan *Mastering Public Speaking : Boost Your Confidence* Training : Boost Your Confidence		Eagle Spirit Indonesia Eagle Spirit Indonesia			7	September September	2023	1
79	Pelatihan *Mastering Public Speaking: Boost Your Confidence* Mastering Public Speaking Training : Boost Your Confidenc e		Eagle Spirit Indonesia Eagle Spirit Indonesia	750.000		7	September September	2023	1
80	Pelatihan Mini Raker Transformasi & *Sustainability* PTPN PTPN Transformation & Sustainability Mini Working Meeting Training	PT LPPAN PT LPPAN				7	September September	2023	1
81	Pelatihan *Office Administration & Management* Office Administration & Management Training	PT LPPAN PT LPPAN		77.000.000		12	Oktober October	2023	25
82	Pelatihan Pengadaan Procurement Training	PT LPPAN PT LPPAN		18.000.000		4	Desember December	2023	3
83	Pelatihan Pengelolaan & Penyajian Laporan Keuangan *Holding Company* Training on Management & Presentation of Holding Company Financial Reports		Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Accountants Association (IAI)	2.400.000		14	Oktober October	2023	2
84	Pelatihan Perencanaan Perusahaan I (RKAP) Company Planning Training I (RKAP)	PT LPPAN PT LPPAN				12	September September	2023	1

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
85	Pelatihan Perhitungan *Social Return on Investment* (SROI) Social Return on Investment (SROI) Calculation Training	PT LPPAN PT LPPAN		19.500.000		14	November November	2023	2
86	Pelatihan *Pricing Strategy And Management* Pricing Strategy And Management Training	PT LPPAN PT LPPAN		4.000.000		20	November November	2023	5
87	Pelatihan *Problem Solving* dalam Komunikasi dan Negosiasi Problem Solving Training in Communication and Negotiation	PT LPPAN PT LPPAN		1.300.000		18	Desember December	2023	1
88	Pelatihan QIA Tingkat Dasar Basic Level QIA Training		YPIA YPIA	13.000.000		2	Oktober October	2023	1
89	Pelatihan QIA Tingkat Lanjutan Advanced QIA Training		YPIA YPIA	45.000.000		16	Oktober October	2023	3
90	Pelatihan QIA Tingkat Manajerial Managerial Level QIA Training		YPIA YPIA	27.000.000		13	November November	2023	3
91	Pelatihan *Quality Control DOAT* (Tebu-Industri Gula) DOAT Quality Control Training (Cane-Sugar Industry)	PT LPPAN PT LPPAN		18.000.000		16	Oktober October	2023	3
92	Pelatihan *Quality Control* Karet Rubber Quality Control Training	PT LPPAN PT LPPAN		4.000.000		23	November November	2023	5
93	Pelatihan Sekretariat Perusahaan Company Secretariat Training	PT LPPAN PT LPPAN		16.000.000		2	Oktober October	2023	7
94	Pelatihan Sekretaris Eksekutif Executive Secretary Training		LPK FHCI PRIMA UNGGUL LPK FHCI PRIMA SUPERIOR	7.142.858		16	November November	2023	2

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
95	Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System Training	PT LPPAN PT LPPAN		4.000.000		2	Oktober October	2023	19
96	Pelatihan *Strategic Orientation* 2020 Strategic Orientation Training 2020	PT LPPAN PT LPPAN				2	Januari January	2023	26
97	Pelatihan *Strategy Improvement Capability: Asset Management* Training : Asset Management	PT LPPAN PT LPPAN		44.000.000		19	Oktober October	2023	24
98	Pelatihan *Strategy Improvement Capability: Corporate Legal* Capability Improvement Strategy Training : Corporate Legal	PT LPPAN PT LPPAN		126.000.000		31	Oktober October	2023	21
99	Pelatihan *Strategy Improvement Capability: Feasibility Study* Training : Feasibility Study	PT LPPAN PT LPPAN		54.000.000		23	Oktober October	2023	26
100	Pelatihan *Strategy Improvement Capability: Renewable Energy* Training : Renewable Energy	PT LPPAN PT LPPAN		78.000.000		30	Oktober October	2023	13
101	Pelatihan *Strategy Improvement Capability: Renewable Energy* Capability Improvement Strategy Training : Renewable Energy	PT LPPAN PT LPPAN		42.000.000		30	Oktober October	2023	7
102	Pelatihan *Strategy Improvement Capability: Tax Planning and Management* Training : Tax Planning and Management	PT LPPAN PT LPPAN		73.500.000		23	Oktober October	2023	20
103	Pelatihan *Talent Management* Talent Management Training	PT LPPAN PT LPPAN		6.000.000		25	September September	2023	1

No.	Judul Pelatihan / Training Title	Lembaga Pelaksana / Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) / Training Costs		Waktu Pelaksanaan / Execution time			Jumlah Peserta / Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* / Holding Expenses	Beban Entitas / Entity Expenses	Tanggal / Date	Bulan / Month	Tahun / Year	
104	Pelatihan *Team Building Mini Raker Transformasi & Sustainability* PTPN 2023 Transformation & Sustainability Team Building Mini Raker Training 2023	PT LPPAN PT LPPAN				1	September September	2023	54
105	Pelatihan *Team Building Mini Raker Transformasi & Sustainability* PTPN 2023 Transformation & Sustainability Team Building Mini Raker Training 2023	PT LPPAN PT LPPAN				1	September September	2023	1
106	Pelatihan Teknik Pengolahan Teh Tea Processing Techniques Training	PT LPPAN PT LPPAN		20.000.000		6	November November	2023	2
107	Pelatihan Teknik Pengolahan Teh Tea Processing Techniques Training	PT LPPAN PT LPPAN		10.000.000		6	November November	2023	1
108	Pelatihan *Time Management*, *Project Management Office* (PMO) 101, dan *Meeting Facilitation* Time Management, Project Management Office (PMO) 101, and Meeting Facilitation training		BCG BCG			10	November November	2023	16
109	Pelatihan *Time Management*, *Project Management Office* (PMO) 101, dan *Meeting Facilitation* Time Management, Project Management Office (PMO) 101, and Meeting Facilitation training		BCG BCG			10	November November	2023	1

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
110	Pelatihan *Training of Trainer* (ToT) *Social Media Rangers: Digital Marketing, Marketing Communication & Social Media Marketing* Training of Trainers (ToT) training : Digital Marketing, Marketing Communication & Social Media Marketing		Forum Human Capital Indonesia (FHCI) The Indonesian Human Capital Forum (FHCI)	4.000.000		21	November November	2023	1
111	Pelatihan Transformasi & *Sustainability* Transformation & Sustainability Training	PT LPPAN PT LPPAN		4.700.000		1	September September	2023	17
112	Pelatihan *Understanding Career Planning & Succession* Understanding Career Planning & Succession training	PT LPPAN PT LPPAN				29	November November	2023	1
113	Pembelajaran Bahasa Inggris English learning		Wallstreet English Wallstreet English			24	Januari January	2023	13
114	Pembelajaran Bahasa Inggris bagi Karyawan Pada Direktorat Pemasaran PT Perkebunan Nusantara III (Persero) English Language Learning for Employees at the Marketing Directorate of PT Perkebunan Nusantara III (Persero)		ESQ English Course (EEC) ESQ English Course (EEC)	1.288.000.000		15	November November	2023	28
115	Pembinaan & Sertifikasi MCU Fit to Work Batch II MCU Fit to Work Batch II Coaching & Certification		IHC PHC Education & Training Center IHC PHC Education & Training Center	1.975.001		2	Mei May	2023	1

No.	Judul Pelatihan / Training Title	Lembaga Pelaksana / Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) / Training Costs		Waktu Pelaksanaan / Execution time			Jumlah Peserta / Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* / Holding Expenses	Beban Entitas / Entity Expenses	Tanggal / Date	Bulan / Month	Tahun / Year	
116	Pendidikan dan Pelatihan *Certified Risk Executive Leader* (CREL) *Batch 1* / Certified Risk Executive Leader (CREL) Education and Training Batch 1		Pusdiklat Pengawasan BPKP / BPKP Supervision Education and Training Center	7.050.000		19	September / September	2023	2
117	*Plantation Executive Development Program* (PEDP) Tahun 2019 Batch XVI PTPN Group / Plantation Executive Development Program (PEDP) 2019 Batch XVI PTPN Group	PT LPPAN / PT LPPAN				19	Januari / January	2023	25
118	*Plantation Executive Development Program* (PEDP) Tahun 2019 Batch XVI s.d XVIII PTPN Group / Plantation Executive Development Program (PEDP) 2019 Batch XVI to XVIII PTPN Group	PT LPPAN / PT LPPAN				19	Januari / January	2023	1
119	*Plantation Executive Development Program* (PEDP) Tahun 2019 Batch XVII PTPN Group / Plantation Executive Development Program (PEDP) 2019 Batch XVII PTPN Group	PT LPPAN / PT LPPAN				19	Januari / January	2023	24
120	*Plantation Executive Development Program* (PEDP) Tahun 2019 Batch XVIII PTPN Group / Plantation Executive Development Program (PEDP) 2019 Batch XVIII PTPN Group	PT LPPAN / PT LPPAN				19	Januari / January	2023	27

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
121	*Plantation Leadership Development Program* (PLDP 1) Plantation Leadership Development Program (PLDP 1)	PT LPPAN PT LPPAN		264.000.000		12	April April	2023	22
122	*Plantation Leadership Development Program* (PLDP 3) Plantation Leadership Development Program (PLDP 3)	PT LPPAN PT LPPAN		5.500.000		12	Juli July	2023	1
123	*Plantation Leadership Development Program* (PLDP) 1 Angkatan XII Plantation Leadership Development Program (PLDP) 1 Batch XII	PT LPPAN PT LPPAN		68.900.000		22	Mei May	2023	2
124	*Plantation Leadership Development Program* (PLDP) 2 Angkatan XXIII Plantation Leadership Development Program (PLDP) 2 Batch XXIII	PT LPPAN PT LPPAN		137.000.000		13	Februari February	2023	5
125	*Plantation Leadership Development Program* (PLDP) 2 Angkatan XXIV Plantation Leadership Development Program (PLDP) 2 Batch XXIV	PT LPPAN PT LPPAN		274.000.000		29	Mei May	2023	10
126	*Plantation Leadership Development program* (PLDP) 2 Angkatan XXV Plantation Leadership Development program (PLDP) 2 Batch XXV	PT LPPAN PT LPPAN		54.800.000		10	Juli	2023	2

No.	Judul Pelatihan / Training Title	Lembaga Pelaksana / Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) / Training Costs		Waktu Pelaksanaan / Execution time			Jumlah Peserta / Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* / Holding Expenses	Beban Entitas / Entity Expenses	Tanggal / Date	Bulan / Month	Tahun / Year	
127	*Plantation Leadership Development Program* (PLDP) 3 Bidang Keuangan & Akuntansi Angkatan XIII / Plantation Leadership Development Program (PLDP) 3 in Finance & Accounting Class XIII	PT LPPAN / PT LPPAN		97.600.000		20	Februari / February	2023	4
128	*Plantation Leadership Development Program* (PLDP) 3 Bidang Keuangan & Akuntansi Angkatan XV / Plantation Leadership Development Program (PLDP) 3 in Finance & Accounting Class XV	PT LPPAN / PT LPPAN		219.600.000		22	Mei / May	2023	9
129	*Plantation Leadership Development Program* (PLDP) 3 Bidang Keuangan & Akuntansi Angkatan XVI / Plantation Leadership Development Program (PLDP) 3 in Finance & Accounting Class XVI	PT LPPAN / PT LPPAN		170.800.000		31	Juli / July	2023	7
130	*Plantation Leadership Development Program* (PLDP) 3 Bidang Pendukung Bisnis Angkatan IX / Plantation Leadership Development Program (PLDP) 3 Business Support Fields Batch IX	PT LPPAN / PT LPPAN		122.000.000		29	Mei / May	2023	5

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
131	*Plantation Leadership Development Program* (PLDP) 3 Bidang Pendukung Bisnis Angkatan VIII Plantation Leadership Development Program (PLDP) 3 Business Support Field Batch VIII	PT LPPAN PT LPPAN		146.400.000		13	Februari February	2023	6
132	*Plantation Leadership Development program* (PLDP) 3 Bidang Tanaman dan Teknik Pengolahan Plantation Leadership Development program (PLDP) 3 Fields of Plants and Processing Techniques	PT LPPAN PT LPPAN		73.200.000		19	Juni June	2023	3
133	*Plantation Leadership Development Program* (PLDP) 4 Bidang Tanaman Komoditi Kelapa Sawit Angkatan VI Plantation Leadership Development Program (PLDP) 4 Field of Palm Oil Commodity Plants Batch VI	PT LPPAN PT LPPAN		28.200.000		29	Mei May	2023	2
134	Program Bimbingan Teknis & Sertifikasi Profesi BNSP Bidang Sumber Daya Manusia Level Manajer BNSP Technical Guidance & Professional Certification Program for Manager Level Human Resources	PT LPPAN PT LPPAN		162.500.000		19	Januari January	2023	25

No.	Judul Pelatihan / Training Title	Lembaga Pelaksana / Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) / Training Costs		Waktu Pelaksanaan / Execution time			Jumlah Peserta / Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* / Holding Expenses	Beban Entitas / Entity Expenses	Tanggal / Date	Bulan / Month	Tahun / Year	
135	Program Bimbingan Teknis & Sertifikasi Profesi BNSP Bidang Sumber Daya Manusia Level Supervisor BNSP Technical Guidance & Professional Certification Program in Human Resources Supervisor Level	PT LPPAN PT LPPAN		148.500.000		19	Januari January	2023	27
136	Program *Making Digital Talent* BUMN BUMN Making Digital Talent Program		Kementerian BUMN Ministry of SOEs			19	Januari January	2023	104
137	PT LPP Agro Nusantara PT LPP Agro Nusantara	PT LPPAN PT LPPAN				19	Januari January	2023	1
138	RCC (Perpanjangan) A QRMP & *Certification Renewal* ERMCP RCC (Renewal) A QRMP & Certification Renewal ERMCP		Lembaga Sertifikasi LSP MKS dan CRMS LSP MKS and CRMS Certification Institute	3.700.000		30	Mei May	2023	1
139	RCC (Perpanjangan) Sertifikasi Manajemen Risiko QCRO RCC (Renewal) QCRO Risk Management Certification		Lembaga Sertifikasi LSP MKS dan CRMS LSP MKS and CRMS Certification Institute	5.000.000		19	Januari January	2023	2
140	*Refreshment Basic Plantation Management* Komoditas Teh, Kopi, dan, Kakao Refreshment Basic Plantation Management Commodities Tea, Coffee, and, Cocoa	PT LPPAN PT LPPAN				19	Januari January	2023	2
141	*Refreshment Basic Training* Tanaman Tebu Ptpn Group Refreshment Basic Training Ptpn Group Sugar Cane Plant	PT LPPAN PT LPPAN		1.252.500.000		5	Oktober October	2023	501

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
142	*Risk Management Maturity Assessment* Risk Management Maturity Assessment		CRMS (Center for risk management & Sustainability) Indonesia CRMS (Center for risk management & Sustainability) Indonesia	17.000.000		29	Mei May	2023	2
143	Seminar Nasional Orthopedi Primaya Hospital Group Primaya Hospital Group Orthopedic National Seminar		Primaya Hospital Primaya Hospital			15	November November	2023	1
144	Sertifikasi HR Skema Manajer HR Scheme Manager Certification	PT LPPAN PT LPPAN		97.500.000		22	Maret March	2023	15
145	Sertifikasi Skema Manajer Manager Scheme Certification	PT LPPAN PT LPPAN		13.000.000		22	Maret March	2023	2
146	Sertifikasi *Update RPL (Remote Pilot License)* FASI RPL (Remote Pilot License) Update Certification		Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Indonesian Aero Sport Federation (FASI)	2.480.000		2	Februari February	2023	1
147	Special Directorship Program Special Directorship Program		Indonesia Institute For Corporate Directorship Indonesia Institute For Corporate Directorship	60.000.000		26	Juli July	2023	4
148	*Stewardship and Portfolio Management Training Program* Tahun 2023 Stewardship and Portfolio Management Training Program in 2023		Forum Human Capital Indonesia (FHCI) The Indonesian Human Capital Forum (FHCI)	84.024.215		7	November November	2023	1
149	Teknik Analisis & *Forecasting* Analysis & Forecasting Techniques	PT LPPAN PT LPPAN		12.000.000		11	Oktober October	2023	2
150	*Thailand Sugar Conference* 2023 Thailand Sugar Conference 2023		Fireworks Exhibitions and Conferences Fireworks Exhibitions and Conferences	1.170		14	September September	2023	6

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
151	The 4th Indonesia *Human Capital Summit* (IHCS 2023) The 4th Indonesia Human Capital Summit (IHCS 2023)		Forum Human Capital Indonesia (FHCI) The Indonesian Human Capital Forum (FHCI)			6	November November	2023	19
152	Training Assessment Center: Assessment Development Training Assessment Center: Assessment Development		Asosiasi Psikologi Industri & Organisasi (APIO) Association of Industrial & Organizational Psychology (APIO)	8.500.000		7	Agustus August	2023	1
153	*Training* dan Sertifikasi RSA Training and Certification		Lembaga Sertifikasiku Sertifikasiku Institute	4.000.000		27	Februari February	2023	1
154	*Training* dan Sertifikasi RTA Training and Certification		Lembaga Sertifikasiku My Certification Institute	4.500.000		1	Desenber December	2023	1
155	*Training Leader as a Coach* dengan tema *"Coaching to Unleash Your Employees Potential"* Training Leader as a Coach with the theme " Coaching to Unleash Your Employees Potential "		Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Indonesian Human Capital Forum (FHCI)	2.000.000		19	Februari February	2023	2
156	*Training of Trainer (ToT) Social Media Rangers:* Digital Desain Grafis, Video *Editing* & *Video Content Creator* Training of Trainer (ToT) Social Media Rangers: Digital Graphic Design, Video Editing & Video Content Creator		Forum Human Capital Indonesia (FHCI) The Indonesian Human Capital Forum (FHCI)	4.000.000		5	Desember December	2023	3
157	*Training* Sertifikasi CRMO (*Certified Risk Management Officer*) CRMO Certification Training (Certified Risk Management Officer)		RAP Indonesia RAP Indonesia	5.000.000		3	Oktober October	2023	1

No.	Judul Pelatihan Training Title	Lembaga Pelaksana Organizer		Biaya Pelatihan (Rp) Training Costs		Waktu Pelaksanaan Execution time			Jumlah Peserta Number of participants
		PT LPPAN	Non PT LPPAN	Beban *Holding* Holding Expenses	Beban Entitas Entity Expenses	Tanggal Date	Bulan Month	Tahun Year	
158	*Workshop A New Perspective of Wellness Program at Workplace* Workshop A New Perspective of Wellness Program at Workplace		Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Association of Occupational Medicine Specialists	3.400.000		24	Februari February	2023	1
159	*Workshop* Ketenagakerjaan Nasional National Employment Workshop		Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Informasi Publik Central Institute for the Study and Development of Public Information	5.000.000		15	November November	2023	1
160	*Workshop* Nasional *Online* Audit Internal K3 Workshop on K3 Internal Audit		Pusat Pengkajian &/ Pengembangan Publik (P3IP) Center for Public Research &/ Development (P3IP)	5.000.000		25	Januari January	2023	1
151	*The 4th Indonesia Human Capital Summit* (IHCS 2023) The 4th Indonesia Human Capital Summit (IHCS 2023)		Forum Human Capital Indonesia (FHCI) The Indonesian Human Capital Forum (FHCI)			6	November November	2023	19
161	*Workshop* Penguatan Kompetensi *Strategic Orientation & Driving Execution* PTPN Group PTPN Group Strategic Orientation & Driving Execution Competency Strengthening Workshop	PT LPPAN PT LPPAN				11	November November	2023	2
162	*Workshop* Retail Perkebunan Nusantara Group Perkebunan Nusantara Group Retail Workshop	PT LPPAN PT LPPAN		24.472.327		26	Januari January	2023	11

PENGEMBANGAN KARIER, PROMOSI DAN MUTASI
CAREER DEVELOPMENT, PROMOTION, AND TRANSFER

Perusahaan berupaya memfasilitasi pencapaian Faktor Kesuksesan Karier (CSF) dengan melaksanakan program pengembangan karier yang disesuaikan dengan berbagai faktor kunci. Ini mencakup strategi promosi dan rotasi sebagai elemen kunci dalam manajemen sumber daya manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan potensi talenta setiap individu. Melalui implementasi strategis promosi dan rotasi, setiap karyawan diberikan kesempatan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang operasi dan bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan. Kebijakan ini dirancang untuk memperkenalkan karyawan kepada prosedur, sistem, kebijakan, aktivitas rutin, dan visi yang diusung oleh Perusahaan.

The company seeks to facilitate the achievement of Career Success Factors (CSF) by implementing career development programs tailored to various vital factors. It includes promotion and rotation strategies as crucial elements in human resource management, aimed at increasing the talent potential of each individual. Through the strategic implementation of promotions and rotations, every employee is allowed to gain a comprehensive understanding of the operations and business run by the Company. This policy is designed to introduce employees to the procedures, systems, policies, routine activities, and vision promoted by the Company.

KESEJAHTERAAN KARYAWAN, LINGKUNGAN KERJA, DAN KESETARAAN KESEMPATAN
EMPLOYEE WELFARE, WORK ENVIRONMENT, AND EQUAL OPPORTUNITIES

Perusahaan menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan karyawan dengan menetapkan gaji atau honor sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota, menyediakan berbagai tunjangan, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, dan pengelolaan dana pensiun oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun). Untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, Perusahaan juga menyediakan fasilitas ibadah, mengadakan forum komunikasi korporasi, dan memfasilitasi pembentukan komunitas karyawan. Dalam upaya pengembangan profesional, semua karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi mereka tanpa diskriminasi.

The company emphasizes its commitment to employee welfare by setting salaries or honorariums following the Regency/City Minimum Wage, providing various allowances and social security through BPJS Employment, health insurance, and managing pension funds by the Plantation Pension Fund (Dapenbun). To create a supportive work environment, the Company also provides prayer facilities, holds corporate communication forums, and facilitates the formation of employee communities. In professional development efforts, all employees are given equal opportunities to improve their competencies without discrimination.

Penilaian kinerja tahunan dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional bisnis dan hak-hak karyawan, dengan sistem *reward* dan *punishment* yang adil. Kinerja yang memuaskan dihargai dengan insentif, bonus, promosi, dan lainnya, sementara pelanggaran ditangani sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penghargaan berdasarkan masa kerja menunjukkan apresiasi terhadap dedikasi karyawan, sementara dukungan terhadap kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja.

Annual performance assessments are carried out to balance business operational needs and employee rights with a fair reward and punishment system. Satisfactory performance is rewarded with incentives, bonuses, promotions, etc., while violations are handled according to established regulations. Awards based on years of service show appreciation for employee dedication, while support for extracurricular activities is expected to increase productivity and job satisfaction.

Perusahaan percaya bahwa sebuah lingkungan kerja yang nyaman dari segala aspek akan meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesuksesan Perusahaan secara keseluruhan. Dengan

The Company believes that a comfortable work environment from all aspects will increase employee loyalty and productivity, contributing to the Company's overall success. By creating a positive and efficient work environment, the

menciptakan lingkungan kerja yang positif dan efisien, Perusahaan berupaya meningkatkan kapasitas SDM dan membangun sebuah organisasi yang ramping dan efektif.

Company strives to increase HR capacity and build a lean and effective organization.

Pemenuhan Hak dan Penghargaan bagi Karyawan

Fulfillment of Rights and Rewards for Employees

Kebijakan pemenuhan hak karyawan diadopsi oleh Perusahaan sebagai strategi penting untuk memberikan apresiasi kepada karyawan, dengan mempertimbangkan kapasitas finansial Perusahaan. Ini bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika demografi karyawan, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan sebagai langkah strategis untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis Perusahaan. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan, serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam memberikan kinerja terbaik yang mendukung visi, misi, dan strategi keseluruhan Perusahaan.

The Company adopted the policy of fulfilling employee rights as an essential strategy to provide appreciation to employees, considering the Company's financial capacity. This aims to adapt to employee demographic dynamics, manage labor costs, and as a strategic step to support achieving the Company's business goals. The main objective of this strategy is to attract, retain, and motivate employees, as well as increase their involvement in providing the best performance that supports the Company's vision, mission, and overall strategy.

Lebih lanjut, remunerasi atau imbalan yang Perusahaan berikan kepada karyawan menegaskan komitmen Perusahaan dalam memenuhi standar Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K) yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah masing-masing unit kerja. Selain itu, kompensasi dan fasilitas kesejahteraan karyawan dirancang sesuai dengan ketentuan dan regulasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, termasuk standar upah yang berlaku. Dalam aspek kesehatan, Perusahaan menyediakan fasilitas BPJS Kesehatan, yang bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di Perusahaan.

Furthermore, the remuneration or rewards that the Company provides to employees confirms the Company's commitment to meeting the Provincial/Regency/City Minimum Wage (UMP/K) standards set by the government in each work unit area. In addition, employee compensation and welfare facilities are designed following the provisions and regulations of the Ministry of Manpower and Transmigration, including applicable wage standards. In terms of health, the Company provides BPJS Health facilities, which aim to provide security and comfort guarantees for employees in carrying out their duties and responsibilities at the Company.

Jumlah Remunerasi yang Diberikan kepada Karyawan
Amount of Remuneration Given to Employees

Tahun Year	Jumlah Remunerasi Amount of Remuneration	Jumlah Karyawan Number of employees
2023	Rp 1.572.393.097.160	17.132 orang/people
2022	Rp1.591.285.402.331	21.252 orang/people
2021	Rp1.580.013.385.099	21.073 orang/people

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Highest and Lowest Salary Ratio

Rasio Ratio	Skala Perbandingan Comparison Scale
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest and lowest employee salaries	8,0:1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest and lowest Directors' salaries	1,2:1
Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah The ratio of the highest and lowest salaries for the Board of Commissioners	1,1:1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Karyawan yang tertinggi The highest salary ratio for Directors and Employees is the highest	17,9:1

Program Pensiun

Berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama Induk (PKB Induk) yang berlaku sejak tahun 2022 hingga 2023, Perusahaan memberikan imbalan jasa dalam bentuk program pensiun dan santunan hari tua dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Program Pensiun**
   a. Karyawan diikutsertakan dalam program Jaminan Hari Tua atau Pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) dan/atau DPLK;
   b. Karyawan yang diterima bekerja pada tahun 2009 dan seterusnya diikutsertakan dalam Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
   c. Karyawan yang diterima bekerja pada tahun 2016 dan seterusnya diikutsertakan dalam Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

2. **Santunan Hari Tua**
   Karyawan yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan dan berhak atas Pensiun Normal atau Pensiun Dipercepat, Pensiun Cacat, Pensiun Meninggal Dunia/ Tewas serta belum pernah mendapat fasilitas membeli rumah dinas dari Perusahaan/Negara memperoleh Santunan Hari Tua dalam bentuk uang tunai yang besarnya didasarkan atas lamanya masa kerja efektif pada Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Karyawan *Grade* 6-10
      Masa kerja sampai dengan 20 tahun, sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) bulan gaji pokok untuk tiap tahun masa kerja dan masa kerja lebih dari 20 tahun sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) bulan gaji pokok untuk tiap tahun masa kerja.
   b. Karyawan *Grade* 11-22
      Masa kerja sampai dengan 20 tahun sebesar 2 (dua) bulan gaji Pokok untuk tiap tahun masa kerja dan masa kerja lebih dari 20 tahun sebesar 3 (tiga) bulan gaji Pokok untuk tiap tahun masa kerja.
   c. Pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) kepada karyawan dibayarkan pada saat yang bersangkutan memasuki masa pensiun dan pembayaran panjar sebesar 80% dibayarkan kepada yang bersangkutan pada saat Masa Bebas Tugas (MBT) dan Pembayaran Rampung diberikan pada saat penetapan jatuh tempo pensiun.
   d. Terhadap karyawan baru yang diangkat/direkrut pada tahun 2022 dan seterusnya, memperoleh santunan hari tua (SHT) dalam bentuk pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pension Program

Based on the provisions of the Master Collective Labor Agreement (Master CLA), which is valid from 2022 to 2023, the Company provides service compensation in the form of a pension program and old age benefits with the following conditions:

1. **Pension Program**
   a. Employees are included in the Old Age Security or Pension program organized by the Plantation Pension Fund (DAPENBUN) and/or DPLK;
   b. Employees accepted to work in 2009 and onwards are included in the Defined Contribution Pension Program (PPIP) of the Financial Institution Pension Fund (DPLK);
   c. Employees accepted to work in 2016 and onwards are included in the BPJS Employment Pension Guarantee Program.

2. **Old Age Compensation**
   Employees who are honorably dismissed from the Company and are entitled to a Normal Pension or Accelerated Pension, Disability Pension, Death Pension, and have never had the facility to purchase an official residence from the Company/State receive Old Age Compensation in the form of cash, the amount of which is based on the length of service. Practical work at the Company with the following conditions:
   a. Employees Grade 6-10
      Work period of up to 20 years, amounting to 1.25 (one point twenty-five) months basic salary for each year of service, and work period of more than 20 years amounting to 1.75 (one point seventy-five) months basic salary for each year years of service.
   b. Employees Grade 11-22
      A work period of up to 20 years is 2 (two) months of basic salary for each year of service, and a work period of more than 20 years is 3 (three) months of basic salary for each year.
   c. Old Age Compensation (SHT) employee payments are paid when the person concerned enters retirement. A down payment of 80% is paid to the person concerned during the Free Duty Period (MBT), and Completion Payment is given when the pension is due.
   d. New employees appointed/recruited in 2022 and beyond will receive old-age compensation (SHT) through severance pay, long service awards, and compensation for rights following applicable statutory provisions.

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KEBEBASAN BERORGANISASI
INDUSTRIAL RELATIONS AND FREEDOM OF ORGANIZATION

Perusahaan berkomitmen pada pemeliharaan hubungan industrial yang berfokus pada penciptaan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan produktif antara karyawan dan manajemen. Dalam rangka mendukung komitmen ini, Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk bergabung dan beraktivitas dalam Serikat Pekerja Perusahaan, dikenal dengan nama Serikat Pekerja Perkebunan (SPBun). Kegiatan Serikat Pekerja ini mencakup segala aspek yang berhubungan dengan hubungan industrial, termasuk advokasi untuk anggota dan penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan, menegaskan dedikasi Perusahaan dalam mendukung hak-hak karyawan dan pengembangan profesional mereka.

The Company is committed to maintaining industrial relations, which focuses on creating a healthy, harmonious, and productive work environment between employees and management. To support this commitment, the Company allows employees to join and carry out activities in the Company's Workers' Union, known as the Plantation Workers' Union (SPBun). The activities of this Trade Union cover all aspects of industrial relations, including advocacy for members and the organization of employment training, confirming the Company's dedication to supporting employee rights and their professional development.

Nama | Name	Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Federation of Plantation Workers' Unions
Ketua Umum | General Chairperson	Asmanuddin Sinaga
Periode Jabatan | Period of Office	2021-2026
Alamat | Address	Gedung Gula Negara, Jl. K.H Fakhrudin No. 14 Tanah Abang, Jakarta Pusat Gula Negara Building, Jl. KH Fakhrudin No. 14 Tanah Abang, Central Jakarta
Telepon | Phone	021 3919392
Faksimile | Faximlie	021 3919392

Analisis dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS OF COMPANY PERFORMANCE





Pada sisi keuangan, Perseroan berhasil membukukan perolehan yang baik di tahun 2023. Total aset per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp143,90 triliun, mencapai 94,13% dari target RKA

On the financial front, the Company achieved strong performance in 2023. As of December 31, 2023, total assets amounted to Rp143.90 trillion, reaching 94.13% of the RKAP target.

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI
ECONOMIC AND INDUSTRY REVIEW

Tinjauan Perekonomian

Pada penghujung tahun 2023, situasi perekonomian global masih dihadapkan oleh dinamika risiko dan penuh tantangan. Secara umum, pertumbuhan perekonomian global pada triwulan III tahun 2023 cenderung lemah, dan risiko yang dimiliki semakin meningkat. Hingga akhir tahun 2023, Badan Kebijakan Fiskal menyebutkan bahwa tren inflasi global akan terus melanjutkan penurunan, dan hal ini mengindikasikan bahwa strategi kebijakan moneter *high for longer* masih akan terus berlanjut. Selain itu dengan meningkatnya tensi geopolitik yang terjadi di berbagai belahan dunia telah mendorong fragmentasi ekonomi yang akhirnya menyebabkan meningkatnya disrupsi rantai pasok global, terbatasnya arus perdagangan dan investasi, serta menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi.

Pada belahan Negara lain, Badan Kebijakan Fiskal, menyebutkan bahwa, perekonomian AS per Oktober 2023 telah mengalami penurunan inflasi hingga ke angka 3,2% (yoy). Angka tersebut lebih rendah setengahnya dibanding tahun 2022, yakni 7,7% (yoy). Serupa dengan AS, hingga November tahun 2023, Uni Eropa telah mengalami penurunan inflasi dengan angka 2,4% (yoy). Tren rendahnya inflasi di sejumlah Negara disebabkan oleh turunnya harga beberapa komoditas global, baik energi maupun pangan. Perkembangan ekonomi di berbagai Negara ini juga disebabkan oleh membaiknya persediaan dan permintaan yang saat ini masih terbatas.

Berlawanan dengan kondisi ekonomi global yang saat ini masih mengalami pasang surut, aktivitas ekonomi Indonesia masih menunjukan pertumbuhan kearah yang lebih baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah tumbuh sebesar 5,05%, meskipun lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. TIngginya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 ditopang oleh sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 13,96%. Sementara

Economic Review

At the end of 2023, the global economic situation continued to face dynamic risks and significant challenges. Generally, global economic growth in the third quarter of 2023 was weak, with increasing risks. By the end of 2023, the Fiscal Policy Agency indicated that the global inflation trend would continue to decline, suggesting that the high-for-longer monetary policy strategy would persist. Additionally, the rise in geopolitical tensions in various parts of the world has driven economic fragmentation, leading to increased disruptions in global supply chains, limited trade and investment flows, and a reduced economic growth outlook.

In other regions, the Fiscal Policy Agency noted that as of October 2023, the US economy experienced a decrease in inflation to 3.2% (year-on-year). This figure is half of the inflation rate in 2022, which was 7.7% (year-on-year). Similarly, by November 2023, the European Union experienced a decrease in inflation to 2.4% (year-on-year). The low inflation trend in several countries was due to declining prices of various global commodities, including energy and food. Economic developments in various countries were also driven by improvements in supply and demand, which remain limited.

Contrary to the fluctuating global economic conditions, Indonesia's economic activities continued to show positive growth. According to the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economic growth in 2023 was recorded at 5.05%, although it was lower than the 2022 growth rate of 5.31%. The high economic growth in Indonesia in 2023 was supported by the Transportation and Warehousing Business Sector, which grew by 13.96%. On the expenditure side, the highest growth was achieved by Non-Profit Institutions Serving Households (NPISH) Consumption Expenditure, which was recorded at

pada sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tercatat sebesar 9,83%.

Seiring dengan proses pemulihan ekonomi nasional yang terus membaik pasca pandemi Covid-19 serta perang berkepanjangan antara Rusia-Ukraina, Pemerintah terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi nasional terus meningkat dan stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga. Melalui berbagai program pemulihan ekonomi, serta kebijakan moneter dan sektor keuangan yang dilakukan Pemerintah telah membantu dan memberikan dorongan besar bagi pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2023. Meskipun kedepannya, pertumbuhan ekonomi nasional akan terus menghadapi berbagai tantangan baru, namun melalui optimisme dan strategi yang tepat guna serta kebijakan tangguh dan lincah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terjaga, kokoh, serta mampu menghadapi badai tantangan global dan domestik di 2024.

Tinjauan Industri

Pada tahun 2023, Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas telah melaporkan bahwa pertumbuhan produk Domestik Bruto atau PDB sektor Industri pengolahan di triwulan III-2023 telah mengalami pertumbuhan sebesar 5,2%. Hasil dari pertumbuhan tersebut menunjukan tren positif dan meningkat dibanding triwulan II 2023.

Melesatnya pertumbuhan di sektor industri pengolahan disebabkan oleh subsektor Industri makanan dan minuman serta Industri logam dasar. Tingginya peran Industri logam dasar terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keberhasilan program hilirisasi industri yang secara konsisten dijalankan pemerintah serta proyek-proyek infrastruktur termasuk pembangunan IKN.

Lajunya industri barang logam yang telah mengalami pertumbuhan hingga 13,68% (yoy), dipengaruhi oleh lonjakan permintaan domestik yang kuat. Selain itu, sub sektor lain yang mencapai pertumbuhan positif pada triwulan III tahun 2023 ialah Industri Pengolahan Tembakau yang mengalami pertumbuhan sebesar 13,28%, (yoy).

9.83%.

Along with the continuous improvement of the national economic recovery post-COVID-19 pandemic and the prolonged Russia-Ukraine war, the Government continues its efforts to ensure national economic growth increases and economic stability is maintained. Through various economic recovery programs and monetary and financial sector policies implemented by the Government, significant support and encouragement have been provided for Indonesia's economic recovery in 2023. Although national economic growth will continue to face new challenges in the future, with optimism, appropriate strategies, and resilient and agile policies, Indonesia's economic growth can be sustained, robust, and capable of weathering global and domestic challenges in 2024.

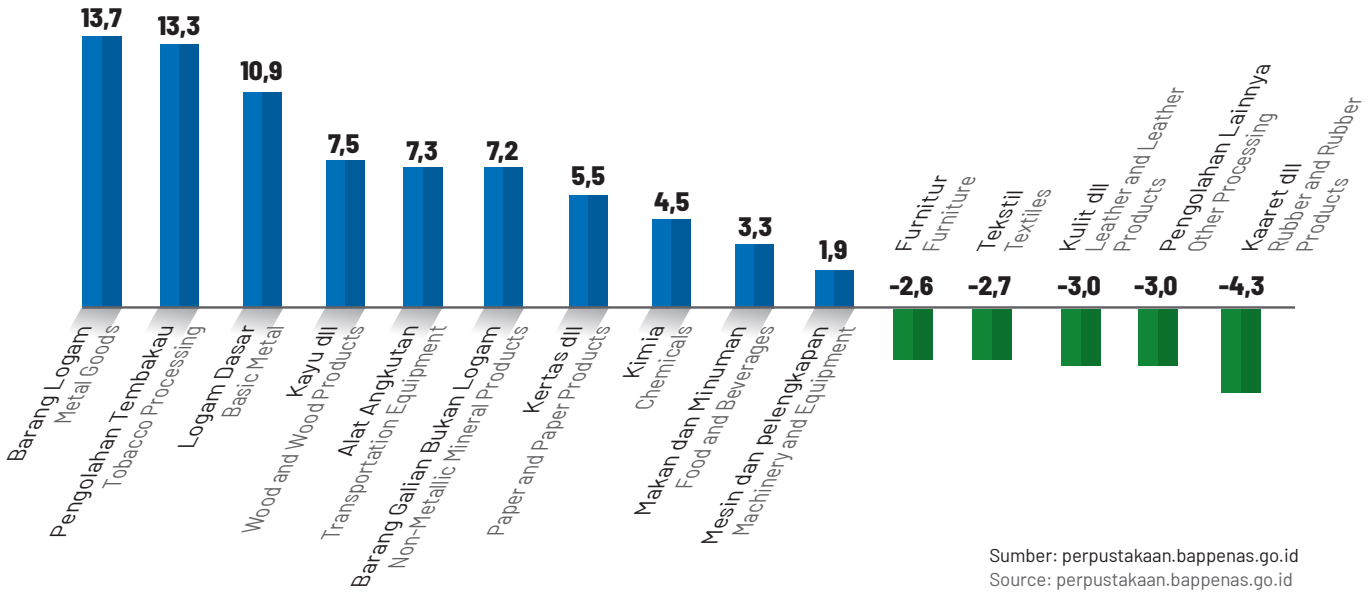
Industry Review

In 2023, the Deputy for Economic Affairs at the Ministry of National Development Planning/Bappenas reported that the Gross Domestic Product (GDP) growth for the manufacturing sector in the third quarter of 2023 was 5.2%. This growth demonstrates a positive and increasing trend compared to the second quarter of 2023.

The food and beverage sub-sector and the basic metal industry drove significant growth in the manufacturing sector. The substantial contribution of the basic metal industry to economic growth is attributable to the successful industrial down-streaming programs consistently implemented by the government, as well as infrastructure projects, including the development of the new capital city (IKN).

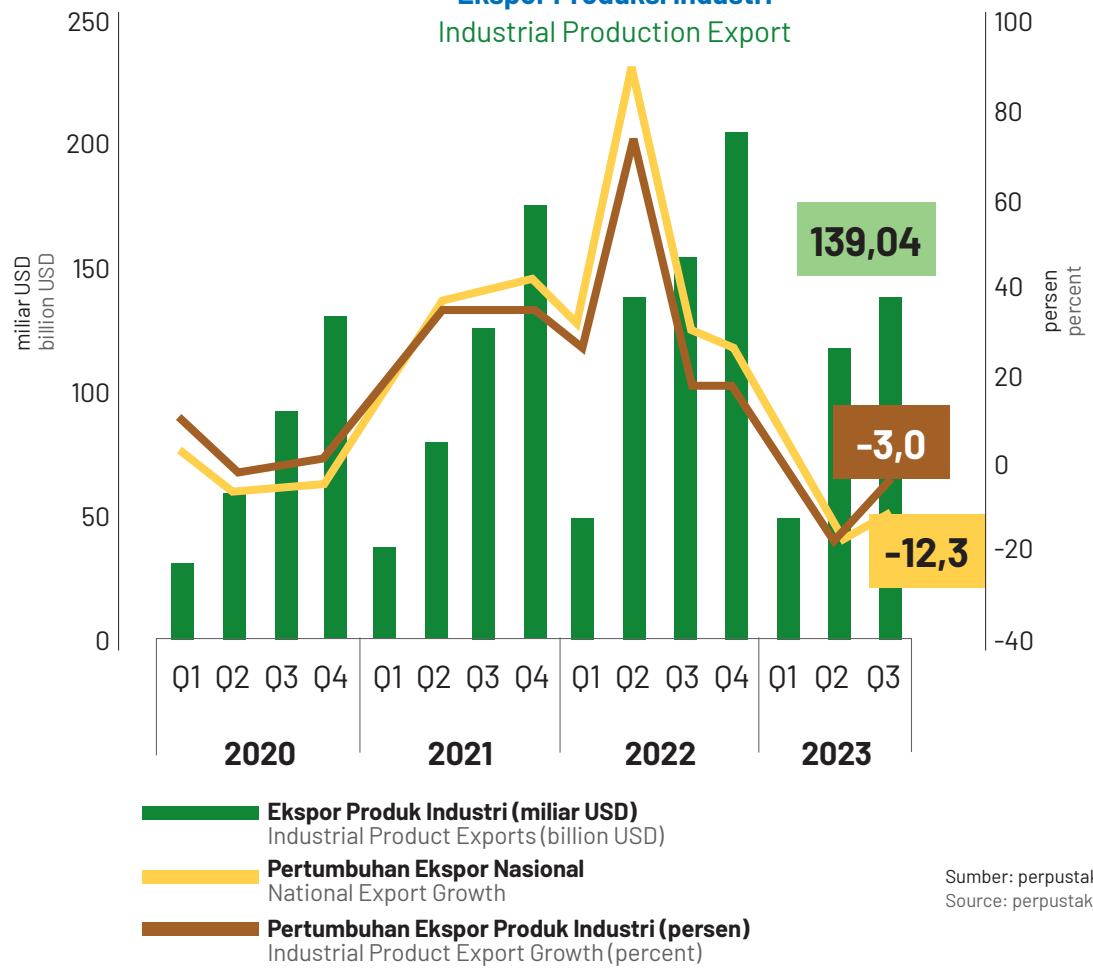
The metal goods industry has experienced a growth rate of 13.68% (year-on-year), driven by a strong surge in domestic demand. Additionally, another sub-sector that achieved positive growth in the third quarter of 2023 is the Tobacco Processing Industry, which grew by 13.28% (year-on-year).

Pertumbuhan Subsektor Industri Pengolahan Non Migas Triwulan III-2023
Growth of Non-Oil and Gas Manufacturing Sub-Sector in Q3-2023



Sumber: perpustakaan.bappenas.go.id
Source: perpustakaan.bappenas.go.id

Ekspor Produksi Industri
Industrial Production Export



Sumber: perpustakaan.bappenas.go.id
Source: perpustakaan.bappenas.go.id

Di sisi lain, terdapat sektor industri yang telah mengalami penurunan, yakni industri karet. Selama triwulan III-2023, industri karet telah mengalami penurunan sebesar -4,34% (yoy). Turunnya harga karet di pasar global sejak 2022 telah menyebabkan banyak petani karet yang tidak melakukan pemanenan karetnya, dan menyebabkan industri karet mengalami kesulitan bahan baku karet alam.

Selanjutnya, pada sektor ekspor industri pengolahan, Bappenas menyebutkan bahwa nilai ekspor produk industri pengolahan di triwulan III-2023 adalah sebesar USD139,04 miliar, dan mengalami penurunan sebesar 3,03% (yoy). turunnya nilai ekspor ini dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas ekspor unggulan Indonesia di pasar global dibanding tahun sebelumnya. Salah satu produk tersebut ialah minyak kelapa sawit yang pada 5 (lima) tahun sebelumnya telah mencapai level tertinggi yakni 7.104 Ringgit/ton, namun di bulan September 2023 telah mengalami penurunan di angka 3.722 Ringgit/ton.

On the other hand, there is an industrial sector that has experienced a decline, namely the rubber industry. During the third quarter of 2023, the rubber industry saw a decrease of -4.34% (year-on-year). The decline in rubber prices in the global market since 2022 has led many rubber farmers to cease harvesting their rubber, causing the rubber industry to face difficulties in sourcing natural rubber raw materials.

Furthermore, in the manufacturing export sector, Bappenas reported that the export value of manufacturing products in the third quarter of 2023 was USD 139.04 billion, experiencing a decline of 3.03% (year-on-year). This decrease was influenced by the declining prices of Indonesia's key export commodities in the global market compared to the previous year. One such product is palm oil, which reached a peak of 7,104 Ringgit/ton in the past five years but had decreased to 3,722 Ringgit/ton by September 2023.



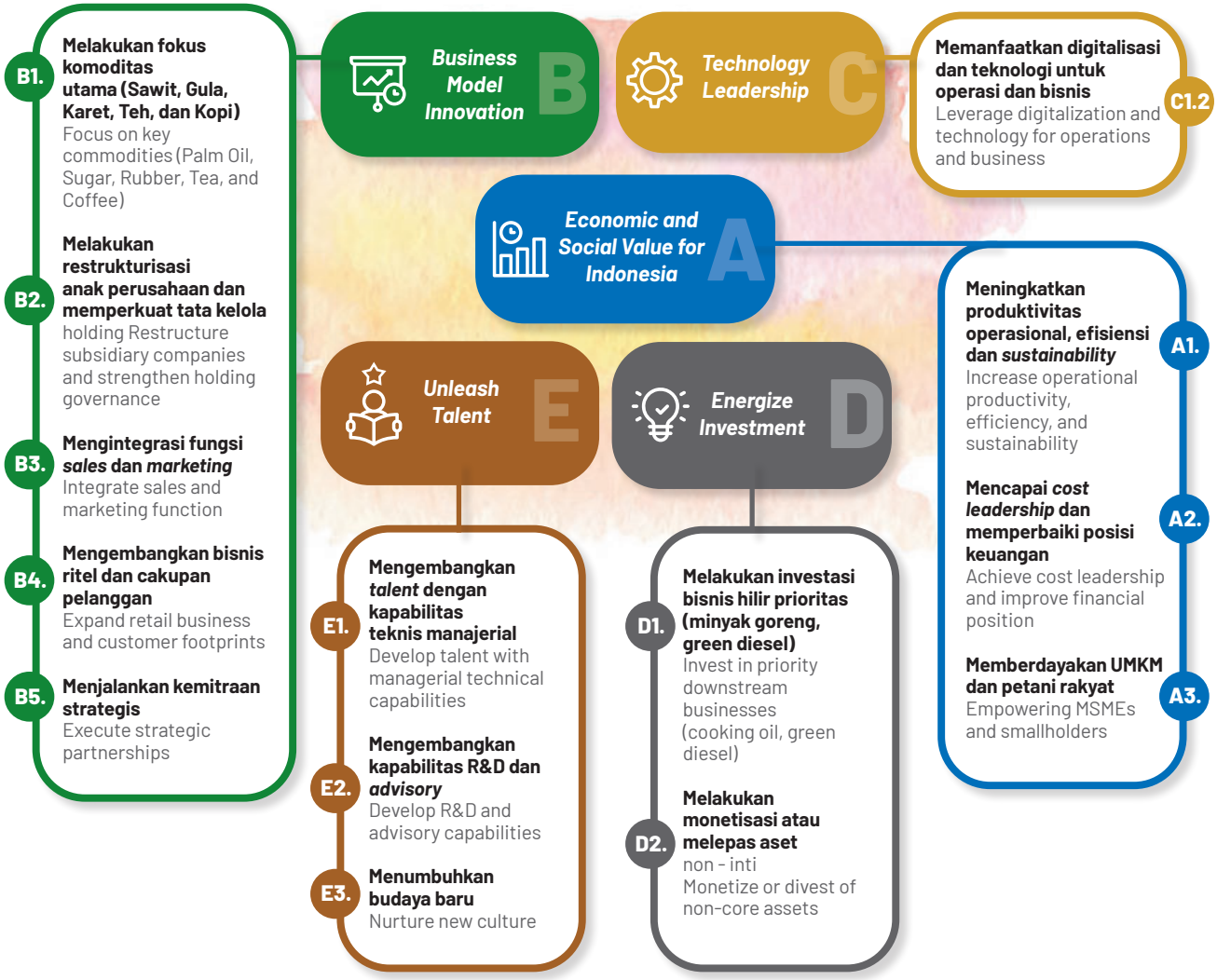
RENCANA DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN
COMPANY'S STRATEGIC PLANS AND POLICIES

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024 dengan tujuan untuk memperkuat posisi Perseroan sebagai agen pembangunan nasional di bidang sektor perkebunan. Adapun isi dari RJPP adalah mengenai strategi utama untuk memaksimalkan kinerja Perusahaan.

Implementasi RJPP periode 2020-2024 merupakan kelanjutan dari proses transformasi RJPP sebelumnya, yakni RJPP 2019-2023. Secara garis besar, RJPP 2020-2024 disusun atas 5 strategi utama dan 14 inisiatif strategis sesuai dengan program prioritas KBUMN yang tergambar pada 5 (lima) perisai (*shield*) KBUMN.

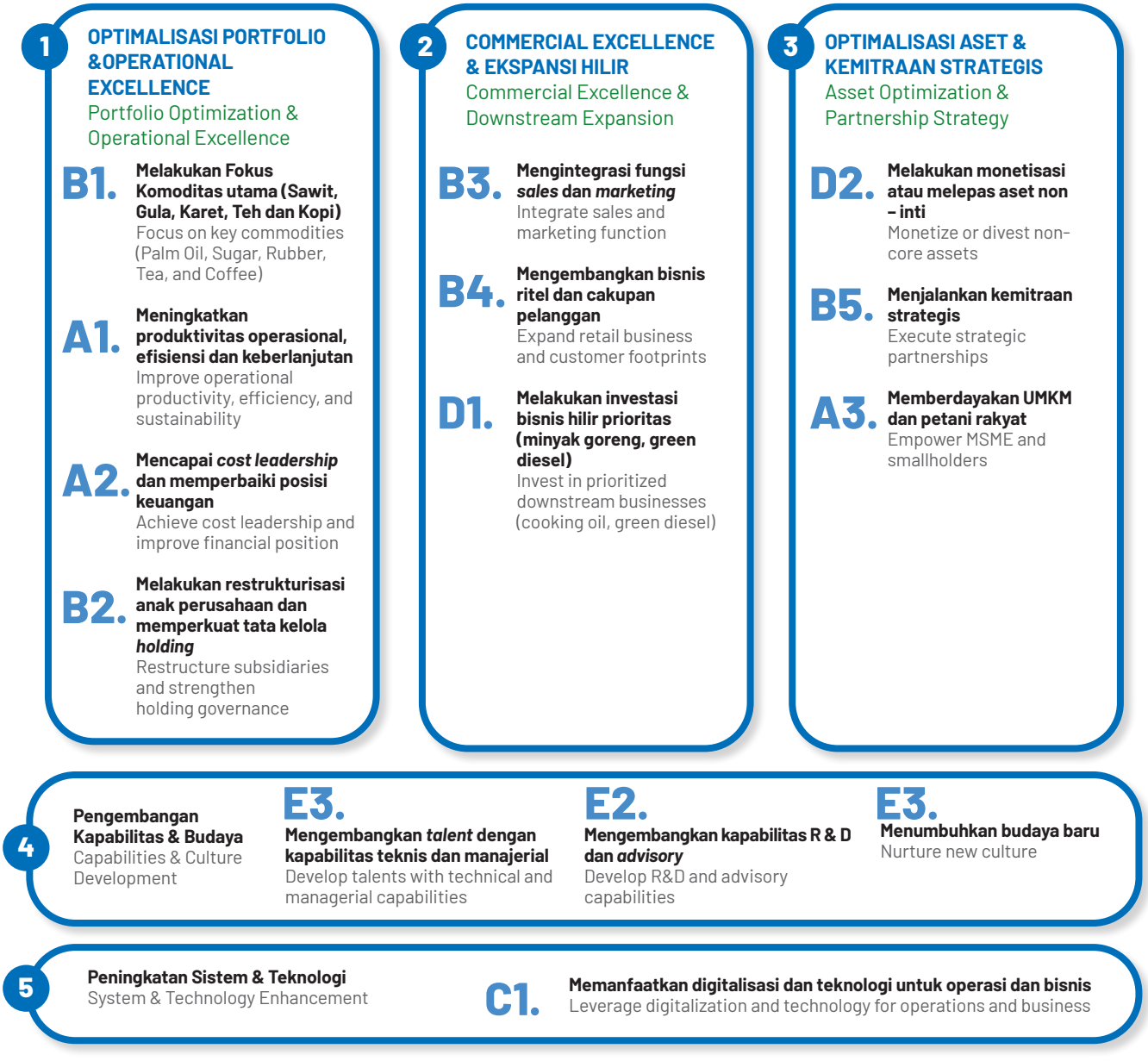
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) has established the 2020-2024 Corporate Long-Term Plan (RJPP) to strengthen the company's position as a national development agent in the plantation sector. The RJPP outlines key strategies to maximize the company's performance.

The implementation of the 2020-2024 RJPP continues from the previous RJPP 2019-2023 transformation process. Broadly, the 2020-2024 RJPP comprises five main strategies and 14 strategic initiatives aligned with the Ministry of State-Owned Enterprises' (KBUMN) priority programs depicted in the five KBUMN shields.



Selanjutnya, PTPN III (Persero) telah menyusun garis besar arahan strategis yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, terdapat tiga pilar utama serta dua pondasi yang diperlukan. Adapun pilar utama ini mencakup *Portfolio Optimisation* & *Operational Excellence*, *Commercial Excellence* & *Downstream Expansion*, serta *Asset Optimization* & *Strategic Partnership*. Sementara pondasi yang perlu diperkuat ialah *Capability* & *Culture Development*, serta *System* & *Technology Enhancement*. Adapun garis besar arahan strategis ini adalah menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia, serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa, yang digambarkan sebagai berikut.

Moreover, PTPN III (Persero) has outlined strategic directives to achieve its formulated vision and mission. These include three main pillars and two foundational elements. The main pillars encompass Portfolio Optimization & Operational Excellence, Commercial Excellence & Downstream Expansion, and Asset Optimization & Strategic Partnership. The foundational elements to be strengthened are Capability & Culture Development and System & Technology Enhancement. The main strategic directions are to become a leading and globally competitive national agribusiness company, continuously contributing to the nation's progress, as outlined below.



Kemudian, dalam rangka menunjukan portofolio bisnis dan komoditas Perusahaan, PT Perkebunan Nusantara III telah menyusun pemetaan terhadap portofolio bisnis dan komoditas. Hasil pemetaaan ini menunjukan bahwa portfolio unggulan dari Perusahaan ialah komoditi kelapa sawit. Selain itu, terdapat juga komoditi dan bisnis lainnya yang termasuk dalam portofolio Perusahaan, yakni, karet, tebu, teh, kopi, kakao, agrowisata, gula ritel, minyak goreng, teh ritel, dan kopi ritel. Selain produk perkebunan, terdapat juga produk biodiesel, *green diesel*, dan bioetanol yang perlu diperhatikan kondisi pasar serta regulasinya.

Additionally, to showcase the company's business portfolio and commodities, PT Perkebunan Nusantara III has mapped out its business and commodity portfolio. This mapping indicates that the company's flagship portfolio is palm oil. Other commodities and businesses within the company's portfolio include rubber, sugarcane, tea, coffee, cocoa, agro-tourism, retail sugar, cooking oil, retail tea, and retail coffee. Besides plantation products, there are also biodiesel, green diesel, and bioethanol products whose market conditions and regulations need attention.

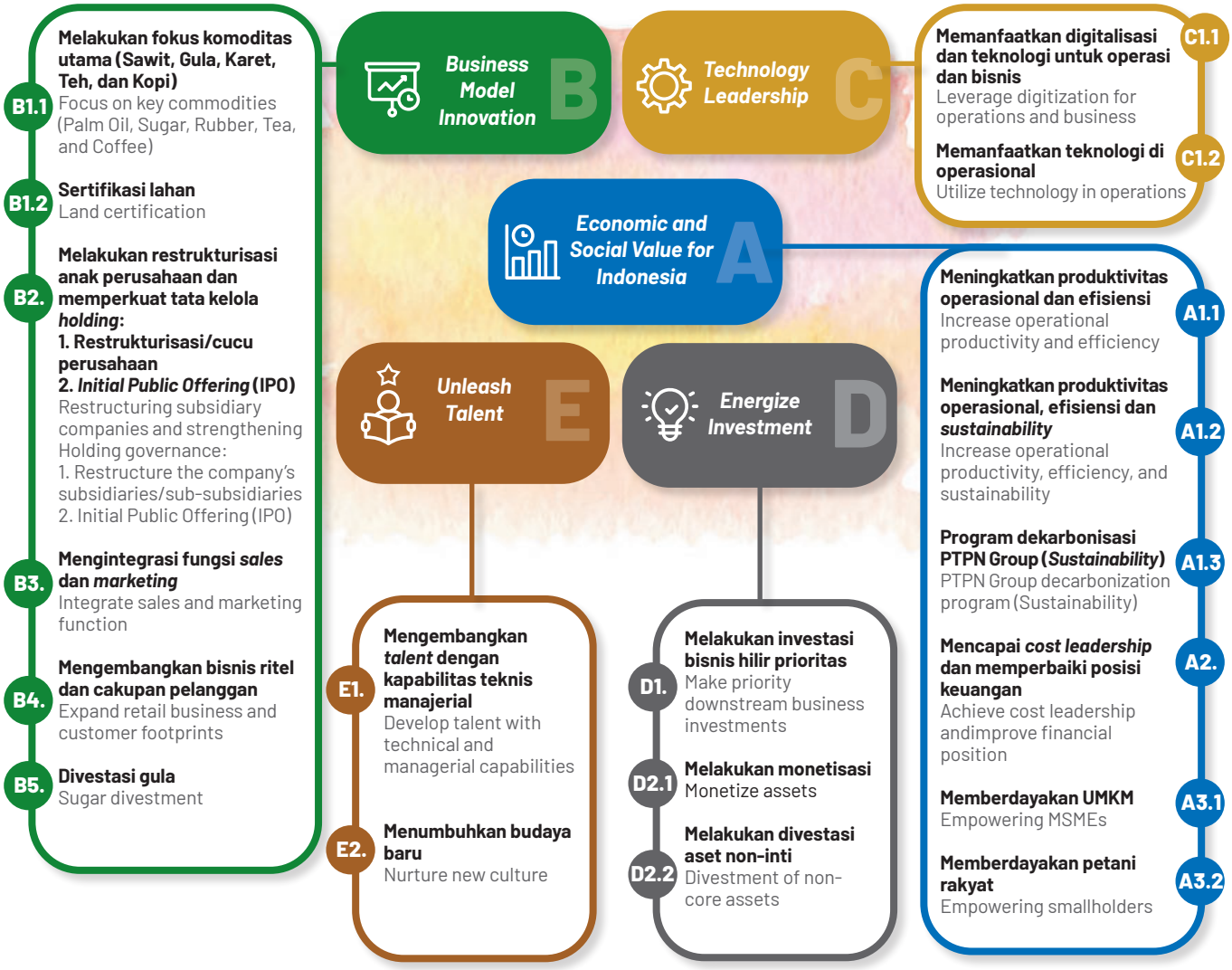


Selain kebijakan untuk mendukung keberlangsungan bisnis Perusahaan, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga memiliki kebijakan untuk memberikan dukungan finansial kepada anak perusahaannya melalui pinjaman penerusan, pinjaman talangan, atau bentuk dukungan lainnya. Dalam konteks restrukturisasi yang diinisiasi oleh *Holding*, perhatian utama terfokus pada bagaimana beberapa anak perusahaan memerlukan dana untuk keperluan modal kerja, investasi, dan *refinancing* utang.

In addition to policies supporting the company's business sustainability, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) has policies to provide financial support to its subsidiaries through pass-through loans, bridging loans, or other forms of support. In the context of restructuring initiated by the Holding, the main focus is on how some subsidiaries require funds for working capital, investment, and debt refinancing.

Untuk memastikan program strategis telah berjalan sesuai dengan yang dirumuskan dalam RJPP, Perusahaan selalu melakukan *monitoring* pelaksanaan program strategis sesuai dengan program prioritas KBUMN yang terdapat pada lima perisai (*shield*) KBUMN, sebagai berikut:

To ensure the strategic programs are executed as formulated in the RJPP, the company continually monitors the implementation of strategic programs in line with the KBUMN priority programs depicted in the five KBUMN shields, as follows:



Kode Code	Inisiatif Program Program Initiative	Penjelasan Description
A1.1	Meningkatkan produktivitas operasional dan efisiensi Enhance operational productivity and efficiency	1. Melaksanakan panen dengan efisien dan bersih; 2. Menerapkan pemupukan sesuai dengan prinsip 5T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat bentuk, dan tepat cara; 3. Meminimalkan kerugian baik di area pertanian maupun di luar area pertanian; 4. Menyelesaikan investasi mesin dan instalasi tepat waktu dan dengan kualitas yang baik; 5. Mengimplementasikan digitalisasi dan mekanisasi dalam operasi perkebunan. 1. Conducting harvests efficiently and cleanly; 2. Applying fertilization according to the principle of right type, right amount, right time, right form, and right method (5T); 3. Minimizing losses both on and off the farm; 4. Completing machinery investments and installations on schedule and with high quality; 5. Implementing digitization and mechanization in plantation operations.
A1.2	Meningkatkan produktivitas operasional, efisiensi dan *sustainability* Enhance operational productivity, efficiency, and sustainability	1. Pelaksanaan *gap assessment* dan laporan *gap assessment* P&C RSPO; 2. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kebun PTPN Group; 3. Pelatihan *awareness* P&C RSPO; 4. Pendampingan dan evaluasi implementasi P&C RSPO; 5. Pelaksanaan audit internal P&C RSPO ; 6. Konsultasi publik sertifikasi RSPO; 7. Pelaksanaan audit sertifikasi RSPO oleh lembaga sertifikasi; 8. Tindak lanjut temuan audit dan mendapatkan sertifikat RSPO. 1. Implementation of gap assessment and gap assessment report for RSPO P&C; 2. Implementation of monitoring and evaluation of PTPN Group plantations; 3. Awareness training on RSPO P&C; 4. Assistance and evaluation of RSPO P&C implementation; 5. Implementation of internal audit for RSPO P&C; 6. Public consultation for RSPO certification; 7. Implementation of RSPO certification audit by certification bodies; 8. Follow-up on audit findings and obtaining RSPO certificate.
A1.3	Program dekarbonisasi PTPN Group (*Sustainability*) PTPN Group decarbonization program (Sustainability)	Pengurangan emisi karbon PTPN Group sebesar 5,5%, atau setara dengan mengurangi 156.695 ton CO_2eq. The carbon emissions reduction of PTPN Group is 5.5%, equivalent to a decrease of 156,695 tons of CO_2eq.
A2	Mencapai *cost leadership* dan memperbaiki posisi keuangan Achieve cost leadership and improve financial position	1. Implementasi program-program untuk peningkatan capaian EBITDA PTPN Group; 2. PTPN telah melakukan pendampingan proses transisi untuk setiap program Transformasi EBITDA, agar divisi terkait dapat menjalankan inisiatif program secara mandiri dan memastikan kontinuitas setiap program EBITDA. Salah satu bentuk pendampingan ini adalah pembaruan progres inisiatif dan dampak nilai yang digunakan sebagai materi dalam rapat mingguan Direksi (BOD Weekly). Konsultan bertindak sebagai mitra pendamping bagi Tim PTPN. Saat ini, pembentukan STO Subholding telah dilaksanakan dan berada pada tahap transfer pengetahuan, penyelesaian masalah yang tertunda, serta pemberian umpan balik oleh STO Holding kepada STO Subholding (STO PTPN IV dan STO PTPN I). 1. Implementation of Programs for Enhancing PTPN Group's EBITDA Achievements; 2. PTPN has provided support during the transition process for each EBITDA Transformation program, enabling the relevant divisions to independently execute program initiatives and ensure the continuity of each EBITDA program. One form of this support includes updating the progress of initiatives and value impact, which is used as material for the Board of Directors' Weekly Meetings (BOD Weekly). Consultants act as sparring partners for the PTPN Team. Currently, the establishment of the STO Subholding has been completed and is in the phase of knowledge transfer, resolving pending matters, and providing feedback from STO Holding to STO Subholding (STO PTPN IV and STO PTPN I).
A3.1	Memberdayakan UMKM Empowering MSMEs	1. Mengalokasikan anggaran hingga Rp1 miliar untuk usaha dengan kualifikasi kecil; 2. Melakukan transaksi pengadaan langsung melalui PaDi UMKM dengan nilai maksimal Rp50 juta; 3. Mendorong pendaftaran UMKM di PaDi UMKM untuk memfasilitasi transaksi dengan BUMN; 4. Mengundang UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan Bazar dan Ekspo yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. 1. Allocating budget up to Rp1 billion for businesses with small-scale qualifications; 2. Conducting direct procurement transactions through PaDi UMKM with a maximum value of Rp50 million; 3. Encouraging registration of UMKM on PaDi UMKM to facilitate transactions with BUMNs; 4. Inviting UMKM to participate in Bazaar and Expo events initiated by the Ministry of BUMN.

Kode Code	Inisiatif Program Program Initiative	Penjelasan Description
A3.2	Memberdayakan petani rakyat Empowering local farmers	1. Pendampingan dalam pelaksanaan peremajaan sawit rakyat (PSR); 2. Pendampingan dalam pelaksanaan Program Makmur; 3. Melakukan pembinaan dan kemitraan dengan petani rakyat untuk mendukung ketersediaan bahan baku dan pendanaan di lingkungan PTPN Group. 1. Support in the implementation of smallholder oil palm replanting (PSR); 2. Support in the implementation of the Prosperous Program; 3. Conducting mentoring and partnerships with smallholder farmers to support the availability of raw materials and funding within the PTPN Group environment.
B1.1	Melakukan fokus komoditas utama (Sawit, Gula, Karet, Teh dan Kopi) Focus on main commodities (Palm Oil, Sugar, Rubber, Tea, and Coffee)	1. Melakukan peremajaan kelapa sawit untuk meningkatkan komposisi umur tanaman; 2. Menyesuaikan komposisi *ratoon* dan *plant crop* (PC) serta mengatur usia panen tanaman tebu; 3. Mengoptimalkan produksi pada area karet yang akan dikonversi; 4. Memfokuskan pengelolaan teh di dataran tinggi dan mengintensifkan penyesuaian area *rightsizing*. 1. Conducting oil palm rejuvenation to improve plant age composition; 2. Adjusting ratoon and plant crop (PC) compositions and managing sugarcane harvesting ages; 3. Optimizing production in rubber areas slated for conversion; 4. Focusing on highland tea management and intensifying rightsizing adjustments.
B1.2	Sertifikasi lahan Land certification	1. Melakukan inventarisasi dan pendataan aset tanah perusahaan untuk memastikan seluruh aset tanah yang diperoleh dengan biaya perusahaan telah dicatat dalam daftar aset Perusahaan; 2. Melakukan identifikasi kebutuhan dan menyusun rencana kerja dan anggaran sertifikasi aset tanah Perusahaan dengan memperhatikan kondisi aset tanah (produktifitas, status jaminan, rencana optimalisasi, rencana RSPO, dll) sesuai prioritas dan kemampuan PTPN/ Subholding, meliputi sertifikasi permohonan baru, perpanjangan/pembaruan hak, baik terhadap sertifikasi reguler yang akan/sedang berproses maupun sertifikasi peralihan hak karena integrasi PTPN; 3. Monitoring secara berkala proses sertifikasi PTPN Group berdasarkan tahapan proses dan kendala-kendala penyelesaian sertifikasi; 4. Penyelesaian permasalahan sertifikasi antara lain: • Rapat kerja dan konsinyering dengan Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah (Kanwil)/ Kantr Cabang (Kantah) dan PTPN terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan sertifikasi dan percepatan proses sertifikasi. • Penyelesaian permasalahan kawasan hutan dengan melakukan FGD/Konsinyering bersama Kemenko Perekonomian, KBUMN, KLHK dan PTPN terkait. 1. Conducting an inventory and asset data collection of company land assets to ensure all land assets acquired at company expense are recorded in the Company's asset register; 2. Identifying needs and developing a work plan and budget for the certification of company land assets, considering the condition of the land assets (productivity, collateral status, optimization plans, RSPO plans, etc.) based on priorities and the capabilities of PTPN/ Subholding, including new certification applications, extension/renewal of rights, both for ongoing regular certifications and certification of transfer rights due to PTPN integration; 3. Periodically monitoring the certification processes of the PTPN Group based on process stages and resolution constraints; 4. Resolving certification issues including: • Holding working meetings and consultations with the Ministry of ATR/BPN, Regional Offices (Kanwil)/Branch Offices (Kantah), and relevant PTPN entities to address certification issues and expedite the certification process. • Addressing forest area issues through Focus Group Discussions (FGD)/Consultations with the Coordinating Ministry for Economic Affairs, state-owned enterprises, Ministry of Environment and Forestry, and relevant PTPN entities.

Kode Code	Inisiatif Program Program Initiative	Penjelasan Description
	Melakukan restrukturisasi anak perusahaan dan memperkuat tata kelola *Holding*: Restructure subsidiaries and strengthen Holding governance:	
B2.1	Restrukturisasi anak/cucu perusahaan Restructure subsidiaries/sub-subsidiaries	Telah terlaksananya aksi korporasi pada 3 entitas dari 10 entitas anak dan cucu perusahaan yang dimiliki oleh PTPN Group, dan 4 entitas dalam proses persetujuan KBUMN atas aksi korporasi. Corporate actions have been carried out for 3 entities out of 10 subsidiaries and sub-subsidiaries owned by PTPN Group, and 4 entities are in the process of obtaining KBUMN approval for corporate actions.
B2.2	*Initial Public Offering* (IPO) Initial Public Offering (IPO)	1. Penunjukan *joint lead underwriter* lokal dan asing (Mandiri Sekuritas, CIMB Sekuritas, DBS Vickers dan BNP Paribas); 2. Penjajakan dengan potensial investor lokal dan global (INA, SALIC, Sime Darby, COFCO, dan lain-lain). 1. Appointment of joint lead underwriters, both local and foreign (Mandiri Sekuritas, CIMB Sekuritas, DBS Vickers, and BNP Paribas); 2. Engagement with potential local and global investors (INA, SALIC, Sime Darby, COFCO, and others).
B3	Mengintegrasi fungsi *sales* dan *marketing* Integrate sales and marketing functions	1. Memusatkan penjualan di Holding untuk meningkatkan koordinasi dan daya tawar terhadap pembeli, sehingga memperoleh harga yang lebih baik; 2. Menjalankan kontrak LTSC dengan beberapa pembeli besar dan global guna mendapatkan harga yang lebih menguntungkan; 3. Mengimplementasikan cara kerja *Sales & Operation* (S&OP) *Planning* untuk rekonsiliasi antara produksi dan penjualan. 1. Centralizing sales within the Holding to enhance coordination and bargaining power with buyers, thereby achieving better pricing; 2. Executing LTSC contracts with several large and global buyers to obtain more advantageous pricing; 3. Implementing Sales & Operations Planning (S&OP) methodologies to reconcile production and sales.
B4	Mengembangkan bisnis ritel dan cakupan pelanggan Develop retail business and customer base.	1. Meningkatkan kapasitas dengan fasilitas pengemasan di Surabaya dan *Central Warehouse* di Tambun dan Surabaya; 2. Mengembangkan titik distribusi hampir di seluruh Indonesia; 3. Menjual minyak goreng Nusakita di Alfamart, mencakup hampir 19.000 gerai. 1. Enhancing capacity with packaging facilities in Surabaya and the Central Warehouse in Tambun and Surabaya; 2. Expanding distribution points across nearly all of Indonesia; 3. Retailing Nusakita cooking oil at Alfamart, spanning nearly 19,000 outlets.
	Menjalankan kemitraan strategis: Execute strategic partnerships:	
B5	Divestasi gula Divestiture of sugar assets	1. Telah didirikan PT Sinergi Gula Nusantara bersama PTPN III (Persero) dan PTPN XI sebagai Special Purpose Vehicle (SPV); 2. PTPN Gula telah melaksanakan pemisahan tidak langsung (spin-off) sebagian dari aset dan kewajiban bisnis gula di luar pertanian kepada PT Sinergi Gula Nusantara. 1. PT Sinergi Gula Nusantara has been established jointly with PTPN III (Persero) and PTPN XI as a Special Purpose Vehicle (SPV); 2. PTPN Gula has executed an indirect separation (spin-off) of a portion of its sugar business assets and liabilities outside of farming to PT Sinergi Gula Nusantara.
C1.1	Memanfaatkan digitalisasi untuk operasi dan bisnis Utilize digitalization for operations and business	1. Implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG): 100% 2. Implementasi *Digital Farming:* 100% 1. Implementation of Geographic Information Systems (GIS): 100% 2. Implementation of Digital Farming: 100%

Kode Code	Inisiatif Program Program Initiative	Penjelasan Description
C1.2	Memanfaatkan teknologi di operasional Utilize technology in operations	1. Implementasi mekanisasi panen dengan menggunakan f*ruit grabber* dan *cane harvester*; 2. Implementasi mekanisasi pemupukan menggunakan *fertilizer spreader* dan GPS *Tracker*; 3. Implementasi *Digital Farming* untuk Kelapa Sawit dan Karet; 4. Implementasi *Automatic Weather Station* (AWS) dengan *dashboard* "Nusaklim" untuk pemantauan cuaca dan iklim; 5. Implementasi Pemetaan Areal dan *tree counting* dengan menggunakan *drone*. 1. Implementation of harvest mechanization using a fruit grabber and cane harvester; 2. Implementation of fertilization mechanization using a fertilizer spreader and GPS Tracker; 3. Implementation of Digital Farming for Oil Palm and Rubber; 4. Implementation of an Automatic Weather Station (AWS) with the "Nusaklim" dashboard for weather and climate monitoring; 5. Implementation of Area Mapping and tree counting using drones.
D1	Melakukan investasi bisnis hilir prioritas Invest in priority downstream businesses.	1. Optimasi produk turunan CPO (Minyak Goreng, RBDPO, Stearin, PFAD); 2. Pengembangan bisnis Biogas *Co Firing* di PKS PTPN V; 3. Pembangunan pabrik minyak goreng kapasitas 2.500 ton CPO/hari 1. Optimization of CPO derivative products (Cooking Oil, RBDPO, Stearin, PFAD); 2. Development of Biogas Co-Firing Business at PTPN V Palm Oil Mills; 3. Construction of cooking oil plant with a capacity of 2,500 tons of CPO per day.
D2.1	Melakukan monetisasi asset Monetize assets	1. Identifikasi aset *non-core underutilized*; 2. Penyusunan program kerja optimalisasi aset; 3. Penandatanganan agreement kerjasama dengan mitra; 4. *Monitoring* dan evaluasi pendapatan optimalisasi aset. 1. Identification of Underutilized Non-Core Assets; 2. Development of Asset Optimization Work Program; 3. Signing of Collaboration Agreements with Partners; 4. Monitoring and Evaluation of Asset Optimization Revenue.
D2.2	Melakukan divestasi aset non-inti Divest non-core assets	Realisasi divestasi aset non-inti sebesar Rp365,03 miliar dari target sebesar Rp1,87 triliun. The realization of non-core asset divestment amounted to Rp365.03 billion out of the target of Rp1.87 trillion.
E1	Mengembangkan *talent* dengan kapabilitas teknis dan manajerial Develop talent with technical and managerial capabilities	1. *Talent Development;* 2. *Digital Talent;* 3. *Leadership Development Program;* 4. *Competency Development Program;* 5. *Learning Wallet Implementation;* 6. *Coaching* Terintegrasi untuk Kinerja dan Penyesuaian KPI Individu; 7. *Back to Basic Program.* 1. Talent Development; 2. Digital Talent; 3. Leadership Development Program; 4. Competency Development Program; 5. Learning Wallet Implementation; 6. Integrated Coaching for Performance and Individual KPI Realignment; 7. Back to Basics Program.
E2	Menumbuhkan budaya baru Foster a new culture	1. Penyusunan pedoman program internalisasi budaya Perusahaan 2. Pelaksanaan kegiatan internalisasi budaya Perusahaan 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program internalisasi budaya Perusahaan 4. Pengukuran efektivitas internalisasi budaya Perusahaan 1. Development of guidelines for the Company's culture internalization program 2. Implementation of the Company's culture internalization activities 3. Monitoring and evaluation of the Company's culture internalization program implementation 4. Measurement of the effectiveness of the Company's culture internalization

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL REVIEW BY BUSINESS SEGMENT

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan Perusahaan milik negara yang bergerak di bidang perkebunan, pengolahan, serta pemasaran hasil perkebunan. Adapun jenis usaha budidaya dan pengelolaan yang dimiliki oleh Perusahaan ialah, kelapa sawit, karet, tebu, kopi, tembakau, kakao, serta produk hilir. Produk penjualan utama yang dimiliki oleh Perusahaan ialah minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (kernel), serta produk hilir karet.

Untuk menjaga kestabilan bisnis Perusahaan, PTPN III (Persero) selalu senantiasa mengoptimalkan setiap segmen usaha dengan tujuan mendorong kinerja serta meningkatkan nilai bagi para Pemegang Saham dan pemangku Kepentingan lainnya.

Penentuan segmen usaha PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menggunakan struktur dan sumber pendapatan yang terdiri dari usaha budidaya dan pengolahan jenis tanaman yang dimiliki oleh Perusahaan, yakni kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau, dan kakao serta produk hilir. Penerapan struktur dan sumber pendapatan sebagai penentu segmen usaha dilakukan karena hingga akhir tahun 2023, Perusahaan masih belum menerapkan PSAK 5 tentang Segmen Operasi.

Berikut ini merupakan uraian mengenai kinerja masing-masing segmen usaha selama tahun 2023, serta perbandingannya dengan target RKAP 2023 dan tahun 2022

Segmen Usaha Kelapa Sawit

Segmen usaha Kelapa sawit merupakan salah satu bisnis unggulan yang dimiliki oleh Perusahaan. Hal ini karena seluruh areal yang dimiliki oleh Perusahaan didominasi oleh areal tanaman kelapa sawit, tanaman karet, konsensi teh, dan tebu. Selain itu, seluruh usaha perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia telah dilakukan oleh hampir seluruh anak Perusahaan Perkebunan Nusantara.

Areal Tanaman Kelapa Sawit

Realiasasi areal tanaman kelapa sawit per 31 Desember 2023 ialah seluas 559.577,36 ha, dan terdiri atas atas Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 452.446,28 ha, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 41.651,44 ha, Tanaman Baru (TB)/ Tanaman Ulang (TU)/ Tanaman Tahun Ini (TTI) 28.543,82 ha, Tanaman Tidak Produktif (TTAD) seluas 36.390,55 ha, dan areal pembibitan seluas 545,27 ha. Adapun total areal tanaman kelapa sawit dapat digambarkan melalui tabel berikut.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is a state-owned company engaged in the plantation, processing, and marketing of plantation products. The company's business includes the cultivation and management of oil palm, rubber, sugar cane, coffee, tobacco, cocoa, and downstream products. The company's main sales products are crude palm oil (CPO), palm kernel, and downstream rubber products.

To maintain business stability, PTPN III (Persero) continuously optimizes each business segment to enhance performance and increase value for shareholders and other stakeholders.

The business segments of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) are determined based on the structure and sources of income from the company's cultivation and processing businesses, which include oil palm, rubber, sugar cane, tea, coffee, tobacco, and cocoa, as well as downstream products. The adoption of the structure and sources of income as segment determinants is implemented because, as of the end of 2023, the company has not yet adopted PSAK 5 regarding Operating Segments.

The following is an overview of the performance of each business segment in 2023, compared to the RKAP 2023 targets and 2022:

Oil Palm Business Segment

The palm oil business segment is one of the leading businesses owned by the Company. This is because the entire area owned by the Company is dominated by oil palm plantations, rubber plantations, tea concessions and sugar cane. Apart from that, all palm oil plantation businesses in Indonesia are carried out by almost all Perkebunan Nusantara subsidiaries.

Oil Palm Plantation Area

The actual area of oil palm plantations as of 31 December 2023 is 559,577.36 ha, and consists of Producing Plants (TM) covering an area of 452,446.28 ha, Immature Plants (TBM) 41,651.44 ha, New Plants (TB)/Replanting (TU)/This Year's Plants (TTI) 28,543.82 ha, Non-Productive Plants (TTAD) 36,390.55 ha, and a nursery area of 545.27 ha. The total area of oil palm plantations can be described in the following table.

Uraian Description	Holding				
	Realisasi 2022 2022 Realization	Realisasi 2023 2023 Realization	RKAP 2023 2023 RKAP	Pencapaian Achievement	
1	2	3	4	5 (3 : 4)	6 (3 : 2)
Kelapa Sawit / Palm oil					
• TM	455.539,40	452.446,28	452.480,35	99,99%	97,67%
• TBM	40.917,10	41.651,44	47.436,98	87,80%	101,79%
• TU/TK/TB/TTI	17.972,93	28.543,82	42.795,45	66,70%	158,82%
• ATP/TTAD	39.838,00	36.390,55	36.390,55	100,00%	91,35%
• Pembibitan | Nursery	487,26	545.27	545,27	100,00%	111,90%
Jumlah Areal Tanaman Number of Plant Areas	**554.754,69**	**559.577,36**	**579.648,60**	**96,54%**	**100,87%**

Produksi Kelapa Sawit

1. Realisasi capaian produksi TBS kelapa sawit kebun sendiri di tahun 2023 ialah sebesar 9.371.700 ton atau 89,77% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 10.439.284 ton dan 94,21% dari realisasi periode yang sama tahun 2022 sebesar 9.948.194 ton.
2. Realisasi capaian produksi TBS kelapa sawit plasma/pihak III per 31 Desember 2023 ialah sebesar 2.859.163 ton atau 75,98% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 3.763.157 ton atau 99,24% dari realisasi periode yang sama tahun 2022 sebesar 2.880.946 ton.
3. Pencapaian total produksi TBS realisasi hingga akhir tahun 2023 ialah sebesar 12.230.863 ton atau 86,12% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 14.202.441 ton dan 95,34% dari realisasi periode yang sama tahun 2022 sebesar 12.829.140 ton.
4. Pencapaian produksi minyak sawit kebun sendiri realisasi hingga akhir tahun 2023 sebesar 2.129.280 ton atau 89,09% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 2.390.120 ton dan 96,90 % dari realisasi periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 2.197.456 ton.
5. Pencapaian produksi minyak sawit hasil dari Pembelian TBS Plasma/Pihak III realisasi hingga akhir tahun 2023 sebesar 520.323 ton atau 74,94% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 694.314 ton dan 100,19 % dari realisasi periode yang sama di tahun 2022, yakni sebesar 519.311 ton.
6. Pencapaian total produksi Minyak Sawit realisasi hingga akhir tahun 2023 ialah sebesar 2.649.603 ton atau 85,90% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 3.084.434 ton dan 97,52% dari realisasi periode yang sama di tahun 2022 sebesar 2.716.767 ton.
7. Pencapaian produksi Inti Sawit (kernel) kebun sendiri realisasi hingga akhir tahun 2023 ialah sebesar 371.273 ton atau 87,56% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 424.044 ton dan 96,73% dari realisasi periode yang sama di tahun 2022, yakni sebesar 387.845 ton.

Palm Oil Production

1. The actual achievement of own plantation oil palm FFB production in 2023 is 9,371,700 tons or 89.77 % of the budgeted RKAP of 10,439,284 tons and 94.21 % of the realization for the same period in 2022 of 9,948,194 tons.
2. The realization of plasma/party III palm oil FFB production achievements as of 31 December 2023 was 2,859,163 tonnes or 75.98 % of the budgeted RKAP of 3,763,157 tonnes or 99.24% of the realization for the same period in 2022 of 2,880,946 tons.
3. The total realization of FFB production until the end of 2023 was 12,230,863 tons or 86.12 % of the budgeted RKAP of 14,202,441 tons and 95.34 % of the realization for the same period in 2022 of 12,829,140 tons.
4. The realization of plantation palm oil production by the end of 2023 was 2,129,280 tons or 89.09 % of the budgeted RKAP of 2,390,120 tons and 96.90 % of the realization for the same period in the previous year of 2,197,456 tons.
5. The realization of palm oil production resulting from Plasma/ III Party FFB Purchases until the end of 2023 was 520,323 tonnes or 74.94 % of the budgeted RKAP of 694,314 tonnes and 100.19% of the realization for the same period in 2022, namely 519,311 tonnes .
6. The total realization of Palm Oil production until the end of 2023 was 2,649,603 tons or 85.90 % of the budgeted RKAP of 3,084,434 tons and 97.52 % of the realization for the same period in 2022 of 2,716,767 tons.
7. The realization of palm kernel (kernel) production from the plantation itself until the end of 2023 was 371,273 tons or 87.56 % of the budgeted RKAP of 424,044 tons and 96.73 % of the realization for the same period in 2022, namely 387,845 tons.

8. Pencapaian produksi Inti Sawit (kernel) dari hasil pembelian TBS Plasma/Pihak III realisasi sampai akhir tahun 2023 ialah sebesar 131.607 ton atau 84,95% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 154.916 ton dan 102,53% dari realisasi periode yang sama tahun 2022, yakni sebesar 128.366 ton.
9. Pencapaian total produksi Inti Sawit (kernel) realisasi sampai akhir tahun 2023 ialah sebesar 502.886 ton atau 86,86% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 578.960 ton dan 97,43% dari realisasi periode yang sama di tahun 2022 sebesar 516.169 ton.

Produktivitas Kelapa Sawit

1. Pencapaian produktivitas TBS kelapa sawit realisasi sampai akhir tahun 2023 ialah sebesar 20,71 ton/ha atau 89,78% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 23,07 ton/ha dan 95,49% dari periode yang sama tahun 2022 yakni sebesar 21,69 ton/ha.
2. Pencapaian produktivitas Minyak Sawit realisasi sampai akhir tahun 2023 ialah sebesar 4,79 ton/ha atau 89,10 % dari RKAP yang dianggarkan sebesar 5,38 ton/ha dan 95,77% dari periode yang sama tahun 2022 yakni sebesar 5,01 ton/ha.
3. Pencapaian produktivitas Inti Sawit realisasi sampai akhir tahun 2023 ialah sebesar 0,84 ton/ha atau mencapai 87,57 % dari RKAP yang dianggarkan sebesar 0,95 ton/ha dan 94,52% dari periode yang sama di tahun 2022 yakni sebesar 0,88 ton/ha.

Segmen Usaha Karet

Segmen usaha karet, merupakan salah satu segmen usaha terbesar yang dijalankan oleh Perseroan. Selain itu, terdapat juga beberapa anak Perusahaan yang menjalankan segmen usaha karet, yakni PTPN I, PTPN III, PTPN V, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN XII, PTPN XIII, dan PTPN XIV.

Areal Tanaman Karet

Hingga akhir tahun 2023, areal tanaman karet yang dimiliki oleh Perusahaan ialah seluas 121.977,38 ha, dengan rincian atas Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 100.429,60 ha, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 4.542,34 ha, Tanaman Baru (TB)/Tanaman Ulang (TU)/Tanaman Tahun Ini (TTI) seluas 1.121,50 ha, Tanaman Tidak Produktif (TTAD) seluas 15.716,08 ha, dan areal pembibitan seluas 167,86 ha. Adapun total areal tanaman karet dapat dijabarkan melalui tabel berikut.

8. The realization of Palm Kernel (kernel) production from the purchase of Plasma/III Party TBS until the end of 2023 was 131,607 tons or 84.95 % of the budgeted RKAP of 154,916 tons and 102.53 % of the realization for the same period in 2022, namely amounting to 128,366 tons.
9. The total realization of palm kernel (kernel) production until the end of 2023 was 502,886 tons or 86.86 % of the budgeted RKAP of 578,960 tons and 97.43 % of the realization for the same period in 2022 of 516,169 tons.

Palm Oil Productivity

1. The realization of palm oil FFB productivity until the end of 2023 was 20.71 tonnes/ha or 89.78% of the budgeted RKAP of 23.07 tonnes/ha and 95.49% of the same period in 2022, namely 21.69 ton/ha.

2. The realization of palm oil productivity until the end of 2023 was 4.79 tonnes/ha or 89.10 % of the budgeted RKAP of 5.38 tonnes/ha and 95.77 % of the same period in 2022, namely 5.01 tonnes. /Ha.

3. The realization of palm kernel productivity until the end of 2023 was 0.84 tonnes/ha or reached 87.57 % of the budgeted RKAP of 0.95 tonnes/ha and 94.52 % of the same period in 2022, namely 0. 88 tonnes/ha.

Rubber Business Segment

The rubber business segment is one of the largest business segments run by the Company. Apart from that, there are also several subsidiaries that run the rubber business segment, namely PTPN I, PTPN III, PTPN V, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN XII, PTPN XIII, and PTPN XIV.

Rubber Plantation Area

Until the end of 2023, the rubber plantation area owned by the Company is 121,977.38 ha, with details of Producing Plants (TM) covering an area of 100,429.60 ha, Immature Plants (TBM) covering an area of 4,542.34 ha, New Plants (TB)/Replanting (TU)/This Year's Plants (TTI) covering an area of 1,121.50 ha, Non-Productive Plants (TTAD) covering an area of 15,716.08 ha, and a nursery area of 167.86 ha. The total area of rubber plantations can be described in the following table.

Uraian Description	Holding				
	Realisasi 2022 2022 Realization	Realisasi 2023 2023 Realization	RKAP 2023 2023 RKAP	Pencapaian Achievement	
1	2	3	4	5 (3 : 4)	6 (3 : 2)
Karet | Rubber					
• TM	106.489,63	100.428,92	100.429,60	100,00%	94,31%
• TBM	3.726,08	4.542,34	4.547,94	99,88%	121,91%
• TU/TK/TB/TTI	1.121,61	1.121,50	2.016,67	55,61%	100,00%
• ATP/TTAD	16.434,76	15.716,08	15.716,08	100,00%	95,63%
• Pembibitan / Nursery	168,55	167,86	167.86	100,00%	99,59%
Jumlah Areal Tanaman Number of Plant Areas	**127.940,50**	**121.976,70**	**122.878,15**	**99,27%**	**95,34%**

Produksi dan Produktivitas Karet

1. Pencapaian produksi karet kering kebun sendiri memiliki realisasi sampai akhir tahun 2023, yakni sebesar 103.742 ton atau mencapai 78,54% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 132.096 ton dan 90,43% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar 114.722 ton.
2. Pencapaian produksi pembelian karet kering Plasma/ Pihak III realisasi sampai akhir tahun 2023 ialah sebesar 26.981 ton atau mencapai 71,00 % dari RKAP yang dianggarkan sebesar 38.000 ton dan 91,18 % dari realisasi periode yang sama tahun 2022 yakni sebesar 29.592 ton.
3. Pencapaian total produksi karet kering memiliki realisasi sampai akhir tahun 2023 sebesar 130.723 ton atau mencapai 76,85% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 170.096 ton dan 90,58% dari realisasi periode yang sama di tahun 2022, yakni sebesar 144.314 ton.
4. Pencapaian produktivitas karet kering memiliki realisasi sampai akhir tahun 2023 sebesar 1.033 kg/ha atau mencapai 78,54% dari RKAP yang dianggarkan sebesar 1.315 kg/ha dan 95,89% dari realisasi periode yang sama di tahun 2022 yakni sebesar 1.077 kg/ha.

Rubber Production and Productivity

1. The achievement of dry rubber production from the plantation itself was realized until the end of 2023, namely 103,742 tons or reaching 78.54 % of the budgeted RKAP of 132,096 tons and 90.43 % of the realization in the same period the previous year, namely 114,722 tons.
2. The realization of Plasma/Party III dry rubber purchase production achieved until the end of 2023 was 26,981 tons or reached 71.00% of the budgeted RKAP of 38,000 tons and 91.18% of the realization for the same period in 2022, namely 29,592 tons.
3. The total realization of dry rubber production until the end of 2023 was 130,723 tons or reached 76.85 % of the budgeted RKAP of 170,096 tons and 90.58 % of the realization for the same period in 2022, namely 144,314 tons.
4. The realization of dry rubber productivity until the end of 2023 was 1,033 kg/ha or reached 78.54 % of the budgeted RKAP of 1,315 kg/ha and 95.89 % of the realization for the same period in 2022, namely 1,077 kg/ha.

Segmen Usaha Tebu

Segmen usaha tebu merupakan salah satu segmen bisnis utama yang dimiliki Perseroan. Perkebunan tebu telah tersebar di seluruh Indonesia melalui anak Perusahaan yang terhimpun atas PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV.

Sugarcane Business Segment

The sugarcane business segment is one of the Company's main business segments. The sugarcane plantations are spread across Indonesia through subsidiaries including PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, and PTPN XIV.

Areal Tanaman Tebu

Sugarcane Plantation Area

Uraian Description	*Holding*				
	Realisasi 2022 2022 Realization	Realisasi 2023 2023 Realization	RKAP 2023 2023 RKAP	Pencapaian Achievement	
1	2	3	4	5 (3 : 4)	6 (3 : 2)
Tebu Sendiri Own Sugarcane	61.327	59.623,1	65.161,2	91,5	97,2
Tebu Rakyat Farmers Sugarcane	116.513	119.670,4	125.506,0	95,4	102,7
Total Area	**177.839**	**179.293,5**	**190.667,2**	**94,0**	**100,8**

Hingga akhir tahun 2023, realisasi luas areal tebu yang telah di tebang ialah seluas 179.294 ha, dan mencapai 94% dari RKAP tahun 2023 yang telah direncanakan seluas 190.667 ha dan 101% terhadap realisasi dari periode yang sama pada tahun 2022 yakni seluas 177.840 ha.

As of the end of 2023, the realized harvested sugarcane area was 179.294 hectares, achieving 94% of the 2023 RKAP target of 190.667 hectares and 101% of the same period's realization in 2022, which was 177,551.8 hectares.

Produksi dan Produktivitas Tebu

1. **Tebu Giling Realisasi**
   Tebu digiling sampai akhir Desember 2023 sebesar 10.448.086 ton atau mencapai 76,2% terhadap RKAP yang dianggarkan tahun 2023 adalah sebesar 13.706.130 ton dan 79,1% terhadap realisasi tebu yang digiling pada periode yang sama di tahun 2022, yaitu sebesar 13.215.948 ton.

2. **Produktivitas tebu**
   Realisasi produktivitas tebu per hektar sampai akhir Desember 2023 sebesar 58,3 ton/ha atau mencapai 81,1% terhadap RKAP yang dianggarkan tahun 2023 yakni sebesar 71,9 ton/ha dan 78,4% terhadap realisasi produktivitas tebu pada periode yang sama di tahun 2022, yaitu sebesar 74,4 ton/ha.

3. **Rendemen**
   Realisasi rendemen sampai akhir tahun 2023 sebesar 7,19% atau mencapai 98,5% terhadap RKAP yang dianggarkan di tahun 2023 yang sebesar 7,30% dan 111,5% terhadap realisasi rendemen pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6,44%.

4. **Produksi Gula**
   Realisasi produksi gula hingga akhir tahun 2023 sebesar 752.971 ton atau mencapai 75,2% terhadap RKAP yang dianggarkan di tahun 2023 yang sebesar 1.001.430 ton dan 88,5% terhadap realisasi produksi gula pada periode yang sama di tahun 2022, yaitu sebesar 850.652 ton.

Sugarcane Production and Productivity

1. **Sugarcane Milled Realization**
   The realized amount of sugarcane milled by the end of December 2023 was 10.448.086 tons, or 76,2% of the budgeted RKAP of 13.706.130 tons, and 79,1% of the same period's realization in 2022, which was 13,215,947.9 tons.

2. **Sugarcane Productivity**
   The realized productivity of sugarcane per hectare by the end of December 2023 was 58,3 tons/ha, or 81,1% of the budgeted RKAP of 71,9 tons/ha, and 78,4% of the same period's productivity in 2022, which was 74.4 tons/ha.

3. **Sugar Recovery Rate**
   The realized sugar recovery rate by the end of 2023 was 7,19%, or 98,5% of the budgeted RKAP of 7,30%, and 111,5% of the same period's realization in the previous year, which was 6.44%.

4. **Sugar Production**
   The realized sugar production by the end of 2023 was 752,971 tons, or 75,2% of the budgeted RKAP of 1.001.430 tons, and 88,5% of the same period's realization in 2022, which was 850.652 tons.

5. Produksi Tetes

Realisasi produksi tetes per 31 Desember 2023 sebesar 505.317 ton atau mencapai 81,9% terhadap RKAP yang dianggarkan di tahun 2023 yang sebesar 616.776 ton dan 77,4% terhadap realisasi produksi tetes pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 653.025 ton.

6. Kapasitas Giling

Realisasi kapasitas giling inklusif hingga akhir tahun 2023 sebesar 91.129,3 TCD atau mencapai 79,5% terhadap RKAP yang dianggarkan di tahun 2023, yakni sebesar 114.695 TCD dan 100,1% terhadap realisasi kapasitas giling inklusif pada periode yang sama di tahun 2022, yakni sebesar 91.064 TCD.

Untuk mencapai sasaran RKAP pada giling tahun 2024, segmen usaha gula telah menyusun strategi dan program kerja sebagai berikut:

1. Pengembangan lahan tebu melalui optimalisasi perluasan areal tebu sendiri dengan konversi lahan HGU dari komoditas lain (non tebu), pemanfaatan lahan HGU non produktif/terokupasi dan sewa lahan, diharapkan ketersediaan bahan baku tebu dapat lebih optimal.

2. Peningkatan Produktivitas Tebu Sendiri melalui optimalisasi dan perbaikan pengelolaan budidaya tebu untuk peningkatan produktivitas tebu meliputi : pelaksanaan budidaya tebu sesuai SOP secara konsisten menuju *operational excellence*, penataan masa tanam dan komposisi varietas, optimalisasi *water management system* serta aplikasi pemupukan tepat jumlah dan waktu.

3. Penerapan mekanisasi budidaya tanaman tebu secara bertahap mulai dari mekanisasi pengolahan tanah, tanam dan pemeliharaan.
4. Peningkatan Produktivitas kinerja pabrik:
   a. Perencanaan aktivitas *maintenance* dan pengelolaan produksi gula fokus pada solusi atas akar permasalahan penyebab ketidaklancaran operasional, berdasarkan skala prioritas dan urgensitas serta optimalisasi aset;
   b. Pengelolaan saving energy agar terwujud *self sufficient bagasse* di masing-masing pabrik gula dan *water management system* (*close loop system, recovery* air kondensat);
   c. Peningkatan *mill extraction*, kestabilan kualitas GKP sesuai SNI dan efisiensi proses;
   d. Optimalisasi aset-aset produksi melalui penerapan norma kerja yang mengarah pada normalisasi kondisi dan operasionalisasi asset-aset produktif tersebut sehingga diperoleh hasil kerja sesuai dengan standar industri.
5. Pengembangan Kualitas SDM dengan training pelatihan, kursus yang berkaitan dengan keahlian maupun benchmarking pada Perusahaan Perkebunan Prioritas.

5. Molasses Production

The realized molasses production by 31 December 2023 was 505.317 tons, or 81,9% of the budgeted RKAP of 616.776 tons, and 77,4% of the same period's realization in the previous year, which was 653.025 tons.

6. Milling Capacity

The realized inclusive milling capacity by the end of 2023 was 91.129,3 TCD, or 79,5% of the budgeted RKAP of 114.695 TCD, and 100,1% of the same period's realization in 2022, which was 91.064 TCD.

To achieve the RKAP targets for the 2024 milling year, The sugar business segment has formulated the following strategies and work programs:

1. Development of sugarcane land through optimizing the expansion of its own sugarcane area by converting HGU land from other commodities (non-cane), utilizing non-productive/occupied HGU land and land leases, it is expected that the availability of sugarcane raw materials can be more optimal.
2. Increasing Own Sugarcane Productivity through optimization and improvement of sugarcane cultivation management to increase sugarcane productivity includes: implementation of sugarcane cultivation according to SOP consistently towards operational excellence, arrangement of planting periods and composition of varieties, optimization of water management systems and application of fertilizers in the right amount and time.
3. Gradual implementation of mechanization of sugarcane cultivation starting from mechanization of tillage, planting and maintenance.
4. Increasing productivity of mill performance:
   a. Planning maintenance activities and sugar production management focus on solutions to the root causes of operational inefficiencies, based on priority and urgency and asset optimization;
   b. Energy saving management to realize self sufficient bagasse in each sugar mill and water management system (close loop system, condensate water recovery);
   c. Increased mill extraction, stability of GKP quality according to SNI and process efficiency;
   d. Optimization of production assets through the application of work norms that lead to the normalization of the condition and operationalization of these productive assets so as to obtain work results in accordance with industry standards.
5. Development of human resource quality through training, courses related to expertise and benchmarking at Priority Plantation Companies.

6. Peningkatan hubungan kemitraan dengan petani:
   a. Melakukan pengamanan Tebu Asli Daerah sesuai kontrak kemitraan dan tidak melakukan pembelian BBT Petani yang sudah bermitra di PTPN lain;
   b. Dalam pengelolaan tebu rakyat dianjurkan untuk melaksanakan Sistem Pembelian Tebu (SPT) dalam proses perolehan bahan baku tebu dari petani dengan memperhitungkan efektifitas bisnis dan kesiapan pendanaan;
   c. Dalam pertimbangan operasional dan bisnis diijinkan untuk menerapkan pengelolaan tebu rakyat yang dinilai lebih menguntungkan dan masih memiliki margin serta menjaga kemitraan yang optimal antara petani dan pabrik gula.
7. Penyelesaian Revitalisasi PG dengan dana PMN.

6. Improving partnership relationships with farmers:
   a. Safeguarding local sugarcane according to the partnership contract and not purchasing BBT from farmers who have partnered with other PTPN;
   b. In the management of smallholder sugarcane, it is recommended to implement the Sugarcane Purchasing System (SPT) in the process of obtaining sugarcane raw materials from farmers by taking into account business effectiveness and funding readiness;
   c. In operational and business considerations, it is allowed to implement the management of smallholder sugarcane which is considered more profitable and still has a margin and maintains an optimal partnership between farmers and sugar factories.
7. Completion of PG Revitalization with PMN funds.

Segmen Usaha Aneka Tanaman Lainnya

Selain sawit, karet, dan lainnya. PTPN III (Persero) juga memiliki segmen usaha tanaman lainnya, yakni tanaman teh, kopi, kakao, dan tembakau. Seluruh segmen usaha ini telah tersebar ke seluruh Indonesia melalui entitas Perusahaan yang terdiri atas PTPN II, PTPN IV, PTPN VI, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, dan PTPN XII.

Areal Tanaman Teh, Kopi & Kakao

Areal teh yang dimiliki oleh PTPN IV, VI, VII, VIII, IX, dan XII ialah seluas 23.596,49 ha, dan areal teh terluas dimiliki oleh PTPN VIII dengan luas 13.691,80 ha. Sedangkan pada areal tanaman kopi, realisasinya adalah seluas 9.752,70 ha, dan berada di PTPN V (KSO PTPN XII), PTPN VI, PTPN IX, dengan hak tanah terluas dimiliki oleh PTPN XII dengan luas 8.497,45 ha (termasuk areal KSO) atau 87,13% dari total areal.

Other Various Plant Business Segments

Apart from palm oil, rubber and others. PTPN III (Persero) also has other plant business segments, namely tea, coffee, cocoa and tobacco plants. All of these business segments have spread throughout Indonesia through Company entities consisting of PTPN II, PTPN IV, PTPN VI, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, and PTPN XII.

Tea, Coffee & Cocoa Plantation Area

The tea area owned by PTPN IV, VI, VII, VIII, IX, and XII is 23,596.49 ha, and the largest tea area is owned by PTPN VIII with an area of 13,691.80 ha. Meanwhile, in the coffee plantation area, the realization is 9,752.70 ha, and is located in PTPN V (KSO PTPN XII), PTPN VI, PTPN IX, with the largest land rights owned by PTPN XII with an area of 8,497.45 ha (including KSO area) or 87.13% of the total area.

Uraian Description	*Holding*				
	Realisasi 2022 2022 Realization	Realisasi 2023 2023 Realization	RKAP 2023 2023 RKAP	Pencapaian Achievement	
1	2	3	4	5 (3 : 4)	6 (3 : 2)
Teh | Tea	23.594,81	23.637,23	24.161,23	97,83	100,18
Kopi Arabika | Arabica Coffee	4.997,95	5.341,96	5.198,13	102,77	106,88
Kopi Robusta | Robusta Coffee	4.754,75	4.596,12	4.596,12	100,00	96,66

Produksi dan Produktivitas Teh **Tea Production and Productivity**

Uraian Description	*Holding*				
	Realisasi 2022 2022 Realization	Realisasi 2023 2023 Realization	RKAP 2023 2023 RKAP	Pencapaian Achievement	
1	2	3	4	5 (3 : 4)	6 (3 : 2)
Areal TM (ha) | TM area (ha)	23.142,04	23.252,82	23.776,82	97,80%	100,48%
Produksi Basah (ton) | Wet Production (tons)					
Kebun Sendiri | Own Plantations	201.188	190.009	241.738	78,60	94,44
Pembelian Pihak ke-3 | Third-Party Purchases	3.260	3.122	3.323	93,95	95,79
ATP	16.664	-	-	-	-
Jumlah Produksi Basah | Total Wet Production	221.111	193.131	245.061	78,81%	87,35%
Produksi Kering (ton) | Dry Production (tons)					
Kebun Sendiri | Own Plantations	44.413	42.171	53.473	78,86	94,95
Pembelian Pihak ke-3 | Third-Party Purchases	695	662	723	91,55	95,16
ATP	3.845	-	-	-	-
Jumlah Produksi Kering | Total Dry Production	48.954	42.833	54.196	79,03	87,50
Produktivitas (kg/ha) | Productivity (kg/ha)	1.919	1.814	2.249	80,64	94,50
Rendemen (%) | Yield (%)					
Kebun Sendiri | Own Plantations	22,08	22,19	22,12	100,33	100,54
Pembelian Pihak ke-3 | Third-Party Purchases	21,34	21,20	21,75	97,45	99,35
ATP	23,07	-	-	-	-
Rata-rata Rendemen | Average Yield	22,14	22,18	22,12	100,28	100,17

Hingga akhir tahun 2023, luas areal tanaman teh PTPN Group sesuai dengan RKAP 2023 ialah sebesar 23.637,23 ha dengan komposisi Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 23.252,82 Ha (98,37%), Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 384,41 Ha atau 1,63%, dan tidak ada realisasi Tanaman Tahun Ini (TTI).

Pada produksi basah kebun sendiri (TM+Lancuran) di tahun 2023 telah mencapai 190.009 ton atau 78,60% dari RKAP 2023 dan 94,44% terhadap realisasi periode yang sama di tahun 2022. Hasil produksi basah kebun sendiri PTPN VIII telah dijual kepada pihak ke-3 sebanyak 1.610 ton (18,07% dari total produksi basah PTPN VIII dan 0,83% dari total produksi basah PTPN). Sedangkan produksi teh kering kebun sendiri TM Hingga akhir tahun 2023 telah mencapai 42.171 ton atau 78,86% dari RKAP 2023 dan 94,95% terhadap realisasi periode yang sama di tahun 2022, sehingga produktivitas teh hingga akhir tahun 2023 telah mencapai 1.814 kg teh kering/ha TM atau 80,64% terhadap RKAP 2023, dan 94,50% terhadap realisasi periode yang sama di tahun 2022.

Until the end of 2023, the PTPN Group tea plantation area in accordance with the 2023 RKAP is 23,637.23 ha with a composition of Mature Plants™ covering 23,252.82 Ha (98.37%) , Immature Plants (TBM) covering 384.41 Ha or 1.63 %, and there was no realization of this year's Crop (TTI) .

In 2023, wet production from own plantations (TM+Lancuran) has reached 190,009 tons or 78.60 % of the 2023 RKAP and 94.44% of the realization for the same period in 2022. PTPN VIII's own plantation wet production results have been sold to parties 3rd amounted to 1,610 tons (18.07 % of PTPN VIII's total wet production and 0.83% of PTPN's total wet production). Meanwhile, TM's own dry tea production from the garden by the end of 2023 had reached 42,171 tons or 78.86 % of the 2023 RKAP and 94.95 % of the realization for the same period in 2022, so that tea productivity by the end of 2023 had reached 1,814 kg of dry tea. /ha TM or 80.64 % of the 2023 RKAP, and 94.50% of the realization for the same period in 2022.

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian produksi dan produktivitas teh di tahun 2023, yakni:

1. Realisasi pemupukan sampai dengan bulan Desember 2023 tercapai 100 kg N/ha TM atau 57,11% terhadap RKAP 2023 dan 82,43% terhadap realisasi periode yang sama Tahun 2022;
2. Adanya musim kemarau "status elnino" yang berkepanjangan berdampak tanaman stagnan, terhambatnya aktivitas pemupukan, kesehatan tanaman rendah hingga terjadi kelayuan dan kematian tanaman teh di beberapa blok;
3. Gagalnya meraih produksi sesuai target atau potensi pada periode *flushing* Semester I-2023 dengan masih terjadi losis produksi, pucuk tidak terpanen, *recovery* tanaman rusak (perlu waktu 2-3 bulan dalam *recovery* areal terdampak hingga layak petik).

Produksi teh kering dari hasil pembelian bahan baku pucuk dari pihak ke-3 di tahun 2023 telah mencapai 662 ton atau 91,55% dari RKAP 2023 dan 95,16% dari realisasi periode yang sama dari tahun 2022. Tahun 2023 tidak ada produksi dari areal lancuran/ATP sehingga pada akhir tahun 2023, pencapaian produksi kering telah mencapai total 42.833 ton atau 79,03% terhadap RKAP 2023 dan 87,50% dari realisasi periode tahun 2022.

Produksi teh hitam orthodoks hingga akhir tahun 2023 sebesar 36.943 ton dengan mutu I tercapai 57,53% atau 93,10% terhadap RKAP 2023, dan 92,96% terhadap realisasi periode yang sama di tahun 2022, sedangkan produksi teh hitam CTC hingga akhir tahun 2023 sebesar 4.663 ton dengan mutu I tercapai 68,06% atau 85,69% terhadap RKAP 2023 namun 96,17% terhadap periode yang sama di tahun 2022. Produksi teh jadi lainnya ialah teh oolong yang telah diproduksi oleh PTPN VIII sebesar 26 ton dan teh hijau sebesar 794 ton yang diproduksi oleh PTPN IX, sehingga total produksi teh jadi yang dihasilkan oleh pabrik sendiri sebesar 42.426 ton.

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya mutu produksi teh hitam di tahun 2023, yakni:

1. Belum optimal terbangun komitmen untuk mencapai analisa pucuk sesuai standar, realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 untuk bahan baku olah teh hitam orthodoks hanya tercapai 50,33% atau 83,88% terhadap standar (minimal 60%) dan untuk bahan baku teh hitam CTC tercapai 59,19% atau 91,06% terhadap standar (minimal 65%) dengan rata-rata kandungan serat pada bahan baku pucuk masih tinggi sebagai dampak dari tanaman kurang nutrisi-terpelihara, teknis panen tidak tepat dan manajemen olah di Pabrik yang kurang baik (kapasitas olah rendah dan/atau pembatasan pasokan menyebabkan kontribusi pucuk kasar kaboler tidak terpanen).

In general, there are several factors that cause tea production and productivity to not be achieved optimally in 2023, namely:

1. Fertilization realization up to December 2023 reached 100 kg N/ha TM or 57.11% of the 2023 RKAP and 82.43% of the realization for the same period in 2022;
2. The prolonged dry season "elnino status" resulted in stagnant plants, hampered fertilization activities, low plant health, resulting in withering and death of tea plants in several blocks;
3. Failure to achieve production according to target or potential during the *flushing period* of Semester I-2023 with production losses still occurring, shoots not being harvested, plant *recovery* being damaged (it takes 2-3 months for the affected area *to recover* until it is fit for picking).

Dry tea production from the purchase of shoot raw materials from third parties in 2023 has reached 662 tons or 91.55 % of the 2023 RKAP and 95.16 % of the realization for the same period from 2022. In 2023 there will be no production from the area launch/ATP so that at the end of 2023, the dry production achievement has reached a total of 42,833 tons or 79.03% of the 2023 RKAP and 87.50% of the realization for the 2022 period .

Orthodox black tea production until the end of 2023 was 36,943 tons with quality I achieved 57.53 % or 93.10 % of the 2023 RKAP, and 92.96 % of the realization for the same period in 2022, while CTC black tea production until the end of the year 2023 amounting to 4,663 tons with quality I achieved 68.06 % or 85.69% of the 2023 RKAP but 96.17 % for the same period in 2022. Other finished tea production is oolong tea which has been produced by PTPN VIII amounting to 26 tons and 794 tons of green tea were produced by PTPN IX, so the total production of finished tea produced by the mill itself was 42,426 tons.

In general, there are several factors that cause the quality of black tea production to not be achieved in 2023, namely:

1. The commitment to achieve bud analysis according to standards has not yet been optimally developed, the realization until December 2023 for raw materials processed for orthodox black tea has only been achieved at 50.33% or 83.88% of the standard (minimum 60%) and for raw materials for CTC black tea it has been achieved 59.19% or 91.06% against the standard (minimum 65%) with the average fiber content in shoot raw materials still high as a result of poorly maintained plants, improper harvesting techniques and poor processing management at the mill (low processing capacity and/or supply restrictions cause the contribution of coarse shoots of kaboler not to be harvested).

2. Selain itu, karena masih terdapat areal-areal TM dengan gulma tidak terkendali menyebabkan teknis panen yang tidak optimal dan bahan baku pucuk terkontaminasi gulma, potensi masuk pasar Eropa yang lemah dengan tidak memenuhinya *EU Compliance* dengan klaim kandungan PA > MRL.
3. Kondisi mesin di beberapa pabrik belum selesai distandarisasi untuk presisi dan kapasitasnya serta mesin yang ada tidak terpelihara dengan standar. Keterlambatan dalam eksekusi investasi non tanaman dan pemeliharaan rutin menyebabkan perubahan dan perbaikan hasil olah serta efisiensi masih stagnan atau fluktuatif.
4. Keterbatasan performa mesin menjadi *bottleneck* kapasitas olah, termasuk dengan segala kekurangannya SDM belum terampil, disiplin dan sigap melakukan *setting* dengan rekayasa pelaksanaan proses olah untuk menghasilkan mutu produksi dan persentase mutu secara optimal serta konsisten. Untuk pabrik yang beroperasi diperlukan seleksi asisten atau karyawan pimpinan yang benar-benar memiliki kompetensi dan kecakapan dalam menjalankan operasional di Pabrik.
5. Kualitas bahan bakar rendah dengan MC/kadar air yang masih tinggi dengan stok bahan bakar dibawah standar umur simpannya (*out-spek*), menyebabkan kualitas suhu pengeringan rendah/berpotensi fluktuatif.

2. Apart from that, because there are still TM areas with uncontrolled weeds causing sub-optimal harvesting techniques and shoot raw materials contaminated with weeds, the potential for entering the European market is weak due to non-compliance with *EU Compliance* with PA > MRL content claims.
3. The condition of machines in several mills has not yet been standardized for precision and capacity and existing machines are not maintained to standards. Delays in the execution of non-plant investments and routine maintenance cause changes and improvements in processing results and efficiency to remain stagnant or fluctuating.
4. Limited machine performance becomes *a bottleneck* in processing capacity, including all the shortcomings of human resources who are not yet skilled, disciplined and ready to carry out engineering *arrangements* for the implementation of the processing process to produce optimal and consistent production quality and quality percentages. For operating mills, it is necessary to select assistants or leadership employees who truly have the competence and skills in carrying out operations at the mill.
5. Low fuel quality with MC/moisture content that is still high with fuel stock below the standard shelf life (*out-spec*), causing the drying temperature quality to be low/ potentially fluctuating.

Produksi dan Produktivitas Kopi

Coffee Production and Productivity

Uraian Description	*Holding*				
	Realisasi 2022 2022 Realization	Realisasi 2023 2023 Realization	RKAP 2023 2023 RKAP	Pencapaian Achievement	
1	2	3	4	5 (3 : 4)	6 (3 : 2)
Kopi Arabika | Arabica Coffee					
Areal TM (ha) | TM area (ha)	3.552,56	3.655,22	3.655,22	100,00	102,89
Produksi Basah (ton) | Wet Production (tons)					
Kebun Sendiri | Own Plantations	5.657,58	7.149	7.638	93,61	126,36
Pembelian Pihak ke-3 | Third-Party Purchases	-	-	-	-	-
Jumlah Produksi Basah | Total Wet Production	5.657,58	7.149	7.638	93,61	126,36
Produksi Kering (ton) | Dry Production (tons)					
Kebun Sendiri | Own Plantations	959,37	1.209	1.258	96,08	125,97
Pembelian Pihak ke-3 | Third-Party Purchases	-	-	-	-	-
Jumlah Produksi Kering | Total Dry Production	959,37	1.209	1.258	96,08	125,97
Produktivitas (kg/ha) | Productivity (kg/ha)	270,05	331	344	96,08	122,43

Uraian Description	Holding				
	Realisasi 2022 2022 Realization	Realisasi 2023 2023 Realization	RKAP 2023 2023 RKAP	Pencapaian Achievement	
1	2	3	4	5 (3 : 4)	6 (3 : 2)
Rendemen (%) | Yield (%)					
Kebun Sendiri | Own Plantations					
Pembelian Pihak ke-3 | Third-Party Purchases	-	-	-	-	-
Rata-rata Rendemen | Average Yield	16,96	16,91	16,47	102,64	99,68
Kopi Robusta | Robusta Coffee					
Areal TM (ha) | TM area (ha)	4.423,24	4.596,12	4.596,12	100,00	96,66
Produksi Basah (ton) | Wet Production (tons)					
Kebun Sendiri | Own Plantations	7.392	6.517	9.489	68,68	88,17
Pembelian Pihak ke-3 | Third-Party Purchases	-	-	-	-	-
Jumlah Produksi Basah | Total Wet Production	7.392	6.517	9.489	68,68	88,17
Produksi Kering (ton)					
Kebun Sendiri | Own Plantations	1.724	1.490	2.061	72,28	86,41
Pembelian Pihak ke-3 | Third-Party Purchases	-	-	-	-	-
Jumlah Produksi Kering | Total Dry Production	1.724	1.490	2.061	72,28	86,41
Produktivitas (kg/ha) | Productivity (kg/ha)	390	325	449	72,28	83,25
Rendemen (%)					
Kebun Sendiri | Own Plantations	23,33	22,68	21,72	105,25	98,01
Pembelian Pihak ke-3 | Third-Party Purchases	-	-	-	-	-
Rata-rata Rendemen | Average Yield	23,33	22,68	21,72	105,25	98,01

Pada tahun 2023, areal tanaman kopi arabika PTPN memiliki realisasi seluas 5.341,96 ha dengan komposisi terhadap areal tanaman untuk Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 3.655,22 ha atau 68,42% Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 1.028,03 ha atau 19,24%, Tanaman Tahun Ini (TU/TK/TB) seluas 251,70 ha atau 4,71%, dan TTAD seluas 407,01 ha atau 7,62%. Pada areal tanaman realisasi terhadap RKAP, untuk TM sebesar 100,00%, TBM 100,00%, TTI 106,34% TTAD 146,31%, perubahan areal ini terdapat di KSO PTPN V dan PTPN XII atas dasar kesepakatan kedua pihak KSO untuk percepatan peningkatan kinerja produksi/produktivitas sejalan dengan Pedoman Umum Penyusunan RKAP Tahun 2023.

Hingga akhir tahun 2023, produksi kopi arabika kering *green bean*, hasil kebun sendiri PTPN Grup melalui PTPN VI telah mencapai 29 ton atau 103,67% terhadap RKAP 2023,

In 2023, PTPN's Arabica coffee plantation area will have a realized area of 5,341.96 ha with a composition of plantation area for Mature Crops (TM) of 3,655.22 ha or 68.42 % of Immature Plants (TBM) of 1,028.03 ha or 19 .24 %, this year's crop (TU/TK/TB) is 251.70 ha or 4.71 %, and TTAD is 407.01 ha or 7.62 %. In the realized plant area against the RKAP, for TM of 100.00 %, TBM 100.00 %, TTI 106.34 % TTAD 146.31 %, changes to this area are in KSO PTPN V and PTPN XII based on the agreement of both KSO parties to accelerated increase in production performance/productivity in line with the General Guidelines for Preparing the 2023 RKAP.

Until the end of 2023, the production of green bean dry Arabica coffee, the result of PTPN Group's own plantations through PTPN VI has reached 29 tons or 103.67 % of the

dan 122,87% dari periode yang sama dari tahun 2022 (hasil akhir kopi arabika PTPN VI dominan HS), PTPN IX sebesar 1 ton atau 34,83% terhadap RKAP 2023 dan 96,17% terhadap periode yang sama di tahun 2022, serta PTPN XII (termasuk PTPN V KSO) sebesar 1.179 ton atau 96,04% terhadap RKAP 2023 dan 126,07% terhadap periode yang sama pada tahun 2022. Untuk produksi KSO sendiri ialah sebesar 885 ton atau 10,55% terhadap RKAP 2023, sedangkan produktivitas telah mencapai 482 ton/ha atau 100,55% terhadap RKAP 2023 kebun Blawan dan Kalisat Jampit (Java Coffee Estate).

2023 RKAP, and 122.87 % of the same period from 2022 (final Arabica coffee production PTPN VI dominantly HS), PTPN IX of 1 ton or 34.83 % of the 2023 RKAP and 96.17 % of the same period in 2022, and PTPN XII (including PTPN V KSO) of 1,179 tons or 96.04 % against the 2023 RKAP and 126.07 % for the same period in 2022. KSO production itself is 885 tons or 10.55 % of the 2023 RKAP, while productivity has reached 482 tons/ha or 100.55 % of the plantation's 2023 RKAP Blawan and Kalisat Jampit (Java Coffee Estate).

Pada produksi kopi arabika kering total di PTPN Grup telah mencapai total 1.209 ton atau 96,08% dari RKAP 2023, dan 125,97% dari periode yang sama di tahun 2022. Produktivitas kopi arabika sampai dengan akhir tahun 2023 ialah sebesar 331 kg/ha atau 96,08% dari RKAP 2023 dan 122,43% dengan periode yang sama di tahun 2022.

Total dry Arabica coffee production at PTPN Group has reached a total of 1,209 tons or 96.08 % of the 2023 RKAP, and 125.97 % of the same period in 2022. Arabica coffee productivity until the end of 2023 is 331 kg/ha or 96.08 % of the 2023 RKAP and 122.43 % for the same period in 2022.

Ketercapaian ini dipengaruhi oleh komitmen pelaksanaan *best practice* dalam pengelolaan tanaman secara intensif yang belum dilaksanakan di semua PTPN. Saat ini, *best practice* tersebut baru dilaksanakan di KSO JCE dengan dukungan finansial yang tepat waktu serta kemampuan SDM yang kompeten.

This achievement is influenced by the commitment to implementing best practices in intensive crop management, which has not yet been carried out in all PTPNs. Currently, these best practices are only implemented at KSO JCE with timely financial support and competent human resources.

Luas areal tanaman kopi robusta PTPN Grup Tahun 2023 adalah 4.596,12 ha dengan TM seluas 4.591,12 ha (99,89%), TBM seluas 5,00 ha (0,11%) dan tidak ada areal TTI (TU/TK/TB) dan TTAD karena agar fokus pada intensifikasi areal *existing* supaya dapat produktif dan efisien.

The PTPN Group Robusta coffee plantation area in 2023 is 4,596.12 ha with TM of 4,591.12 ha (99.89%), TBM of 5.00 ha (0.11%) and no TTI area (TU/TK/ TB) and TTAD because they need to focus on intensifying the *existing area* so that it can be productive and efficient.

Produksi kopi robusta hingga Desember 2023 dihasilkan oleh PTPN IX setara dengan 398 ton *green bean* dan PTPN XII sebanyak 1.092 ton sehingga total produksi kopi robusta PTPN s.d. Desember 2023 adalah 1.490 ton atau 72,28% terhadap RKAP 2023 dan 86,41% terhadap periode yang sama Tahun 2022. Pencapaian produksi tersebut setara dengan produktivitas 325 kg/ha atau 72,28% terhadap RKAP 2023 dan 83,25% terhadap Tahun 2022.

Robusta coffee production until December 2023 produced by PTPN IX is equivalent to 398 tons of *green beans* and PTPN the same in 2022. This production achievement is equivalent to productivity of 325 kg/ha or 72.28% of the 2023 RKAP and 83.25% of 2022.

Produktivitas kopi robusta tertinggi dicapai PTPN IX sebesar 634 kg/ha TM atau 101,67% terhadap RKAP 2023 dan 120,98% terhadap realisasi pada periode yang sama Tahun 2022 sedangkan PTPN XII hanya mencapai 276 kg/ha TM atau 65,40% terhadap RKAP 2023 dan 74,95% terhadap realisasi pada periode yang sama Tahun 2022. Signifikan disparitas atau *gap* produktivitas antara PTPN IX dan PTPN XII, salah satu faktornya adalah PTPN XII baik tahun lalu maupun tahun ini tidak ada aplikasi pemupukan sedangkan PTPN I ada aplikasi pemupukan walaupun di Tahun 2023 hanya mencapai 10,96% terhadap RKAP 2023 dan 24,97% terhadap realisasi periode yang sama Tahun 2022.

The highest robusta coffee productivity was achieved by PTPN IX at 634 kg/ha TM or 101.67% of the 2023 RKAP and 120.98% of the realization in the same period in 2022, while PTPN XII only reached 276 kg/ha TM or 65.40% of RKAP 2023 and 74.95% of the realization in the same period in 2022. There is a significant disparity or gap in productivity between PTPN IX and PTPN XII, one of the factors is that PTPN although in 2023 it will only reach 10.96% of the 2023 RKAP and 24.97% of the realization for the same period in 2022.

Profitabilitas Segmen Usaha

Perseroan telah mencatat pendapatan usaha di tahun 2023, sebesar Rp51,12 triliun. Jumlah pendapatan ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yakni 8,48%. Adapun hasil pendapatan tersebut diperoleh melalui segmen komoditi kelapa sawit yang merupakan kontributor terbesar, yakni Rp5,35 triliun dan mengalami penurunan 45,79% dibanding pendapatan tahun sebelumnya yang telah memperoleh Rp9,86 triliun. Tidak hanya komoditi kelapa sawit, segmen komoditi lainnya juga telah mencatatkan penurunan dibanding capaian pendapatan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp55,86 triliun.

Berbeda dengan segmen kelapa sawit yang telah memberikan kontribusi pendapatan besar, pada segmen produk karet, Perseroan mencatat pencapaian usaha produk karet di tahun 2023 telah mengalami kerugian sebesar Rp1,10 triliun, dan mengalami kerugian yang meningkat 202,77% dibanding kerugian tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp0,36 triliun. Selain produk karet, segmen usaha lainnya seperti teh, tebu, kopi, kakao, dan lainnya juga telah mencatatkan kerugian sebesar Rp1.20 triliun. Jumlah kerugian tersebut turun sebesar 37,42%. Dibandingkan kerugian tahun sebelumnya. Selain mencatatkan kerugian, Perseroan juga telah mencatatkan pendapatan di segmen pendapatan tembakau yakni sebesar Rp21,44 miliar, dan naik sebesar 13,30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian, di tahun 2023 ini Perseroan juga telah mencatat realisasi dari produk kelapa sawit telah memberikan kontribusi laba sebesar Rp5,35 triliun, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 45,79% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp9,86 triliun.

Business Segment Profitability

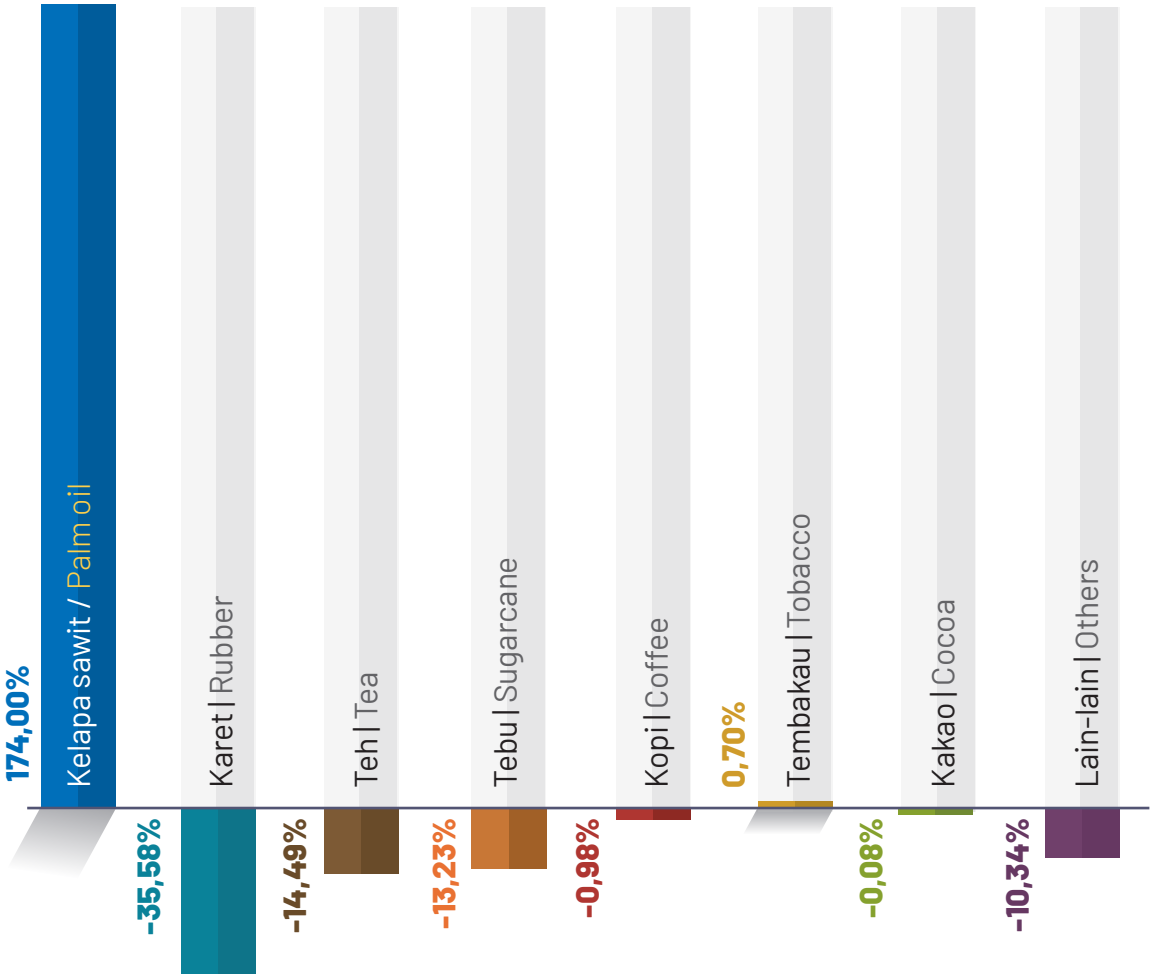
The company recorded business revenue in 2023 amounting to Rp51.12 trillion. This revenue experienced a decrease compared to the previous year, namely 8.48%. This revenue was obtained through the palm oil commodity segment, which is the largest contributor, amounting to Rp5.35 trillion, experiencing a decrease of 45.79% compared to the previous year's revenue of Rp9.86 trillion. Not only the palm oil commodity but also other commodity segments have recorded a decrease compared to the previous year's revenue of Rp55.86 trillion.

Unlike the palm oil segment, which has provided significant revenue contribution, in the rubber product segment, the company recorded a loss in business achievement in 2023 amounting to Rp1.10 trillion, an increase of 202.77% compared to the previous year's loss of Rp0.36 trillion. Besides rubber products, other business segments such as tea, sugar cane, coffee, cocoa, and others have also recorded a loss of Rp1.20 trillion. This loss decreased by 37.42% compared to the previous year's loss. In addition to recording losses, the company also recorded revenue in the tobacco revenue segment amounting to Rp21.44 billion, an increase of 13.30% compared to the previous year.

Furthermore, in 2023, the company also recorded that palm oil product realization contributed a profit of Rp5.35 trillion, which experienced a decrease of 45.79% compared to the previous year, which was recorded at Rp9.86 trillion.



Komposisi Penjualan
Sales Composition



Selama tahun 2023, segmen usaha kelapa sawit telah menjadi kontributor terbesar bagi Perusahaan, dengan 174% total penjualan. Kemudian disusul oleh komoditi tembakau yang telah memberikan kontribusi sebesar 0,70%.

Throughout the year 2023, the palm oil business segment has been the largest contributor to the Company, accounting for 174% of total sales. This is followed by the tobacco commodity, which contributed 0.70%.

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

Standar Penyajian Informasi Dan Kesesuaian Terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Uraian kinerja keuangan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk laporan tahunan 2023 mengacu pada laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY).

Laporan Keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Presentation Of Standard Information And Compliance With Financial Accounting Standards

The financial performance description of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) for the annual report of 2023 refers to the financial statements ending on 31 December 2023 and 31 December 2022, which the Public Accountant Office has audited Purwantono, Sungkoro & Surja (EY).

The Company's Financial Statements are prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards (FAS) in Indonesia, namely, the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS), which includes Statements and Interpretations issued by the Standards Board and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the Indonesian Institute of Accountants Accounting Standards Board.

Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Position

(dalam jutaan Rupiah) / (in million Rupiah)

Uraian / Description	Holding			
	2023	2022	Selisih / Difference	Yoy 2023-2022 / 2023-2022 yoy
Aset | Assets				
Aset Lancar Current Assets	21.509.109	29.746.310	(8.237.201)	-27,69%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	122.390.645	119.409.539	2.981.106	2,50%
Jumlah Aset Total Assets	**143.899.755**	**149.155.850**	**(5.256.095)**	**-3,52%**
Liabilitas Dan Ekuitas | Liabilities And Equity				
Liabilitas | Liabilities				
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	21.945.178	26.126.560	(4.381.410)	-16,77%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	51.268.950	52.913.144	(1.444.167)	-2,73%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**73.214.128**	**79.039.705**	**(5.825.578)**	**-7,37%**
Ekuitas | Equity				
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Total Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity	66.115.030	65.382.960	732.070	1,12%

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	Holding			
	2023	2022	Selisih Difference	Yoy 2023-2022 2023-2022 yoy
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali Equity Attributable to the Non-controlling Interest	4.570.597	4.733.183	(162.587)	-3,44%
Jumlah Ekuitas | Total Equity	**70.685.627**	**70.116.144**	**569.483**	**0,81%**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | Total Liabilities and Equity	**143.899.755**	**149.155.850**	**(5.256.095)**	**-3,52%**

Aset

Pada tahun 2023, Perusahaan telah membukukan total Aset senilai Rp143.900 miliar, lebih rendah 3,52% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp149.155 miliar. Adapun penurunan Aset ini dipengaruhi oleh penurunan kas dan setara kas dan persediaan.

Asset

In 2023, the Company recorded total assets amounting to Rp143,900 billion, a decrease of 3.52% compared to 2022, which was Rp149,155 billion. This decrease in assets is influenced by the decline in cash and cash equivalents and inventory.

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	Holding			
	2023	2022	Selisih Difference	Yoy 2023-2022 2023-2022 yoy
Aset Lancar | Current Assets				
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	7.085.854	10.862.010	(3.776.156)	-34,76%
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash	1.671.546	2.282.287	(610.741)	-26,76%
Piutang Usaha | Trade receivables				
Pihak ketiga Third parties	1.155.433	1.570.653	(415.220)	-26,44%
Pihak berelasi Related parties	218.218	59.341	158.877	267,74%
Piutang Lain-Lain | Other receivables				
Pihak ketiga Third parties	515.097	545.205	(30.108)	-5,52%
Pihak berelasi Related parties	278.129	485.991	(207.863)	-42,77%
Persediaan - neto Inventories - net	5.859.683	10.428.672	(4.568.989)	-43,81%
Aset biologis Biological assets	2.094.881	2.014.322	80.559	4,00%
Aset lancar lainnya Other current assets	1.040.488	373.983	666.505	178,22%
Total Aset Lancar Total Current Assets	**21.509.109**	**29.746.310**	**(8.237.201)**	**-27,69%**

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	Holding			
	2023	2022	Selisih Difference	Yoy 2023-2022 2023-2022 yoy
Aset Tidak Lancar | Non-Current Assets				
Piutang lain-lain jangka panjang Other long-term receivables	337.050	259.618	77.431	29,82%
Investasi saham Investments in shares of stock	1.985.058	1.777.667	207.391	11,67%
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	562.186,00	1.020.962	(458.776)	-44,94%
Aset hak guna Right of use assets	552.826,00	276.902	275.924	99,65%
Aset tetap Fixed assets	106.912.294	104.831.544,00	2.080.750	1,98%
Aset biologis Biological assets	402.758	527.9301	(125.173)	-23,71%
Properti investasi Investment property	8.813.171	8.708.117	105.054	1,21%
Beban tangguhan - hak atas tanah Deferred charge – land rights	584.049	511.995	72.054	14,07%
Piutang tagihan pajak Claim for tax refund	991.463	661.650	329.813	49,85%
Total Aset Tidak Lancar | Total Non-Current Assets	**122.390.645**	**119.409.539**	**2.981.106**	**2,50%**
Jumlah Aset | Total Assets	**143.899.755**	**149.155.850**	**(5.256.095)**	**-3,52%**

Aset Lancar

Jumlah Aset lancar pada tahun 2023 telah mencapai Rp21,51 triliun, turun 27,69% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp29,746 triliun. Adapun penurunan Aset ini dipengaruhi oleh penurunan kas dan setara kas dan persediaan.

Current assets

The total current assets in 2023 reached Rp21.51 trillion, a decrease of 27.69% compared to 2022, which was Rp29.746 trillion. This decline in assets was influenced by a reduction in cash and cash equivalents and inventory.

Aset Tidak Lancar

Jumlah Aset tidak lancar di tahun 2023 sebesar Rp122,39 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp119,41. Kenaikan 2,50% ini disebabkan oleh adanya penambahan aset berupa mesin dan peralatan di tahun 2023 sebesar Rp2,054 miliar.

Non-Current Assets

The total non-current assets in 2023 amounted to Rp122.39 trillion, higher than the Rp119.41 trillion in 2022. This 2.50% increase was due to the addition of assets in the form of machinery and equipment, which amounted to Rp2.054 billion in 2023.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Perusahaan selama tahun 2023 sebesar Rp73,21 triliun, jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp79,04 triliun. Adanya penurunan liabilitas Perusahaan dipengaruhi oleh penurunan hutang jangka panjang perbankan (pokok) sebesar Rp2,81 miliar

Liabilities

The decrease in the Company's liabilities is influenced by the decrease in long-term bank loans (principal) amounting to Rp2.81 billion and accrued interest of Rp945 million. In addition to these factors, there is a decrease in long-term liabilities consisting of employee benefits liabilities and deferred tax

dan bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp945 Juta, selain hal tersebut terdapat penurunan liabilitas jangka panjang yang terdiri dari liabilitas imbalan kerja karyawan dan liabilitas pajak tangguhan. liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp1,60 triliun yang disebabkan adanya realisasi pembayaran karyawan pensiun, penurunan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp181 juta.

liabilities. The long-term employee benefits liabilities amount to Rp1.60 trillion, attributed to the realization of payments to retired employees, and a decrease in deferred tax liabilities of Rp181 million.

(dalam jutaan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian Description	Holding			
	2023	2022	Selisih Difference	Yoy 2023-2022 2023-2022 yoy
Liabilitas Jangka Pendek | Current Liabilities				
Utang bank jangka pendek Short-term bank loans	46.464	262.122	(215.658)	-82,27%
Utang Usaha | Trade payables				
Pihak ketiga Third parties	6.824.988	5.306.845	1.518.143	28,61%
Pihak berelasi Related parties	194.251	339.220	(144.969)	-42,74%
Utang Lain-Lain | Other payables				
Pihak ketiga Third parties	844.574	606.286	238.288	39,30%
Pihak berelasi Related parties	587.798	529.054	58.744	11,10%
Liabilitas kontrak Contract liabilities	2.152.815	2.556.213	(403.398)	-15,78%
Utang pajak Taxes payables	653.328	1.224.769	(571.441)	-46,66%
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses	2.262.873	4.563.969	(2.301.096)	-50,42%
Bagian lancar atas pendapatan diterima di muka Current portion of unearned revenue	208.284	10.752	197.532	1837,24%
Liabilitas sewa bagian lancar Current portion of lease liabilities	215.194	144.002	71.192	49,44%
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**21.945.178**	**26.126.560**	**(4.381.410)**	**-16,77%**

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	Holding			
	2023	2022	Selisih Difference	Yoy 2023-2022 2023-2022 yoy
Liabilitas Jangka Panjang | Non-Current Liabilities				
Utang Lain-Lain Jangka Panjang | Other long-term payables				
Pendapatan diterima di muka Unearned revenue	890.915	480.701	410.214	85,34%
Utang jangka panjang Long-term debt	35.886.808	35.704.734	182.074	0,51%
Liabilitas imbalan kerja karyawan Employee benefit obligations	13.550.807	15.150.927	(1.600.120)	-10,56%
Liabilitas pajak tangguhan – neto Deferred tax liabilities - Net	940.532	1.121.478	(180.946)	-16,13%
Liabilitas sewa Lease liabilities	199.917	139.576	60.341	43,23%
Total Liabilitas Jangka Panjang Total long-term liabilities	**51.268.950**	**52.913.145**	**(1.444.167)**	**-2,73%**
Jumlah Liabilitas Total liabilities	**73.214.128**	**79.039.706**	**(5.825.578)**	**-7,37%**

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tahun 2023, jumlah liabilitas jangka pendek Perusahaan sebesar Rp21,94 triliun, lebih rendah 16,77% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp26,13 triliun. Adanya penurunan ini dipengaruhi oleh adanya penurunan hutang jangka panjang perbankan (pokok) dan bunga yang masih harus dibayar.

Short-Term Liabilities

In 2023, the Company's short-term liabilities amounted to Rp21.94 trillion, which is 16.77% lower than in 2022, which was Rp26.13 trillion. This decrease was influenced by a reduction in long-term bank loans (principal) and accrued interest that still needed to be paid.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tahun 2023, jumlah liabilitas jangka panjang Perusahaan sebesar Rp51,27 triliun, lebih rendah 2,73% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp52.92 triliun. Adanya penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp1,60 triliun, penurunan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp945 juta, dan kenaikan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp410 juta.

Long Term Liabilities

In 2023, the Company's long-term liabilities amounted to Rp51.27 trillion, which is 2.73% lower than in 2022, which was Rp52.92 trillion. This decrease is influenced by a decrease in employee benefits liabilities by Rp1.60 trillion, a decrease in deferred tax liabilities by Rp945 million, and an increase in advance received income by Rp410 million.

Ekuitas

Per 31 Desember 2023, jumlah ekuitas Perusahaan sebesar Rp70,68 triliun, mengalami kenaikan 0,81% dibanding jumlah ekuitas tahun 2022 yang sebesar Rp70,12 triliun.

Equity

As of December 31, 2023, the Company's equity amounted to Rp70.68 trillion, representing an increase of 0.81% compared to the equity of Rp70.12 trillion in 2022.Rp70.12 trillion.

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	Holding			
	2023	2022	Selisih Difference	Yoy 2023-2022 2023-2022 yoy
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity				
Modal saham Share capital	40.216.132	40.216.132	0	0,00%
Komponen ekuitas lainnya Other components of equity	(13.589.154)	(13.589.154)	0	0,00%
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	(42.158)	-28.375	(13.783)	48,57%
Saldo Laba/(Rugi) Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	7.236.401	1.603.337	5.633.064	351,33%
Belum ditentukan Penggunaannya Unappropriated	(13.369.102)	(7.869.270)	(5.499.832)	69,89%
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Total Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity	66.115.030	65.382.960	732.070	1,12%
Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada kepentingan non-pengendali Total Equity Attributable to the Noncontrolling Interest	4.570.597	4.733.184	(162.587)	-3,44%

Laba (Rugi) Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Hingga akhir tahun 2023, jumlah pendapatan Perusahaan sebesar Rp50,98 triliun, mengalami penurunan sebesar 8,74% dibandingkan jumlah pendapatan di tahun 2022 yang sebesar Rp55,86 triliun.

Consolidated Profit (Loss) And Other Comprehensive Income

Until the end of 2023, the Company's revenue amounted to Rp50.98 trillion, experiencing a decrease of 8.74% compared to the revenue in 2022, which was Rp55.86 trillion.

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	Holding			
	2023	2022	Selisih Difference	Yoy 2023-2022 2023-2022 yoy
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity				
Pendapatan Revenue	50.981.397	55.863.302	(4.881.905)	-8,74%
Beban pokok pendapatan Cost Of Goods Sold	(38.234.291)	(36.669.237)	(1.565.054)	4,27%
Laba bruto Gross Profit	12.747.106	19.194.065	(6.446.959)	-33,59%
Keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis Gain on changes in fair value of biological assets	43.646	(377.119)	111,57%	420.765

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	Holding			
	2023	2022	Selisih Difference	Yoy 2023-2022 2023-2022 yoy
Beban pemasaran dan penjualan Marketing and selling expenses	(1.032.974)	(856.341)	1.889.315	220,63%
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(6.787.255)	(8.259.387)	1.472.132	-17,82%
Pendapatan operasi lain Other operating revenue	2.589.107	3.526.493	(937.386)	-26,58%
Beban operasi lain Other operating expenses	(1.945.721,00)	(2.459.456,00)	513.735	-20,89%
Laba usaha Income from operations	5.613.908	10.768.255	(5.154.347)	-47,87%
Bagian laba entitas Share in profits of associates	259.222	226.053	33.169	14,67%
Pendapatan keuangan Finance income	237.617	191.462,00	46.155	24,11%
Beban keuangan Finance expense	(3.751.386)	(3.151.477)	(599.909)	19,04%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Income (loss) before income tax expense	2.359.361	8.034.294	(5.674.933)	-70,63%
Beban pajak penghasilan Income tax expense	(1.337.055)	(2.017.313)	680.258	-33,72%
Laba tahun berjalan Loss for the year	1.022.306	6.016.981	(4.994.675)	-83,01%
Penghasilan Komprehensif Lain: Other comprehensive income:				
Revaluasi aset tetap Revaluation of fixed assets	579.722	(116.730)	696.452	596,63%
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan Remeasurement of employee benefits liabilities	(1.016.280)	(1.411.629)	395.349	-28,01%
Nilai wajar aset keuangan keuangan – neto Fair value of financial assets income adjustment- net	(18.076)	(161.436)	143.360	88,80%
Bagian penghasilan komprehensif dari entitas asosiasi - kerugian aktuaria Share in other comprehensive income of associate entities - actuaria loss	2.467	1.006	1.461	145,23%
Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi: Items that will be reclassified to profit or loss:				
Penghasilan (Rugi) komprehensif lain tahun berjalan - neto setelah pajak Other comprehensive income (loss) for the current year - net of tax	(452.167)	(1.688.789)	1.236.622	-73,23%
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income (loss) for the current year	570.139	4.328.192	(3.758.053)	-86,83%

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	Holding			
	2023	2022	Selisih Difference	Yoy 2023-2022 2023-2022 yoy
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Income (Loss) For the Year Attributable To:				
Pemilik entitas induk Owners of the Parent	1.085.206	5.633.064	(4.547.858)	-80,74%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interest	(62.900)	383.917	(446.817)	-116,38%
Total	**1.022.306**	**6.016.981**	**(4.994.675)**	**-83,01%**
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Loss For The Year Attributable To:				
Pemilik entitas induk Owners of the parent	732.069	4.112.324	(3.380.255)	-82,20%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interest	(161.930)	215.868	(377.798)	-175,01%
Total	**570.139**	**4.328.192**	**(3.758.053)**	**-86,83%**
Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah penuh) Net income (loss) per basic share attributable to the parent entity's owners (in full Rupiah)	26.984	140.069	(113.085)	-80,74%

Arus Kas Konsolidasian

Kas merupakan salah satu jenis aset yang memiliki tingkat likuiditas tertinggi, sehingga semakin besar nilainya, semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Laporan arus kas merupakan suatu laporan keuangan yang mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini biasanya terbagi menjadi tiga kegiatan utama, yaitu kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan.

Pada akhir tahun 2023, Perusahaan telah mencatatkan kas dan setara kas sebesar Rp8,76 triliun. Jumlah ini menurun 33,37% dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp13,14 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya pembayaran kepada karyawan dan pemasok pada tahun 2023.

Consolidated Cash Flows

Cash is one of the most liquid types of assets, and its value reflects the financial health of a company. The cash flow statement is a financial report that records the inflows and outflows of cash in a company over a specific period. This statement is typically divided into three main activities: operating, investing, and financing.

By the end of 2023, the Company had recorded cash and cash equivalents amounting to Rp8.76 trillion. This figure represents a decrease of 33.37% compared to Rp13.14 trillion in 2022. The decrease was influenced by payments made to employees and suppliers in 2023.

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	Holding			
	2023	2022	Selisih Difference	Yoy 2023-2022 2023-2022 yoy
Arus kas dari (untuk) aktivitas operasi Cash flows from operating activities	10.659.427	6.738.357	3.921.070	58,19%
Arus kas dari (untuk) aktivitas investasi Cash flows from investing activities	(4.317.186)	(2.832.837)	(1.484.349)	52,40%

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	Holding			
	2023	2022	Selisih Difference	Yoy 2023-2022 2023-2022 yoy
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flows from financing activities	(10.644.504)	(4.408.952)	(6.235.552)	141,43%
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	(4.302.262)	(503.432)	(3.798.830)	754,59%
Dampak bersih selisih kurs atas kas dan setara kas Net effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(84.634)	131.673	(216.307)	-164,28%
Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at beginning of year	10.862.010	11.476.219	(614.208)	-5,35%
Kas dan setara kas pada akhir tahun Cash and cash equivalents at end of year	8.757.400	13.144.297	(4.386.897)	-33,37%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi **Cash Flow from Operating Activities**

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	Holding			
	2023	2022	Selisih Difference	Yoy 2023-2022 2023-2022 yoy
Penerimaan kas dari pelanggan Receipts from customers	52.647.626,10	58.605.956,73	(5.958.331)	-10,17%
Penerimaan dari restitusi pajak Receipts from tax refunds	478.781,98	702.732,46	(223.950)	-31,87%
Pembayaran pajak Tax payment	(5.398.035,37)	(5.373.081,86)	(24.954)	0,46%
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan Payment to suppliers and employees	-	(45.772.257,68)	-	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows provided by operating activities	7.135.254,97	6.812.165,88	323.089	4,74%

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatat jumlah Kas bersih yang telah didapat melalui Aktivitas Operasi sebesar Rp10,66 triliun, jumlah ini naik 58,19% dibanding Kas Bersih yang diperoleh pada tahun 2022 yang sebesar Rp6,74 triliun. Kenaikan jumlah Kas Bersih dipengaruhi oleh adanya penerimaan penjualan gula atas transaksi tahun 2022 dan penurunan pembayaran kepada pemasok dan karyawan pada tahun 2023.

In 2023, the Company recorded net cash provided by Operating Activities amounting to Rp10.66 trillion. This figure represents an increase of 58.19% compared to the Net Cash provided in 2022, which was Rp6.74 trillion. The increase in Net Cash was influenced by the receipt of sugar sales from transactions in 2022 and a decrease in payments to suppliers and employees in 2023.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flows from Investing Activities

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	Holding			
	2023	2022	Selisih Difference	Yoy 2023-2022 2023-2022 yoy
Penerimaan dari penjualan aset tetap Proceeds from the sale of fixed assets	320.215	326.885	(6.670)	-2,04%
Penerimaan bunga bank/deposito Interest received from banks/deposits	237.617	191.462,00	46.155	24,11%
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi Dividend received from	59.933	122.737	(62.804)	-51,17%
Penambahan piutang lain-lain jangka panjang Increase in other long-term receivables	(60.127)	(629.443)	569.316	-90,45%
Penambahan beban tangguhan hak atas tanah Increase in deferred land rights expenses	(154.415)	(1.680)	(152.735)	9092,85%
Penambahan aset lainnya Increase in other assets	(145.840)	(55.694)	(90.146)	161,86%
Perolehan aset tetap Acquisition of fixed assets	(4.571.567)	(2.787.105)	(1.784.462)	64,03%
Arus kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas investasi Net cash flows provided (used) by investing activities	(4.317.186)	(2.832.837)	(1.484.349)	52,40%

PT Perkebunan Nusantara III (persero) telah mencatat adanya pengeluaran Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi di tahun 2023. Jumlah dari pengeluaran tersebut sebesar Rp4,32 triliun, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 52,40% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,83 triliun. Adanya kenaikan ini disebabkan oleh penambahan investasi aset tetap.

PT Perkebunan Nusantara III (persero) recorded a net cash outflow used for Investing Activities in 2023. The amount of this outflow was Rp4.32 trillion, representing an increase of 52.40% compared to the previous year, which was Rp2.83 trillion. This increase was due to additional investments in fixed assets.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flow from Financing Activities

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	Holding			
	2023	2022	Selisih Difference	Yoy 2023-2022 2023-2022 yoy
Penerimaan dari pinjaman bank Proceeds from bank loans	31.558.701,22	346.076,26	31.212.625	9019,00%
Penerimaan dari pinjaman pihak berelasi Loan payments to related parties	-	1.201.143,50	(1.201.144)	-100,00%
Penerimaan pinjaman dari asosiasi Loan receipts from associations	92.637,77	70.124,86	22.513	32,10%
Penerimaan dari wesel bayar Proceeds from medium term notes	-	-	-	-
Penerimaan setoran modal Proceeds from issuance of share capital	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian / Description	Holding			
	2023	2022	Selisih / Difference	Yoy 2023-2022 / 2023-2022 yoy
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga / Receipt of loans from third parties	1.500,00	-	1.500	-
Pembayaran utang kepada kepentingan nonpengendali / Payment of debts to non-controlling interests	-	-	-	-
Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali / Dividends paid to non-controlling interests	(656,78)	(1.034,07)	377	-36,49%
Pembayaran utang kepada Pemerintah Republik Indonesia / Payment of debts to Government of Republic of Indonesia	1.046.424,37	(5.000,12)	1.051.424	-21027,99%
Pembayaran sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen / Payment of obligations under lease and consumer financing loan	(2.453,85)	(236.122,13)	233.668	-98,96%
Pembayaran dividen kepada pemerintah / Dividend Paid to Government	-	-	-	-
Pembayaran utang kredit petani tebu / Payment of credit payables to sugarcane farmers	-	-	-	-
Pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga / Loan payment to third party	(523,85)	(8.296,96)	7.773	-93,69%
Pembayaran beban keuangan / Payment of finance cost	(3.595.052,82)	(2.799.157,23)	(795.896)	28,43%
Pembayaran pinjaman bank / Payment of bank loans	(35.237.150,53)	(2.906.561,28)	(32.330.589)	1112,33%
Arus kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas pendanaan / Net cash flows provided (used) by financing activities	(6.896.648)	(4.338.827,17)	(2.557.821)	58,95%

Selama tahun 2023, Perusahaan telah mencatat pengeluaran Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp6,89 triliun, jumlah ini naik 58,95% dibandingkan jumlah di tahun 2022 yang sebesar Rp4,388 triliun. Adanya kenaikan dari pengeluaran ini dipengaruhi oleh pembayaran hutang perbankan yang dilakukan oleh PTPN Group kepada perbankan.

During the year 2023, the Company recorded net cash outflows used for Financing Activities amounting to Rp6.89 trillion, representing an increase of 58.95% compared to the amount in 2022, which stood at Rp4.388 trillion. This increase in expenditure was influenced by The repayment of bank debts made by the PTPN Group to banks.

RASIO-RASIO KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE RATIOS

	2023	2022	2021	2020	2019
Gross Profit Margin (GPM)	25,00%	34,36%	37,17%	26,50%	19,95%
Net Profit Margin (NPM)	2,00%	10,77%	8,67%	-2,89%	-7,12%
Current Ratio (CR)	101,09%	113,85%	122,28%	44,46%	51,20%
Debt to Equity Ratio (DER)	103,58%	112,73%	120,11%	144,42%	155,93%
Return On Assets (ROA)	1,13%	4,03%	3,21%	0,86%	-1,98%
EBITDA	10.249.939	15.582.196	14.179.378	7.321.052	6.650.723

Pada tahun 2023, beberapa rasio keuangan Perseroan mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Produksi dan penjualan empat komoditas utama, terutama CPO, tidak mencapai target akibat fluktuasi harga komoditas yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, target pendapatan dari penjualan atau ganti rugi aset non-produktif serta optimalisasi aset belum tercapai seperti yang diharapkan. Kenaikan beban keuangan akibat peningkatan suku bunga acuan (JIBOR 1 Bulan) pada tahun 2023 juga turut mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Tren penurunan ini juga tercermin secara umum di industri perkebunan sawit pada tahun 2023, dengan data menunjukkan penurunan laba industri berkisar antara 39% hingga 72%.

In 2023, several of the Company's financial ratios experienced a decline due to various factors. The production and sales of four main commodities, especially CPO, did not meet targets due to commodity price fluctuations being lower than the previous period. Additionally, the revenue targets from the sale or compensation of non-productive assets, as well as asset optimization, were not achieved as expected. The increase in financial burdens due to the rise in the reference interest rate (1-Month JIBOR) in 2023 also affected the Company's financial performance. This downward trend was also reflected across the palm oil plantation industry in 2023, with data indicating that industry profits declined between 39% and 72%.

KINERJA KEUANGAN MASING-MASING PERUSAHAAN *HOLDING* PERKEBUNAN
FINANCIAL PERFORMANCE OF EACH HOLDING PERKEBUNAN COMPANY

Sejak 1 Desember 2023, Perseroan melakukan perubahan struktur grup Perusahaan sehingga Perseroan terbagi menjadi PTPN III sebagai *holding*, serta *subholding* yaitu PTPN IV dan PTPN I. Namun Perseroan juga melakukan perhitungan dengan struktur lama.

Since 1 December 2023, the Company has restructured the group structure, dividing it into PTPN III as the holding company, with PTPN IV and PTPN I as its subsidiaries, formerly known as PTPN IV. However, the Company also conducted calculations using the old structure.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Net Income (Loss) for the Current Year

(dalam jutaan Rupiah) / (in million Rupiah)

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
	1	2	(3=1-2)	(3:2)
PTPN I	(62.784)	244.270	(307.054)	-125,70%
PTPN II	452.160	1.011.423	(559.263)	-55,29%
PTPN III	1.787.630	2.227.424	(439.794)	-19,74%
PTPN IV	1.092.188	2.174.787	(1.082.600)	-49,78%
PTPN V	1.011.290	1.518.743	(507.454)	-33,41%
PTPN VI	100.116	301.276	(201.159)	-66,77%
PTPN VII	(582.997)	(333.776)	(249.220)	74,67%
PTPN VIII	(86.333)	(86.333)	(325.358)	0,00%
PTPN IX	(37.610)	(196.077)	158.467	-80,82%
PTPN X	3.479	7.658	(4.180)	-54,57%
PTPN XI	(38.283)	(211.181)	172.898	-81,87%

Uraian / Description	2023 (Rp-juta) / (Rp-million)	2022 (Rp-juta) / (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) / Kenaikan (Penurunan)	
			Selisih (Rp-juta) / Difference (Rp-million)	Persentase (%) / Percentage (%)
	1	2	(3=1-2)	(3:2)
PTPN XII	(459.881)	(289.152)	(170.728)	59,04%
PTPN XIII	1.081	112.600	(111.519)	-99,04%
PTPN XIV	(377.163)	(429.214)	52.051	-12,13%

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
ABILITY TO PAY DEBTS AND ACCOUNTS RECEIVABLE COLLECTIBILITY RATE

Kemampuan Membayar Utang

Dalam memenuhi kewajibannya, kemampuan Perusahaan dapat diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Penggunaan rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek; semakin tinggi rasio likuiditas mengindikasikan bahwa Perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo.

Sedangkan rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perusahaan membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk rasio solvabilitas, khususnya rasio utang (*interest bearing* & *leverage*) terhadap modal sendiri, semakin rendah menunjukkan adanya perbaikan kemampuan Perusahaan untuk melunasi kewajibannya.

Kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendek serta perbandingannya dengan keberadaan aset lancar dan liabilitas jangka pendek dapat digambarkan melalui tabel berikut.

Ability to Pay Debts

In meeting its obligations, the Company's ability can be measured through liquidity ratios and solvency ratios. The use of liquidity ratios is employed to gauge the company's ability to pay short-term debts; the higher the liquidity ratio, the indication that the Company is capable of meeting short-term obligations that will mature.

Meanwhile, solvency ratios measure the Company's ability to pay all of its obligations, both short-term and long-term. For solvency ratios, particularly debt ratios (interest-bearing & leverage) against equity, the lower the ratio, the better the Company's ability to settle its obligations.

The company's ability to pay short-term liabilities and its comparison with the existence of current assets and short-term liabilities can be depicted in the following table.

(dalam jutaan Rupiah) / (in million Rupiah)

Uraian / Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) / Increase (Decrease)	
			Selisih / Difference	Persentase (%) / Percentage (%)
Aset Lancar / Current assets	21.509.109	29.746.310	(8.237.201)	-27,69%
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	21.745.150	26.126.560	(4.381.410)	-16,77%
Rasio Likuiditas (%) / Liquidity Ratio (%)	98,91%	113,85%	-14,94	-13,12%

Pada tahun 2023, diketahui tingkat likuiditas Perusahaan tercatat turun 1,43%, dibanding dengan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka panjang serta perbandingannya dengan keberadaan aset lancar dan liabilitas jangka pendek dapat digambarkan melalui tabel berikut.

In 2023, it was noted that the Company's liquidity level decreased by 1.43% compared to the previous year.

Furthermore, the Company's ability to pay long-term liabilities and its comparison with the presence of current assets and short-term liabilities can be depicted in the following table.

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage (%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	73.214.128	79.039.706	(5.825.578)	-7,37%
Jumlah Ekuitas Total Equity	70.685.627	70.116.144	569.483	0,81%
Rasio Solvabilitas – Rasio Utang terhadap Modal (%) Solvability Ratio - Debt to Equity Ratio (%)	103,57%	112,73%	-9,16	-8,13%

Pada tahun 2023, diketahui rasio solvabilitas Perusahaan tercatat turun sebesar 8,13% dibanding tahun 2022.

In 2023, the solvency ratio of the Company was known to have decreased by 8,13% compared to 2022.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Aktivitas Perusahaan dalam mengumpulkan piutang dilakukan dengan cara menghitung Lama Penagihan rata-rata atau *Collection Period*. Dalam hal ini, jika semakin kecil nilai Collection Period maka kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat.

Berikut merupakan uraian tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan di tahun 2023 dan 2022.

Accounts Receivable Collection Ability

The Company's activities in collecting receivables are measured by calculating the Average Collection Period. In this regard, if the Collection Period value decreases, it indicates that the Company's ability to collect receivables is faster.

The following is a description of the Company's accounts receivable collection ability in 2023 and 2022.

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage (%)
Belum jatuh tempo Not yet due	166.356	714.104	547.749	76,70
Telah jatuh tempo | Past due:				
1 – 30 hari 1 - 30 days	622.065	307.530	314.534	102,28
31 – 60 hari 31 - 60 days	6.798	125.315	-118.517	-94,58
61 – 90 hari 61 - 90 days	81.375	483.044	-94.514	-53,74
Total	**710.238**	**1.629.994**	**101.502**	**16,67**

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Struktur Modal Perusahaan

Perseroan memiliki kebijakan struktur modal yang digunakan untuk mengimbangi antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman/utang atas utang jangka pendek dan jangka panjang. Berikut ini merupakan komposisi struktur modal perseroan pada tahun 2023 dan 2022.

Company's Capital Structure

The company has a policy on capital structure that is used to balance the use of equity capital and short-term and long-term debt. Below is the composition of the company's capital structure in 2023 and 2022.

Struktur Modal Perusahaan dan Perubahannya

(dalam jutaan Rupiah)

Company's Capital Structure and Changes

(in million Rupiah)

Uraian Description	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Total (Rp-juta) (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Total (Rp-juta) (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	21.945.178	15,11%	26.126.560	17,52	(4.381.410)	-16,77%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	51.268.950	35,76%	52.913.144	35,48	(1.444.167)	-2,73%
Total Liabilitas Total Liabilities	73.214.128	50,87%	79.039.705	52,99	(5.825.578)	-7,37%
Ekuitas Equity	70.685.627	49,12%	70.116.144	47,01	569.483	0,81%
Jumlah Total	**143.899.755**	**100,00**	**149.155.850**	**100,00**	**(5.256.095)**	**-3,52%**

Pada tahun 2023, liabilitas jangka pendek Perusahaan telah mengalami penurunan sebesar 16,77% dibanding dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada liabilitas jangka panjang, telah mengalami penurunan sebesar 2,73% dibanding tahun 2022.

In 2023, the company's short-term liabilities decreased by 16,77% compared to the previous year. Meanwhile, long-term liabilities experienced an increase of 2,73% compared to 2022.

Rasio Struktur Modal Perusahaan dan Perubahannya

Ratio of Company's Capital Structure and Changes

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage (%)
Rasio Liabilitas jangka pendek terhadap ekuitas Ratio of current liabilities to equity	30,76	37,26	-6,5	-17,44%
Rasio Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas Ratio of non-current liabilities to equity	72,81	75,46	-2,65	-3,51%
Rasio total liabilitas terhadap ekuitas Ratio of total liabilities to equity	103,58	112,73	-9,15	-8,12%

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Perusahaan

Kebijakan pengelolaan modal Kelompok Usaha bertujuan untuk memastikan keberlangsungan rasio modal yang sehat serta mendukung pertumbuhan usaha serta optimalisasi imbalan bagi pemegang saham. Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku sejak 16 Agustus 2007, Kelompok Usaha diwajibkan untuk menyisihkan kontribusi sebesar 20% dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak dapat didistribusikan. Persyaratan modal tambahan ini kemudian akan dievaluasi oleh Kelompok Usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dengan manajemen yang terus mengelola dan menyesuaikan struktur permodalan sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi.

Kelompok Usaha memiliki kewenangan untuk menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, memberikan pengembalian modal kepada pemegang saham, atau menerbitkan saham baru, tanpa ada perubahan dalam tujuan, kebijakan, atau proses yang berlaku untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Kebijakan Kelompok Usaha bertujuan untuk menjaga struktur permodalan yang sehat untuk memastikan akses terhadap pendanaan dengan biaya yang masuk akal.

Management Policy on Company Capital Structure

The Group's capital management policy aims to ensure the sustainability of a healthy capital ratio, supports business growth, and optimizes returns for shareholders. In accordance with the Limited Liability Company Law in effect since 16 August 2007, the Group is required to set aside a contribution of 20% of the issued and fully paid-up share capital into a non-distributable reserve fund. This additional capital requirement will then be evaluated by the Group in a General Meeting of Shareholders, with management continuously managing and adjusting the capital structure according to changes in economic conditions.

The Group has the authority to adjust dividend payments to shareholders, return capital to shareholders, or issue new shares without any changes in the objectives, policies, or processes applicable for the years ending on 31 December 2023 and 2022. The Group's policy aims to maintain a healthy capital structure to ensure access to funding at reasonable costs.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	s/d. Bulan up to	s/d. bulan Desember 2023 Up to December 2023		Perbandingan Comparison	
	Desember 2022 December 2022	Realisasi Realization	RKAP RKAP	% pertumbuhan % growth	% terhadap RKAP % against RKAP
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
Tanaman | Plant					
Kelapa Sawit Palm Oil	1.081.295	1.776.843	2.833.044	164,33	62,72
Karet Rubber	69.480	73.730	153.270	106,12	48,10
Kopi Coffee	9.245	4.658	21.634	50,38	21,53
Teh Tea	16.925	11.303	10.356	66,78	109,15
Aneka Tanaman Assorted Plans	47.104	61.061	74.355	129,63	82,12
Jumlah Tanaman Total Plants	**1.224.049**	**1.927.595**	**3.092.658**	**157,48**	**62,33**
Non Tanaman | Non Plants					
Tanah Land	10.256	-	465.233	-	-
Bangunan Rumah House Building	89.311	128.777	214.250	144,19	60,11
Bangunan Perusahaan Company Building	169.656	253.220	630.492	149,26	40,16
Mesin dan Instalasi Machinery and Installation	1.390.748	2.395.722	3.531.408	172,26	67,84
Jalan, Jembatan dan Saluran Air Roads, Bridges and Waterways	220.948	319.738	675.392	144,71	47,34
Alat Pengangkutan Transportation Equipment	102.332	100.875	123.041	98,58	81,98
Inventaris Kecil Small Inventory	105.894	98.630	270.974	93,14	36,40
Instalasi Pembibitan Nursery Instalation	-	-	-	-	-
Aktiva dalam Konstruksi Assets in Construction	-	-	-	-	-
HGU/Sertifikas HGU/Certificate	77.663	808.154	647.195	1.040,60	124,87

Uraian Description	s/d. Bulan up to	s/d. bulan Desember 2023 Up to December 2023		Perbandingan Comparison	
	Desember 2022 December 2022	Realisasi Realization	RKAP RKAP	% pertumbuhan % growth	% terhadap RKAP % against RKAP
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
Sapi Pola Pembiakan Cattle Breeding	-	-	-	-	-
Aktiva Lain-Lain Other Assets	124.610	65.074	1.824.019	52,22	3,57
Jumlah Non Tanaman Total Non-Plant	**2.291.419**	**4.170.191**	**8.382.004**	**181,99**	**49,75**
Penyertaan Anak Perusahaan | Subsidiaries Participation					
Penyertaan Anak Perusahaan Subsidiaries Participation	92.653	-	694.683	-	-
Jumlah Penyertaan Anak Perusahaan Total Subsidiaries Participation	92.653	-	694.683	-	-
Total Investasi & Penyertaan PTPN Total PTPN's Investment & Participation	3.608.121	6.097.786	12.169.345	169,00	50,11

Hingga akhir tahun 2023, realisasi investasi barang modal telah tercatat sebesar Rp6,10 triliun dengan realisasi terbesar diberikan oleh mesin dan instalasi yang tercatat sebesar Rp2,39 triliun.

Until the end of 2023, the realization of capital goods investments amounted to Rp6.10 trillion, with the largest realization attributed to machinery and installations, recorded at Rp2.39 trillion.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/ MODAL

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENTS, EXPANSION, DIVESTMENTS, BUSINESS MERGERS, ACQUISITIONS, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Beberapa hal informasi yang terjadi setelah tanggal pelaporan antara lain sebagai berikut :

A. Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota Direksi
   Sesuai Keputusan Menteri BUMN nomor SK-67/ MBU/03/2024 tanggal 15 Maret 2024, telah ditetapkan:

   Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan melakukan aksi korporasi berupa penggabungan usaha. Terhitung sejak tanggal 1 Desember 2023, PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV telah menggabungkan diri ke dalam PTPN I, dan

Reporting date include the following:

A. Changes in Job Titles and Appointment of Board Members
   In accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-67/MBU/03/2024 dated March 15, 2024, it has been established:

   By the end of 2023, the Company engaged in corporate actions involving business mergers. Effective 1 December 2023, PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, and XIV merged into PTPN I, while PTPN V, VI, XIII, and PTPN III Medan

PTPN V, VI, XIII, dan PTPN III Operasional Medan (melalui pengalihan sebagian aktiva dan pasiva PTPN III (Persero)) telah menggabungkan diri ke dalam PTPN IV.

Atas Penggabungan PTPN I dan PTPN IV sebagaimana di atas, seluruh aktiva dan pasiva, hak serta kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PTPN I dan PTPN IV, dan dengan demikian status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu terhitung sejak tanggal penggabungan 1 Desember 2023.

Operational (through the partial transfer of assets and liabilities of PTPN III (Persero)) merged into PTPN IV.

Due to the merger of PTPN I and PTPN IV as described above, all assets and liabilities, rights, and obligations of the merging companies were legally transferred to PTPN I and PTPN IV, thereby terminating the legal entity status of the merging companies without prior liquidation as of the merger date of 1 December 2023.

Informasi Material Mengenai Divestasi dan Penggabungan Usaha

Pada tanggal 1 Desember 2023, Grup melakukan pembentukan dua *subholding* yaitu PT Perkebunan Nusantara IV dan PT Perkebunan Nusantara I melalui transaksi penggabungan (*"merger"*) dan pemisahan tidak murni (*"spin-off"*), yang telah mendapatkan persetujuan atas integrasi PTPN Grup melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-595/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023:

Penggabungan PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, dan PT Perkebunan Nusantara XIII

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham SK-328/MBU/11/2023 dan DSPN/KPPS/82/XI/2023 pada tanggal 28 November 2023, para pemegang saham PT Perkebunan Nusantara IV ("PTPN IV") menyetujui, antara lain:

a. Penggabungan dengan PT Perkebunan Nusantara V ("PTPN V"), PT Perkebunan Nusantara VI ("PTPN VI"), dan PT Perkebunan Nusantara XIII ("PTPN XIII") ke dalam PTPN IV,
b. Persetujuan untuk menerbitkan saham baru kepada Negara Republik Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai berikut:
   i. Negara Republik Indonesia sebanyak 299.365 lembar saham seri B atau sebesar Rp299.635.000.000;
   ii. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 2.696.718 lembar saham seri B atau sebesar Rp 2.696.718.000.000;
c. Persetujuan penyertaan modal/ penambahan modal yang ditempatkan PTPN IV dari semula sebesar Rp2.942.116.000.000 menjadi sebesar Rp5.938.469.000.000;
d. Persetujuan atas pemindahan tempat kedudukan dan kantor pusat PTPN IV dari semula Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
e. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar PTPN IV.

Material Information Regarding Divestment and Business Mergers

On December 1 2023, the Group formed two sub-holdings, namely PT Perkebunan Nusantara IV and PT Perkebunan Nusantara I through a merger (" merger") and impure separation (" spin-off") transaction , which has received approval for the integration of PTPN Group through Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number S-595/MBU/11/2023 dated 28 November 2023:

Merger of PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, and PT Perkebunan Nusantara XIII

Based on the Shareholders' Decision SK-328/MBU/11/2023 and DSPN/KPPS/82/XI/2023 on 28 November 2023, the shareholders of PT Perkebunan Nusantara IV ("PTPN IV") agreed, among other things:

a. Merger with PT Perkebunan Nusantara V ("PTPN V"), PT Perkebunan Nusantara VI ("PTPN VI"), and PT Perkebunan Nusantara XIII ("PTPN XIII") into PTPN IV,
b. Approval to issue new shares to the Republic of Indonesia and PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as follows:
   i. Republic of Indonesia, 299,365 series B shares or Rp299,635,000,000;
   ii. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) with 2,696,718 series B shares or Rp2,696,718,000,000;
c. Approval of capital participation/increase in capital issued by PTPN IV from the original amount of Rp2,942,116,000,000 to Rp5,938,469,000,000;
d. Approval of the transfer of the domicile and head office of PTPN IV from Medan City, North Sumatra Province to being domiciled and headquartered in South Jakarta City, DKI Jakarta Province;
e. Approval of changes to PTPN IV's Articles of Association.

Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2023, PTPN IV melakukan penggabungan dengan PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII. Pada tanggal tersebut, PTPN IV juga melakukan perubahan atas modal yang ditempatkan dan disetor pada PTPN IV. Dimana PTPN IV menerbitkan saham baru kepada Negara Republik Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai berikut:

a. Negara Republik Indonesia sebanyak 299.365 lembar saham seri B atau sebesar Rp299.635.000.000;
b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 2.696.718 lembar saham seri B atau sebesar Rp 2.696.718.000.000.

Nilai tersebut merupakan nilai indikatif sementara dimana nilai definitif akan ditetapkan berdasarkan nilai wajar sesuai hasil penilaian oleh penilai independen. Sehingga struktur modal ditempatkan/disetor PTPN IV setelah tanggal penggabungan sebagai berikut:

a. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai Rp1.000.000;
b. Negara Republik Indonesia sebanyak 593.846 lembar saham seri B dengan nilai Rp593.486.000.000;
c. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 5.344.622 lembar saham seri B dengan nilai Rp5.344.622.000.000.

Penggabungan dan perubahan modal yang ditempatkan dan disetor tersebut telah dikukuhkan melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 1 Desember 2023 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn dan telah disetujui dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No.AHU-AH.01.09-0191342 tanggal 1 Desember 2023.

Pemisahan tidak murni Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) kepada PT Perkebunan Nusantara IV

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham SK-329/MBU/11/2023 dan DSPN/KPPS/82/XI/2023 pada tanggal 28 November 2023, para pemegang saham PTPN IV menyetujui, antara lain:

a. Persetujuan atas pemisahan tidak murni (*spin-off*) usaha Perkebunan kelapa sawit dan karet dari Perusahaan kepada PTPN IV;
b. Persetujuan atas penerbitan saham baru kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 2.456.849 lembar saham seri B atau sebesar Rp2.456.849.000.000;
c. Persetujuan atas Peningkatan modal yang ditempatkan PTPN IV dari semula sebesar Rp5.938.469.000.000 (setelah merger) menjadi sebesar Rp8.395.318.000.000.

Pada tanggal 1 Desember 2023, PTPN IV menerima pemisahan tidak murni usaha Perkebunan kelapa sawit dan karet dari Perusahaan. Atas aksi korporasi tersebut PTPN IV melakukan perubahan atas modal yang ditempatkan dan disetor oleh Perusahaan sebesar sebanyak 2.456.849 lembar saham seri B atau sebesar Rp2.456.849.000.000.

Furthermore, on December 1 2023, PTPN IV merged with PTPN V, PTPN VI, and PTPN XIII. On that date, PTPN IV also made changes to the issued and paid-up capital at PTPN IV. Where PTPN IV issues new shares to the Republic of Indonesia and PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as follows:

a. Republic of Indonesia, 299,365 series B shares or Rp299,635,000,000;
b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) with 2,696,718 series B shares or Rp2,696,718,000,000.

This value is a temporary indicative value where the definitive value will be determined based on fair value according to the results of an assessment by an independent appraiser. So the issued/paid-up capital structure of PTPN IV after the merger date is as follows:

a. Republic of Indonesia, 1 Dwiwarna series A share with a value of Rp1,000,000;
b. Republic of Indonesia, 593,846 series B shares with a value of Rp593,486,000,000;
c. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) with 5,344,622 series B shares with a value of Rp5,344,622,000,000.

The merger and changes in issued and paid-up capital have been confirmed through Notarial Deed No. 01 dated 1 December 2023 from Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn and has been approved and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No.AHU-AH.01.09-0191342 dated 1 December 2023.

Impure separation of Palm Oil and Rubber Plantation Business from PT Perkebunan Nusantara III (Persero) to PT Perkebunan Nusantara IV

Based on Shareholder Decisions SK-329/MBU/11/2023 and DSPN/KPPS/82/XI/2023 on November 28 2023, PTPN IV shareholders agreed, among other things:

a. Approval of the spin -off of the Company's palm oil and rubber plantation business to PTPN IV;
b. Approval of the issuance of new shares to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) totaling 2,456,849 series B shares or Rp. 2,456,849,000,000;
c. Approval of an increase in the issued capital of PTPN IV from Rp. 5,938,469,000,000 (after the merger) to Rp. 8,395,318,000,000.

On December 1, 2023, PTPN IV received an impure separation of the oil palm and rubber plantation businesses from the Company. Due to this corporate action, PTPN IV made changes to the Company's issued and paid-up capital amounting to 2,456,849 series B shares or Rp2,456,849,000,000.

Nilai tersebut merupakan nilai indikatif sementara di mana nilai definitif akan ditetapkan berdasarkan nilai wajar sesuai hasil penilaian oleh penilai independen. Selanjutnya, setelah penggabungan dan pemisahan tidak murni tersebut kepemilikan Perusahaan di PTPN IV menjadi 92,93% (2022: 90,00%).

This value is a temporary indicative value where the definitive value will be determined based on fair value according to the results of an assessment by an independent appraiser. Furthermore, after the impure merger and separation, the Company's ownership in PTPN IV will become 92.93% (2022: 90.00%).

Penggabungan PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, dan PT Perkebunan Nusantara XIV

Merger of PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham No. SK-324/MBU/11/2023 dan DSPN/KPPS/80/XI/2023 pada tanggal 28 November 2023, para pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:

a. Persetujuan atas penggabungan PT Perkebunan Nusantara ("PTPN") II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV ke dalam PTPN I;
b. Persetujuan atas penerbitan saham baru kepada Negara Republik Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai berikut:
   i. Negara Republik Indonesia sebanyak 907.598 lembar saham Seri B atau sebesar Rp907.598.000.000;
   ii. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 7.873.401 lembar saham Seri B atau sebanyak Rp7.873.401.000.000;
c. Persetujuan atas peningkatan modal dasar PTPN I dari semula sebesar Rp640.000.000.000 menjadi sebesar Rp35.700.000.000.000;
d. Persetujuan atas pemindahan tempat kedudukan dan kantor pusat PTPN I dari semula Kota Langsa, Provinsi Aceh menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta.
e. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar PTPN I.

Based on Shareholders' Decree No. SK-324/MBU/11/2023 and DSPN/KPPS/80/XI/2023 on November 28 2023, the Company's shareholders approved, among other things:

a. Approval of the merger of PT Perkebunan Nusantara ("PTPN") II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII and PTPN XIV into PTPN I;
b. Approval of the issuance of new shares to the Republic of Indonesia and PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as follows:
   i. Republic of Indonesia, 907,598 Series B shares or Rp 907,598,000,000;
   ii. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) with 7,873,401 Series B shares or Rp. 7,873,401,000,000;
c. Approval of increasing the authorized capital of PTPN I from Rp. 640,000,000,000 to Rp. 35,700,000,000,000;

d. Approval of the transfer of the domicile and head office of PTPN I from Langsa City, Aceh Province to being domiciled and headquartered in Jakarta City.

e. Approval of changes to PTPN I's Articles of Association.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 09 oleh Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn. tanggal 1 Desember 2023, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV setuju untuk menggabungkan diri kepada dan di dalam Perusahaan (PTPN I) dimana sejak tanggal efektif penggabungan, semua kegiatan pengusahaan, operasional, kekayaan, tagihan-tagihan, aset, liabilitas, hak, kewajiban dan pekerja dari PTPN yang menggabungkan diri beralih kepada Perusahaan.

Based on Merger Deed No. 09 by Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn. December 1 2023, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN , operations, assets, bills, assets, liabilities, rights, obligations and employees of the merged PTPN are transferred to the Company.

Nilai tersebut merupakan nilai indikatif sementara dimana nilai definitif akan ditetapkan berdasarkan nilai wajar sesuai hasil penilaian oleh penilai independen.

This value is a temporary indicative value where the definitive value will be determined based on fair value according to the results of an assessment by an independent appraiser.

Sehingga struktur modal ditempatkan/disetor PTPN I setelah tanggal penggabungan sebagai berikut:

a. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai Rp1.000.000;
b. Negara Republik Indonesia sebanyak 946.238 lembar saham seri B dengan nilai Rp946.238.000.000;

So the issued/paid-up capital structure of PTPN I after the merger date is as follows:

a. Republic of Indonesia, 1 Dwiwarna series A share with a value of Rp 1,000,000;
b. Republic of Indonesia, 946,238 series B shares with a value of Rp946,238,000,000;

c. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 7.995.757 lembar saham seri B dengan nilai Rp7.995.757.000.000.

Penggabungan dan perubahan modal yang ditempatkan dan disetor tersebut telah dikukuhkan melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 1 Desember 2023 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn dan telah disetujui dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No.AHU-AH.01.09-0191443 tanggal 1 Desember 2023.

Selanjutnya, setelah penggabungan dan pemisahan tidak murni tersebut kepemilikan Perusahaan di PTPN I menjadi 89,42% (2022: 76,00%).

Utang/Modal

Dalam upaya mendukung aksi korporasi integrasi PTPN, maka PTPN Group telah melakukan penandatangan perjanjian fasilitas pinjaman baru dengan Bank Mandiri, BNI, BRI, dan LPEI ("Himbara Plus") pada 27 Juni 2023. Adapun perjanjian tersebut telah efektif pada Juli 2023.

Berikut merupakan rincian perjanjian tersebut.

1 Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Palm Co No. 11, tertanggal 27 Juni 2023, dibuat dihadapan Gamal Wahidin S.H., notaris di Jakarta antara Himbara Plus dengan PTPN III, PTPN IV, PTPN V, PTPN XIII, PT SPN, PT ASN dan PT SPN dengan nilai fasilitas sebesar Rp26.124.558.000.000 (dua puluh enam triliun seratus dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta Rupiah) ("PK PTPN IV"); dan
2 Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Supporting Co No. 12, tertanggal 27 Juni 2023, dibuat dihadapan Gamal Wahidin S.H., notaris di Jakarta antara Himbara Plus dengan PTPN I, PTPN II, PTPN III PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV dengan nilai fasilitas sebesar Rp5.611.584.000.000 (lima triliun enam ratus sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) ("PK PTPN VII").

c. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 7,995,757 series B shares with a value of Rp7,995,757,000,000.

The merger and changes in issued and paid-up capital have been confirmed through Notarial Deed No. 01 dated 1 December 2023 from Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn and has been approved and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No.AHU-AH.01.09-0191443 dated 1 December 2023.

Furthermore, after the impure merger and separation, the Company's ownership in PTPN I became 89.42% (2022: 76.00%).

Debt/Capital

In support of the corporate integration efforts of PTPN, the PTPN Group has entered into new loan facility agreements with Bank Mandiri, BNI, BRI, and LPEI ("Himbara Plus") on June 27, 2023. These agreements became effective in July 2023.

The following are the details of these agreements:

1. Deed of Palm Co Credit Facility Agreement No. 11, dated June 27, 2023, executed before Gamal Wahidin S.H., a notary in Jakarta, between Himbara Plus and PTPN III, PTPN IV, PTPN V, PTPN XIII, PT SPN, PT ASN, and PT SPN, with a facility value of Rp26,124,558,000,000 (twenty-six trillion one hundred twenty-four billion five hundred fifty-eight million Rupiah) ("PK PTPN IV"); and
2. Deed of Supporting Co Credit Facility Agreement No. 12, dated June 27, 2023, executed before Gamal Wahidin S.H., a notary in Jakarta, between Himbara Plus and PTPN I, PTPN II, PTPN III, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, and PTPN XIV, with a facility value of Rp5,611,584,000,000 (five trillion six hundred eleven billion five hundred eighty-four million Rupiah) ("PK PTPN VII").

PERBANDINGAN ANTARA TARGET ANGGARAN DENGAN REALISASI
COMPARISON BETWEEN BUDGET TARGETS AND REALIZATION

Perseroan serta entitas anak melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan—Perubahan (RKAP-P) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. S-114/Wk1.MBU/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penyusunan Draft Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 BUMN Portfolio Wakil Menteri BUMN I.

The Company and its subsidiaries prepare the Company's Work Plan and Budget Change (RKAP-P) based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-114/Wk1. MBU/10/2021 dated 7 October 2021 regarding the Preparation of the Draft Work Plan and Company Budget for 2022 State-Owned Enterprises Portfolio Vice Minister of State-Owned Enterprises I.

Berikut ini merupakan rincian perbandingan antara target anggaran Perusahaan di tahun 2023 serta realisasinya.

Below is a detailed comparison between the Company's budget targets in 2023 and its realization.

Indikator / Indicators	2023		2022	%	
	Realisasi / Realization	RKAP / Work Plan & Budget of the Company	Realisasi / Realization	Tumbuh / Growth	Capaian / Achievement
	a	b	c	(a-c)/c	a/b
Laba Rugi (dalam miliar Rupiah) | Profit/Loss (in billion Rupiah)					
Pendapatan / Revenue	50.981	71.489	55.863	-28,69%	71,31%
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Goods Sold	38.234	53.395	36.669	-28,39%	71,61%
Laba Kotor / Gross Profit	12.747	18.094	19.194	-29,55%	70,45%
Beban Usaha & Operasi Lain / Operating Expense & Others	10.096	10.436	11.160	-3,26%	96,74%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak / Profit (Loss) for the Year	2.359	7.657	8.034	-69,19%	30,81%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Profit (Loss) for the Year	1.022	5.376	6.016	-80,99%	19,01%
EBITDA	10.250	15.391	15.965	-32,29%	67,71%
Posisi Keuangan (dalam miliar Rupiah) | Financial Position (in billion Rupiah)					
Aset Lancar / Current assets	24.761	22.928	29.746	7,99%	107,99%
Aset Tidak Lancar / Non-Current assets	122.391	129.951	119.409	-5,82%	94,18%
Total Aset / Total Assets	143.900	152.880	149.155	-5,87%	94,13%
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	21.945	22.064	26.126	-1,45%	98,55%
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	51.268	53.052	52.913	-2,99%	97,01%
Total Liabilitas / Total Liabilities	73.214	83.776	79.039	-12,61%	87,39%
Total Ekuitas / Total Equity	70.686	72.467	70.116	-2,46%	97,54%
Arus Kas (dalam miliar Rupiah) | Cash Flow (in billion Rupiah)					
Arus Kas Operasi / Operating Cash Flows	10.659	8.838	6.812	20,60%	120,60%
Arus Kas Investasi / Investing Cash Flows	4.317	(9.014)	(3.219)	-147,89%	-47,89%
Arus Kas Pendanaan / Financing Cash Flows	(10.644)	(4.045)	(4.338)	163,14%	263,14%
Saldo Kas Akhir Tahun / Cash Balance at End of Year	8.757	4.656	10.862	88,08%	188,08%

Indikator Indicators	2023		2022	%	
	Realisasi Realization	RKAP Work Plan & Budget of the Company	Realisasi Realization	Tumbuh Growth	Capaian Achievement
	a	b	c	(a-c)/c	a/b
***Capital Expenditure* (dalam miliar Rupiah) | Capital Expenditure (in billion Rupiah)**					
On-Farm	1.928	3.412	1.224	57,48%	56,50%
Off-Farm	4.170	8.384	2.291	81,99%	49,74%
Penyertaan Participation	-	335	92	-100,00%	0,00%
Total Capital Expenditure	6.098	12.130	3.608	69,00%	50,27%
Rasio Keuangan | Financial Ratios					
Profitabilitas/ Profitability					
Gross Profit Margin (%)	25,00%	25.31%	34,36%	-25,03%	98.79%
Net Profit Margin (%)	2,00%	7.52%	10,77%	-69,64%	26.66%
Rentabilitas | Rentability					
ROA (%)	0,71%	3,52%	4,03%	-82,39%	20,20%
ROE (%)	1,45%	7,78%	8,58%	-83,15%	18,59%
Likuiditas | Liquidity					
Current Ratio (%)	98,91%	83,29%	113,85%	-13,12%	118,76%
Solvabilitas | Solvency					
Debt Equity Ratio (%)	57,96%	58,04%	63,02%	-8,03%	99,86%
Indikator Lainnya | Other Indicators					
KPI (%)	80,96%	100,00%	96,51%	-16,11%	80,96%
Kelapa Sawit | Palm Oil					
Produksi TBS Total (Juta Ton) Total FFB production (million Tons)	12,23	14,20	12,82	-4,66%	86,12%
Produksi CPO Total (Juta Ton) Total CPO production (million Tons)	2,65	3,08	2,71	-2,47%	85,90%
Produktivitas TBS Kebun Sendiri (Juta Ton) Own Plantation FFB Productivity (Ton/Ha)	20,71	23,07	21,69	-4,51%	89,78%
Produktivitas CPO Kebun Sendiri (Ton/Ha) Own Plantation CPO Productivity (Ton/Ha)	4,79	5,38	5,01	-4,24%	89,10%
Rendemen CPO Total (%) Total CPO Yield (%)	21,86%	22,05%	21,79%	0,33%	99,14%
Tebu | Sugarcane					
Produksi Tebu Total (Juta Ton) Total Sugarcane Production (Million Ton)	10,45	13,71	13,21	-20,94%	76,23%
Produksi Gula Total (Juta Ton) Total Sugar Production (Million Ton)	0,75	1,00	8,50	-11,48%	75,19%
Produktivitas Tebu Total (Ton/Ha) Sugarcane Productivity (Ton/Ha)	58,27	71,89	74,31	-21,58%	81,06%
Rendemen Hablur (%) Crystalline Yield (%)	7,19%	7,30%	6,44%	11,52%	98.52%

Indikator / Indicators	2023		2022	%	
	Realisasi / Realization	RKAP / Work Plan & Budget of the Company	Realisasi / Realization	Tumbuh / Growth	Capaian / Achievement
	a	b	c	(a-c)/c	a/b
Karet | Rubber					
Produksi Karet Total (Ribu Ton) / Total Rubber Production (Thousand Ton)	130,72	170,10	144,31	-9,42%	76,85%
Produktivitas Karet (Ton/Ha) / Rubber Productivity (Ton/Ha)	1,03	1,32	1,08	-4,11%	78,54%
Teh | Tea					
Produksi Teh Total (Ribu Ton) / Total Tea Production (Thousand Ton)	42,83	54,20	48,95	-12,50%	79,03%
Produktivitas Teh (Kg/Ha) / Tea Productivity (Kg/Ha)	1.813,57	2.248,96	1.919,15	-5,50%	80,64%
Rendemen Teh (%) / Tea Yield (%)	22,18%	22,12%	22,14%	0,17%	100,28%

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

INFORMATION AND MATERIAL FACTS OCCURRING AFTER THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

Beberapa hal informasi yang terjadi setelah tanggal pelaporan antara lain sebagai berikut :

A. Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota Direksi
Sesuai Keputusan Menteri BUMN nomor SK-67/MBU/03/2024 tanggal 15 Maret 2024, telah ditetapkan:

1. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi PTPN III (Persero) dengan mengubah jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Direktur Kelembagaan menjadi Direktur Manajemen Risiko;
2. Mengalihkan penugasan kepada M. Iswahyudi yang semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan M. Arifin Firdaus yang semula sebagai Direktur Kelembagaan menjadi Direktur Manajemen Risiko;
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Surat Keputusan dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.

Some events that occurred after the reporting date include the following:

A. Changes in Job Titles and Appointment of Board Members
In accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-67/MBU/03/2024 dated March 15, 2024, it has been established:

1. Change the nomenclature of positions for members of the Board of Directors of PTPN III (Persero) by changing the position of Director of Finance and Risk Management to Director of Finance, and changing the position of Director of Institutional Affairs to Director of Risk Management.
2. Assign M. Iswahyudi, who was previously the Director of Finance and Risk Management, as the Director of Finance, and M. Arifin Firdaus, who was previously the Director of Institutional Affairs, as the Director of Risk Management.
3. Empower the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) with substitution rights to declare what is decided in the Decree in authentic form before a notary or authorized official.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 15 Maret 2024.

B. Perubahan Struktur Organisasi dan Susunan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Sesuai Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) nomor DSDM/SKPTS/64/2024 tanggal 17 April 2024, telah ditetapkan:

1. Menetapkan perubahan struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) pada Divisi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
2. Menetapkan susunan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai berikut:
   a. Direktur Utama
   b. Wakil Direktur Utama
   c. Direktur Keuangan
   d. Direktur SDM dan Umum
   e. Direktur Produksi dan Pengembangan
   f. Direktur Pemasaran
   g. Direktur Manajemen Risiko.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 17 April 2024.

This decision takes effect on the date it was determined, which is March 15, 2024.

B. Changes in the Organizational Structure and Composition of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
In accordance with the Decision of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. DSDM/SKPTS/64/2024 dated April 17, 2024, it has been established:

1. Determined the changes to the organizational structure of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the Division as outlined in the attachment, which is an integral part of this Decision Letter.
2. Determined the composition of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) is as follows:
   a. President Director
   b. Vice President Director
   c. Director of Finance
   d. Director of HR and General Affairs
   e. Director of Production and Development
   f. Director of Marketing
   g. Director of Risk Management.

This decision takes effect on the date it was determined, which is April 17, 2024.

PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

Perekonomian global di tahun 2024 diperkirakan masih akan dalam posisi yang lemah, meskipun saat ini inflasi telah mengalami moderasi atau penurunan, namun serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Melalui laporan *World Economic Outlook* (WEO) yang diterbitkan IMF pada 10 Oktober 2023, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 akan mencapai sebesar 2,9% turun 0,1% dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 yang mencapai sebesar 3%. Adanya prakiraan ini disebabkan berbagai kondisi ketidakpastian global mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Amerika yang melemah, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi), volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, kontraksi PMI Manufaktur global, serta meningkatnya harga minyak dunia.

Di berbagai belahan dunia, khususnya bagian Negara besar dan maju seperti seperti Amerika telah diproyeksikan akan mengalami perlambatan di tahun 2024 karena suku bunga yang masih tinggi, melambatnya belanja konsumen, serta

The global economy in 2024 is expected to remain weak, although inflation has moderated or declined, thus immediately lowering the sharply increased interest rates over the past 18 months. According to the World Economic Outlook (WEO) report published by the IMF on 10 October 2023, global economic growth in 2024 is projected to reach 2.9%, down by 0.1% from the projection of global economic growth in 2023, which reached 3%. This forecast is due to various conditions of global uncertainty, ranging from the risk of weakening economic growth in China and the United States, geopolitical issues such as the Ukraine-Russia war and the Palestine-Israel conflict, economic fragmentation (the antithesis of economic integration), commodity price volatility, climate change threats, global Manufacturing PMI contraction, and the increase in global oil prices.

In various parts of the world, particularly in major and developed countries such as the United States, a slowdown is projected in 2024 due to persistently high interest rates, slowing consumer spending, and a weaker labor market.

pasar tenaga kerja yang lebih lemah. Di sisi lain, prospek pertumbuhan jangka pendek di berbagai negara berkembang, terutama di Asia Timur, Asia Barat, serta Amerika Latin dan Karibia, juga memburuk karena kondisi keuangan yang lebih ketat, ruang fiskal yang menyusut, dan permintaan eksternal yang lesu. Negara-negara berpenghasilan rendah dan ekonomi yang rentan menghadapi tekanan neraca pembayaran yang semakin meningkat dan risiko keberlanjutan utang.

On the other hand, short-term growth prospects in various developing countries, especially in East Asia, West Asia, Latin America and the Caribbean, have also worsened due to tighter financial conditions, shrinking fiscal space, and sluggish external demand. Low-income countries and vulnerable economies face increasing pressure on their balance of payments and debt sustainability risks.

Di tengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global, perekonomian Indonesia di tahun 2023 tercatat tetap kuat dan stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,94% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh kuat sebesar 5,05% (yoy). Pada 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7-5,5% didukung oleh permintaan domestik utamanya berlanjutnya pertumbuhan konsumsi, termasuk dampak positif penyelenggaraan pemilu, serta peningkatan investasi khususnya bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Amidst the uncertainty and slowdown in the global economy, Indonesia's economy in 2023 remained strong and stable. Data from the Central Statistics Agency (BPS) shows that Indonesia's economy grew by 5.04% (yoy) in the fourth quarter of 2023, an increase from the previous quarter's growth of 4.94% (yoy). With this development, Indonesia's overall economic growth in 2023 was recorded at a robust 5.05% (yoy). In 2024, economic growth is expected to increase in the range of 4.7-5.5%, supported by domestic demand, mainly the continuation of consumption growth, including the positive impact of holding elections, as well as increased investment, particularly in infrastructure projects under the National Strategic Projects (PSN) including the Nusantara Capital (IKN).

Di sektor kinerja ekspor, pada tahun 2023, nilai ekspor Indonesia Januari–Desember 2023 mencapai US$258,82 miliar atau turun 11,33 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh harga komoditas unggulan pendulang ekspor yang mengalami penurunan ditambah perlambatan ekonomi global telah memicu penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor, sehingga membuat kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan mengalami penurunan. Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Desember 2023 telah turun 9,26% dibanding periode yang sama tahun 2022, demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 10,04 persen dan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 20,68 persen.

In terms of export performance, in 2023, Indonesia's export value from January to December 2023 reached US$258.82 billion, a decrease of 11.33 percent compared to the same period in 2022. The decline influenced the prices of key export commodities, coupled with the global economic slowdown, which triggered a decrease in demand from export destination countries, leading to an overall decline in Indonesia's export performance. Furthermore, based on data from the Central Statistics Agency (BPS), non-oil and gas exports from the manufacturing sector from January to December 2023 decreased by 9.26% compared to the same period in 2022, as did exports from the agriculture, forestry, and fisheries sectors, which decreased by 10.04%, and mining and other exports decreased by 20.68%.

Melalui uraian tersebut, Perusahaan telah merancang strategi sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Bisnis Gula PTPN Group
   PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020-2024 dimana salah satu inisiatif strategis dalam mencapai visi dan misi perusahaan adalah melakukan restrukturisasi bisnis gula PTPN Group menjadi *single entity* yang dikelompokan ke dalam *strategic mapping* berdasarkan (i) Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, (ii) Inovasi Model Bisnis, (iii) Kepemimpinan Teknologi, (iv) Peningkatan Investasi, dan (v) Pengembangan Talenta.

In light of the above, the Company has devised the following strategies:

1. Restructuring of the Sugar Business of PTPN Group
   PT Perkebunan Nusantara III (Persero) has formulated a Long-Term Company Plan for 2020-2024, where one of the strategic initiatives in achieving the company's vision and mission is to restructure the sugar business of the PTPN Group into a single entity grouped into a strategic mapping based on (i) Economic and Social Value for Indonesia, (ii) Business Model Innovation, (iii) Technological Leadership, (iv) Increased Investment, and (v) Talent Development.

Restrukturisasi bisnis gula PTPN Group merupakan 1 dari 88 proyek strategis Kementerian BUMN sebagaimana tertuang dalam Roadmap Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Skema restrukturisasi bisnis gula PTPN Group direncanakan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pendirian perusahaan patungan ("SugarCo") yang akan mengelola bisnis gula PTPN Group ;
   Berdasarkan persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui surat No. S-527/MBU/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Persetujuan Pendirian SugarCo, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara XI telah mendirikan SugarCo pada 17 Agustus 2021 dengan profil sebagai berikut:
   Akta Pendirian : No. 08 tanggal 17 Agustus 2021
   Nama : PT Sinergi Gula Nusantara
   Kedudukan : Jakarta Pusat, DKI Jakarta
   Modal Dasar : Rp20.000.000.000,00
   Modal Ditempat & Disetor : Rp5.000.000.000,00
   Persentase Kepemilikan Saham : PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar 99% atau sebesar Rp4.950.000.000,00 dan PT Perkebunan Nusantara XI sebesar 1% atau sebesar Rp50.000.000,00.

   PT Sinergi Gula Nusantara telah memperoleh pengesahan pendirian badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 19 Agustus 2021 sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0051271.AH.01.01. Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sinergi Gula Nusantara.

b. Pemisahan tidak murni (*spin-off*) bisnis gula *off-farm* PTPN Group kepada SugarCo;
   Melalui surat nomor S-641/MBU/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022 Menteri Badan Usaha Milik Negara telah memberikan persetujuan pemisahan tidak murni/*spin off* bisnis gula *off*

2. Berdasarkan dengan RJPP Tahun 2020 - 2024 yang telah disusun oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) di mana salah satu inisiatif strategis dalam mencapai visi dan misi perusahaan adalah dengan melakukan restrukturisasi anak perusahaan dan memperkuat tata kelola *holding* dengan melakukan aksi korporasi terhadap Anak dan/atau Cucu Perusahaan Non PTPN. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah menyusun Kajian Strategis Restrukturisasi Anak/Cucu Perusahaan Non PTPN yang dibantu oleh Konsultan dengan rekomendasi pengelompokan aksi korporasi berupa *merger*, *roll up* ke induk, divestasi, likuidasi, *partially divest*, dan *strategic partner*. Implementasi program Restrukturisasi Anak/Cucu Perusahaan Non PTPN telah berjalan sejak tahun 2020, dimana sejak tahun 2020 – 2022 telah terealisasi

The restructuring of the sugar business of the PTPN Group is one of the 88 strategic projects of the Ministry of State-Owned Enterprises as outlined in the Roadmap of the Ministry of State-Owned Enterprises.

The sugar business restructuring scheme of the PTPN Group is planned to be carried out in stages as follows:

a Establishment of a joint venture company ("SugarCo") to manage the sugar business of the PTPN Group;
   Based on the approval of the Minister of State-Owned Enterprises through letter No. S-527/MBU/07/2021 dated 26 July 2021, regarding Approval of the Establishment of SugarCo, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and PT Perkebunan Nusantara XI established SugarCo on 17 August 2021, with the following profile:
   Act of Establishment: No. 08 dated 17 August 2021
   Name: PT Sinergi Gula Nusantara
   Position: Central Jakarta, DKI Jakarta
   Authorized Capital: Rp20,000,000,000.00
   Paid-up Capital: Rp5,000,000,000.00
   Share Ownership Percentage: PT Perkebunan Nusantara III (Persero) holds 99% or Rp4,950,000,000.00, and PT Perkebunan Nusantara XI holds 1% or Rp50,000,000.00.

   PT Sinergi Gula Nusantara obtained legal entity establishment approval from the Minister of Law and Human Rights on 19 August 2021, in accordance with Minister of Law and Human Rights Decision No. AHU-0051271.AH.01.01. The year 2021 concerning the Ratification of the Establishment of a Limited Liability Company PT Sinergi Gula Nusantara.

b. Non-pure separation (spin-off) of off-farm sugar business from PTPN Group to SugarCo;
   Through letter number S-641/MBU/10/2022 dated 6 October 2022, the Minister of State-Owned Enterprises has approved the non-pure/spin-off separation of the off-farm sugar business.

2. Based on the RJPP for the years 2020 - 2024, which has been prepared by PT Perkebunan Nusantara III (Persero), where one of the strategic initiatives in achieving the company's vision and mission is to restructuring subsidiaries and strengthening holding governance by taking corporate actions on Non-PTPN Subsidiaries and/or Affiliates. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) has prepared a Strategic Study of Restructuring Non-PTPN Subsidiaries/Affiliates assisted by Consultants with recommendations for grouping corporate actions such as mergers, roll-ups to the parent company, divestments, liquidations, partial divestments, and strategic partners. The implementation of the Restructuring Program for Non-PTPN Subsidiaries/Affiliates has been ongoing since 2020, where from 2020 to 2022, a total of 13 (thirteen)

sebanyak 13 (tiga belas) aksi korporasi. Pada tahun 2023 program Restrukturisasi Anak dan/atau Cucu Perusahaan Non PTPN akan tetap dilanjutkan sesuai dengan *mapping* hasil kajian yang telah disusun.

3. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pada RJPP Tahun 2020 - 2024 yang telah disusun oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yakni menjadi perusahaan agribisnis nasional berkelas dunia, untuk memastikan keberhasilan tersebut maka perlu dilakukan akselerasi peningkatan kinerja operasional dan keuangan PTPN Group melalui Program Percepatan Peningkatan EBITDA PTPN Group. Program ini telah berjalan sejak tahun 2021, dimana sejak 2021-2022 telah terimplementasi Percepatan Peningkatan EBITDA PTPN Group Fase I melalui 9 program utama yaitu *Revenue Enhancement, Operational Excellence, Logistics Optimization, Procurement Excellence, Zero Based Budgeting, Organizational Excellence, Cash Office, Operations Control Tower, Management Review Cycle* dan *Strategic Transformation Office* yang diimplementasikan di Holding dan di Anak Perusahaan. Pada Semester II 2022 Program Percepatan Peningkatan EBITDA PTPN Group telah memasuki Fase II dengan melanjutkan 9 program di Fase I dan menambah satu program baru yaitu *Operational Excellence*.

corporate actions have been realized. In 2023, the Restructuring Program for Non-PTPN Subsidiaries and/or Affiliates will continue according to the mapping of study results that have been prepared.

3. In order to support the achievement of the vision and mission in the RJPP for the years 2020 - 2024, which has been prepared by PT Perkebunan Nusantara III (Persero), namely to become a world-class national agribusiness company, to ensure the success of this, it is necessary to accelerate the improvement of the operational and financial performance of the PTPN Group through the Accelerated EBITDA Improvement Program of the PTPN Group. This program has been running since 2021, where from 2021-2022, Phase I of the Accelerated EBITDA Improvement Program of the PTPN Group has been implemented through 9 main programs, namely Revenue Enhancement, Operational Excellence, Logistics Optimization, Procurement Excellence, Zero Based Budgeting, Organizational Excellence, Cash Office, Operations Control Tower, Management Review Cycle, and Strategic Transformation Office implemented in the Holding and its Subsidiaries. In the second semester of 2022, the Accelerated EBITDA Improvement Program of the PTPN Group entered Phase II by continuing the 9 programs in Phase I and adding a new program, namely Operational Excellence.

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECTS

Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang diterapkan Perusahaan pada tahun 2023 difokuskan untuk meningkatkan pendapatan melalui beberapa inisiatif. Perusahaan mengoptimalkan harga premium untuk produk bersertifikat seperti CPO dan PKO, melakukan penjualan langsung ke *End Buyers* untuk komoditi karet dan teh, serta memproduksi teh dengan *grade* yang sesuai permintaan *Buyers*. Selain itu, upaya peningkatan cara kerja rekonsiliasi produksi dan penjualan dilakukan melalui *Sales & Operation Planning* (S&OP). Perusahaan juga menambah titik distribusi untuk produk retail, termasuk menjual minyak goreng Nusakita di Alfamart.

Fokus strategi pemasaran ini selanjutnya direalisasikan melalui:

Produk Komoditi:

1. Meningkatkan penjualan CPO bersertifikat yang berharga premium dibanding non sertifikat
   Inisiatif ini berhasil mencapai nilai penjualan CPO sebesar Rp288,61 miliar atau 250,97% dibanding RKAP.

Marketing Strategy

The marketing strategy implemented by the Company in 2023 was focused on increasing revenue through several initiatives. The Company optimized premium pricing for certified products such as CPO and PKO, conducted direct sales to end buyers for commodities like rubber and tea, and produced tea grades according to buyers' demands. Additionally, efforts to improve the reconciliation of production and sales processes were carried out through Sales & Operation Planning (S&OP). The Company also expanded distribution points for retail products, including selling Nusakita cooking oil in Alfamart.

The focus of this marketing strategy was further realized through:

Commodity Products:

1. Improving sales of certified premium CPO compared to non-certified
   This initiative successfully achieved a sales value of CPO amounts to Rp288.61 billion, which is 250.97% higher than the RKAP.

2. Meningkatkan optimasi logistik *supply* CPO ke INL
   Peningkatan tingkat ketepatan waktu penyerahan (OTIF) sebesar 99,50%. Ini menandakan pencapaian optimalisasi sebesar 110,55% dari target yang telah ditetapkan RKAP.
3. Penjualan langsung Karet ke *End Buyers*
   Peningkatan Nilai Penjualan Produk Komoditi Karet sebesar Rp.12,52 miliar. Strategi ini berhasil mencapai target dengan progress 312,92% dibandingkan dengan RKAP.
4. Meningkatkan nilai penjualan Teh
   Peningkatan nilai Penjualan Produk Teh sebesar 6,71 miliar, dengan capaian sebesar 122% dari RKAP. Secara umum, inisiatif ini telah berhasil meningkatkan kualitas produksi yang dihasilkan, adapun upaya peningkatan ini akan dilanjutkan di 2024.
5. Mengimplementasikan cara kerja S&OP
   Realisasi Pelaksanaan implementasi melalui Rapat Kerja *Monitoring* S&OP sebesar 91,67%, dengan capaian sebesar 110,44% dari RKAP.

Produk Retail:
Sepanjang tahun 2023, perusahaan telah menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran yang terarah untuk produk ritel. Hasilnya, penjualan produk ritel mencapai Rp1,24 triliun, yang merupakan 71,49% dari target RKAP.

2. Enhancing logistics optimization for CPO supply to INL
   The improvement in On-Time In-Full (OTIF) delivery rate reached 99.50%. This signifies an optimization achievement of 110.55% from the established target, as per the RKAP.
3. Direct sales of rubber to End Buyers
   The increase in the sales value of rubber commodity products amounted to Rp12.52 billion. This strategy successfully achieved the target with a progress of 312.92% compared to the RKAP.
4. Increasing the sales value of Tea
   The increase in Tea Product Sales Value was Rp6.71 billion, achieving 122% of the RKAP. Overall, this initiative has successfully improved the quality of production. Efforts for further improvement will continue in 2024.
5. Implementing S&OP working methods
   Realization of the implementation through the S&OP Monitoring Working Meeting reached 91.67%, with an achievement of 110.44% of the RKAP.

Retail Products:
Throughout 2023, the company formulated and implemented a targeted marketing strategy for retail products. As a result, retail product sales reached Rp 1.24 trillion, achieving 71.49% of the RKAP target.

PANGSA PASAR
MARKET SHARE

Sampai dengan Desember 2023 pangsa pasar komoditas CPO sebesar 5,49% dari nilai estimasi produksi nasional, komoditas karet sebesar 4,10% dari nilai estimasi produksi nasional, komoditas gula sebesar 33,16% dari nilai estimasi produksi nasional, komoditas teh sebesar 30,91% dari nilai estimasi produksi nasional, komoditas tetes sebesar 33,45% dari nilai estimasi produksi nasional, komoditas kopi sebesar 0,34% dari nilai estimasi produksi nasional, dan komoditas kakao sebesar 0,004% dari nilai estimasi produksi nasional.

As of December 2023, the market share of CPO commodities amounted to 5.49% of the estimated national production value, rubber commodities amounted to 4.10% of the estimated national production value, sugar commodities amounted to 33.16% of the estimated national production value, tea commodities amounted to 30.91% of the estimated national production value, molasses commodities amounted to 33.45% of the estimated national production value, coffee commodities amounted to 0.34% of the estimated national production value, and cocoa commodities amounted to 0.004% of the estimated national production value.

Perekonomian Global

Perkiraan awal adalah untuk pertumbuhan global melambat dari 3,5% pada tahun 2022 menjadi 3,0% pada tahun 2023 dan 2,9% pada tahun 2024, jauh di bawah rata-rata historis (2000-19) sebesar 3,8%. Negara-negara maju diperkirakan akan melambat dari 2,6% pada tahun 2022 menjadi 1,5% pada tahun 2023 dan 1,4% pada tahun 2024 karena pengetatan kebijakan mulai terasa. Pasar negara berkembang dan negara berkembang diproyeksikan akan mengalami penurunan pertumbuhan yang moderat dari 4,1 persen pada tahun 2022

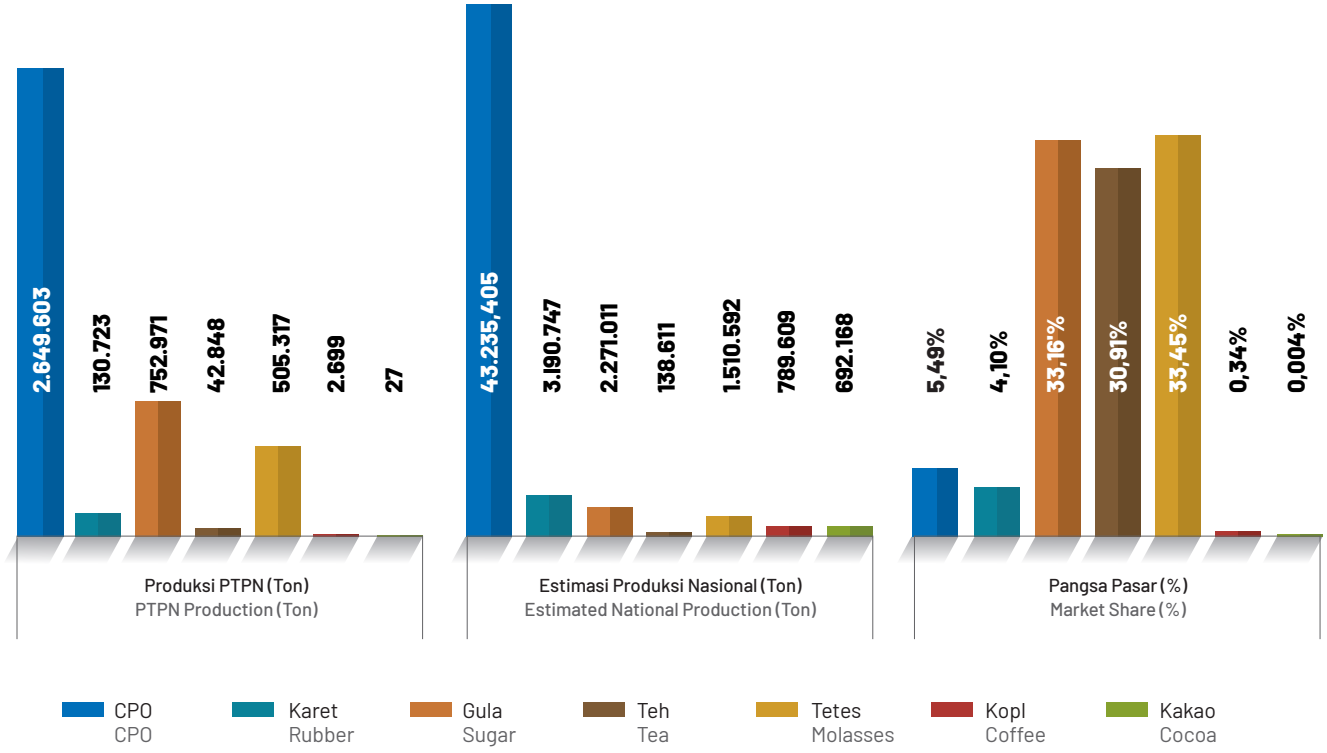
Global Economy

The initial estimate is for global growth to slow from 3.5% in 2022 to 3.0% in 2023 and 2.9% in 2024, well below the historical average (2000-19) of 3.8%. Advanced economies are expected to slow from 2.6% in 2022 to 1.5% in 2023 and 1.4% in 2024 as policy tightening begins to bite. Emerging and developing markets are projected to experience a moderate growth slowdown from 4.1 percent in 2022 to 4.0 percent in 2023 and 2024. Global inflation is expected to continue to decline, from 8.7% in 2022 to 6.9% in 2023 and 5.8% in 2024,

menjadi 4,0 persen pada tahun 2023 dan 2024. Inflasi global diperkirakan akan terus menurun, dari 8,7 persen pada tahun 2022 menjadi 6,9 persen pada tahun 2023 dan 5,8 persen pada tahun 2024, karena kebijakan moneter yang lebih ketat yang dibantu oleh harga komoditas internasional yang lebih rendah. Inflasi inti secara umum diproyeksikan menurun secara bertahap, dan inflasi diperkirakan tidak akan kembali ke target hingga tahun 2025.

due to tighter monetary policies aided by lower international commodity prices. Core inflation is generally projected to decline gradually, and inflation is not expected to return to target until 2025.

Pangsa pasar Komoditas Sampai dengan Desember 2023
Market Share of Commodities as of December 2023



Perekonomian Indonesia

Di tengah ketidakpastian global dan meluasnya dampak El Nino, perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi dengan tumbuh sebesar 4,94 persen pada Triwulan 3-2023 (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Triwulan 3-2023 terutama bersumber dari Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan serta Konstruksi. Industri Pengolahan tumbuh sebesar 5,20%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan 3-2023 terutama bersumber dari Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto. Pertumbuhan PMTB sebesar 5,77%, lebih tinggi dibandingkan Triwulan 3-2022 sebesar 4,98%. Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di wilayah pulau Sulawesi dan wilayah Maluku dan Papua masing-masing sebesar 6,44 persen dan 9,25 persen. Pertumbuhan ekonomi pulau Sulawesi bersumber

Indonesian economy

Amid global uncertainty and the widening impact of El Nino, the Indonesian economy has shown resilience, growing by 4.94 percent in the third quarter of 2023 (yoy). From the production side, the growth of the Indonesian economy in the third quarter of 2023 mainly came from Manufacturing, Transportation and Warehousing, and Construction. Manufacturing grew by 5.20%, higher than Indonesia's economic growth. From the expenditure side, Indonesia's economic growth in the third quarter of 2023 mainly came from Household Consumption and Gross Fixed Capital Formation. PMTB growth was 5.77%, higher than the third quarter of 2022 at 4.98%. Meanwhile, spatially, the highest economic growth occurred in the Sulawesi island region and the Maluku and Papua regions, each at 6.44 percent and 9.25 percent, respectively. The economic growth of Sulawesi Island is sourced from manufacturing, mining, quarrying, and

dari Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, serta erdagangan. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi pulau Maluku dan Papua bersumber dari Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan.

trade. Meanwhile, economic growth in the Maluku and Papua islands is sourced from Mining and Quarrying, Manufacturing, and Trade.

JP Morgan Composite Indeks

Sektor jasa kembali mengungguli sektor manufaktur di bulan November. Aktivitas bisnis jasa meningkat secara moderat, karena pertumbuhan di kategori jasa bisnis dan keuangan lebih dari mengimbangi penurunan pertama dalam aktivitas jasa konsumen sejak Januari. Terdapat pula beberapa sinyal positif yang muncul dari industri manufaktur. Meskipun volume produksi menurun selama enam bulan berturut-turut, tingkat kontraksi sangat kecil dan merupakan yang terlemah selama periode tersebut. Data subsektor menyoroti ekspansi ringan pada produsen barang konsumsi dan investasi yakni output turun pada kategori barang setengah jadi.

JP Morgan Composite Index

The service sector once again outperformed the manufacturing sector in November. Business activity in the service sector increased moderately, as growth in the business and financial services categories more than offset the first decline in consumer service activity since January. There were also some positive signals emerging from the manufacturing industry. Although production volumes decreased for six consecutive months, the level of contraction was very small and the weakest during that period. Subsector data highlight mild expansions in consumer goods and investment goods manufacturers, with output declining in the semi-finished goods category.



TINJAUAN KEUANGAN LAINNYA
OTHER FINANCIAL REVIEWS

Kebijakan Dividen Dan Pembagiannya

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

Perseroan menerapkan kebijakan pembagian dividen Perusahaan melalui Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan atas penetapan Direksi dan persetujuan Dewan Komisaris. Pembagian dividen interim diizinkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan, dengan catatan bahwa pembagian tersebut tidak akan mengakibatkan aset bersih Perusahaan menjadi kurang dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk cadangan wajib Perusahaan.

Selama tahun 2023, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen, dan begitupun di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena keputusan Pemegang Saham telah menetapkan bahwa Perseroan tidak akan menyetorkan dividen kepada kas negara. Laba Perseroan secara keseluruhan dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengembangan usaha.

Dividend Policy And Distribution

Basis of Dividend Distribution Policy

The Company implements the dividend distribution policy through the Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS). Before the end of the financial year, interim dividends may be distributed upon the resolution of the Board of Directors and the approval of the Board of Commissioners. The Company's Articles of Association permit interim dividend distribution, provided that such distribution will not result in the Company's net assets falling below the fully paid-up capital, including the Company's mandatory reserves.

During the year 2023, the Company did not distribute dividends, as in previous years. This is because the Shareholders' decision has determined that the Company will not remit dividends to the state treasury. The Company's profits as a whole are allocated to support business development activities.

Kontribusi Terhadap Negara

Per 31 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kepada Negara. Pembayaran pajak perusahaan di tahun 2023 tercatat sebesar Rp4,85 triliun. RIncian mengenai pembayaran pajak telah diuraikan melalui tabel berikut:

Contribution To The Country

As of 31 December 2023, the Company has fulfilled its obligation to pay taxes to the State. The company's tax payments in 2023 amounted to Rp4.85 trillion. Details regarding tax payments have been outlined in the following table:

(dalam jutaan Rupiah) / (in million Rupiah)

Uraian Description	2023
PBB Land and Building Tax	528.691
PPN Masukan Input VAT	1.535.705
PPN Lebih/Kurang bayar di SPT Masa PPN Over/Underpayment VAT in VAT Periodic Tax Returns	72.457
PPh Psl. 21 Income Tax Article 21	557.991
PPh Psl. 22 Income Tax Article 22	28.933
PPh Psl. 23 Income Tax Article 23	170.266
PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4.2	158.134

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

Uraian Description	2023
PPh Badan 25/29 Corporate Income Tax Article 25/29	1.716.171
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Duty on the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB)	-
Pajak Ekspor Export Tax	-
Pajak lainnya (Revaluasi Aset + STP) Other Taxes (Asset Revaluation + Tax Collection Penalty)	79.859
Total Pajak Total Taxes	**4.848.208**

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)
INFORMATION ON EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Per 31 Desember 2023, tidak terdapat informasi mengenai ESOP/MSOP yang dilakukan Perusahaan, karena perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) dan/atau Manajemen (MSOP).

As of 31 December 2023, there is no information regarding ESOP/MSOP conducted by the Company, as the company does not have an Employee Stock Ownership Program (ESOP) and/or Management Stock Ownership Program (MSOP).

INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
INFORMATION ON THE REALIZATION OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS USAGE

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak mencatatkan adanya informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Hal ini karena Perusahaan tidak pernah melakukan aksi Penawaran Umum Perdana Saham. Selain itu, Perusahaan juga tidak menerbitkan obligasi yang mewajibkan Perusahaan untuk melaporkan penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi.

Until the end of 2023, the Company did not record any information regarding the realization of the usage of proceeds from a public offering. This is because the Company has never conducted an Initial Public Offering of Shares. Furthermore, the Company has not issued bonds that require the Company to report the usage of proceeds from public bond offerings.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS INVOLVING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

Kebijakan tentang Pihak Berelasi

Perseroan memiliki kebijakan mengenai transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang merupakan individu atau entitas yang berelasi dengan Perusahaan. Adapun rincian mengenai pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

1. Individu atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika mereka:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan;
   c. Merupakan personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk dari Perusahaan.
2. Suatu entitas dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:
   a. Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan;
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf 1);
   g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf 1) a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
   h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah bagi Perusahaan adalah entitas yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi

Policy on Related Parties

The Company has a policy regarding transactions with related parties, who are individuals or entities related to the Company. Details regarding related parties are as follows:

1. Individuals or immediate family members have a relationship with the Company if they:
   a. Have control or joint control over the Company;
   b. Have significant influence over the Company;
   c. Are key management personnel of the Company or the ultimate parent entity of the Company.
2. An entity is considered related to the Company if:
   a. The entity and the Company are members of the same group (meaning the parent entity, subsidiary entities, and subsequent subsidiary entities related to another entity);
   b. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a group, where the other entity is a member);
   c. Both entities are joint ventures of the same third party;
   d. One entity is a joint venture of a third party, and the other entity is an associate of the third party;
   e. The entity is a post-employment benefit plan for benefits arising from services rendered by employees of either the reporting entity or an entity related to the Company. If the Company is the entity that sponsors such a plan, then the sponsoring entity is also related to the Company;
   f. The entity is controlled or jointly controlled by individuals identified in (1);
   g. Individuals identified in (1)(a) have significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or the parent entity of the entity);
   h. The entity, or members of the group of which the entity is a part, provide key management personnel services to the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.

Entities related to the government for the Company are entities jointly controlled or influenced by the Government. In

oleh Pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah yang dimaksud ialah, instansi pemerintah serta badan pemerintah yang serupa, baik itu lokal, nasional, maupun internasional.

Selain itu, entitas yang berelasi dengan pemerintah juga dapat dipengaruhi atau dikendalikan secara signifikan oleh Kementrian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

this context, the government refers to government agencies and similar government bodies, whether local, national, or international.

Additionally, entities related to the government may also be significantly influenced or controlled by the Ministry of Finance or Regional Governments who are Shareholders of the entity or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as the authorized shareholder.

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara substansial dengan persyaratan yang normal, sebagaimana transaksi dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan khusus, dan telah diatur sesuai dengan standar PSAK 7 mengenai Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Pengaturan harga pasar menjadi dasar bagi transaksi dengan pihak berelasi. Khusus untuk transaksi antara Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perlakuan yang diberikan sama seperti transaksi dengan pihak berelasi, sejalan dengan ketentuan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Explanation Regarding Fairness of Transactions

Transactions with related parties have been conducted substantially on normal terms, as with transactions with parties not having special relationships, and have been regulated in accordance with PSAK 7 standards regarding Disclosure of Related Parties.

Market prices serve as the basis for transactions with related parties. Specifically for transactions between the Company and State-Owned Enterprises (SOEs), the treatment given is the same as transactions with related parties, in line with the provisions in PSAK 7 "Disclosure of Related Parties".

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Kewajaran transaksi dan kepatuhan terhadap regulasi terkait transaksi dengan pihak berelasi telah melalui tahap *review* dan audit oleh auditor internal dan eksternal Perusahaan. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dijalankan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 7 mengenai Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Dalam konteks ini, Direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi telah mengikuti prosedur yang memadai dan dipatuhi sesuai dengan praktik bisnis yang umum, termasuk prinsip transaksi yang adil (*arm's-length principle*).

Company Policy Regarding Transaction Review Mechanisms

The fairness of transactions and compliance with regulations related to transactions with related parties have undergone review and audit procedures by the Company's internal and external auditors. Transactions with related parties have been conducted in accordance with PSAK No. 7 provisions on the Disclosure of Related Parties. In this context, the Board of Directors is responsible for ensuring that affiliate transactions have followed adequate procedures and complied with common business practices, including the principle of fair transactions (arm's-length principle).

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan aturan dan ketentuan terkait, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, dilakukan melalui pengungkapan sesuai dengan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dalam Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2023, yang telah disertifikasi oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY). Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilaksanakan dengan kondisi dan persyaratan yang serupa dengan pihak ketiga maupun tidak, dijelaskan secara rinci dalam Laporan Keuangan.

Compliance with Related Regulations and Provisions

Compliance with rules and regulations, such as Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, is achieved through disclosures in accordance with PSAK 7 on "Disclosure of Related Parties" in the Company's 2023 Financial Statements, which have been certified by The office of Public Accountant Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY). All transactions conducted with related parties, whether executed under similar conditions and terms as with third parties or not, are detailed extensively in the Financial Statements.

Dewan Komisaris dan Komite Audit juga memegang peranan penting dalam menjalankan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang umum, termasuk mematuhi prinsip transaksi yang adil (*arm's-length principle*).

The Board of Commissioners and the Audit Committee also play a crucial role in implementing adequate procedures to ensure that affiliate transactions are conducted in accordance with common business practices, including compliance with the fair transaction principle (arm's-length principle).

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI
FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE OCCURRENCE EVENTS

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak mencatat adanya kejadian yang bersifat luar biasa dan dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perusahaan.

Until the end of 2023, the Company did not record any extraordinary events that could affect the Company's financial performance.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
ACCOUNTING POLICY CHANGES AND THEIR IMPACTS ON THE COMPANY

Hingga akhir tahun 2023, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang telah memberikan pengaruh terhadap kinerja Perusahaan baik secara operasional maupun keuangan.

Until the end of 2023, there were no accounting policy changes that have affected the Company's performance, both operationally and financially.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Hal-Hal Yang Berpotensi Berpengaruh Terhadap Kelangsungan Usaha

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak menghadapi hal-hal yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Issues Potentially Affecting Business Continuity

Until the end of 2023, the Company has not faced issues that could significantly affect business continuity.

Asesmen Manajemen

Pada tahun 2023, Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap kapabilitasnya untuk menjalankan operasi bisnisnya secara berkelanjutan dan yakin bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang memadai untuk meneruskan kegiatan usahanya di masa depan. Selain itu, manajemen perusahaan tidak menemukan adanya ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kegiatan bisnisnya.

Management Assessment

In 2023, the Company evaluated its capabilities to sustain its business operations and is confident that the Company has adequate resources to continue its business activities in the future. Furthermore, the company's management did not find any material uncertainties that could significantly undermine the Company's ability to continue its business activities.

Asumsi Yang Digunakan Manajemen Untuk Melakukan Asesmen

Dalam melakukan penyusunan asesmen, Manajemen Perusahaan melakukan penyusunan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan manajemen adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan;
2. Likuiditas;
3. Solvabilitas;
4. Masalah Internal;
5. Perkara Hukum.

Assumptions Used By Management For Conducting The Assessment

In conducting the assessment, the Company's Management considers several factors that can affect business continuity. The factors considered by management are as follows:

1. Financial performance;
2. Liquidity;
3. Solvency;
4. Internal Issues;
5. Legal Matters.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
COMPANY HEALTH LEVEL

Pengukuran tingkat kesehatan Perusahaan dilakukan dengan pedoman pada Keputusan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tersebut tingkat kesehatan perusahaan harus dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Nasional/Perusahaan Pemeringkat Nasional yang Terafiliasi dengan Perusahaan Pemeringkat Internasional. Pada Tahun 2023 Penilaian tingkat kesehatan PTPN dilakukan oleh PEFINDO dan sesuai suratnya No.RTG-201/PEF-DIR/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 tingkat kesehatan Holding Perkebunan mendapat klasifikasi "SEHAT" dengan Tingkat Kesehatan "A" dengan peringkat (*rating*) Perusahaan idA-/Stable.

No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. According to the Minister of SOEs Regulation, the health level of companies must be assessed by a National Rating Agency/International Rating Agency Affiliated with National Rating Agency. In 2023, PTPN's health level assessment was conducted by PEFINDO, and according to its letter No. RTG-201/PEF-DIR/V/2024 dated May 30, 2024, the health level of the Plantation Holding was classified as "HEALTHY" with an "A" Health Level rating and a company rating of idA-/Stable.

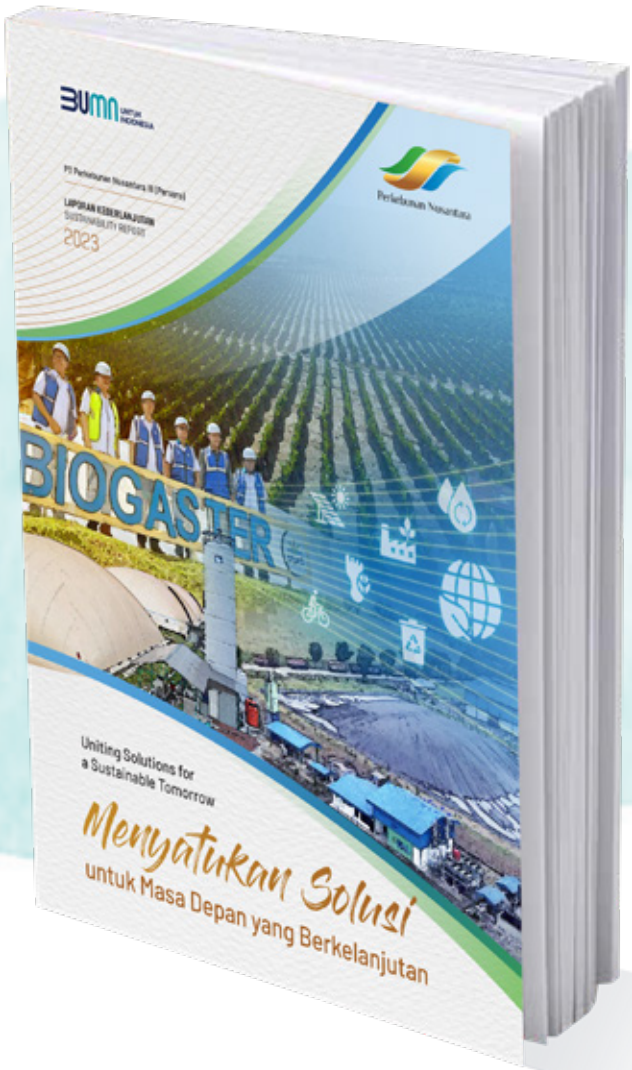
Peringkat Berdiri Sendiri Standalone Rating	**Peringkat Akhir** Final Rating	**Tingkat Kesehatan** Health Level
idBBB+(sa)	**idA-/Stable**	**Sehat** Healthy
Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan yang memadai dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan. Tanda (sa) menunjukkan bahwa peringkat adalah peringkat berdiri sendiri (standalone rating). An obligor with an idBBB rating has an adequate capacity compared to other Indonesian obligors to meet its long-term financial commitments. However, the obligor's ability is more likely to be affected by adverse changes in economic conditions. The plus sign (+) indicates that the rating is relatively strong and above the average for the respective category. The (sa) sign indicates that the rating is a standalone rating.	Obligor dengan peringkat idA memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor dengan peringkat lebih tinggi. Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan. An obligor with an idA rating has a strong capacity compared to other Indonesian obligors to meet its long-term financial commitments. However, the obligor's ability may be more easily affected by adverse changes in economic conditions compared to obligors with higher ratings. The minus sign (-) indicates that the rating is relatively weak and below the average for the respective category.	Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 pasal 81. In accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 Article 81.

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY







TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Informasi kegiatan Perusahaan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) akan disampaikan pada Laporan Keberlanjutan 2023 yang diterbitkan dalam buku terpisah dan dalam waktu yang bersamaan dengan Laporan Tahunan. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Tahunan dan dalam Laporan Keberlanjutan 2023 merupakan bagian yang sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan.

Information on the Company's activities related to Social and Environmental Responsibility (CSR) of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) will be submitted in the 2023 Sustainability Report which is published in a separate book and at the same time as the Annual Report. The information submitted in the Annual Report and in the 2023 Sustainability Report is in accordance with the provisions contained in POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies and SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports.



Laporan Keuangan

FINANCIAL REPORT





PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
dan entitas anaknya/ and its subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of December 31, 2023
and for the year then ended with independent auditor's report

The original report included herein is in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

Daftar Isi | ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Director's Statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-2	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3-4	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6-7	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8-202	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

Perkebunan Nusantara

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III DAN ENTITAS ANAKNYA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

DIRECTORS' STATEMENT ON THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES AS OF DECEMBER 31, 2023 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *We, the undersigned:*

1.	Nama / *Name*	:	Mohammad Abdul Ghani
	Alamat Kantor / Office *Address*	:	Gedung Agro Plaza Lt. 15 Jl. H.R. Rasuna Said Kav.X2 - 1 Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950
	Jabatan / *Title*	:	Direktur Utama / *President Director*
2.	Nama / *Name*	:	M. Iswahyudi
	Alamat Kantor / Office *Address*	:	Gedung Agro Plaza Lt. 15 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 - 1 Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950
	Jabatan / *Title*	:	Direktur Keuangan / *Finance Director*

menyatakan bahwa: /*certify that*:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara III (Perusahaan) dan entitas anaknya ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

1. *We take the responsibility for the preparation and presentation of consolidated financial statements of PT Perkebunan Nusantara III ("the Company") and its subsidiaries (the "Group")*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in Group's consolidated financial statements has been completely and properly disclosed;*
   b. The Group's consolidated financial statements do not contain material misleading information or facts, and do not omit material information or facts;
4. *We are responsible for the Group's internal control system.*

The statement is made truthfully.

Jakarta, 19 Mei 2024 /*May 19, 2024*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)



Mohammad Abdul Ghani
Direktur Utama/
President Director



M. Iswahyudi
Direktur Keuangan/
Finance Director

Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01409/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 01409/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024

The Shareholders, the Boards of Commissioners, and Directors
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01409/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ("SPKN") yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal lain

Kami juga telah menerbitkan secara terpisah laporan-laporan bertanggal 19 Mei 2024, masing-masing atas: (i) kepatuhan Grup terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian, dan (ii) pengendalian internal Grup.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan Tahun 2023 ("Laporan Tahunan"). Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01409/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA") and State Financial Auditing Standards ("SPKN") established by the Audit Board of the Republic of Indonesia ("BPK"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other matter

We have also separately issued reports dated May 19, 2024, on: (i) the Group's compliance with laws and regulations that directly and materially affect the presentation of its consolidated financial statements, and (ii) the Group's internal control.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2023 Annual Report ("The Annual Report"). The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indones
langua

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01409/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01409/2.1032/AU.1/01/160 5/1/V/2024 (continued)

Other information (continued)

Our opinion on the accompanying consolidat financial statements does not cover the Annu Report, and accordingly, we do not express a form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanyi consolidated financial statements, c responsibility is to read the Annual Report wher becomes available and, in doing so, consic whether the Annual Report is materia inconsistent with the accompanying consolidat financial statements or our knowledge obtained the audit, or otherwise appears to be materia misstated.

When we read the Annual Report, if we conclu that there is a material misstatement therein, are required to communicate the matter to thc charged with governance and take appropria actions based on the applicable laws a regulations.

Responsibilities of management and thc charged with governance for the consolidat financial statements

Management is responsible for the preparation a fair presentation of the consolidated financ statements in accordance with Indonesian Financ Accounting Standards, and for such interi control as management determines is necessary enable the preparation of consolidated financ statements that are free from mater misstatement, whether due to fraud or error.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01409/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01409/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01409/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01409/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01409/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01409/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01409/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SPKN yang ditetapkan BPK juga mencakup pengujian atas: (i) kepatuhan Grup terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup, dan (ii) pengendalian internal Grup.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01409/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

An audit conducted in accordance with SPKN established by BPK also includes testing of the: (i) Group's compliance with laws and regulations that directly affect and material to the presentation of Group's consolidated financial statements, and (ii) Group's internal control.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Damestar Hutagalung
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1609/*Public Accountant Registration No. AP.1609*

19 Mei 2024/*May 19, 2024*

01409

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4,37a	7.085.854.404.115	10.862.010.136.371	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	5,37b	1.671.545.886.645	2.282.286.871.086	*Restricted cash*
Piutang usaha - neto	6			*Trade receivables - net*
Pihak ketiga		1.155.433.180.661	1.570.653.455.581	*Third parties*
Pihak berelasi	37c	218.218.000.032	59.340.999.723	*Related parties*
Piutang lain-lain - neto	7			*Other receivables - net*
Pihak ketiga		515.097.055.768	545.205.363.640	*Third parties*
Pihak berelasi	37d	278.129.215.369	485.991.910.803	*Related parties*
Persediaan - neto	8	5.859.682.696.971	10.428.671.390.826	*Inventories - net*
Aset biologis	9	2.094.880.889.932	2.014.322.292.568	*Biological assets*
Pajak dibayar di muka	22a	1.589.779.649.222	1.123.845.158.644	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya - neto	10	1.040.488.539.100	373.982.969.261	*Other current assets - net*
TOTAL ASET LANCAR		**21.509.109.517.815**	**29.746.310.548.503**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang lain-lain jangka panjang - neto	11,37e	337.049.699.636	259.618.928.071	*Other long-term receivables - net*
Investasi saham	12	1.985.058.201.436	1.777.666.699.987	*Investments in shares of stock*
Aset pajak tangguhan	22f	562.186.126.476	1.020.961.790.103	*Deferred tax assets*
Aset tetap - neto	13	106.912.294.014.273	104.831.544.466.126	*Fixed assets - net*
Aset biologis	9	402.758.572.882	527.930.828.458	*Biological assets*
Properti investasi	14	8.813.171.361.439	8.708.117.491.638	*Investment property*
Beban tangguhan - hak atas tanah	15	584.048.893.774	511.994.686.820	*Deferred charge - land rights*
Piutang tagihan pajak	22b	991.462.652.599	661.650.491.835	*Claims for tax refund*
Aset hak-guna	16	552.826.265.074	276.902.247.822	*Right-of-use assets*
Aset tidak lancar lainnya - neto	17	1.249.789.620.002	833.151.968.891	*Other non-current assets - net*
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		**122.390.645.407.591**	**119.409.539.599.751**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
TOTAL ASET		**143.899.754.925.406**	**149.155.850.148.254**	***TOTAL ASSETS***

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank jangka pendek	18, 37f	46.464.039.668	262.121.608.387	*Short-term bank loans*
Utang usaha	19			*Trade payables*
Pihak ketiga		6.824.988.452.362	5.306.845.372.035	*Third parties*
Pihak berelasi	37g	194.251.497.168	339.220.348.665	*Related parties*
Utang lain-lain	20			*Other payables*
Pihak ketiga		844.574.229.432	606.285.587.610	*Third parties*
Pihak berelasi	37h	587.797.646.648	529.054.084.315	*Related parties*
Liabilitas kontrak	21	2.152.814.817.559	2.556.213.479.478	*Contract liabilities*
Utang pajak	22c	653.327.706.417	1.224.768.761.887	*Taxes payables*
Biaya masih harus dibayar	23,37k	2.262.873.412.734	4.563.969.325.150	*Accrued expenses*
Bagian lancar atas:				*Current maturities of:*
Pendapatan diterima di muka	24,37l	208.284.268.100	10.751.606.975	*Unearned revenue*
Utang jangka panjang	25,37m	5.632.949.408.651	8.244.607.329.973	*Long-term debts*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	26	2.321.658.159.675	2.338.721.924.515	*Employee benefits liability*
Liabilitas sewa	16	215.193.680.148	144.001.545.094	*Lease liabilities*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		**21.945.177.318.562**	**26.126.560.974.084**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa	16	199.916.599.638	139.576.465.206	*Lease liabilities*
Pendapatan diterima di muka	24,37l	890.914.898.253	480.700.995.834	*Deferred revenue*
Utang jangka panjang	25,37m	35.686.780.537.118	36.020.462.712.256	*Long-term liabilities*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	26	13.550.807.063.689	15.150.926.865.890	*Employee benefits liability*
Liabilitas pajak tangguhan - neto	22f	940.531.843.626	1.121.477.945.434	*Deferred tax liabilities - net*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		**51.268.950.942.324**	**52.913.144.984.620**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
TOTAL LIABILITAS		**73.214.128.260.886**	**79.039.705.958.704**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				***Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham				*Share capital - par value Rp1,000,000 per share*
Modal dasar - 66.600.000 saham				*Authorized - 66,600,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 40.216.132 saham	28	40.216.132.000.000	40.216.132.000.000	*Issued and fully paid - 40,216,132 shares*
Komponen ekuitas lainnya	28	(13.589.154.502.114)	(13.589.154.502.114)	*Other equity components*
Penghasilan komprehensif lain		(42.158.169.713)	(28.374.941.362)	*Other comprehensive income*
Surplus revaluasi	29	45.662.911.740.980	45.050.291.089.385	*Revaluation surplus*
Saldo laba				*Retained earning*
Ditentukan penggunaannya		7.236.401.118.109	1.603.336.719.707	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		(13.369.102.350.831)	(7.869.270.058.180)	*Unappropriated*
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		66.115.029.836.431	65.382.960.307.436	*Total Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali	27	4.570.596.828.089	4.733.183.882.114	*Non-controlling Interest*
TOTAL EKUITAS		**70.685.626.664.520**	**70.116.144.189.550**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**143.899.754.925.406**	**149.155.850.148.254**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,* 2023	2022	
PENDAPATAN	30	50.981.397.158.067	55.863.302.364.478	***REVENUE***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	31	(38.234.291.171.653)	(36.669.237.286.067)	***COST OF REVENUE***
LABA BRUTO		**12.747.105.986.414**	**19.194.065.078.411**	***GROSS PROFIT***
Keuntungan yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis	9	43.645.969.261	(377.118.832.890)	*Gain arising from change in fair value of biological assets*
Beban pemasaran dan penjualan	32	(1.032.974.547.697)	(856.340.857.350)	*Marketing and selling expenses*
Beban umum dan administrasi	33	(6.787.255.020.986)	(8.259.387.409.429)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lain	34	2.589.107.052.879	3.526.493.251.119	*Other operating income*
Beban operasi lain	35	(1.945.721.299.246)	(2.459.455.745.908)	*Other operating expenses*
LABA USAHA		**5.613.908.140.625**	**10.768.255.483.953**	***OPERATING PROFIT***
Bagian laba entitas asosiasi		259.222.051.808	226.053.213.835	*Share in income of associates*
Pendapatan keuangan	36a	237.617.385.855	191.462.376.918	*Finance income*
Beban keuangan	36b	(3.751.386.253.219)	(3.151.476.616.479)	*Finance expense*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**2.359.361.325.069**	**8.034.294.458.227**	***PROFIT BEFORE TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	22d	(1.337.055.074.408)	(2.017.313.386.680)	*INCOME TAX EXPENSE*
LABA TAHUN BERJALAN		**1.022.306.250.661**	**6.016.981.071.547**	***PROFIT FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lain:				***Other comprehensive income:***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Keuntungan (kerugian) dari revaluasi aset tetap	13,14	579.722.115.592	(116.730.372.659)	*Gain (loss) from revaluation of fixed assets*
Kerugian dari pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	26	(1.016.280.169.426)	(1.411.628.959.329)	*Loss on Re-measurement of employee benefits liability*
Kerugian nilai wajar aset keuangan - neto		(18.076.302.921)	(161.436.059.358)	*Loss on Fair value of financial assets - net*
Bagian penghasilan komprehensif dari entitas asosiasi - keuntungan aktuaria		2.467.390.996	1.005.950.889	*Share in other comprehensive income of associate entities - actuarial gain*
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan neto		**(452.166.965.759)**	**(1.688.789.440.457)**	***Other comprehensive income/ (loss) for the year - net***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**570.139.284.902**	**4.328.191.631.090**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*		
		2023	2022	
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:				***Income For The Year Attributable To:***
Pemilik entitas induk		1.085.206.469.713	5.633.064.398.402	*Owners of the Parent*
Kepentingan nonpengendali		(62.900.219.052)	383.916.673.145	*Non-controlling interest*
Total		**1.022.306.250.661**	**6.016.981.071.547**	***Total***
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:				***Total Comprehensive Income For The Year Attributable To:***
Pemilik entitas induk		732.069.528.996	4.112.323.794.630	*Owners of the Parent*
Kepentingan nonpengendali		(161.930.244.094)	215.867.836.460	*Non-controlling interest*
Total		**570.139.284.902**	**4.328.191.631.090**	***Total***
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	38	**26.984**	**140.069**	***BASIC PROFIT PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNER OF THE PARENT***

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk /*Equity attributable to the owner of the parent*									
	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and full paid paid share capital*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus*	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Fair value through other comprehensive income	Saldo laba/*Retained earning*			Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interest*	Total ekuitas/ *Total equity*	
					Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*	Total/ *Total*			
Saldo per 31 Desember 2021	**40.216.132.000.000**	**(13.589.154.502.114)**	**45.093.984.876.072**	**87.150.411.166**	**1.603.336.719.707**	**(12.294.264.064.025)**	**61.117.185.440.806**	**4.589.788.075.868**	**65.706.973.516.674**	***Balance as of December 31, 2021***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	5.633.064.398.402	5.633.064.398.402	383.916.673.145	6.016.981.071.547	*Profit for the year*
Dividen kas	-	-	-	-	-	-	-	(1.427.849.041)	(1.427.849.041)	*Cash dividend*
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	(91.068.225.209)	-	-	-	(91.068.225.209)	(25.662.147.450)	(116.730.372.659)	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	(1.291.446.837.793)	(1.291.446.837.793)	(120.182.121.536)	(1.411.628.959.329)	*Loss on remeasurement of employee benefits liability*
Bagian penghasilan komprehensif dari entitas asosiasi dan mutasi ekuitas lainnya	-	-	-	-	-	969.554.409	969.554.409	36.396.480	1.005.950.889	*Share of comprehensive income from associate entity and other equity mutation*
Nilai wajar investasi saham - neto	-	-	-	(139.205.731.514)	-	-	(139.205.731.514)	(22.230.327.844)	(161.436.059.358)	*Fair value of share investment – net*
Reklasifikasi	-	-	47.374.438.522	23.680.378.986	-	82.406.890.827	153.461.708.335	(71.054.817.508)	82.406.890.827	*Reclassification*
Saldo per 31 Desember 2022	**40.216.132.000.000**	**(13.589.154.502.114)**	**45.050.291.089.385**	**(28.374.941.362)**	**1.603.336.719.707**	**(7.869.270.058.180)**	**65.382.960.307.436**	**4.733.183.882.114**	**70.116.144.189.550**	***Balance as of December 31, 2022***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	1.085.206.469.713	1.085.206.469.713	(62.900.219.052)	1.022.306.250.661	*Profit for the year*
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	5.633.064.398.402	(5.633.064.398.402)	-	-	-	*Appropriation for general reserve*
Dividen kas	-	-	-	-	-	-	-	(656.809.932)	(656.809.932)	*Cash dividend*
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	612.620.651.595	-	-	-	612.620.651.595	(32.898.536.003)	579.722.115.592	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	(954.192.266.070)	(954.192.266.070)	(62.087.903.356)	(1.016.280.169.426)	*Loss on remeasurement of employee benefits Liability*
Bagian penghasilan komprehensif lain dari asosiasi	-	-	-	-	-	2.217.902.108	2.217.902.108	249.488.888	2.467.390.996	*Share of other comprehensive income of associate*
Keuntungan neto atas instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	(13.783.228.351)	-	-	(13.783.228.351)	(4.293.074.570)	(18.076.302.921)	*Net gain on equity instruments designated at fair value through other comprehensive income*
Saldo per 31 Desember 2023	**40.216.132.000.000**	**(13.589.154.502.114)**	**45.662.911.740.980**	**(42.158.169.713)**	**7.236.401.118.109**	**(13.369.102.350.831)**	**66.115.029.836.431**	**4.570.596.828.089**	**70.685.626.664.520**	***Balance as of December 31, 2023***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements from an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

	2023	Catatan/ *Notes*	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	51.602.628.566.046		58.424.818.546.900	*Receipts from customers*
Penerimaan dari restitusi pajak	478.781.981.237		702.732.463.052	*Receipts from tax refunds*
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(36.023.947.910.166)		(47.016.112.410.367)	*Payments to suppliers*
Pembayaran pajak	(5.398.035.375.924)		(5.373.081.861.046)	*Tax payment*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	**10.659.427.261.193**		**6.738.356.738.539**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dari penjualan aset tetap	320.214.922.172		326.885.359.974	*Receipts from sales of fixed assets*
Penerimaan bunga	237.617.385.855		191.462.376.918	*Receipts of interest*
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	56.932.615.371		122.736.980.480	*Dividend receipt from associates*
Penambahan piutang lain-lain jangka panjang	(60.127.371.052)		(629.443.097.969)	*Payment of other long-term receivables*
Penambahan beban tangguhan hak atas tanah	(154.415.566.426)		(1.679.736.907)	*Addition of deferred charges land rights*
Penambahan aset lainnya	(145.840.139.703)		(55.693.535.867)	*Addition of other assets*
Perolehan aset tetap	(4.571.567.513.870)		(2.787.105.003.579)	*Acquisition of fixed assets*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(4.317.185.667.653)**		**(2.832.836.656.950)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pinjaman bank	31.558.701.220.518		346.076.268.660	*Proceeds from bank loans*
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga	1.500.000.000		-	*Receipt of loans from third parties*
Pembayaran beban keuangan	(3.751.386.253.219)		(2.799.157.233.472)	*Finance cost payment*
Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali	(656.809.932)		(1.034.071.912)	*Dividens paid to non-controlling interest*
Penerimaan utang dari Pemerintah Republik Indonesia	1.047.519.139.000		1.201.143.500.000	*Receipt of debt from the Government of the Republic of Indonesia*
Pembayaran utang kepada Pemerintah Republik Indonesia			(5.000.120.711)	*Payment of debt to the Government of the Republic of Indonesia*
Pembayaran MTN	(665.000.000.000)			*Payment of Medium term notes*
Pembayaran sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen	(2.453.847.492)		(236.122.131.973)	*Payment of obliations under lease and consumer financing loan*
Pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga	(523.850.000)		(8.296.960.070)	*Payment of Loan payments to third party*
Pembayaran pinjaman bank	(38.832.203.350.382)		(2.906.561.284.448)	*Bank loans payment*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(10.644.503.751.507)**		**(4.408.952.033.926)**	***Net cash used in financing activities***
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS SERTA KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	**(4.302.262.157.967)**		**(503.431.952.337)**	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENT***
Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar Atas Kas dan setara kas	(84.634.558.730)		131.672.910.871	*Net Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

	2023	Catatan/ *Notes*	2022	
KAS DAN SETARA KAS SERTA KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANYA AWAL TAHUN				***CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR***
Kas dan setara kas	10.862.010.136.371		11.476.218.634.841	*Cash and cash equivalent*
Kas dan setara kas yang dibatasi Penggunaannya	2.282.286.871.086		2.039.837.414.082	*Restricted Cash and cash equivalent*
KAS DAN SETARA KAS SERTA KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANYA AKHIR TAHUN	**8.757.400.290.760**		**13.144.297.007.457**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENT AT ENDING OF YEAR***
Terdiri dari:				***Consits of:***
Kas dan setara kas	7.085.854.404.115		10.862.010.136.371	*Cash and cash equivalent*
Kas dan setara kas yang dibatasi Penggunaannya	1.671.545.886.645		2.282.286.871.086	*Restricted Cash and cash equivalent*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)***

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tanggal 14 Februari 1996, sesuai dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H. No. 36 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8331 HT.01.01.Th.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, tambahan No. 8674. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No. 11 dari Notaris Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. tanggal 19 Oktober 2020, mengenai Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Perubahan anggaran dasar ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat No. AHU-AH.01.03-0401013 tanggal 23 Oktober 2020.

Perusahaan adalah hasil peleburan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Perkebunan III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero) dan PT Perkebunan V (Persero). Peleburan ketiga BUMN tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1996.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero), ditetapkan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar 90% yang berasal dari pengalihan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara (Persero) lainnya.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ("the Company") was established based on the Government Regulation No. 8 dated February 14, 1996, as based on the Notarial Deed No. 36 of Harun Kamil, S.H. dated March 11, 1996 and was approved by Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-8331 HT.01.01.Th.96 dated August 8, 1996 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated October 8, 1996, Supplement No. 8674. The Company's Articles of Association has been amended several times, the most recent amendments were made through the Notarial Deed No. 11, of Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn dated October 19, 2020, regarding The Statement of Decision of Ministry of State-Owned Enterprises as The Stockholders of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Regarding The Approval of Changes in Articles of Association. The amendments of the articles of association were received by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter No. AHU-AH.01.03-0401013 dated October 23, 2020.

The Company was the result of the merger of 3 (three) State-Owned Enterprises (BUMN), which are PT Perkebunan III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero) and PT Perkebunan V (Persero). The merger of three BUMN was based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 8 year 1996.

According to the Government Regulation No. 72 year 2014 dated September 17, 2014, regarding an additional investment of the Republic of Indonesia to the share capital of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), stated the additional investment of the Republic of Indonesia to the share capital of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) amounting to 90%, which come from the transfer of shares owned by the Republic of Indonesia in other entities of PT Perkebunan Nusantara (Persero).

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan (lanjutan)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 pada tanggal 17 September 2014, maka:

- Bentuk badan usaha PT Perkebunan Nusantara I (Persero), PT Perkebunan Nusantara II (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), PT Perkebunan Nusantara V (Persero), PT Perkebunan Nusantara VI (Persero), PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT Perkebunan Nusantara X (Persero), PT Perkebunan Nusantara XI (Persero), PT Perkebunan Nusantara XII (Persero), PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menjadi Pemegang Saham
  PT Perkebunan Nusantara I,
  PT Perkebunan Nusantara II,
  PT Perkebunan Nusantara IV,
  PT Perkebunan Nusantara V,
  PT Perkebunan Nusantara VI,
  PT Perkebunan Nusantara VII,
  PT Perkebunan Nusantara VIII,
  PT Perkebunan Nusantara IX,
  PT Perkebunan Nusantara X,
  PT Perkebunan Nusantara XI,
  PT Perkebunan Nusantara XII,
  PT Perkebunan Nusantara XIII,
  dan PT Perkebunan Nusantara XIV masing-masing masing-masing sebesar 90%.

- Kepemilikan saham milik Negara Republik Indonesia pada
  PT Perkebunan Nusantara I,
  PT Perkebunan Nusantara II,
  PT Perkebunan Nusantara IV,
  PT Perkebunan Nusantara V,
  PT Perkebunan Nusantara VI,
  PT Perkebunan Nusantara VII,
  PT Perkebunan Nusantara VIII,
  PT Perkebunan Nusantara IX,
  PT Perkebunan Nusantara X,
  PT Perkebunan Nusantara XI,
  PT Perkebunan Nusantara XII,
  PT Perkebunan Nusantara XIII,
  dan PT Perkebunan Nusantara XIV masing-masing menjadi 10%.

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment and General Information (continued)

With the enactment of the Government Regulation No. 72 year 2014 dated September 17, 2014, therefore:

- *Entity business form of PT Perkebunan Nusantara I (Persero), PT Perkebunan Nusantara II (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), PT Perkebunan Nusantara V (Persero), PT Perkebunan Nusantara VI (Persero), PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT Perkebunan Nusantara X (Persero), PT Perkebunan Nusantara XI (Persero), PT Perkebunan Nusantara XII (Persero), PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) and PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) changed into a Limited Company under the Corporate Law No. 40 year 2007 on Limited Companies.*

- *PT Perkebunan Nusantara III (Persero) become the shareholder of
  PT Perkebunan Nusantara I,
  PT Perkebunan Nusantara II,
  PT Perkebunan Nusantara IV,
  PT Perkebunan Nusantara V,
  PT Perkebunan Nusantara VI,
  PT Perkebunan Nusantara VII,
  PT Perkebunan Nusantara VIII,
  PT Perkebunan Nusantara IX,
  PT Perkebunan Nusantara X,
  PT Perkebunan Nusantara XI,
  PT Perkebunan Nusantara XII,
  PT Perkebunan Nusantara XIII and
  PT Perkebunan Nusantara XIV with 90% of ownership, respectively.*

- *Share ownership by the Republic of Indonesia of*

  *PT Perkebunan Nusantara I,
  PT Perkebunan Nusantara II,
  PT Perkebunan Nusantara IV,
  PT Perkebunan Nusantara V,
  PT Perkebunan Nusantara VI,
  PT Perkebunan Nusantara VII,
  PT Perkebunan Nusantara VIII,
  PT Perkebunan Nusantara IX,
  PT Perkebunan Nusantara X,
  PT Perkebunan Nusantara XI,
  PT Perkebunan Nusantara XII,
  PT Perkebunan Nusantara XIII and
  PT Perkebunan Nusantara XIV become 10%, respectively.*

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan (lanjutan)

Nilai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp10.190.379.000.000 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 468/KMK.06/2014 tanggal 1 Oktober 2014. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 767/KMK.06/2015 tanggal 24 Juli 2015 ditetapkan bahwa nilai pertambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menjadi sebesar Rp27.588.578.194.542. Nilai tersebut merupakan nilai definitif penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sesuai perhitungan nilai wajar saham per tanggal 30 September 2014 yang berasal dari pengalihan 90% saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII dan PT Perkebunan Nusantara XIV.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 135 tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp3.150.000.000.000 yang diteruskan sebagai penambahan modal PT Perkebunan Nusantara III (Persero) kepada PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI dan PT Perkebunan Nusantara XII masing-masing sebesar Rp157.500.000.000, Rp900.000.000.000, Rp877.500.000.000, Rp585.000.000.000 dan Rp630.000.000.000.

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment and General Information (continued)

The Republic of Indonesia invested additional share capital to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) amounting to Rp10,190,379,000,000 and was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. 468/KMK.06/2014 dated October 1, 2014. Based on the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Decree No. 767/KMK.06/2015 dated July 24, 2015 determined that the total value of the additional capital investment of the Republic of Indonesia into PT Perkebunan Nusantara III (Persero) amounting to Rp27,588,578,194,542. Such total value is the definitive increase in capital investment of the Republic of Indonesia into PT Perkebunan Nusantara III (Persero) according to the fair value calculation of shares as of September 30, 2014 which are derived from the transfer of 90% shares owned by the Republic of Indonesia on PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI , PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII and PT Perkebunan Nusantara XIV.

Furthermore, based on Government Regulation No. 135 year 2015 dated December 28, 2015, the Republic of Indonesia increased its capital investment into PT Perkebunan Nusantara III (Persero) amounting to Rp3,150,000,000,000 which was forwarded as a capital increase of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) to PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI and PT Perkebunan Nusantara XII amounting to Rp157,500,000,000, Rp900,000,000,000, Rp877,500,000,000, Rp585,000,000,000 and Rp630,000,000,000, respectively.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan (lanjutan)

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan.

Kegiatan Perusahaan pada saat ini adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet serta produksi minyak sawit dan karet yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

Pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023, Perusahaan mengelola perkebunan seluas 158.226 hektar (ha) (2022: 140.211 ha) (tidak diaudit) yang terdiri dari 43 unit kebun kelapa sawit dan kebun karet yang didukung dengan 14 unit pabrik kelapa sawit (PKS) dan 7 unit pabrik karet serta 1 unit pabrik pengolahan inti sawit. Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan spin off unit usaha Kelapa Sawit dan Karet seluas 146.696 hektar (41 unit kebun dan 13 unit pabrik kelapa sawit, 1 unit pabrik pengolahan inti sawit, dan 7 unit pabrik karet) ke PTPN IV, entitas anak. Sehingga, pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan mengelola perkebunan seluas 11.530 hektar (ha), yang terdiri dari 2 unit kebun kelapa sawit dan 1 unit pabrik kelapa sawit. Perusahaan juga mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara atas hak pengelolaan lahan (HPL) seluas 1.933,80 ha yang terdiri atas zona industri, logistik dan pariwisata berdasarkan PP No. 29 tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012.

Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini, yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 19 Mei 2024.

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment and General Information (continued)

According to Article No. 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities comprises of agro-business and agro-industry and also optimization of the Company's resources.

The Company's current activities are the development of oil palm and rubber plantations as well as the production of palm oil and rubber, which are located in the Provinces of North Sumatra and Aceh.

As of January 1, 2023 up to November 30, 2023, the Company manged plantations covering 158,226 hectares (ha) (2022: 140,211 ha) (unaudited), consisting of 43 business units of palm oil plantation and rubber plantations, which supported with 14 units of palm oil mills (PKS) and 7 units of rubber mills, and 1 unit of palm kernel mill. Subsequently, on December 1, 2023, the Company has spun off business units of palm oil and rubber of 146,595 ha (41 business units of palm oil plantation and 13 business units of palm oil mills, 1 unit of palm kernel mill and 7 business units of rubber) to PTPN IV, subsidiary. Therefore, as of December 31, 2023, the Company managed plantations covering 11,530 hectares, consisting of 2 business units of palm oil plantations and 1 business unit of palm oil mill. The company also manages the Sei Mangkei Special Economic Zone (KEK), Simalungun, North Sumatra on land management rights (HPL) covering an area of 1,933.80 ha consisting of industrial, logistics, and tourism zones based on PP No. 29 of 2012 dated February 27, 2012.

Completion of the Consolidated Financial Statement

The management of the Group is responsible for the preparation of the consolidated financial statements, which were completed and authorized for issue by Company's Board of Director on May 19, 2024

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Dewan Direksi, SEVP dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. The Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Directors, SEVP and Employees

The Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Board of Directors of the Company as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Dewan Komisaris	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	***Boards of Commissioner***
Komisaris Utama	Zulkifli Zaini	Zulkifli Zaini	*President Commissioner*
Komisaris	Ardan Adiperdana	Ardan Adiperdana	*Commissioner*
Komisaris	Asep Subarkah Yusuf	Asep Subarkah Yusuf	*Commissioner*
Komisaris	Wisto Prihadi	Wisto Prihadi	*Commissioner*
Komisaris	Alhilal Hamdi	Amal Bakti Pulungan	*Commissioner*
Komisaris	Suyus Windayana	Arie Yuriwin	*Commissioner*
Komisaris	Tsamara Amany Alatas	Erwan Pelawi	*Commissioner*

Komite Audit	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	***Audit Committee***
Ketua	Wisto Prihadi	Wisto Prihadi	*Chairman*
Anggota	Ardan Adiperdana	Ardan Adiperdana	*Member*
Anggota	Bahri Efendi Dongoran	Bahri Efendi Dongoran	*Member*
Anggota	Suka Edi Prasetyo	Suka Edi Prasetyo	*Member*
Anggota	-	Arie Yuriwin	*Member*
Anggota	-	Amal Bakti Pulungan	*Member*

Komite Pemantau Risiko	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	***Risk Monitoring Committee***
Ketua*)	-	Erwan Pelawi	*Chairman*
Anggota	Poerwitono PW	Poerwitono PW	*Member*
Anggota	Asep Subarkah Yusuf	Asep Subarkah Yusuf	*Member*
Anggota	Jones Batara Manurung	Jones Batara Manurung	*Member*
Anggota	Alhilal Hamdi	-	*Member*

Komite Nominasi dan Remunerasi	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	**31 Desember 2022 *December 31, 2022***	***Nomination and Remuneration Committee***
Ketua	Zulkifli Zaini	Zulkifli Zaini	*Chairman*
Anggota	Hamong Dhanardono	Erwan Pelawi	*Member*
Anggota	-	Ardan Adiperdana	*Member*

*) Efektif per tanggal 8 Januari 2024, dijabat oleh Bapak Wisto Prihadi/*effective January 8 2024, held by Mr. Wisto Prihadi*.

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Dewan Direksi, SEVP dan Karyawan (lanjutan)

Direksi	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022 *December 31, 2022*	*Directors*
Direktur Utama	Mohammad Abdul Ghani	Mohammad Abdul Ghani	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Denaldy Mulino Mauna	Denaldy Mulino Mauna	Vice *President Director*
Direktur Sumber Daya Manusia	-	Seger Budiarjo	*Human Capital Director*
Direktur Umum	-	Doni P. Gandamiharja	*General Affairs Director*
Direktur Sumber Daya Manuasia dan Umum	Sucipto Prayitno	-	*Human Capital and General Affairs Directors*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	M. Iswahyudi	M. Iswahyudi	*Finance and Risk Management Director*
Direktur Pemasaran	Dwi Sutoro	Dwi Sutoro	*Marketing Director*
Direktur Pelaksana	-	Ahmad Haslan Saragih	*Operation Director*
Direktur Produksi dan Pengembangan	Mahmudi	Mahmudi	*Production and Development Director*
Direktur Hubungan Kelembagaan	M. Arifin Firdaus	-	*Institutional Relations Director*

Senior Executive Vice President (SEVP)	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	*Senior Executive Vice President (SEVP)*
SEVP Operation I	-	Darmansyah Siregar	*SEVP Operation I*
SEVP Operation II	-	Sudarma Bhakti Lessan	*SEVP Operation II*
SEVP Business & Support	-	Tengku Rinel	*SEVP Business* & Support

Jumlah karyawan tetap Perusahaan dan entitas anak ("Grup") Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebanyak 86.737 orang dan 106.237 orang (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

b. The Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Directors, SEVP and Employees (continued)

Number of permanent employees of the Company and its subsidiaries (the "Group") as of December 31, 2023 and 2022 was 86,737 and 106,237 employees (unaudited), respectively.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak dan Asosiasi

Perusahaan mempunyai kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung pada Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries and Associates

The Company has direct or indirect share ownership in the Subsidiaries as of December 31, 2023 and 2022 as follows:

Nama Perusahaan/ *Company name*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Principal activity*	Tahun operasi/ *Start of operation*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ *Total assets before elimination(in millions of Rupiah)*	
				2023	2022	2023	2022
Kepemilikan langsung/*Direct ownership:*							
PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) (**)	Aceh	Perkebunan dan produksi kelapa sawit dan karet/ *Plantation and production of palm oil and rubber*	1996	89,42%	76,00%	9.756.675	3.247.954
PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) (**)	Medan	Perkebunan dan produksi kelapa sawit, tebu, tembakau dan karet/ *Plantation and productionof palm oil, sugar cane, tobacco and rubber*	1996	-	90,00%	-	10.764.994
PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) (*)	Medan	Perkebunan dan produksi kelapa sawit dan teh/ *Plantation and production of palm oil and tea*	1996	92,93%	90,00%	16.250.126	23.650.527
PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) (*)	Pekanbaru	Perkebunan dan produksi kelapa sawit dan karet/ *Plantation and production of palm oil and rubber*	1996	-	90,00%	-	12.246.705
PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) (*)	Jambi	Perkebunan dan produksi kelapa sawit dan teh/ *Plantation and production of palm oil and tea*	1996	-	90,00%	-	5.498.410
PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) (**)	Bandar Lampung	Perkebunan dan produksi kelapa sawit, karet, tebu dan teh/ *Plantation and production of palm oil, rubber, sugar cane and tea*	2014	-	90,00%	-	12.789.092
PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) (**)	Bandung	Perkebunan dan produksi teh, karet, kelapa sawit, kina, kakao dan hortikultura/ *Plantation and production of tea, rubber, palm oil, quinine, cocoa and horticulture*	1996	-	90,00%	-	11.010.676
PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) (**)	Semarang	Perkebunan dan produksi karet, teh, kopi dan tebu/ *Plantation and production of rubber, tea, coffee and sugar cane*	1996	-	90,00%	-	4.970.492

*) Pada tanggal 1 Desember 2023, telah efektif merger, PT Perkebunan Nusantara IV sebagai survival entity (Catatan 1d) / On December 1, 2023, the merger was effective, PT Perkebunan Nusantara IV as a survival entity. (Note 1d)

**) Pada tanggal 1 Desember 2023, telah efektif merger, PT Perkebunan Nusantara I sebagai survival entity (Catatan 1d)/ On December 1, 2023, the merger was effective, PT Perkebunan Nusantara I as a survival entity. (Note 1d)

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

c. Entitas Anak dan Asosiasi (lanjutan) / *c. Subsidiaries and Associates (continued)*

Nama Perusahaan/ *Company name*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Principal activity*	Tahun operasi/ *Start of operation*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ *Total assets before elimination(in millions of Rupiah)*	
				2023	2022	2023	2022
Kepemilikan langsung/*Direct ownership:*							
PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) (**)	Surabaya	Perkebunan dan produksi tebu, tembakau, karung, bioethanol dan edamame/ *Plantation and production of sugar cane, tobacco, sack, bioethanol and edamame*	1996	-	90,00%	-	13.915.210
PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) (**)	Surabaya	Perkebunan dan produksi tebu, karung, dan bioethanol/ *Plantation and production of sugar cane, sack, and bioethanol*	1996	-	90,00%	-	7.467.137
PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) (**)	Surabaya	Perkebunan dan produksi karet, tebu, kopi, teh, aneka kayu, kakao dan hortikultura/ *Plantation and production of rubber, sugar cane, coffee, tea, assorted woods, cacao and horticulture*	1996	-	90,00%	-	9.836.821
PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) (*)	Pontianak	Perkebunan dan produksi kelapa sawit dan karet/ *Plantation and production of palm oil and rubber*	1996	-	90,00%	-	4.967.517
PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) (**)	Makassar	Perkebunan dan produksi kelapa sawit, tebu, karet dan kelapa/ *Plantation and production of palm oil, sugar crane, rubber and coconut*	1996	-	90,00%	-	2.559.900
PT Industri Karet Nusantara (IKN)	Medan	Industri hilir karet/ *Downstream rubber industry*	2006	99,99%	99,99%	93.170	96.292
PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA)	KEK Sei Mangke	Memasarkan lahan dan mengelola fasilitas Kawasan Industri Sei Mangkei/ *Marketing land and managing facilities in the Sei Mangkei Industrial Area*	2014	99,99%	99,99%	207.531	129.625
PT Industri Nabati Lestari (INL)	Medan	Industri pengolahan minyak kelapa sawit/ *Palm oil processing industry*	2012	95,10%	95,10%	3.025.927	3.278.579

*) Pada tanggal 1 Desember 2023, telah efektif *merger*, PT Perkebunan Nusantara IV sebagai *survival entity* (Catatan 1d) / *On December 1, 2023, the merger was effective, PT Perkebunan Nusantara IV as a survival entity. (Note 1d)*

**) Pada tanggal 1 Desember 2023, telah efektif *merger*, PT Perkebunan Nusantara I sebagai *survival entity* (Catatan 1d)/ *On December 1, 2023, the merger was effective, PT Perkebunan Nusantara I as a survival entity. (Note 1d)*

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

c. Entitas Anak dan Asosiasi (lanjutan) / *c. Subsidiaries and Associates (continued)*

Nama Perusahaan/ *Company name*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Principal activity*	Tahun operasi/ *Start of operation*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ *Total assets before elimination(in millions of Rupiah)*	
				2023	2022	2023	2022
Kepemilikan langsung/*Direct ownership:*							
PT Sri Pamela Medika Nusantara (SPMN)	Tebing Tinggi	Jasa Kesehatan/rumah sakit/ *Health service/hospital*	2014	99,99%	99,99%	115.201	136.612
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN)	Jakarta	Pemasaran produk perkebunan-perkebunan/ *Marketing of plantation product*	2009	98,36%	97,94%	888.690	1.443.242
PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)	Bogor	Penelitian, pengembangan dan pelayanan/ *Research, development and services*	2009	99,29%	99,00%	1.295.960	1.145.197
PT Bio Industri Nusantara (BIN)	Bandung	Produksi dan penjualan pupuk/ *Production and selling of fertilizers*	2009	92,94%	91,71%	65.591	63.020
PT LPP Agro Nusantara (LPPAN)(***)	Yogyakarta	Pelatihan, pengembangan dan pelayanan/ *Training, development and services*	2002	46,38%	45,46%	494.673	456.817
PT Sinergi Gula Nusantara (SGN)	Jakarta	Industri pengolahan bahan baku tebu/ *Sugar cane processing industry*	2021	89,43%	90.01%	12.283.161	712.911
Kepemilikan tidak langsung/*Indirect ownership:*							
PT Cut Meutia Medika Nusantara (CMMN)	Langsa	Jasa kesehatan/rumah sakit/ *Health services/hospital*	2013	88,53%	75,24%	49.006	32.148
PT Nusa Dua Bekala (NDB)	Medan	Pemasaran/*Marketing*	2012	88,52%	89,10%	84.514	80.299
PT Tembakau Deli Medika (TDM)	Medan	Jasa kesehatan/rumah sakit/ *Health services/hospital*	2017	87,63%	88,20%	16.372	8.264
PT Nusa Dua Propertindo	Medan	Properti/*Property*	2014	89,41%	89,41%	856.981	329,927
PT Agro Sinergi Nusantara (ASN)	Meulaboh	Perkebunan dan produksi kelapa sawit/ *Plantation and production of palm oil*	2011	91,69%	85,07%	930.606	916.125
PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN)	Morowali	Perkebunan dan produksi kelapa sawit/ *Plantation and production of palm oil*	2012	91,92%	90,00%	774.617	747.890

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Entitas Anak dan Asosiasi (lanjutan)

c. Subsidiaries and Associates (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Principal activity*	Tahun operasi/ *Start of operation*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ *Total assets before elimination(in millions of Rupiah)*	
				2023	2022	2023	2022
Kepemilikan tidak langsung/*Indirect ownership:*							
PT Alam Lestari Nusantara (ALN)	Jambi	Perkebunan dan produksi karet/ *Plantation and production of rubber*	2019	92,36%	90,00%	485.285	504.795
PT Karya Nusa Tujuh (KNT)	Bandar Lampung	Peternakan dan produksi sapi/ *Cattle breeding*	2013	80,48%	81,00%	2.754	2.489
PT Optima Nusa Tujuh (ONT)	Bandar Lampung	Pertambangan, penggalian, dan industri pengolahan pertambangan/ *Mining, quarrying and mining processing industry*	2015	80,48%	81,00%	17.137	15.320
PT Buma Cima Nusantara	Bandar Lampung	Industri Pengolahan bahan baku tebu/ *Sugar cane processing industry*	2018	89,42%	90,00%	2.120.858	2.386.557
PT Agro Medika Nusantara (AMN)	Subang	Jasa kesehatan/rumah sakit/ *Health services/hospital*	2012	86,47%	83,97%	94.398	93.318
PT Mitratani Dua Tujuh	Jember	Industri edamame dan okra/ *Edamame and okra industry*	2004	58,12%	58,50%	245.736	255.268
PT Dasaplast Nusantara (DN)	Jepara	Produksi plastik, *inner bag* dan waring plastik/ *Production of plastic, inner bag and waring plastic*	2004	80,48%	81,00%	200.191	176.746
PT Energi Agro Nusantara (EAN)	Mojokerto	Produksi ethanol/ *Production of ethanol*	2013	88,75%	89,33%	89.807	91.506
PT Rolas Nusantara Tambang (RNT)	Surabaya	Pertambangan pasir/ *Sand mining*	2015	89,42%	89,99%	9.720	11.769
PT Nusantara Batulicin (NB)	Tanah Bumbu	Pabrik karet/ *Rubber factory*	2011	47,39%	45,90%	50.623	74.888
PT Kalimantan Medika Nusantara (KMN)	Pontianak	Jasa kesehatan/rumah sakit/ *Health services/hospital*	2013	92,46%	89,55%	-	4.140
PT Kharisma Pemasaran Bersama Niaga	Jakarta	Perdagangan/*Trading*	2016	50,16%	50,05%	202.159	467.222
PT Kurnia Multi Komoditas (PT KMK)	Jakarta	Perdagangan/*Trading*	2018	98,34%	97,93%	87.275	96.485
PT Sei Mangkei Nusantara Tiga	KEK Sei Mangkei	Kepelabuhan/Port	2018	99,90%	99,90%	20.196	11.897

***) Perusahaan memiliki investasi saham pada LPPAN, dengan persentase kepemilikan 46,38%. Sampai dengan saat diterbitkannya laporan keuangan ini, Perusahaan masih tetap memegang kendali, sehingga laporan keuangan LPPAN dikonsolidasi di Perusahaan.

***) *Company has a share investment in LPPAN, with an ownership percentage of 46.38%. As of the issuance of this financial statements, the Company is the controlling holder, so the financial statements of LPPAN is consolidated by the Company.*

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

c. Entitas Anak dan Asosiasi (lanjutan) / *c. Subsidiaries and Associates (continued)*

Nama Perusahaan/ *Company name*	Domisili/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Business activities*	Tahun Pendirian/ *Establishment Year*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	
				2023	2022
Entitas Asosiasi/*Associates Entity*					
PT Applied Agricultural Resources Nusantara (AARN)	Jakarta	Pembibitan kelapa sawit/ *Nursery of palm oil*	2011	35,00%	35,00%
PT Industri Gula Nusantara (IGN)	Kendal	Pabrik pengolahan gula/ *Sugar processing mills*	2004	14,61%	32,01%
PT Langkat Nusantara Kepong (LNK)	Medan	Perkebunan dan produksi karet dan kelapa sawit/ *Plantation and production of rubber and palm oil*	2009	40,00%	40,00%
PT Perkebunan Agrintara (PA)	Jakarta	Industri hilir karet (dalam proses divestasi)/ *Downstream rubber industry (in the divestment process)*	1993	30,05%	30,05%
PT Perkebunan Mitra Ogan (PMO)	Palembang,	Perkebunan dan produksi kelapa sawit/ *Plantation and production of palm oil*	1997	26,42%	26,42%
PT Propernas Nusa Dua (PND)	Medan	Properti/ *Property*	2014	49,00%	49,00%
PT Pupuk Agro Nusantara (PAN)	Medan	Pengolahan pupuk/ *Processing of fertilizer*	2010	49,00%	49,00%
PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)	Subang	Pengolahan kina/ *Processing of quinine*	1986	49,00%	49,00%
PT Tiga Mutiara Nusantara (TMN)	Serdang Bedagai,	Industri mebel dari kayu karet/ *Furniture from rubber wood industry*	2006	30,00%	30,00%
PT Mardec Nusa Riau (MNR)	Riau	Industri latex pekat/ *Liquid latex industry*	2011	40,00%	40,00%
PT Kalimantan Agro Nusantara (KAN)	Kutai Timur	Perkebunan dan produksi kelapa sawit/ *Plantation and production of palm oil*	2009	41,07%	41,07%
Hamburg Indonesische Import GmbH (Indoham)	Jerman	Tidak beroperasi/*not operating*		33,07%	33,07%
PT Rolas Nusantara Medika (RNME)	Jember	Jasa kesehatan/rumah sakit/ *Health services/hospital*	2013	32,99%	32,99%
PT Nusantara Sebelas Medika (NSM)	Surabaya	Jasa kesehatan/rumah sakit/ *Health services/hospital*	2012	32,80%	32,80%
PT Nusantara Medika Utama (NMU)	Mojokerto	Jasa kesehatan/rumah sakit/ *Health services/hospital*	2008	32,55%	32,55%
PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR)	Serdang	Properti/ *Property*	2020	25,00%	25,00%
PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis (DMKB)	Serdang	Properti/ *Property*	2020	25,00%	25,00%
PT Deli Megapolitan Kawasan Industri (DMKI)	Serdang	Properti/ *Property*	2020	25,00%	25,00%

1. UMUM (lanjutan)

d. Aksi Korporasi

Pada tanggal 1 Desember 2023, Grup melakukan pembentukan dua *sub-holding* yaitu PT Perkebunan Nusantara IV ("*Palm Co")* dan PT Perkebunan Nusantara I *("Supporting Co")* melalui transaksi penggabungan ("*merger")* dan pemisahan tidak murni ("*spin-off")*, yang telah mendapatkan persetujuan atas integrasi PTPN Grup melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-595/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023:

Penggabungan PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, dan PT Perkebunan Nusantara XIII

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham SK-328/MBU/11/2023 dan DSPN/KPPS/82/XI/2023 pada tanggal 28 November 2023, para pemegang saham PT Perkebunan Nusantara IV ("PTPN IV") menyetujui, antara lain:

a) Penggabungan dengan PT Perkebunan Nusantara V ("PTPN V"), PT Perkebunan Nusantara VI ("PTPN VI"), dan PT Perkebunan Nusantara XIII ("PTPN XIII") ke dalam PTPN IV,

b) Persetujuan untuk menerbitkan saham baru kepada Negara Republik Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai berikut:
   i) Negara Republik Indonesia sebanyak 299.365 lembar saham seri B atau sebesar Rp299.635.000.000;
   ii) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 2.696.718 lembar saham seri B atau sebesar Rp 2.696.718.000.000;

c) Persetujuan penyertaan modal/ penambahan modal yang ditempatkan PTPN IV dari semula sebesar Rp2.942.116.000.000 menjadi sebesar Rp5.938.469.000.000;

d) Persetujuan atas pemindahan tempat kedudukan dan kantor pusat PTPN IV dari semula Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan,Provinsi DKI Jakarta;

e) Persetujuan perubahan Anggaran Dasar PTPN IV.

1. GENERAL (continued)

d. Corporate Action

On December 1, 2023, PTPN Grup formed two sub-holdings consists of PT Perkebunan Nusantara IV ("Palm Co") and PT Perkebunan Nusantara I ("Supporting Co") through merger and spin-off transactions, which had obtained approval for the integration of PTPN Group through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number S-595/MBU/11/2023 dated November 28, 2023:

Merger of PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, and PT Perkebunan Nusantara XIII

Based on the Shareholder's Decision Number SK-328/MBU/11/2023 and DSPN/KPPS/92/XI/2023 on November 28, 2023, the shareholder's of PT Perkebunan Nusantara IV ("PTPN IV") approved, among others:

a) Merger with PT Perkebunan Nusantara V ("PTPN V"), and PT Perkebunan Nusantara XIII ("PTPN XIII") into PTPN IV,

b) Approval to issue new shares to the State of the Republic of Indonesia and PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as follows:
   i) Republic of Indonesia, 299,365 series B shares or equivalent to Rp299,635,000,000;
   ii) PT Perkebunan Nusantara III (Persero), 2,696,718 series B shares or equivalent to Rp2,696,718,000,000;

c) Approval of an increase in PTPN IV's issued capital from the original amount of Rp2,942,116,000,000 to Rp5,938,469,000,000;

d) Approval for the transfer of the PTPN IV's seat and head originally from Medan City, North Sumatra Province to be domiciled and headquartered in South Jakarta City, DKI Jakarta Province;

e) Approval of amandment to the Aticles of Association of PTPN IV.

1. UMUM (lanjutan)

d. Aksi Korporasi (lanjutan)

Penggabungan PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, dan PT Perkebunan Nusantara XIII (lanjutan)

Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2023, PTPN IV melakukan penggabungan dengan PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII. Pada tanggal tersebut, PTPN IV juga melakukan perubahan atas modal yang ditempatkan dan disetor pada PTPN IV. Dimana PTPN IV menerbitkan saham baru kepada Negara Republik Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai berikut:

a) Negara Republik Indonesia sebanyak 299.365 lembar saham seri B atau sebesar Rp299.635.000.000;

b) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 2.696.718 lembar saham seri B atau sebesar Rp 2.696.718.000.000.

Nilai tersebut merupakan nilai indikatif sementara dimana nilai definitif akan ditetapkan berdasarkan nilai wajar sesuai hasil penilaian oleh penilai independen.

Sehingga struktur modal ditempatkan/disetor PTPN IV setelah tanggal penggabungan sebagai berikut:

a) Negara Republik Indonesia sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai Rp1.000.000;

b) Negara Republik Indonesia sebanyak 593.846 lembar saham seri B dengan nilai Rp593.486.000.000;

c) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 5.344.622 lembar saham seri B dengan nilai Rp5.344.622.000.000.

Penggabungan dan perubahan modal yang ditempatkan dan disetor tersebut telah dikukuhkan melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 1 Desember 2023 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn dan telah disetujui dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repbulik Indonesia dalam surat keputusan No.AHU-AH.01.09-0191342 tanggal 1 Desember 2023.

1. GENERAL (continued)

d. Corporate Action (continued)

Merger of PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, and PT Perkebunan Nusantara XIII (continued)

Furthermore, on December 1, 2023, PTPN IV merged with PTPN V, PTPN VI, and PTPN XIII. On that date, PTPN IV also made changes to the issued and paid-up capital of the Company. Where PTPN IV issues new shares to the Republic of Indonesia and PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as follows:

a) The Republic of Indonesia 299,365 series B shares or equivalent to Rp299,635,000,000;

b) PT Perkebunan Nusantara III (Persero), 2,696,718 series B shares or equivalent to Rp2,696,718,000,000.

The value is a temporary indicative value where the definitive value will be determined based on fair value according to the results of the assessment by an independent appraiser.

So that the capital structure is placed/paid up by PTPN IV after the merger date as follows:

a) The Republic of Indonesia, 1 series A Dwiwarna shares equivalent to Rp1,000,000;

b) The Republic of Indonesia, 593,846 series B shares equivalent to Rp593,485,000,000;

c) PT Perkebunan Nusantara III (Persero), 5,344,622 series B shares equivalent to Rp5,344,622,000,000.

The merger and change of issued and paid-up capital have been confirmed through Notarial Deed Number 01 dated December 1, 2023 from Notary Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn and have been approved and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decree Number AHU-AH.01.09-0191342 dated December 1, 2023.

1. UMUM (lanjutan)

d. Aksi Korporasi (lanjutan)

Pemisahan tidak murni Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) kepada PT Perkebunan Nusantara IV

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham SK-329/MBU/11/2023 dan DSPN/KPPS/82/XI/2023 pada tanggal 28 November 2023, para pemegang saham PTPN IV menyetujui, antara lain:

a) Persetujuan atas pemisahan tidak murni *(spin-off)* usaha Perkebunan kelapa sawit dan karet dari Perusahaan kepada PTPN IV;

b) Persetujuan atas penerbitan saham baru kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 2.456.849 lembar saham seri B atau sebesar Rp2.456.849.000.000;

c) Persetujuan atas Peningkatan modal yang ditempatkan PTPN IV dari semula sebesar Rp5.938.469.000.000 (setelah *merger*) menjadi sebesar Rp8.395.318.000.000.

Pada tanggal 1 Desember 2023, PTPN IV menerima pemisahan tidak murni usaha Perkebunan kelapa sawit dan karet dari Perusahaan. Atas aksi korporasi tersebut PTPN IV melakukan perubahan atas modal yang ditempatkan dan disetor oleh Perusahaan sebesar sebanyak 2.456.849 lembar saham seri B atau sebesar Rp2.456.849.000.000.

Nilai tersebut merupakan nilai indikatif sementara dimana nilai definitif akan ditetapkan berdasarkan nilai wajar sesuai hasil penilaian oleh penilai independen.

Selanjutnya, setelah penggabungan dan pemisahan tidak murni tersebut kepemilikan Perusahaan di PTPN IV menjadi 92,93% (2022: 90,00%).

1. GENERAL (continued)

d. Corporate Action (continued)

Spin-off of palm oil and rubber plantation business of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) to PT Perkebunan Nusantara IV

Based on the Shareholder's Decision Number SK-329/MBU/11/2023 and DSPN/KPPS/82/XI/2023 on November 28, 2023, PTPN IV's shareholders approved, among others:

a) Approval of the spin-off of palm oil and rubber plantation business from the Company to PTPN IV;

b) Approval of the issuance of new shares to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) amounting to 2,456,849 series B shares or equivalent to Rp2,456,849,000,000;

c) Approval of the increase in PTPN IV's issued capital from Rp5,938,469,000,000 (after merger) to Rp8,395,318,000,000.

On December 1, 2023, the PTPN IV received the spin-off of its palm oil and rubber plantation business from the Company. For this corporate action, PTPN IV made changes to the issued and paid-up capital of the Company amounting to 2,456,849 series B shares or equivalent to Rp2,456,849,000,000.

The value is a temporary indicative value where the definitive value will be determined based on fair value according to the results of the assessment by an independent appraiser.

Furhtermore, after merger and spinoff, the Company's ownership in PTPN IV become 92.93% (2022: 90.00%).

1. UMUM (lanjutan)

d. Aksi Korporasi (lanjutan)

Penggabungan PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, dan PT Perkebunan Nusantara XIV

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham No. SK-324/MBU/11/2023 dan DSPN/KPPS/80/XI/2023 pada tanggal 28 November 2023, para pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:

a) Persetujuan atas penggabungan PT Perkebunan Nusantara ("PTPN") II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV ke dalam PTPN I;

b) Persetujuan atas penerbitan saham baru kepada Negara Republik Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai berikut:
   i) Negara Republik Indonesia sebanyak 907.598 lembar saham Seri B atau sebesar Rp907.598.000.000;
   ii) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 7.873.401 lembar saham Seri B atau sebanyak Rp7.873.401.000.000;

c) Persetujuan atas peningkatan modal dasar PTPN I dari semula sebesar Rp640.000.000.000 menjadi sebesar Rp35.700.000.000.000;

d) Persetujuan atas pemindahan tempat kedudukan dan kantor pusat PTPN I dari semula Kota Langsa, Provinsi Aceh menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta.

e) Persetujuan perubahan Anggaran Dasar PTPN I.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 09 oleh Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn. tanggal 1 Desember 2023, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV setuju untuk menggabungkan diri kepada dan di dalam Perusahaan (PTPN I) dimana sejak tanggal efektif penggabungan, semua kegiatan pengusahaan, operasional, kekayaan, tagihan-tagihan, aset, liabilitas, hak, kewajiban dan pekerja dari PTPN yang menggabungkan diri beralih kepada Perusahaan.

1. GENERAL (continued)

d. Corporate Action (continued)

Merger of PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, and PT Perkebunan Nusantara XIV

Based on the Shareholder's Decree Number SK-324/MBU/11/2023 and DSPN/KPPS/80/XI/2023 on November 28, 2023, the Company's shareholders approved, among others:

a) Approval of the merger of PT Perkebunan Nusantara ("PTPN") II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, and PTPN XIV into PTPN I;

b) Approval the issuance of new shares to the Republic of Indonesia and PTPN III (Persero) are as follows:
   i) Republic of Indonesia, 907,598 series B shares or equivalent to Rp907,598,000,000;
   ii) PT Perkebunan Nusantara III (Persero), 7,873,401 series B shares or equivalent to Rp7,873,401,000,000;

c) Approval of an increase in PTPN I's authorized capital originally from Rp640,000,000,000 to Rp35,700,000,000,000;

d) Approval for the transfer of the seat and head office of PTPN I originally from Langsa City, Aceh Province to be domiciled and headquartered in Jakarta City.

e) Approval of amandments to the Articles of Association of PTPN I.

Based on the Deed of Merger Number 09 by Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn. dated December 1, 2023, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII and PTPN XIV agree to merge into and within the Company (PTPN I) where from the effective date of the merger, all business activities, operations, assets, bills, assets, liabilities, rights, obligations and employees of PTPN who joined themselves transferred to the Company.

1. UMUM (lanjutan)

d. Aksi Korporasi (lanjutan)

Penggabungan PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, dan PT Perkebunan Nusantara XIV (lanjutan)

Nilai tersebut merupakan nilai indikatif sementara dimana nilai definitif akan ditetapkan berdasarkan nilai wajar sesuai hasil penilaian oleh penilai independen.

Sehingga struktur modal ditempatkan/disetor PTPN I setelah tanggal penggabungan sebagai berikut:

a) Negara Republik Indonesia sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai Rp1.000.000;

b) Negara Republik Indonesia sebanyak 946.238 lembar saham seri B dengan nilai Rp946.238.000.000;

c) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 7.995.757 lembar saham seri B dengan nilai Rp7.995.757.000.000.

Penggabungan dan perubahan modal yang ditempatkan dan disetor tersebut telah dikukuhkan melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 1 Desember 2023 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn dan telah disetujui dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No.AHU-AH.01.09-0191443 tanggal 1 Desember 2023.

Selanjutnya, setelah penggabungan dan pemisahan tidak murni tersebut kepemilikan Perusahaan di PTPN I menjadi 89,42% (2022: 76,00%).

1. GENERAL (continued)

d. Corporate Action (continued)

Merger of PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, and PT Perkebunan Nusantara XIV (continued)

The value is a temporary indicative value where the definitive value will be determined based on fair value according to the results of the assessment by an independent appraiser.

So that the capital structure is placed/paid up by PTPN I after the merger date as follows:

a) The Republic of Indonesia, 1 series A Dwiwarna shares equivalent to Rp1,000,000;

b) The Republic of Indonesia, 946,238 series B shares equivalent to Rp946,238,000,000;

c) PT Perkebunan Nusantara III (Persero), 7,995,757 series B shares equivalent to Rp7,995,757,000,000.

The merger and change of issued and paid-up capital have been confirmed through Notarial Deed Number 01 dated December 1, 2023 from Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn and have been approved and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decree Number AHU-AH.01.09-0191443 dated December 1, 2023.

Furhtermore, after merger and spinoff, the Company's ownership in PTPN I become 89.42% (2022: 76.00%).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian yang disusun menggunakan metode langsung (*direct method*), dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2ac dibawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprises of the Statements and Interpretations issued by Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI").

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that measured based on the measurement that disclosed in the accounting policies of each account to the consolidated financial statement.

The consolidated statement of cash flows, which has been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2ac.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

The reporting currency used in the consolidated financial statements is Rupiah, which is the functional currency of the Group.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan

iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

i) pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
ii) hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

i) Power over the investee, that is existing rights that give the investor current ability to direct the relevant activities of the investee,
ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

i) the contractual arrangement with the other voting rights holders of the investee,
ii) rights arising from other contractual arrangements, and
iii) the voting rights and potential voting rights held by Group.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Laporan keuangan (konsolidasian) Entitas Anak disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan, menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

c. Investasi Saham

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

The (consolidated) financial statements of the Subsidiaries are prepared for the same reporting period as the Company, using consistent accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

c. Investment in Shares of Stock

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Investasi Saham (lanjutan)

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

Investasi Grup pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan PKL dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Grup. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Investment in Shares of Stock (continued)

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Investasi Saham (lanjutan)

Gabungan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Grup.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

d. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

1) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
2) untuk diperdagangkan,
3) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
4) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Investment in Shares of Stock (continued)

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

d. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

1) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
2) held primarily for the purpose of trading,
3) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or
4) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Klasifikasi lancar dan tak lancar (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:
i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,

ii) untuk diperdagangkan,
iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
iv) tidak ada hak untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

e. Kombinasi bisnis dan *goodwill*

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

Grup menentukan bahwa mereka telah mengakuisisi bisnis ketika rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup input dan proses substantif yang bersama-sama secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk menghasilkan output. Proses yang diperoleh adalah substantif jika penting bagi kemampuan untuk terus menghasilkan output, dan input yang diperoleh mencakup tenaga kerja yang terorganisir dengan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk melakukan proses itu atau secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk terus menghasilkan output dan dianggap unik atau langka atau tidak dapat diganti tanpa biaya, usaha, atau penundaan yang signifikan dalam kemampuan untuk terus menghasilkan output.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Current and non-current classification (continued)

A liability is current when it is:
i) expected to be settled in the normal operating cycle,
ii) held primarily for the purpose of trading,
iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
iv) there is no right at the end of reporting period to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

e. Business combinations and goodwill

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

The Group determines that it has acquired a business when the acquired set of activities and assets include an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to create outputs. The acquired process is considered substantive if it is critical to the ability to continue producing outputs, and the inputs acquired include an organized workforce with the necessary skills, knowledge, or experience to perform that process or it significantly contributes to the ability to continue producing outputs and is considered unique or scarce or cannot be replaced without significant cost, effort, or delay in the ability to continue producing outputs.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Kombinasi bisnis dan *goodwill* (lanjutan)

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, Grup mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

Setiap imbalan kontinjensi yang akan ditransfer oleh perusahaan pengakuisisi akan diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya adalah diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yaitu instrumen keuangan dan dalam lingkup PSAK 71, diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 71. Imbalan kontinjensi lain yang tidak termasuk dalam PSAK 71 diukur sebesar nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan perubahan nilai wajar yang diakui pada laba rugi.

Bila pencatatan awal kombinasi bisnis belum dapat diselesaikan pada tanggal pelaporan, Grup melaporkan jumlah sementara bagi *item* yang pencatatannya belum dapat diselesaikan tersebut.

Periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi yang didalamnya Grup dapat melakukan penyesuaian atas jumlah sementara yang diakui dalam kombinasi bisnis tersebut. Selama periode pengukuran, Grup mengakui penambahan aset atau liabilitas bila terdapat informasi terbaru yang diperoleh mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi, yang bila diketahui pada saat itu, akan menyebabkan pengakuan atas aset dan liabilitas pada tanggal tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Business combinations and goodwill (continued)

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Contingent consideration classified as equity is not re-measured and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a financial instrument and within the scope of PSAK 71, is measured at fair value with the changes in fair value recognized in the statement of profit or loss in accordance with PSAK 71. Other contingent consideration that is not within the scope of PSAK 71 is measured at fair value at each reporting date with changes in fair value recognized in profit or loss.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete.

The measurement period is the period after the acquisition date during which the Group may adjust the provisional amounts recognized for a business combination. During the measurement period, the Group recognizes additional assets or liabilities if new information is obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Kombinasi bisnis dan *goodwill* (lanjutan)

Periode pengukuran berakhir pada saat pengakuisisi menerima informasi yang diperlukan mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi atau mengetahui bahwa informasi lainnya tidak dapat diperoleh, namun tidak lebih dari satu tahun dari tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Jika imbalan tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui pada laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen melakukan penilaian atas identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Grup yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan terhadap bagian dari UPK yang ditahan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Business combinations and goodwill (continued)

The measurement period ends as soon as the acquirer receives the information it was seeking about facts and circumstances that existed as of the acquisition date or learns that more information is not obtainable but shall not exceed one year from the acquisition date.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed.

If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash-generating Units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are allocated to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Kombinasi bisnis dan *goodwill* (lanjutan)

Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Komponen Ekuitas Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam kesepengendalian.

f. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Grup menentukan bahwa mata uang fungsionalnya adalah Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing selain Rupiah dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Kurs mata uang asing yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Business combinations and goodwill (continued)

Business combinations under common control

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method, whereby the difference between the considerations transferred and the book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Other Component of Equity" account in the consolidated statement of financial position.

In applying the said pooling-of-interest method, the components of the financial statements of the combining entities are presented as if the combination has occurred since the beginning of the period of the combining entity become under common control.

f. Foreign Currency Transactions and Balances

The Group determines that its functional currency is Rupiah. Transactions in currencies other than Rupiah are recorded ar the prevailing rates of exchange in effect on the date of transactions.

At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the middle exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

The exchange rate used at December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
1 Dolar Amerika Serikat/Rupiah	15.416	15.731	*United State Dollar 1/Rupiah*
1 Euro/Rupiah	17.140	16.713	*Euro 1/Rupiah*
1 Pound Sterling Inggris /Rupiah	19.760	18.926	*Great Britain Pound Sterling 1/Rupiah*
1 Dolar Singapura/Rupiah	11.712	11.659	*Singapore Dollar 1/Rupiah*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 37.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

h. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk agar berada pada lokasi dan kondisi siap untuk dijual dicatat sebagai berikut:

i) Bahan baku, suku cadang dan bahan pembantu: harga pembelian;
ii) Barang jadi dan persediaan dalam proses: biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dan bagian proporsional dari beban *overhead* berdasarkan kapasitas operasi normal namun tidak termasuk biaya pinjaman.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Transactions with Related Parties

The company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 7.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 37.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

h. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of three (3) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

i. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Costs incurred in bringing each product to its present location and condition are accounted for as follow:

i) Raw materials, spare parts and factory supplies: purchase cost;
ii) Finished goods and work in-process: cost of direct materials and labor and a proportion of manufacturing overheads based on normal operating capacity but excluding borrowing costs.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Persediaan (lanjutan)

Sehubungan dengan pembelian bahan baku, biaya perolehan awal persediaan termasuk pengalihan keuntungan dan kerugian atas lindung nilai arus kas kualifikasian, diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain.

Grup menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

j. Aset Biologis

Aset biologis terdiri atas produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif (tandan buah segar (TBS), getah karet, daun teh basah (DTB), kakao, biji kopi, hortikultura, kelapa hibrida dan kelapa benih dan tebu) dan tanaman tebangan.

Aset biologis dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dari aset biologis pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi pada tahun terjadinya.

Nilai wajar dari produk agrikultur, termasuk produk yang tumbuh dan sudah dipanen dari tanaman produktif kelapa sawit dan karet ditentukan pada Level 2 dengan menerapkan estimasi volume produksi terhadap harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Inventories (continued)

Initial cost of inventories includes the transfer of gains and losses on qualifying cash flow hedges, recognized in Other Comprehensive Income, in respect of the purchases of raw materials.

The Group provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

j. Biological Assets

Biological assets comprise of agriculture produce growing on bearer plant (fresh fruit bunches (FFB), sap rubber, wet tea leave (WTL), cocoa, coffee bean, horticulture, hybrid coconut, coconut seed and sugarcane) and consumable plant.

Biological assets are stated at fair value less costs to sell. Gains or losses arising on initial recognition of agricultural produce at fair value less costs to sell and from the change in fair value less costs to sell of the biological assets at each reporting date are included in the profit or loss for the year in which they arise.

The fair value of the agricultural produce, including growing produce and harvested produce, of oil palm bearer plants and rubber bearer plants is determined at Level 2 by applying the estimated volume of the produce to the market price applicable at the reporting date. Costs to sell are the incremental costs directly attributable to the disposal of an asset, excluding finance costs and income taxes.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha dan lain-lain, piutang plasma, dan pinjaman kepada pihak berelasi yang merupakan bagian dari aset keuangan tidak lancar lainnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Fair value through profit or loss (FVTPL).*

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes trade and other receivables, plasma receivables, and loans to related parties under other non-current financial assets.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tidak dapat dikembalikan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah didaur ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir;
  Atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan *'pass-through'*, dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
  Or
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

Penurunan Nilai

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Impairment

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha dan lain-lain, biaya masih harus dibayar, liabilitas sewa dan utang lain-lain jangka panjang.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade and other payables, accrued expense, lease liabilitiy and other long-term payables..

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

ii) Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

ii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefit liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

l. Aset Tetap

Tanaman Produktif

Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan sangat jarang dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa hanya sesekali.

Tanaman produktif belum menghasilkan

Tanaman produktif belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang meliputi akumulasi biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan, pemeliharaan dan alokasi biaya tidak langsung lainnya sampai dengan saat tanaman yang bersangkutan dinyatakan menghasilkan dan dapat dipanen. Biaya-biaya tersebut juga termasuk kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan pengembangan tanaman produktif belum menghasilkan.

Kapitalisasi beban pinjaman tersebut berakhir ketika tanaman telah menghasilkan dan siap untuk dipanen. Tanaman produktif belum menghasilkan tidak diamortisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Financial Instruments (continued)

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

l. Fixed Assets

Bearer Plants

Bearer plants are living plants used in the production or supply of agricultural produce; are expected to bear produce for more than one period; and have a remote likelihood of being sold as agricultural produce, except for incidental scrap sales.

Immature bearer plantations

Immature bearer plants are recognized at cost, which consist mainly of the accumulated cost of land clearing, planting, fertilizing and up-keeping/maintaining the plantations and allocations of indirect overhead costs up to the time the trees become commercially productive and available for harvest. Costs also include capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the development of immature bearer plants.

Such capitalization of borrowing costs ceases when the trees become commercially productive and available for harvest. Immature bearer plants are not amortized.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Aset Tetap (lanjutan)

Tanaman Produktif (lanjutan)

Tanaman produktif menghasilkan

Tanaman produktif belum menghasilkan direklasifikasi menjadi tanaman produktif menghasilkan pada saat tanaman dinyatakan menghasilkan dan dapat dipanen. Jangka waktu suatu tanaman dinyatakan mulai menghasilkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran manajemen, dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) Tanaman kelapa sawit dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila tanaman telah berumur 36 bulan, dan atau minimal 60% dari jumlah seluruh pohon telah menghasilkan tandan buah dengan dengan berat tandan diatas 9 kilogram.

(ii) Tanaman teh dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila tanaman telah berumur 36 bulan dan atau pertumbuhan daun yang telah saling bertemu antara satu pokok dengan pokok lainnya mencapai lebih dari 70% dari jumlah pokok atau tegakan.

(iii) Tanaman lainnya yaitu teh, kakao, kopi, hortikultura, kelapa hibrida, kelapa benih dan tebu dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila tanaman telah berumur antara 1 tahun sampai dengan 7 tahun.

Tanaman produktif menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan, dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis dari tanaman produktif utama berikut ini:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

I. Fixed Assets (continued)

Bearer Plants (continued)

Mature bearer plantations

Immature bearer plants are reclassified to mature bearer plants when they are commercially productive and available for harvest. The period of a plantation classified as mature depends on the vegetative growth and based on the management estimation with criteria as follows:

(i) The palm oil plantation is classified as mature plantations when the plantation has been 36 months old, and or minimum 60% of trees per block produces fresh fruit bunches with weight per bunch of 9 kilograms.

(ii) Tea is classified as a mature plant if the plant is 36 months old and or the growth of leaves that have met each other between one principal and another reaches more than 70% of the total number of trees or stands.

(iii) Other plantations such as tea, cocoa, coffee, horticulture, hybrid coconut, palm plants and cane classified as mature plantations when the plantation had been aged between 1 year until 7 years.

Mature bearer plants are stated at cost, and are amortized using the straight-line method over their estimated useful lives of the primary bearer plants as follows:

	Tahun/*Years*	
Kelapa sawit	25	*Palm Oil*
Karet	20	*Rubber*
Lain-lain	15 - 50	*Others*

Jumlah tercatat tanaman produktif direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of bearer plants are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Aset Tetap (lanjutan)

Tanaman Produktif (lanjutan)

Jumlah tercatat komponen dari suatu tanaman produktif dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Umur manfaat aset dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

Beban pemeliharaan tanaman produktif dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset ini dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

I. Fixed Assets (continued)

Bearer Plants (continued)

The carrying amount of an item of bearer plants is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

The asset useful lives and depreciation method are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively if necessary.

Upkeep and maintenance costs of bearer plants are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Other Fixed Assets

All other fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used.

Subsequent to initial recognition, these assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Aset Tetap (lanjutan)

Aset Tetap Lainnya (lanjutan)

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Grup dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

I. Fixed Assets (continued)

Other Fixed Assets (continued)

Depreciation of an asset is commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Group and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follow:

Keterangan	**Tahun/ *Year***	***Description***
Bangunan dan prasarana	3-20	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	8-20	*Machinery and equipments*
Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya	5	*Vehicles and other transportation equipments*
Peralatan pertanian, kesehatan dan kantor	2-8	*Farming, health and office equipments*
Instalasi pembibitan	5-16	*Nursery instalation*
Aset agrowisata	5	*Agro-business assets*
Aset tetap lain-lain	5-10	*Other fixed assets*

Jumlah tercatat aset ini direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of these assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

The residual values, useful lives and depreciation method of fixed assets are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively, if necessary.

Tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat masa berlakunya selesai.

*Land, including legal cost of land rights in the form of Right to Cultivate ("*Hak Guna Usaha*" or "HGU"), Right to Build ("*Hak Guna Bangunan*" or "HGB") and Right to Use ("*Hak Pakai*" or "HP") when the land rights were acquired initially, is stated at cost and not amortized as the management is of the opinion that it is probable the titles of land rights can be renewed/extended upon expiration.*

Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan.

After the initial recognition, land is stated at fair value at the date of the revaluation less accumulated impairment losses. Revaluations are done with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Aset Tetap (lanjutan)

Aset Tetap Lainnya (lanjutan)

Surplus revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Defisit revaluasi diakui dalam laba rugi. Namun penurunan nilai tersebut diakui dalam surplus revaluasi aset tetap sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut.

Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

I. Fixed Assets (continued)

Other Fixed Assets (continued)

The revaluation surplus is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit or loss. The revaluation deficit is recognized in profit or loss. However, the decrease is recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset.

The revaluation surplus included in equity in respect of an item of fixed assets may be transferred directly to retained earnings when the fixed asset is derecognized.

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Fixed assets are derecognized or sold in carrying value are removed from fixed assets section. Any gain or loss arising from sales of fixed assets included in profit or loss.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Aset Tetap (lanjutan)

Aset Tidak Produktif

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha diklasifikasikan ke akun aset tetap tidak produktif dalam akun aset tidak lancar lainnya - neto dan disajikan sebesar nilai setelah dikurangi penurunan nilai.

Penghapusan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-03/MBU/03/2021, tentang tata cara penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik negara.

Aset tetap tidak produktif yang diusulkan untuk dihapusbukukan yang selanjutnya telah mendapat persetujuan Direksi dan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan penghapusan oleh Pemegang Saham, maka biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak produktif tersebut direklasifikasi ke aset tidak produktif dalam akun aset tidak lancar lainnya - neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap usulan penghapusan ini, diakui sebagai pendapatan lain-lain (keuntungan penjualan aset tetap).

m. Beban tangguhan - hak atas tanah

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (“HGU”), Hak Guna Bangunan (“HGB”), dan Hak Pakai (“HP”) ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun “Aset Tetap” dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB, dan HP diakui sebagai bagian dari akun “Beban Tangguhan” pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Fixed Assets (continued)

Non-Productive Assets

Fixed assets not used in operation are classified as non-productive assets in the other non-current assets - net account and are presented net of impairment.

Write-off and transfer of non-productive assets follow the provisions set forth in the Regulation of Minister of State-Owned Enterprise No. PER-02/MBU/2010 on Procedures of Write-off and Transfer of Fixed Assets of State-Owned Enterprise.

The non-productive assets are proposed to be written-off with Directors, Board of Commissioners, and Shareholders approval. Cost and accumulated depreciation of the non-productive assets are presented as part of other non-current assets - net account in the consolidated statement of financial position. Accumulated impairment of the non-productive assets is provided based on the policy of impairment on non-financial assets.

Income earned from the sale of the non-productive assets is recognized as other income (gain on sale of fixed assets).

m. Deferred charges - land rights

Legal cost of landrights in the form of HGU (“Hak Guna Usaha” or “HGU”), *HGB* (“Hak Guna Bangunan” or “HGB”), *and Usage Rights* (“Hak Pakai” or “HP”) *when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the “Fixed Assets” account and not amortized. Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of landrights in the form of HGU, HGB, and HP were recognized as part of “Deferred Charges” account in the consolidated statement of financial position and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Properti Investasi

Properti investasi merupakan tanah dan atau bangunan yang dimiliki untuk sewa operasi atau kenaikan nilai, daripada untuk digunakan atau dijual dalam kegiatan operasi normal.

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, properti investasi dinyatakan sebesar nilai wajar yang mencerminkan kondisi pasar pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi dimasukkan dalam laba rugi pada periode terjadinya, termasuk dampak pajak yang terkait. Nilai wajar ditentukan berdasarkan penilaian tahunan yang dilakukan oleh penilai independen eksternal terakreditasi yang menerapkan Standar Penilaian Indonesia yang diterbitkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Properti investasi dihentikan pengakuannya ketika telah dilepaskan (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak lagi digunakan secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Selisih antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi pada periode penghentian pengakuan. Dalam menentukan jumlah imbalan dari penghentian pengakuan properti investasi, Grup mempertimbangkan dampak dari imbalan variabel, keberadaan komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non-kas, dan imbalan yang harus dibayar kepada pembeli (jika ada).

Transfer dilakukan ke (atau dari) properti investasi hanya jika ada perubahan penggunaan. Untuk pengalihan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, biaya yang diperhitungkan untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi, Grup mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam aset tetap sampai dengan tanggal perubahan penggunaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Investment Properties

Investment property represents land or building held for operating lease or for capital appreciation, rather than for use or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at fair value, which reflects market conditions at the reporting date. Gains or losses arising from changes in the fair values of investment properties are included in profit or loss in the period in which they arise, including the corresponding tax effect. Fair values are determined based on an annual valuation performed by an accredited external independent valuer applying Indonesian Valuation Standards issued by the Indonesian Society of Appraisers (MAPPI).

Investment properties are derecognized either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognized in profit or loss in the period of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Grup mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Grup atas aset individual yang dialokasikan. Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama lima atau sepuluh tahun sesuai dengan stabilitas arus kas perkebunan terkait. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Impairment of Non-financial Assets

The Group assesses at the each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

The Group bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Group's CGUs to which the individual assets are allocated. These budgets and forecast calculations are generally covering a period of five or ten years in accordance with the stability of each estate's cash flows. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) terkait dari *goodwill* tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Impairment of Non-financial Assets (continued)

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than their carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future years.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban

Grup adalah produsen dan penjual minyak kelapa sawit, inti sawit, karet, gula dan produk terkait lainnya. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika pengendalian atas barang, terutama minyak kelapa sawit, inti sawit, karet, gula dan produk terkait lainnya dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut. Secara umum, Grup menyimpulkan bahwa mereka bertindak sebagai prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

Kontrak-kontrak dengan pelanggan-pelanggan tertentu dalam segmen bisnisnya mensyaratkan imbalan variabel.

Grup menawarkan imbalan variabel berupa hak retur dan penyesuaian harga sehubungan dengan klaim kualitas, perubahan harga komoditas dan volume penjualan. Dalam menetapkan estimasi tersebut, manajemen menggunakan metode nilai ekspektasian yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis, atau metode jumlah yang paling mungkin yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan juga pola pembelian saat ini.

Manajemen menetapkan metode estimasi untuk memastikan imbalan variabel yang kemungkinan terjadinya sangat tinggi sebagai salah satu faktor yang diperhitungkan dalam estimasi sehingga pembalikan signifikan atas jumlah pendapatan kumulatif yang telah diakui tidak akan terjadi pada saat ketidakpastian yang terkait dengan imbalan variabel tersebut terselesaikan di kemudian waktu. Sedangkan pengakuan dilakukan pada saat dokumen-dokumen pendukung telah diterima dari pelanggan-pelanggan atau pada saat besar kemungkinan bahwa penyesuaian harga akan diberikan.

Piutang usaha merupakan hak Grup atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang perlu terjadi sebelum pembayaran imbalan tersebut jatuh tempo). Lihat kebijakan akuntansi aset keuangan di bagian Instrumen Keuangan mengenai pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses

The Group are producer and seller of crude palm oil, palm kernel, rubber, sugar and other related products. Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods, primarily crude palm oil, palm kernel, rubber, sugar and other related products are transferred to the customers at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

Certain contracts with customers within the respective business segments give rise to variable considerations.

The Group estimates the variable considerations such as right of return and price adjustments arising from quality claim, changes of commodity price and sales volume, using expected value developed based on historical experience or using most likely amount developed based on historical experience taking into account also current purchasing patterns.

The management established estimation method that ensure inclusion of these variable consideration only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved. Meanwhile, the recognition is made when supporting documents have been received from customers or when it is probable price adjustments will be given.

Trade receivables represent the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due). Refer to accounting policies of financial assets in Financial instruments section regarding initial recognition and subsequent measurement.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban (lanjutan)

Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Grup mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran imbalan jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Grup telah memenuhi apa yang harus dilaksanakan sesuai kontrak.

Penghasilan/Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu tingkat suku bunga digunakan mendiskontokan secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan arus kas di masa yang akan datang selama umur ekpektasian dari instrumen keuangan, atau jika lebih sesuai, selama periode yang lebih singkat, untuk jumlah tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan.

Penghasilan Sewa

Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Beban

Beban diakui pada saat terjadi (asas akrual)

q. Sewa

Grup menilai pada saat insepsi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai Penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses (continued)

If a customer pays consideration before the Group transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Group performs under the contract.

Interest Income/Expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the EIR, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Lease Income

Lease income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

Expense

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

q. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Leases (continued)

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.The right-of-use assets are also assessed for impairment.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontijensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontijensi tersebut diperoleh.

r. Piutang Plasma

Grup memiliki komitmen dengan beberapa Koperasi Unit Desa ("KUD") yang mewadahi petani plasma untuk mengembangkan perkebunan plasma sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan Inti akan memberikan bimbingan dan berbagi pengetahuan dalam mengembangkan perkebunan plasma kelapa sawit hingga tahap produktif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Leases (continued)

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.

r. Plasma Receivables

Group have commitments with several rural cooperatives ("KUD" or Koperasi Unit Desa) representing plasma farmers to develop plantations as required by the Indonesian government. The Nucleus Companies is to provide guidance and sharing of knowledge in developing the oil palm plasma plantations up to the productive stage.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Piutang Plasma (lanjutan)

Pembiayaan atas pengembangan perkebunan plasma ini diperoleh melalui pinjaman dari bank, sedangkan Perusahaan Inti memberikan tambahan pinjaman sementara untuk membantu para petani plasma membayar pokok pinjaman beserta bunga sementara perkebunan plasma belum mencapai tahap produktif. Perusahaan Inti memberikan jaminan perusahaan *(corporate guarantee)* untuk fasilitas pinjaman terkait yang diperoleh dari bank. Piutang plasma yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri atas akumulasi biaya-biaya pengembangan yang terjadi dan pembiayaan yang diperoleh dari Perusahaan Inti kepada KUD atau petani plasma dikurangi dana yang diterima dari bank atas nama KUD atau petani plasma dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Piutang plasma juga termasuk pinjaman talangan kredit untuk menutup bunga dan cicilan pinjaman, pinjaman pupuk serta sarana produksi pertanian lainnya kepada petani.

Piutang plasma diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan PSAK 71. Kebijakan akuntansi lebih lanjut atas piutang plasma diungkapkan pada bagian "Instrumen Keuangan" dari Catatan ini.

s. Beban Tangguhan

Biaya-biaya tertentu, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, sehubungan dengan biaya perolehan sistem perangkat lunak, yang tidak memenuhi syarat untuk dicatat sebagai aset tetap seperti diungkapkan pada Catatan 2n, diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. Beban-beban ini disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

t. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya lain yang ditanggung Grup sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Plasma Receivables (continued)

The financing of these plasma plantations are mainly provided by the banks while the Nucleus Companies provide additional temporary loans to help the plasma farmers repay the principal and interest while the plasma plantations are not yet at productive stage. The Nucleus Companies provide corporate guarantees to the related credit facilities provided by the banks. The plasma receivables presented in the consolidated statement of financial position consist of accumulated development costs incurred and the funding provided by the Nucleus Companies to the KUD or plasma farmers less the funds received from banks on behalf of the KUD or plasma farmers and accumulated impairment losses.

Plasma receivables also include advances to plasma farmers for topping up the loan interest and installment payments to banks, and advances for fertilizers and other agricultural supplies.

Plasma receivables are classified as financial assets at amortized cost under PSAK 71. Further accounting policies on plasma receivables are disclosed in "Financial Instruments" section of this Note.

s. Deferred Charges

Certain expenditures, which benefits extend over a period of more than one year, relating to systems software cost, that do not fulfill the criteria to be recognized as fixed assets as disclosed in Note 2n, are amortized over the periods benefited using the straight-line method. These expenditures are presented as part of "Other Non-current Assets" account in the consolidated statement of financial position.

t. Borrowing Cost

Borrowing costs consist of interest expenses and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing funds. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. All other borrowing costs are recognized as expenses when incurred.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Perpajakan

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam SPT sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;

ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Taxation

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;

ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or

ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Manfaat pajak yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk pengakuan terpisah pada tanggal tersebut, diakui selanjutnya jika informasi baru tentang fakta dan keadaan berubah. Penyesuaian tersebut diperlakukan sebagai pengurangan *goodwill* (selama tidak melebihi *goodwill*) jika terjadi selama periode pengukuran atau diakui dalam laba rugi.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Tax benefits acquired as part of a business combination, but not satisfying the criteria for separate recognition at that date, are recogn ised subsequently if new information about facts and circumstances change. The adjustment is either treated as a reduction in goodwill (as long as it does not exceed goodwill) if it was incurred during the measurement period or recognized in profit or loss.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the consolidated statement of financial position.

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Imbalan Kerja

Grup mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja No. 2/2022 ("UU Cipta Kerja", (UUCK)). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "*Projected Unit Credit"*.

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui PKL pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Grup mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Pokok Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian *(curtailment)* tidak rutin, dan

ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

Perusahaan dan entitas-entitas anak tertentu juga, mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Employee Benefits

The Group provides additional provisions on top of the benefits provided under the above-mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Collective Labor Agreement and. Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2022 (the "Cipta Kerja Law", (UUCK)). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

i) the date of the plan amendment or curtailment, and
ii) the date the Group recognizes related restructuring costs.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Revenue" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and
ii) Net interest expense or income.

The Company and certain subsidiaries, also have defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek Grup meliputi:

a) Tantiem

Penyisihan atas tantiem dibuat berdasarkan estimasi manajemen dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Tantiem akan dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selisih antara jumlah tantiem yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana tantiem tersebut disahkan oleh RUPS.

b) Bonus

Bonus ditetapkan berdasarkan estimasi manajemen Grup dan disahkan oleh RUPS. Selisih antara jumlah bonus yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana bonus tersebut disahkan oleh RUPS.

Imbalan Jangka Panjang

Imbalan kerja jangka panjang Grup meliputi:

a) Imbalan dan iuran pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Entitas Anak menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, imbalan pensiun manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuaria berdasarkan metode *Projected Unit Credit* seperti yang diharuskan oleh PSAK No. 24.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Employee Benefits (continued)

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits of the Group comprise of:

a) Tantiem

Provision of tantiem are based on management estimates and charged to the current period profit or loss. Tantiem will be paid to Directors and Commissioners after obtaining the approval in the General Stockholders' Meeting (GSM). The difference between the provision of tantiem that was estimated by management and the amount approved by the stockholders is recognized in the period when such tantiem is approved by GSM.

b) Bonus

Bonus is provided based on the estimation of Group's management and approved by GSM. The difference between the total bonus estimated by management and approved by stockholders is recognized in the period when such bonus is approved by GSM.

Long-Term Employee Benefits

Long-term employee benefits of the Group comprise of:

a) Defined benefit and contribution

The Company has defined benefit and defined contribution pension plan for all of its eligible permanent employees. The Subsidiaries have defined contribution pension plan for all of their eligible permanent employees.

For financial reporting purposes, the defined benefit pension plan is calculated using the actuarial assumptions based on the Projected Unit Credit method as required by PSAK No. 24.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Jangka Panjang (lanjutan)

a) Imbalan dan iuran pasti (lanjutan)

Jika terdapat surplus pendanaan, aset diakui pada laporan keuangan konsolidasian apabila pemulihan surplus tersebut dapat dilakukan baik melalui pembayaran kembali atau pengurangan iuran masa datang.

Untuk program pensiun iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban pada usaha periode berjalan.

b) Imbalan kerja jangka panjang lain

Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang selain pensiun yang meliputi cuti berimbalan jangka panjang dan kesetiaan yang tidak didanai. Imbalan kerja jangka panjang tersebut dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sesuai dengan PSAK No. 24.

c) Imbalan kesehatan pasca kerja

Grup memberikan Program Iuran Pasti Imbalan Perawatan Kesehatan Pensiun kepada karyawannya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Employee Benefits (continued)

Long-Term Employee Benefits (continued)

a) Defined benefit and contribution (continued)

Where the funding status shows a surplus, an asset is recognized in the consolidated financial statements if that surplus can be recovered through refunds or reductions in future contributions.

For the defined contribution pension plans, contributions payable are charged to current period operations.

b) Other long-term employee benefits

The Group also provides long-term employment benefits other than pension which include long-term compensation leave and service rewards which are unfunded. These long-term employee benefits are calculated using the Projected Unit Credit method in accordance with PSAK No. 24.

c) Post-retirement healthcare benefits

The Group provides defined contribution Post-retirement Healthcare Benefits plan to its employees.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

w. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

i) In the principal market for the asset or liability, or
ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

i) *Level* 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
ii) *Level* 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan *(input)* yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
iii) *Level* 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan *(input)* yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Grup bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti aset biologis, nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan, terutama aset biologis dan tanah. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Grup dan penilai eksternal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

w. Fair Value Measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.

ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Group's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as biological assets and fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

External valuers are involved for valuation of significant assets, in particular, the biological assets and land. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Group and external valuers.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan *level* pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

x. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

y. Laba per Saham

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

w. Fair Value Measurement (continued)

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

x. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

y. Earning per Share

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Perubahan kebijakan akuntansi

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Grup, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian *item* apa pun dalam laporan keuangan Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

z. Changes in accounting principles

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies

This amendments provide guidance to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendments aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments have had an impact on the Group's disclosures of accounting policies, but not on the measurement, recognition or presentation of any items in the Group's financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Amandemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan *item* yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan *item-item* tersebut, dan biaya untuk memproduksi *item-item* tersebut, dalam laba rugi.

Grup menerapkan amandemen tersebut secara retrospektif hanya untuk aset tetap yang dibuat supaya aset siap digunakan pada atau setelah awal periode penyajian paling awal ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup karena tidak ada penjualan atas *item-item* yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal.

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

z. Changes in accounting principles (continued)

Amendment of PSAK 16: Fixed Assets - Proceeds before Intended Use

The amendments prohibit entities from deducting from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

The Group applies the amendments retrospectively only to items of fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Group as there were no sales of such items produced by fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented.

Amendment of PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates

The amendments to PSAK 25 clarify the distinction between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and the correction of errors. They also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

Amendment of PSAK 46: Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

The amendments to PSAK 46 Income Taxes narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua

Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD),* dan mencakup:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.

Pengecualian tersebut – yang penggunaannya harus diungkapkan – segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perundang-undangan terkait pajak penghasilan Pilar Dua belum diberlakukan atau secara substantif belum diberlakukan di Indonesia tempat Grup beroperasi. Oleh karena itu, Grup masih dalam proses melakukan penilaian atas potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua. Potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, jika ada, saat ini tidak diketahui atau dapat diperkirakan secara wajar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

z. Changes in accounting principles (continued)

Amendment of PSAK 46: Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules

The amendments to PSAK 46 have been introduced in response to the Pillar Two Rules, issued by Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and include:

- *An exception to the recognition and disclosure of deferred taxes related to the Pillar Two income taxes; and*
- *Disclosure requirements for affected entities to help users of the financial statements better understand an entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation, particularly before its effective date.*

The exception – the use of which is required to be disclosed – applies immediately upon the issue of these amendments. The remaining disclosure requirements apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not for any interim periods ending on or before December 31, 2023.

As of December 31, 2023, the Pillar Two income taxes legislation has not yet been enacted or has not yet substantively enacted in Indonesia where the Group operates. Therefore, the Group is still in the process of assessing the potential exposure to Pillar Two income taxes. The potential exposure, if any, to Pillar Two income taxes is currently not known or reasonably estimable.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgement is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for corporate income tax is based on estimation of whether there will be additional corporate income tax.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

Based on the tax regulations currently enacted, the management uses judgements if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE. Matriks provisi digunakan untuk menghitung KKE untuk piutang usaha dan lain-lain. Tarif provisi didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Grup akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan KKE, adalah estmasi signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

Penyisihan Nilai Realisasi Neto Persediaan

Penyisihan nilai realisasi neto persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Group estimates impairment allowance for trade receivables using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for trade and other receivables, where the provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Group will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly. At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.

Allowance for Net Realizable Value of Inventories

Allowance for net realizable value of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Plasma

Seperti diungkapkan dalam Catatan 2t, piutang plasma merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan plasma. Grup menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang plasma dengan menggunakan pendekatan umum KKE karena piutang ini mengandung komponen pembiayaan yang signifikan.

Jika belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak awal kontrak, penyisihan didasarkan pada KKE 12 bulan. Grup menetapkan piutang dari masing-masing proyek plasma mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika biaya pengembangan aktual per hektar melebihi biaya pengembangan per hektar yang disepakati dalam perjanjian kredit antara koperasi dan kreditur. Pada titik ini, Grup menetapkan estimasi kerugian penurunan nilai menggunakan KKE sepanjang umurnya.

Grup menghitung KKE sepanjang umurnya berdasarkan perkiraan kekurangan kas, didiskontokan dengan perkiraan SBE awal. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang menjadi hak Grup sesuai kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, yang diestimasi berdasarkan pendapatan dari perkebunan plasma dikurangi biaya penjualan. pembayaran pokok dan bunga ke bank. Input utama yang digunakan untuk estimasi ini adalah harga jual TBS, hasil produksi perkebunan plasma, biaya produksi dan tingkat inflasi. Penyisihan ini dievaluasi ulang dan disesuaikan dengan tambahan informasi yang diterima pada setiap tanggal pelaporan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Impairment of Plasma Receivables

As discussed in Note 2t, plasma receivables represents disbursements made for the costs to develop plasma plantations. The Group estimates allowance for impairment of plasma receivables using general approach of ECL as these receivables contain significant financing component.

When there has not been significant increase in credit risk since origination, the allowance is based on the 12-months' ECL. The Group primarily determined a receivable from individual plasma project has significant increase in credit risk when the actual development cost per hectare is exceeding the agreed development cost per hectare as stated in the credit agreement between the cooperatives and the creditor. At this point, the Group estimates the impairment loss using lifetime ECLs.

The Group calculates lifetime ECL based on the expected cash shortfalls, discounted at an approximation of the original EIR. A cash shortfall is the difference between the cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive, which is estimated based on the revenues from the plasma plantations deducted with the costs of sales, principal and interest payments to the bank. The key inputs applied for this estimation are the selling price of FFB, production yield of the plasma plantations, production costs and inflation rate. These provisions are re-evaluated and adjusted as additional information is received at each reporting date.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Program Pensiun dan Imbalan Kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

Revaluasi tanah

Grup mengukur tanah pada jumlah revaluasian dengan perubahan pada nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Nilai wajar tanah ditentukan berdasarkan bukti pasar dengan menggunakan harga yang dapat diperbandingkan dan disesuaikan terhadap faktor-faktor pasar spesifik seperti sifat, lokasi dan kondisi aset tersebut.

Aset biologis

Grup mengadopsi pendekatan pendapatan menggunakan model arus kas yang didiskontokan untuk mengukur nilai wajar dari produksi tebu dan hutan tanaman. Input signifikan yang diterapkan untuk menentukan nilai wajar aset biologis ini termasuk harga jual yang diproyeksikan, tingkat produksi, tingkat diskonto, tingkat inflasi dan nilai tukar.

Jumlah perubahan dalam nilai wajar dari aset biologis ini akan berbeda jika ada perubahan pada input yang digunakan, dan akan mempengaruhi laba rugi Grup dan ekuitas.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Pension Plan and Employee Benefits

The measurement of the Group' employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI the the period in which they occur.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

Revaluation of land

The Group measures land at revalued amounts with changes in fair value being recognized in other comprehensive income. Land was valued by reference to market-based evidence, using comparable prices adjusted for specific market factors such as nature, location and condition of the asset.

Biological assets

The Group adopts income approach using discounted cash flow models to measure the fair value of the cane produce and timber plantations. Significant inputs applied to determine the fair value of these biological assets include the projected selling prices, production yields, discount rate, inflation rate and exchange rates

The amount of changes in fair values of these biological assets would differ if there are changes to the inputs used, and would affect the Group's profit or loss and equity.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Kas - Rupiah	11.957.900.339	13.531.231.089	*Cash on hand - Rupiah*
Bank:			*Banks:*
Rupiah			*Rupiah*
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 37a)			*Government-related entities (Notes 37a)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.520.020.522.047	5.736.780.795.619	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	792.628.969.558	381.532.959.433	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	627.346.008.054	1.425.681.393.518	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	58.461.449.983	23.855.186	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	31.405.475.596	67.444.044.423	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	20.886.693.570	104.456.437	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	13.566.494.121	14.048.945.438	*PT Bank Pembangunan Daerah Riau*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	7.699.298.890	1.920.595.155	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	3.413.408.343	127.053.861.400	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Tomata	569.470.083	1.370.960.853	*PT Bank Pembangunan Daerah Tomata*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	439.288.758	225.234.926	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	374.830.124	293.594.771	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	103.074.352	103.136.785	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	14.166.793	248.860.702	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	4.151.371	13.396.371	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Pembangunan Daerah Aceh	1.225.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Aceh*
PT Bank Mandiri Taspen	-	50.000.000.000	*PT Bank Mandiri Taspen*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Victoria International Tbk	11.032.749.985	10.819.575.555	*PT Bank Victoria International Tbk*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	6.498.716.955	12.549.507.690	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Perkreditan Rakyat Agroloka	6.106.118.801	7.956.347.731	*PT Bank Perkreditan Rakyat Agroloka*
PT Bank Central Asia Tbk	832.763.677	2.526.890.819	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	759.721.754	14.928.465.777	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	633.276.975	632.378.145	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	435.089.193	18.906.393.785	*PT Bank DBS Indonesiz*
PT Bank ICBC Indonesia	143.509.553	143.765.714	*PT Bank ICBC Indonesia*
PT Bank Permata Tbk	7.179.651	21.819.913.681	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Neo Commerce	1.605.629	1.921.204	*PT Bank Neo Commerce*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	989.457	246.172.987	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Mega Tbk	-	1.083.480.546	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	608.095.102	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Bukopin Tbk	-	128.532.524	*PT Bank Bukopin Tbk*

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Bank (lanjutan):			*Banks (continued):*
Dollar Amerika			*US Dollar*
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 37a)			*Government-related entities (Notes 37a)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.153.080.903.750	920.068.685.966	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	164.576.274.991	483.296.651.878	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	82.944.873.527	4.768.260.407	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	981.923.045	-	*PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.439.344.593	1.468.755.145	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	373.785.586	380.280.822	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	140.825.183	377.926.142	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	24.830.705	26.280.051	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	17.669.048	18.454.823	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	537.246.528	*PT Bank Maybank IndonesiaTbk*
PT Bank Bukopin Tbk	-	444.169.347	*PT Bank Bukopin Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	-	16.952.664	*PT Bank UOB Indonesia*
Euro Eropa			*European Euro*
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 37a)			*Government-related entities (Notes 37a)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.508.460.723	10.764.271	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.408.706.278	1.332.571.787	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Dolar Singapura			*Singapore Dollar*
Pihak Ketiga			*Third Party*
PT Bank OCBC NISP Tbk	89.092.319	2.041.025	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Deposito berjangka:			*Time deposits:*
Rupiah			*Rupiah*
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 37a)			*Government-related entities (Note 37a)*
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	265.240.000.000	443.900.000.000	*PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	237.051.527.927	157.650.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	19.000.000.000	62.500.000.000	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.200.000.000	600.342.997.451	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.000.000.000	189.741.219.074	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	500.000.000	15.500.000.000	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	500.000.000	6.500.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan and Bangka Belitung*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	40.470.825.522	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	-	17.000.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara*
Pihak Ketiga			*Third parties*
PT Bank DBS Indonesia	6.432.037.828	927.290.102	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
Total	**7.085.854.404.115**	**10.862.010.136.371**	***Total***

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah berkisar antara 2,15%-7,00% (2022: antara 2,00%-7,00%).

Kas tertentu telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Tania Tbk terhadap risiko kehilangan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp435 miliar dan Rp380 miliar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Grup.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank. For the year ended December 31, 2023 the annual interest rates of the time deposits in Rupiah were at range between 2.15%-7.00% (2022: ranging 2.00%-7.00%).

Certain cash are insured against losses risk under PT Asuransi Jasa Tania Tbk with combined coverage amounting to Rp435 bilion and Rp380 billion for the year ended December 31, 2023 and 2022 respectively.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the risk faced by the Group.

5. KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA / *5. RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENT*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Bank			*Bank*
Rupiah			*Rupiah*
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 37b)			*Government-related entities (Note 37b)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	294.429.582.809	332.880.152.360	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	265.564.081.333	94.280.066.451	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	39.510.568.010	50.330.583.359	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	14.559.663.460	5.203.257.596	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.392.364.262	49.469.667.297	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	11.281.781.213	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
PT Bank DBS Indonesia	9.042.604.831	27.434.728.382	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank UOB Indonesia	4.498.152.603	7.484.161.372	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Central Asia Tbk	3.644.975.862	8.921.194.140	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank ICBC Indonesia	2.160.096.757	6.678.095.459	*PT Bank ICBC Indonesia*
PT Bank Victoria International Tbk	1.969.385.435	3.662.163.274	*PT Bank Victoria International Tbk*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	1.834.582.147	2.784.456.737	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk*
PT Bank QNB Indonesia Tbk	889.788.167	15.440.674.429	*PT Bank QNB Indonesia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	34.291.132	9.968.061.425	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	12.714.707	550.077.821	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	1.129.562.912	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Dolar AS			*US Dollar*
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 37b)			*Government-related entities (Note 37b)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.514.841.988	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	90.277.062.800	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Pihak Ketiga			*Third party*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	46.686.302.162	61.519.219.183	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation*

5. KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

5. RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENT (continued)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Deposito berjangka			*Time Deposits*
Rupiah			*Rupiah*
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 37b)			*Government-related entities (Note 37b)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	548.835.000.000	737.956.118.363	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	173.414.000.000	593.714.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	163.583.550.180	160.986.362.233	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	500.000.000	-	*PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur*
Pihak Ketiga			*Third parties*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	-	1.800.000.000	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank UOB Indonesia	-	5.535.424.280	*PT Bank UOB Indonesia*
Dolar AS			*US Dollar*
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 37b)			*Government-related entity (Note 37b)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	88.469.340.800	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Total	**1.671.545.886.645**	**2.282.286.871.086**	***Total***

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya terutama merupakan kas di bank dalam bentuk giro dan deposito yang ditempatkan sebagai pembayaran bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun dan cadangan atas pembayaran utang bank jangka pendek, sebagai syarat dalam perjanjian penerusan fasilitas kredit, dimana perusahaan diwajibkan menempatkan sejumlah dana, pada rekening bank, dan baru boleh dicairkan pada saat seluruh pinjaman dilunasi.

Restricted cash balances are cash in banks mainly represent cash in bank in the form of current account and time deposits placed as payment for current portion of long term bank loans and reserves for payment of short term bank loans, as a condition in a credit extension agreement, in which the company is required to determine the amount of funds, in bank account, and new may be disbursed when all bank loans are repaid.

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tingkat suku bunga tahunan kas yang dibatasi penggunaanya dalam mata uang Rupiah berkisar antara 2,50%-4,75% (2022: antara 1,94%-7,75%).

Accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank. For the year ended December 31, 2023 the annual interest rates of restricted cash in Rupiah were at range between 2.50%-4.75% (2022: ranging 1.94%-7.75%).

6. PIUTANG USAHA – NETO / *6. TRADE RECEIVABLES – NET*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Pihak ketiga	1.607.744.452.180	1.876.003.947.960	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi (Catatan 37c)	250.415.481.832	87.579.415.982	*Related parties (Note 37c)*
Total	1.858.159.934.012	1.963.583.363.942	*Total*
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai:			*Less allowance for for impairment:*
Pihak ketiga	(452.311.271.519)	(305.350.492.379)	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 37c)	(32.197.481.800)	(28.238.416.259)	*Related parties (Note 37c)*
Total penyisihan atas penurunan nilai	(484.508.753.319)	(333.588.908.638)	*Total allowance for impairment*
Pihak ketiga - neto	1.155.433.180.661	1.570.653.455.581	*Third parties - net*
Pihak-pihak berelasi - neto (Catatan 37c)	218.218.000.032	59.340.999.723	*Related parties - net (Note 37c)*
Neto	**1.373.651.180.693**	**1.629.994.455.304**	***Net***

Perubahan saldo penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Saldo awal	333.588.908.638	343.236.029.185	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan (Catatan 35)	161.334.925.928	25.875.596.407	*Allowance for the year (Notes 35)*
Pemulihan tahun berjalan (Catatan 34)	(10.415.081.247)	(35.522.716.954)	*Recovery for the year (Notes 34)*
Saldo akhir	**484.508.753.319**	**333.588.908.638**	***Ending balance***

6. PIUTANG USAHA – NETO (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES – NET (continued)*

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The aging analysis of trade receivables is as follows:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Lancar	166.356.012.152	714.104.844.414	*Current*
Telah jatuh tempo			*Past due*
1 - 30 hari	622.064.958.419	307.530.861.338	*1 - 31 days*
31 - 60 hari	6.798.362.791	125.315.458.492	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	81.375.136.446	175.890.124.207	*61 - 90 days*
91 - 365 hari	365.082.990.585	293.801.557.955	*91 - 365 days*
Lebih dari 365 hari	616.482.473.619	346.900.517.536	*More than 365 days*
Total	**1.858.159.934.012**	**1.963.583.363.942**	***Total***
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai	(484.508.753.319)	(333.588.908.638)	*Less allowance for impairment*
Neto	**1.373.651.180.693**	**1.629.994.455.304**	***Neto***

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: / *The trade receivables details based on currencies are as follows:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Dalam Rupiah	1.768.669.361.314	1.442.972.085.840	*In Rupiah*
Dalam Dolar AS	89.490.572.698	520.611.278.102	*In US Dollar*
Total	**1.858.159.934.012**	**1.963.583.363.942**	***Total***
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai	(484.508.753.319)	(333.588.908.638)	*Less allowance for impairment*
Neto	**1.373.651.180.693**	**1.629.994.455.304**	***Net***

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang usaha tersebut.

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover losses from impairment of such trade receivables.

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan barang adalah 7 sampai dengan 90 hari.

The average term of the credit sales of goods is 7 days to 90 days.

Piutang usaha di beberapa Entitas Anak digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek (Catatan 18) dan utang jangka panjang (Catatan 25).

Trade receivables in several Subsidiaries are pledged as a collateral to the short-term bank loans (Note 18) and long-term liabilities (Note 25).

7. PIUTANG LAIN-LAIN – NETO / *7. OTHER RECEIVABLES – NET*

Piutang lain-lain terdiri dari pinjaman modal kerja kepada pihak berelasi dan kegiatan non-operasional lainnya.

Other receivables mainly consists of working capital loans to related parties and other non-operational activities.

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Pihak ketiga	1.019.714.507.233	992.159.801.439	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi (Catatan 37d)	411.845.679.236	589.558.371.270	*Related parties (Note 37d)*
Total	1.431.560.186.469	1.581.718.172.709	*Total*
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai:			*Less allowance for for impairment:*
Pihak ketiga	(504.617.451.465)	(446.954.437.799)	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 37d)	(133.716.463.867)	(103.566.460.467)	*Related parties (Note 37d)*
Pihak ketiga - neto	515.097.055.768	545.205.363.640	*Third parties – net*
Pihak-pihak berelasi - neto (Catatan 37d)	278.129.215.369	485.991.910.803	*Related parties - net (Note 37d)*
Neto	**793.226.271.137**	**1.031.197.274.443**	***Net***

Perubahan saldo penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Saldo awal	550.520.898.266	586.670.779.337	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 35)	99.810.310.867	9.018.487.973	*Allowance for the year (Note 35)*
Pemulihan penyisihan (Catatan 34)	(11.997.293.801)	(45.168.369.044)	*Recovery for the year (Notes 34)*
Saldo akhir	**638.333.915.332**	**550.520.898.266**	***Ending balance***

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang lain-lain di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang lain-lain tersebut.

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of other receivables is sufficient to cover losses from impairment of such other receivables.

8. PERSEDIAAN – NETO / *8. INVENTORIES – NET*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Barang jadi:			*Finished goods:*
Minyak kelapa sawit	1.378.946.444.011	1.604.419.522.784	*Crude palm oil*
Gula dan tetes	1.050.672.103.740	4.070.999.808.112	*Sugar and drops*
Teh	211.518.735.349	232.135.113.722	*Tea*
Inti sawit	184.784.100.299	324.210.274.533	*Palm kernel*
Karet	183.921.807.516	241.163.901.548	*Rubber*
Palm kernel oil	62.557.023.242	74.201.820.885	*Palm kernel oil*
Palm kernel meal	24.742.624.969	22.695.734.962	*Palm kernel meal*
Tembakau	136.496.917.530	194.590.669.348	*Tobacco*
Lain-lain	307.790.580.811	1.038.886.108.424	*Others*
Bahan pembantu	1.890.702.163.773	2.170.792.295.042	*Supporting materials*
Barang dalam proses	365.133.231.101	336.446.920.064	*Goods in progress*
Bahan baku	111.480.846.748	98.724.101.702	*Raw materials*
Perlengkapan pabrik	183.770.464.578	170.576.174.585	*Factory supplies*
Total	6.092.517.043.667	10.579.842.445.711	*Total*
Penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan	(232.834.346.696)	(151.171.054.885)	*Allowance for obsolescence and impairment of inventory market value*
Neto	**5.859.682.696.971**	**10.428.671.390.826**	***Net***

Persediaan tertentu diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dalam suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp5.685 miliar dan Rp10.486 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Certain inventories are insured for fire and other risks under certain blanket policies with combined coverage amounting to Rp5,685 billion and Rp10,486 billion for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Grup.

Management believes that the insurance coverage are sufficient to cover from such risks if the Group suffered losses from such risks.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik dari persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan.

Based on a review of the market prices and physical conditions of the inventories at the reporting dates, management believes that the above allowance is adequate to cover any possible losses from obsolescence and decline in market values of inventories.

Persediaan digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek (Catatan 18) dan utang jangka panjang (Catatan 25).

Inventories are pledged as collateral to the short-term bank loans (Note 18) and long-term liabilities (Note 25).

Perubahan saldo penyisihan atas keuangan dan penurunan nilai pasar.

Changes in the balance of allowance for obsolescence and decline in market value.

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Saldo awal	151.171.054.885	76.426.212.138	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 31 dan 35)	150.236.816.497	133.714.668.573	*Allowance for the year (Notes 31 and 35)*
Pemulihan penyisihan (Catatan 31 dan 34)	(68.573.524.686)	(58.969.825.826)	*Recovery of allowance (Notes 31 and 34)*
Saldo Akhir	**232.834.346.696**	**151.171.054.885**	***Ending Balance***

9. ASET BIOLOGIS / *BIOLOGICAL ASSETS*

Aset biologis terdiri atas tanaman kayu dan produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif.

Biological assets comprise of standing timber and growing agriculture produce on the bearer plants.

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Tebu	1.235.967.658.598	1.052.889.904.749	*Sugarcane*
Kayu	667.278.963.496	905.171.118.284	*Wood*
Tandan buah segar	533.984.039.488	510.946.665.619	*Fresh Fruit Bunches*
Daun teh basah	17.531.171.150	18.068.553.418	*Wet tea leaves*
Karet	12.364.011.783	35.591.912.586	*Rubber*
Lain-lain	30.513.618.299	19.584.966.370	*Others*
Total	**2.497.639.462.814**	**2.542.253.121.026**	***Total***

Mutasi atas aset biologis adalah sebagai berikut:

Mutation of biological assets as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Saldo awal	2.542.253.121.026	2.667.803.599.289	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	16.917.292.914.254	21.951.868.347.449	*Additions during the year*
Panen	(17.005.552.541.727)	(21.700.299.992.822)	*Harvests*
Kerugian neto atas perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual yang diakui pada laba rugi	43.645.969.261	(377.118.832.890)	*Loss arising from change in fair value less cost to sell recognized in the profit or loss*
Saldo akhir	**2.497.639.462.814**	**2.542.253.121.026**	***Ending balance***
Bagian lancar	2.094.880.889.932	2.014.322.292.568	*Current portion*
Bagian tidak lancar	**402.758.572.882**	**527.930.828.458**	***Non-current portion***

Nilai wajar atas produk agrikultur kelapa sawit, karet, teh, kopi dan lainnya ditentukan pada Level 2 berdasarkan harga pasar terkait yang diterapkan terhadap estimasi volume produk, dan nilai wajar aset biologis tebu dan kayu tegakan ditentukan pada Level 3 menggunakan metode pendapatan.

The fair values of the agricultural produce of palm oil, rubber, tea, coffee and others are determined at Level 2 based on the applicable market price applied to the estimated volume of the produce, and the fair value of cane and standing timber determined at Level 3 based on income approach.

Nilai wajar atas produk agrikultur tebu dan kayu ditentukan menggunakan pendekatan pendapatan *(income approach)* berdasarkan teknik nilai kini *(present value)* dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan neto atas aset tanaman/produk.

The fair values of the agricultural produce of timber plantations and sugar cane are determined using income approach based on the present value technique by discounting net future estimated cash flows of the underlying plantations/produce.

	Jumlah Panen/*Total Harvest*		
	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
	(dalam ton)	*(in tonnes)*	
Tandan Buah Segar	11.770.302	12.762.145	*Fresh Fruit Bunches*
Getah Karet	61.922	114.722	*Rubber*
Daun teh basah	94.080	221.111	*Wet tea leaves*
Tebu	474.134	302.583	*Sugarcane*
	(dalam meter kubik)	*(in cubic meters)*	
Kayu	1.421.642	382.152	*Wood*

9. ASET BIOLOGIS (lanjutan)

Aset biologis Grup diukur pada niai wajar dikurangi biaya menjual pada titik panen. Tabel dibawah ini memberikan informasi mengenai asumsi signifikan yang digunakan:

9. *BIOLOGICAL ASSETS (continued)*

The Group's biological assets are measured at fair value less costs to sell at the point of harvest. The table below provides information about the significant assumptions used:

Aset Biologis/ ***Biological assets***	**Input/** ***Input***	**31 Desember 2023/** ***December 31, 2023***	**31 Desember 2022/** ***December 31, 2022***	**Sensitivitas input ke nilai wajar** ***Input Sensitivity fo fair value***
Tandan Buah Segar/ *Fresh Fruit Buches*	Harga jual produk olahan/ *Selling price of processed produce*	antara/*between* Rp1.646/Kg- Rp2.639/Kg	antara/*between* Rp1.403/Kg - Rp3.077/Kg	Kenaikan/(penurunan) harga jual produk olahan akan menyebabkan peningkatan/(penurunan) nilai wajar/ *An increase/(decrease) in selling price of processed produce will cause an increase(decrease) in fair value*
Getah karet/ *Rubber sap*	Harga jual produk olahan/ *Selling price of processed produce*	antara/between Rp6.786/Kg - Rp24.276/Kg	antara/between Rp6.343/Kg - Rp27.590/Kg	Kenaikan/(penurunan) harga jual produk olahan akan menyebabkan peningkatan/(penurunan) nilai wajar/ *An increase/(decrease) in selling price of processed produce will cause an increase(decrease) in fair value*
Daun teh basah/ *Wet tea leaves*	Harga jual produk olahan/ *Selling price of processed produce*	antara/between Rp2.461/Kg - Rp7.902/Kg	antara/between Rp2.500/Kg - Rp2.843/Kg	Kenaikan/(penurunan) harga jual produk olahan akan menyebabkan peningkatan/(penurunan) nilai wajar/ *An increase/(decrease) in selling price of processed produce will cause an increase(decrease) in fair value*
Kayu/ *Wood*	Harga jual produk olahan/ *Selling price of processed produce*	antara/*between* Rp446.402/Kg - Rp1.080.000/Kg	antara/*between* Rp336.356/Kg - Rp1.860.529/Kg	Kenaikan/(penurunan) harga jual produk olahan akan menyebabkan peningkatan/(penurunan) nilai wajar/ *An increase/(decrease) in selling price of processed produce will cause an increase(decrease) in fair value*
	Tingkat diskonto/ *Discount rate*	sebesar/*amounting to* 10,00%	sebesar/*amounting to* 10,53%	Kenaikan/(penurunan) tingkat diskonto akan menyebabkan penurunan/(peningkatan) nilai wajar/ *An increase/(decrease) in the discount rate will result in a decrease/(increase) in the fair value*
Tebu/ *Sugar cane*	Harga jual produk olahan/ *Selling price of processed produce*	antara/*between* Rp623/Kg - Rp822/Kg	antara/*between* Rp556/Kg - Rp814/Kg	Kenaikan/(penurunan) harga jual produk olahan akan menyebabkan peningkatan/(penurunan) nilai wajar/ *An increase/(decrease) in selling price of processed produce will cause an increase(decrease) in fair value*
	Tingkat diskonto/ *Discount rate*	antara/*between* 10,27% - 13,08%	antara/*between* 8,95% - 12,00%	Kenaikan/(penurunan) tingkat diskonto akan menyebabkan penurunan//(peningkatan) nilai wajar/ *An increase/(decrease) in the discount rate will result in a decrease/(increase) in the fair value*

Perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Change in fair value less cost to sell recognized in the profit or loss of biological assets recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Desember 2023/ ***December 31, 2023***	**31 Desember 2022/** ***December 31, 2022***	
Tebu	6.612.382.618	(125.367.674.298)	*Sugarcane*
Kayu	(86.930.900.629)	15.585.482.120	*Standing timber*
Tandan buah segar	109.730.750.975	(328.398.742.229)	*Fresh fruit bunches*
Lainnya	14.233.736.297	61.062.101.517	*Others*
Total - neto	**43.645.969.261**	**(377.118.832.890)**	***Total - net***

10. ASET LANCAR LAINNYA - NETO / *10. OTHER CURRENT ASSETS - NET*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Aset tersedia untuk dijual	341.873.250.000	8.636.015.713	*Available for sale assets*
Uang muka pembelian	301.119.899.828	144.829.291.612	*Advances payment*
Biaya dibayar dimuka	290.928.533.103	147.663.633.685	*Prepaid expenses*
Uang muka operasional	57.623.002.410	19.531.215.169	*Advances for operations*
Beban tangguhan	26.751.716.714	33.367.371.310	*Deferred charges*
Lain-lain	22.369.980.346	27.576.707.485	*Others*
Total	**1.040.666.382.401**	**381.604.234.974**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(177.843.301)	(7.621.265.713)	*Allowance for impairment losses*
Total Neto	**1.040.488.539.100**	**373.982.969.261**	***Total Net***

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kerugian dari tidak terpulihkannya aset lancar lainnya.

Management believes that allowance for impairment losses are adequate to cover losses from unrecoverability of other current asset.

11. PIUTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG – NETO / *11. OTHER LONG-TERM RECEIVABLES – NET*

Piutang lain-lain jangka panjang terutama merupakan piutang yang timbul dari proyek perkebunan plasma.

Other long-term receivables mainly representf receivables arising from plasma plantation project.

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Pihak ketiga	1.170.928.170.314	1.307.326.838.171	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 37e)	171.647.274.312	21.786.614.622	*Related parties (Note 37e)*
Total	**1.342.575.444.626**	**1.329.113.452.793**	***Total***
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai	(1.005.525.744.990)	(1.069.494.524.722)	*Less allowance for impairment*
Neto	**337.049.699.636**	**259.618.928.071**	***Net***

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang lain-lain jangka panjang di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang lain-lain jangka panjang tersebut.

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of other long-term receivables is sufficient to cover losses from impairment of such other long-term receivables.

Perubahan saldo penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Saldo awal	1.069.494.524.722	960.920.035.796	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 35)	(63.968.779.732)	108.574.488.926	*Allowance for the year*
Saldo akhir	**1.005.525.744.990**	**1.069.494.524.722**	***Ending balance***

12. INVESTASI SAHAM - NETO

Rincian investasi saham adalah sebagai berikut:

12. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK - NET

Details of investment in shares of stock are as follow:

Perusahaan	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan/ *Acquisition cost*	Penambahan (pengurangan)/ *Additions (deduction)*	Bagian dividen/ *Dividend share*	Akumulasi bagian atas laba (rugi) neto dan penghasilan komprehensif lainnya/ *Equity in net earnings (loss) and comprehensive income*	Total Kepemilikan akhir tahun/ *Total investment at year end*	*Companies*
2023							***2023***
Metode ekuitas							***Equity method***
a) PT Sinkona Indonesia Lestari	49,00%	11.403.983.136	-	(610.378.500)	76.662.062.242	87.455.666.878	*a) PT Sinkona Indonesia Lestari*
b) PT Propernas Nusa Dua	49,00%	14.700.000.000	-	-	(941.354.653)	13.758.645.347	*b) PT Propernas Nusa Dua*
c) PT Pupuk Agro Nusantara	49,00%	28.420.000.000	-	-	-	28.420.000.000	*c) PT Pupuk Agro Nusantara*
d) PT Kalimantan Agro Nusantara	41,07%	109.870.000.000	-	-	64.031.815.504	173.901.815.504	*d) PT Kalimantan Agro Nusantara*
e) PT Langkat Nusantara Kepong	40,00%	20.000.000.000	-	(42.383.736.738)	678.617.505.768	656.233.769.030	*e) PT Langkat Nusantara Kepong*
f) PT Madec Nusa Riau	40,00%	5.064.800.000	-	-	(5.064.800.000)	-	*f) PT Madec Nusa Riau*
g) PT Applied Agricultural Resources Nusantara	35,00%	3.500.000.000	-	-	(1.556.011.991)	1.943.988.009	*g) PT Applied Agricultural Resources Nusantara*
h) Hamburg Indonesische Import GmbH	33,07%	3.841.375.680	-	-	-	3.841.375.680	*h) Hamburg Indonesische Import GmbH*
i) PT Rolas Nusantara Medika	32,99%	20.404.000.000	-	(679.418.936)	59.602.056.306	79.326.637.370	*i) PT Rolas Nusantara Medika*
j) PT Nusantara Sebelas Medika	32,80%	16.842.000.000	-	(1.095.048.932)	43.880.621.607	59.627.572.675	*j) PT Nusantara Sebelas Medika*
k) PT Nusantara Medika Utama	32,55%	11.219.000.000	-	(12.164.032.265)	134.782.013.094	133.836.980.829	*k) PT Nusantara Medika Utama*
l) PT Perkebunan Agrintara	30,50%	46.923.076.000	-	-	(46.923.076.000)	-	*l) PT Perkebunan Agrintara*
m) PT Perkebunan Mitra Ogan	26,42%	35.130.000.000	-	-	(35.130.000.000)	-	*m) PT Perkebunan Mitra Ogan*
n) PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial	25,00%	1.250.000.000	-	-	(1.250.000.000)	-	*n) PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial*
o) PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis	25,00%	1.250.000.000	-	-	(1.250.000.000)	-	*o) PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis*
p) PT Deli Megapolitan Kawasan Industri	25,00%	1.250.000.000	-	-	(1.250.000.000)	-	*p) PT Deli Megapolitan Kawasan Industri*
Total		**331.068.234.816**	-	**(56.932.615.371)**	**964.210.831.877**	**1.238.346.451.322**	***Total***
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai:							*Allowance for impairment losses:*
PT Pupuk Agro Nusantara	49,00%	(1.482.018.000)	-	-	-	(1.482.018.000)	*PT Pupuk Agro Nusantara*
Hamburg Indonesische Import GmbH	33,07%	(3.841.375.680)	-	-	-	(3.841.375.680)	*Hamburg Indonesische Import GmbH*
Total penyisihan atas kerugian penurunan nilai		(5.323.393.680)	-	-	-	(5.323.393.680)	*Total allowance for impairment losses*
Neto		**325.744.841.136**	**-**	**(56.932.615.371)**	**964.210.831.877**	**1.233.023.057.642**	***Net***
Metode nilai wajar							***Fair value method***
a) PT Eco Plywood Indonesia	16,39%	525.000.000	-	-	-	525.000.000	*a) PT Eco Plywood Indonesia*
b) PT Padasa Enam Utama	15,00%	15.000.000.000	-	-	-	15.000.000.000	*b) PT Padasa Enam Utama*
c) PT Siak Prima Nusantara	15,00%	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	*c) PT Siak Prima Nusantara*
d) PT Industri Gula Nusantara	14,61%	52.370.000.000	-	-	(40.972.000.000)	11.398.000.000	*d) PT Industri Gula Nusantara*
e) PT Mitra BUMNDes Nusantara	10,00%	10.000.000.000	-	-	-	10.000.000.000	*e) PT Mitra BUMNDes Nusantara*
f) PT Pertamina Bina Medika IHC	9,30%	411.076.000.000	-	-	298.723.279.105	709.799.279.105	*f) PT Pertamina Bina Medika IHC*
g) PT Primanusa Energi Lestari	9,09%	400.000.000	-	-	-	400.000.000	*g) PT Primanusa Energi Lestari*
h) PT Jasamarga Restarea Batang	2,50%	2.122.420.700	-	-	(1.323.420.700)	799.000.000	*h) PT Jasamarga Restarea Batang*
i) PT Kawasan Industri Terpadu Batang	1,22%	12.500.000.000	-	-	(802.157.000)	11.697.843.000	*i) PT Kawasan Industri Terpadu Batang*
j) PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	1,21%	187.500.000.000	-	-	(187.500.000.000)	-	*j) PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia*
k) PT Manajemen Sumber Daya Manusia Global	0,00%	150.000.000	-	-	-	150.000.000	*k) PT Manajemen Sumber Daya Manusia Global*
l) PT Tiga Mutiara Nusantara	18,14%	3.653.874.000	-	-	(312.852.311)	3.341.021.689	*l) PT Tiga Mutiara Nusantara*
Total		**698.297.294.700**	**-**	-	**67.812.849.094**	**766.110.143.794**	***Total***

12. INVESTASI SAHAM – NETO (lanjutan) / *12. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK – NET (continued)*

Perusahaan	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan/ *Acquisition cost*	Penambahan (pengurangan)/ *Additions (deduction)*	Bagian dividen/ *Dividend share*	Akumulasi bagian atas laba (rugi) neto dan penghasilan komprehensif lainnya/ *Equity in net earnings (loss) and comprehensive income*	Total Kepemilikan akhir tahun/ *Total investment at year end*	*Companies*
2023 (lanjutan)							***2023 (continued)***
Metode nilai wajar (Lanjutan)							***Fair value method (continued)***
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai:							*Allowance for impairment losses:*
PT Mitra BUMNDes Nusantara	10,00%	(10.000.000.000)	-	-	-	(10.000.000.000)	*PT Mitra BUMNDes Nusantara*
PT Eco Plywood Indonesia	16,39%	(525.000.000)	-	-	-	(525.000.000)	*PT Eco Plywood Indonesia*
PT Primanusa Energi Lestari	9,09%	(400.000.000)	-	-	-	(400.000.000)	*PT Primanusa Energi Lestari*
PT Siak Prima Nusantara	15,00%	(3.000.000.000)	-	-	-	(3.000.000.000)	*PT Siak Prima Nusantara*
PT Manajemen Sumber Daya Manusia Global	0,00%	-	-	-	(150.000.000)	(150.000.000)	*PT Manajemen Sumber Daya Manusia Global*
Total penyisihan atas kerugian penurunan nilai		(13.925.000.000)	-	-	(150.000.000)	(14.075.000.000)	*Total allowance for impairment losses*
Neto		**684.372.294.700**	**-**	**-**	**67.662.849.094**	**752.035.143.794**	***Net***
Total investasi saham - neto		**1.010.117.135.836**	**-**	**(56.932.615.371)**	**1.031.873.680.971**	**1.985.058.201.436**	***Total investment in share of stock - net***

Perusahaan	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan/ *Acquisition cost*	Penambahan (pengurangan)/ *Additions (deduction)*	Bagian dividen/ *Dividend share*	Akumulasi bagian atas laba (rugi) neto dan penghasilan komprehensif lainnya/ *Equity in net earnings (loss) and comprehensive income*	Total Kepemilikan akhir tahun/ *Total investment at year end*	*Companies*
2022							***2022***
Metode ekuitas							***Equity method***
a) PT Sinkona Indonesia Lestari	49,00%	11.403.983.136	-	-	78.527.284.784	89.931.267.920	*a) PT Sinkona Indonesia Lestari*
b) PT Propernas Nusa Dua	49,00%	14.700.000.000	-	-	(5.460.033.489)	9.239.966.511	*b) PT Propernas Nusa Dua*
c) PT Pupuk Agro Nusantara	49,00%	28.420.000.000	-	-	-	28.420.000.000	*c) PT Pupuk Agro Nusantara*
d) PT Kalimantan Agro Nusantara	41,07%	109.870.000.000	-	-	33.785.049.396	143.655.049.396	*d) PT Kalimantan Agro Nusantara*
e) PT Langkat Nusantara Kepong	40,00%	20.000.000.000	-	(40.000.000.000)	531.916.661.393	511.916.661.393	*e) PT Langkat Nusantara Kepong*
f) PT Madec Nusa Riau	40,00%	5.064.800.000	-	-	(5.064.800.000)	-	*f) PT Madec Nusa Riau*
g) PT Applied Agricultural Resources Nusantara	35,00%	3.500.000.000	-	-	(1.556.011.991)	1.943.988.009	*g) PT Applied Agricultural Resources Nusantara*
h) Hamburg Indonesische Import GmbH	33,07%	3.841.375.680	-	-	-	3.841.375.680	*h) Hamburg Indonesische Import GmbH*
i) PT Rolas Nusantara Medika	32,99%	20.404.000.000	-	(3.983.034.182)	56.414.921.877	72.835.887.695	*i) PT Rolas Nusantara Medika*
j) PT Nusantara Sebelas Medika	32,80%	16.842.000.000	-	(6.916.435.511)	30.882.599.854	40.808.164.343	*j) PT Nusantara Sebelas Medika*
k) PT Nusantara Medika Utama	32,55%	11.219.000.000	-	(12.534.799.485)	116.692.207.270	115.376.407.785	*k) PT Nusantara Medika Utama*
l) PT Perkebunan Agrintara	30,50%	46.923.076.000	-	-	(46.923.076.000)	-	*l) PT Perkebunan Agrintara*
m) PT Tiga Mutiara Nusantara	27,21%	3.653.874.000	-	-	1.667.465.583	5.321.339.583	*m) PT Tiga Mutiara Nusantara*
n) PT Perkebunan Mitra Ogan	26,42%	35.130.000.000	-	-	(22.295.837.270)	12.834.162.730	*n) PT Perkebunan Mitra Ogan*
o) PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial	25,00%	1.250.000.000	-	-	(1.250.000.000)	-	*o) PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial*
p) PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis	25,00%	1.250.000.000	-	-	(1.250.000.000)	-	*p) PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis*
q) PT Deli Megapolitan Kawasan Industri	25,00%	1.250.000.000	-	-	(1.250.000.000)	-	*q) PT Deli Megapolitan Kawasan Industri*
Total		**334.722.108.816**	**-**	**(63.434.269.178)**	**764.836.431.407**	**1.036.124.271.045**	***Total***
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai:							*Allowance for impairment losses:*
PT Pupuk Agro Nusantara	49,00%	(1.482.018.000)	-	-	-	(1.482.018.000)	*PT Pupuk Agro Nusantara*
Hamburg Indonesische Import GmbH	33,07%	(3.841.375.680)	-	-	-	(3.841.375.680)	*Hamburg Indonesische Import GmbH*
Total penyisihan atas kerugian penurunan nilai		(5.323.393.680)					*Total allowance for impairment losses*
Neto		**329.398.715.136**	**-**	**(63.434.269.178)**	**764.836.431.407**	**1.030.800.877.365**	***Net***

12. INVESTASI SAHAM – NETO (lanjutan)

12. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK – NET (continued)

Perusahaan	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Biaya perolehan/ Acquisition cost	Penambahan (pengurangan)/ Additions (deduction)	Bagian dividen/ Dividend share	Akumulasi bagian atas laba (rugi) neto dan penghasilan komprehensif lainnya/ Equity in net earnings (loss) and comprehensive income	Total Kepemilian akhir tahun/ Total investment at year end	*Companies*
2022							***2022***
Metode nilai wajar							***Fair value method***
a) PT Eco Plywood Indonesia	16,39%	525.000.000	-	-	-	525.000.000	*a) PT Eco Plywood Indonesia*
b) PT Padasa Enam Utama	15,00%	15.000.000.000	-	-	-	15.000.000.000	*b) PT Padasa Enam Utama*
c) PT Siak Prima Nusantara	15,00%	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	*c) PT Siak Prima Nusantara*
d) PT Industri Gula Nusantara	14,61%	52.370.000.000	-	-	1.298.000.000	53.668.000.000	*d) PT Industri Gula Nusantara*
e) PT Mitra BUMNDes Nusantara	10,00%	10.000.000.000	-	-		10.000.000.000	*e) PT Mitra BUMNDes Nusantara*
f) PT Pertamina Bina Medika IHC	9,30%	411.076.000.000	-	-	251.590.407.622	662.666.407.622	*f) PT Pertamina Bina Medika IHC*
g) PT Primanusa Energi Lestari	9,09%	400.000.000	-	-		400.000.000	*g) PT Primanusa Energi Lestari*
h) PT Bursa Perdagangan Berjangka Indonesia	3,45%	3.100.000.000	(3.100.000.000)	-		-	*h) PT Bursa Perdagangan Berjangka Indonesia*
i) PT Jasamarga Restarea Batang	2,50%	2.122.420.700	-	-	(436.420.700)	1.686.000.000	*i) PT Jasamarga Restarea Batang*
j) PT Kawasan Industri Terpadu Batang	1,22%	4.500.000.000	8.000.000.000		1.195.415.000	13.695.415.000	*j) PT Kawasan Industri Terpadu Batang*
k) PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	1,21%	187.500.000.000	-	-	(187.500.000.000)	-	*k) PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia*
l) PT Manajemen Sumber Daya Manusia Global	0,00%	150.000.000	-	-	-	150.000.000	*l) PT Manajemen Sumber Daya Manusia Global*
m) PT Commodities New York	0,00%	42.111.503	(42.111.503)		-	-	*m) PT Commodities New York*
Total		**689.785.532.203**	**4.857.888.497**	**-**	**66.147.401.922**	**760.790.822.622**	***Total***
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai:							*Allowance for impairment losses:*
PT Mitra BUMNDes Nusantara	10,00%	(10.000.000.000)	-	-	-	(10.000.000.000)	*PT Mitra BUMNDes Nusantara*
PT Commodities New York	0,00%	(42.111.503)	42.111.503	-	-	-	*PT Commodities New York*
PT Eco Plywood Indonesia	16,39%	(525.000.000)	-	-	-	(525.000.000)	*PT Eco Plywood Indonesia*
PT Primanusa Energi Lestari	9,09%	(400.000.000)	-	-	-	(400.000.000)	*PT Primanusa Energi Lestari*
PT Bursa Perdagangan Berjangka Indonesia	3,45%	(3.100.000.000)	3.100.000.000	-	-	-	*PT Bursa Perdagangan Berjangka Indonesia*
PT Siak Prima Nusantara	15,00%	(3.000.000.000)	-	-	-	(3.000.000.000)	*PT Siak Prima Nusantara*
Total penyisihan atas kerugian penurunan nilai		(17.067.111.503)	3.142.111.503	-	-	(14.075.000.000)	*Total allowance for impairment losses*
Neto		**672.718.420.700**	**8.000.000.000**	**-**	**66.147.401.922**	**746.865.822.622**	***Net***
Total investasi saham - neto		**1.002.117.135.836**	**8.000.000.000**	**(63.434.269.178)**	**830.983.833.329**	**1.777.666.699.987**	***Total investment in share of stock - net***

12. INVESTASI SAHAM – NETO (lanjutan)

Metode ekuitas

a) PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)

Pada tahun 1986, PTPN I (Ex PTPN VIII), Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL). SIL berkedudukan di Subang dan bergerak dalam bidang usaha pengolahan kina.

b) PT Propernas Nusa Dua (PND)

Pada tahun 2014, PTPN I (Ex PTPN II), Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Propernas Nusa Dua (PND). PND berkedudukan di Medan dan bergerak dalam bidang usaha properti.

c) PT Pupuk Agro Nusantara (PAN)

Pada tahun 2010, PTPN IV (PTPN IV dan Ex PTPN V), Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Pupuk Agro Nusantara (PAN) dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 34,00% dan 15,00%. PAN berkedudukan di kota Medan, Sumatera Utara dan bergerak dalam bidang industri pengolahan pupuk.

Sesuai dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PAN tentang Keberlanjutan Usaha PT Pupuk Agro Nusantara (PAN) pada tanggal 3 Februari 2017, Pemegang Saham memutuskan untuk mengambil opsi likuidasi PAN dengan mempertimbangkan: (i) hasil kajian yang dilakukan oleh Direksi PAN melalui surat No. 001/PAN/DU/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 perihal Laporan Kajian Prospek Bisnis PAN, dimana prospek bisnis PAN yaitu melakukan pengantongan dan manajemen pergudangan di wilayah Sumatera Utara, didapatkan hasil tidak layak; (ii) Direksi PAN belum menemukan bidang usaha lain yang cocok dengan bisnis inti atau bisnis penunjang serta tidak duplikasi dengan bisnis masing-masing Pemegang Saham sebagai upaya untuk mempertahankan sinergi pembentukan kerjasama usaha melalui PAN.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini proses likuidasi PAN masih berlangsung.

12. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK – NET (continued)

Equity method

a) PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)

In 1986, PTPN I (Ex PTPN VIII), a Subsidiary, has investment in shares of stock of PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL). SIL is domiciled in Subang and engaged in the processing of quinine.

b) PT Propernas Nusa Dua (PND)

In 2014, PTPN I (Ex PTPN II), a Subsidiary, has investment in shares of stock of PT Propernas Nusa Dua (PND). PND is domiciled in Medan and engaged in the property business.

c) PT Pupuk Agro Nusantara (PAN)

In 2010, PTPN IV (PTPN IV and Ex PTPN V), both are Subsidiaries, have investment in shares of stock of PT Fertilizer Agro Nusantara (PAN) representing 34.00% and 15.00% of ownership, respectively. PAN is domiciled in Medan, North Sumatera and engaged in fertilizer manufacturing industry.

Based on the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PAN on the continuity of PT Pupuk Agro Nusantara (PAN) operation on February 3, 2017, the shareholders decided to liquidate PAN considering: (i) the result of PAN Directors' assessment through letter No. 001/PAN/DU/I/2017 on January 5, 2017 in regard of PAN Business Prospects Assessment Report, whereby the business prospects of PAN which are packaging and warehouse management in Sumatera Utara, does not have feasible result; (ii) Directors of PAN have not found other business which fit with the main or supporting business which do not duplicate with business from each Shareholders as an effort to maintain business cooperation establishment through PAN.

Until the date of released audited financial statement, the liquidation process are still in progress.

12. INVESTASI SAHAM – NETO (lanjutan)

Metode ekuitas (lanjutan)

d) PT Langkat Nusantara Kepong (LNK)

Pada tahun 2009, PTPN I (Ex PTPN II), Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Langkat Nusantara Kepong (LNK). LNK berkedudukan di Medan dan bergerak dalam bidang usaha perkebunan dan produksi karet dan kelapa sawit.

e) PT Industri Gula Nusantara (IGN)

Pada tahun 2004, PTPN I (Ex PTPN IX), Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Industri Gula Nusantara (IGN) sebanyak 52.370 lembar saham dengan nilai Rp52.370.000.000 dan persentase kepemilikan sebesar 35,57%. Selanjutnya pada tahun 2018, PTPN IX, PT Bumi Citpa Niaga, PT Capital Inti Gula dan PT Multi Manis Mandiri telah menandatangani perjanjian pengambilan sham bersyarat, sehingga kepemilikan PTPN IX di IGN menjadi 14,61%. IGN berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah dan bergerak dalam bidang usaha perdagangan gula dan telah berhenti beroperasi.

f) PT Applied Agricultural Resources Nusantara (AARN)

Pada tahun 2013, PTPN I (Ex PTPN II), Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Applied Agricultural Resources Nusantara (AARN). AARN berkedudukan di Jakarta dan bergerak dalam bidang usaha pembibitan kelapa sawit.

12. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK – NET (continued)

Equity method (continued)

d) PT Langkat Nusantara Kepong (LNK)

In 2009, PTPN I (Ex PTPN II), a Subsidiary, has investment in shares of stock of PT Langkat Nusantara Kepong (LNK). LNK is domiciled in Medan and engaged in the plantation and production of rubber and palm oil.

e) PT Industri Gula Nusantara (IGN)

In 2004, PTPN I (Ex PTPN IX), a Subsidiary, invested shares in PT Industri Gula Nusantara (IGN) totaling 52,370 shares with a value of Rp52,370,000,000 and an ownership percentage of 35.57%. Subsequently, in 2018, PTPN IX, PT Bumi Cipta Niaga and PT Multi manis Mandiri have signed share take over conditional agreemnt, therefore the ownership of PTPN IX in IGN become 14.61%. IGN is domiciled in Kendal, Central Java and engaged in sugar trading business and has ceased its operations.

f) PT Applied Agricultural Resources Nusantara (AARN)

In 2013, PTPN I (Ex PTPN II), a Subsidiary, has investment in shares of stock of PT Applied Agricultural Resources Nusantara (AARN). AARN is domiciled in Jakarta and engaged in palm oil seedling.

12. INVESTASI SAHAM – NETO (lanjutan)

Metode ekuitas (lanjutan)

g) PT Nusantara Medika Utama (NMU)

Pada tahun 2013, PTPN I (eks PTPN X) melakukan investasi saham pada PT Nusantara Medika Utama (“NMU”). NMU berkedudukan di Mojokerto - Jawa Timur dan bergerak dalam bidang usaha jasa pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Saham Bersyarat tanggal 30 Juni 2020, PTPN I (eks PTPN X) melepas 67,30% kepemilikan saham di NMU sehingga kepemilikan PTPN I (eks PTPN X) di NMU menjadi 32,55%.

h) PT Nusantara Sebelas Medika (NSM)

Pada tahun 2013, PTPN XI (eks PTPN XI) melakukan investasi saham pada PT Nusantara Sebelas Medika (”NSM”). NSM berkedudukan di Surabaya - Jawa Timur dan bergerak dalam bidang usaha jasa pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Saham Bersyarat tanggal 30 Juni 2020, PTPN XI (eks PTPN XI) melepas 67,20% kepemilikan saham di NSM sehingga kepemilikan PTPN XI (eks PTPN XI) di NSM menjadi 32,80%.

i) PT Rolas Nusantara Medika (RNM)

Pada tahun 2012, Perusahaan PTPN I (eks PTPN XII) melakukan investasi saham pada PT Rolas Nusantara Medika (“RNM”). RNM berkedudukan di Jember - Jawa Timur dan bergerak dalam bidang usaha jasa pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Saham Bersyarat tanggal 30 Juni 2020, PTPN I (eks PTPN XII) 67,01% kepemilkan saham di RNM sehingga kepemilikan PTPN I (eks PTPN XII) di RNMe menjadi 32,99%.

12. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK – NET (continued)

Equity method (continued)

g) PT Nusantara Medika Utama (NMU)

In 2013, PTPN I (ex PTPN X) has investment in shares of stock of PT Nusantara Medika Utama ("NMU"). NMU is domiciled in Mojokerto - Jawa Timur and engaged in health services.

Based on the Conditional Share Acquisition Agreement dated 30 June 2020, PTPN I (ex PTPN X) released 67.30% ownership of shares in NMU so that ownership of PTPN I (ex PTPN X) in NMU become 32.55%.

h) PT Nusantara Sebelas Medika (NSM)

In 2013, the Company (ex PTPN XI) has investment in shares of stock of PT Nusantara Sebelas Medika ("NSM"). NSM is domiciled in Surabaya - Jawa Timur and engaged in health services.

Based on the Conditional Share Acquisition Agreement dated 30 June 2020, PTPN XI (ex PTPN XI) released 67.20% ownership of shares in NSM so that ownership of PTPN XI (ex PTPN XI) become 32.80%.

i) PT Rolas Nusantara Medika (RNM)

In 2012, the Company PTPN I (ex PTPN XII) has investment in shares of stock of PT Rolas Nusantara Medika ("RNM"). RNMe is domiciled in Jember - Jawa Timur and engaged in health services.

Based on the Conditional Share Acquisition Agreement dated June 30, 2020, PTPN I (ex PTPN XII) released 67.01% ownership of shares in RNM so that ownership of PTPN I (ex PTPN XII) become 32.99%.

12. INVESTASI SAHAM – NETO (lanjutan)

Metode ekuitas (lanjutan)

j) Hamburg Indonesische Import GmbH (Indoham)

Perusahaan dan Entitas Anak, PTPN I dan PTPN IV (Ex PTPN II, Ex PTPN IV, Ex PTPN V, Ex PTPN VI, Ex PTPN VII, Ex PTPN VIII, Ex PTPN IX dan Ex PTPN XIII) melakukan investasi saham pada Hamburg Indonesische Import GmbH (Indoham) dengan total persentase kepemilikan sebesar 20,80%. Indoham bergerak dalam bidang usaha pemasaran dan perdagangan komoditi perkebunan dan bertempat kedudukan di Hamburg, Jerman. Mengingat kondisi kesulitan keuangan Indoham, Perusahaan dan Entitas Anak yang memiliki penyertaan pada Indoham telah membuat penyisihan atas penurunan nilai penyertaan dan uang muka pemesanan saham pada Indoham.

k) PT Tiga Mutiara Nusantara (TMN)

Pada tahun 2006, Perusahaan melakukan investasi saham pada PT Tiga Mutiara Nusantara (TMN). TMN berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dan bergerak dalam bidang usaha perkebunan dan produksi kelapa sawit.

l) PT Perkebunan Mitra Ogan (PMO)

Pada tahun 1988, Perusahaan melakukan investasi saham pada PT Perkebunan Mitra Ogan (PMO). PMO berkedudukan di Palembang dan bergerak dalam bidang usaha perkebunan dan produksi kelapa sawit.

m) PT Kalimantan Agro Nusantara (KAN)

PTPN IV (Ex PTPN XIII), Entitas Anak, melakukan investas saham pada PT Kalimantan Agro Nusantara (KAN). KAN berkedudukan di Kutai Timur dan bergerak di bidang usaha Perkebunan dan produksi kelapa sawit.

n) PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)

Pada tahun 2021, PTPN I (Ex PTPN IX), Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Kawasan Industri Terpadu (KITB). KITB berkedudukan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dan bergerak dalam bidang usaha pengelolaan kawasan industri.

12. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK – NET (continued)

Equity method (continued)

j) Hamburg Indonesische Import GmbH (Indoham)

The Company and Subsidiaries, PTPN I and PTPN IV (Ex PTPN II, Ex PTPN IV, Ex PTPN V, Ex PTPN VI, Ex PTPN VII, Ex PTPN VIII, Ex PTPN IX and Ex PTPN XIII) have investment in shares of stock of Hamburg Indonesische Import GmbH (Indoham) with total ownership percentage of 20.80%. Indoham is engaged in marketing and trading of plantation commodities and domiciled in Hamburg, Germany. Considering the financial difficulties condition of Indoham, the Company and Subsidiaries have made a provision for impairment of their investment and advance reservation on Indoham shares.

k) PT Tiga Mutiara Nusantara (TMN)

In 2006, the Company has investment in shares of stock of PT Tiga Mutiara Nusantara (TMN). TMN is domiciled in Serdang Bedagai, the Province of North Sumatra and engaged in plantation and production of palm oil.

l) PT Perkebunan Mitra Ogan (PMO)

In 1988, the Company has investment in shares of stock of PT Perkebunan Mitra Ogan (PMO). PMO is domiciled in Palembang and engaged in plantation and palm oil production.

m) PT Kalimantan Agro Nusantara (KAN)

PTPN IV (Ex PTPN XIII), a Subsidiary, has ivestment in shares of stock of PT Kalimantan Agro Nusantara (KAN). KAN is domiciled in Kutai Timur and engaged in Plantation and production of palm oil.

n) PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)

In 2021, PTPN I (Ex PTPN IX), a Subsidiary, has investment in shares of stock of PT Kawasan Industri Terpadu (KITB). KITB is domiciled in Batang Regency, Central Java and engaged in development of industrial area.

12. INVESTASI SAHAM – NETO (lanjutan)

Metode nilai wajar

a) PT Eco Plywood Indonesia (EPI)

Pada tahun 2011, PTPN I, Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Eco Plywood Indonesia (EPI). EPI berkedudukan di Aceh Tamiang dan bergerak di bidang usaha produksi kayu lapis berbahan baku batang kelapa sawit dan kayu.

b) PT Bursa Perdagangan Berjangka Indonesia (BPBI)

Pada tahun 1999, Perusahaan melakukan investasi saham pada PT Bursa Perdagangan Berjangka Indonesia (BPBI). BPBI berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang usaha bursa berjangka komoditi.

c) PT Primanusa Energi Lestari (PEL)

Pada tahun 2011, PTPN I, Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Primanusa Energi Lestari (PEL). PEL berkedudukan di Aceh Tamiang dan bergerak di bidang usaha pembangkit listrik tenaga biomas sawit.

d) PT Padasa Enam Utama (PEU)

Pada tahun 2000, PTPN IV, Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Padasa Enam Utama (PEU). PEU berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang berlokasi di Teluk Dalam Propinsi Sumatera Utara dan Koto Kampar, Kalianta, Provinsi Riau.

e) PT Siak Prima Nusalima (SPN)

Pada tahun 2008, PTPN IV (Ex PTPN V), Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Siak Prima Nusalima (SPN). SPN berkedudukan di Indrapura dan bergerak di bidang usaha perkebunan dan produksi kelapa sawit.

f) PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN)

Pada tahun 2017, Perusahaan melakukan investasi saham pada PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN). MBN berkedudukan di Menteng, Jakarta Pusat dan bergerak di bidang usaha perdagangan.

12. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK – NET (continued)

Fair value method

a) PT Eco Plywood Indonesia (EPI)

In 2011, PTPN I, a Subsidiary, has investment in shares of stock of PT Eco Plywood Indonesia (EPI). EPI is domiciled in Aceh Tamiang and engaged in production of plywood made from trunk of palm oil tree and wood.

b) PT Bursa Perdagangan Berjangka Indonesia (BPBI)

In 1999, the Company has investment in shares of stock of PT Bursa Perdagangan Berjangka Indonesia (BPBI). BPBI is domiciled in Jakarta and engaged in commodity futures exchanges.

c) PT Primanusa Energi Lestari (PEL)

In 2011, PTPN I, a Subsidiary, has investment in shares of stock of PT Primanusa Energi Lestari (PEL). PEL is domiciled in Aceh Tamiang and is engaged in power generation bio oil mas.

d) PT Padasa Enam Utama (PEU)

In 2000, PTPN IV, a Subsidiary has investment in shares of stock of PT Padasa Enam Utama (PEU). PEU is domiciled in Jakarta and engaged in plantations and palm oil industry which are located in Teluk Dalam, North Sumatra and Koto Kampar, Kalianta, Riau.

e) PT Siak Prima Nusalima (SPN)

In 2008, PTPN IV (Ex PTPN V), a Subsidiary, has investment in shares of stock of PT Siak Prima Nusalima (SPN). SPN is domiciled in Indrapura and engaged in plantation and production of palm oil.

f) PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN)

In 2017, the Company has investment in shares of stock PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN). MBN is domiciled in Menteng, Central Jakarta and is engaged in the trading business.

12. INVESTASI SAHAM – NETO (lanjutan)

Metode nilai wajar (lanjutan)

g) PT Pertamina Bina Medika (PBM)

Berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Saham Bersyarat tanggal 30 Juni 2020, PTPN I (Ex PTPN X) memperoleh kepemilikan 5,62% saham di PBM-IHC, (Ex PTPN XI) memperoleh kepemilikan 1,94% saham di PT Pertamina Bina Medika (PBM), dan (Ex PTPN XII) memperoleh kepemilikan 1,74% saham di PBM. PBM berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang jasa kesehatan/rumah sakit.

h) PT Jasamarga Rest Area Batang (JRAB)

Pada tahun 2019, PTPN I (Ex PTPN IX), Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Jasamarga Rest Area Batang (JRAB). JRAB berkedudukan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dan bergerak dalam bidang usaha real estate, stasiun pengisian bahan bakar, restoran, wisata agro, taman rekreasi, dan daya tarik wisata buatan.

i) PT Commodities New York (CNY)

Pada tahun 1998, PTPN I (Ex PTPN II), Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Commodities New York (CNY). Entitas anak telah membuat penyisihan atas penurunan nilai seluruh penyertaan pada CNY.

j) PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis (DMKB)

Pada tahun 2020, PTPN I (Ex PTPN II), Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR). DMKR berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dan bergerak dalam bidang usaha properti.

k) PT Deli Megapolitan Kawasan Industri (DMKI)

Pada tahun 2020, PTPN I (Ex PTPN II), Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Deli Megapolitan Kawasan Industri (DMKI). DMKI berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dan bergerak dalam bidang usaha properti.

12. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK – NET (continued)

Fair value method (continued)

g) PT Pertamina Bina Medika (PBM)

Based on the Conditional Share Acquisition Agreement dated 30 June 2020, PTPN I (Ex PTPN X) acquired 5.62% ownership of shares in PBM-IHC, (Ex PTPN XI) acquired 1.94% ownership of shares in Pertamina Bina Medika and (Ex PTPN XII) acquired 1.74% ownership of shares in PBM. MBN is domiciled in Jakarta and is engaged in health services/hospital.

h) PT Jasamarga Rest Area Batang (JRAB)

In 2021, PTPN I (Ex PTPN IX), a Subsidiary, has investment in shares of stock of PT Jasamarga Rest Area Batang (JRAB). JRAB is domiciled in Batang Regency, Central Java and engaged in real estate, gas stations, restaurants, agro-tourism, recreational parks and artificial tourist attractions.

i) PT Commodities New York (CNY)

In 1998, PTPN II, a Subsidiary, has investment in shares of stock of PT Commodities New York (CNY). The subsidiary has made a provision for impairment of investment in CNY.

j) PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis (DMKB)

In 2020, PTPN II, a Subsidiary, has investment in shares of stock of Deli Megapolitan Kawasan Bisnis (DMKB). DMKB is domiciled in Medan, North Sumatera and engaged in property.

k) PT Deli Megapolitan Kawasan Industri (DMKI)

In 2020, PTPN II, a Subsidiary, has investment in shares of stock of Deli Megapolitan Kawasan Bisnis (DMKB). DMKB is domiciled in Medan, North Sumatera and engaged in property.

12. INVESTASI SAHAM – NETO (lanjutan)

Metode nilai wajar (lanjutan)

l) PT Manajemen Sumber Daya Manusia Global (MSDMG)

Pada tahun 2022, LPPAN, Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Manajemen Sumber Daya Manusia Global (MSDMG). MSDMG berkedudukan di kota Yogyakarta dan bergerak dalam bidang usaha jasa sertifikasi profesi.

m) PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)

Pada tahun 2015, PTPN I (Ex PTPN VIII), Entitas Anak, melakukan investasi saham pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang merupakan perusahaan patungan antara PTPN VIII, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. PSBI berkedudukan di Jakarta dan bergerak dalam bidang transportasi.

12. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK – NET (continued)

Fair value method (continued)

l) PT Manajemen Sumber Daya Manusia Global (MSDMG)

In 2022, LPPAN, a Subsidiary, has investment in shares of stock of PT Manajemen Sumber daya Manusia Global (MSDMG). MSDMD is domiciled in Yogyakarta and engaged in professional certification service business sector.

m) PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)

In 2015, PTPN I (Ex PTPN VIII), a Subsidiary, has investment in shares of stock of PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI is a joint venture between PTPN VIII, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) and PT Jasa Marga (Persero) Tbk. PSBI is domiciled in Jakarta and engaged in transportation.

13. ASET TETAP - NETO / *13. FIXED ASSETS - NET*

2023	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	*2023*
Harga Perolehan/ Nilai Revaluasian						*Historical Cost/ Revaluation Amount*
Tanaman produktif						*Bearer plants*
Tanaman menghasilkan	42.176.636.426.425	158.298.382.885	(1.074.130.919.184)	1.202.208.340.490	42.463.012.230.616	*Mature plants*
Tanaman belum menghasilkan	5.098.144.347.344	2.450.031.421.127	(196.081.848.956)	(1.318.503.104.672)	6.033.590.814.843	*Immature plants*
Tanah	56.007.981.682.995	701.251.151.851	(1.824.188.303)	(332.152.673.207)	56.375.255.973.336	*Land*
Bangunan dan prasarana	12.054.851.473.073	409.945.349.691	(25.005.454.036)	293.478.048.996	12.733.269.417.724	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	27.150.529.274.912	1.028.242.095.693	(116.874.563.943)	1.142.760.988.462	29.204.657.795.124	*Machinery and equipments*
Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya	1.408.003.497.540	96.148.713.103	(35.608.323.553)	2.162.673.781	1.470.706.560.871	*Vehicles and other transportation equipments*
Peralatan pertanian, kesehatan dan kantor	2.391.602.329.232	70.203.669.406	(20.100.220.217)	35.708.681.838	2.477.414.460.259	*Farming, health and office equipments*
Instalasi pembibitan	79.054.156.468	7.185.769.670	-	(2.904.460.000)	83.335.466.138	*Nursery installation*
Aset tetap lain-lain	69.460.068.982	8.819.996.903	-	284.618.977	78.564.684.862	*Other fixed assets*
Aset dalam penyelesaian	2.300.211.032.549	2.091.472.384.668	(126.760.463.255)	(1.408.628.822.921)	2.856.294.131.041	*Construction in progress*
Total Nilai Tercatat	**148.736.474.289.520**	**7.021.598.934.997**	**(1.596.385.981.447)**	**(385.585.708.256)**	**153.776.101.534.814**	***Total carrying value***
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan Langsung						*Direct Ownership*
Tanaman menghasilkan	(14.240.327.223.116)	(1.946.573.231.387)	870.836.145.588	8.360.530.649	(15.307.703.778.266)	*Mature plants*
Bangunan dan prasarana	(7.047.575.956.168)	(596.405.907.271)	21.345.873.716	(11.486.801.216)	(7.634.122.790.939)	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	(16.426.718.569.107)	(1.299.142.739.122)	116.874.563.943	(19.285.715.778)	(17.628.272.460.064)	*Machinery and equipment*
Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya	(1.164.717.797.110)	(89.025.527.227)	33.648.465.555	(406.200.682)	(1.220.501.059.464)	*Vehicle and other transportation equipments*
Peralatan pertanian, kesehatan dan kantor	(1.994.754.190.072)	(124.029.030.587)	15.182.794.418	(1.564.172.728)	(2.105.164.598.969)	*Farming, health and office equipments*
Instalasi pembibitan	(62.066.538.266)	(1.603.104.906)	-	-	(63.669.643.172)	*Nursery installation*
Aset tetap lain-lain	(38.172.010.106)	(15.412.082.561)	-	216.730.210	(53.367.362.457)	*Other fixed assets*
Total akumulasi penyusutan	**(40.974.332.283.945)**	**(4.072.191.623.061)**	**1.057.887.843.220**	**(24.165.629.545)**	**(44.012.801.693.331)**	***Total accumulated depreciation***
Akumulasi penurunan nilai	(2.930.597.539.449)	(125.963.340.781)	198.589.833.824	6.965.219.196	(2.851.005.827.210)	*Accumulated* ***Impairment loss***
Nilai tercatat neto	**104.831.544.466.126**				**106.912.294.014.273**	***Net carrying value***

*) Reklasifikasi signifikan pada tahun 2023 terdiri dari:

- Reklasifikasi aset tetap PTPN I merupakan reklasifikasi tanah ke investasi sebagai modal disetor ke PT NDB sebesar Rp332.152.673.207
- Reklasifikasi aset tetap PTPN I merupakan reklasifikasi aset tanaman menghasilkan ke aset biologis sebesar Rp81.419.796.853

****) Significant reclassifications in 2023 consist of:***

- *Reclassification of PTPN I fixed assets is the reclassification of land to investment as paid-in capital to PT NDB amounted to Rp332.152.673.207*
- *Reclassification of PTPN I fixed assets is the reclassification of mature plantation to biological assets amounted to Rp81.419.796.853*

2022	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	*2022*
Harga Perolehan/ Nilai Revaluasian						*Historical Cost/ Revaluation Amount*
Tanaman produktif						*Bearer plants*
Tanaman menghasilkan	41.950.322.895.521	345.627.281.734	(501.398.098.246)	382.084.347.416	42.176.636.426.425	*Mature plants*
Tanaman belum menghasilkan	5.143.416.859.661	1.468.965.070.783	(299.671.137.321)	(1.214.566.445.779)	5.098.144.347.344	*Immature plants*
Tanah	55.863.484.141.278	379.782.725.554	(235.285.183.837)	-	56.007.981.682.995	*Land*
Bangunan dan prasarana	11.436.165.032.663	548.423.436.957	(48.042.148.236)	118.305.151.689	12.054.851.473.073	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	26.371.819.228.203	1.646.670.272.538	(580.379.830.062)	(287.580.395.767)	27.150.529.274.912	*Machinery and equipments*
Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya	1.395.712.836.666	21.743.395.995	(15.644.686.922)	6.191.951.801	1.408.003.497.540	*Vehicles and other transportation equipments*
Peralatan pertanian, kesehatan dan kantor	2.099.000.165.826	269.778.952.987	(7.839.035.847)	30.662.246.266	2.391.602.329.232	*Farming, health and office equipments*
Instalasi pembibitan	29.210.410.610	40.054.787.271	(1.617.599.626)	11.406.558.213	79.054.156.468	*Nursery installation*
Aset tetap lain-lain	336.338.532.781	-	(266.878.463.799)	-	69.460.068.982	*Other fixed assets*
Aset dalam penyelesaian	2.291.923.877.897	790.828.897.251	(100.910.630.065)	(681.631.112.534)	2.300.211.032.549	*Construction in progress*
Total Nilai Tercatat	**146.917.393.981.106**	**5.511.874.821.070**	**(2.057.666.813.961)**	**(1.635.127.698.695)**	**148.736.474.289.520**	***Total carrying value***
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan Langsung						*Direct Ownership*
Tanaman Menghasilkan	(12.746.401.086.457)	(1.960.741.600.107)	334.544.131.901	132.271.331.547	(14.240.327.223.116)	*Mature plants*
Bangunan dan prasarana	(6.623.940.915.259)	(488.342.238.197)	64.707.197.288		(7.047.575.956.168)	*Buildings and infrastructure*
Mesin dan peralatan	(15.458.534.393.723)	(1.592.346.612.537)	239.086.351.986	385.076.085.167	(16.426.718.569.107)	*Machinery and equipment*
Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya	(1.103.710.426.176)	(81.011.365.778)	15.023.126.064	4.980.868.780	(1.164.717.797.110)	*Vehicle and other transportation equipments*
Peralatan pertanian, kesehatan dan kantor	(1.754.611.490.831)	(270.734.370.850)	7.042.547.462	23.549.124.147	(1.994.754.190.072)	*Farming, health and office equipments*
Instalasi pembibitan	(24.746.812.090)	(38.937.325.802)	1.617.599.626	-	(62.066.538.266)	*Nursery installation*
Aset tetap lain-lain	(250.376.251.438)	-	212.204.241.332	-	(38.172.010.106)	*Other fixed assets*
Total akumulasi penyusutan	**(37.962.321.375.974)**	**(4.432.113.513.271)**	**874.225.195.659**	**545.877.409.641**	**(40.974.332.283.945)**	***Total accumulated depreciation***
Akumulasi penurunan nilai	(2.401.051.594.792)	(596.423.862.507)	66.877.917.850	-	(2.930.597.539.449)	***Accumulated Impairment loss***
Nilai tercatat neto	**106.554.021.010.340**				**104.831.544.466.126**	***Net carrying value***

*) Reklasifikasi signifikan pada tahun 2022 terdiri dari:

- Reklasifikasi aset tetap PTPN III merupakan reklasifikasi aset tanaman menghasilkan ke aset tidak lancar lain sebesar Rp468.534.206.550
- Reklasifikasi aset tetap PTPN X merupakan reklasifikasi mesin dan peralatan ke aset tidak lancar lain sebesar Rp371.433.035.513
- Reklasifikasi aset tetap PTPN XI merupakan reklasifikasi aset tanaman menghasilkan ke aset biologis sebesar Rp118.290.292.080

****) Significant reclassifications in 2023 consist of:***

- *Reclassification of PTPN III fixed assets is the reclassification of mature plantation to other non-current assets Rp468.534.206.550*
- *Reclassification of PTPN X is the reclassification of machinery and equipments to other non-current assets amounted to Rp371.433.035.513*
- *Reclassification of PTPN XI fixed assets is the reclassification of mature plantation to biological assets amounted to Rp118.290.292.080*

13. ASET TETAP – NETO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 komposisi luas areal dalam ha atas tanaman produktif - tanaman menghasilkan (TM) dan tanaman produktif - tanaman belum menghasilkan (TBM) untuk setiap jenis tanaman adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

13. FIXED ASSETS – NET (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, composition of areal in hectares (ha) of bearer plants - mature plantations and bearer plants - immature plantations for each commodities are as follows: (un-audited)

	Kelapa Sawit/ *Palm Oil*	Karet/ *Rubber*	Tebu/ *Sugarcane*	Teh/ *Tea*	Kopi/ *Coffee*	Total/ *Total*	
Tanaman menghasilkan							***Mature plantation***
31 Desember 2023	452.446	100.429	42.478	23.253	8.246	584.374	*December 31, 2023*
31 Desember 2022	455.539	106.490	37.934	23.142	7.976	593.147	*December 31, 2022*

	Kelapa Sawit/ *Palm Oil*	Karet/ *Rubber*	Tebu/ *Sugarcane*	Teh/ *Tea*	Kopi/ *Coffee*	Total/ *Total*	
Tanaman belum menghasilkan							***Immature plantation***
31 Desember 2023	100.483	4.542	10.648	384	1.033	669.352	*December 31, 2023*
31 Desember 2022	106.489	3.726	14.094	417	1.152	706.206	*December 31, 2022*

Pengurangan tanaman menghasilkan di tahun 2022 terutama termasuk penghapusan dan pemindahan tanaman menghasilkan ke kelompok aset tidak produktif yang disusutkan sekaligus pada saat pemindahan. Beban penyusutan sekaligus tersebut dilaporkan sebagai bagian dari "Rugi penghapusan tanaman" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Selain itu, termasuk pengurangan sehubungan dengan adanya konversi lahan tanaman menghasilkan Karet dan Kakao ke Tebu dan Kayu PTPN XII dengan nilai buku sebesar Rp304.069.915.685. Selanjutnya terdapat penghapusan aset tanaman akibat sudah tidak produktif pada PTPN IV dengan nilai buku sebesar Rp67.398.224.118.

The deduction of mature plantation in 2022 includes the disposal and the reclassification of mature plantation into non-productive assets which are fully depreciated at the time the reclassification is made. Depreciation expenses is recorded as part of "Loss on disposal of plantations" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. Furthermore, this includes deductions in connection with the conversion of rubber and cocoa-producing plantation land to PTPN XII's sugarcane and timber with a book value of Rp304,069,915,685. Furthermore, deduction of disposal of mature plantation on PTPN IV amounting to Rp67,398,224,118.

Pada tahun 2023, PTPN IV menerima ganti rugi atas penghapusbukuan aset kepada Kementerian PUPR atas tanah di Kebun Marjandi, Kebun Gunung Bayu dan Kebun Tinjowan yang dicatat sebagai bagian dari pendapatan operasi lain (Catatan 34).

In 2023, PTPN IV received compensation for the write-off of assets to the Ministry of PUPR for the land in Kebun Marjandi, Kebun Gunung Bayu and Kebun Tinjowan which is recorded as part of other operating income (Catatan 34).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset tetap tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp23.669 miliar dan Rp25.448 miliar.

As of December 31, 2023 and 2022, certain fixed asset are insured against losses from fire and other risks under blanket policies amounting to Rp23,669 billion and Rp25,448 billion respectively.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, mengenai nilai yang dapat diperoleh kembali pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai di atas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai aset tetap.

Based on the evaluation of the management, in connection with recoverable amount as of December 31, 2023 and 2022, management believes that the accumulated impairment is adequate to cover the impairment of fixed assets.

13. ASET TETAP – NETO (lanjutan) / *13. FIXED ASSETS – NET (continued)*

Beban penyusutan aset tetap dibebankan pada: / *Depreciation expense of fixed assets is charged to:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Beban pokok pendapatan	3.810.056.453.822	4.030.789.815.905	*Cost of revenue*
Beban umum dan administrasi	170.460.169.500	240.549.295.051	*General and administrative expenses*
Beban operasi lain	91.674.999.738	127.032.032.857	*Other operating expenses*
Total	**4.072.191.623.060**	**4.398.371.143.813**	***Total***

Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek (Catatan 18) dan utang jangka panjang (Catatan 25).

Certain fixed assets are used as collateral for the short-term bank loans (Note 18) and long-term debts (Note 25).

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam revaluasi tanah perkebunan adalah pendekatan pendapatan yang menggunakan hirarki level 3, dan untuk tanah perkotaan menggunakan pendekatan nilai pasar, yang menggunakan hirarki level 2.

The valuation approach used in the revaluation of land in plantation area is income approach, which using hierarchy level 3 and for land in urban area using market approach, which using hierarchy level 2.

Nilai wajar tanah didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh beberapa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), penilai independen yang terdaftar pada OJK. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai wajar tanah Grup berdasarkan pada laporan beberapa KJPP masing-masing adalah sebesar Rp56.375 miliar dan Rp56.007 miliar.

The fair value of the land is based on the valuation performed by by several "Kantor Jasa Penilai Publik" (KJPP), registered independent appraisers with OJK. As of December 31, 2023 and 2022, the fair value of the Group's land based on reports of some KJPP amounting to Rp56,375 billion and Rp56,007 billion respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2023, kenaikan bersih nilai revaluasi tanah sebesar Rp579 miliar (31 Desember 2022 mengalami penurunan bersih sebesar Rp116 miliar) dicatat sebagai kenaikan nilai revaluasi aset tetap, sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain.

In December 31, 2023, net increase of land revaluation amounted to Rp579 billion (December 31, 2022 net decrease amounted to Rp116 billion) recorded as increase on fixed asset revaluation, as part of other comprehensive income.

14. PROPERTI INVESTASI / *14. INVESTMENT PROPERTY*

	1 Januari 2023/ *January 1, 2023*	Kenaikan/ (penurunan) penghasilan komprehensif lain/ *Increase/ (decrease) of other comprehensive income*	Keuntungan (kerugian) dari pengukuran ulang nilai wajar *Net gain/(loss) from fair value re-measurement*	Penambahan dan reklasifikasi/ *Addition and reclassification*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Nilai wajar:						*Fair value:*
Tanah	8.274.426.858.175	66.609.345.313	240.829.629.180	(278.911.000.000)	8.302.954.832.668	*Land*
Bangunan	433.690.633.463	(47.422.431.783)	40.490.187.388	83.458.139.703	510.216.528.771	*Building*
Total	**8.708.117.491.638**	**19.186.913.530**	**281.319.816.568**	**(195.452.860.297)**	**8.813.171.361.439**	***Total***

	1 Januari 2022/ *January 1, 2022*	Kenaikan/ (penurunan) penghasilan komprehensif lain/ *Increase/ (decrease) of other comprehensive income*	Keuntungan (kerugian) dari pengukuran ulang nilai wajar *Net gain/(loss) from fair value re-measurement*	Penambahan dan Reklasifikasi/ *Addition and Reclassification*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Nilai wajar:						*Fair value:*
Tanah	7.289.251.882.077	65.000.000	985.868.974.230	(758.998.132)	8.274.426.858.175	*Land*
Bangunan	419.899.735.891	-	(7.794.470.070)	21.585.376.642	433.690.633.463	*Building*
Total	**7.709.151.617.968**	**65.000.000**	**978.074.504.160**	**20.826.378.510**	**8.708.117.491.638**	***Total***

Nilai wajar properti investasi dihasilkan menggunakan dasar yang digunakan dalam penilaian pada tanggal tersebut oleh beberapa KJPP, penilai independen. Penilaian dilakukan berdasarkan pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya penggantian masing-masing untuk aset tanah dan bangunan.

The fair values of investment properties were generated on the basis of the valuation used on that date by several KJPP, independent appraisers. The valuation is based on income approach and replacement cost approach for land assets and buildings, respectively.

Dalam mengestimasi nilai wajar properti investasi, penggunaan tertinggi dan terbaik dari properti investasi adalah penggunaan saat ini. Tidak terdapat perubahan teknik penilaian selama tahun berjalan.

In estimating the fair value of investment property, the highest and best use of investment property is current use. There were no changes in valuation techniques during the year.

Dalam mengestimasi nilai wajar properti investasi, penggunaan tertinggi dan terbaik dari properti investasi adalah penggunaan saat ini. Tidak terdapat perubahan teknik penilaian selama tahun berjalan.

In estimating the fair value of investment property, the highest and best use of investment property is current use. There were no changes in valuation techniques during the year.

Pada tanggal 31 Desember 2023, kenaikan bersih dari nilai wajar sebesar Rp281.319.816.568 (31 Desember 2022: Rp978.074.495.160) dicatat sebagai pendapatan selisih nilai wajar properti investasi, sebagai bagian dari pendapatan operasi lain (Catatan 34).

In December 31, 2023, net increase of fair value is amounted to Rp281.319.816.568 (December 31, 2022: Rp978,074,495,160) recorded as surplus of fair value of investment property as part of other income (Note 34).

Penghasilan sewa properti investasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan operasi lain - pendapatan sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian masing-masing sebesar Rp306 miliar dan Rp259 miliar untuk tahun 2023 dan 2022 (Catatan 34).

The rental income of investment property is recorded as part of other operating income - rental income in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income Rp306 billion and Rp259 billion for 2023 and 2022, respectively (Note 34).

15. BEBAN TANGGUHAN - HAK ATAS TANAH / *15. DEFERED CHARGES - LAND RIGHTS*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Saldo awal	511.994.686.820	526.327.821.653	*Beginning balance*
Penambahan	154.415.566.426	22.109.921.852	*Addition*
Pengurangan	(188.428.354)	(402.853.905)	*Deduction*
Reklasifikasi	(1.274.575.093)	10.936.225.700	*Reclassification*
Amortisasi	(80.898.356.025)	(46.976.428.480)	*Amortization*
Nilai buku neto	**584.048.893.774**	**511.994.686.820**	***Net book value***

Amortisasi beban tangguhan - hak atas tanah dibebankan pada:

The amortization of deferred charges - land rights costs is charged to:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Beban umum dan administrasi	34.750.330.175	21.816.816.239	*General and administrative expenses*
Beban pokok pendapatan	44.411.954.433	21.965.915.643	*Cost of revenue*
Beban operasi lain	1.736.071.417	3.193.696.598	*Other operating expenses*
Total	**80.898.356.025**	**46.976.428.480**	***Total***

HGU dan HGB beserta seluruh aset yang ada diatasnya di beberapa unit/kebun Perusahaan dan beberapa Entitas Anak digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek (Catatan 18) dan utang jangka panjang (Catatan 25) yang diperoleh dari beberapa bank.

HGU and HGB with all of the assets over the land of certain Company's units and Subsidiaries are used as collateral for short-term bank loan (Note 18) and long-term debt (Note 25) obtained from several banks.

Perusahaan dan beberapa Entitas Anak tertentu memiliki beberapa HGU dan HGB seluas ± 1.030.410 ha yang tersebar di wilayah Republik Indonesia yang berjangka waktu 21 (dua puluh satu) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) tahun.

The Company and certain Subsidiaries have several HGU and HGB of ± 1,030,410 ha located in several areas in the Republic of Indonesia. for a period of 21 (twenty one) years until 36 (thirty six) years.

16. SEWA / *16. LEASES*

Analisis umur liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The aging analysis of lease liabilities are as follows:

Sebagai penyewa

As lessee

Grup memiliki kontrak sewa untuk aset kendaraan dan mesin, tanah, dan bangunan yang digunakan dalam operasinya. Grup dibatasi untuk menyewakan kembali aset sewaan

The Group has lease contracts for vehicles and machine, land and building used in its operations. The Group is restricted from assigning and subleasing the leased assets.

Sewa kendaraan dan mesin, tanah dan bangunan umumnya memiliki jangka waktu sewa antara satu sampai dengan sepuluh tahun.

Lease of for vehicles and machine, land and building generally have lease terms between one to ten years.

Grup memiliki sewa tertentu untuk bangunan dan kendaraan dengan masa sewa kurang dari 12 bulan atau dengan nilai rendah. Grup menerapkan pengecualian pengakuan untuk sewa-sewa ini dan mengakui biaya sewa berdasarkan garis lurus dalam laba rugi.

The Group has certain leases of building and vehicles with lease terms of less than 12 months or with low value. The Group applies recognition exemptions for these leases and recognizes lease expenses on a straight-line basis in the profit or loss.

Jumlah tercatat dari aset hak guna yang diakui pada laporan posisi keuangan Grup dan pergerakannya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The carrying amounts of right-of-use assets recognized on the Group statement of financial position and the movements during the current year are as follows:

	Tanah / *Land*	Bangunan/ *Building*	Kendaraan dan mesin/ *Vechicle and machine*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
1 Januari 2022	80.432.629.027	33.326.962.891	185.812.440.327	299.572.032.245	*January 1, 2022*
Penambahan (Pengurangan)	66.130.042.958	2.345.130.000	105.559.519.628	174.034.692.586	*Additional (Disposal)*
Beban penyusutan	(27.986.356.612)	(12.913.732.601)	(155.804.387.896)	(196.704.477.109)	*Depreciation expense*
31 Desember 2022	**118.576.315.373**	**22.758.360.290**	**135.567.572.059**	**276.902.247.722**	***December 31, 2022***
Penambahan (Pengurangan)	223.141.025.452	64.163.659.095	260.128.390.691	547.433.075.238	*Additional (Disposal)*
Beban penyusutan	(47.250.891.420)	(33.045.816.331)	(191.212.350.135)	(271.509.057.886)	*Depreciation expense*
31 Desember 2023	**294.466.449.405**	**53.876.203.054**	**204.483.612.615**	**552.826.265.074**	***December 31, 2023***

Mutasi jumlah tercatat liabilitas sewa selama tahun berjalan:

Movement of the carrying amount of lease liabilities during the year:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Saldo awal	283.578.010.300	314.784.925.275	*Beginning balance*
Penambahan	547.433.075.238	174.034.692.586	*Addition*
Penambahan bunga	29.197.593.652	30.880.524.412	*Accretion of interest*
Pembayaran	(445.098.399.404)	(236.122.131.973)	*Payment*
Sub-total	**415.110.279.786**	**283.578.010.300**	***Sub-total***
Dikurangi bagian jangka pendek	(215.193.680.148)	(144.001.545.094)	*Less current portion*
Liabilitas sewa jangka panjang	**199.916.599.638**	**139.576.465.206**	***Long-term lease liabilities***

16. SEWA (lanjutan) / *16. LEASES (continued)*

Analisis umur liabilitas sewa adalah sebagai berikut: / *The aging analysis of lease liabilities are as follows:*

	2023	2022	
Dalam 1 tahun	215.193.680.148	144.001.545.094	*Within 1 years*
2-5 tahun	199.916.599.638	139.576.465.206	*2-5 years*
Total	**415.110.279.786**	**283.578.010.300**	***Total***

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian: / *The amount recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Beban penyusutan aset hak-guna	271.509.057.886	196.704.477.109	*Depreciation expenses of rights-of-use asset*
Beban bunga atas liabilitas sewa	29.197.593.652	30.880.524.412	*Interest expenses on lease liabilities*
Biaya yang terkait dengan sewa atas aset bernilai rendah dan sewa jangka pendek	55.638.839.500	33.664.575.624	*Expenses relating to leases of low value assets and short-term leases*
Total yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	**356.345.491.038**	**261.249.577.145**	***Total amount recognized in consolidated statement of profit or loss and other comporehensive income***

Grup memiliki arus kas keluar untuk sewa sebesar Rp445.098.399.404, termasuk beban bunga Rp29.197.593.652, pada tahun 2023 (2022: sebesar Rp236.122.131.973, termasuk beban bunga Rp30.880.534.412).

The group had total cash outflows for leases amounting to Rp445,098,399,404, including interest expenses of Rp29,197,593,652 in 2022 (2022: amounting to Rp236,122,131,973, including interest expenses of Rp30,880,534,412).

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA - NETO / *17. OTHER NON-CURRENT ASSETS - NET*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Aset tidak produktif	2.069.279.741.433	2.197.214.415.016	*Non productive assets*
Tanah untuk pengembangan	662.299.057.653	290.550.986.647	*Land for development*
Beban tangguhan	113.756.420.215	208.659.853.781	*Deferred charges*
Uang muka pembelian aset tetap	88.578.394.601	202.543.470.694	*Advance for fixed assets*
Aset tidak berwujud	82.348.440.303	227.318.376.312	*Intangible assets*
Uang muka pengurusan HGU HGB dan BPHTB	14.378.167.761	19.967.635.297	*Advances for HGU, HGB and BPHTB*
Deposito yang dibatasi penggunaannya	10.271.000.528	69.560.342.089	*Restricted deposits*
Lain lain (masing-masing dibawah Rp10 miliar)	358.696.490.370	46.415.823.076	*Others (each below Rp10 billions)*
Total	**3.399.607.712.864**	**3.262.230.902.912**	***Total***
Total akumulasi amortisasi	(2.139.226.742.862)	(2.372.890.042.957)	*Total accumulated amortization*
Total penurunan nilai	(10.591.350.000)	(56.188.891.064)	*Total impairment*
Neto	**1.249.789.620.002**	**833.151.968.891**	***Net***

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA - NETO (lanjutan)

Aset tidak produktif

Aset tidak produktif merupakan aset tanaman dan aset tetap Perusahaan dan beberapa Entitas Anak yang nilai bukunya sudah nol menunggu persetujuan penghapusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Tanah untuk pengembangan

Pada tahun 2019, berdasarkan Akta inbreng No.1 tanggal 3 Juli 2019 dari Notaris Muhammad Arif Fadilah S.H., Grup mereklasifikasi tanah yang dicatat di aset tetap menjadi tanah untuk pengembangan. Hal ini terkait dengan penyetoran modal PTPN II ke PT Nusa Dua Bekala ("NDB"). entitas anak, berupa sebidang tanah Hak Guna Usaha Perusahaan seluas 245,41 Ha yang terletak di Desa Simalingkar A, Kabupaten Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan akan digunakan NDB untuk membangun Perumahan di daerah tersebut.

Beban tangguhan

Beban tangguhan merupakan biaya pengembangan unit kerja dan pembangunan PKS, beban yang telah dikeluarkan dan akan menjadi beban produksi tanaman tebu giling dan tembakau pada 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun berikutnya, beban pengembangan lahan kemitraan dan beban tangguhan lainnya di beberapa Entitas Anak.

Perangkat lunak

Perangkat lunak merupakan aset tidak berwujud berupa sistem SAP yang digunakan oleh Grup yang akan diamortisasi selama 2, 3, dan 5 tahun.

Deposito yang dibatasi penggunaannya

Deposito yang dibatasi penggunaannya ditempatkan sebagai jaminan utang bank jangka panjang Grup.

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS - NET (continued)

Non-productive assets

Non-productive assets are plantations and fixed assets of the Company and several Subsidiaries which its book value is already zero waiting approval for write-off from General Meeting of Shareholders.

Land for development

In 2019, based on Inbreng Deed No.1 dated 3 July 2019 from Notary Muhammad Arif Fadilah S.H., The group reclassified land from fixed assets to land for development. This is related to the deposit of PTPN II capital to PT Nusa Dua Bekala ("NDB"), a subsidiary, including a plot of land for the PTPN II land rights of 245.41 hectares located in Simalingkar A Village, Pancur Batu Regency, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province and will be used by NDB to build housing in the area.

Deferred charges

Deferred charges represent development cost and construction of PKS, wherein such cost incurred will become production cost of sugar cane milled and tobacco in the next 2 (two) to 5 (five) years, the land development of partnerships and other deferred charges in several Subsidiaries.

Software

Software is an intangible asset in the form of application of SAP system to the Group which will be amortized for 2, 3, and 5 years.

Deposits restricted in use

Restricted deposits are placed as guarantee for long-term bank debt of the Group.

18. UTANG BANK JANGKA PENDEK / *18. SHORT-TERM BANK LOANS*

Utang bank jangka pendek merupakan pinjaman dari bank kepada entitas anak tertentu untuk modal kerja dengan rincian sebagai berikut:

Short-term bank loans represent loans from banks to certain subsidiaries for working capital with details as follows :

Kreditor/*Creditors*	Fasilitas Maksimum/ *Maximum Facilities*	Batas Jangka Waktu Fasilitas/ *End of Availability Period*	Jumlah/ *Amount* 31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Entitas Anak/*Subsidiaries*				
Entitas berelasi dengan Pemerintah/*Goverment-related entities*				
Rupiah/*Rupiah*				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.000.000.000	Januari 2024/ *January 2024*	7.500.000.000	2.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.500.000.000	Desember 2024/ *December 2024/*	3.500.000.000	3.500.000.000
PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur	4.000.000.000	Mei 2024/ *May 2024*	3.128.817.083	1.384.577.300
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000.000	Mei 2024/ *May 2024*	2.462.773.312	700.000.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	3.300.000.000	Maret 2024/ March 2024	1.789.045.669	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500.000.000.000	Desember 2023/ *December 2023*	-	217.899.125.000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	26.160.653.000	Agustus 2023/ August 2023	-	8.241.014.702
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.000.000.000	Maret 2023/ *March 2023*	-	25.596.536
Pihak ketiga/*Third parties*				
PT Bank Permata Tbk	8.000.000.000	Januari 2024/ *January 2024*	5.720.170.938	5.995.018.140
Bank Danamon Indonesia Tbk	30.500.000.000	Februari 2024/ *February 2024*	22.363.232.666	22.376.276.709
			46.464.039.668	**262.121.608.387**

18. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Suku Bunga

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pinjaman dalam mata uang Rupiah dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 4,00% - 17,25% (2022: antara 6,05% - 12,05%).

Selain itu, pinjaman ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dikenakan nisbah bank sebesar 29,94% dan nisbah nasabah sebesar 70,06%.

Jaminan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh Grup dijamin oleh masing-masing penerima pinjaman berupa kas yang dibatasi penggunaannya, piutang, persediaan, aset tanaman, aset tetap tertentu dan hak guna usaha. Seluruh jaminan tersebut juga digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang (Catatan 25).

Pembatasan-pembatasan

Perjanjian pinjaman Grup di atas mensyaratkan beberapa pembatasan antara lain mengubah anggaran dasar, memberi dan memperoleh pinjaman baru, melakukan penggabungan usaha, mengadakan penyertaan saham baru dalam perusahaan lain dan mengikatkan diri sebagai penjamin atau mengagunkan harta kekayaan.

Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman-pinjaman utang jangka pendek seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh *waiver* sebagaimana diperlukan.

18. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

Interest Rate

For the year ended December 31, 2023, the loans denominated in Rupiah bear annual interest rate ranging between 4.00% - 17.25% (2022: between 6.05% - 12.05%).

In addition, loans to PT Bank Syariah Indonesia Tbk are subject to a bank ratio of 29.94% and a customer ratio of 70.06%.

Collateral

As of December 31, 2023 and 2022, all loans facilities obtained by the Group are secured by restricted cash, trade receivables, inventories, plantations, certain fixed assets and HGU. The entire collateral is also used as collateral for long-term loans (Note 25).

Covenants

The loan agreements obtained by the Group mentioned above required several covenants, such as change the articles of association, granting of and obtaining new loans, merge, hold new investment in another company and engage as guarantor or pledge their assets.

Compliance with Loan Covenants

As of December 31, 2023 and 2022, the Group have complied with all of the covenants of the short-term loans as stipulated in the loan agreements or obtained waiver as required.

19. UTANG USAHA / *19. TRADE PAYABLES*

Utang usaha terutama timbul atas pembelian pupuk, suku cadang, bahan pendukung lainnya, serta penggunaan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Grup, dengan rincian sebagai berikut:

Trade payables primarily arise from purchases of fertilizer, spare parts, other materials as well as purchases of services required for the Group's operations, with the following details:

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok:

Details of accounts payable based on suppliers:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Pihak ketiga	6.824.988.452.362	5.306.845.372.035	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi (Catatan 37g)	194.251.497.168	339.220.348.665	*Related parties (Note 37g)*
Total	**7.019.239.949.530**	**5.646.065.720.700**	***Total***

20. UTANG LAIN-LAIN / *20. OTHER PAYABLES*

Utang lain-lain terutama timbul dari utang kepada kontraktor, retensi, dan jasa konsultasi, dengan rincian sebagai berikut:

Other payables mainly arise from payable to contractor, retention, and consultation service, with the following details:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Pihak ketiga	844.574.229.432	606.285.587.610	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi (Catatan 37h)	587.797.646.648	529.054.084.315	*Related parties (Note 37)*
Total	**1.432.371.876.080**	**1.135.339.671.925**	***Total***

21. LIABILITAS KONTRAK / *21. CONTRACT LIABILITIES*

Liabilitas kontrak terutama merupakan penerimaan uang muka atas penjualan produk kelapa sawit dan karet.

Contract liabilities mainly represent advance received from sales of palm oil dan rubber products.

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Musim Mas	306.172.428.070	303.215.084.797	*PT Musim Mas*
Tobacco Traders International Ltd	122.537.297.877	57.357.061.439	*Tobacco Traders International Ltd*
PT Aditya Karya Gemilang	122.033.750.000	-	*PT Aditya Karya Gemilang*
Agri Oils Pte. Ltd.	111.102.209.775	-	*Agri Oils Pte. Ltd.*
PT Cargill Trading Indonesia	83.080.000.000	-	*PT Cargill Trading Indonesia*
PT Setia Mandiri Sentral Makmur	79.034.500.000	8.832.000.000	*PT Setia Mandiri Sentral Makmur*
PT Intibenua Perkasatama	76.900.228.290	129.649.611.500	*PT Intibenua Perkasatama*
PT Energi Unggul Persada	74.936.491.879	23.852.337.350	*PT Energi Unggul Persada*
PT Bitung Gunasejahtera	68.941.162.252	54.112.014.355	*PT Bitung Gunasejahtera*
PT Aman Jaya Perdana	58.009.608.638	12.469.611.500	*PT Aman Jaya Perdana*
PT Wilson Tunggal Perkasa	48.618.922.765	37.980.109.568	*PT Wilson Tunggal Perkasa*
PT Jaya Asri Niaga	40.066.210.080	21.288.448.340	*PT Jaya Asri Niaga*
PT Unilever Oleochemical Indonesia	39.910.163.857	26.233.293.730	*PT Unilever Oleochemical Indonesia*
PT Wilmar Nabati Indonesia	38.693.513.860	93.704.474.457	*PT Wilmar Nabati Indonesia*
PT Industri Karet Deli	36.768.669.550	23.068.645.840	*PT Industri Karet Deli*
PT Kreasi Jaya Adhikarya	36.092.801.970	39.369.517.940	*PT Kreasi Jaya Adhikarya*
PT Meridian Jati Indonesia	29.587.427.664	2.567.852.392	*PT Meridian Jati Indonesia*
PT Pacific Palmindo Industri	27.947.076.130	44.576.080.130	*PT Pacific Palmindo Industri*
PT Indo Acidatama Tbk	27.994.364.780	93.072.920.684	*PT Indo Acidatama Tbk*
PT Sari Dumai Sejati	27.945.647.071	3.902.965.192	*PT Sari Dumai Sejati*
PT Ecogreen Oleochemicals	27.055.726.400	-	*PT Ecogreen Oleochemicals*
PT Smart Tbk	26.876.020.800	1.294.339.090	*PT Smart Tbk*
PT Agro Jaya Perdana	24.581.718.255	7.624.932.634	*PT Agro Jaya Perdana*
Singapore Tong Teik Pte. Ltd.	23.502.626.343	9.271.828.713	*Singapore Tong Teik Pte. Ltd*
Wilson Global Traders International Ltd	17.264.485.278	7.511.107	*Wilson Global Traders International Ltd*
PT Akar Djati	15.583.635.486	25.602.388.130	*PT Akar Djati*
PT Wahana Citra Nabati	11.521.029.940	21.666.781.194	*PT Wahana Citra Nabati*
PT Pacrim Nusantara Lestari Food	11.198.000.000	-	*PT Pacrim Nusantara Lestari Food*
PT Multi Nabati Sejahtera	2.640.400.000	28.666.900.000	*PT Multi Nabati Sejahtera*
PT Bina Karya Prima	4.205.960	27.879.745.480	*PT Bina Karya Prima*
Lain-lain	430.264.682.126	1.225.923.319.489	*Others*
Pihak-pihak berelasi (Catatan 37i)	105.949.812.463	223.023.704.427	*Related parties (Note 37i)*
Total	**2.152.814.817.559**	**2.556.213.479.478**	***Total***

22. PERPAJAKAN / *22. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Perusahaan:			***Company:***
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	91.612.500.151	84.737.936.851	*Value Added Tax ("VAT")*
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
PPN	1.441.211.467.741	1.028.018.630.689	*VAT*
Pajak Penghasilan:			*IncomeTax:*
Pasal 22	2.140.228.934	5.663.147.661	*Article 22*
Pasal 23	1.280.529.303	498.188.362	*Article 23*
Pasal 25	52.724.310.677	3.878.770.295	*Article 25*
Pasal 4(2)	810.612.416	1.041.313.110	*Article 4(2)*
Lain-lain	-	7.171.676	*Others*
Subtotal	1.498.167.149.071	1.039.107.221.793	*Subtotal*
Total	**1.589.779.649.222**	**1.123.845.158.644**	***Total***

b. Piutang tagihan pajak / *b. Claims for tax refund*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Perusahaan:			***Company:***
Pajak penghasilan badan:			*Corporate income tax:*
Tahun 2023	91.911.771.963	-	*Year 2023*
Tahun 2019	8.272.849.594	8.272.849.594	*Year 2019*
Tahun 2018	24.155.259.755	24.155.259.755	*Year 2018*
Tahun 2015	12.299.323.204	12.299.323.204	*Year 2015*
PPN:			*VAT:*
Tahun 2023	10.154.217.302	-	*Year 2023*
Tahun 2022	2.087.075.457	-	*Year 2023*
Tahun 2021	-	90.174.082.030	*Year 2021*
Tahun 2018	18.394.488.758	18.394.488.758	*Year 2018*
Tahun 2008	4.479.940.756	4.479.940.756	*Year 2008*
Tahun 2007	-	23.052.138.792	*Year 2007*
Tahun 2006	14.827.943.548	14.827.943.548	*Year 2006*
Pajak penghasilan:			*Incometax:*
Pasal 21			*Article 21*
Tahun 2023	13.804.715	-	*Year 2023*
Subtotal	186.596.675.052	195.656.026.437	*Subtotal*

22. PERPAJAKAN (lanjutan) / *22. TAXATION (continued)*

b. Piutang tagihan pajak (lanjutan) / *b. Claims for tax refund (continued)*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
Pajak penghasilan badan:			*Corporate incometax:*
Tahun 2023	363.302.983.560	-	*Year 2023*
Tahun 2022	4.563.971.226	4.533.201.851	*Year 2022*
Tahun 2021	337.966.316	11.777.690.285	*Year 2021*
Tahun 2020	2.270.321.068	8.251.136.726	*Year 2020*
Tahun 2019	60.534.163	60.534.163	*Year 2019*
Tahun 2018		6.254.180.515	*Year 2018*
Tahun 2017	170.773.801.544	177.174.383.105	*Year 2017*
Tahun 2015	12.212.259.212	-	*Year 2015*
PPN:			*VAT:*
Tahun 2023	55.647.855.618	-	*Year 2023*
Tahun 2022	17.217.712.235	-	*Year 2022*
Tahun 2021	2.567.323.238	22.631.856.838	*Year 2021*
Tahun 2020	-	4.431.387.088	*Year 2020*
Tahun 2019	-	5.801.626.322	*Year 2019*
Tahun 2018	-	43.373.614.251	*Year 2018*
Tahun 2017	15.420.212.080	-	*Year 2017*
Tahun 2014	-	384.805.308	*Year 2014*
Tahun 2013	942.340.584	942.340.584	*Year 2013*
Tahun 2012	9.770.869.081	9.770.869.081	*Year 2012*
Tahun 2011	2.166.573.794	2.166.573.794	*Year 2011*
Tahun 2010	32.884.679.664	32.884.679.664`	*Year 2010*
Tahun 2003	87.274.930.073	87.274.930.073	*Year 2003*
Pajak penghasilan:			*Incometax:*
Pasal 21			*Article 21*
Tahun 2017	686.105.727	-	*Year 2017*
Pasal 23			*Article 23*
Tahun 2023	13.753.057.362	-	*Year 2023*
Tahun 2017	7.345.785.002	-	*Year 2017*
Bea ekspor	5.666.696.000		*Others*
Lain-lain	-	48.280.655.750	*Others*
Subtotal	804.865.977.547	465.994.465.398	*Subtotal*
Total	991.462.652.599	**661.650.491.835**	***Total***

22. PERPAJAKAN (lanjutan) / *22. TAXATION (continued)*

c. Utang pajak / *c. Taxes payable*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Perusahaan:			***The Company:***
Pasal 4 (2)	139.043.109	614.882.944	*Article 4 (2)*
Pasal 15	15.073.020	-	*Article 15*
Pasal 21	1.684.167.452	2.209.458.353	*Article 21*
Pasal 22	74.022.665	6.512.298.031	*Article 22*
Pasal 23	1.403.118.481	3.063.446.521	*Article 23*
Pasal 25	25.015.397.660	25.392.432.772	*Article 25*
Pasal 29	-	247.627.005.666	*Article 29*
PPN	14.521.431.150	3.435.078.612	*VAT*
Subtotal	42.852.253.537	288.854.602.899	*Subtotal*
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
Pajak penghasilan			*Incometax:*
Pasal 4 (2)	22.381.763.604	21.130.961.754	*Article 4 (2)*
Pasal 15	3.498.000	-	*Article 15*
Pasal 21	112.805.568.768	81.059.724.344	*Article 21*
Pasal 22	1.248.198.308	2.901.215.641	*Article 22*
Pasal 23	14.390.216.411	24.890.941.067	*Article 23*
Pasal 25	3.185.051.462	95.714.093.991	*Article 25*
Pasal 26	1.482.486.278	-	Article 26
Pasal 29			*Article 29*
Tahun 2023	55.204.455.409	-	*Year 2023*
Tahun 2022	-	245.937.209.114	*Year 2022*
Tahun 2021	-	783.733.453	*Year 2021*
Tahun 2019	18.483.893.918	-	*Year 2019*
Tahun 2017	4.137.328.857	41.620.156.153	*Year 2017*
Tahun 2016	-	39.744.818.044	*Year 2016*
Pajak Pertambahan Nilai	113.891.071.870	153.354.068.043	*Value added tax*
Pajak Bumi dan Bangunan	257.027.419.887	228.545.919.738	*Land and building tax*
Pajak lain-lain	6.234.500.108	231.317.646	*Other taxes*
Subtotal	610.475.452.880	935.914.158.988	*Subtotal*
Total	**653.327.706.417**	**1.224.768.761.887**	***Total***

d. Beban pajak penghasilan / *d. Income tax expense*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Perusahaan:			***The Company:***
Kini	252.741.284.620	600.196.585.340	*Current*
Tangguhan	77.586.066.172	48.192.618.739	*Deferred*
Subtotal	330.327.350.792	648.389.204.079	*Subtotal*
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
Kini	570.040.018.176	1.249.247.674.389	*Current*
Penyesuaian atas pajak pajak periode lalu	27.661.311.974	41.321.630.319	*Adjustment for prior period income tax*
Tangguhan	409.026.393.466	78.354.877.893	*Deferred*
Subtotal	1.006.727.723.616	1.368.924.182.601	*Subtotal*
Beban pajak penghasilan	**1.337.055.074.408**	**2.017.313.386.680**	***Income tax expense***

22. PERPAJAKAN (lanjutan) / *22. TAXATION (continued)*

e. Pajak kini / *e. Current tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before income tax expense (benefit) with the estimated taxable income for the years ended December 31, 2023 and 2022, is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	2.359.361.325.069	8.034.294.458.227	*Consolidated income before income tax expenses*
Ditambah rugi/(laba) sebelum pajak entitas anak dan entitas asosiasi	(890.891.918.989)	(5.158.480.814.822)	*Plus loss/(gain) before tax expense of subsidiaries and associatesentity*
Laba sebelum pajak Perusahaan	1.468.469.406.080	2.875.813.643.405	*Profit before income tax of the Company*
Ditambah/(dikurangi)			*Additions/(deductions)*
Beda Waktu:			***Temporary Differences:***
Aset biologis	(30.799.044.001)	36.435.439.260	*Biological Assets*
Kerugian atas perubahan nilai wajar persediaan	98.298.429.612	(93.016.349.845)	*Impairment loss of inventory fair value*
Penyisihan piutang	78.933.026.498	-	*Provision for impairment of receivables*
Penyisihan aktiva tetap	-	626.863.989	*Provision for impairment of receivables*
Penyisihan penurunan nilai saham	-	(3.100.000.000)	*Allowance for impairment of share*
Amortisasi penyusutan dan biaya tenaga kerja	98.454.359.568	44.906.217.888	*Amortization. depreciation and labor cost*
Cadangan penurunan nilai wajar piutang	(79.781.292.667)	(75.996.490.216)	*Allowance for impairment on fair value of receivables*
Alokasi beban imbalan karyawan	(394.676.319.664)	(345.496.401.642)	*Allocation of employee benefits*
Total beda waktu	**(229.570.840.654)**	**(435.640.720.566)**	***Total temporary differences***
Beda Tetap:			***Permanent Differences:***
Penyusutan aset tetap	81.412.257.065	27.520.103.816	*Depreciation of fixed assets*
Iuran dan sumbangan	62.398.010.980	66.505.773.063	*Contributions and donations*
Pendapatan sewa tanah dan bangunan	(4.799.123.929)	(17.515.717.372)	*Land and building rental income*
Pemeliharaan rumah dan bangunan sosial	2.388.858.763	1.307.033.490	*House and social building maintenance*
Penghasilan yang sudah dikenakan pajak final	(28.223.918.049)	(55.091.618.592)	*Income subjected to final tax*
Beda tetap lainnya	(203.250.628.756)	247.752.082.671	*Other permanent difference*
Total beda tetap	**(90.074.543.926)**	**287.993.374.448**	***Total permanent differences***
Taksiran penghasilan kena pajak - Perusahaan	**1.148.824.021.500**	**2.728.166.297.287**	***Estimated taxable income - Company***

22. PERPAJAKAN (lanjutan) / *22. TAXATION (continued)*

e. Pajak kini (lanjutan) / *e. Current tax (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Taksiran beban pajak penghasilan			*Estimated income tax expense*
- Perusahaan	252.741.284.620	600.196.585.340	*Company -*
- Entitas Anak			*Subsidiaries -*
Pajak kini	570.040.018.176	1.249.247.674.389	*Current tax*
Taksiran beban pajak Penghasilan Grup	**822.781.302.796**	**1.849.444.259.729**	***Estimated income tax expense Group***
Pajak dibayar dimuka - Perusahaan			*Prepaid taxes - Company*
Pajak penghasilan:			*Income tax:*
Pasal 22	9.877.210.642	34.768.094.685	*Article 22*
Pasal 23	34.214.038.909	13.092.291.725	*Article 23*
Pasal 25	300.561.807.032	304.709.193.264	*Article 25*
	344.653.056.583	352.569.579.674	
Pajak dibayar dimuka - Entitas Anak			*Prepaid taxes - Subsidiaries*
Pajak penghasilan:			*Income tax:*
Pasal 22	737.523.564	2.916.346.408	*Article 22*
Pasal 23	43.026.363.429	14.443.100.882	*Article 23*
Pasal 25	833.931.259.125	985.951.017.985	*Article 25*
	877.695.146.118	1.003.310.465.275	
Lebih (kurang) bayar PPh badan			*Over (under) payment corporate income tax*
- Perusahaan	91.911.771.963	(247.627.005.666)	*Company -*
- Entitas Anak	307.655.127.942	(245.937.209.114)	*Subsidiaries -*
Lebih (Kurang) bayar pajak penghasilan badan Grup	**399.566.899.905**	**(493.564.214.780)**	***Over (Under) payment corporate income tax Group***

Perhitungan pajak Perusahaan untuk tahun 2023 di atas akan dilaporkan dalam SPT PPh Badan 2023.

The tax calculation of the Company for the year 2023 will be reported by the Company in its 2023 annual income tax return (SPT).

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

f. Pajak tangguhan

f. Deferred tax

Mutasi aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Deferred tax assets (liabilities) are computed as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	(Dibebankan) Pada laba rugi/ *(Charged) to profit or loss*	Penyesuaian atas pajak tangguhan termasuk penyesuaian spin-off/ *Adjustment to deffered tax including spin-off adjustment*	Penghasilan komprehensif lainnya / *Other comprehensive income*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Perusahaan						***Company***
Aset pajak tangguhan						*Deffered tax assets*
Penyisihan piutang	12.001.117.312	17.477.883.343	(6.017.631.063)	-	23.461.369.592	*Provision for impairment of receivables*
Penyisihan beban manfaat karyawan	561.054.630.252	(86.828.790.326)	(493.765.120.969)	54.572.637.737	35.033.356.694	*Provision for employee benefits*
Penyisihan penurunan nilai penyertaan saham	3.742.729.152	-	-	-	3.742.729.152	*Allowance for impairment of share*
Nilai wajar piutang pihak berelasi	129.761.277.804	(17.551.884.387)	(30.071.253.912)	-	82.138.139.505	*Fair value for receivables of related party*
Liabilitas pajak tangguhan						*Deferred tax liabilites*
Persediaan	(37.966.737.923)	21.625.654.515	7.455.717.122	-	(8.885.366.286)	*Inventories*
Aset biologis	(24.799.819.006)	(6.775.789.680)	25.221.394.200	-	(6.354.214.486)	*Biological aset*
Aset tetap dan tanaman menghasilkan	(602.874.017.392)	21.659.959.105	549.794.541.081	-	(31.419.517.206)	*Fixed assets and mature plantations*
Total Perusahaan	**40.919.180.199**	**(50.392.967.430)**	**52.617.646.459**	**54.572.637.737**	**97.716.496.965**	***Total Company***
Cadangan penurunan nilai	-	(27.193.098.742)	-	-	(27.193.098.742)	*Allowance of impairment*
Total aset pajak tangguhan neto - Perusahaan	**40.919.180.199**	**(77.586.066.172)**	**52.617.646.459**	**54.572.637.737**	**70.523.398.223**	***Total deferred tax asset net – the Company***
Entitas Anak						***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan – neto	980.042.609.904	(425.695.364.779)	(40.222.342.706)	(22.462.174.166)	491.662.728.253	*Deferred tax liabilities - net*
Aset pajak tangguhan - neto	**1.020.961.790.103**	**(503.281.430.951)**	**12.395.303.753**	**32.110.463.571**	**562.186.126.476**	***Deferred tax assets - net***
Liabilitas pajak tangguhan - neto	**(1.121.477.945.434)**	**4.052.281.436**	**221.386.124**	**176.672.434.248**	**(940.531.843.626)**	***Deferred tax liabilities - net***

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pajak tangguhan (lanjutan)

Mutasi aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

22. TAXATION (continued)

f. Deferred tax (continued)

Deferred tax assets (liabilities) are computed as follows:

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	(Dibebankan) Pada laba rugi/ *(Charged) to profit or loss*	Penyesuaian atas pajak tangguhan/ *Adjustment to deffered tax*	Penghasilan komprehensif lainnya / *Other comprehensive income*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Perusahaan						***Company***
Aset pajak tangguhan						*Deffered tax assets*
Penyisihan piutang	12.001.117.312	-	-	-	12.001.117.312	*Provision for impairment of receivables*
Penyisihan beban manfaat karyawan	556.257.761.970	(76.009.208.361)	-	80.806.076.643	561.054.630.252	*Provision for employee Benefits*
Penyisihan penurunan nilai penyertaan saham	4.424.729.152	(682.000.000)	-	-	3.742.729.152	*Allowance for impairment of share*
Nilai wajar piutang pihak berelasi	146.480.505.651	(16.719.227.847)	-	-	129.761.277.804	*Fair value for receivables of related party*
Liabilitas pajak tangguhan						*Deferred tax liabilites*
Persediaan	(17.503.140.957)	(20.463.596.966)	-	-	(37.966.737.923)	*Inventories*
Aset biologis	(32.815.615.643)	8.015.796.637	-	-	(24.799.819.006)	*Biological aset*
Aset tetap dan tanaman menghasilkan	(660.539.635.190)	10.017.278.013	47.648.339.785	-	(602.874.017.392)	*Fixed assets and mature Plantations*
Total Perusahaan	**8.305.722.295**	**(95.840.958.524)**	**47.648.339.785**	**80.806.076.643**	**40.919.180.199**	***Total Company***
Entitas Anak						***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan - neto	1.077.724.566.404	(203.662.952.227)	(21.237.210.442)	127.218.206.169	980.042.609.904	*Deferred tax liabilities - net*
Aset pajak tangguhan - neto	**1.086.030.288.699**	**(299.503.910.751)**	**26.411.129.343**	**208.024.282.812**	**1.020.961.790.103**	***Deferred tax assets - net***
Entitas Anak						***Subsidiaries***
Liabilitas pajak tangguhan - neto	(1.284.144.766.709)	140.146.375.095	22.639.411.304	(118.965.123)	(1.121.477.945.434)	*Deferred tax liabilities - net*
Liabilitas pajak tangguhan - neto	**(1.284.144.766.709)**	**140.146.375.095**	22.639.411.304	**(118.965.123)**	**(1.121.477.945.434)**	***Deferred tax liabilities - net***

Tidak ada konsekuensi pajak atas beda temporer dari investasi pada Entitas Anak dan Grup tidak bermaksud menjual Entitas Anak.

There is no tax consequence for the temporary difference of the investment in the Subsidiaries and the Group does not intend to sell the Subsidiaries.

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

g. Rekonsiliasi Beban Pajak

g. Reconciliation of Corporate Income Tax

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense which is calculated at the tax rates from profit (loss) before income tax expense and income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Laba sebelum pajak Grup	2.359.361.325.069	8.034.294.458.227	*Profit before income tax of the Group*
Pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak	519.059.491.515	1.648.614.842.755	*Income tax expense at the tax rates*
Perbedaan tetap	67.738.022.891	(56.716.296.879)	*Permanent differences*
Penyesuaian pajak tangguhan	(12.616.689.877)	(49.050.540.647)	*Adjustment of deferred tax*
Penurunan nilai aset pajak tangguhan	165.754.234.611	139.979.171.503	*Changes in allowance of deffered tax*
Penyesuaian pajak periode lalu	27.661.311.974	41.321.630.319	*Adjustment for prior period income tax*
Rugi fiskal yang tidak diakui	421.393.496.435	260.045.295.961	*Unrecognized fiscal loss*
Kompensasi rugi fiskal tahun sebelumnya	148.065.206.859	33.119.283.668	*Compensation of fiscall loss from prior year*
Total beban pajak penghasilan Grup	**1.337.055.074.408**	**2.017.313.386.680**	***Total income tax expense Group***

22. PERPAJAKAN (lanjutan) / *22. TAXATION (continued)*

i. Surat ketetapan pajak / *i. Tax assessments letter*

Perusahaan / ***Company***

Entitas/ *Entity*	Surat Pajak/ *Tax Letter*	Nilai Lebih/(Kurang) Bayar Sengketa Terakhir/*Amount of Over/(Under) Payment from Latest Tax Dispute*	Piutang Tagihan Pajak/ *Claims for Tax Refund*	Status/ *Status*
Pajak Penghasilan Badan/ *Corporate Income Tax*				
Perusahaan	SKPLB PPh Badan 2023	-	Rp91.911.771.963	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
Perusahaan	SKPLB PPh Badan 2019	Rp126.982.147.237	Rp8.272.849.594	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
Perusahaan	SKPKB PPh Badan 2018	(Rp194.697.945.264)	Rp24.155.259.755	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
Perusahaan	SKPKB PPh Badan 2017	(Rp85.983.539.153)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
Perusahaan	SKPKB PPh Badan 2016	(Rp104.633.710.439)	-	Dalam proses pengajuan peninjauan kembali/ *In the process of filing for a judicial review*
Perusahaan	SKPLB PPh Badan 2015	Rp8.894.798.860	Rp8.894.798.860	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
Perusahaan	SKPLB PPh Badan 2015	Rp3.404.524.344	Rp3.404.524.344	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
Pajak Pertambahan Nilai/ *Value-Added Tax*				
Perusahaan	PPN 2023	-	Rp10.154.217.302	Masih dalam proses pemeriksaan oleh DJP/ *In inspection process by DJP*
Perusahaan	PPN 2022	-	Rp2.087.075.457	Masih dalam proses pemeriksaan oleh DJP/ *In inspection process by DJP*
Perusahaan	SKPLB PPN 2018	Rp9.071.375.238	Rp9.071.375.238	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
Perusahaan	SKPKB PPN 2018	(Rp9.323.113.520)	Rp9.323.113.520	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
Perusahaan	SKPKB PPN 2017	(Rp16.872.831.542)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
Perusahaan	SKPKB PPN 2008	Rp14.150.955.386	Rp4.479.940.756	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
Perusahaan	SKPKB PPN 2006	Rp14.827.943.548	Rp14.827.943.548	Menunggu putusan Mahkamah Agung/ *Waiting for the decision of Supreme Court*

22. PERPAJAKAN (lanjutan) / *22. TAXATION (continued)*

i. Surat ketetapan pajak (lanjutan) / *i. Tax assessments letter (continued)*

Perusahaan (lanjutan) / ***Company (continued)***

Entitas/ *Entity*	Surat Pajak/ *Tax Letter*	Nilai Lebih/(Kurang) Bayar Sengketa Terakhir/*Amount of Over/(Under) Payment from Latest Tax Dispute*	Piutang Tagihan Pajak/ *Claims for Tax Refund*	Status/ *Status*
Pajak Penghasilan/ *Income Tax*				
Perusahaan	SKPKB PPh 21 2018	(Rp57.858.397.092)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
Perusahaan	SKPKB PPh 21 2017	(Rp1.209.542.688)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
Perusahaan	SKPKB PPh 23 2017	(Rp8.900.193.366)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
Perusahaan	SKPKB PPh 21 2016	(Rp5.607.803.599)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*

Entitas Anak / ***Subsidiaries***

Entitas/ *Entity*	Surat Pajak/ *Tax Letter*	Nilai Lebih/(Kurang) Bayar Sengketa Terakhir/*Amount of Over/(Under) Payment from Latest Tax Dispute*	Piutang Tagihan Pajak/ *Claims for Tax Refund*	Status/ *Status*
Pajak Penghasilan Badan/ *Corporate Income Tax*				
PTPN IV	PPh Badan 2023	-	Rp363.302.983.560	Masih dalam proses pemeriksaan oleh DJP/ *In inspection process by DJP*
PT INL	SKPKB PPh Badan 2019	(Rp18.483.893.918)	-	Dalam proses pengajuan keberatan/ *In the process of filing an objection*
PTPN IV	SKPKB PPh Badan 2018	(Rp24.639.699.894)	Rp6.254.180.515	Menunggu putusan Pengadilan Pajak atas proses banding yang masih berlangsung/*Waiting for the tax court's decision on the appeal process*
PTPN IV	SKPKB PPh Badan 2017	(Rp171.950.518.110)	Rp170.773.801.544	Menunggu putusan Pengadilan Pajak atas proses banding yang masih berlangsung/*Waiting for the tax court's decision on the appeal process*
PTPN IV	SKPKB PPh Badan 2017	(Rp11.927.715.453)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak atas proses banding yang masih berlangsung/*Waiting for the tax court's decision on the appeal process*
PTPN IV	SKPLB PPh Badan 2015	Rp109.552.247.620	Rp12.212.259.212	Putusan dari Mahkamah Agung (MA) sudah diterima yaitu menolak permohonan peninjauan kembali DJP / *Company has received decision of judicial review, which is to reject the judicial review request from DJP.*
PTPN IV	SKPKB PPh Badan 2014	(Rp354.570.016.540)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/*Waiting for the tax court's decision*

22. PERPAJAKAN (lanjutan) / *22. TAXATION (continued)*

i. Surat ketetapan pajak (lanjutan) / *i. Tax assessments letter (continued)*

Entitas Anak (lanjutan) / ***Subsidiaries (continued)***

Entitas/ *Entity*	Surat Pajak/ *Tax Letter*	Nilai Lebih/(Kurang) Bayar Sengketa Terakhir/*Amount of Over/(Under) Payment from Latest Tax Dispute*	Piutang Tagihan Pajak/ *Claims for Tax Refund*	Status/ *Status*
Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)/ *Corporate Income Tax (continued)*				
PTPN IV	SKPKB PPh Badan 2014	(Rp354.570.016.540)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
PTPN IV	SKPLB PPh Badan 2013	Rp17.017.010.295	-	Putusan dari Mahkamah Agung (MA) sudah diterima yaitu menolak permohonan peninjauan kembali DJP / *The Company has received decision of judicial review, which is to reject the judicial review request from DJP.*
PTPN IV	SKPLB PPh Badan 2012	Rp18.909.219.712	-	Menunggu putusan Mahkamah Agung/*Waiting for the supreme court's decision.*
PTPN I	SKPLB PPh Badan 2008	Rp13.505.133.393	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
Pajak Pertambahan Nilai/ *Value-Added Tax*				
PTPN I	PPN 2022	-	Rp17.217.712.235	Menunggu proses pengembalian tagihan pajak/ *Awaiting refund process of tax claims*
PTPN IV	SKPKB PPN 2017	(Rp17.146.081.517)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
PTPN IV	SKPKB PPN 2014	(Rp116.127.146.109)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
PTPN I	SKPKB PPN 2010	(Rp32.884.679.664)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
PTPN I	SKPKB PPN 2008	(Rp112.192.211.371)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
PTPN I	SKPKB PPN 2001 – 2003	(Rp87.274.930.073)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
PTPN IV	SKPKB PPN 2013	(Rp48.507.408.246)	-	Menunggu putusan Mahkamah Agung/*Waiting for the supreme court's decision.*
PTPN IV	PPN 2012	-	Rp9.770.869.081	Dikompensasi untuk kurang bayar PPN masa pajak 2013 sebesar Rp9.726.028.727 dan denda bunga sebesar Rp44.840.354/*Compensated for underpayment of VAT for 2013 amounting to Rp9,726,028,727 and penalties amounting to Rp44,840,354.*

22. PERPAJAKAN (lanjutan) / *22. TAXATION (continued)*

i. Surat ketetapan pajak (lanjutan) / *i. Tax assessments letter (continued)*

Entitas Anak (lanjutan) / *Subsidiaries (continued)*

Entitas/ *Entity*	Surat Pajak/ *Tax Letter*	Nilai Lebih/(Kurang) Bayar Sengketa Terakhir/*Amount of Over/(Under) Payment from Latest Tax Dispute*	Piutang Tagihan Pajak/ *Claims for Tax Refund*	Status/ *Status*
Pajak Penghasilan/ Income Tax				
PTPN IV	SKPKB PPh 23 2018	(Rp11.863.809.433)	-	Proses pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak/*In the process of filing an appeal to the Tax Court.*
PTPN IV	SKPKB PPh 23 2017	(Rp7.361.373.953)	Rp7.345.785.001	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/*Waiting for the tax court's decision*
PTPN I	SKPKB PPh 21 2014	(Rp12.572.927.686)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
PTPN I	SKPKB PPN 2010	(Rp32.884.679.664)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
PTPN I	SKPKB PPN 2008	(Rp112.192.211.371)	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/ *Waiting for the decision of Tax Court*
PTPN I	SKPKB PPN 2001-2003	(Rp87.274.930.073)	-	Menunggu putusan Mahkamah Agung/ *Waiting for the decision of Supreme Court*

23. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR / *23. ACCRUED EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Bonus dan Tantiem	1.008.859.343.129	2.244.707.401.573	*Employee bonus*
Biaya Pajak yang Masih Harus Dibayar	231.432.534.932	154.132.840.439	*Accrued Tax Expense*
Bunga Pinjaman	120.441.717.979	1.065.476.750.722	*Loan Interest*
Gaji dan upah	114.961.449.186	322.335.733.815	*Salaries and wages*
Cuti karyawan	79.086.031.521	77.374.553.225	*Employee leave*
Jasa profesional	65.263.761.124	80.167.978.830	*Professional fees*
Santunan Hari Tua	62.490.177.596	118.253.622.969	*Retirement compensation*
Panen dan angkutan	23.481.327.283	40.390.487.996	*Harvesting and transportation*
Premi Karyawan	20.429.260.699	48.232.385.112	*Employee premium*
BPJS Ketenagakerjaan	12.337.713.966	23.100.681.286	*BPJS Ketenagakerjaan*
Iuran dana pensiun	7.797.287.052	15.428.122.050	*Pension contribution*
Beban kantor	7.401.162.390	16.295.035.189	*Office expense*
Asuransi	4.605.261.087	13.093.298.283	*Insurance*
Biaya pengobatan	1.841.385.905	6.054.009.643	*Medical expense*
Biaya sewa	1.089.256.693	9.115.399.770	*Rent expense*
Lain-lain	501.355.742.192	329.811.024.248	*Other*
Total	**2.262.873.412.734**	**4.563.969.325.150**	***Total***

24. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA / *24. UNEARNED REVENUE*

Pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan pendapatan atas pendapatan sewa kepada tenant untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.

Unearned revenue mainly represents revenue received for rental income to tenants from from tenants for a period more than one year.

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Pihak ketiga	989.155.970.771	371.320.514.339	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 37l)	110.043.195.582	120.132.088.470	*Related parties (Note 37l)*
Total	**1.099.199.166.353**	**491.452.602.809**	***Total***
Bagian jangka pendek	(208.284.268.100)	(10.751.606.975)	*Short term portion*
Setelah dikurangi bagian jangka pendek	**890.914.898.253**	**480.700.995.834**	***Net of short term portion***

25. UTANG JANGKA PANJANG / *25. LONG-TERM DEBTS*

2023	**Total/ *Total***	**Jatuh tempo dalam 1 tahun/ *Current maturities of long-term debts***	***Utang jangka panjang /Long-term debts***	***2023***
a) Utang bank				*Bank loans (a*
- Perusahaan	-	-	-	*Company -*
- Entitas Anak	33.476.875.750.748	3.501.691.010.141	29.975.184.740.607	*Subsidiaries -*
b) Wesel bayar	3.201.000.000.000	1.896.000.000.000	1.305.000.000.000	*Medium Term Notes (b*
c) Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia	4.246.512.217.491	226.085.116.085	4.020.427.101.406	*Debts to the Government (c of the Republic of Indonesia*
d) Utang lain-lain jangka Panjang	395.341.977.530	9.173.282.425	386.168.695.105	*Other long-term payables (d*
Total	**41.319.729.945.769**	**5.632.949.408.651**	**35.686.780.537.118**	***Total***

2022	**Total/ *Total***	**Jatuh tempo dalam 1 tahun/ *Current maturities of long-term debts***	***Utang jangka panjang /Long-term debts***	***2022***
a) Utang bank				*Bank loans (a*
- Perusahaan	12.563.535.959.691	1.344.266.790.490	11.219.269.169.201	*Company -*
- Entitas Anak	24.295.653.982.400	5.544.669.828.618	18.750.984.153.782	*Subsidiaries -*
b) Wesel bayar	3.866.000.000.000	1.105.000.000.000	2.761.000.000.000	*Medium Term Notes (b*
c) Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia	3.199.565.670.111	226.085.116.085	2.973.480.554.026	*Debts to the Government (c of the Republic of Indonesia*
d) Utang lain-lain jangka Panjang	340.314.430.027	24.585.594.780	315.728.835.247	*Other long-term payables (d*
Total	**44.265.070.042.229**	**8.244.607.329.973**	**36.020.462.712.256**	***Total***

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) / *25. LONG-TERM DEBTS (continued)*

a. Utang bank dan lembaga keuangan / *a. Bank and financial institution Loans*

Kreditor/*Creditors*	Fasilitas Maksimum/ *Maximum Facility*	Jatuh Tempo/ *Maturity date*	Total/*Total* 31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	Total/*Total* 31 Desember 2022/ *December 31, 2022*
Perusahaan/*Company*				
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government-related entities*				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.200.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	1.712.311.160.951
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.100.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	1.685.029.832.020
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	500.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	208.603.464.083
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	605.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	490.832.876.390
PT Bank Raya Indonesia Tbk	500.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	300.582.004.061
Pihak ketiga/*Third parties*				
PT Bank DBS Indonesia	2.000.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	1.299.737.671.336
PT Bank UOB Indonesia	500.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	434.117.017.412
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	5.507.460.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	163.932.418.198
PT Bank ICBC Indonesia	200.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	67.369.534.000
PT Bank Central Asia Tbk	600.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	525.419.281.690
PT Bank Victoria International Tbk	500.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	210.786.819.117
PT Bank QNB Indonesia Tbk	500.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	421.573.638.234
PT Bank PermataTbk	500.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	417.484.993.453
Sumitomo Mitsui Banking Corp USD	USD390.600.000	Juni 2028/ *June 2028*	-	4.654.708.503.366
Total/*Total*			**-**	**12.592.489.214.311**
Dikurangi biaya perolehan utang yang belum diamortisasi/*Less unamortized costs*			-	(28.953.254.620)
Neto/*Net*			**-**	**12.563.535.959.691**
Dikurangi bagian jangka pendek/*Less short term portion*			-	(1.344.266.790.490)
Bagian Jangka Panjang/*Long-term Portion*			**-**	**11.219.269.169.201**

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) / *25. LONG-TERM DEBTS (continued)*

a. Utang bank dan lembaga keuangan (lanjutan) / *a. Bank and financial instituion Loans (continued)*

Kreditor/*Creditors*	Fasilitas Maksimum/ *Maximum Facility*	Jatuh Tempo/ *Maturity date*	Total/*Total* 31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*
Entitas Anak/*Subsidiaries*				
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government-related entites*				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.920.388.369.019	December 2030/ *December 2030*	12.731.629.526.848	9.021.136.818.576
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.327.320.100.234	December 2030/ *December 2030*	8.521.322.174.433	4.926.964.786.241
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11.345.533.710.365	December 2030/ *December 2030*	8.119.626.677.580	3.811.537.367.539
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	3.980.565.713.035	December 2030/ *December 2030*	2.584.046.416.559	2.221.539.298.013
Bank Sindikasi*)	1.236.663.000.000	December 2025/ *December 2025*	926.192.311.811	947,413,681,811
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	470.297.000.000	December 2025/ *December 2025*	337.995.303.219	345.861.911.427
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	549.461.750.000	December 2025/ *December 2025*	236.071.505.210	242.576.678.268
PT Bank Raya Indonesia Tbk	120.265.380.159	December 2030/ *December 2030*	-	73.304.901.411
PT Bank Riau Kepri	263.721.300.000	December 2028/ December 2028	-	180.944.360.396
Pihak ketiga/*Third parties*				
PT Bank Permata Tbk	43.055.028.959	Juni 2025/ *June 2025*	33.486.739.696	-
PT Bank Central Asia Tbk	2.025.000.000	Juni 2025/ *June 2025*	1.072.976.322	-
PT Bank ICBC Indonesia	1.024.681.375.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	846.428.750.513
PT Bank Central Asia Tbk	662.928.750.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	454.081.123.906
PT Bank Permata Tbk	55.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	34.705.698.786
PT Bank QNB Indonesia Tbk	289.900.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	269.984.016.273
PT Bank DBS Indonesia	200.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	121.006.473.565
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	879.362.750.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	603.235.910.685

*) Bank Sindikasi dipimpin oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan anggota sindikasi terdiri dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/*Syndicated Banks is led by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with syndicate members consisting of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Indonesian Export Financing Institution, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.*

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

a. Utang bank dan lembaga keuangan (lanjutan)

a. Bank and financial institution Loans (continued)

Kreditor/*Creditors*	Fasilitas Maksimum/ *Maximum Facility*	Jatuh Tempo/ *Maturity date*	Total/*Total* 31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	Total/*Total* 31 Desember 2022/ *December 31, 2022*
Entitas Anak/*Subsidiaries*				
Pihak ketiga/*Third parties*				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	156.736.531.340	Desember 2028/ *December 2028*	-	134.107.272.657
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	250.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	67.608.477.225
PT Bank Global Internasional Tbk	20.000.000.000	Desember 2028/ *December 2028*	-	14.809.829.444
Total/*Total*			**33.491.343.631.678**	**24.317.247.356.736**
Dikurangi biaya perolehan utang yang belum diamortisasi/*Less unamortized costs*			(14.467.880.930)	(21.593.374.336)
Neto/*Net*			**33.476.875.750.748**	**24.295.653.982.400**
Dikurangi bagian jangka pendek/*Less short term portion*			(3.501.691.010.141)	(5.544.669.828.618)
Bagian Jangka Panjang/*Long-term Portion*			**29.975.184.740.607**	**18.750.984.153.782**

Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement* (MAA))

Pada tahun 2021, sehubungan dengan program transformasi keuangan jangka panjang PTPN Group, telah dilakukan penandatanganan perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement*/MAA) antara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan Para Kreditur Perbankan PTPN Group sebagai berikut:

1) Perjanjian Perubahan Induk Hijau Nomor 29, tanggal 29 Januari 2021 (“MAA Hijau”) untuk PTPN III, PTPN IV dan PTPN V
2) Perjanjian Perubahan Induk Kuning Nomor 22, tanggal 10 Oktober 2022 (“MAA Kuning”) untuk PTPN I, PTPN II, PTPN VI, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV
3) Perjanjian Perubahan Induk Merah Nomor 21, tanggal 10 Oktober 2022 (“MAA Merah”) untuk PTPN VII, PTPN VIII dan PTPN IX
4) Perjanjian Perubahan Induk PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) Nomor 20, tanggal 10 Oktober 2022 (“MAA PT SGN”) untuk PT SGN

Long-term financial transformation program Master Amendement Agreement (MAA)

In 2021, in connection with the PTPN Group’s long term financial transformation program, the Master Amendment Agreement (MAA) has been signed between PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and Banking Creditors of PTPN Group as follows:

1) Master Amendment Agreement Green Number 29, dated January 29, 2021 (“MAA Green”) for PTPN III, PTPN IV, and PTPN V
2) Master Amendment Agreement Yellow Number 22, dated October 10, 2022 (“MAA Yellow”) for PTPN I, PTPN II, PTPN VI, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII and PTPN XIV
3) Master Amendment Agreement Red Number 21, dated October 10, 2022 (“MAA Red”) for PTPN VII, PTPN VIII, and PTPN IX
4) Master Amendment Agreement PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) Number 20, dated October 10, 2022 (“MAA PT SGN”) for PT SGN

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Utang bank dan lembaga keuangan (lanjutan)

Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement* (MAA)) (lanjutan)

Perjanjian Perubahan Induk Hijau dibuat di hadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito. S.H. M.Kn tersebut dinyatakan telah berlaku efektif sejak 15 Maret 2021. Perjanjian tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil Kajian Transformasi Keuangan Jangka Panjang PTPN Group. Hasil kajian dan perjanjian-perjanjian perubahan induk tersebut juga membagi Grup ke dalam tiga kelompok yaitu Kelompok Hijau, Kelompok Kuning dan Kelompok Merah.

Perjanjian Perubahan Induk PT Sinergi Gula Nusantara dibuat di hadapan Notaris Vestina Ria Kartika, S.H. M.H., sekaligus merubah Perjanjian Perubahan Induk Kuning dan Perjanjian Perubahan Induk Merah dan berlaku efektif sejak 10 Oktober 2022. Perjanjian tersebut disusun berkenaan pelaksanaan aksi korporasi pemisahan bisnis gula *off-farm* dari PTPN II, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XIV, PT BCN, PT IGG ke PT SGN.

Pasca pemberlakuan efektif perjanjian tersebut, maka seluruh fasilitas pinjaman perbankan yang semula terdiri atas fasilitas dengan tenor jangka pendek dan jangka panjang, diubah menjadi fasilitas pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu jatuh tempo sampai dengan tahun 2028.

Merujuk pada ketentuan *MAA*, atas sisa *outstanding* pinjaman perbankan pada tahun 2025 dapat dilakukan *refinancing* untuk Kelompok Hijau dan Kelompok Kuning. Adapun atas seluruh instrumen surat utang di pasar modal yang masih beredar, Grup harus mengupayakan dilakukannya pembiayaan ulang *(refinancing)* atau penjadwalan kembali *(rescheduling)* atas Surat Utang *Existing* yang jatuh tempo setelah tahun 2021 sebagai bentuk perlakuan yang sama dengan fasilitas pinjaman bank yang telah direstrukturisasi.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

a. Bank and financial institution Loans (continued)

Long-term financial transformation program Master Amendement Agreement (MAA) (continued)

Master Amandement Agreement of Tranche Green made before Notary Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito. S.H. M.Kn is declared to have been effective since March 15, 2021. The agreements were prepared taking into account the results of the PTPN Group Long-Term Financial Transformation Study. The results of the study and the amendment agreements also divided the group into three groups, which is Green Group, Yellow Group and Red Group.

Master Amandement Agreement of PT Sinergi Gula Nusantara made before Notary Vestina Ria Kartika, S.H. M.H., at the same time amending Master Amandement Agreement of Tranche Yellow and Master Amandement Agreement of Tranche Red and became effective on October 10, 2022. The agreement was drafted regarding the implementation of corporate actions for spin off sugar business off-farm from PTPN II, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XIV, PT BCN, PT IGG to PT SGN.

After the effective implementation of the agreement, all bank credit facilities. which originally consist of short-term and long-term facilities, were changed to long-term credit facilities with maturities up to 2028.

Refer to the regulation in MAA, the remaining outstanding bank loans in 2025 can be refinanced for Green Group and Yellow Group. The outstanding debt instruments in the capital market, the Group have to refinance or reschedule the existing debt securities with the maturity date after 2021 as the equal treatment with the restructured bank loan facility.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Utang bank dan lembaga keuangan (lanjutan)

Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement* (MAA)) (lanjutan)

Fasilitas perbankan untuk entitas anak tertentu dalam Grup yang tidak mengikuti *MAA* tetap mengacu kepada perjanjian pinjaman paling akhir yang disetujui oleh entitas anak tertentu dengan pihak perbankan.

Fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Grup yang diterima dari Lembaga Pembiayaan non-perbankan tetap mengacu pada perjanjian terakhir yang disetujui oleh Grup.

Kelompok Hijau dan Kelompok Kuning memiliki ringkasan struktur sebagai berikut:
- *Amortizing Loan*
- Tenor 5+3 tahun
- *Prepayment*: divestasi aset, *carve out* bisnis gula, instrumen pasar modal

Kelompok Merah memiliki ringkasan struktur sebagai berikut:
- Tenor 8 tahun
- Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman: dari Divestasi Aset periode 2021 – 2028
- Hasil Divestasi SugarCo menjadi *Prepayment.*

Berdasarkan Akta Novasi Nomor 9 sampai dengan Nomor 18 dan Akta Perjanjian Bilateral Nomor 19 tertanggal 10 Oktober 2022, PT Sinergi Gula Nusantara, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI dan PT Perkebunan Nusantara XII (kemudian disebut sebagai PTPN Gula) serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (disebut sebagai "Bank Sindikasi") menandatangani perjanjian novasi pinjaman atas nama PT Sinergi Gula Nusantara.

Perjanjian pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2025 dan dapat diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2028.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

a. Bank and financial institution Loans (continued)

Long-term financial transformation program Master Amendement Agreement (MAA) (continued)

Banking facilities for certain subsidiaries within the Business Group that do not follow the MAA still refer to the most recent loan agreement approved by certain subsidiaries with the banking sector.

The financing facilities received by the Business Group received from non-banking Financing Institutions still refer to the latest agreement approved by the Business Group.

Green Group and Yellow Group has the following structure:
- *Loan Amortization*
- *5+3 years tenor*
- *Advance payment: asset divestment, carve out sugar business, capital market instrument*

Red Group has a summary structure as follows:
- *8 years tenor*
- *Repayment of Loan Principal: from Asset Divestment period 2021 – 2028*
- *SugarCo Divestment proceeds into Prepayment.*

Based on Deed of Novation Number 9 to Number 18 and Deed of Bilateral Agreement Number 19 dated October 10, 2022, the Company, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI and PT Perkebunan Nusantara XII (later referred to as PTPN Gula) and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (referred to as "Syndicated Banks") signed a novation loan agreement to PT Sinergi Gula Nusantara.

The loan agreement will mature on December 23, 2025 and can extended until December 31, 2028.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Utang bank dan lembaga keuangan (lanjutan)

Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement* (MAA)) (lanjutan)

Suku Bunga

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pinjaman dalam mata uang Rupiah dikenakan suku bunga tahunan sebagai berikut:

- Kelompok Hijau, Kelompok Kuning, dan PT SGN:
  - JIBOR 1 bulan + 3,43781% berlaku sejak tanggal efektif perjanjian MAA sampai dengan tahun kelima (selama 5 tahun) perjanjian MAA.
  - JIBOR 1 bulan + 3,43781% + 1% berlaku sejak tahun keenam sampai dengan tahun pengakhiran perjanjian MAA pada tanggal 31 Desember 2028 (selama 3 tahun).

- Kelompok Merah:
  - 5,5% p.a berlaku sejak tanggal efektif Perjanjian MAA sampai dengan tahun ke lima (selama 5 tahun) dengan bunga ditangguhkan 3% p.a (selama 5 tahun), dan
  - 6,5% p.a sejak tahun keenam sampai dengan 31 Desember 2028 (selama 3 tahun) dengan bunga ditangguhkan 4% p.a (selama 2 tahun).

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

a. Bank and financial institution Loans (continued)

Long-term financial transformation program Master Amendement Agreement (MAA) (continued)

Interest Rate

For the year ended December 31, 2023 loans denominated in Rupiah bear annual interest rates as folows:

- *Green Group, Yellow Group, and PT SGN:*
  - *JIBOR 1 month + 3.43781% valid from the effective date of the MAA agreement until the fifth year (for 5 years) of the MAA*
  - *JIBOR 1 month + 3.43781% + 1% is valid from the sixth year until the year of termination of the MAA agreement on December 31, 2028 (for 3 years).*

- *Red Group:*
  - *5.5% p.a effective from the effective date of the MAA Agreement until the fifth year (for 5 years) with a deferred interest of 3% p.a (for 5 years), and*
  - *6.5% p.a from the sixth year until December 31, 2028 (for 3 years) with a deferred interest of 4% p.a (for 2 years).*

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Utang bank dan lembaga keuangan (lanjutan)

Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement* (MAA)) (lanjutan)

Suku Bunga (lanjutan)

Untuk fasilitas pinjaman dalam Dolar AS dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar LIBOR + 4,25% untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Atas fasilitas pinjaman tersebut telah dilunasi pada tanggal 24 Juli 2023.

Jaminan

Fasilitas pinjaman MAA yang diperoleh Perusahaan dan Entitas Anak tertentu dijamin dengan aset tertentu masing-masing penerima pinjaman dapat berupa piutang, aset tetap tertentu, aset tanaman dan juga hak guna usaha. Seluruh jaminan tersebut juga digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek.

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian MAA tersebut, Grup diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan antara lain, pemberian pinjaman, memenuhi rasio-rasio tertentu, memindahtangankan barang jaminan, mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Grup yang telah dijaminkan, pembagian deviden, anggaran tahunan.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

a. Bank and financial institution Loans (continued)

Long-term financial transformation program Master Amendement Agreement (MAA) (continued)

Interest Rate (continued)

The US Dollar loan facility bears an annual interest rate of LIBOR + 4.25% for the year ended December 31, 2022. For this loan facility facility was paid off on July 24, 2023.

Collateral

All MAA credit facilities obtained by the Company and certain Subsidiaries are secured by specific asset of the recipient in the form of receivables, certain fixed assets, plantations and also deferred charges of landrights. All collateral also were used to pledge for short-term loans.

Covenants

Based on the terms of the MAA agreements, the Group is required to obtain prior written approval from the bank in connection with, among others, granting loans, meeting certain ratios, transferring collateral, binding itself as debt guarantor or pledging the Group assets that have been secured/ guaranteed, dividend distribution, annual budget.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Utang bank dan lembaga keuangan (lanjutan)

Pinjaman Kredit Sindikasi Himpunan Bank Negara dalam rangka Pelunasan Fasilitas Pinjaman MAA *(Repackaging)*

Pada tanggal 27 Juni 2023, telah dilakukannya penandatangan atas Akta-Akta Acessoir Perjanjian Fasilitas Kredit (Palm Co), oleh:
- PT Perkebunan Nusantara III
- PT Perkebunan Nusantara IV
- PT Perkebunan Nusantara V
- PT Perkebunan Nusantara VI
- PT Perkebunan Nusantara XIII
- PT Industri Nabati Lestari
- PT Agro Sinergi Nusantara
- PT Sinergi Perkebunan Nusantara

dengan "HIMBARA Plus", yaitu:
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Perjanjian Kredit sindikasi diperoleh dengan tujuan untuk pelunasan seluruh pinjaman fasilitas MAA yang sebelumnya terhutang dari PTPN Grup (selanjutnya disebut sebagai "*Repackaging*").

Perjanjian tersebut saat ini masih berstatus *open renvoi* namun sudah berlaku efektif dengan persetujuan dari masing-masing kreditur, berdasakan Covernote No. 08/Not/GW/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan No. 05/Not/GW/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, yang ditanda tangan oleh Notaris Gamal Wahidin S.H.

Repackaging pada Grup PTPN atas utang MAA melalui utang sindikasi dilakukan melalui skema sebagai berikut:
1. Penyaluran dari kreditur Himbara ke PTPN IV untuk penerusan pelunasan utang pokok dan bunga MAA PTPN III, PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII

2. Penyaluran dari kreditur Himbara ke PTPN IV untuk penerusan pelunasan utang pokok dan bunga MAA PTPN III, PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

a. Bank and financial institution Loans (continued)

Pinjaman Kredit Sindikasi Himpunan Bank Negara dalam rangka Pelunasan Fasilitas Pinjaman MAA (Repackaging)

On June 27, 2023, the Acessoir Deed of Credit Facility Agreement was signed by:

- *PT Perkebunan Nusantara III*
- *PT Perkebunan Nusantara IV*
- *PT Perkebunan Nusantara V*
- *PT Perkebunan Nusantara VI*
- *PT Perkebunan Nusantara XIII*
- *PT Industri Nabati Lestari*
- *PT Agro Sinergi Nusantara*
- *PT Sinergi Perkebunan Nusantara*

With "HIMBARA Plus", namely:
- *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
- *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
- *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
- *Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*

The syndicated credit agreement was obtained for the purpose of repayment of all MAA facility loans previously payable from entities that are members of the PTPN Group. (hereinafter referred to as "Repackaging").

The agreement are currently in open renvoi but has been effective with approval from each respective creditor. according to Covernote No. 08/Not/GW/VI/2023, dated June 27, 2023, and No. 05/Not/GW/VII/2023, dated July 20, 2023, signed by Gamal Wahidin S.H.

Repackaging in the PTPN Group for MAA debt through syndicated debt is carried out through the following scheme:
1. *Distribution from Himbara creditors to PTPN IV for the continuation of repayment of principal debt and interest on MAA PTPN IV, PTPN III, PTPN V, PTPN VI, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN XI and PTPN XIII*
2. *Distribution from Himbara creditors to PTPN VII for the continuation of repayment of principal debt and interest on MAA PTPN I, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN XII, and PTPN XIV*

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Utang bank dan lembaga keuangan (lanjutan)

Pinjaman Kredit Sindikasi Himpunan Bank Negara dalam rangka Pelunasan Fasilitas Pinjaman MAA (Repackaging)

Berdasarkan perjanjian pinjaman kredit sindikasi, Kreditur menyetujui perubahan seluruh fasilitas pinjaman perbankan Grup PTPN dengan rincian suku bunga fasilitas pinjaman adalah sebesar JIBOR+Margin% per tahun, dengan margin yang disepakati adalah sebesar 2,75%. Jangka waktu untuk seluruh fasilitas pinjaman perbankan akan jatuh tempo tahun 2030.

Jaminan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dan Entitas Anak tertentu dijamin dengan aset tertentu masing-masing penerima pinjaman dapat berupa piutang, aset tetap tertentu, aset tanaman dan juga hak guna usaha. Seluruh jaminan tersebut juga digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek.

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman-pinjaman tersebut, Grup diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan antara lain, pemberian pinjaman, memenuhi rasio-rasio tertentu (terhitung sejak laporan keuangan audited 2024), memindahtangankan barang jaminan, mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Grup yang telah dijaminkan, anggaran tahunan.

Perjanjian pinjaman-pinjaman Grup di atas mensyaratkan beberapa pembatasan, antara lain, untuk mengubah anggaran dasar, memberi dan memperoleh pinjaman baru tanpa persetujuan awal, memberikan jaminan baru, melakukan penggabungan usaha, mengadakan penyertaan saham baru dalam perusahaan lain dan mengikatkan diri sebagai penjamin atau mengagunkan harta kekayaan.

Kepatuhan atas Syarat-Syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup telah memenuhi persyaratan pinjaman utang jangka panjang seperti disebutkan dalam perjanjian kredit.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

a. Bank and financial institution Loans (continued)

Pinjaman Kredit Sindikasi Himpunan Bank Negara dalam rangka Pelunasan Fasilitas Pinjaman MAA (Repackaging)

Based on the syndicated credit loan agreement, the Creditor approved changes to all PTPN Group bank loan facilities with details of the loan facility interest rate being JIBOR+Margin% per year, with an agreed margin of 2.75%. The term for all banking loan facilities will mature in 2030.

Collateral

As of December 31, 2023 and 2022, all credit facilities obtained by the Company and certain Subsidiaries are secured by specific asset of the recipient in the form of receivables, certain fixed assets, plantations and also deferred charges of landrights. All collateral also were used to pledge for short-term loans.

Covenants

Based on the terms of the loan agreements, the Group is required to obtain prior written approval from the bank in connection with, among others, granting loans, meeting certain ratios (starting from the 2024 audited financial statements), transferring collateral, binding itself as debt guarantor or pledging the Group assets that have been secured/ guaranteed, annual budget.

Group's loan agreements required some restrictions, such as to amend the articles of association, to give and obtain new loans without prior consent, providing new guarantees merge, to hold new shares in another company and bind themselves as guarantor or to pledge property.

Compliance with Loan Covenants

As of December 31, 2023, the Group has complied with covenants of the long-term loans as stipulated in the loan agreements.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) / *25. LONG-TERM DEBTS (continued)*

b. Wesel bayar / *b. Medium Term Notes (MTN)*

Rincian akun ini adalah sebagai berikut: / *The details of this account are as follows:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Perusahaan			***Company***
a) MTN III Tahun 2019 Seri B	-	600.000.000.000	*a) MTN III year 2019 Series B*
b) MTN II Tahun 2018	-	375.000.000.000	*b) MTN II year 2018*
c) MTN III Tahun 2019 Seri A	-	300.000.000.000	*c) MTN III year 2019 Series A*
d) MTN Syariah Ijarah I Tahun 2018	-	125.000.000.000	*d) MTN Syariah Ijarah I year 2018*
e) MTN IV Tahun 2019	-	100.000.000.000	*e) MTN IV year 2019*
f) SI II Tahun 2019 Seri G	-	465.000.000.000	*f) MTN Ijarah II year 2019 Series G*
g) SI II Tahun 2019 Seri E	-	200.000.000.000	*g) MTN Ijarah II year 2019 Series E*
h) SI II Tahun 2019 Seri C	-	150.000.000.000	*h) MTN Ijarah II year 2019 Series C*
i) SI II Tahun 2019 Seri F	-	105.000.000.000	*i) MTN Ijarah II year 2019 Series F*
j) SI II Tahun 2019 Seri H	-	100.000.000.000	*j) MTN Ijarah II year 2019 Series H*
k) SI II Tahun 2019 Seri D	-	40.000.000.000	*k) MTN Ijarah II year 2019 Series D*
l) SI II Tahun 2019 Seri A	-	10.000.000.000	*l) MTN Ijarah II year 2019 Series A*
Total Perusahaan	**-**	**2.570.000.000.000**	***Total Company***
Entitas Anak			***Subsidiaries***
a) MTN III Tahun 2019 Seri B	600.000.000.000	-	*a) MTN III year 2019 Series B*
b) MTN II Tahun 2018	375.000.000.000	-	*b) MTN II year 2018*
c) MTN III Tahun 2019 Seri A	300.000.000.000	-	*c) MTN III year 2019 Series A*
d) MTN Syariah Ijarah I Tahun 2018	125.000.000.000	-	*d) MTN Syariah Ijarah I year 2018*
e) SI II Tahun 2019 Seri E	200.000.000.000	-	*e) MTN Ijarah II year 2019 Series E*
f) SI II Tahun 2019 Seri C	150.000.000.000	-	*f) MTN Ijarah II year 2019 Series C*
g) SI II Tahun 2019 Seri F	105.000.000.000	-	*g) MTN Ijarah II year 2019 Series F*
h) SI II Tahun 2019 Seri D	40.000.000.000	-	*h) MTN Ijarah II year 2019 Series D*
i) SI II Tahun 2019 Seri A	10.000.000.000	-	*i) MTN Ijarah II year 2019 Series A*
j) MTN VIII A (PTPN II)	215.000.000.000	215.000.000.000	*j) MTN VIII A (PTPN II)*
k) MTN VIII B (PTPN II)	136.000.000.000	136.000.000.000	*k) MTN VIII B (PTPN II)*
l) MTN PTPN V	445.000.000.000	445.000.000.000	*l) MTN PTPN V*
m) MTN PTN X	500.000.000.000	500.000.000.000	*m) MTN PTPN X*
Sub Total Anak	**3.201.000.000.000**	**1.296.000.000.000**	***Sub Total Subsidiaries***
Total Grup	3.201.000.000.000	3.866.000.000.000	***Total Group***
Neto			*Net*
Dikurangi bagian jangka pendek	(1.896.000.00.000)	(1.105.000.000.000)	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**1.305.000.000.000**	**2.761.000.000.000**	***Long-term portion***

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Wesel bayar

(i) Perusahaan

a) MTN III Tahun 2019 Seri B

Pada tanggal 9 Mei 2019 PTPN III melakukan penawaran MTN III PTPN III Tahun 2019 Seri B dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau sejumlah Rp600.000.000.000. MTN ini memiliki jangka waktu 5 tahun sampai dengan 9 Mei 2024 dengan tingkat bunga sebesar 11,25% per tahun yang dibayar secara triwulan. MTN tersebut telah didaftarkan di KSEI. Pada tanggal 31 Desember 2023, *rating* atas MTN ini adalah idBBB.

Selanjutnya, sehubungan dengan transksi *spin-off* (Catatan 1d) yang dilakukan pada tanggal 1 Desember, MTN tersebut telah dialihkan ke PTPN IV.

b) MTN II Tahun 2018

Pada tanggal 23 Januari 2019 PTPN III melakukan penawaran MTN II Tahun 2018 dengan Arranger dan/atau pembeli pertama PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau sejumlah Rp375.000.000.000. MTN ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 23 Januari 2022 dengan tingkat bunga 11% per tahun.

Berdasarkan rapat umum tanggal 23 Desember 2021, pemegang MTN menyetujui perpanjangan jangka waktu dari 23 Januari 2022 menjadi 23 Januari 2024 dan kenaikan suku bunga 11,25% per tahun. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 51 tanggal 23 Desember 2021 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. MTN tersebut telah didaftarkan di KSEI. Pada tanggal 31 Desember 2023, *rating* atas MTN ini adalah idBBB.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

b. Medium Term Notes (MTN)

(i) Company

a) MTN III Year 2019 Series B

On May 9, 2019, PTPN III has made an offer of MTN III PTPN III Series B in 2019 with the arranger and/or the first purchaser of PT Mandiri Sekuritas along with PT Bahana Sekuritas and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the Monitoring Agent, amounting to Rp600,000,000,000. The MTN has a term of 5 years up to May 9, 2024 with an interest rate of 11.25% per annum payable on quarterly basis. The MTN has been registered in KSEI. As of December 31, 2023, the rating for this MTN is idBBB.

Furthermore, related to the spin off transaction (Note 1d) which was carried out on December 1, 2023, the MTN has been transferred to PTPN IV.

b) MTN II Year 2018

On January 23, 2019, PTPN III has made an offer of MTN II in 2018 with the arranger or the first buyer PT Mandiri Sekuritas and/or PT Bahana Sekuritas along with the PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as an monitoring agent amounting to Rp375,000,000,000. MTN has a term 3 years up to January 23, 2022 with interest rate 11%, annually.

Based on the general meeting dated December 23, 2021, The MTN holder agreed to extend the term from January 23, 2022 tp January 23, 2023 and the increased interest rate of 11.25% annually. This agreement has been authorized by deed No.51 dated December 23, 2023 by notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The MTN has been registered in KSEI. As of December 31, 2023, the rating for this MTN is idBBB.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Wesel bayar (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

b) MTN II Tahun 2018 (lanjutan)

Selanjutnya, sehubungan dengan transksi spin off (Catatan 1d) yang dilakukan pada tanggal 1 Desember, MTN tersebut telah dialihkan ke PTPN IV.

c) MTN III Tahun 2019 Seri A

Pada tanggal 9 Mei 2019, PTPN III melakukan penawaran MTN III PTPN III Tahun 2019 Seri A dengan *Arranger* dan/atau pembeli pertama PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau sejumlah Rp300.000.000.000. MTN ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 9 Mei 2022, dengan tingkat bunga sebesar 11% per tahun yang dibayar secara triwulan.
Berdasarkan rapat umum tanggal 18 April 2022, pemegang MTN menyetujui perpanjangan jangka waktu menjadi 5 tahun yaitu dari 9 Mei 2022 menjadi 9 Mei 2024. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 35 tanggal 18 April 2022 oleh notaris Leolin Jayayanti, S.H, M.Kn. MTN tersebut telah didaftarkan di KSEI. Pada tanggal 31 Desember 2023, rating atas MTN ini adalah idBBB.

Selanjutnya, sehubungan dengan transksi *spin-off* (Catatan 1d) yang dilakukan pada tanggal 1 Desember, MTN tersebut telah dialihkan ke PTPN IV.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

b. Medium Term Notes (MTN) (continued)

(i) Company (continued)

b) MTN II Year 2018 (continued)

Furthermore, related to the spin off transaction (Note 1d) which was carried out on December 1, 2023, the MTN has been transferred to PTPN IV.

c) MTN III Year 2019 Series A

*On May 9, 2019, PTPN III has made an offer of MTN III PTPN III Series A in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser of PT Mandiri Sekuritas along with PT Bahana Sekuritas and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the Monitoring Agent, amounting to Rp300,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to May 9, 2022 with an interest rate of 11.00% per annum payable on quarterly basis.
Based on the general meeting of MTN on April 18, 2022 has agreed to extend the period of loan from May 9, 2022 to May 9, 2025. This agreement was notarized under deed no 35. dated April 18 2022 of notary Leolin Jayayanti, S.H, M.Kn. The MTN has been registered in KSEI. As of December 31, 2023 the rating for this MTN is idBBB.*

Furthermore, related to the spin off transaction (Note 1d) which was carried out on December 1, 2023, the MTN has been transferred to PTPN IV.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Wesel bayar (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

d) MTN Syariah Ijarah I Tahun 2018

Pada tanggal 2 Januari 2019 PTPN III. melakukan penawaran MTN Syariah Ijarah I PTPN III tahun 2018 dengan *Arranger* dan/atau pembeli pertama PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau sejumlah Rp125.000.000.000. MTN ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 23 Januari 2022, dengan tingkat bunga sebesar 11,00% per tahun yang dibayar secara triwulan.

Berdasarkan rapat umum tanggal 17 Januari 2022, pemegang MTN menyetujui perpanjangan jangka waktu dari 23 Januari 2022 menjadi 23 Januari 2024. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 19 tanggal 17 Januari 2022 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. MTN ini telah didaftarkan di KSEI. Pada tanggal 31 Desember 2023, *rating* atas MTN ini adalah idBBB.

Selanjutnya, sehubungan dengan transksi *spin-off* (Catatan 1d) yang dilakukan pada tanggal 1 Desember, MTN tersebut telah dialihkan ke PTPN IV.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

b. Medium Term Notes (MTN) (continued)

(i) Company (continued)

d) MTN Syariah Ijarah I Year 2018

On January 21, 2019, PTPN III has made an offer of MTN Syariah Ijarah I in 2018 with the Arranger and/or the first purchaser of PT Mandiri Sekuritas along with PT Bahana Sekuritas and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Monitoring Agent. amounting to Rp125,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to January 23, 2022 with an interest rate of 11.00% per annum payable on quarterly basis.

Based on the general meeting of MTN on January 17, 2022 has agreed to extend the period of loan from January 23, 2022 to January 23, 2024. This agreement was notarized under deed no 19 dated January 17 2022 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The MTN has been registered in KSEI. As of December 31, 2023, the rating for this MTN is idBBB.

Furthermore, related to the spin off transaction (Note 1d) which was carried out on December 1, 2023, the MTN has been transferred to PTPN IV.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Wesel bayar (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

e) MTN IV Tahun 2019

Pada tanggal 20 November 2019, PTPN III, melakukan penawaran MTN IV PTPN III Tahun 2019 dengan *Arranger* dan/atau pembeli pertama PT Danareksa Sekuritas dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau sejumlah Rp100.000.000.000. MTN ini memiliki jangka waktu 5 tahun sampai dengan 20 November 2024, dengan tingkat bunga sebesar 8,75% per tahun yang dibayar secara triwulan. MTN tersebut telah didaftarkan di KSEI. Pada tanggal 31 Desember 2023, rating atas MTN ini adalah idBBB.

Selanjutnya, sehubungan dengan transksi *spin off* (Catatan 1d) yang dilakukan pada tanggal 1 Desember, MTN tersebut telah dialihkan ke PTPN IV.

f) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri G

Pada tanggal 21 Agustus 2019 PTPN III, melakukan penawaran Sukuk Ijarah II PTPN III (Persero) Seri G Tahun 2019 dengan *Arranger* dan/atau pembeli pertama PT Permodalan Nasional Madani - Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Bank Kustodi: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejumlah Rp465.000.000.000. Sukuk ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 21 Agustus 2022, dengan tingkat bunga sebesar 11,20% per tahun yang dibayar secara triwulan.

Pada tanggal 10 Agustus 2022, telah disetujui perpanjangan jangka waktu dari 21 Agustus 2022 menjadi 21 Februari 2023. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 16 tanggal 10 Agustus 2022 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Sukuk tersebut telah didaftarkan di KSEI. Pada tanggal 31 Desember 2022, rating atas MTN ini adalah idBBB.

Pada tahun 2023, MTN ini telah jatuh tempo dan telah dilunasi oleh Perusahaan.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

b. Medium Term Notes (MTN) (continued)

(i) Company (continued)

e) MTN IV Year 2019

On November 20, 2019, PTPN III has made an offer of MTN IV PTPN III in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser of PT Danareksa Sekuritas and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Monitoring Agent. amounting to Rp100,000,000,000. The MTN has a term of 5 years up to November 20. 2024 with an interest rate of 8.75% per annum payable on quarterly basis. The MTN has been registered in KSEI. As of December 31, 2023, the rating for this MTN is idBBB.

Furthermore, related to the spin off transaction (Note 1d) which was carried out on December 1, 2023, the MTN has been transferred to PTPN IV.

f) MTN Ijarah II Year 2019 Series G

On August 21, 2019, PTPN III has made an offer of MTN Ijarah II PTPN III (Persero) Series G in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser PT Permodalan Nasional Madani - Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Custodian Bank: PT Bank Maybank Indonesia Tbk. amounting to Rp465,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to August 21, 2022, with an interest rate of 11.20% per annum payable on a quarterly basis.

On August 10, 2022 has agreed to extend the period of loan from August 21, 2022 to February 21, 2023. This agreement was notarized under deed no 16. dated August 10 2022 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The MTN has been registered in KSEI. As of December 31, 2022, the rating for this MTN is idBBB.

In 2023, this MTN has matured and have been paid off by the Company.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Wesel bayar (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

g) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri E

Pada tanggal 23 Agustus 2019 PTPN III, melakukan penawaran Sukuk Ijarah II PTPN III (Persero) Seri E Tahun 2019 dengan *Arranger* dan/atau pembeli pertama PT Permodalan Nasional Madani – Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Bank Kustodi: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejumlah Rp200.000.000.000. Sukuk ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 23 Agustus 2022, dengan tingkat bunga sebesar 11,20% per tahun yang dibayar secara triwulan.

Pada tanggal 10 Agustus 2022, telah disetujui perpanjangan jangka waktu dari 23 Agustus 2022 menjadi 23 Agustus 2025. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 16 tanggal 10 Agustus 2022 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Sukuk tersebut telah didaftarkan di KSEI. Pada tanggal 31 Desember 2023, rating atas MTN ini adalah idBBB.

Selanjutnya, sehubungan dengan transksi *spin off* (Catatan 1d) yang dilakukan pada tanggal 1 Desember, MTN tersebut telah dialihkan ke PTPN IV.

h) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri C

Pada tanggal 22 Agustus 2019 PTPN III, melakukan penawaran Sukuk Ijarah II PTPN III (Persero) Seri C Tahun 2019 dengan *Arranger* dan/atau pembeli pertama PT Permodalan Nasional Madani - Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Bank Kustodi: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejumlah Rp150.000.000.000. Sukuk ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 22 Agustus 2022, dengan tingkat bunga sebesar 11,20% per tahun yang dibayar secara triwulan.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

b. Medium Term Notes (MTN) (continued)

(i) Company (continued)

g) MTN Ijarah II Year 2019 Series E

On August 23, 2019, PTPN III has made an offer of MTN Ijarah II PTPN III (Persero) Series E in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser PT Permodalan Nasional Madani - Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III – Custodian Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk. amountiing to Rp200,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to August 23, 2022, with an interest rate of 11.20% per annum payable on a quarterly basis.

On August 10, 2022 has agreed to extend the period of loan from August 23, 2022 to August 23, 2025. This agreement was notarized under deed no 16. dated August 10 2022 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.The MTN has been registered in KSEI. As of December 31, 2023, the rating for this MTN is idBBB.

Furthermore, related to the spin off transaction (Note 1d) which was carried out on December 1, 2023, the MTN has been transferred to PTPN IV.

h) MTN Ijarah II Year 2019 Series C

On August 22, 2019, PTPN III has made an offer of MTN Ijarah II PTPN III (Persero) Series C in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser PT Permodalan Nasional Madani - Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Custodian Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk. amounting to Rp150,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to August 22. 2022 with an interest rate of 11.20% per annum payable on a quarterly basis.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Wesel bayar (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

i) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri E (lanjutan)

Pada tanggal 10 Agustus 2022, telah disetujui perpanjangan jangka waktu dari 22 Agustus 2022 menjadi 22 Agustus 2025. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 16 tanggal 10 Agustus 2022 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Sukuk tersebut telah didaftarkan di KSEI. Pada tanggal 31 Desember 2023, rating atas MTN ini adalah idBBB.

Selanjutnya, sehubungan dengan transksi *spin off* (Catatan 1d) yang dilakukan pada tanggal 1 Desember, MTN tersebut telah dialihkan ke PTPN IV.

j) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri F

Pada tanggal 3 September 2019 PTPN III. melakukan penawaran Sukuk Ijarah II PTPN III (Persero) Seri F Tahun 2019 dengan *Arranger* dan/atau pembeli pertama PT Permodalan Nasional Madani - Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Bank Kustodi: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejumlah Rp105.000.000.000. Sukuk ini memiliki jangka waktu 5 tahun sampai dengan 3 September 2024, dengan tingkat bunga sebesar 11.60% per tahun yang dibayar secara triwulan. Sukuk tersebut telah didaftarkan di KSEI. Pada tanggal 31 Desember 2023, *rating* atas MTN ini adalah idBBB.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

b. Medium Term Notes (MTN) (continued)

(i) Company (continued)

i) MTN Ijarah II Year 2019 Series E (continued)

On August 10, 2022 has agreed to extend the period of loan from August 22, 2022 to August 22, 2025. This agreement was notarized under deed no 16. dated August 10 2022 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.The MTN has been registered in KSEI. As of December 31, 2023 the rating for this MTN is idBBB.

Furthermore, related to the spin off transaction (Note 1d) which was carried out on December 1, 2023, the MTN has been transferred to PTPN IV.

j) MTN Ijarah II Year 2019 Series F

On September 3, 2019, PTPN III has made an offer of MTN Ijarah II PTPN III (Persero) Series F in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser PT Permodalan Nasional Madani - Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III – Custodian Bank: PT Bank Maybank Indonesia Tbk. amounting to Rp105,000,000,000. The MTN has a term of 5 years up to September 3, 2024, with an interest rate of 11.60% per annum payable on a quarterly basis. The MTN has been registered in KSEI. As of December 31, 2023, the rating for this MTN is idBBB.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Wesel bayar (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

j) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri F (lanjutan)

Selanjutnya, sehubungan dengan transksi *spin off* (Catatan 1d) yang dilakukan pada tanggal 1 Desember, MTN tersebut telah dialihkan ke PTPN IV.

k) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri H

Pada tanggal 20 Desember 2019 PTPN III, melakukan penawaran Sukuk Ijarah II PTPN III (Persero) Seri H Tahun 2019 dengan Arranger dan/atau pembeli pertama PT Permodalan Nasional Madani - Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Bank Kustodi: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejumlah Rp100.000.000.000. Sukuk ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 21 Agustus 2022 dengan tingkat bunga sebesar 11,20% per tahun yang dibayar secara triwulan.

Pada tanggal 10 Agustus 2022, telah disetujui perpanjangan jangka waktu dari 21 Agustus 2022 menjadi 21 Februari 2023. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 16 tanggal 10 Agustus 2022 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Sukuk tersebut telah didaftarkan di KSEI. Pada tanggal 31 Desember 2022, rating atas MTN ini adalah idBBB.

Pada tahun 2023, MTN ini telah jatuh tempo dan telah dilunasi oleh Perusahaan.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

c. Medium Term Notes (MTN) (continued)

(i) Company (continued)

j) MTN Ijarah II Year 2019 Series F (continued)

Furthermore, related to the spin off transaction (Note 1d) which was carried out on December 1, 2023, the MTN has been transferred to PTPN IV.

k) MTN Ijarah II Year 2019 Series H

On December 21, 2019, PTPN III has made an offer of MTN Ijarah II PTPN III (Persero) Series H in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser PT Permodalan Nasional Madani - Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III – Custodian Bank: PT Bank Maybank Indonesia Tbk. amounting to Rp100,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to August 21, 2022, with an interest rate of 11.20% per annum payable on a quarterly basis.

On August 10, 2022 has agreed to extend the period of `loan from August 21, 2022 to February 21, 2023. This agreement was notarized under deed no 16. dated August 10 2022 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The MTN has been registered in KSEI. As of December 31, 2022, the rating for this MTN is idBBB

In 2023, this MTN has matured and have been paid off by the Company.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Wesel bayar (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

l) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri D

Pada tanggal 21 Agustus 2019 PTPN III. melakukan penawaran Sukuk Ijarah II PTPN III (Persero) Seri D Tahun 2019 dengan *Arranger* dan/atau pembeli pertama PT Permodalan Nasional Madani - Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Bank Kustodi: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejumlah Rp40.000.000.000. Sukuk ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 21 Agustus 2022. dengan tingkat bunga sebesar 11,20% per tahun yang dibayar secara triwulan.

Pada tanggal 10 Agustus 2022, telah disetujui perpanjangan jangka waktu dari 21 Agustus 2022 menjadi 21 Februari 2023. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 16 tanggal 10 Agustus 2022 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Sukuk tersebut telah didaftarkan di KSEI. Pada tanggal 31 Desember 2023 *rating* atas MTN ini adalah idBBB.

Selanjutnya, sehubungan dengan transksi *spin off* (Catatan 1d) yang dilakukan pada tanggal 1 Desember, MTN tersebut telah dialihkan ke PTPN IV.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

b. Medium Term Notes (MTN) (continued)

(i) Company (continued)

l) MTN Ijarah II Year 2019 Series D

On August 21. 2019. PTPN III has made an offer of MTN Ijarah II PTPN III (Persero) Series D in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser PT Permodalan Nasional Madani - Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Custodian Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk. amounting to Rp40,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to August 21, 2022 with an interest rate of 11.20% per annum payable on a quarterly basis.

On August 10, 2022 has agreed to extend the period of loan from August 21, 2022 to February 21, 2023. This agreement was notarized under deed no 16. dated August 10 2022 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.The MTN has been registered in KSEI. As of December 31, 2023, the rating for this MTN is idBBB.

Furthermore, related to the spin off transaction (Note 1d) which was carried out on December 1, 2023, the MTN has been transferred to PTPN IV.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Wesel bayar (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

m) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri A

Pada tanggal 21 Agustus 2019 PTPN III. melakukan penawaran Sukuk Ijarah II PTPN III (Persero) Seri A Tahun 2019 dengan *Arranger* dan/atau pembeli pertama PT Permodalan Nasional Madani - Investment Management (PNM IM) – RDPT PNM Multisektoral III - Bank Kustodi: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejumlah Rp10.000.000.000. Sukuk ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 21 Agustus 2022. dengan tingkat bunga sebesar 11,20% per tahun yang dibayar secara triwulan.

Pada tanggal 10 Agustus 2022, telah disetujui perpanjangan jangka waktu dari 21 Agustus 2022 menjadi 21 Agustus 2025. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 16 tanggal 10 Agustus 2022 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Sukuk tersebut telah didaftarkan di KSEI. Pada tanggal 31 Desember 2023 *rating* atas MTN ini adalah idBBB.

Selanjutnya, sehubungan dengan transksi *spin off* (Catatan 1d) yang dilakukan pada tanggal 1 Desember, MTN tersebut telah dialihkan ke PTPN IV.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

b. Medium Term Notes (MTN) (continued)

(i) Company (continued)

m) MTN Ijarah II Year 2019 Series A

On August 21. 2019. PTPN III has made an offer of MTN Ijarah II PTPN III (Persero) Series A in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser PT Permodalan Nasional Madani – Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Custodian Bank: PT Bank Maybank Indonesia Tbk. amounting to Rp10,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to August 21, 2022 with an interest rate of 11.20% per annum payable on a quarterly basis.

On August 10, 2022 has agreed to extend the period of loan from August 21, 2022 to August 21, 2025. This agreement was notarized under deed no 16. dated August 10 2022 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.The MTN has been registered in KSEI. As of December 31, 2023, the rating for this MTN is idBBB.

Furthermore, related to the spin off transaction (Note 1d) which was carried out on December 1, 2023, the MTN has been transferred to PTPN IV.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Wesel bayar (lanjutan)

(ii) Entitas Anak

a) MTN VIII A - PTPN I (eks PTPN II)

Pada tanggal 23 Juni 2019 PTPN I (eks PTPN II) melakukan penawaran MTN VIII A dengan *Arranger* dan/atau pembeli pertama PT Asta Kapital Asia dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau sejumlah Rp215.000.000.000, MTN ini memiliki jangka waktu 5 tahun sampai dengan 26 Juni 2024, dengan tingkat bunga sebesar 11,00% per tahun yang dibayar secara triwulan. MTN tersebut telah didaftarkan di KSEI. Pada tanggal 31 Desember 2023, *rating* atas MTN ini adalah idBBB.

b) MTN VIII B - PTPN I (eks PTPN II)

Pada tanggal 30 Oktober 2019, PTPN I (Ex PTPN II) melakukan penawaran MTN VIII A dengan *Arranger* dan/atau pembeli pertama PT Asta Kapital Asia dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau sejumlah Rp136.000.000.000. MTN ini memiliki jangka waktu 5 tahun sampai dengan 31 Oktober 2024, dengan tingkat bunga sebesar 11,00% per tahun yang dibayar secara triwulan. MTN tersebut telah didaftarkan di KSEI. Pada tangga 31 Desember 2023, *rating* atas MTN ini adalah idBBB.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

b. Medium Term Notes (MTN) (continued)

(ii) Subsidiaries

a) MTN VIII A - PTPN I (Eks PTPN II)

On June .23, 2019, PTPN I (eks PTPN II) has made an offer of MTN VIII A with the Arranger and/or the first purchaser PT Asta Kapital Asia and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Monitoring Agent, amounting to Rp215,000,000,000. The MTN has a term of 5 years up to June 26, 2024, with an interest rate of 11.00% per annum payable on a quarterly basis. The MTN has been registered in KSEI. As of December 31, 2023, the rating for this MTN is idBBB.

b) MTN VIII B - PTPN I (eks PTPN II)

On October 31, 2024, PTPN I (Ex PTPN II) has made an offer of MTN VIII A with the Arranger and/or the first purchaser PT Asta Kapital Asia and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Monitoring Agent, amounting to Rp136,000,000,000. The MTN has a term of 5 years up to October 31, 2024, with an interest rate of 11.00% per annum payable on a quarterly basis. The MTN has been registered in KSEI. As of December 31, 2023, the rating for this MTN is idBBB.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Wesel bayar (lanjutan)

(ii) Entitas Anak

c) MTN PTPN V – PTPN IV (eks PTPN V)

Pada tanggal 9 September 2021, PTPN IV (Ex PTPN V) melakukan penawaran terbatas *Medium Term Notes (MTN)* PTPN V Tahun 2021 dengan Arranger dan/atau pembeli pertama PT Mandiri Sekuritas dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Agen Pemantau, sejumlah Rp445.000.000.000. MTN ini memiliki jangka waktu 4 tahun 10 bulan sampai dengan 13 Juli 2026, dengan tingkat bunga sebesar 11,25% per tahun yang dibayar secara triwulanan. MTN tersebut telah didaftarkan di KSEI. Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo, MTN tersebut mendapat peringkat idBBB+.

d) MTN PTPN X – PTPN I (eks PTPN X)

Berdasarkan perjanjian penerbitan Medium Term Notes ("MTN") No. 52 tanggal 23 Mei 2018 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., PTPN I (Ex PTPN X) menerbitkan surat berharga yang bersifat utang jangka menengah MTN PTPN X Tahun 2018 dengan nominal Rp500.000.000.000. MTN tersebut bersifat *full commitment* dan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) pinjaman PTPN X.

Jangka waktu pinjaman adalah tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021. Suku bunga pinjaman sebesar 10,5% per tahun yang dibayar setiap 3 bulan. Berdasarkan rapat umum tanggal 15 Desember 2020, pemegang MTN menyetujui perpanjangan jangka waktu dari 25 Mei 2021 menjadi 25 Mei 2023 dan kenaikan suku bunga 10,75% per tahun. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 8 tanggal 4 Februari 2021 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

b. Medium Term Notes (MTN) (continued)

(ii) Subsidiaries

c) MTN PTPN V-PTPN IV (eks PTPN V)

On September 9, 2021, PTPN IV (Ex PTPN V) made a private placement of Medium Term Notes (MTN) PTPN V Year 2021 with the Arranger and/or the first purchaser as PT Mandiri Sekuritas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk as the Monitoring Agent amounting to Rp445,000,000,000. This MTN has a period of 4 years 10 months years up to July 13, 2026, with an interest rate of 11.25% per annum, payable on quarterly basis. The MTN has been registered in KSEI. Based on the rating issued by Pefindo, the above-mentioned MTN was rated idBBB+.

d) MTN PTPN X - PTPN I (eks PTPN X)

Based on Medium Term Notes ("MTN") issuance agreement No. 52 dated May 23, 2018 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., PTPN I (Ex PTPN X) issued medium term notes of MTN PTPN X 2018 amounting to Rp500,000,000,000. The MTN is under full commitment basis and is used for refinancing of the PTPN X loans.

The period of loan is started from May 25, 2018 until May 25, 2021. The loan bears interest rate at 10.5% per annum and is paid quarterly. Based on the general meeting of MTN on December 15, 2020 has agreed to extend the period of loan from May 21, 2021 to May 25, 2023 and increased in interest rate to 10.75% per annum. This agreement was notarized under deed no 8. dated February 4, 2021 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Wesel bayar (lanjutan)

(ii) Entitas Anak (lanjutan)

d) MTN PTPN X – PTPN I (eks PTPN X) (lanjutan)

Pada tanggal 12 Mei 2023, penerbit dan agen pemantau telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang MTN dan memutuskan melakukan perpanjangan jangka waktu dari 25 Mei 2023 menjadi 25 Mei 2026. Perjanjian ini telah diaktakan pada Addendum II Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau MTN PTPN X tahun 2018 No. 22 tanggal 16 Mei 2023 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H

Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo, MTN tersebut mendapat peringkat idBBB.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

b. Medium Term Notes (MTN) (continued)

(ii) Subsidiaries (continued)

d) MTN PTPN X - PTPN I (eks PTPN X) (continued)

On 12 May 2023, the issuer and monitoring agent held a General Meeting of MTN Holders and decided to extend the term from 25 May 2023 to 25 May 2026. This agreement has been notarized in Addendum II to the Agreement on Issuance and Appointment of PTPN X MTN Monitoring Agent of 2018 No. 22 dated 16 May 2023 by notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Based on the rating issued by Pefindo, the above-mentioned MTN was rated idBBB.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) / *25. LONG-TERM DEBTS (continued)*

c. Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia / *c. Debts to the Government of the Republic of Indonesia*

Rincian akun ini adalah sebagai berikut: / *The details of this account are as follows:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Perusahaan			***Company***
(i) Pemulihan Ekonomi Nasional	3.999.999.999.411	2.952.480.860.413	*Pemulihan Ekonomi Nasional (i)*
Entitas Anak			***Subsidiaries***
(ii) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Loan No.1751 IND – Proyek NES III 1979 Loan/1968	1.002.642.744	1.002.642.744	*International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Loan No.1751 IND – Proyek NES III 1979 Loan/1968 (ii)*
Loan No.1751 IND - G01 Loan/1968	6.829.436.790	6.829.436.790	*Loan No.1751 IND - G01 Loan/1968*
(iii) Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR)	7.603.588.210	7.603.588.210	*Nucleus Estate Smallhoder (NES) (iii)*
(iv) Eks Gebr. StorkApparaten Fabriek NV. Amsterdam	450.000.000	450.000.000	*Ex Gebr. StorkApparaten Fabriek NV. Amsterdam (iv)*
(v) BBD Rehab-II Eks PT Perkebunan XX (Persero)	2.950.304.707	3.522.896.325	*BBD Rehab-II Ex PT Perkebunan XX (Persero) (v)*
(vi) Kredit Modal Kerja eks PG Pelaihari (KMK) DP3	16.150.613.586	16.150.613.586	*Kredit Modal Kerja ex PG Pelaihari (KMK) DP3 (vi)*
(vii) Eks PT Perkebunan XXXII (Persero),	101.235.445.002	101.235.445.002	*Ex PT Perkebunan XXXII (Persero) (vii)*
(vii) Eks PT Perkebunan XXVIII (Persero)	86.535.423.763	86.535.423.763	*Ex PT Perkebunan XXVIII (Persero) (vii)*
(vii) Eks PT Bina MulyaTernak (BMT)	8.467.834.493	8.467.834.493	*Ex PT Bina MulyaTernak (BMT) (vii)*
(vii) Ex PT Perkebunan XXIII (Persero)	10.172.902.916	10.172.902.916	*Ex PT Perkebunan XXIII (Persero) (vii)*
(viii) Rehabilitasi PIR	5.114.025.869	5.114.025.869	*PIR Rehabilitation (viii)*
Total	**4.246.512.217.491**	**3.199.565.670.111**	***Total***
Dikurangi jangka pendek	(226.085.116.085)	(226.085.116.085)	*Less short-term portion*
Bagian jangka panjang	**4.020.427.101.406**	**2.973.480.554.026**	***Long-term portion***

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia (lanjutan)

i. Pemulihan Ekonomi Nasional

Perjanjian Pemberian Pinjaman Investasi Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam Bentuk Pinjaman Subordinasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("IP - PEN").

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 75 tahun 2020 antara PTPN III (Persero) dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai Pelaksana Investasi yang dibuat di hadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, pada tanggal 28 Desember 2020, PTPN III (Persero) menerima alokasi Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk Pinjaman Subordinasi. Selanjutnya, perjanjian tersebut telah diubah dengan Addendum Perubahan Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. PRJ-13/KN/2023 - 144/ADDPKS/10/2023 tertanggal 24 Oktober 2023.

Perubahan Perjanjian Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan ketentuan dalam hal transaksi penggabungan di PTPN Group telah efektif, maka Anak Perusahaan Penerima Investasi akan menjadi sebagai berikut:

1) Palm Co yang terdiri dari PTPN IV, PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII
2) Supporting Co yang terdiri dari PTPN I, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIV.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

c. Debts to the Government of the Republic of Indonesia (continued)

i. Pemulihan Ekonomi Nasional

The Government of Indonesia's Investment Loan Agreement to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the Form of Subordinated Loans in the Framework of the National Economic Recovery Program ("IP - PEN").

Based on The Deed of Agreement No. 75 of 2020 between PTPN III (Persero) and the Indonesian Export Financing Institution (LPEI) as the Executor of Investment made before Notary Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, on December 28, 2020, PTPN III (Persero) received the allocation of Government Investment Funds in the framework of the National Economic Recovery Program (PEN) in the form of Subordinated Loans. Furthermore, the agreement has been amended with the Amendment of the Implementation Agreement on Investment between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Indonesian Export Financing Institution regarding the Implementation of Government Investment in the National Economic Recovery Program to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. PRJ-13/KN/2023 - 144/ADDPKS/10/2023 dated October 24, 2023.

The Amendment of the Agreement for the Provision of Government Investment Funds from the Republic of Indonesia to PT Perkebunan Nusantara III (Persero), with provisions regarding transactions of mergers within the PTPN Group, has become effective. Consequently, the Receiving Subsidiaries of the Investment will be as follows:

1) Palm Co, consisting of PTPN IV, PTPN V, PTPN VI, and PTPN XIII
2) Supporting Co, consisting of PTPN I, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, and PTPN XIV.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia (lanjutan)

i. Pemulihan Ekonomi Nasional (lanjutan)

Pinjaman Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IP - PEN) tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan tentang Perjanjian Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam Bentuk Pinjaman Subordinasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Adapun syarat dan ketentuan mengenai bentuk, nilai, jangka waktu dan tingkat suku bunga sebagai berikut:

- Bentuk Investasi : Pinjaman Subordinasi
- Nilai: pagu total dana investasi Rp4.000.000.000.000 (empat triliun rupiah)
- Tujuan Penggunaan : Pembiayaan komoditas kelapa sawit dan komoditas tebu
- Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan dengan masa tenggang (grace period) pembayaran pokok 84 bulan (delapan puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Investasi
- Bunga : 2% (dua persen) per tahun

Penggunaan Dana Investasi Pemerintah Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("Dana IP PEN") dapat dialokasikan kepada Anak Perusahaan PTPN III (Persero) ("Anak Perusahaan"), yaitu PTPN I, dan PTPN IV.

Penggunaan alokasi dana IP PEN oleh anak perusahaan dilaksanakan dengan skema Pinjaman Pemegang Saham yang diatur dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Yang Bersumber Dari Dana Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

c. Debts to the Government of the Republic of Indonesia (continued)

i. Pemulihan Ekonomi Nasional (continued)

Government Investment Loans in the framework of the National Economic Recovery Program (IP - PEN) are determined by the Government of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Finance on the Agreement to Grant Investment Funds of the Government of the Republic of Indonesia to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the Form of Subordinated Loans in the Framework of the National Economic Recovery Program.

The terms and conditions regarding the form, value, term and interest rate are as follows:

- *Form of Investment: Subordinated Loans*
- *Value: total investment fund ceiling of Rp4,000,000,000,000 (four trillion rupiah)*
- *Purpose of Use: Financing of palm oil and sugarcane commodities*
- *Period: 10 (ten) years from the date of signing with grace period of principal payment of 84 months (eighty-four) months from the date of signing of the Investment Agreement*
- *Interest: 2% (two percent) per year*

The use of Government Investment Funds of the National Economic Recovery Program ("PEN IP Funds") can be allocated to Subsidiaries of PTPN III (Persero) ("Subsidiaries"), namely PTPN I and PTPN IV.

The use of IP PEN fund allocation by Subsidiaries is carried out by the Shareholder Loan scheme stipulated in the Loan Agreement Sourced From Government Investment Funds in the Framework of the National Economic Recovery Program.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia (lanjutan)

(ii) IBRD

Loan No. 1751 iND – Proyek NES III/1979

Pada periode tahun 1979 sampai dengan 1992, Perusahaan mendapat pinjaman dari IBRD. Pinjaman ini merupakan penerusan pinjaman antara Pemerintah dengan PN Perkebunan yang pencairannya dilakukan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian IBRD No. 1751 iND pada tanggal 13 Agustus 1979. Pinjaman awal IBRD sebesar Rp30.317.384.461 ini dikenakan bunga 13,50% per tahun.

Sesuai dengan perjanjian nomor AMA-463/SLA-12/DSMI/2012 tanggal 19 November 2012, saldo pinjaman IBRD menjadi sebesar Rp26.047.965.037 yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp25.045.322.293 dan jasa bank sebesar Rp1.002.642.744.

Pada tahun 2016, utang kepada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dikonversi menjadi modal oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2016 senilai Rp 25.045.323.000. Perubahan tersebut telah disajikan dalam akta notaris No. 1 tanggal 26 Januari 2017 dari Anisa Rahmah Karim, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0011206.AH.01.11 tahun 2017.

Pada tahun 2016, saldo pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia menjadi sebesar Rp1.002.642.744 dan tidak dikenakan bunga.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

c. Debts to the Government of the Republic of Indonesia (continued)

(ii) IBRD

Loan No. 1751 iND – Proyek NES III/1979

On 1979 until 1992, the Company received loan from IBRD. This loan is a continuation of the loan between the Government and the Plantation PN which disbursed through PT Bank Mandiri (Persero) Tbk based on IBRD agreement No. 1751 iND on August 13, 1979. The initial IBRD loan of Rp30,317,384,461 with interest rate of 13.50% per annum.

Based on the agreement no. AMA-463/SLA-12/DSMI/2012 dated November 19, 2012, the outstanding balance of IBRD loan became Rp26,047,965,037 consist of principal amounting Rp25,045,322,293 and bank service fee amounting Rp1,002,642,744.

In 2016, loan from International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) is converted into capital by the Government of the Republic of Indonesia based on Government Regulation No. 89 of 2016 amounting Rp25,045,323,000. The changes have been presented in notarial deed No. 1 dated January, 26, 2017 from Anisa Rahmah Karim, S.H., M.Kn. and has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-0011206.AH.01.11.Tahun 2017.

In 2016, the loan balance to the Government of the Republic of Indonesia amounted to Rp1,002,642,744 and no longer imposed of interest.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia (lanjutan)

(ii) IBRD (lanjutan)

Loan No. 1751 iND – Proyek NES III/1979

Pinjaman ini diperoleh melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) eks PT Bank Bumi Daya (BBD), berdasarkan perjanjian Kredit Investasi jangka menengah atau panjang No. 12/02/PK/Khusus/Non Gula/1980, tanggal 1 April 1980. Penggunaan pinjaman ini untuk membiayai proyek Nucleus Estates and Smallholders III (NES III) inti pembangunan dan rehabilitasi kebun kelapa sawit dan karet termasuk pembelian mesin pabrik, bangunan dan perlengkapan. Pada tahun 2023, saldo utang ini adalah sebesar Rp6.829.436.790.

(iii) Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR)

Utang ini berasal dari risiko pembiayaan yang ditanggung PTPN VIII yang berasal dari eks PTP XI sebesar Rp5.701.927.201 atau 50,00% dari proyek PIR NES V dan VI berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Keuangan No. S-4/MK.013/1987 tanggal 8 Desember 1987. Pelaksanaan pembayaran utang ini belum ditentukan dan tidak dikenakan bunga sesuai dengan Surat Ketetapan Menteri Keuangan No. S-003/MK tanggal 9 Januari 2002 perihal Penyelesaian Risiko Pembiayaan Proyek PIR/UPP Perkebunan.

Berdasarkan Rapat Pembahasan Usul Penyelesaian Beban Risiko Pembiayaan Proyek PIR/UPP Perkebunan pada tanggal 29 Desember 2005 yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sampai dengan XIII, telah disepakati bahwa pembebanan risiko pembiayaan dari PTPN XIII yang menjadi beban PTPN VIII adalah sebesar Rp1.902 juta, sehingga jumlah utang proyek PIR yang menjadi kewajiban PTPN VIII menjadi sebesar Rp7.603.588.210.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

c. Debts to the Government of the Republic of Indonesia (continued)

(ii) IBRD (continued)

Loan No. 1751 iND – Proyek NES III/1979

The loan was obtained through PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri), formerly PT Bank Bumi Daya (BBD), based on the middle or long term Investment Credit agreement No. 12/02/PK/Special/Non-Sugar/1980, April 1, 1980. The loan was use for finance the Nucleus Estates and Smallholders III (NES III) project for the construction and rehabilitation of oil palm and rubber plantations including the purchase of factory machinery, buildings and equipment . In 2023, the balance of this loan is Rp6,829,436,790.

(iii) Nucleus Estate Smallholder (NES)

This debt is derived from financing risks incurred by PTPN VIII originating from ex PTPN XI amounting to Rp5,701,927,201 or 50.00% of PIR NES V and VI projects based on the Letter of the Minister of Finance Decree No. S-4/MK.013/1987 dated December 8, 1987. Implementation of this debt payment has not been determined and is not subject to interest in accordance with Minister of Finance Decree No. S-003/MK dated January 9, 2002 regarding the Completion of Financing Risk of NES Project/Plantation.

Based on Discussion Meeting to Propose the Settlement of Expenses of NES Project Financing Risk/UPP Perkebunan on December 29, 2005, attended by the Directorate General of Loan Forward Management, Directorate General of Treasury, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) to XIII, it was agreed that the imposition of PTPN XIII's, financing risks covered by PTPN VIII amounting to Rp1,902 millions, therefore the total debt amount of NES project that will be owed by PTPN VIII amounting to Rp7,603,588,210.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia (lanjutan)

(iv) Eks Gebr. Stork Apparten Fabriek NV. Amsterdam

Pinjaman ini dipergunakan sebagai biaya pembangunan pabrik minyak kelapa sawit di Kebun Karang Inong yang diperoleh sebagai hasil reorganisasi PTPN I Perkebunan Negara tahun 1968. Dalam perjanjian antara PTPN I dan Pemerintah pada tanggal 9 April 1975, pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,00% per tahun dan tidak berubah sampai adanya pembayaran. Pinjaman ini baru akan dibayar bila PTPN I telah memiliki posisi keuangan yang baik.

(v) BBD Rehab-II Eks PT Perkebunan XX (Persero)

Utang ini merupakan kredit modal kerja dan investasi di tahun 1983-1987 untuk proyek pembangunan dan pengembangan pabrik gula Bone dan rehabilitasi pabrik tahap II pembiayaan KSO pabrik gula Pagottan dan Soedhono yang dikelola oleh PTPN XI, entitas anak. Saldo utang kepada Pemerintah Republik Indonesia tersebut sesuai dengan hasil rekonsiliasi per tanggal 31 Desember 2016.

(vi) Kredit Modal Kerja Eks PG. Pelaihari (KMK) DP3

PTPN XI, entitas anak, memiliki utang Kredit Modal Kerja (KMK) eks Proyek Gula Pelaihari yang terdiri dari pokok dan bunga yang dibebankan kepada PTPN XI sejak tahun 1996 didasarkan pada salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 441/KMK.016/1997 tentang Penetapan Neraca Pembukaan PT Perkebunan Nusantara XI per 11 Maret 1996 dan Surat Menteri Keuangan No.S-133/MK.16/1996 tanggal 11 Maret 1996.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

c. Debts to the Government of the Republic of Indonesia (continued)

(iv) Ex Gebr. Stork Apparten Fabriek NV. Amsterdam

This loan is used for financing the cost of construction of palm oil mills in the Karang Inong estate acquired as a result of the reorganization of the PTPN I State Plantation in 1968. In the agreement between PTPN I and the Government dated April 9, 1975, the loan bears interest at 12.00% per annum and does not change until the payment. This loan will be paid when PTPN I has a good financial position.

(v) BBD Rehab-II Ex PT Perkebunan XX (Persero)

This debt is consists of working capital and investment in 1983 – 1987 for the construction and development of plant sugar factory Bone and plant rehabilitation of phase II financing of joint operation plant sugar factory Pagottan and Soedhono and which is managed by PTPN X, a subsidiary. The balance of debt to the Government of the Republic of Indonesia is in accordance with the reconciliation result as of December 31, 2016.

(vi) Working Capital Loan Ex PG. Pelaihari (KMK) DP3

PTPN XI, a subsidiary, has a Working Capital Loan (KMK) ex Pelaihari Sugar Project consisting of principal and interest charged to PTPN XI since 1996 based on a copy of the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 441/KMK.016/1997 on the Establishment of the Opening Balance of PT Perkebunan Nusantara XI as of March 11, 1996 and the letter of the Minister of Finance No.S-133/MK.16/1996 dated March 11, 1996.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia (lanjutan)

(vii) Eks PTP XXXII (Persero), Eks PTP XXIII (Persero), Eks PTP XXVIII (Persero) dan Eks PT Bina Mulia Ternak (Persero)

PTPN XIV, entitas anak, memiliki utang kepada Pemerintah Republik Indonesia merupakan utang yang berasal dari pelimpahan eks perusahaan yang dilebur yaitu PT Perkebunan XXVIII (Persero), PT Perkebunan XXXII (Persero), PT Bina Mulya Ternak (Persero), eks proyek-proyek PT Perkebunan XXIII (Persero) di Sulawesi menjadi PTPN XIV (Persero) pada tanggal 11 Maret 1996.

(viii) Rehabilitasi PIR

PTPN VII, entitas anak, mendapat pinjaman untuk rehabilitasi PIR. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai rehabilitasi tanaman proyek PIR yang rusak sebelum diserahterimakan menjadi milik petani peserta proyek PIR. Berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Keuangan No. S1544/MK.013/1987 tanggal 8 Desember 1987, 50.00% dari total biaya rehabilitasi menjadi beban PTPN VII, dan sisanya ditanggung oleh Pemerintah. Perjanjian pinjaman dengan Pemerintah Republik Indonesia ini tidak memiliki ketentuan mengenai hal yang tidak boleh dilakukan oleh PTPN VII (*negative covenant*). PTPN VII telah mengajukan usulan beberapa kali, termasuk melalui Surat Direksi No. TAN/A/29/2020 tanggal 30 November 2020 agar pinjaman tersebut dapat dikonversikan menjadi PMN kepada PTPN VII. Namun sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan tertulis dari Menteri Keuangan.

25. LONG-TERM DEBTS (continued)

c. Debts to the Government of the Republic of Indonesia (continued)

(vii) Ex PTP XXXII (Persero), Ex PTP XXIII (Persero). Ex PTP XXVIII (Persero), and Ex PT Bina Mulia Ternak (Persero)

PTPN XIV, a Subsidiary, has debts to the Government of the Republic of Indonesia which came from the merger of ex companies which are PT Perkebunan XXVIII (Persero), PT Perkebunan XXXII (Persero), PT Bina Mulya Ternak (Persero), the former projects of PT Perkebunan XXIII (Persero) in Sulawesi became PTPN XIV (Persero) on March 11, 1996.

(viii) PIR Rehabilitation

PTPN VII, a subsidiary, received a loan for PIR rehabilitation. This loan is used to finance the rehabilitation of damaged PIR project plants before being handed over to the PIR project participating farmers. Based on the Decree of the Minister of Finance No. S1544/MK.013/1987 dated December 8, 1987, 50.00% of the total rehabilitation costs were borne by the PTPN VII, a subsidiary, and the rest was borne by the Government. This loan agreement with the Government of the Republic of Indonesia does not have any provisions regarding what PTPN VII, a subsidiary, should not do (negative covenant). PTPN VII, has submitted proposals several times, including through the Letter of the Board of Directors No. TAN/A/29/2020 dated November 30, 2020 so that the loan can be converted into PMN to PTPN VII. However, as of the completion date of the consolidated financial statements. the proposal has not yet received a written response from the Minister of Finance.

25. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) / *25. LONG-TERM DEBTS (continued)*

d. Utang lain-lain jangka panjang / *d. Other long-term payables*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Pihak ketiga	155.332.718,590	301.737.671.563	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi (Catatan 37j)	240.009.258.940	38.576.758.464	*Related parties (Note 37j)*
Total	**395.341.977.530**	**340.314.430.027**	***Total***
Bagian jangka pendek	(9.173.282.425)	(24.585.594.780)	*Short-term portion*
Setelah dikurangi bagian jangka pendek	**386.168.695.105**	**315.728.835.247**	***Net of short-term portion***

Utang lain-lain jangka panjang sebagian besar terdiri atas Utang Kredit Koperasi Primer Anggota ("Utang KPPA"). Utang KPPA merupakan titipan dana plasma dari Koperasi Unit Desa ("KUD") peserta pengembangan perkebunan rakyat pembangunan kebun kelapa sawit. Transaksi tersebut didasarkan pada surat perjanjian antara KUD, entitas anak dan bank responden terkait dengan penyaluran dana plasma dimana entitas anak terlibat sebagai *avalist* (penjamin). Dana tersebut telah digunakan untuk membangun kebun plasma. Jumlah tersebut selanjutnya akan menjadi utang petani plasma melalui KUD bersamaan dengan penyerahan kebun plasma sesuai kesepakatan.

Long-term other debts mostly consist of Member Primary Cooperative Credit Debt ("KPPA Debt"). KKPA debt is a plasma fund deposit from Village Unit Cooperatives ("KUD") participating in the development of smallholder plantations for the development of oil palm plantations. The transaction is in the form of a letter of agreement between KUD, a subsidiary and a respondent bank related to prostitution of plasma funds in which the subsidiary is involved as an avalist (guarantor). The funds have been used to establish plasma plantations. This amount will then become the debt of the plasma farmers through the KUD simultaneously with the delivery of the plasma plantations according to the agreement.

Dalam Surat Persetujuan *Plafond* Plasma dari masing-masing Bank ditetapkan ketentuan bahwa pencairan kredit atas nama KUD dilakukan setelah:

- Entitas anak menyerahkan *Corporate Guarantee* sebagai bapak angkat sekaligus penjamin;
- Perusahaan menyerahkan *Buy Back Guarantee* secara notarial.

In the Letter of Approval of the Plasma Ceiling from each Bank it is stipulated that the disbursement of credit on behalf of KUD is carried out after:

- *Subsidiary submits a Corporate Guarantee as a foster father and guarantor;*
- *The Business Group submits a notarized Buy Back Guarantee*

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN / *26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Dana pensiun	3.319.316.205.633	3.825.037.240.729	*Pension fund*
Imbalan jasa masa kerja lainnya	12.553.149.017.731	13.664.611.549.676	*Other employee benefit*
Total	**15.872.465.223.364**	**17.489.648.790.405**	***Total***
Bagian jangka pendek			*Short-term portion*
Dana pensiun	347.268.373.303	53.155.593.857	*Pension fund*
Imbalan jasa masa kerja lainnya	1.974.389.786.372	2.285.566.330.658	*Other employee benefit*
Total bagian jangka pendek	2.321.658.159.675	2.338.721.924.515	*Total short-term portion*
Bagian jangka panjang	**13.550.807.063.689**	**15.150.926.865.890**	*Long-term portion*

a. Dana pensiun / *a. Pension fund*

Perusahaan dan Entitas Anak tertentu menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-344/KMK/17/1999.

The Company and certain Subsidiaries provide defined benefit pension plan for all permanent employees managed by Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) based on the Letter of Ministry of Finance No. Kep-344/ KMK/17/1999.

Pendanaan Dapenbun berasal dari kontribusi karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% - 6,22% dan 4,94% - 9.80% dari gaji dasar tahunan untuk tahun tertentu. Apabila terdapat saldo defisit antara aset dan liabilitas dana pensiun akan ditanggung oleh Perusahaan dan Entitas Anak tertentu.

The pension plan funding is contributed by the employees and employer contributions of 6.00% - 6.22% and 4.94% - 9.80% respectively of the basic annual salary of certain year. If a deficit balance between the assets and liabilities of the pension fund will be borne by the Company and certain Subsidiaries.

Nilai wajar aset dan liabilitas manfaat pensiun Perusahaan dan Entitas Anak tertentu pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 didasarkan pada penilaian aktuaris independen, KKA Azwir Arifin dan Rekan, KKA Steven & Mourits beberapa aktuaris independen lainnya menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

The fair value of plan asset and pension benefit obligation of the Company and certain Subsidiaries as of December 31, 2023 and 2022, based on independent actuary, KKA Azwir Arifin dan Rekan and several other actuaries using the "Projected Unit Credit" method with main assumptions as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Tingkat diskonto	6,25% - 7,10%	6.12% - 7.66%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji tahunan	2,5%	3.00%	*Annual basic salary increase*
Usia pensiun normal	55-56 tahun/*years*	55-56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat pengunduran diri	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 year and linearly decreasing to zero at normal retirement age*	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 year and linearly decreasing to zero at normal retirement age*	*Resignation rate*
Tingkat mortalita	GAM 71 Modified	GAM 71 Modified	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	*Disability rate*

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)*

a. Dana pensiun (lanjutan) / *Pension fund (continued)*

Rincian beban / ***Details of expense***

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Biaya bunga	236.226.778.985	180.296.933.816	*Interest cost*
Biaya jasa kini	89.413.931.390	98.015.377.417	*Current service cost*
Iuran karyawan	(32.038.933.260)	(35.700.506.249)	*Employee contribution*
Total	**293.601.777.115**	**242.611.804.984**	***Total***

Rincian dana pensiun / ***Details of pension fund***

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	10.740.862.699.512	10.649.034.828.575	*Present value of liability*
Nilai wajar dari aset program	(7.421.546.493.882)	(6.823.997.587.846)	*Fair value of plan assets*
Total	**3.319.316.205.630**	**3.825.037.240.729**	***Total***

Mutasi dana pensiun / ***Movements of pension fund***

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Saldo awal	3.825.037.240.729	3.116.844.827.639	*Beginning balance*
Iuran yang dibayarkan	(1.102.853.072.236)	(1.129.218.192.942)	*Contribution paid*
Pengukuran kembali Liabilitas imbalan kerja karyawan	303.530.260.025	1.594.798.801.048	*Gain due to remeasurement of employee benefits*
Beban imbalan kerja yang diakui pada tahun berjalan	293.601.777.115	242.611.804.984	*Employee benefit expense rcognized in current year*
Total	**3.319.316.205.633**	**3.825.037.240.729**	***Total***

Mutasi saldo nilai wajar dari aset program / ***Movements of fair value plan assets***

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Saldo awal	6.823.997.587.846	7.612.722.279.914	*Beginning balance*
Pembayaran manfaat	(933.296.528.838)	(1.003.845.443.721)	*Payment of the employee benefits*
Iuran yang dibayarkan	1.190.572.084.986	1.162.020.372.024	*Payment of contribution*
Pendapatan bunga	475.130.896.305	569.191.162.774	*Interest income*
Hasil pengembangan lainnya	(134.857.546.417)	(1.516.090.783.145)	*Other results*
Total	**7.421.546.493.882**	**6.823.997.587.846**	***Total***

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

a. Dana pensiun (lanjutan)

Mutasi nilai wajar dari aset program (lanjutan)

Pengembangan aset program dilaksanakan dan dikelola secara gabungan oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun). Distribusi aset program kepada masing-masing pemberi kerja dilakukan oleh Dapenbun setiap bulan secara proporsional dari nilai aset neto ditambah iuran pemberi kerja dan iuran tambahan, kemudian dikurangi dengan manfaat pensiun. Pengalihan dana ke dana pensiun lain yang dibayarkan dan piutang iuran dan masing-masing pemberi kerja.

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

a. Pension fund (continued)

Movements of plan assets fair value (continued)

The development of plan assets are implemented and managed jointly by Dana Pernsiun Perkebunan (Dapenbun). The distribution of plan assets to each employer is performed by Dapenbun every month proportionately of the net asset value plus the employer's contribution and additional contribution, then deducted by the pension benefits. the transfer of funds to other pension funds and contribution receivables and each employer.

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Obligasi	47,77%	43,04%	*Bonds*
Deposito berjangka	18,99%	15,45%	*Time deposits*
Tanah dan bangunan	11,85%	12,52%	*Land and buildings*
Reksa Dana	8,54%	13,75%	*Mutual fund*
Saham	6,81%	8,82%	*Shares*
Lain-lain	6,04%	6,42%	*Others*
Total	100,00%	100,00%	*Total*

b. Imbalan jasa masa kerja lainnya

Perusahaan dan Entitas Anak memberikan imbalan jasa masa kerja lainnya yang tidak didanai sesuai dengan UU Cipta Kerja dan berdasarkan kebijakan dan praktek internal yang berlaku dan relevan dan sesuai dengan PSAK No. 24 yang meliputi imbalan pasca kerja (santunan hari tua dan pemeliharaan kesehatan pensiunan) dan imbalan jangka panjang lainnya (cuti panjang, penghargaan masa pengabdian, dan bantuan kematian).

Imbalan Karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung oleh aktuaris independen KKA Azwir Arifin dan KKA Steven Mourits menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

b. Other employee benefits

The Company and Subsidiaries provide other employee benefits that are unfunded in accordance with UU Cipta Kerja and in accordance with applicable and relevant internal policies and practices and in accordance with PSAK No. 24. covering post employment benefits (old age pensions and retirement health care) and other long-term benefits (long service leave, service dedication, and death benefits).

Employee benefits as of December 31, 2023 and 2022 are calculated by independent actuary KKA Azwir Arifin dan Rekan and other independent actuary using the "Projected Unit Credit" method with main assumptions as follows:

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)*

b. Imbalan jasa masa kerja lainnya (lanjutan) / *Other employee benefits (continued)*

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Tingkat diskonto	5,18% - 7,44%	6.12% - 7.66%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji tahunan	2,50% - 10,00%	3.00%	*Annual basic salary increase*
Usia pensiun normal	55-56 tahun/*years*	55-56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat pengunduran diri	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	*Resignation rate*
Tingkat mortalita	GAM 71 Modified	GAM 71 Modified	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	*Disability rate*

Rincian beban imbalan kerja / ***Details of Employee Benefits Expense***

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Biaya bunga	748.895.765.259	747.615.236.342	*Interest expense*
Beban jasa kini	454.784.399.566	560.569.420.393	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(1.078.157.682.436)	(289.395.294.030)	*Past service cost*
Total	**125.522.482.389**	**1.018.789.362.705**	***Total***

Mutasi saldo estimasi imbalan kerja / ***Movements of the estimated employee benefits***

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Saldo awal	13.664.611.549.676	14.742.170.455.260	*Beginning balance*
Pembayaran imbalan	(2.359.809.857.462)	(2.017.580.029.324)	*Benefit payment*
Kewajiban imbalan yang belum dibayar	4.068.257.219	(101.115.485.474)	*Unpaid benefit liability*
Rugi pengukuran kembali atas imbalan kerja karyawan	1.118.756.585.920	18.821.914.660	*Loss due to remeasurement of employee benefit*
Beban imbalan kerja yang diakui pada tahun berjalan	125.522.482.378	1.022.314.694.554	*Employee benefit expense recognized in current year*
Saldo akhir tahun	**12.553.149.017.731**	**13.664.611.549.676**	***Ending balance***

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Sensitivity analysis to the key assumptions used in determining employee benefits as of December 31, 2023 is as follows:

Asumsi utama	Persentase kenaikan/ (penurunan)/ *Percentage of increase/ (decrease)*	Kenaikan/(penurunan) nilai kewajiban kini/ *Increase/(decrease) in present value of liability*	*Key assumptions*
Tingkat diskonto tahunan	1%/(1%)	(1.749.361.221.744)/ 2.005.570.973.394	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1%/(1%)	583.094.350.394/ (603.411.804.743)	*Annual salary increase rate*

Analisa sensitivitas di atas dihitung menggunakan metode ekstrapolasi atas pengaruh terhadap kewajiban imbalan kerja sebagai hasil dari perubahan yang beralasan atas asumsi utama yang mungkin terjadi pada tanggal pelaporan.

The sensitivity analysis above is calculated based on a method that extrapolates the impact on employee benefits liability as a result of reasonable changes in key assumptions occurring at the end of the reporting period.

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

Expected contributions from the employee benefits liability in future years are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Dalam 12 bulan mendatang	2.321.658.159.675	2.338.721.924.515	*Within the next 12 months*
Antara 1 sampai 2 tahun	3.291.774.642.166	4.025.403.937.999	*Between 1 and 2 years*
Antara 2 sampai 5 tahun	5.995.373.074.094	7.438.659.572.931	*Between 2 and 5 years*
Di atas 5 tahun	34.930.311.539.523	43.503.340.848.825	*Above 5 years*
Total	**46.539.117.415.458**	**57.306.126.284.270**	***Total***

27. KEPENTINGAN NON PENGENDALI / *27. NON-CONTROLLING INTERESTS*

Akun ini merupakan hak pemegang saham nonpengendali atas aset bersih dan bagian laba (rugi) bersih Entitas Anak yang dikonsolidasikan.

This account represents the right of non-controlling interest shareholders of net assets and net income (loss) of consolidated Subsidiaries.

a. Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali:

a. Net equity attributable to non-controlling interest:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Pemerintah Republik Indonesia	4.244.708.825.855	4.407.206.305.945	*Government of Republic of Indonesia*
Pemegang saham non pengendali lainnya	325.888.002.234	325.977.576.169	*Other non controling Interest*
Total - neto	**4.570.596.828.089**	**4.733.183.882.114**	***Total - net***

b. Laba (rugi) bersih dan penghasilan komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali:

b. Net income (loss) and other comprehensive income attributable to non-controlling interests:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Pemerintah Republik Indonesia	(162.497.480.091)	213.095.982.862	*Pemerintah Republik Indonesia*
Pemegang saham non pengendali lainnya	567.235.997	2.782.489.932	*Other non controling Interest*
Total - neto	**(161.930.244.094)**	**215.878.472.794**	***Total - net***

c. Dividen yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali:

c. Dividends attributable to non-controlling interests:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
PT Kelola Mina Laut	656.809.932	1.427.849.041	*PT Kelola Mina Laut*

28. MODAL SAHAM DAN KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

a. Modal Saham

Seluruh saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 6 tanggal 3 Oktober 2014, dinyatakan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Negara BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham No. S-594/MBU/10/2014 tanggal 2 Oktober 2012 tentang perubahan struktur permodalan dan perubahan anggaran dasar Perusahaan, Pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula sejumlah Rp13.100.000.000.000 yang terbagi atas 13.100.000 saham menjadi Rp54.000.000.000.000 yang terbagi atas 54.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000, dan menyetujui penerbitan saham baru sebanyak 10.190.379 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000 sehingga seluruhnya senilai Rp10.190.379.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Repulik Indonesia dan pembayaran dari Negara Republik Indonesia sehubungan dengan penerbitan saham baru Perusahaan yang diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud tersebut dibayarkan dalam bentuk pengalihan 90% saham Negara Republik Indonesia pada masing-masing PT Perkebunan Nusantara I (Persero), PT Perkebunan Nusantara II (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), PT Perkebunan Nusantara V (Persero), PT Perkebunan Nusantara VI (Persero), PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT Perkebunan Nusantara X (Persero), PT Perkebunan Nusantara XI (Persero), PT Perkebunan Nusantara XII (Persero), PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero).

Selanjutnya, pemegang saham menyetujui penambahan modal ditempatkan/disetor Perusahaan yang semula sebesar Rp3.321.298.000.000 menjadi Rp13.511.677.000.000. Perubahan modal dasar ini telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-06997.40.21.2014 tanggal 3 Oktober 2014.

28. CAPITAL STOCK AND OTHER EQUITY COMPONENTS

a. Capital Stock

All of the Company's capital stock as of December 31, 2023 and 2022 are owned by Government of the Republic of Indonesia.

Based on the Deed of General Meeting of Shareholders of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 6 dated October 3, 2014, it stated that based on the decision of the Minister of State Owned Enterprises as decided in the General Meeting of Shareholders No. S-594/MBU/10/2014 dated October 2, 2012 on changes in the capital structure and changes in the Company's Articles of Association, the Shareholder approved to increase the authorized capital from Rp13,100,000,000,000 consisting of 13,100,000 shares to become Rp54,000,000,000,000 which is divided into 54,000,000 shares with a nominal value of 1,000,000, respectively and approved the issuance of new shares amounting to 10,190,379 shares with a nominal value each of 1,000,000, with total value of Rp10.190,379,000,000 which are entirely subscribed by the Republic of Indonesia and the payment from the Republic of Indonesia in connection with the issuance of new shares of the Company were paid through the transfer of 90% share of Indonesia in each PT Perkebunan Nusantara I (Persero), PT Perkebunan Nusantara II (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), PT Perkebunan Nusantara V (Persero), PT Perkebunan Nusantara VI (Persero), PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT Perkebunan Nusantara X (Persero), PT Perkebunan Nusantara XI (Persero), PT Perkebunan Nusantara XII (Persero), PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) and PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero).

Furthermore, the shareholders approved the increase of issued/fully paid capital of the Company from Rp3.321.298.000.000 to Rp13,511,6770,00,000. The authorized capital changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights in Decree No. AHU-06997.40.21.2014 dated October 3, 2014.

28. MODAL SAHAM DAN KOMPONEN EKUITAS LAINNYA (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 468/KMK.06/2014 oleh Menteri Keuangan tanggal 1 Oktober 2014 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan, ditetapkan bahwa nilai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan menjadi sebesar Rp10.190.379.000.000.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 767/KMK.06/2015 oleh Menteri Keuangan tanggal 24 Juli 2015 tentang Penetapan Nilai Definitif Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan, nilai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan secara definitif ditetapkan menjadi sebesar Rp27.588.578.194.542 yang sebelumnya adalah sebesar Rp10.190.379.000.000.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 135 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan, nilai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp3.150.000.000.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.

Pemegang saham menyetujui penambahan modal ditempatkan/disetor Perusahaan semula sebesar Rp13.511.677.000.000 menjadi Rp34.059.877.000.000. Perubahan modal dasar ini telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0004359.AH.01.02 tahun 2016 tanggal 4 Maret 2016.

Selanjutnya, pemegang saham menyetujui penambahan modal ditempatkan/disetor Perusahaan semula sebesar Rp34.059.877.000.000 menjadi Rp40.216.132.000.000 dalam bentuk aset tetap (Catatan 13) dan kapitalisasi cadangan masing-masing sebesar Rp6.156.254.841.144 dan Rp158.856. Perubahan modal dasar ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat No. AHU-AH.01.03-0401013 tanggal 23 Oktober 2020.

28. CAPITAL STOCK AND OTHER EQUITY COMPONENTS (continued)

a. Capital Stock (continued)

Based on the decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 468/KMK.06/2014 dated October 1, 2014 regarding Stipulation of Definitive Value of Additional Capital Investment of the Republic of Indonesia to the Company's capital stock, it stated that the additional value of capital investment of the Republic of Indonesia to the Company's capital stock amounting to Rp10,190,379,000,000.

Based on the decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 767/KMK.06/2015 dated July 24, 2015 regarding Stipulation of Definitive Value of Additional Capital Investment of the Republic of Indonesia into the Company's capital stock, it stated total definitive value of capital investment of the Republic of Indonesia into the Company's capital stock amounting to Rp27,588,578,194,542 which was previously stated at Rp10,190,379,000,000.

Furthermore, based on decision of the Government of the Republic of Indonesia No. 135 Year 2015 dated December 28, 2015 regarding Additional Value of Capital Investment of the Republic of Indonesia into the Company's capital stock, additional value of capital investment of the Republic of Indonesia into to the Company's capital stock had increased amounting to Rp3,150,000,000,000 generated from APBN year 2015.

The shareholders approved the addition of the Company's issued/paid-up capital of Rp13,511,677,000,000 to Rp34,059,877,000,000. This change of authorized capital has been approved by the Minister of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0004359.AH.01.02 of 2016 dated March 4, 2016.

Furthermore, the shareholders approved the addition of the Company's issued/paid-up capital of Rp34,059,877,000,000 to Rp40,216,132,000,000 in the form of fixed assets (Note 13) and capitalization of reserve amounting to Rp6,156,254,841,144 and Rp158,856 respectively. The change of the authorized capital has been received by the Minister of Law and Human Rights in its letter No. AHU-AH.01.03-0401013 dated October 23, 2020.

28. MODAL SAHAM DAN KOMPONEN EKUITAS LAINNYA (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Berdasarkan keputusan para pemegang saham tanggal 30 Mei 2023, pemegang saham sepakat menetapkan penggunaan seluruh laba Perusahaan tahun 2022 sebagai cadangan wajib.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Selain itu Grup dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, Imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

28. CAPITAL STOCK AND OTHER EQUITY COMPONENTS (continued)

a. Capital Stock (continued)

Based on the shareholders decision dated May 30, 2023, the shareholders agreed to establish the use of the Company's 2022 profits as the capital reserve.

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

In addition the Group is also required by the Corporate Law effective August 16, 2007 to contribute a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in economic conditions. To maintain or to adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes during the years ended December 31, 2023 and 2022.

The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

28. MODAL SAHAM DAN KOMPONEN EKUITAS LAINNYA (lanjutan)

28. CAPITAL STOCK AND OTHER EQUITY COMPONENTS (continued)

b. Komponen Ekuitas Lainnya

b. Other Equity Components

Komponen ekuitas lainnya terdiri dari:

The details of other components of equity consist of:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Modal lainnya	337.845.477.532	337.845.477.532	*Other capital*
Selisih kurs penjabaran	(2.758.290.909)	(2.758.290.909)	*Foreign exchange on translation*
Tambahan modal disetor:			*Additional paid-in capital:*
Selisih nilai transaksi peleburan PTPN III (Persero). PTPN IV (Persero) dan PTPN V (Persero) menjadi Perusahaan	(20.136.688.772)	(20.136.688.772)	*Differences in values of the merger of PTPN III (Persero). PTPN IV (Persero) and PTPN V (Persero) in forming the Company*
Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali - Pengalihan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara (Persero) lainnya kepada Perusahaan	(14.222.580.203.999)	(14.222.580.203.999)	*Differences between the consideration transferred and the cost of business combination with entities under common control - Transfer of shares on the others PT Perkebunan Nusantara (Persero) owned by the Republic of Indonesia to the Company*
Selisih nilai transaksi penjualan PT Nusantara Medika Utama dari PT Perkebunan Nusantara X kepada PT Pertamina Bina Medika IHC	211.997.964.634	211.997.964.634	*Differences in values of the sales of PT Nusantara Medika Utama from Perkebunan Nusantara X to PT Pertamina Bina Medika IHC*
Selisih nilai transaksi penjualan PT Nusantara Sebelas Medika dari PT Perkebunan Nusantara XI kepada PT Pertamina Bina Medika IHC	79.507.194.392	79.507.194.392	*Differences in values of the sales of PT Nusantara Sebelas Medika from Perkebunan Nusantara XI to PT Pertamina Bina Medika IHC*
Selisih nilai transaksi penjualan PT Rolas Nusantara Medika dari PT Perkebunan Nusantara XII kepada PT Pertamina Bina Medika IHC	25.917.187.561	25.917.187.561	*Differences in values of the sales of PT Rolas Nusantara Medika from Perkebunan Nusantara XII to PT Pertamina Bina Medika IHC*
Dilusi saham atas PT Kalimantan Agro Nusantara	1.052.857.447	1.052.857.447	*Dilution of stock of PT Kalimantan Agro Nusantara*
Total	**(13.589.154.502.114)**	**(13.589.154.502.114)**	***Total***

29. SURPLUS REVALUASI / *29. REVALUATION SURPLUS*

	2023	2022	
Saldo awal tahun	45.050.291.089.385	45.093.984.876.072	*Beginning balances*
Penambahan tahun berjalan atas aset tetap	579.722.115.592	(91.068.225.209)	*Additional during a year for fixed assets*
Dampak atas kepentingan nonpengendali	32.898.536.003	47.374.438.522	*Effect for non-controlling interest*
Total	**45.662.911.740.980**	**45.050.291.089.385**	***Total***

30. PENDAPATAN / *30. REVENUE*

a. Rincian pendapatan Grup berdasarkan komoditas adalah sebagai berikut:

a. The details of revenue of the Group by commodity are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Produk kelapa sawit	28.408.553.180.384	32.723.126.643.063	*Palm oil products*
Produk tanaman lainnya	11.479.997.962.583	11.171.771.320.980	*Other plantation products*
Produk karet	3.150.794.025.197	4.139.258.055.860	*Rubber products*
Pendapatan lainnya	7.942.051.989.903	7.829.146.344.575	*Other revenue*
Total	**50.981.397.158.067**	**55.863.302.364.478**	***Total***

b. Rincian pendapatan menurut daerah geografis adalah sebagai berikut:

b. The details of revenue by geographical areas are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Dalam negeri	44.277.476.937.827	48.947.104.146.303	*Domestic*
Luar negeri	6.703.920.220.240	6.916.198.218.175	*Overseas*
Total	**50.981.397.158.067**	**55.863.302.364.478**	***Total***

31. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *31. COST OF REVENUE*

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

The details of cost of revenue are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/ *Year ended December 31, 2023*				
	Kelapa Sawit/ *Palm Oil*	**Karet/ *Rubber***	**Lainnya/ *Others***	**Total/ *Total***	
BEBAN POKOK PENDAPATAN					***COST OF REVENUE***
Bahan baku yang digunakan	9.080.134.722.498	706.135.890.623	1.292.565.185.725	11.078.835.798.846	*Raw material used*
Biaya langsung					***Direct cost***
Biaya tanaman					*Plantation cost*
Pemupukan	2.684.731.471.149	6.193.132.190	604.766.203.776	3.295.690.807.115	*Fertilizing*
Panen	1.277.980.785.120	861.319.639.735	643.348.872.682	2.782.649.297.537	*Harvesting*
Pemeliharaan	1.016.120.012.919	114.498.414.156	1.102.415.779.233	2.233.034.206.308	*Maintenance*
Pengangkutan	807.674.450.020	90.091.505.709	275.440.722.084	1.173.206.677.813	*Transportation*
Gaji dan tunjangan karyawan	582.818.112.659	272.283.592.109	411.696.801.278	1.266.798.506.046	*Salary and employees allowances*
Pembibitan tanaman semusim	-	-	193.262.431.375	193.262.431.375	*Seedling annual crop*
Perubahan nilai wajar aset biologis	88.147.235.879	1.267.352.078	(1.154.960.484)	88.259.627.473	*Change in fair value of biological assets*
Total biaya tanaman	6.457.472.067.746	1.345.653.635.977	3.229.775.849.944	11.032.901.553.667	*Total plantation cost*
Biaya pabrik					*Factory cost*
Biaya pengolahan	1.212.099.991.556	174.695.223.691	893.258.021.731	2.280.053.236.978	*Processing cost*
Pemeliharaan mesin dan instalasi	336.984.643.806	23.095.969.618	402.717.318.421	762.797.931.845	*Installation*
Gaji dan tunjangan karyawan	282.191.564.393	75.604.089.784	861.165.964.099	1.218.961.618.276	*Salary and employees allowances*
Biaya pengemasan	77.816.068.776	39.302.770.408	107.354.544.074	224.473.383.258	*Cost of packaging*
Lain-lain	175.277.841.160	153.510.266.944	40.348.163.349	369.136.271.453	*Others*
Total biaya pabrik	2.084.370.109.691	466.208.320.445	2.304.844.011.674	4.855.422.441.810	*Total factory cost*
Penyusutan dan amortisasi	2.312.015.542.296	574.347.186.537	993.484.795.788	3.879.847.524.621	*Depreciation and amortization*
Biaya jasa lainnya	35.468.329.561	-	375.554.434.616	411.022.764.177	*Other services*
Total biaya langsung	**19.969.460.771.792**	**3.092.345.033.582**	**8.196.224.277.747**	**31.258.030.083.121**	***Total direct cost***
Biaya tidak langsung					***Indirect cost***
Gaji dan tunjangan karyawan	430.369.927.632	17.854.557.978	383.753.749.127	831.978.234.737	*Salary and employees allowances*
Keamanan	411.348.192.265	8.418.797.157	36.595.391.969	456.362.381.391	*Security*
Pajak bumi dan bangunan, retribusi dan sewa tanah	196.845.489.532	2.094.165.162	22.332.967.593	221.272.622.287	*Tax on land and building retribution and land rental*
Pengangkutan dan perjalanan	64.190.376.146	6.810.969.015	44.879.524.794	115.880.869.955	*Transportation and travel*
Listrik	48.797.075.180	15.173.928.042	202.919.185.072	266.890.188.294	*Electricity*
Pemeliharaan bangunan	56.189.313.313	5.518.770.028	61.536.263.384	123.244.346.725	*Building maintenance*
Biaya air	25.755.482.668	152.284.847	991.665.894	26.899.433.409	*Water expense*
Pemeliharaan jalan. jembatan dan saluran air	54.521.300.254	534.290.197	12.180.966.289	67.236.556.740	*Roads. bridges and water system maintenance*
Biaya umum	4.443.673.719	1.585.358.412	8.776.870.418	14.805.902.549	*General expenses*
Overhead	64.489.827.776	146.835.168.599	59.626.999.951	270.951.996.326	*Overhead*
Lain-lain	110.966.684.324	22.842.566.734	364.914.054.131	498.723.305.189	*Others*
Total biaya tidak langsung	**1.467.917.342.809**	**227.820.856.171**	**1.198.507.638.622**	**2.894.245.837.602**	***Total indirect cost***
Total biaya produksi	**21.437.378.114.601**	**3.320.165.889.753**	**9.394.731.916.369**	**34.152.275.920.723**	***Total production cost***
Persediaan barang dalam proses – awal	26.165.436.473	46.418.883.021	263.862.600.570	336.446.920.064	*Work in process – beginning*
Persediaan barang dalam proses – akhir	(2.742.302.023)	(65.969.854.384)	(296.421.074.694)	(365.133.231.101)	*Work in process – ending*
Total beban pokok produksi	**21.460.801.249.051**	**3.300.614.918.390**	**9.362.173.442.245**	**34.123.589.609.686**	***Total cost of goods produced***
Persediaan barang jadi – awal	1.986.287.417.400	236.491.905.393	5.429.352.576.640	7.652.131.899.433	*Finished goods - beginning*
Persediaan barang jadi – akhir	(1.651.030.192.521)	(183.921.807.516)	(1.706.478.337.429)	(3.541.430.337.466)	*Finished goods - ending*
Total	**21.796.058.473.930**	**3.353.185.016.267**	**13.085.047.681.456**	**38.234.291.171.653**	***Total***

31. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan) / *31. COST OF REVENUE (continued)*

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut (lanjutan):

The details of cost of revenue are as follows (continued):

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/ *Year ended December 31, 2022*				
	Kelapa Sawit/ *Palm Oil*	**Karet/ *Rubber***	**Lainnya/ *Others***	**Total/ *Total***	
BEBAN POKOK PENDAPATAN					***COST OF REVENUE***
Bahan baku yang digunakan	9.998.152.333.000	895.125.512.788	5.584.044.256.966	16.477.322.102.754	*Raw material used*
Biaya langsung					***Direct cost***
Biaya tanaman					*Plantation cost*
Pemupukan	2.379.520.063.892	22.162.247.559	1.643.748.193.488	4.045.430.504.939	*Fertilizing*
Panen	1.616.892.997.830	1.009.973.498.138	757.402.155.715	3.384.268.651.683	*Harvesting*
Pemeliharaan	1.029.616.625.514	155.456.639.373	999.002.706.904	2.184.075.971.791	*Maintenance*
Pengangkutan	886.446.945.853	71.299.090.701	347.624.657.302	1.305.370.693.856	*Transportation*
Gaji dan tunjangan karyawan	274.669.954.855	220.217.530.865	541.431.925.147	1.036.319.410.867	*Salary and employees allowances*
Pembibitan tanaman semusim	48.684.168.778	15.342.682.058	66.292.189.436	130.319.040.272	*Seedling annual crop*
Perubahan nilai wajar Aset Biologis	(126.286.371.352)	(30.309.040.760)	(94.972.942.515)	(251.568.354.627)	*Change in fair value of biological assets*
Lain lain	15.444.143.786	5.869.713.638	345.733.668.866	367.047.526.290	*Others*
Total biaya tanaman	6.124.988.529.156	1.470.012.361.572	4.606.262.554.343	12.201.263.445.071	*Total plantation cost*
Biaya pabrik					*Factory cost*
Biaya pengolahan	657.299.119.114	97.895.279.938	680.569.760.926	1.435.764.159.978	*Processing cost*
Pemeliharaan mesin dan instalasi	363.875.077.661	30.219.542.351	715.663.818.133	1.109.758.438.145	*Installation*
Gaji dan tunjangan karyawan	342.263.896.171	137.770.305.965	840.657.981.241	1.320.692.183.377	*Salary and employees allowances*
Biaya pengemasan	33.113.021.053	11.575.899.861	94.001.491.900	138.690.412.814	*Cost of packaging*
Lain-lain	168.808.080.414	11.596.186.336	782.171.249.405	962.575.516.155	*Others*
Total biaya pabrik	1.565.359.194.413	289.057.214.451	3.113.064.301.605	4.967.480.710.469	*Total factory cost*
Penyusutan dan amortisasi	2.306.636.956.577	584.329.954.193	1.161.788.820.778	4.052.755.731.548	*Depreciation and amortization*
Biaya jasa lainnya	15.856.699.350	-	98.192.191.951	114.048.891.301	*Other services*
Total biaya langsung	**20.010.993.712.496**	**3.238.525.043.004**	**14.563.352.125.643**	**37.812.870.881.143**	***Total direct cost***
Biaya tidak langsung					***Indirect cost***
Gaji dan tunjangan karyawan	430.329.768.814	37.568.646.576	281.365.655.036	749.264.070.426	*Salary and employees allowances*
Keamanan	478.723.751.418	34.874.111.257	21.067.674.419	534.665.537.094	*Security*
Pajak bumi dan bangunan retribusi dan sewa tanah	262.785.580.662	19.828.850.874	46.324.263.192	328.938.694.728	*Tax on land and building retribution and land rental*
Pengangkutan dan perjalanan	82.498.676.160	6.975.470.363	32.999.413.788	122.473.560.311	*Transportation and travel*
Listrik	63.974.971.639	10.339.848.107	26.735.891.050	101.050.710.796	*Electricity*
Pemeliharaan bangunan	63.444.636.482	4.362.510.815	9.984.353.137	77.791.500.434	*Building maintenance*
Biaya air	31.962.810.666	1.101.387.414	3.242.782.794	36.306.980.874	*Water expense*
Pemeliharaan jalan. jembatan dan saluran air	80.574.117.762	1.433.440.237	22.180.352.180	104.187.910.179	*Roads. bridges and water system maintenance*
Biaya umum	890.239.995	94.223.813	1.244.259.666	2.228.723.474	*General expenses*
Overhead	84.270.563.465	70.716.057.311	102.746.863.739	257.733.484.515	*Overhead*
Lain-lain	132.051.967.301	20.056.255.221	415.154.822.468	567.263.044.990	*Others*
Total biaya tidak langsung	**1.711.507.084.364**	**207.350.801.988**	**963.046.331.469**	**2.881.904.217.821**	***Total indirect cost***
Total biaya produksi	**21.722.500.796.860**	**3.445.875.844.992**	**15.526.398.457.112**	**40.694.775.098.964**	***Total production cost***
Persediaan barang dalam proses - awal	887.231.952	190.848.326.906	184.758.890.976	376.494.449.834	*Work in process – beginning*
Persediaan barang dalam proses – akhir	(26.165.436.473)	(46.418.883.021)	(263.862.600.570)	(336.446.920.064)	*Work in process – ending*
Total beban pokok produksi	**21.697.222.592.339**	**3.590.305.288.877**	**15.447.294.747.518**	**40.734.822.628.734**	***Total cost of goods produced***
Persediaan barang jadi – awal	992.460.207.812	341.443.834.947	2.252.642.514.007	3.586.546.556.766	*Finished goods - beginning*
Persediaan barang jadi – akhir	(1.986.287.417.400)	(236.491.905.393)	(5.429.352.576.640)	(7.652.131.899.433)	*Finished goods - ending*
Total	**20.703.395.382.751**	**3.695.257.218.431**	**12.270.584.684.885**	**36.669.237.286.067**	***Total***

32. BEBAN PEMASARAN DAN PENJUALAN / *32. MARKETING AND SELLING EXPENSES*

Rincian beban pemasaran dan penjualan adalah sebagai berikut:

The details of marketing and selling expenses are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pengangkutan	627.662.749.956	622.440.004.130	*Transportation*
Beban jasa logistik	170.902.635.628	13.070.468.364	*Logistics service expense*
Biaya instalasi pompa	51.403.576.456	67.113.393.784	*Pump installation costs*
Biaya gudang/penyimpanan	31.881.149.424	35.461.294.174	*Warehouse/storage costs*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 miliar)	151.124.436.233	118.255.696.898	*Others (each below Rp10 billion)*
Total	**1.032.974.547.697**	**856.340.857.350**	***Total***

33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

The details of general and administrative expenses are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Gaji, upah dan tunjangan lainnya	1.857.279.606.251	2.073.213.540.437	*Salary, wages and other allowances*
Bonus dan tantiem	1.538.784.347.986	2.559.825.286.878	*Bonus and tantiem*
Beban imbalan kerja	768.815.868.480	1.191.449.026.577	*Employee benefits expense*
Biaya konsultan	441.837.523.388	388.380.605.192	*Consultants fee*
Beban perjalanan	353.253.480.771	391.244.725.942	*Transportation expense*
Depresiasi dan amortisasi	347.634.085.579	262.366.111.290	*Depreciation and amortization*
Beban pemeliharaan dan perbaikan	261.157.596.142	185.036.946.937	*Maintenance and repair expense*
Beban kantor, gedung dan mess	145.547.241.513	17.003.817.028	*Office, building and mess expenses*
Biaya CSR dan sumbangan	138.803.078.623	106.591.800.112	*CSR expense and donations*
Pendidikan dan latihan	135.718.358.418	148.632.999.543	*Education and training*
Biaya keamanan	130.139.010.349	146.408.958.028	*Security expense*
Biaya penelitian dan pengembangan	99.668.429.050	124.791.808.099	*Research and development expenses*
Pajak dan retribusi	88.496.857.600	80.435.930.252	*Taxes and retribution expense*
Telepon, faksimili, dan pos	72.903.188.963	32.272.999.441	*Telephone, faximile and post*
Biaya dewan komisaris	56.295.254.091	92.234.481.561	*Board of commissioners expenses*
Biaya alat tulis kantor	43.988.664.401	90.766.658.731	*Office stationery costs*
Listrik dan penerangan	34.815.584.561	50.082.264.304	*Electricity and lighting cost*
Asuransi	22.188.167.972	31.123.604.174	*Insurance*
Amdal, sistem keselamatan dan kesehatan kerja	18.812.994.766	51.690.668.864	*Occupational, health and safety system*
Lain-lain	231.115.682.082	235.835.176.039	*Others*
Total	**6.787.255.020.986**	**8.259.387.409.429**	***Total***

34. PENDAPATAN OPERASI LAIN / *34. OTHER OPERATING INCOME*

Rincian pendapatan operasi lain adalah sebagai berikut:

The details of other operating income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31*		
	2023	**2022**	
Penjualan aset tetap	320.214.922.172	345.551.182.482	*Sales on fixed assets*
Pendapatan sewa	306.301.654.586	259.658.533.557	*Rental income*
Keuntungan atas perubahan Nilai wajar properti investasi	281.319.816.568	978.074.495.160	*Gain on changes in fair value of investment property*
Pemulihan penurunan aset tetap	209.585.166.830	50.317.179.662	*Reversal on impairment of fixed asset*
Pendapatan KSO dan jasa titip olah	194.881.982.268	219.016.767.062	*Income from KSO and commend production*
Pendapatan kawasan industri	92.702.666.469	28.669.022.358	*Industrial estate revenue*
Pendapatan ganti rugi aset	60.194.524.288	265.882.796.329	Asset compensation income
Pendapatan selisih kurs	82.037.322.960	-	*Gain on foreign exchange*
Pendapatan denda dan klaim	79.345.606.382	263.576.988.375	*Income from fines and claims*
Penjualan produk sampingan	72.588.080.703	63.209.031.986	*Sales of Byproduct*
Pendapatan dividen	71.891.991.066	97.929.619.360	*Dividend income*
Pendapatan penjualan kayu	26.014.327.682	13.492.780.146	*Income from sales of wood plants*
Pemulihan kerugian penurunan nilai piutang (Catatan 6 dan 7)	22.412.375.049	80.691.085.998	*Reversal of impairment losses on receivable (Note 6 and 7)*
Pendapatan pemberdayaan tanah	20.422.408.035	267.469.239.210	*Land empowerment income*
Pendapatan penjualan limbah/waste	18.298.506.324	53.541.701.463	*Income from sales of waste*
Penjualan non-komoditi	10.256.151.688	41.767.444.608	*Non-commodity sales*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10 miliar)	720.639.549.809	497.645.383.363	*Others (each below Rp10 billion)*
Total	**2.589.107.052.879**	**3.526.493.251.119**	***Total***

35. BEBAN OPERASI LAIN / *35. OTHER OPERATING EXPENSES*

Rincian beban operasi lain adalah sebagai berikut:

The details of other operating expenses are as follows :

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31*		
	2023	**2022**	
Tagihan dan denda pajak	409.706.308.366	238.350.424.429	*Claims and tax penalties*
Beban penyisihan penurunan piutang (Catatan 6 dan 7)	301.729.220.018	223.268.099.400	*Allowance for impairment of receivable (Notes 6 and 7)*
Beban selisih kurs	-	211.138.844.992	*Foreign exchange charges*
Beban penurunan nilai	244.139.410.630	718.794.996.827	*Impairment charges*
Beban denda klaim dan mutu	119.932.097.083		*Claim and quality fines*
Beban penyusutan dan amortisasi	93.411.071.155	259.771.474.610	*Depreciation and amortization*
Beban penyisihan persediaan	33.302.416.434	29.668.330.221	*Impairment losses of inventories*
Beban produksi produk sampingan	-	38.051.594.984	*Byproduct production expense*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10 miliar)	743.500.775.560	740.411.980.445	*Others (each below Rp10 billion)*
Total	**1.945.721.299.246**	**2.459.455.745.908**	***Total***

36. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN / *36. FINANCE INCOME AND EXPENSE*

a. Pendapatan keuangan / *a. Finance income*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31*		
	2023	**2022**	
Penghasilan bunga atas jasa giro	128.898.193.245	167.400.171.841	*Interest income from cash in bank*
Penghasilan bunga atas Deposito berjangka	83.041.861.478	24.052.559.062	Interest income from *time deposits*
Lain-lain	25.677.331.132	9.646.015	Others
Total	**237.617.385.855**	**191.462.376.918**	**Total**

b. Beban keuangan / *b. Finance expense*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31*		
	2023	**2022**	
Beban bunga dari:			*Interest expense from:*
Utang bank	3.327.969.650.779	2.670.704.729.591	*Bank loans*
Wesel	303.397.274.309	427.870.000.000	*Medium Term Notes*
Bunga sewa guna usaha	29.197.593.652	24.201.580.057	*Lease interest*
Lainnya	90.821.734.479	29.664.790.199	*Others*
Dikurangi:			*Less:*
Kapitalisasi biaya pinjaman ke tanaman belum menghasilkan dan aset tetap	-	(964.483.368)	*Capitalization of borrowing cost to immature plantation and fixed assets*
Total	**3.751.386.253.219**	**3.151.476.616.479**	***Total***

37. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yaitu dengan beberapa bank yang dikendalikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, beberapa asosiasi perusahaan perkebunan, beberapa koperasi karyawan dan pusat koperasi karyawan berupa penempatan giro, deposito dan fasilitas kredit modal kerja, penyewaan kendaraan dan peralatan kantor, pemberian pinjaman modal kerja kepada perusahaan afiliasi dan lain-lain.

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a) Kas dan setara kas (Catatan 4)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada pihak berelasi masing-masing sebesar 99,30% dan 99,44% dari seluruh kas dan setara kas.

b) Kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 5)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo kas yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 95,59% dan 99,02% dari total kas yang dibatasi penggunaannya.

c) Piutang usaha (Catatan 6)

37. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

The Group entered into transactions with related parties with several banks that are controlled by the Central Government or Local Government, several plantation companies association, some employees cooperatives and central employees cooperative in the form of current account, deposits and working capital credit facility, vehicles and office equipments rental and working capital loans to affiliated companies and others.

The related parties significant balance are as follows:

a) Cash and cash equivalents (Note 4)

As of December 31, 2023 and 2022, cash and cash equivalents balances placed on entities related parties represent 99.30% and 99.44% of the total cash and cash equivalents respectively.

b) Restricted cash (Note 5)

As of December 31, 2023 and 2022, restricted cash placed on entities related to the Government represent 95.59% and 99.02% of the total restricted cash, respectively.

c) Trade receivables (Note 6)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
PT Mardec Nusa Riau	25.754.553.135	25.754.553.135	*PT Mardec Nusa Riau*
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	20.121.686.690	33.938.265.241	*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	15.449.225.159	667.710.705	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)*
PT Polindo Bio Energi Pratama	12.647.778.174	-	*PT Polindo Bio Energi Pratama*
PT Propernas Nusa Dua	7.089.060.149	3.256.283.488	*PT Propernas Nusa Dua*
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	4.985.551.858	2.011.554.993	*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan*
PT Petrokimia Gresik	3.514.160.000	-	*PT Petrokimia Gresik*
Lain-lain	160.853.466.667	40.766.997.299	*Others*
Total	**250.415.481.832**	**87.579.415.982**	*Total*
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai	(32.197.481.800)	(28.238.416.259)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**218.218.000.032**	**59.340.999.723**	***Net***

37. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

c) Piutang usaha (Catatan 6) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo piutang usaha pada entitas berelasi masing-masing sebesar 15,88% dan 3,64% dari total piutang usaha.

c) Trade receivables (Note 6) (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, trade receivables with related parties balances represent 15.88% and 3.64% from total trade receivables, respectively.

d) Piutang lain-lain (Catatan 7)

d) Other receivables (Note 7)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	95.344.387.261	95.344.387.261	*PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia*
Pemerintah Kota Binjai	89.485.000.000	89.485.000.000	*Pemerintah Kota Binjai*
PT Perkebunan Mitra Ogan	53.874.491.514	47.428.673.869	*PT Perkebunan Mitra Ogan*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	33.464.698.956	33.464.698.956	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
Kementerian PUPR	29.779.600.000	58.959.338.487	*Kementerian PUPR*
PT Kawasan Industri Terpadu Batang	28.588.297.154	28.588.297.154	*PT Kawasan Industri Terpadu Batang*
Badan Pengelola Dana PKS	17.920.627.297	34.752.599.249	*Badan Pengelola Dana PKS*
PT Asuransi Jasa Tania Tbk	8.534.756.203	11.953.594.727	*PT Asuransi Jasa Tania Tbk*
PT Nusantara Sebelas Medika	7.601.274.397	7.601.274.397	*PT Nusantara Sebelas Medika*
Koperasi Karyawan Ruwa Jurai	6.288.905.042	88.262.417.231	*Koperasi Karyawan Rua Jurai*
PT Nusantara Medika Utama	-	18.173.863.865	*PT Nusantara Medika Utama*
Pemda Deli Serdang	-	7.829.336.001	*Pemda Deli Serdang*
PT Propernas Nusa Dua	-	1.500.000.000	*PT Propernas Nusa Dua*
Lain-lain	40.963.641.412	66.214.890.073	*Others*
Total	411.845.679.236	589.558.371.270	*Total*
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai	(133.716.463.867)	(103.566.460.467)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**278.129.215.369**	**485.991.910.803**	***Net***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian penurunan nilai di atas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.

Management believes that allowance for impairment losses above are adequate to cover possible losses from uncollected other receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo piutang lain-lain pada entitas berelasi masing-masing sebesar 34,06% dan 47,13% dari total piutang lain-lain.

As of December 31, 2023 and 2022, other receivables with related parties balances represent 17.29% and 47.13% from total other receivables, respectively.

37. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

e) Piutang lain-lain jangka panjang (Catatan 11)

e) Long-term other receivables (Note 11)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
PT Barata Indonesia (Persero)	135.180.000.000	-	*PT Barata Indonesia (Persero)*
Pemerintah Siak	15.543.146.655	19.428.933.319	*Pemerintah Siak*
Lain-lain	20.924.127.657	2.357.681.303	*Others*
Total	171.647.274.312	21.786.614.622	*Total*
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai	(153.935.842.921)	(6.883.433.570)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**17.711.431.391**	**14.903.181.052**	***Net***

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain jangka panjang.

Management believes that allowance for impairment losses above are adequate to cover possible losses from uncollected long-term other receivables.

f) Utang bank jangka pendek (Catatan 18)

f) Short-term loan (Note 18)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo utang bank jangka pendek yang ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 39,56% dan 89,17% dari total utang bank jangka pendek.

As of December 31, 2023 and 2022, short-term bank loan placed on entities related to the Government represent 39.56% and 89.17% from total short-term bank loan, respectively.

g) Utang usaha (Catatan 19)

g) Trade payables (Note 19)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	23.109.621.202	-	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
Koperasi Karyawan Ruwa Jurai	19.626.952.304	125.874.659.390	*Koperasi Karyawan Ruwa Jurai*
PT Barata Indonesia (Persero)	17.629.317.442	47.253.655.292	*PT Barata Indonesia (Persero)*
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	12.041.309.053	21.117.795.534	*PT Telekomunikasi Indonesia Tbk*
PT Asuransi Jasa Tania Tbk	13.340.739.658	-	*PT Asuransi Jasa Tania Tbk*
PT Adhi Karya	11.245.005.000	22.694.464.636	*PT Adhi Karya*
Perum Bulog	11.121.794.685	11.121.794.685	*Perum Bulog*
PT Rajawali Nusindo	11.142.295.570	-	*PT Rajawali Nusindo*
Pusat Koperasi Karyawan	6.770.968.778	4.309.201.317	*Pusat Koperasi Karyawan*
PT Pertamina Gas	6.125.347.114	7.771.602.418	*PT Pertamina Gas*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	4.959.350.649	20.367.217.433	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Varuna Tirta Prakarsya (Persero)	3.463.978.423	10.186.053.607	*PT Varuna Tirta Prakarsya (Persero)*
Koperasi Tenera	2.775.535.142	3.356.111.304	*Koperasi Tenera*
PT Sucofindo	1.981.310.050	3.433.358.428	*PT Sucofindo*
PT Nusantara Sebelas Medika	47.116.970	11.478.155.956	*PT Nusantara Sebelas Medika*
PT Sarana Multi Infrastuktur (Persero)	-	4.457.315.483	*PT Sarana Multi Infrastuktur (Persero)*
Lain-lain	48.870.855.128	45.798.963.182	*Others*
Total	**194.251.497.168**	**339.220.348.665**	***Total***

37. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

g) Utang usaha (Catatan 19) (lanjutan)

g) Trade payables (Note 19) (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo utang usaha pada entitas berelasi masing-masing sebesar 2,76% dan 6,01% dari total utang usaha.

As of December 31, 2023 and 2022. trade payables with related parties balances represent 2.76% and 6.01% from total trade payables, respectively.

h) Utang lain-lain (Catatan 20)

h) Other payables (Note 20)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	281.014.177.612	286.968.974.542	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia	65.572.615.012	65.475.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia*
PT Rekayasa Industri	42.961.579.132	42.961.579.132	*PT Rekayasa Industri*
PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial	26.145.840.143	-	*PT Deli Megapolitan Residensial*
PT Pertamina (Persero)	25.025.000.000	25.475.000.000	*PT Pertamina (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero)	17.833.130.631	-	*PT Bank Mandiri (Persero)*
PT Deli Megapolitan Kawasan Industri	16.173.698.930	-	*PT Deli Megapolitan Kawasan Industri*
Dana Pensiun Perkebunan	13.586.453.382	11.781.918.249	*Dana Pensiun Perkebunan*
PT Nusantara Sebelas Medika	8.962.898.157	8.052.355.309	*PT Nusantara Sebelas Medika*
PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis	7.680.460.927	-	*PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis*
PT Perusahaan Gas Negara	6.529.500.000	7.245.215.650	*PT Perusahaan Gas Negara*
PT Pertamina Power Indonesia	5.431.413.435	5.090.723.892	*PT Pertamina Power Indonesia*
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	3.359.115.886	10.734.912.696	*PT Telekomunikasi Indonesia Tbk*
Lain-lain	67.521.763.401	65.268.404.845	*Others*
Total	**587.797.646.648**	**529.054.084.315**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. saldo utang lain-lain pada entitas berelasi masing-masing sebesar 41,01% dan 46.60% dari total utang lain-lain.

As of December 31. 2023 and 2022. other payables with related parties balance represent 41,01% and 46.60% from total other payables, respectively.

i) Liabilitas kontrak (Catatan 21)

i) Contract liabilities (Note 21)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial	61.029.465.527	62.703.396.591	*PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial*
PT Perum Bulog	23.119.493.571	-	*PT Perum Bulog*
PT Kawasan Industri Terpadu Batang	21.427.389.554	22.790.752.717	*PT Kawasan Industri Terpadu Batang*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	9.112.500	87.518.555.119	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)*
PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis	-	50.000.000.000	*PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis*
Lain-lain	364.351.311	11.000.000	*Others*
Total	**105.949.812.463**	**223.023.704.427**	***Total***

37. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

j) Utang lain-lain jangka panjang (Catatan 25d)

j) Other long-term payables (Note 25d)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Koperasi Unit Desa	232.057.156.001	-	*Koperasi Unit Desa*
PT Jasamarga Restarea Batang	7.470.552.759	7.690.274.899	*PT Jasamarga Restarea Batang*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.735.316.215	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) Tbk	-	27.434.797.830	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Lain-lain	481.550.180	1.716.369.520	*Others*
Total	**240.009.258.940**	**38.576.758.464**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo utang lain-lain jangka panjang pada entitas berelasi masing-masing sebesar 63,46% dan 87,96% dari total utang lain-lain jangka panjang.

As of December 31, 2023 and 2022, other long-term payables with related parties balance represent 63,46% and 87.96% from total other long-term payables, respectively.

k) Biaya masih harus dibayar - BPJS Ketenagakerjaan (Catatan 23)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. saldo biaya masih harus dibayar (iuran BPJS Ketenagakerjaan) pada total biaya yang masih harus dibayar adalah sebesar 0,54 % dan 0,51% dari total biaya masih harus dibayar.

k) Accrued expense - BPJS Ketenagakerjaan (Note 23)

As of December 31, 2023 and 2022, accrued expense contribution (BPJS Ketenagakerjaan) balance from total accrued expense represent 0.54% and 0.51% from total accrued expense, respectively.

l) Pendapatan diterima di muka (Catatan 24)

l) Unearned revenue (Note 24)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	65.850.331.245	71.116.839.460	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Pertamina Gas	27.228.060.412	29.323.257.556	*PT Pertamina Gas*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	7.368.361.000	8.340.013.000	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
PT Pertamina (Persero)	3.198.000.000	3.900.000.000	*PT Pertamina (Persero)*
PT Pertamina Power Indonesia	2.408.655.388	3.276.737.617	*PT Pertamina Power Indonesia*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	1.000.000.000	-	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)*
Indonesia Healthcare Corporation	-	1.092.995.280	*Indonesia Healthcare Corporation*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	1.008.286.061	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Lain-lain	2.989.787.537	2.073.959.496	*Others*
Total	**110.043.195.582**	**120.132.088.470**	***Total***

37. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

l) Pendapatan diterima di muka (Catatan 24) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. saldo pendapatan diterima di muka pada entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 10,01% dan 24,44% dari total pendapatan diterima di muka.

m) Utang jangka panjang (Catatan 25)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. saldo utang jangka panjang pada entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 73,42% dan 71,39% dari total utang jangka panjang.

37. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

l) Unearned revenue (Note 24) (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, Unearned revenue balance from entities related to the Government represents 10.01% and 24.44% from total unearned revenue. respectively.

m) Long-term debts (Note 25)

As of December 31, 2023 and 2022, long-term debts balances due to entities related to the Government represent 73.42% and 71.39% from total long-term debts, respectively.

Rincian pihak berelasi. sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Details of related parties. nature of relationships and nature of significant transactions with related parties are as follows (continued):

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat Hubungan/ *Nature of relationships*	Sifat transaksi/ *Nature of transactions*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito. fasilitas kredit modal kerja dan investasi/ *Placement of current accounts and deposits. interest from time deposits, credit facilities for working capital and investment*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito. fasilitas kredit modal kerja dan investasi/ *Placement of current accounts and deposits. interest from time deposits, credit facilities for working capital and investment*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi/ *Placement of current accounts and deposits, credit facilities for working capital and investment*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito fasilitas kredit modal kerja dan investasi/ *Placement of current accounts and deposits. interest from time deposits, credit facilities for working capital and investment*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*	Penempatan giro, deposito dan fasilitas kredit modal kerja/ *Placement of current accounts, deposits and credit facilities for working capital*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	Dikendalikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito fasilitas kredit modal kerja dan investasi/ *Placement of current accounts and deposits, interest from time deposits. credit facilities for working capital and investment*

37. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. *SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

Rincian pihak berelasi. sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Details of related parties. nature of relationships and nature of significant transactions with related parties are as follows (continued):

Pihak berelasi/ *Related parties*	**Sifat Hubungan/** *Nature of relationships*	**Sifat transaksi/** *Nature of transactions*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah/ *Controlled by the Local Government of Central Java Province*	Penempatan giro dan pemberian pinjaman/ *Placement of current accounts and loan*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/ *Controlled by Local Government of East Java Province*	Penempatan giro/ *Placement of current accounts*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/ *Controlled by Local Government of West Java Province*	Penempatan giro/ *Placement of current accounts*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan/ *Controlled by Local Government of South Sumatera Province*	Penempatan giro dan deposito/ *Placement of current accounts and deposits*
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau/ *Controlled by Local Government of Riau Province*	Penempatan giro/ *Placement of current accounts*
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung/ *Controlled by Local Government of Lampung Province*	Penempatan giro/ *Placement of current accounts*
PT Bank Nagari	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat/ *Controlled by Local Government of East Sumatera Province*	Penempatan giro/ *Placement of current accounts*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat/ *Controlled by Local Government of West Kalimantan Province*	Penempatan giro/ *Placement of current accounts*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	Dikendalikan oleh Pemerintah Sumatera Utara/ *Controlled by the Local Government of North Sumatera Province*	Penempatan giro dan deposito/ *Placement of current accounts and deposits*

37. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Rincian pihak berelasi. sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Details of related parties. nature of relationships and nature of significant transactions with related parties are as follows (continued):

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat Hubungan/ Nature of relationships	Sifat transaksi/ Nature of transactions
PT Mardec Nusa Riau	Entitas Asosiasi/ *Associate Company*	Penjualan komoditas perkebunan/ *Sales of commodities*
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Jasa kesehatan karyawan/ *Employee health services*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro, fasilitas kredit modal kerja dan investasi/ *Placement of current accounts, credit facilities for working capital and investment*
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Jaminan sosial ketenagakerjaan karyawan/ *Employee social security contribution*
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Jaminan sosial kesehatan karyawan/ *Employee social health contribution*
PT Sinkona Indonesia Lestari	Entitas Asosiasi/ *Associate Company*	Penyertaan saham dan penjualan komoditas perkebunan/ *Investments in shares and sales of plantation commodities*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Penyewaan tanah/ *Land rental*
PT Perkebunan Mitra Ogan	Entitas Asosiasi/ *Associate Company*	Penyertaan saham, jasa kesehatan/ *Investments in shares, health services*
PT Asuransi Jasa Tania Tbk	Dikendalikan oleh Dana Pensiun Perkebunan/ *Controlled by Dana Pensiun Perkebunan*	Asuransi/ *Insurance*
PT Langkat Nusantara Kepong	Entitas Asosiasi/ *Associate Company*	Biaya talangan/ *Advance payment of expenses*
Koperasi Karyawan Nusa Tiga	Koperasi Karyawan / *Employee Cooperative*	Pembelian bahan pembantu dan sewa kendaraan/ *Purchase of supporting material and vehicle lease*
Pusat Penelitian Teh dan Kina	Entitas Asosiasi/ *Associate Company*	Pembelian bibit/ *Purchase of seeds*
PT Tiga Mutiara Nusantara	Entitas Asosiasi/ *Associate Company*	Biaya talangan dan jasa perobatan/ *Advance payment of expenses and medical services*
Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun)	Dana Pensiun/ *pension fund*	Peserta dana pensiun perkebunan/ *Plantation pension fund participant*

37. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian pihak berelasi. sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

37. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Details of related parties. nature of relationships and nature of significant transactions with related parties are as follows (continued):

Pihak berelasi/ *Related parties*	**Sifat Hubungan/** *Nature of relationships*	**Sifat transaksi/** *Nature of transactions*
Koperasi Karyawan Ruwa Jurai	Koperasi Karyawan/ *Employee Cooperative*	Pembelian bahan pembantu dan jasa pemeliharaan/ *Purchase of supporting material and maintenance services*
PT Industri Gula Nusantara	Entitas Asosiasi/ *Associate Company*	Penyertaan saham dan pinjaman/ *Investment in shares and loan*
Serikat Pekerja Perkebunan	Serikat Pekerja/ *Labor Union*	Pemberian pinjaman/ *Loan*
Perum Jasa Tirta I	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Penyertaan pada entitas asosiasi/ *Investment in associate company*
Pemerintah Daerah Siak	Pemerintah Daerah/ *Local Government*	Pemberian pinjaman modal dan tenaga kerja/ *Lending of working capital and labor*
Perusahaan Umum Kehutanan Negara	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Penjualan saham entitas asosiasi/ *Sales of investment in associate company*
PT Pupuk Kalimantan Timur	Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)/ *Controlled by PT Pupuk Indonesia (Persero)*	Penyertaan saham pada entitas anak. pembelian pupuk dan bahan pembantu/ *Investment in subsidiary. purchase of fertilizers and supporting materials*
PT Mega Eltra	Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)/ *Controlled by PT Pupuk Indonesia (Persero)*	Pembelian pupuk dan bahan pembantu/ *Purchase of fertilizers and supporting materials*
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)/ *Controlled by PT Pupuk Indonesia (Persero)*	Pembelian pupuk dan bahan pembantu/ *Purchase of fertilizers and supporting materials*
PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Jasa konstruksi/ *Construction services*
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pembelian bahan bakar minyak/ *Purchase of fuel*
WIKA-WIP KSO	Dikendalikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*	Jasa konstruksi/ *Construction services*
Koperasi Karyawan Mon Madu	Koperasi Karyawan/ *Employee Cooperatives*	Jasa pengangkutan TBS. CPO dan pemeliharaan tanaman/ *Transportation services of FFB. CPO and maintenance of plantations*

37. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Rincian pihak berelasi. sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Details of related parties. nature of relationships and nature of significant transactions with related parties are as follows (continued):

Pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat Hubungan/** ***Nature of relationships***	**Sifat transaksi/** ***Nature of transactions***
PT Krakatau Engineering	Dikendalikan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*	Jasa konstruksi/ *Construction services*
PT Petral Niaga Pertamina	Entitas Anak PT Pertamina (Persero)/ *Subsidiary of PT Pertamina (Persero)*	Pembelian bahan bakar minyak/ *Purchase of fuel*
PT Petrokimia Gresik (Persero)	Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)/ *Controlled by PT Pupuk Indonesia (Persero)*	Pembelian pupuk dan bahan pembantu/ *Purchase of fertilizers and supporting materials*
PT Petrosida Gresik	Entitas Anak PT Petrokimia Gresik (Persero)/ *Subsidiary of PT Petrokimia Gresik (Persero)*	Pembelian pupuk dan bahan pembantu/ *Purchase of fertilizers and supporting materials*
PT Gresik Cipta Sejahtera	Entitas Anak PT Petrokimia Gresik (Persero)/ *Subsidiary of PT Petrokimia Gresik (Persero)*	Pembelian pupuk dan bahan pembantu/ *Purchase of fertilizers and supporting materials*
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pembelian beras dan bahan pembantu/ *Purchase of rice and supporting material*
PT Amarta Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Jasa konstruksi/ *Construction services*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Jasa angkutan CPO/ *Transportation services of CPO*
PT Waskita Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Jasa konstruksi/ *Construction services*
Pusat Koperasi Karyawan	Koperasi Karyawan/ *Employee Cooperative*	Pengadaan barang dan jasa/ *Procurement of goods and services*
PT Rekayasa Industri (Persero)	Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)/ *Controlled by PT Pupuk Indonesia (Persero)*	Jasa konstruksi/ *Construction services*

37. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Rincian pihak berelasi. sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Details of related parties. nature of relationships and nature of significant transactions with related parties are as follows (continued):

Pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat Hubungan/** ***Nature of relationships***	**Sifat transaksi/** ***Nature of transactions***
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/	Penjualan gula/ *Sugar sales*
PT Pupuk Kujang	Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)/ *Controlled by PT Pupuk Inonesia (Persero)*	Pembelian pupuk dan bahan pembantu/ *Purchase of fertilizers and supporting materials*
PT Pilar Sinergi BUMN	Entitas Asosiasi/ *Associate Entity*	Penyertaan pada entitas asosiasi/ *Investment in associate entity*
Koperasi Karyawan Rispa Medan	Koperasi Karyawan/ *Employee Cooperative*	Pemberian pinjaman/ *Loan*
Koperasi Karyawan Jurai	Koperasi Karyawan/ *Employee Cooperative*	Pemberian pinjaman/ *Loan*
PT Propernas Nusa Dua	Dikendalikan oleh Perum Perumnas/ *Controlled by Perum Perumnas*	Pemberian pinjaman/ *Loan*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Jasa pengadaan/ *Procurement services*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Jasa penyedia sistem dan jaringan/ *System and network provider services*
PT Telekomunikasi Seluler	Dikendalikan oleh PT Telkom (Persero) Tbk/ *Controlled by PT Telkom (Persero) Tbk*	Penyewaan tanah/ *Land rental*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Pemberian Pinjaman/ *Loan*
PT Administrasi Medika	Dikendalikan oleh PT Telkom Indonesia (Persero)/ Controlled by PT Telkom Indonesia	Jasa kesehatan karyawan/Employee *Employee health services*
Badan Pusat Statistik	Lembaga pemerintah non Kementerian/ Non Ministerial Institution	Jasa penyedia data statistik/ Statistical data provider services
PT Hutama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia*	Jasa konstruksi/ *construction services*
PT Jasa Raharja (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by Government Of the Republic of Indonesia*	Penyedia jasa asuransi/ *Insurance service provider*

38. LABA PER SAHAM / *38. EARNINGS PER SHARE*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	1.085.206.469.713	5.633.064.398.402	*Income for the year attributable to Owners of the Parent*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar saham)	40.216.132	40.216.132	*Weighted average of number of shares issued (shares)*
Laba per saham	**26.984**	**140.069**	***Income per share***

39. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN / *39. SIGNIFICANT AGREEMENTS*

a. Barang Milik Negara / *a. State Owned Propery*

Dalam rangka melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang upaya penyediaan tenaga listrik dengan target bauran energi terbarukan nasional sebesar 23% sampai dengan tahun 2025, maka pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan DIPA APBN Tahun 2014 mengalokasikan anggaran untuk membangun Pembangkit Tenaga Listrik Biogas berbasis *Palm Oil Mills Effluence* (PLT Biogas POME).

In order to implement and support government policies and programs in the field of efforts to provide electricity with a target of a national renewable energy mix of 23% by 2025, the government through the Ministry of Energy and Mineral Resources based on the 2014 State Budget DIPA allocates a budget to build a Power Plant Biogas based on Palm Oil Mills Effluence (PLT Biogas POME).

Perusahaan / ***The Company***

Dalam rangka mendukung pengembangan usaha Perusahaan, Kementerian Perindustrian memberikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) melalui Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) nomor 02/KPAII.1/BMN/BAST-SM/5/2020 dan Nomor BOTI/BA.STO/01/2020 tanggal 15 Mei 2020. Adapun PMPP yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara (BMN) Sei Mangkei antara lain:

1. Jalan Poros
2. *Dry Port, Tank Farm,* dan Gedung Pusat Inovasi
3. Perlengkapan dan peralatan lainnya

In order to support the Company's business development, the Ministry of Industry provides Central Government Equity Participation (PMPP) through the Directorate General of Resilience, Territory and International Industrial Access (KPAII), which is stated in the Minutes of Operational Handover (BASTO) number 02/KPAII.1/BMN /BAST-SM/5/2020 and Number BOTI/BA.STO/01/2020 dated 15 May 2020. The PMPP, hereinafter referred to as State Property (BMN) Sei Mangkei, includes:

1. *Axis Road*
2. *Dry Port, Tank Farm, and Innovation Center Building*
3. *Fixtures and other equipment*

Sesuai surat Perusahaan Nomor BOTI/X/14/2022 tanggal 31 Januari 2022, Perusahaan menyurati Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian untuk tindak lanjut proses PMPP merujuk timeline Penyelesaian Barang Milik Negara (BMN) Sei Mangkei.

In accordance with PTPN III's letter number BOTI/X/14/2022 dated January 31, 2022, PTPN III wrote to the Directorate General of KPAII, Ministry of Industry to follow up on the PMPP process referring to the Sei Mangkei State Property (BMN) Completion timeline.

39. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Barang Milik Negara (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Proses yang telah dilakukan oleh Perusahaan antara lain:
- Membuat kajian internal untuk BMN yang ada di Grup
- Mengajukan kajian internal ke Direksi untuk proses penandatanganan

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, aset tersebut masih dalam proses pengalihan menjadi PMN, sehingga Perusahaan belum mengakui aset tersebut.

PT Perkebunan Nusantara I (Eks PT Perkebunan Nusantara II)

Dalam rangka melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang upaya penyediaan tenaga listrik dengan target bauran energi terbarukan nasional sebesar 23% sampai dengan tahun 2025, maka pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan DIPA APBN Tahun 2014 mengalokasikan anggaran untuk membangun Pembangkit Tenaga Listrik Biogas berbasis *Palm Oil Mills Effluence* (PLT Biogas POME).

Pada rencana awalnya, BMN PLT Biogas POME diperuntukkan bagi PTPN I (Eks PTPN 2) yang sebelumnya merupakan BUMN dan akan dipindahtangankan melalui mekanisme PMPP. BMN PLT Biogas POME tersebut telah di operasikan oleh PTPN I (Eks PTPN II) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO).

Kementerian ESDM menetapkan Pengelola Energi Biogas kepada PTPN 2:

- PLT Biogas Kwala Sawit No: 12/20/DJE/2016 tanggal 27 Mei 2016.
- PLT Biogas Pagar Merbau No: 11/20/DJE/2016 tanggal 27 Mei 2016.

Pada awalnya di tahun 2014, direncanakan pelaksanaan PMPP PTPN I (Eks PTPN II) pada dokumen penganggaran dan pengadaan PLTBg POME dimana pada saaat itu PTPN I (Eks PTPN II) masih berstatus sebagai BUMN.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. State Owned Propery (continued)

The Company (continued)

The processes that have been carried out by the Company include:
- *Make an internal review for BMN in the Group*
- *Submitting an internal review to the Board of Directors for the signing process.*

Up to the date of consolidated financial statements, the assets is in the transfer process to PMN, therefore the Company has not yet recorded the assets.

PT Perkebunan Nusantara I (Ex PT Perkebunan Nusantara II)

In order to implement and support government policies and programs in the field of efforts to provide electricity with a target of a national renewable energy mix of 23% by 2025, the government through the Ministry of Energy and Mineral Resources based on the 2014 State Budget DIPA allocates a budget to build a Power Plant Biogas based on Palm Oil Mills Effluence (PLT Biogas POME).

In the initial plan, BMN PLT Biogas POME was allocated to PTPN I (Ex PTPN II), which was previously a state-owned enterprise and will be transferred through the PMPP mechanism. The BMN PLT Biogas POME has been operated by PTPN I (Ex PTPN II) based on the Minutes of Operational Handover (BASTO).

The Ministry of Energy and Mineral Resources assigns a Biogas Energy Manager to PTPN I (Ex PTPN II):
- PLT Biogas Kwala Sawit No: 12/20/DJE/2016 dated 27 May 2016.
- PLT Biogas Pagar Merbau No: 11/20/DJE/2016 dated 27 May 2016.

Initially in 2014, it was planned to implement PTPN I (Ex PTPN II) PMPP in the budgeting and procurement documents for PLTBg POME where at that time PTPN 2 was still a BUMN.

39. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Barang Milik Negara (lanjutan)

PT Perkebunan Nusantara I (Eks PT Perkebunan Nusantara II) (lanjutan)

Namun, pada akhir triwulan 3 tahun 2014, pemerintah membentuk Holding BUMN Perkebunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Nergara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III sehingga status PTPN I (Ex PTPN 2) berubah menjadi entitas anak Perusahaan. Pemindahtanganan PMPP BMN PLTBg POME melalui mekanisme PMPP dilakukan kepada Perusahaan selaku Holding BUMN Perkebunan.

Rencana tindak lanjut atas aset BMN Kementerian ESDM sesuai dengan Notulen Rapat Perubahan Mekanisme PMPP Optimalisasi BMN dan Persiapan Data Pendukung BUMN sebagai berikut:

- Direktur PTPN III (Persero) akan menyampaikan surat kesediaan menerima PMPP setelah kajian pengguna barang selesai disusun.
- Kajian bersama PMPP telah disusun sebelumnya oleh KESDM dan PTPN I (Ex PTPN II), penyesuaian pada kajian perlu dilakukan dengan mengubah penerima dari sebelumnya PTPN II menjadi ke PTPN III (Persero).
- PPBMN akan melaksanakan rapat dengan mengundang Kementerian Sekretaris Negara untuk memastikan usulan Izin Prakarsa untuk RPP PMPP dan RPerpres Penugasan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, aset tersebut masih dalam proses pengalihan menjadi PMN, sehingga PTPN I (Eks PTPN II) belum mengakui aset tersebut.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. State Owned Propery (continued)

PT Perkebunan Nusantara I (Ex PT Perkebunan Nusantara II) (continued)

However, at the end of the 3rd quarter of 2014, the government established a BUMN Plantation Holding based on Government Regulation Number 72 of 2014 concerning the Addition of the Republic of Indonesia State Equity Participation into the Share Capital of the Limited Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III so that the status of PTPN I (Ex PTPN II) changed to a subsidiary oh the Company. The transfer of PMPP BMN PLTBg POME through the PMPP mechanism was carried out to the Company as the Holding of Plantation BUMN.

The follow-up plan for the BMN assets of the Ministry of Energy and Mineral Resources is in accordance with the Minutes of Meeting on Changes to the PMPP Optimization of BMN Mechanisms and Preparation of SOE Supporting Data as follows:

- *The Director of PTPN III (Persero) will submit a letter of willingness to accept PMPP after the review of the use of goods has been completed.*
- *The PMPP joint study has been previously prepared by KESDM and PTPN I (Ex PTPN II), adjustments to the study need to be made by changing the beneficiary from previously PTPN II to PTPN III (Persero).*
- *PPBMN will hold a meeting by inviting the inistry of State Secretariat to confirm the Initiative Permit proposal for RPP PMPP and RPerpres Assignment.*

Up to the date of consolidated financial statements, the assets is in the transfer process to PMN, therefore PTPN I (Ex PTPN II) has not yet recorded the assets.

39. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian Jual Beli Bersyarat PT Mitra Kerinci

Pada tanggal 16 November 2022, PTPN IV ("Pembeli") dan PT Mitra Kerinci ("Penjual") menandatangani perjanjian jual beli bersyarat. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli unit Kebun Teh di Kabupaten Solok, Sumatera Barat seluas 1.481,16 ha, senilai Rp107.500.000.000. Berdasarkan perjanjian tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang ditetapkan dan harus dipenuhi oleh para pihak terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi jual beli.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian, para pihak belum dapat memenuhi persyaratan jual beli tersebut.

c. Perjanjian Pengembangan Perkebunan Plasma

PTPN I dan PTPN IV mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa untuk pengembangan perkebunan plasma.

Berdasarkan perjanjian tersebut PTPN I dan PTPN IV wajib dan berhak untuk:

(i) memasarkan hasil TBS kelapa sawit koperasi dengan syarat kualitas sesuai dengan ketentuan Pemerintah,
(ii) membayar jumlah produksi TBS kebun koperasi berdasarkan hasil timbang neto yang diterima dengan harga per Kg TBS kelapa sawit berdasarkan tahun tanam yang dikaji oleh tim pengkajian dan penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit Pemda Riau,
(iii) mengamati teknis pelaksanaan perawatan kebun, kegiatan panen, dan transportasi TBS

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Conditional Sale and Purchase Agreement to PT Mitra Kerinci

On November 16, 2022, the PTPN IV ("Buyer") and PT Mitra Kerinci ("Seller") entered into a conditional sale and purchase agreement. Both parties are prohibited from buying and selling tea plantation units in Solok Regency, West Sumatra covering an area of 1.481,16 hectares, valued at IDR 107,500,000,000. Based on the agreement, there are several conditions set and must be fulfilled by the parties before proceed the sale and purchase transaction.

As of the issuance date of the consolidated financial statement, each parties have not been able to fulfill the sales and purchase agreement.

c. Plasma Plantation Development Agreement

PTPN I and PTPN IV entered into cooperation agreements with several KUDs for the development of plasma plantations.

Based on the agreement, PTPN I and PTPN IV is obliged and entitled to:

(i) sell the FFB from cooperative palm oil with quality requirements in accordance with government regulations,
(ii) paying for the amount of FFB produced by cooperative plantations based on the net weight received at the price per Kg of TBS based on the year of planting reviewed by the study team and determining the purchase price of palm oil FFB from the Regional Government of Riau,
(iii) observing the technical implementation of garden maintenance, harvesting activities, and transportation of FFB

39. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Perjanjian Pengembangan Perkebunan Plasma (lanjutan)

Koperasi-koperasi wajib dan berhak untuk:

(i) menyerahkan lahan kepada PTPN I dan PTPN IV untuk dikelola,

(ii) memasarkan hasil kebun kelapa sawit kepada PTPN I dan PTPN IV selama satu tahun siklus tanaman, jika TBS dipasarkan ke pihak ke lain akan dikenakan denda 30% dari hasil penjualan TBS,

(iii) membayar seluruh kewajiban terkait dana talangan yang dikeluarkan oleh PTPN I dan PTPN IV,

(iv) Koperasi menanggung biaya angkutan TBS dari kebun sama ke pabrik kelapa sawit.

d. Perjanjian sewa menyewa Barang Milik Negara (BMN)

a. Perjanjian sewa menyewa Barang Milik Negara (BMN) dengan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian.

Pada tanggal 14 Oktober 2022, SGN dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian menandatangani perjanjian sewa Nomor B/938/ILMATE/BMN/X/2022 dan Nomor SG01-PESWA-SKE221014.002 untuk sewa BMN untuk jangka waktu selama 2 tahun efektif sejak tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp875.318.000.

b. Perjanjian sewa menyewa BMN dengan Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian

Pada tanggal 14 Oktober 2022, SGN dan Direktorat Jenderal Industri Industri Agro Kementerian Perindustrian menandatangani perjanjian sewa Nomor 1509/IA.1/BMN/X/2022 dan Nomor SG01-PESWA-SKE221014.001 untuk sewa BMN untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun efektif sejak tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp3.530.090.000.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c. Plasma Plantation Development Agreement (continued)

Cooperatives are obliged and entitled to:

(i) hand over the land to PTPN I and PTPN IV managed,

(ii) marketing the produce of oil palm plantations to PTPN I and PTPN IV for one year of the crop cycle, if FFB is marketed to other parties a fine of 30% of the proceeds from the sale of FFB will be imposed,

(iii) pay all obligations related to bailout funds issued by PTPN I dan PTPN IV,

(iv) The cooperative bears the cost of transporting FFB from the same plantation to the palm oil mill.

d. Lease agreement for renting State-Owned Goods ("BMN")

a. Lease agreement for renting State-Owned Goods ("BMN") between the Company and the Directorate General of Metal, Machinery, Transportation Equipment and Electronics Industry of the Ministry of Industry.

On October 14, 2022, SGN and the Directorate General of Metal, Machinery, Transportation Equipment and Electronics Industry of the Ministry of Industry signed lease agreements Number B/938/ILMATE/BMN/X/2022 and Number SG01-PESWA-SKE221014.002 for BMN leases for 2 years which effective since October 10, 2022 amounted Rp875,318,000.

b. Lease agreement for renting BMN between the Company and the Directorate General of Agro Industry of the Ministry of Industry

On October 14, 2022, SGN and the Directorate General of Metal, Machinery, Transportation Equipment and Electronics Industry of the Ministry of Industry signed lease agreements Number 1509/IA.1/BMN/X/2022 and Number SG01-PESWA-SKE221014.001 for BMN leases for 2 (two) years which effective since October 10, 2022 amounted Rp3,530,090,000.

39. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Perjanjian Kerjasama Induk Proyek Kota Deli Megapolitan

Berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama Induk ("*Master Cooperation Agreement*") Proyek Kota Deli Megapolitan No. Dir/SPK-I/01/VI/2020 pada tanggal 26 Juni 2020 antara PTPN I (Eks PTPN II), PT Ciputra KPSN, dan NDP, para pihak bekerjasama untuk mengembangkan, mengelola dan memasarkan wilayah HGU PTPN I (Eks PTPN II) menjadi Kota Deli Megapolitan seluas 8.077 ha selama 30 (tiga puluh) tahun yang terbagi menjadi 6 (enam) Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan mendirikan 6 (enam) Perusahaan Usaha Patungan (PUP), yaitu (i) PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial ("DMKR"), (ii) PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis ("DMKB"), (iii) PT Deli Megapolitan Kawasan Industri ("DMKI"), (iv) PT Deli Megapolitan Kawasan Hijau ("DMKH"), (v) PT Deli Megapolitan Kawasan Penunjang ("DMKPu") dan PT Deli Megapolitan Kawasan Pengelola ("DMKPo").

PTPN I (Eks PTPN II) akan meng-inbreng-kan aset tanah seluas 2.514 ha ke dalam modal disetor NDP yang selanjutnya akan diubah menjadi HGB untuk dikembangkan oleh DMKR dan mengubah HGU menjadi hak pengelolaan atas tanah ("HPL") seluas 5.563 ha untuk dikembangkan oleh DMKB, DMKI, dan DMKH. Sebagai kontra prestasi atas komitmen Perusahaan dan NDP, PT Ciputra KPSN sepakat untuk membiayai dan menyediakan uang jaminan untuk pengalokasian lahan wilayah HGU tahap pertama dalam jumlah tetap sebesar Rp225.000.000.000.

Para pihak sepakat bahwa sebagai kompensasi ditunjuknya PT Ciputra KPSN sebagai pengembang, untuk melaksanakan kerjasama Pengembangan atas Proyek Kota Deli Megapolitan maka pada tahun 2020 PT Ciputra KPSN sepakat untuk membayar pembayaran awal ("*initial fee*") dengan jumlah Rp18.000.000.000 kepada PTPN I (Eks PTPN II).

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e. Master Cooperation Agreement for Deli Megapolitan City Project

Based on the letter of Master Cooperation Agreement for the Deli Megapolitan City Project No. Dir/SPK-I/01/VI/2020 on June 26, 2020 between the PTPN I (Ex PTPN II), PT Ciputra KPSN, and NDP, the parties work together to develop, manage and market PTPN I (Ex PTPN II)'s HGU area into a Megapolitan Deli City covering an area of 8,077 ha for 30 (thirty) years which is divided into 6 (six) Annual Work Plans (CTR) by establishing 6 (six) Joint Venture Companies (PUP), namely (i) PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial ("DMKR"), (ii) PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis ("DMKB"), (iii) PT Deli Megapolitan Kawasan Industri ("DMKI"), (iv) PT Deli Megapolitan Kawasan Hijau ("DMKH"), (v) PT Deli Megapolitan Kawasan Penanjang ("DMKPu") and PT Deli Megapolitan Kawasan Pengelola ("DMKPo").

PTPN I (Ex PTPN II) will integrate 2,514 ha of land assets into NDP's paid-up capital which will then be converted into HGB to be developed by DMKR and convert HGU into land management rights ("HPL") covering an area of 5,563 ha to be developed by DMKB, DMKI, and DMKH. As a counter to the Company's commitment and NDP, PT Ciputra KPSN agreed to finance and provide a security deposit for the allocation of the first phase of HGU area land in a fixed amount of Rp225,000,000,000.

The parties agreed that as compensation for the appointment of PT Ciputra KPSN as the developer, to carry out the Development Cooperation for the Megapolitan Deli City Project, in 2020 PT Ciputra KPSN agreed to pay an initial fee in the amount of Rp18,000,000,000 to PTPN I (Ex PTPN II).

39. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Perjanjian kerjasama operasi dengan PT Nusa Dua Propertindo dan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial

Atas dasar Perjanjian Induk, pada tanggal 11 November 2020, PTPN I (Eks PTPN II) menandatangani KSO Residensial untuk pembangunan Kawasan Residensial di lahan seluas +2.514 Ha dengan NDP (entitas anak) dan DMKR.

Berdasarkan KSO Residensial ini, para pihak telah menyetujui bahwa NDP sebagai pemilik dan penyedia lahan Kawasan Residensial sebagai akibat dari pemasukan (inbreng) dari PTPN I (Eks PTPN II) akan memberikan hak eksklusif kepada DMKR yang merupakan PUP yang didirikan oleh PTPN I (Eks PTPN II) dan PT Ciputra KPSN untuk mengembangkan, membangun produk Real Estat dan memasarkan atau melakukan penjualan produk Real Estat di Kawasan Residensial Kota Deli Megapolitan.

NDP sebagai pemilik dan penyedia lahan bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya proses konversi status lahan Kawasan Residensial dari sebelumnya berstatus HGU menjadi HGB yang terdaftar atas nama NDP. Seluruh biaya yang timbul sampai dengan penerbitan HGB menjadi beban dan tanggungan penuh Perusahaan termasuk segala tindakan untuk membersihkan atau membebaskan lahan tanah wilayah Kota Deli Megapolitan.

DMKR berkewajiban untuk mengembangkan lahan Kawasan Residensial menjadi produk Real Estat dalam jangka waktu yang sesuai dengan Master Plan dengan sumber dana yang berasal dari DMKR sendiri atau diperoleh dari PT Ciputra KPSN maupun pinjaman kepada pihak ketiga.

Berdasarkan KSO Residensial ini, para pihak telah menyetujui untuk melakukan pembagian Pendapatan atas Pemanfaatan Lahan Kawasan Residensial (“PPLKR”) yang jumlahnya dihitung berdasarkan porsi atau persentase tertentu dari penjualan produk Real Estat Kawasan Residensial yang telah disepakati oleh para pihak yaitu masing-masing berkisar antara 13% - 17% untuk NDP dan 83% - 87% untuk DMKR.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f. Joint operation agreement with PT Nusa Dua Propertindo and PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial

Based on the Master Agreement, on November 11, 2020, PTPN I (Ex PTPN II) signed a Residential KSO for the construction of a Residential Area on an area of +2,514 Ha with the subsidiary (PT NDP) and PT DMKR.

Based on this Residential KSO, the parties have agreed that NDP as the owner and provider of Residential Area land as a result of income (inbreng) from PTPN I (Ex PTPN II) will give exclusive rights to DMKR which is a PUP established by PTPN I (Ex PTPN II) and PT Ciputra KPSN to develop, build Real Estate products and market or sell Real Estate products in the Deli Megapolitan City Residential Area.

NDP as the owner and provider of land is responsible for ensuring the process of converting the land status of Residential Areas from previously HGU status to HGB registered on behalf of NDP. All costs incurred up to the issuance of HGB shall be the Company's full burden and responsibility, including all actions to clear or acquire land in the Deli Megapolitan City area.

DMKR is obliged to develop Residential Area land into Real Estate products within a period of time in accordance with the Master Plan with funding sources derived from DMKR itself or obtained from PT Ciputra KPSN or loans to third parties.

Based on this Residential KSO, the parties have agreed to share Revenue on Residential Area Land Use ("PPLKR") whose amount is calculated based on a certain portion or percentage of the sale of Residential Area Real Estate products that have been agreed upon by the parties, each ranging from 13% - 17% for NDP and 83% - 87% for DMKR.

39. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Perjanjian kerjasama operasi dengan PT Nusa Dua Propertindo dan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (lanjutan)

Para pihak juga menyetujui bahwa untuk menjamin kepastian akan diterimanya pembagian pendapatan atas PPLKR secara berkesinambungan di masa yang akan datang, maka setiap kali DMKR akan meminta alokasi pemanfaatan dan pembangunan lahan, 50% dari total perkiraan porsi pendapatan PPLKR Perusahaan wajib untuk dibayarkan terlebih dahulu oleh DMKR kepada PTPN I (Eks PTPN II).

Para pihak juga menyetujui bahwa untuk menjamin kepastian akan diterimanya pembagian pendapatan atas PPLKR secara berkesinambungan di masa yang akan datang, maka setiap kali DMKR akan meminta alokasi pemanfaatan dan pembangunan lahan, 50% dari total perkiraan porsi pendapatan PPLKR Perusahaan wajib untuk dibayarkan terlebih dahulu oleh DMKR kepada PTPN I (Eks PTPN II).

g. Perjanjian kerjasama operasi dengan PT Propernas Nusa Dua (PND)

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasi Pengolahan Lahan antara entitas anak (PT Nusa Dua Bekala (NDB)) dan PT Propernas Nusa Dua (“PND”) No. NDB/24/IX/2013 pada tanggal 19 September 2013, NDB sepakat untuk menyerahkan hak pengelolaan, penguasaan fisik dan hak eksklusif atas lahan bekas perkebunan seluas kurang lebih 854,26 ha yang terletak di Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang sesuai sertifikat HGU No. 171 (“Lahan Kerjasama”) kepada PND setelah proses pengurusan oleh Perusahaan (eks-PTPN II) untuk merubah menjadi sertifikat Lahan Kerjasama dari HGU menjadi HGB.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f. Joint operation agreement with PT Nusa Dua Propertindo and PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (continued)

The parties also agree that in order to ensure the certainty of receiving revenue sharing for PPLKR on an ongoing basis in the future, every time DMKR will request an allocation of land use and development, 50% of the total estimated portion of the Company's PPLKR revenue must be paid in advance by DMKR to the PTPN I (Ex PTPN II).

The parties also agree that in order to ensure the certainty of receiving revenue sharing for PPLKR on an ongoing basis in the future, every time DMKR will request an allocation of land use and development, 50% of the total estimated portion of the Company's PPLKR revenue must be paid in advance by DMKR to the PTPN I (Ex PTPN II).

g. Joint operation agreement with PT Propernas Nusa Dua (PND)

In accordance with the Land Processing Operation Cooperation Agreement between the subsidiary (PT Nusa Dua Bekala (NDB)) and PT Propernas Nusa Dua ("PND") No. NDB/24/ IX/2013 on September 19, 2013, NDB agreed to hand over management rights, physical control and exclusive rights over the former plantation land covering an area of approximately 854.26 ha located in Simalingkar A Village, Pancur Batu District, Deli Serdang Regency in accordance with HGU certificate No. 171 ("Cooperation Land") to PND after the management process by the Company to change Cooperation Land certificate from HGU to HGB.

39. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Perjanjian dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Fasilitas Kredit Usaha Rakyat

Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara BCN dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BSL2/1/063/2020 dan No. KOM/KTR/57/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang berlaku untuk jangka waktu dua tahun hingga 26 Februari 2022 dan No. W03/1/003/2022 dan No. DSDU/PKS/138/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang berlaku untuk jangka waktu dua tahun hingga 30 Mei 2024, berupa kredit modal kerja dengan suku bunga maksimal sebesar 6,00% efektif anuitas per tahun atau sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Sinergi Gula Nusantara No. SBP/1/014 dan No. BD07-BANEG/221101.0001 tanggal 18 November 2022, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, BCN dan PT Sinergi Gula Nusantara dimana pengelolaan administrasi dan dokumentasi penyaluran kredit kepada petani beralih dari BCN kepada PT Sinergi Gula Nusantara.

Fasilitas kredit ini digunakan untuk membiayai usaha budi daya tanaman tebu dan berjangka waktu sesuai siklus panen/produksi tebu maksimal 18 bulan. Pokok, beban bunga dan beban administratif penarikan fasilitas kredit akan dilunasi oleh kelompok tani sebagai penerima fasilitas kredit. Pinjaman akan disalurkan melalui unit Bungamayang BCN kepada kelompok tani/koperasi primer di wilayah operasionalnya. Saldo pinjaman per 31 Desember 2023 adalah sebesar nihil (2022: Rp44.404.095.500), disajikan sebagai bagian dari akun utang lain-lain jangka panjang - pihak berelasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h. Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Kredit Usaha Rakyat facility

Kredit Usaha Rakyat Facility (KUR) is held based on a cooperation agreement between BCN and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. BSL2/1/063/2020 and No. KOM/KTR/57/2020 dated February 27, 2020 which is valid for a period of two years until February 26, 2022 and No. W03/1/003/2022 and No. DSDU/PKS/138/2022 dated May 31, 2022 which is valid for a period of two years until May 30, 2024, in the form of a working capital loan with a maximum interest rate of 6.00% effective annuity per year or according to the interest rate set by the Government.

Based on the cooperation agreement between PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Sinergi Gula Nusantara No. SBP/1/014 and No. BD07-BANEG/221101.0001 dated November 18, 2022, an Agreement for the Transfer of Rights and Obligations was made between PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, BCN and PT Sinergi Gula Nusantara whereby administrative management and documentation of credit distribution to farmers was transferred from BCN to PT Sinergi Gula Nusantara.

This credit facility is used for financing of sugarcane plantings cultivation and has a loan term according to the maximum sugarcane production/harvesting cycle which is 18 months. The principal, interest expense and administrative expense related with the drawdown of the credit facility will be repaid by the farmers group as the debitor. The loan will be distributed by Bungamayang unit of BCN to the farmers group/primary cooperative in its operational area. The outstanding balance of the loan as of December 31, 2023 is nil (2022: Rp44,404,095,500), is presented as part of other long-term payables - related parties in the consolidated statements of financial position.

39. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Pada tanggal 27 Oktober 2014, PTPN I (Ex PTPN IX) menerima fasilitas pinjaman dari Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam bentuk Program Kemitraan dimana Program Pendanaan UMK PGN menyediakan sejumlah Dana Program Kemitraan sebesar Rp25.000.000.000 untuk disalurkan kepada Petani Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) PGN melalui pabrik gula pelaksana dalam rangka budidaya tanaman Tebu Rakyat Masa Tanam 2014/2015 dan pemeliharaan sampai dengan pasca panen pada masa tanam tahun yang bersangkutan sehingga Petani dapat menghasilkan tanaman tebu yang berkualitas dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan Petani. Perjanjian tersebut jatuh tempo pada 22 Juni 2015. Perjanjian ini telah diamandemen dimana disepakati akan diselesaikan secara cicilan dengan jatuh tempo pada Oktober 2018.

Pada tanggal 6 Februari 2023, PUMK PGN mengeluarkan amandemen III dengan nomor surat 009400.AMD/HM.05.01/COS/2023 yang disepakati oleh PTPN I (Eks PTPN IX) akan diselesaikan dalam jangka waktu 8 tahun dan 6 bulan atau jatuh tempo pada 31 Juli 2031**.**

k. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) PT Pertamina (Persero)

Pada tanggal 23 Agustus 2013, PTPN I (Eks PTPN IX) menerima dana kemitraan sebesar Rp60.000.000.000 dari Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) PT Pertamina (Persero) dalam bentuk Program Kemitraan dimana Pertamina menyediakan sejumlah dana kemitraan untuk dialokasikan sebagai pinjaman kepada Kelompok Tani Tebu binaan dari Perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari petani tebu tersebut.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

j. Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

On October 27, 2014, PTPN I (Ex PTPN IX) received a loan facility from Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk in the form of PGN Partnership Program provides Partnership Program Fund amounting to Rp25,000,000,000 to farmers partners of Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program PGN in order cultivation of sugar cane Farmers planting period 2014/2015 and maintenance until the post-harvest in planting year so that the farmer could produce qualified sugarcane and can improve the welfare of Farmers. The agreement matures on June 22, 2015. This agreement has been amendment where agreed the loan settled by installment and due on October 2018.

On February 6, 2023 MSE PGN has issued amendment III with letter number 009400.AMD/HM.05.01/COS/2023 which was agreed by PTPN I (Ex PTPN IX) to be completed within 8 years and 6 months or due in July 31, 2023.

k. Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program PT Pertamina (Persero)

On August 23, 2013, PTPN I (Ex PTPN IX) received partnership funds from Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program PT Pertamina (Persero) amounting to Rp60,000,000,000 in the form of Pertamina's Partnership Program which provides a number of partnership funds to be allocated as a loan to the Cane Farmers Group target of the Company which the purpose is to improve the incomes and welfare of the sugarcane farmers.

39. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) PT Pertamina (Persero) (lanjutan)

Pada tanggal 11 Maret 2013, PTPN I (Eks PTPN IX) menerima dana kemitraan sebesar Rp75.000.000.000 dari Program Pendanaan UMK PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam bentuk Program Kemitraan dimana BRI menyediakan dana Program Kemitraan untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman Kemitraan kepada petani/kelompok petani untuk budidaya tanaman tebu Masa Tanam 2013/2014 binaan PTPN I (Eks PTPN IX). Perjanjian ini telah jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2014. Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai pinjaman sebesar Rp65.475.000.000 dicatat sebagai utang lain-lain - pihak berelasi (Catatan 20).

l. Perjanjian Proyek PMN EPCC 1 - Peningkatan Kapasitas PG Gempolkrep dengan Barata

Pada tanggal 27 Agustus 2018, PTPN I (Eks PTPN X) mengadakan perjanjian dengan Barata terkait dengan Kontrak Jasa Rekayasa, Pengadaan, Konstruksi dan Komisioning (*Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Services Contract* atau "*EPCC*") - Peningkatan Kapasitas PG Gempolkrep dari 6.500 TCD menjadi 8.000 TCD yang terintegrasi dengan Pabrik Bioethanol dan Co-generation ("Proyek EPCC 1") dengan total nilai kontrak Rp743.490.000.000. Tanggal penyelesaian pekerjaan konstruksi pabrik dan Co-generation yang disepakati masing-masing selambat-lambatnya bulan November 2019 dan Maret 2020.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terkait dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi, yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2021.

Berdasarkan surat PTPN I (Eks PTPN X) ke Barata tanggal 24 Juli 2021, PTPN I (Eks PTPN X) memutuskan untuk mengakhiri pekerjaan dengan alasan pemilik atau wanprestasi kontrak dikarenakan Barata gagal mempertahankan jaminan uang muka yang telah jatuh tempo sejak 30 Juli 2020.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

k. Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program PT Pertamina (Persero) (continued)

On March 11, 2013, PTPN I (Ex PTPN IX) received partnership funds from Micro and Small Enterprise (MSE) Fundig Program PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp75,000,000,000. in the form of BRI Partnership Program which BRI provides fund for the Partnership Program to be distributed in the form of loans to farmers/farmer group for the cultivation of sugar cane in Planting Period 2013/2014 which targeted by PTPN I (Ex PTPN IX). This agreement was due on December 5, 2014. As of December 31, 2023, the outstanding balance amounting to Rp65,475,000,000, was recorded as other payables - related parties (Notes 20).

l. PMN Project EPCC 1 Agreement - Gempolkrep SF Capacity Increase with Barata

On August 27, 2018, PTPN I (Ex PTPN X) entered into an agreement with Barata related to the Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Services Contract ("EPCC") - Gempolkrep SF Capacity Increase from 6,500 TCD to 8,000 TCD which integrated with Bioethanol Factory and Co-generation Plant ("EPCC Project 1") with a total contract value of Rp743,490,000,000. The mechanical completion date of factory and Co-generation was no later than November 2019 and March 2020, respectively.

This agreement has been amended several times regarding the extention of mechanical completion, which no later than January 31, 2021.

Based on letter from PTPN I (Ex PTPN X) to Barata dated July 24, 2021, PTPN I (Ex PTPN X) decided to terminate the work with owner's reason or default of contract due to Barata failed to maintain the validity of down payment guarantee which has been due since July 30, 2020.

39. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Perjanjian Proyek PMN EPCC 1 - Peningkatan Kapasitas PG Gempolkrep dengan Barata (lanjutan)

Dikarenakan terdapat perselisihan atas wanprestasi yang diajukan oleh PTPN I (Eks PTPN X), atas permintaan Barata, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") Jawa Timur melakukan mediasi. Pada tanggal 17 Januari 2022, Perusahaan dan Barata sepakat bahwa BPKP melakukan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (E-HKP) yang ditandai dengan penandatanganan Management Representation Letter.

Berdasarkan hasil ekspose mediasi proyek PMN EPCC 1 tanggal 28 Maret 2022 oleh BPKP, PTPN I (Eks PTPN X) dan Barata sepakat untuk menunjuk Ahli Hukum Kontrak untuk memberikan legal opinion terkait pengakhiran kontrak dan menunjuk Ahli Teknis untuk melakukan pemeriksaaan pekerjaan secara teknis dan nilai pembangunan.

Pada tanggal 28 Desember 2022, mediasi lanjutan dilakukan dimana Barata setuju atas pengakhiran dengan wanprestasi kontrak. Pada 20 Januari 2023, telah ditunjuk Ahli Teknis untuk membantu dalam penilaian hak dan kewajiban pengakhiran. Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian, acuan kerja Ahli Tekhis sedang dalam pembahasan.

m. Penyertaan Modal Negara ("PMN") 2015

PTPN I (Eks PTPN XI) menerima dana program Penyertaan Modal Negara ("PMN") senilai Rp650.000.000.000 pada tanggal 30 Desember 2015. Dana ini telah habis digunakan pada 2018.

Dana ini akan digunakan dalam beberapa program kegiatan PTPN I (Eks PTPN XI), antara lain:

- Peningkatan kapasitas Pabrik Gula Djatiroto dari 6.000 TCD menjadi 10.000 TCD;
- Peningkatan kapasitas Pabrik Gula Assembagoes dari 3.000 TCD menjadi 6.000 TCD.

Pabrik Gula Djatiroto dan Pabrik Gula Assembagoes termasuk aset yang dialihkan kepada SGN sesuai dengan aksi korporasi pemisahan tidak murni (*spin-off*) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-641/MBU/10/2022 tertanggal 6 Oktober 2022 mengenai Persetujuan Atas Restrukturisasi Bisnis Gula PT Perkebunan Nusantara Grup.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

l. PMN Project EPCC 1 Agreement - Gempolkrep SF Capacity Increase with Barata (continued)

Due to dispute regarding default of contract filed by PTPN I (Ex PTPN X), by request of Barata, Financial and Development Supervisory Agency ("BPKP") East Java to conduct mediation. On January 17, 2022, the Company and Barata agreed that BPKP conducts "Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan" (E-HKP). This appointment was marked by the signing of a Management Representation Letter.

Based on the results of the exposure of the PMN EPCC Project 1 mediation on March 28, 2022 by BPKP, PTPN I (Ex PTPN X) and Barata agreed to appoint a Contract Legal Expert to provide a legal opinion regarding the termination of the contract and to appoint a Technical Expert to carry out a technical inspection of the work and the value of the development.

On December 28, 2022, further mediation conducted whereas the Barata agreed the termination by default of contract. On January 20, 2023, and Technical Expert has been appointed to assist in valuation of rights and obligations termination. Up to the date of consolidated financial statements, the term of reference is on discussion.

m. State Capital Investment ("PMN") 2015

PTPN I (Ex PTPN XI) received State Capital Investment program fund ("PMN") amounting to Rp650,000,000,000 on December 30, 2015. This fund already used in 2018.

This fund will be allocated to several program activities of PTPN I (Ex PTPN XI), among others:

- *The increase in milling capacity of Djatiroto sugar mill from 6,000 TCD to 10,000 TCD;*
- *The increase in milling capacity of Assembagoes sugar mill from 3,000 TCD to 6,000 TCD.*

Sugar Mill Djatiroto and Sugar Mill Assembagoes were transferred in accordance to corporate action of spin-off asset to SGN based on Decision of the Minister of State-Owned Enterprises Number S-641/MBU/10/2022 dated October 6, 2022 regarding Approval of the Restructuring of the Sugar Business of PT Perkebunan Nusantara Group.

39. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Somasi kepada KSO WIKA - Barata - Multinas ("KSO WBM")

Pada tanggal 20 Maret 2017, PTPN I (Eks PTPN X) mengadakan perjanjian dengan KSO WBM untuk pelaksanaan Proyek PMN atas Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi: Rekayasa, Pengadaan, Konstruksi dan Komisioning (*Engineering, Procurement, Construction and Comisioning* - "*EPCC*") untuk Pengembangan dan Modernisasi di PG Assembagoes dengan nilai kontrak Rp727.730.000.000.

Berdasarkan Berita Acara Performance Guarantee Test tertanggal 24 Agustus 2020, dinyatakan bahwa target kapasitas giling hanya tercapai 65,3% dari target kontrak. Selain itu, hingga tanggal 10 Juni 2021, KSO WBM tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan Jaminan Performance Guarantee sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp144.427.977.171 yang seharusnya dipenuhi sebelum tahapan Commisioning. Sehingga pada tanggal 17 Juni 2022, setelah dilaksanakan General Assessment di PG Assembagoes oleh Tim Ahli Independen pada tanggal 12 November 2021, PTPN I (Eks PTPN X) menerbitkan surat pemutusan kontrak dan menagihkan Jaminan Performance Guarantee.

Dengan fakta tersebut, pada 20 November 2023, PTPN I (Eks PTPN X) mengirimkan Surat Peringatan Pertama ("Somasi I") kepada KSO WBM. Tanggapan atas Somasi ini adalah KSO WBM keberatan atas pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Perusahaan dan meminta agar dilakukan mediasi oleh BPK RI.

PTPN I (Eks PTPN X) kemudian mengeluarkan Somasi II pada tanggal 27 November 2023 yang menegaskan kembali kepada KSO WBM untuk menyerahkan Jaminan Performance Guarantee dan jika tidak dipenuhi maka PTPN I (Eks PTPN X) akan melakukan tuntutan melalui BANI. Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan, permasalahan ini masih dalam proses negoisasi.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

n. Warning letter to KSO WIKA - Barata - Multinas ("KSO WBM")

On March 20, 2017, PTPN I (Ex PTPN X) entered into an agreement with KSO WBM to perform PMN Project of Integrated Construction Work: Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Services Contract ("EPCC") - for development and modernization in PG Assembagoes with a total contract value of Rp727,730,000,000.

Based on Minutes of Performance Guarantee Test dated August 24, 2020, it is stated that the milling capacity target has only reached 65,3% of the contract target. In addition, up to June 10, 2021, KSO WBM did not perform its obligation to deliver Performance Guarante at 20% from contract value or amounting to Rp144,427,977,171 which should have been fulfilled before Commisioning process. Accordingly, on June 17, 2022, after General Assessment in PG Assembagoes performed by Independent Expert Team, on November 12, 2021, PTPN I (Ex PTPN X) issued a contract termination letter and a billing for Performance Guarantee.

With the facts above, on November 20, 2023, PTPN I (Ex PTPN X) sent Warning Letter I to KSO WBM. The response to this is KSO WBM objected of the contract termination by PTPN I (Ex PTPN X) and requested the mediation by BPK RI.

Then PTPN I (Ex PTPN X) issued Warning Letter II dated November 27, 2023 that reaffirmed to KSO WBM to deliver Performance Guarante and if it is not fulfilled, PTPN I (Ex PTPN X) will submit litigation to BANI. Up to the reporting date, this matter is still on negotiation process.

39. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Perjanjian Kerjasama Unit Usaha Kabaru

Pada tanggal 4 Desember 2021, PTPN I (Eks PTPN XIV) bersama dengan PT Asiabeef Biofarm Indonesia menandatangani perjanjian Kerja Sama Unit Usaha Kabaru untuk usaha budi daya sapi berkelanjutan berbasis ranch. Objek kerja sama ini adalah tanah seluas 7.972 Ha beserta fasilitas eksisting serta bagian lainnya di luar lahan produktif namun masih dalam bagian dari tanah. PT Asiabeef Biofarm Indonesia diperkirakan akan melakukan investasi di objek kerja sama sebesar Rp200 miliar untuk 7.972 Ha tanah.

Atas pemanfaatan objek kerja sama ini, PTPN I (Eks PTPN XIV) akan memperoleh kompensasi berupa revenue sharing dengan rasio 8:92. Jangka waktu kerja sama berlaku selama 30 tahun sejak tanggal efektif kerja sama ini. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, kerja sama di atas masih belum berlaku efektif.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

o. Business Unit Kabaru Joint Operation Agreement

On December 4 2021, PTPN I (Ex PTPN XIV) together with PT Asiabeef Biofarm Indonesia signed a Kabaru Business Unit Cooperation agreement for a ranch-based sustainable cattle cultivation business. The object of this collaboration is land covering an area of 7,972 Ha along with existing facilities and other parts outside the productive land but still part of the land. PT Asiabeef Biofarm Indonesia is estimated to invest IDR 200 billion in the cooperation object for 7,972 Ha of land.

For the use of this cooperation object, PTPN I (Ex PTPN XIV) will receive compensation in the form of revenue sharing with a ratio of 8:92. The cooperation period is valid for 30 years from the effective date of this cooperation. As of the completion date of the consolidated financial statements, the above cooperation is still not effective.

40. TUNTUTAN DAN PERKARA HUKUM SIGNIFIKAN / *40. SIGNIFICANT CLAIMS AND LITIGATIONS*

Entitas/ *Entity*	Kasus/ *Case*	Para Pihak/ *The Parties*	Objek/ *Object*	Status/ *Status*
PTPN I (Eks PTPN II)	Kasus Kebun Patumbak No. 10/Pdt.G/2020/PN.Lbp tahun 2020	PT Sianjur Resort sebagai Penggugat dan PTPN I (Eks PTPN II) sebagai Tergugat/ *PT Sianjur Resort as the Plaintiff and PTPN I (Ex PTPN II) as the Defendant*	Tanah seluas ± 125 Ha yang terletak di Dusun II dan Dusun IX, Desa Marindal II/ *An area of ± 125 hectares located in Dusun II and Dusun IX, Marindal II Village*	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, PTPN I – (Eks PTPN II) sedang mengajukan permohonan eksekusi/ *As of the reporting date, PTPN I (Ex PTPN II) is currently filing for execution*.
PTPN I (Eks PTPN II)	Sengketa Tanah No. 74/Pdt.G/2015/PN LBP Tahun 2015	Saudara Supardi dkk dan Sahman Saragih dkk sebagai Penggugat dan PTPN I (Eks PTPN II) sebagai tergugat I / *Supardi et al. and Mr. Sahman Saragih et al. as the Plaintiffs and PTPN I (Ex PTPN II) as the Defendant I*	Tanah seluas ± 41 ha yang terletak di Desa Penara/ *A land area of ± 41 hectares located in Penara Village*	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, PTPN I (Eks PTPN II) akan mengajukan PK Kedua/ *As of the reporting date, PTPN I (Ex PTPN II) will file for a second Judicial Review.*
PTPN I (Eks PTPN II)	Sengketa Tanah No. 76/Pdt.G/2023/PN-Lbp Tahun 2023	Kelompok Masyarakat Adat BPR PI oleh saudara Muklis dkk sebagai penggugat dan PTPN I (Eks PTPN II) sebagai tergugat / *Kelompok Masyarakat Adat BPR PI represented by Mr. Muklis et al. as the Plaintiffs and PTPN I (Ex PTPN II) as the Defendant.*	Tanah seluas ± 320 ha yang merupakan bagian dari SHGU No.108/Klumpang milik PTPN I (Eks PTPN II)/ *An area of ± 320 hectares which is part of SHGU No.108/Klumpang owned by PTPN I (Ex PTPN II).*	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, PTPN I (Eks PTPN II) sedang dalam proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri (PN)/ *As of the reporting date, PTPN I (Ex PTPN II)is currently in the trial process at the District Court level.*
PTPN I (Eks PTPN II)	Kasus Kebun Bandar Klippa Bangun Sari, No. 83/Pdt.G/2015/PN-Lbp tgl. 09 Juni 2015	Rasken Pinem, dkk sebagai Penggugat dan PTPN I (Eks PTPN II) sebagai Tergugat/ *Rasken Pinem et al as the Plaintiff and PTPN I (Ex PTPN II) as the Defendant*	Tanah seluas ± 119,47 Ha/ *Land area of ± 119.47 Ha*	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, PTPN I (Eks PTPN II) sedang mempersiapkan pengajuan gugatan baru/ *As of the reporting date, PTPN I (Ex PTPN II) is currently preparing to file a new lawsuit*
PTPN I (Eks PTPN II)	Kasus Kebun Sei Semayang Perkara No. 04/Pdt.G/2013/PNBJ dan No. 04/Pdt.G.INT/2013/PN-B	Mustika Akbar sebagai Penggugat dan Perusahaan sebagai Tergugat/ *Mustika Akbar as Plaintiff and the Company as Defendant*	Tanah seluas ± 616,25 ha yang berada di Kelurahan Tunggurono Kebun Sei Semayang/ *Land covering an area of ± 616.25 hectares located in Tunggurono Kebun Sei Semayang Village*	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, PTPN I (Eks PTPN II) telah mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri (PN)/ *As of the reporting date, PTPN I (Ex PTPN II) has filed a new lawsuit at the District Court*
PTPN I (Eks PTPN II)	Kasus Kebun Tanjung Garbus (Afdeling Penara). No. 80/Pdt.G/ 2017/PN-Lbp. tgl. 03 Mei 2017	PTPN I (Eks PTPN II) sebagai Penggugat dan Rokani dkk sebagai Tergugat/ *PTPN I (Ex PTPN II) as Plaintiff and Mr. Rokani et al as Defendants*	Tanah seluas ± 474 Ha, Tanaman Kelapa Sawit dan Bangunan Perusahaan dengan nilai Rp22.879.472.798.-/ *Land covering an area of ± 474 Ha. Palm Oil Plants and Company Buildings with value of Rp. 22,879,472,798.*	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, PTPN I (Eks PTPN II) sedang mengajukan peninjauan kembali yang kedua di tingkat MA/ *As of the reporting date, PTPN I (Ex PTPN II) is currently submitting a second review at the Supreme Court level*
PTPN I (Eks PTPN VIII)	Kasus wanprestasi atas Perjanjian Pembangunan Kelapa Sawit (PKS II) Cikasungka No. SP/IV.3/1172/XII/2009 Perkara No. 224/PDT.G/2017/PN.BDG	PTPN I (Eks PTPN VIII) dikuasakan kepada JPN Jamdatun dan PT Sinar Galuh Pratama sebagai tergugat/ *PTPN I (Ex PTPN VIII) is authorized to JPN Jamdatun and PT Sinar Galuh Pratama as a Defendant*	*Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS II) Cikasungka dengan nilai yang disengketakan sebesar Rp27.804.905.070/ Development of Cikasungka Palm Oil Factory (PKS II). Cikasungka with a disputed value of Rp27,804,905,070.*	Tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas kasus tersebut/ *Defendant was appeal to the Supreme Court through Class IA Bandung court. As of the issuance date of the consolidated financial statements, no decision has been made on this case.*

40. TUNTUTAN DAN PERKARA HUKUM SIGNIFIKAN (lanjutan)

40. SIGNIFICANT CLAIMS AND LITIGATIONS (continued)

Entitas/ *Entity*	Kasus/ *Case*	Para Pihak/ *The Parties*	Objek/ *Object*	Status/ *Status*
PTPN I (Eks PTPN VII)	Sengketa Lahan dengan PT Bumi Madu Mandiri, 05/Pdt.G/2019/PN.Bbu dan No. 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu	PTPN I (Eks PTPN VII) dan PTPN IV (Eks PTPN III) sebagai Penggugat dan PT Bumi Madu Mandiri sebagai Tergugat/ *PTPN I (Ex PTPN VII) and PTPN IV (Ex PTPN III) as Plaintiffs and PT Bumi Madu Mandiri as Defendants.*	Lahan seluas 4,650 Ha/ *Land area of 4.650 Ha*	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, perkara masih dalam proses pengajuan Kasasi/ *As of the reporting date, the case is still in the process of filing an cassation*
PTPN I (Eks PTPN XIV)	Perkara Tata Usaha Negara No. 24/G/2021/PTU N.Mks tanggal 16 September 2021	PT Sinar Indonesia Property sebagai Penggugat dengan menggugat Kanwil BPN Sulawesi Selatan sebagai Tergugat 1, Kantor BPN Gowa sebagai tergugat 2 dan PTPN I sebagai Tergugat 2 Intervensi/ *PT Sinar Indonesia Property, as the Plaintiff, is suing the Regional Office of the National Land Agency of South Sulawesi as Defendant 1, the Land Agency Office of Gowa as Defendant 2, and PTPN I as Defendant 2 Intervention*	Tanah seluas ± 313,17 Ha, yang merupakan tanah yang dikuasai PTPN I (eks Pabrik Kertas Gowa). milik PTPN I (Eks PTPN XIV)/ *An area of ± 313.17 hectares, which is land controlled by PTPN I (formerly the Gowa Paper Factory). Owned by PTPN I (Ex PTPN XIV)*	Berdasarkan putusan No. 212 K/TUN 2022 tanggal 6 April 2022, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Perusahaan yang mengakibatkan PT Sinar Indonesia Property mengajukan peninjauan kembali pada tanggal 10 Agustus 2022. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, belum ada putusan terkait perkara hukum di atas/ *Based on Decision No. 212 K/TUN 2022 dated April 6, 2022, the Supreme Court granted the Company's cassation request, leading PT Sinar Indonesia Property to file for a judicial review on August 10, 2022. As of the consolidation of financial reports completion date, there hasn't been any ruling regarding the legal case above.*
PTPN IV	Sengketa Tanah Kebun Mandailing Natal No. 114/Pdt.G/2022/PN-Mdl	PTPN IV sebagai tergugat dan H. Khairunedi Lubis sebagai penggugat / *PTPN IV. as the defendant and H. Khairunedi Lubis as the plaintiff*	Tanah 66 Ha milik PTPN IV Kebun Mandailing Natal / *Land 66 Ha owned by PTPN IV Mandailing Natal Estate*	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini. areal dikuasi PTPN IV dan proses pengajuan kasasi dari H. Khairunedi Lubis dan kawan-kawan masih berlangsung/ *As of the issuance date of these consolidated financial statements. the area still controlled by PTPN IV. and the cassation process filed by H. Khairunedi Lubis is still ongoing*
PTPN IV	Sengketa Tanah Kebun Dolok Ilir No. 115 K/Pdt/2022	PTPN IV sebagai tergugat dan Abdul Kadir Damanik dan kawan-kawan sebagai penggugat/ *PTPN IV as the defendant and Abdul Kadir Damanik and friends as the plaintiff*	Tanah 121 ha milik PTPN IV Kebun Dolok Ilir / *Land 121 ha owned by PTPN IV Dolok Estate*	Pada tanggal 13 Juni 2022, berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 115 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Abdul Kadir Damanik dan kawan-kawan / *On June 13, 2022, based on the decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 115 K/Pdt/2022, the Supreme Court rejected the cassation request from Abdul Kadir Damanik and friends.*

40. TUNTUTAN DAN PERKARA HUKUM SIGNIFIKAN (lanjutan) / *40. SIGNIFICANT CLAIMS AND LITIGATIONS (continued)*

Entitas/ Entity	Kasus/ Case	Para Pihak/ The Parties	Objek/ Object	Status/ Status
PTPN IV (Eks PTPN VIII)	Pemerintah daerah Siak telah melakukan wanprestasi kepada Perusahaan/	Pemerintah Daerah Siak sebagai tergugat dan PTPN IV sebagai penggugat/ *Local Government Siak as the defendant and PTPN IV as the plaintiff*	Uang muka kerjasama antara PTPN IV dengan Pemerintah daerah Siak untuk pembangunan kebun masyarakat sebesar Rp33.200.506.674/ *Advance payment between PTPN IV and the Siak local government for the development of community gardens amounts to Rp33,200,506,674*	Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Putusan No. 643/PK/PDT/2017 Putusan tersebut menerima dan mengabulkan gugatan PTPN IV dan menyatakan Pemerintah Siak telah melakukan wanprestasi Berdasarkan Perjanjian No. 5/HKM/BA/10/V/2020, piutang sebesar Rp33.200.506.674 akan dibayarkan Pemerintah Daerah Siak secara bertahap selama 8 tahun anggaran dimulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2028. Pada tahun 2022, Pemda Siak telah membayar sebesar Rp3.885.786.664 (2021: Rp6.000.000.000). Selanjutnya, pada tahun 2022 sampai 2028 Pemda Siak akan membayar sebesar Rp3.885.786.664 pada setiap tahun anggaran/ *The Supreme Court of the Republic of Indonesia issued decision No. 643/PK/PDT/2017. The decision accepted and granted PTPN IV's lawsuit and stated that the Government of Siak had breached. Based on Agreement No. 5/HKM/BA/10/V/2020, receivable amounting to Rp33,200,506,674 will be paid by the Local Government Siak in installment over 8 fiscal years starting from 2021 to 2028. In 2022, the Local Government Siak paid Rp3,885,786,664 (2021: Rp6,000,000,000). Furthermore, in 2022 to 2028 the Local Government Siak will pay Rp3,885,786,664 in each fiscal year.*
PTPN IV	Gugatan perdata dari Koperasi Sawit Makmur ("KOPSA M") perkara No. 99/PDT.G/2019/PN .BKN/	KOPSA M sebagai penggugat dan PTPN IV sebagai tergugat/ *KOPSA M as plaintiff and PTPN IV as defendant*	PTPN IV merupakan tergugat kerugian materiil KOPSA M sebesar Rp129.980.911.500 dikarenakan ketidaksepakatan dalam pembangunan kebun pada lahan seluas 1.650 ha, yang terletak di Provinsi Riau/ *PTPN IV is a defendant to a lawsuit regarding material loss amounted to Rp129,980,911,500 due to disagreement in development estate on an area of 1,650 ha, which located at Riau Province.*	KOPSA M mengajukan pencabutan permohonan Kasasi melalui Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 3 Juni 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan ini, PTPN IV belum menerima tindak lanjut permohonan tersebut dari Mahkamah Agung/ *KOPSA M filed the revocation of the Cassation application through the Bangkinang District Court on June 3, 2021. As of the completion date of this report, PTPN IV has not yet received a follow-up on the request from the Supreme Court.*
PTPN IV (Eks PTPN XIII)	Sengekta Tanah Kebun Gunung Emas 18/Pdt.G/2021/PN jo. 2/PDT/2022/PT PTK jo. 2135 K/Pdt/2022	PTPN IV (Eks PTPN XIII) sebagai penggugat dan Ilu Dkk, BPN Kab. Sanggau sebagai tergugat/ *PTPN IV (Ex PTPN XIII) as the defendant and Ilu Dkk, BPN Kab. Sanggau as the plaintiff*	Tanah 14,23 Ha milik PTPN IV (Eks PTPN XIII) Afdeling II Kebun Gunung Emas / *Land owned by PTPN IV (Ex PTPN XIII) Afdeling II Gunung Emas Estate*	PTPN IV (Eks PTPN XIII) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, atas Putusan MA RI Nomor 2135K/PDT/2022 tanggal 28 Juli 2022 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Sanggau dengan sesuai Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali nomor : 2/Akta Pdt.PK/2023/PN.Sag/ *PTPN IV (Ex PTPN XIII) has filed a Request for Judicial Review, against the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 2135K/PDT/2022 dated July 28, 2022, to the Supreme Court of the Republic of Indonesia through the Sanggau District Court in accordance with the Receipt of the Review Memorandum number: 2/Akta Pdt.PK/2023/PN.Sag.*

40. TUNTUTAN DAN PERKARA HUKUM SIGNIFIKAN (lanjutan) / *40. SIGNIFICANT CLAIMS AND LITIGATIONS (continued)*

Entitas/ Entity	Kasus/ Case	Para Pihak/ The Parties	Objek/ Object	Status/ Status
PTPN IV (Eks PTPN XIII)	Sengketa Tanah Kebun Pandawa No: 1/Pdt.G/2O19/PN.Tgt jo. 101/PDT/2019/PT SMR Jo. 1404/K/PDT/2020 Jo. 264 PK/PDT/2022 /	PTPN IV (Eks PTPN XIII) sebagai penggugat dan Yordan Redan dan Masyarakat Dusun Daet sebagai tergugat/ *PTPN IV (Ex PTPN XIII) as the defendant and Yordan Redan and Dusun Daet Community as the plaintiff*	Tanah 165,03 Ha milik PTPN IV (Eks PTPN XIII) Kebun Pandawa / *Land owned by PTPN IV (Ex PTPN XIII) Kebun Pandawa Estate*	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, PTPN IV (Eks PTPN XIII) masih melakukan upaya mediasi. / *As of the issuance date of these consolidated financial statements, the mediation process is still ongoing.*
PTPN IV	Kasus Kebun Danau Salak No. 15/G/2021/PTUN.BJM Jo. 127/B/2022/PT.TUN.JKT	H. Zulwahid dan H. Abdul Hakim selaku Para Penggugat, BPN Kab. Banjar selaku Tergugat, PTPN IV dan PT Bank Mandiri selaku Para Tergugat Intervensi / *H. Zulwahid and H. Abdul Hakim as the Plaintiffs, BPN Kab. Banjar as the Defendant, PTPN IV and PT Bank Mandiri as the Intervening Defendants*.	Klaim kepemilikan lahan seluas 134 Ha / *Claim of ownership of land measuring 134 hectares*	H. Zulwahid dan H. Abdul Hakim telah mengajukan Permohonan PK dan PTPN IV pada tanggal 27 Maret 2023 telah menyerahkan kontra memori PK / *H. Zulwahid and H. Abdul Hakim have filed a Judicial Review Petition, and PTPN IV submitted a counter-memorandum on March 27, 2023*
PT KPBN	Gugatan perdata ke PT Gading Cempaka Graha terkait uang muka pembelian CPO	PT Gading Cempaka Graha sebagai tergugat dan PT KPBN sebagai penggugat/ *PT Gading Cempaka Graha as defendant and PT KPBN as plaintiff.*	PT KPBN melakukan gugatan perdata kepada PT Gading Cempaka Graha (GCG) atas kegagalan menyerahkan CPO sesuai dengan kontrak pembelian No. 001- SPJB/CPO/GCG-KPBN/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp33,7 milyar, belum termasuk Rp5 milyar terkait chargeable cost of fund/ *PT KPBN filed a civil lawsuit against PT Gading Cempaka Graha (GCG) for failure to deliver the CPO in accordance with purchase contract No. 001-SPJB/CPO/GCG- KPBN/I/2020 dated January 17, 2020 amounting to Rp33.7 billion, excluded Rp5 billion related to chargeable cost of fund*	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini laporan keuangan, PT GCG belum melakukan pengembalian uang muka pembelian senilai Rp33,7 milyar/ *As of the reporting date of the financial statements, PT GCG still not yet refunded the purchase advance amounting to Rp33.7 billion.*
PT KPBN	Gugatan perdata ke PT Agro Tani Nusantara terkait uang muka pembelian gula	PT Agro Tani Nusantara sebagai tergugat dan PT KPBN sebagai penggugat/ *PT Agro Tani Nusantara as defendant and PT KPBN as plaintiff*	PT KPBN melakukan gugatan perdata kepada PT Agro Tani Nusantara (ATN) atas kegagalan menyerahkan gula yang tertuang pada beberapa kontrak pembelian dengan total senilai Rp54,2 milyar/ *PT KPBN filed a civil lawsuit against PT Agro Tani Nusantara (ATN) for failure to deliver the sugar as stated in several purchase contracts with total amounting to Rp54.2 billion*	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini laporan keuangan, sisa uang muka pembelian yang belum dikembalikan senilai Rp44,2 milyar/ *As of the reporting date of the financial statements, the remaining outstanding purchase advance payment is Rp44.2 billion*

40. TUNTUTAN DAN PERKARA HUKUM SIGNIFIKAN (lanjutan)

40. SIGNIFICANT CLAIMS AND LITIGATIONS (continued)

Entitas/ *Entity*	Kasus/ *Case*	Para Pihak/ *The Parties*	Objek/ *Object*	Status/ *Status*
PT KPBN	Gugatan perdata ke PT Sakti Mait Jaya Langit terkait uang muka pembelian CPO	PT Sakti Mait Jaya Langit sebagai tergugat dan PT KPBN sebagai penggugat/ *PT Sakti Mait Jaya Langit as defendant and PT KPBN as plaintiff*	PT KPBN melakukan gugatan perdata kepada PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) atas kegagalan menyerahkan CPO yang tertuang pada beberapa kontrak pembelian pada periode 12 Juli 2019 sampai dengan 9 Desember 2019 senilai Rp28,4 milyar dari total transaksi senilai Rp107,2 milyar/ *PT KPBN filed a civil lawsuit against PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) for failure to deliver the CPO as stated in several purchase contracts in the period July 12, 2019 to December 9, 2019 amounting to Rp28.4 billion out of total transactions amounting to Rp107.2 billion*	Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan PT SMJL dalam kondisi PKPU dengan surat putusan PKPU No. 51/Pdt.Sus PKPU/2021/PN tanggal 11 Oktober 2021, dan sudah diputus pailit juga oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Mei 2023. Total tagihan yang diakui oleh tim kurator menjadi senilai Rp21,9 milyar. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini keuangan, sisa uang muka pembelian yang masih harus dikembalikan senilai Rp17 milyar/ *The Surabaya District Court determined PT SMJL to be in PKPU condition with PKPU decision letter No. 51/Pdt.Sus PKPU/2021/PN dated October 11, 2021, and was also declared bankrupt by the Surabaya District Court on May 15, 2023. The total claims recognized by the curator team were worth Rp21.9 billion. As of the reporting date of financial statements, the remaining refund of purchase advance amounting to Rp17 billion.*
PT KPBN	Gugatan perdata ke PT Bitara Agung Mandiri terkait piutang usaha atas penjualan CPO	PT Bitara Agung Mandiri sebagai tergugat dan PT KPBN sebagai penggugat/ *PT Bitara Agung Mandiri as defendant and PT KPBN as plaintiff*	PT KPBN melakukan gugatan perdata kepada PT Bitara Agung Mandiri (BAM) atas kegagalan melakukan pembayaran piutang usaha kepada PT KPBN atas kontrak penjualan senilai Rp30,3 milyar/ *PT KPBN filed a civil lawsuit against PT Bitara Agung Mandiri (BAM) for failure to payment of trade receivables to the PT KPBN on sales contract with total amounting to Rp30.3 billion.*	Berdasarkan surat Kepolisian Republik Indonesia No. B/1617/XI/RES.1.11/2022/Ditreskr imum tanggal 8 November 2022 telah menetapkan Bathera Edi S. Sibuea, direktur BAM, sebagai tersangka penipuan dan atau penggelapan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini laporan keuangan, piutang usaha tersebut sudah dicadangkan oleh PT KPBN/ *Based on the Republic of Indonesia Police letter No. B/1617/XI/RES.1.11/2022/Ditreskr imum, dated November 8, 2022, Bathera Edi S Sibuea, as BAM's director was a suspect in fraud and/or ambezzlement. As of the reporting date of the financial statements, the trade receivables have been impaired by PT KPBN.*

41. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Metode dan asumsi praktis berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap aset maupun liabilitas Grup:

a) Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan kurang lebih sebesar nilai wajarnya. Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, piutang usaha dan lain-lain, kas yang dibatasi penggunaannya, utang usaha dan lain-lain dan biaya masih harus dibayar, mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek. Nilai tercatat dari liabilitas jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.

b) Setelah pengakuan awal. piutang lain-lain jangka panjang - plasma yang tidak dikenakan bunga disajikan pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode SBE dan tingkat diskonto mengacu kepada suku bunga pijaman pada saat ini bagi pinjaman yang serupa. Tingkat diskonto tahunan yang digunakan adalah 9,15% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

c) Investasi saham biasa yang tidak memiliki kuotasi pasar dengan kepemilikan saham dibawah 20%. dicatat sebesar nilai wajar.

d) Nilai wajar atas produk agikultur kelapa sawit, karet dan teh ditentukan pada Level 2 berdasarkan harga pasar terkait yang diterapkan terhadap estimasi volume produk, dan nilai wajar aset biologis tebu dan kayu tegakan ditentukan pada Level 3 menggunakan metode pendapatan.

e) Nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif. yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah yang dinilai.

f) Nilai wajar tanah dan property investasi ditentukan dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif. yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat. lokasi dan kondisi dari tanah yang dinilai.

41. FAIR VALUE MEASUREMENT

The following methods and assumptions are practical to be used to estimate the fair value of each aset and liabilities of the Group:

a) The carrying values of financial instruments presented in the statements of financial position approximate their fair values. Management believes that the carrying values of cash and cash equivalents, trade and other receivables, restricted cash, trade and other payables and accrued expenses approximate their fair values due to their short-term maturity. The carrying amounts of long-term liabilites with floating interest rates approximate their fair values as they are reasessed frequently.

b) Subsequent to initial recognition. other long-term receivables - plasma which are non-interest bearing. were presented at amortized cost using EIR and the discount rates used is referring to current market lending rates for simillar types of lending. The applied annual discount rates is 9.75% for the year ended December 31, 2023.

c) Ordinary shares investment that do not have market quotation below 20%. are recorded at fair value.

d) The fair values of the oil palm, rubber and tea agricultural produce are determined at Level 2 based on the applicable market price applied to the estimated volume of the produce, and the fair value of cane and standing timber determined at Level 3 based on income approach.

e) The fair value of land was determined by using market comparable method. This means that valuations performed by the valuer are based on active market prices. significantly adjusted for difference in the nature, location or condition of the specific land.

f) The fair value of land and investment property was determined by using market comparable method. This means that valuations performed by the valuer are based on active market prices. significantly adjusted for difference in the nature. location or condition of the specific land.

42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup menghadapi risiko keuangan yang timbul dari kegiatan operasional dan penggunaan instrumen keuangan. Risiko keuangan utama meliputi risiko suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan dan prosedur untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan Grup akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar.

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul dari utang jangka panjang. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Grup. Tidak terdapat pinjaman Grup yang dikenakan suku bunga tetap.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika tingkat suku bunga Grup sebesar 1% lebih rendah/tinggi, dengan semua variabel lain konstan, laba sebelum manfaat pajak penghasilan untuk Periode yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp159.286.998.278 lebih tinggi/rendah.

Risiko Mata Uang

Risiko mata uang merupakan risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang. Risiko Grup atas fluktuasi nilai tukar mata uang terutama timbul dari penempatan kas dan setara kas dalam mata uang asing.

Saat ini, Grup tidak memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk mengelola risiko mata uang.

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to financial risks arising from its operations and the use of financial instruments. The key financial risks include interest rate risk, market risk (including foreign currency risk and commodity price risk), credit risk and liquidity risk. The Board of Director reviews and agrees policies and procedures for the management of these risks, which are described in more detail as follows:

Interest Rate Risks

Interest rate risk is the risks that the fair value or future cash flows of the Group's financial instruments will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Groups's exposure to interest rate risk mainly arises from bank loan. Loan with various interest rate inflict interest rate risk on the fair value to the Group. There is no loan at fixed rates.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures.

Sensitivity analysis for rate risk

As of December 31, 2023, if the interest rate of the Group amounted to 1% lower/higher, with all other variables constant, the income before income tax benefit for the period then ended amounted to Rp159,286,998,278 higher/lower.

Currency Risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in currency exchange rates. Risk of the Group against fluctuations in currency values arises mainly from placement of cash and cash equivalent in foreign currency.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy to manage currency risk.

42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Mata Uang (lanjutan)

Analisis sensitivitas untuk risiko nilai mata uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah/menguat sebanyak 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sebesar Rp12.757.885.943 lebih rendah/tinggi, terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi kas dan setara kas, piutang usaha dan uang muka pelanggan dalam Dolar AS, yang secara kolektif dalam posisi aset moneter neto.

Risiko Harga Komoditas

Risiko harga komoditas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi dikarenakan perubahan harga komoditas (selain yang timbul dari risiko tingkat suku bunga atau risiko mata uang asing), apakah perubahan ini disebabkan oleh faktor-faktor khusus untuk instrumen keuangan secara individu atau faktor yang mempengaruhi semua instrumen keuangan yang sama yang diperdagangkan di pasar.

Risiko harga komoditas Grup timbul dari pembelian tandan buah segar dan penjualan penjualan minyak kelapa sawit, minyak inti sawit, inti sawit, produk teh. Harga bahan baku dan barang jadi dapat berfluktuasi secara signifikan tergantung pada situasi pasar dan faktor-faktor lain seperti cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran di pasar dan lingkungan ekonomi global.

Pada saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko harga komoditas.

Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan teh, piutang plasma dan penempatan rekening koran dan deposito pada bank.

Selain dari pengungkapan di bawah ini, Grup tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Currency Risk (continued)

Sensitivity analysis for foreign currency risk

As of December 31, 2023, if the Rupiah exchange rate against the US Dollar weakened/strengthened by 1% with all variables constant, profit before tax expense for the period then ended amounted to Rp12,757,885,943 lower/higher, mainly as a result of cash translation losses/gains and cash equivalents, trade receivables and customer advances in US Dollars, which are collectively in a position of net monetary assets.

Commodity Price Risk

Commodity price risk is the risk that fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in commodity prices (other than those arising from interest rate risk or foreign currency risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument or factors affecting all similar financial instruments traded in the market.

The Group's exposure to commodity price risk arises from its purchase of fresh fruit bunches and sales of palm oil, palm kernel oil, palm kernel, tea products. Prices of raw material and end products may fluctuate significantly depending on the market situation and factors such as weather, government policy, level of demand and supply in the market and the global economic environment.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for commodity price exposures.

Credit Risk

The Group has credit risk arising from the credits granted to the customers of tea, plasma receivable and placement of current accounts and deposits in the banks.

Other than as disclosed below, the Group has no concentration of credit risk.

42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Kas dan Setara Kas

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Grup. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh dewan direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Piutang Usaha

Terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Grup bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Untuk penjualan ekspor, Grup mensyaratkan pembayaran saat penyerahan dokumen penjualan. Grup memiliki kebijakan yang membatasi jumlah kredit untuk tiap-tiap pelanggan dan saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih.

Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat pembayaran. Grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Grup akan menempuh jalur hukum sesuai dengan evaluasi oleh Grup, penyisihan spesifik dapat dibuat jika utang dianggap tidak tertagih. Untuk menekan risiko kredit, Grup akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang terlambat dan/atau gagal bayar.

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit Risk (continued)

Cash and Cash Equivalents

Credit risk arising from placements of current accounts and deposits is managed in accordance with the Group's policy. Investments of surplus funds are limited for each bank and reviewed annually by the board of directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

Trade Receivables

The Group has policies in place to ensure that sales of products are made only to creditworthy customers with proven track records or good credit history. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. For export sales, the Group requires cash against the presentation of documents of tittle. The Group has policies that limit the amount of credit exposure to any particular customer and receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the Group's exposure to bad debts.

When a customer fails to make payment within the granted credit terms. the Group will contact the customer to act on overdue receivable. If the customer does not settle the overdue receivable within a reasonable time. The Group will proceed with legal actions. Depending on the Group's assessment. specific provisions may be made if the debt is deemed uncollectible. To mitigate its credit risk, the Group will cease the supply of all products to customers in the event of late payment and/or default.

42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Piutang Plasma

Piutang plasma merupakan uang muka kepada petani plasma atas dana talangan untuk angsuran pinjaman petani plasma ke bank serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan plasma yang untuk sementara dibiayai sendiri oleh Perusahaan. termasuk pinjaman pupuk serta sarana produksi pertanian lainnya kepada petani. Biaya-biaya ini akan ditagihkan kembali kepada petani plasma.

Grup melalui pola kemitraan juga memberikan bantuan teknis kepada petani plasma untuk mempertahankan produktivitas perkebunan plasma yang merupakan bagian dari strategi Grup untuk mempererat hubungan dengan petani plasma yang diharapkan akan dapat memperlancar pelunasan piutang plasma.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan oleh karena keterbatasan dana.

Grup mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan bank.

Grup secara teratur mengevaluasi proyeksi arus kas proyeksi dan aktual dan terus menerus memantau tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel dibawah ini merupakan daftar jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskontokan:

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit Risk (continued)

Plasma Receivables

Plasma receivables represent advance to plasma farmer on the bailout of farmer's installment loan from bank and costs incurred for plasma plantation development which include costs for plasma plantations temporarily self funded by the Company. including fertilizer used and other agriculture production facility to the farmers. These costs will be charged back to plasma farmers.

The Group through partnership scheme also provides technical assistance to the plasma farmers to maintain the productivity of plasma plantations as part of the Group's strategy to strengthen relationship with plasma farmers which is expected to improve the repayments of plasma receivables.

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying value of each class of financial assets presented in the consolidated statement of financial position.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group will have difficulty in fulfilling its financial obligation due to limited availibilty of funds.

The Group manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditures and service its maturing debts by maintaining sufficient cash and bank.

The Group regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assesses the maturity date of financial assets and liabilities.

The table below summarizes the maturity profile ofthe Group's financial liabilities. based on contractual undiscounted payments:

42. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

42. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risk (continued)

31 Desember 2023/*December 31, 2023*

	Kurang dari 1 Tahun *Nominal value*	1 - 5 Tahun *Nominal Value*	Di atas 5 Tahun/ *Nominal value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Utang bank jangka pendek	46.464.039.668	-	-	46.464.039.668	*Short-term bank loans*
Utang usaha	7.019.239.949.530	-	-	7.019.239.949.530	*Trade payables*
Utang lain-lain	1.432.371.876.080	-	-	1.432.371.876.080	*Other payables*
Biaya masih harus dibayar	2.262.873.412.734	-	-	2.262.873.412.734	*Accrued expenses*
Utang jangka panjang					*Long term debts*
Pokok	5.432.922.098.805	35.886.807.846.965	-	41.319.729.945.770	*Principal*
Bunga	239.727.115.054	10.260.636.476.911	-	10.500.363.591.965	*Interest*
Total	**16.433.598.491.871**	**46.147.444.323.876**	**-**	**62.581.042.815.747**	***Total***

31 Desember 2022/*December 31, 2022*

	Kurang dari 1 Tahun *Nominal value*	1 - 5 Tahun *Nominal Value*	Di atas 5 Tahun/ *Nominal value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Utang bank jangka pendek	261.567.330.804	-	-	261.567.330.804	*Short-term bank loans*
Utang usaha	5.646.065.720.700	-	-	5.646.065.720.700	*Trade payables*
Utang lain-lain	1.135.339.671.925	-	-	1.135.339.671.925	*Other payables*
Biaya masih harus dibayar	4.643.185.216.039	-	-	4.643.185.216.039	*Accrued expenses*
Utang lain-lain jangka panjang					*Other long term payables*
Pokok	7.616.297.110	350.344.898.355	-	357.961.195.465	*Principal*
Bunga	952.037.139	43.793.112.294	-	44.745.149.433	
Utang jangka panjang					*Long term debts*
Pokok	2.887.594.051.034	38.072.299.233.237	-	40.959.893.284.271	*Principal*
Bunga	360.949.256.379	4.759.037.404.155	-	5.119.986.660.534	*Interest*
Total	**14.943.269.581.130**	**43.225.474.648.041**	**-**	**58.168.744.229.171**	***Total***

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas Perusahaan adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

	1 Januari 2023/ *January 1, 2023*	Arus Kas Masuk/ *Cash In Flows*	Arus Kas Keluar/ *Cash out flows*	Perubahan lainnya/ *Other Changes*	*31 Desember 2023/ December 31, 2023*	
Utang bank jangka pendek dan utang jangka Panjang	43.926.140.189.502	32.606.220.359.518	(39.497.203.350.382)	2.349.336.146.736	39.384.493.345.374	*Short-term bank loan and long term debts*

	1 Januari 2022/ *January 1, 2022*	Arus Kas Masuk/ *Cash In Flows*	Arus Kas Keluar/ *Cash out flows*	Perubahan lainnya/ *Other Changes*	*31 Desember 2022/ December 31, 2022*	
Utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang	45.060.429.707.780	1.547.219.768.660	(5.707.012.644.608)	3.025.503.357.670	43.926.140.189.502	*Short-term bank loan and long term debts*

43. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Informasi tambahan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

43. ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOW

Supplementary information on non-cash activities are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Penambahan aset tetap melalui revaluasi tanah	612.620.651.595	593.213.796.943	*Addition of fixed assets through land revaluation*
Penambahan properti melalui nilai wajar	281.319.816.568	978.074.495.160	*Addition of investment properties through fair value*

44. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi sampai tanggal penyelesaian Laporan Keuangan.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

44. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated until the date of completion of the Financial Statements.

Effective beginning on or after January 1, 2024

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. *Pillar 1 International Financial Accounting Standards,*
2. *Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),*
3. *Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and*
4. *Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities*

44. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan)

Pilar Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Standar ini merupakan adopsi penuh dari *International Financial Reporting Standards (*"IFRS") yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan hakya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif dengan penerapan dini diperkenankan.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

44. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2024 (continued)

Financial Accounting Standards Pillars (continued)

This standard is a full-adoption of International Financial Reporting Standards ("IFRS") which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- *what is meant by a right to defer settlement,*
- *the right to defer must exist at the end of the reporting period,*
- *classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and*
- *only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.*

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024 retrospectively with early adoption permitted.

The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

44. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan)

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan. Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan, namun perlu diungkapkan. Amandemen tersebut diperkirakan tidak mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

44. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2024 (continued)

Amendment of PSAK 73: Lease liability in a Sale and Leaseback

The amendment to PSAK 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Earlier application is permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

Amendment of PSAK 2 and PSAK 60: Supplier Finance Arrangements

The amendments to PSAK 2 and PSAK 60 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendments will be effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Early adoption is permitted, but will need to be disclosed.The amendments are not expected to have a material impact on the Group's financial statements.

45. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota Direksi

Sesuai Keputusan Menteri BUMN nomor SK-67/MBU/03/2024 tanggal 15 Maret 2024, telah ditetapkan:

1) Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi PTPN III (Persero) dengan mengubah jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Direktur Hubungan Kelembagaan menjadi Direktur Manajemen Risiko.
2) Mengalihkan penugasan kepada Sdr. M. Iswahyudi yang semila sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Sdr. M. Arifin Firdaus yang semula sebagai Direktur Kelembagaan menjadi Direktur Manajemen Risiko.
3) Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Surat Keputusan dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 15 Maret 2024.

Perubahan Struktur Organisasi dan Susunan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Sesuai Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) nomor DSDM/SKPTS/64/2024 tanggal 17 April 2024, telah ditetapkan:

1) Menetapkan perubahan struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) pada Divisi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
2) Menetapkan susunan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai berikut.

    a. Direktur Utama
    b. Wakil Direktur Utama
    c. Direktur Keuangan
    d. Direktur SDM dan Umum
    e. Direktur Produksi dan Pengembangan
    f. Direktur Pemasaran
    g. Direktur Manajemen Risiko

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 17 April 2024.

45. EVENTS AFTER REPORTING DATE

Changes to Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors

In accordance with the Decree of the Minister of BUMN number SK-67/MBU/03/2024 dated March 15, 2024, it has been determined:

1) Change *the position nomenclature of members of the Board of Directors of PTPN III (Persero) by altering the position of Finance and Risk Management Director to Finance Director and Institutional Relations Director to Risk Management Director.*
2) Reassigning Mr. M. Iswahyudi, who previously served as Finance and Risk Management Director, to Finance Director, and Mr. M. Arifin Firdaus, who previously served as Institutional Director, to Risk Management Director.
3) Granting authority to the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) with substitution rights to declare decisions made in the form of authentic deeds before a notary or authorized officer.

This decision takes effect on the date of stipulation, namely March 15, 2024.

Changes in the Organizational Structure and Board of Directors Composition of PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

In accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III number DSDM/SKPTS/64/2024 dated April 17, 2024, it has been determined:

1) Establishing changes is the organizational structure of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the Divisions as listed in the appendix, which is an integral part of this Decision.
2) Establishing the composition of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as follows:
    a. President Director
    b. Vice President Director
    c. Director of Finance
    d. Director of HR ad General Affairs
    e. Director of Production and Development
    f. Director of Marketing
    g. Director of Risk Management

This decision takes effect on the date of stipulation, namely April 17, 2024.

Perkebunan Nusantara

BUMN UNTUK INDONESIA

Perkebunan Nusantara

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2023



Kantor Pusat | Head Office:
Gedung Agro Plaza Lt.15,
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1,
Setia Budi, Jakarta Selatan 12950
Telephone : (+62-21) 29183300
Fax : (+62-21) 5203030

Pindai *barcode* ini untuk akses langsung ke *website* kami
Scan this barcode for direct access to our website

Pertumbuhan Transformasional melalui *Integrasi Strategis*

Transformational Growth through Strategic Integration